PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIKKA

2027



RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang memuat

#rkpd

BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana ...

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen tahunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
4. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA–Perangkat Daerah sebelum disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Daerah adalah Kabupaten Sikka.

6. Pemerintah ...

6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
7. Bupati adalah Bupati Sikka.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sikka.
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPERIDA Adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka.
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BAPPERIDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 2

RKPD disusun untuk mewujudkan sinergisitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan Daerah.

Pasal 3

RKPD digunakan sebagai:
a. pedoman perumusan, penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
b. pedoman penyusunan rancangan KUA dan PPAS untuk dibahas sebagai landasan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2027.

BAB II
RKPD

Pasal 4

(1) Sistematika penyusunan RKPD Tahun 2027, terdiri dari:
    a. bab I Pendahuluan;
    b. bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
    c. bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
    d. bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
    e. bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
    f. bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
    g. bab VII Penutup.
(2) Isi dan uraian RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III ...

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Kepala BAPPERIDA melakukan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan RKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tangal 9 Juli 2026

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 9 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,

ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2026 NOMOR ...

LAMPIRAN ...

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Kepala BAPPERIDA melakukan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan RKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 9 Juli 2026

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 9 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,

ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2026 NOMOR ...

LAMPIRAN ...

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Kepala BAPPERIDA melakukan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan RKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
Pada tanggal 9 Juli 2026

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 9 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,

ADRIANUS KIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2026 NOMOR ...

LAMPIRAN ...

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas berkat dan tuntunanNya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2027 dapat disusun dengan baik dengan beberapa tahapan, sejak Penyusunan rancangan awal, musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan musrenbang Kabupaten untuk mendapatkan masukan masukan dan saran untuk pelaksanaan pembangunan Tahun 2027.

RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2027 merupakan tahun perencanaan ke tiga RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dan merupakan kekewajiban konstitusional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2027 selaras dengan RKPD Provinsi NTT dan RKP Nasional merupakan perencanaan berkesinambungan yang terencana dan sistematis dan yang akan dilaksanakan seluruh komponen masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel.

Akhirnya dengan rendah hati dan menaruh rasa hormat kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan kontribusi yang konstruktif dalam proses pelaksanaan Penyusunan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2027 ini.

Maumere, 9 Juli 2026

Bupati Sikka,

JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GRAFIK xi
DAFTAR GAMBAR xiii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-3
1.3 Hubungan Antara Dokumen Perencanaan I-6
1.4 Maksud dan Tujuan I-8
1.5 Sistematika Dokumen RKPD I-8

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH
2.1 Aspek Geografi Dan Demografi II-1
2.1.1 Geografi II-1
2.1.2 Topografi II-4
2.1.3 Klimatologi II-5
2.1.4 Morfologi II-6
2.1.5 Hidrologi II-7
2.1.6 Demografi II-10
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-16
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi II-16
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya II-25
2.3 Aspek Pelayanan Umum II-35
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib II-35
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan II-84
2.3.3 Penunjang Urusan Pemerintahan II-104
2.4 Aspek Daya Saing II-110
2.4.1 Daya Saing Ekonomi Daerah II-110
2.4.2.Daya Saing SDM II-113
2.4.3 Daya Saing Iklim Berinvestasi II-115
2.5 Evaluasi II-117
2.5.1. Evaluasi Pencapaian SPM Tahun 2025 ..... II-117
2.5.2 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2025 ..... II-128
2.6 Permasalahan Daerah II-368
2.6.1. Isu dan Permasalahan Daerah II-368
2.6.2. Permasalahan yang dihadapi perurusan II-368

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
3.1 .Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) III-1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-11
3.2.1 Pendapatan Daerah III-11
3.2.2. Belanja Daerah III-16

3.2.3 Pembiayaan Daerah....III-24
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1 Visi....IV-1
4.2 Misi....IV-2
4.3 Tujuan dan Sasaran....IV-3
4.4 Strategi dan Arah Kebijakan....IV-10
4.4.1 Strategi....IV-10
4.4.2 Arah Kebijakan Pembangunan....IV-15
4.5 Program Prioritas....IV-21
4.5.1. Program Prioritas Nasional....IV-21
4.5.2. Program Prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur....IV-21
4.5.3. Program Prioritas Kabupaten Sikka....IV-22

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
5.1 Rencana Kerja....V-1
5.1.1. Rencana Kerja Prioritas Pertama....V-1
5.1.2. Rencana Kerja Prioritas Kedua....V-68

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
6.1 Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah....VI-1

BAB VII PENUTUP
7.1 Kaidah Pelaksanaan....VII-1
7.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi....VII-2

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keselarasan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Sikka Tahun 2027 .....I-7
Tabel 2.1 Ibu Kota Kecamatan dan Luas Wilayah Per Kecamatan II-1
Tabel 2.2 Kondisi Suhu Udara dan Kelembaban Udara di Kabupaten Sikka II-5
Tabel 2.3 Jumlah Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan di Kabupaten Sikka II-5
Tabel 2.4 Rata-Rata Tekanan Udara dan Kecepatan Angin di Kabupaten Sikka II-5
Tabel 2.5 Curah Hujan Bulan Kecamatan Nita dari Pos Hujan Ledalero, Kabupaten Sikka II-7
Tabel 2.6 Curah Hujan Bulan Kecamatan Paga dari Pos Hujan Paga, Kabupaten Sikka II-7
Tabel 2.7 Curah Hujan Bulan Kecamatan Lela dari Pos Hujan Lela, Kabupaten Sikka II-8
Tabel 2.8 Curah Hujan Bulan Kecamatan Alok Timur dari Pos Hujan Stamet Maumere, Kabupaten Sikka II-8
Tabel 2.9 Curah Hujan Bulan Kecamatan Magepanda dari Pos Hujan Magepanda, Kabupaten Sikka II-9
Tabel 2.10 Curah Hujan Bulan Kecamatan Waigete dari Pos Hujan Waigete, Kabupaten Sikka II-9
Tabel 2.11 Curah Hujan Bulan Kecamatan Bola dari Pos Hujan Bola, Kabupaten Sikka II-9
Tabel 2.12 Curah Hujan Bulan Kecamatan Mego dari Pos Hujan Nangablo, Kabupaten Sikka II-10
Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Kabupaten Sikka Menurut Kecamatan Tahun 2021-2025 .....II-11
Tabel 2.14 Jumlah Penduduk Kabupaten Sikka Menurut Rasio Jenis Kelamin Tahun 2025 .....II-12
Tabel 2.15 Capaian Kinerja Pelayanan Kependudukan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-13
Tabel 2.16 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sikka Tahun 2025 .....II-13
Tabel 2.17 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan di Kabupaten Sikka Tahun 2025 " II-14
Tabel 2.18 Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut Per Kecamatan di Kabupaten Sikka Tahun 2025 .....II-15
Tabel 2.19 Nilai Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-17
Tabel 2.20 Persentase Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-18
Tabel 2.21 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) II-19
Tabel 2.22 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor/Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 .....II-20
Tabel 2.23 Inflasi Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2021-2025 .....II-21
Tabel 2.24 Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya Tahun 2021-2025 .....II-26
Tabel 2.25 Organisasi Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2025 .....II-30

Tabel 2.26 Kinerja Fokus Seni dan Budaya Tahun 2021-2025 .....II-31
Tabel 2.27 Data Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-33
Tabel 2.28 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2021-2025 .....II-34
Tabel 2.29 Data Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Kabupaten Sikka dan Provinsi NTT Tahun 2021 - 2025 .....II-34
Tabel 2.30 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-35
Tabel 2.31 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Sikka Tahun 2021-202 .....II-35
Tabel 2.32 Rasio Penduduk terhadap Sarana Kesehatan dan Paramedis Kabupaten Sikka Tahun 2020-2025 .....II-40
Tabel 2.33 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Tahun 2023 dan Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID) Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-41
Tabel 2.34 Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Sikka Tahun 2022–2025 .....II-42
Tabel 2.35 Kualitas Jembatan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sikka Tahun 2021–2025 .....II-43
Tabel 2.36 Akses Masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Sikka Tahun 2022–2025 .....II-44
Tabel 2.37 Panjang Drainase dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sikka Tahun 2022–2025 .....II-45
Tabel 2.38 Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil di Kabupaten Sikka Tahun 2022–2025 .....II-45
Tabel 2.39 Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan di Kabupaten Sikka Tahun 2021–2025 .....II-46
Tabel 2.40 Jumlah Keluarga dengan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sikka II-47
Tabel 2.41 Penyediaan PSU Permukiman di Kabupaten Sikka Tahun 2022–2025 .II-48
Tabel 2.42 Angka Kriminalitas Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-48
Tabel 2.43 Indikator Kinerja Satpol PP Kab. Sikka Tahun 2021-2025 .....II-49
Tabel 2.44 Kinerja Pelayanan Umum Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-49
Tabel 2.45 Indikator Pelayanan Urusan Sosial Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-50
Tabel 2.46 Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-52
Tabel 2.47 Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-53
Tabel 2.48 Kebutuhan, Produksi dan Ketersediaan Pangan Per Kapita Per Tahun Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-58
Tabel 2.49 Skor PPH Ketersediaan Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2021-2025 .....II-58
Tabel 2.50 Kinerja Pertanahan di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-59
Tabel 2.51 Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-60
Tabel 2.52 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-61
Tabel 2.53 Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-62

Tabel 2.54 Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-63
Tabel 2.55 Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak Kegiatan, Rencana, dan/atau Program (KRP) di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-63
Tabel 2.56 Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-65
Tabel 2.57 Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2021-2025 .....II-68
Tabel 2.58 Capaian Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-69
Tabel 2.59 Data Fasilitasi Kerja Sama Desa II-70
Tabel 2.60 Indeks Desa Membangun Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-70
Tabel 2.61 Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-71
Tabel 2.62 Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-72
Tabel 2.63 Kualitas Layanan Transportasi Darat dan Laut di Kabupaten Sikka Tahun 2021–2025 .....II-73
Tabel 2.64 Capaian Kinerja Bidang Perhubungan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-74
Tabel 2.65 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Semua Angkutan Umum) II-74
Tabel 2.66 Nilai SPBE Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 .....II-75
Tabel 2.67 Capaian Kinerja Telekomunikasi Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-75
Tabel 2.68 Kelompok Koperasi di Kabupaten Sikka II-76
Tabel 2.69 Koperasi di Kabupaten Sikka Berdasarkan Status II-77
Tabel 2.70 Jenis UMKM Berdasarkan Jenis Usaha di Kabupaten Sikka Tahun 2024 .....II-78
Tabel 2.71 Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-80
Tabel 2.72 Nilai Investasi Berdasar Sektor Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ....II-81
Tabel 2.73 Organisasi Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 II-82
Tabel 2.74 Kinerja Fokus Seni dan Budaya Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ....II-83
Tabel 2.75 Jumlah Perpustakaan, Pengunjung dan Koleksi Buku Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-84
Tabel 2.76 Kinerja Pengelolaan Arsip Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-85
Tabel 2.77 Kinerja Pariwisata Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-86
Tabel 2.78 Jumlah Hotel Tahun 2021-2025 .....II-87
Tabel 2.79 Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-87
Tabel 2.80 Kinerja Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-88
Tabel 2.81 Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-89
Tabel 2.82 Luas Panen Tanaman Pangan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-89
Tabel 2.83 Produksi Tanaman Sayuran Buah Semusim Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-90
Tabel 2.84 Produksi Buah dan Sayuran Tahunan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-90
Tabel 2.85 Produksi Tanaman Biofarmaka Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ....II-91
Tabel 2.86 Produksi Perkebunan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-92
Tabel 2.87 Data Populasi Ternak Besar Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-93

Tabel 2.88 Data Populasi Ternak Kecil Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-93
Tabel 2.89 Data Populasi Ternak Unggas Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-93
Tabel 2.90 Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-94
Tabel 2.91 Data Populasi Hewan Penular Rabies Anjing dan Realisasi Vaksinasi Hewan Penular Rabies Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-95
Tabel 2.92 Nilai Produksi dan Komoditas Utama Perikanan Tangkap di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 (Rupiah) II-96
Tabel 2.93 Armada Perikanan di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-97
Tabel 2.94 Jenis Alat Tangkap Perikanan di Kabupaten Sikka II-98
Tabel 2.95 Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-99
Tabel 2.96 Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-100
Tabel 2.97 Jumlah Pasar di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-101
Tabel 2.98 Kontribusi Sektor dan Pertumbuhan Industri Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-102
Tabel 2.99 Kinerja Industri Pengolahan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-102
Tabel 2.100 Kinerja Transmigrasi Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-104
Tabel 2.101 Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-104
Tabel 2.102 Kinerja Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-105
Tabel 2.103 Kinerja Keuangan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-106
Tabel 2.104 Kinerja Pengawasan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-107
Tabel 2.105 Kinerja Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-108
Tabel 2.106 Kinerja Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-109
Tabel 2.107 Kinerja Sekretariat Dewan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-110
Tabel 2.108 Angka Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-111
Tabel 2.109 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Sikka Tahun 2017-2021 .....II-113
Tabel 2.110 Struktur Umur dan Umur Median Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-114
Tabel 2.111 Rasio Ketergantungan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-115
Tabel 2.112 Rata-rata Lama Perizinan di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-115
Tabel 2.113 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-116
Tabel 2.114 Evaluasi Pencapaian SPM Tahun 2025 .....II-117
Tabel 2.115 Tingkat Target dan Capaian Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Dalam RKPD Tahun 2025 .....II-129
Tabel 2.116 Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program.....II-131
Tabel 2.117 Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program II-132
Tabel 2.118 Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program II-133
Tabel 2.119 Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program II-134
Tabel 2.120 Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program II-135
Tabel 2.121 Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program II-136
Tabel 2.122 Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program II-138
Tabel 2.123 Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program II-139

Tabel 2.124 Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program II-140
Tabel 2.125 Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program II-142
Tabel 2.126 Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program II-142
Tabel 2.127 Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program II-143
Tabel 2.128 Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program II-145
Tabel 2.129 Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program II-146
Tabel 2.130 Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten dalam RKPD Tahun 2025.....II-148
Tabel 2.131 Evaluasi terhadap Hasil RKPD Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025.....II-150
Tabel 3.1. Nilai Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka (miliar rupiah) Tahun 2021-2025.....III-2
Tabel 3.2. Persentase Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga BerlakuKabupaten Sikka Tahun 2021-2025.....III-3
Tabel 3.3. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2021-2025 (Juta Rupiah).....III-4
Tabel 3.4. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor/Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka (persen) Tahun 2021-2025.....III-5
Tabel 3.5. Inflasi Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2021-2025 .....III-6
Tabel 3.6. Arah Kebijakan Nasional, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dan Kabupaten Sikka Tahun 2027 .....III-11
Tabel 3.7. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025.....III-13
Tabel 3.8. Dana Perimbangan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025.....III-14
Tabel 3.9. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2021-2025 .....III-14
Tabel 3.10. Proyeksi Pendapatan Kabupaten Sikka Tahun 2027 .....III-16
Tabel 3.11. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025.....III-21
Tabel 3.12. Proyeksi Belanja Kabupaten Sikka Tahun 2027 .....III-23
Tabel 3.13. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025.....III-24
Tabel 3.14. Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Sikka Tahun 2027 .....III-25
Tabel 4.1 Indikator Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Sikka Tahun 2027 .....IV-9
Tabel 4.2 Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sikka Tahun 2027 .....IV-9
Tabel 4.3. Strategi Pembangunan Misi 1 .....IV-10
Tabel 4.4. Strategi Pembangunan Misi 2 .....IV-12
Tabel 4.5. Strategi Pembangunan Misi 3 .....IV-13
Tabel 4.6. Strategi Pembangunan Misi 4 .....IV-14
Tabel 4.7. Strategi Pembangunan Misi 5 .....IV-14
Tabel 4.8 Uraian Arah Kebijakan Nasional.....IV-15
Tabel 4.9 Uraian Arah Kebijakan Provinsi NTT.....IV-17
Tabel 4.10 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2027.....IV-19
Tabel 5.1 Dukungan Program dan Kegiatan untuk Prioritas Nasional V-2
Tabel 5.2. Program dan Kegiatan Penanganan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2027.....V-42
Tabel 5.3 Rekapitulasi Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2027.....V-68
Tabel 5.4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka Tahun 2027 .....V-72

Tabel 5.5. Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sikka untuk Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2027 ..... V-499
Tabel 5.4 Usulan Hasil Musrenbangcam untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2027 ..... V-546
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2027 .... VI-1

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ....II-11
Grafik 2.2. Piramida Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2025 .....II-14
Grafik 2.3. Proyeksi Komposisi Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif
Grafik 2.4. Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 .....II-16
Grafik 2.5. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sikka
Tahun 2021-2025 .....II-17
Grafik 2.6. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka
Tahun 2021-2025 .....II-17
Grafik 2.7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025.....II-20
Grafik 2.8. Inflasi Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-21
Grafik 2.9. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sikka Tahun 2021- 2025 ....II-22
Grafik 2.10. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-22
Grafik 2.11. Garis Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-23
Grafik 2.12. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sikka
Tahun 2021-2025 .....II-24
Grafik 2.13. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sikka
Tahun 2021-2025 .....II-24
Grafik 2.14. Indeks Gini Kabupaten Sikka, Provinsi NTT dan Nasional
Tahun 2020-2024 .....II-25
Grafik 2.15. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021-2025 .....II-26
Grafik 2.16. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sikka, Ende
dan Flores Timur 2025 .....II-26
Grafik 2.17. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2020-2025 ..II-27
Grafik 2.18. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2020-2025 .....II-28
Grafik 2.19. Usia Harapan Hidup Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional ....
Tahun 2020-2025 .....II-31
Grafik 2.20. Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2025 .....II-32
Grafik 2.21. Indeks Distribusi Guru SD/Mi Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ...II-37
Grafik 2.22. Angka Kelahiran Bayi Kabupaten Sikka Tahun 2020-2025 .....II-38
Grafik 2.23. Angka Kematian Bayi Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-38
Grafik 2.24. Angka Kematian Ibu Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-39
Grafik 2.25. Prevalensi Stunting Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 .....II-40
Grafik 2.26. Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sikka
Tahun 2021–2025 .....II-43
Grafik 2.27. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sikka
Tahun 2021–2025 .....II-52
Grafik 2.28. IDG Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Sikka
Tahun 2020-2025 .....II-55
Grafik 2.29. Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Sikka
Tahun 2021-2025 .....II-55
Grafik 2.30. Persentase Penduduk Usia 25 Tahun Ke Atas dengan
Pendidikan SMA Ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sikka
Tahun 2021-2025 .....II-56
Grafik 2.31. Harapan Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Sikka
Tahun 2021-2025 .....II-56
Grafik 2.32. Pengeluaran Per Kapita Menurut Jenis KelaminTahun 2021-2025 .....II-57

Grafik 2.33. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021-2025 ..... II-57
Grafik 2.34. Persentase Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... II-60
Grafik 2.35. Persentase Limbah B3 yang Terkelola di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... II-61
Grafik 2.36. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Sikka Tahun 2021 – 2025 ..... II-65
Grafik 2.37. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... II-66
Grafik 2.38. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... II-67
Grafik 2.39. Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kependudukan Kabupaten SikkaTahun 2022-2025 ..... II-68
Grafik 2.40. Nilai Penanaman Modal Tetap Bruto Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 (Rp miliar) II-80
Grafik 2.41. Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... II-95
Grafik 2.42. Konsumsi Ikan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... II-96
Grafik 3.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-1
Grafik 3.2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-2
Grafik 3.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-4
Grafik 3.4. Inflasi Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-6
Grafik 3.5. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sikka Tahun 2021- 2025 ..... III-6
Grafik 3.6. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-7
Grafik 3.7. Garis Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-8
Grafik 3.8. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-9
Grafik 3.9. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan RKPD dengan Dokumen Lainnya	I-7
Gambar 2.1	Peta Geografis Kabupaten Sikka	II-1
Gambar 2.2	Peta Ketinggian Lahan Kabupaten Sikka	II-4
Gambar 2.3	Peta Morfologi (Kelerengan)	II-6
Gambar 3.1	Indeks Gini Kabupaten Sikka, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020-2024	III-10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2025. Selanjutnya penyusunan RKPD Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sikka Tahun 2025-2045, serta mempertimbangkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 dan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2027.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2027 memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2025, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya. Selain itu, kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 juga memperhatikan berbagai proyeksi dalam RKPD Tahun 2027.

Penyusunan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2027 juga memedomani arah kebijakan pembangunan dari program Asta Cita dalam RPJMN 2025 – 2029, RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029, rancangan RKP 2027, Program Strategis Nasional, dan RKPD Provinsi Tahun 2027. Berdasarkan dokumen perencanaan tersebut, RKPD Kabupaten Sikka tahun 2027 diarahkan pada tahap kedua pembangunan lima tahun yaitu tahap **"Penguatan Kapasitas dan Sistem Lintas Sektor yang Efektif dan Berkelanjutan "Pemantapan sistem pembangunan manusia lintas sektor, memperkuat sektor ekonomi berkelanjutan, integrasi pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup dengan teknologi, serta penguatan kolaborasi tata kelola pemerintahan"".** Prioritas Kabupaten Sikka tahun 2027 diharapkan memberikan dukungan pada tahap pembangunan Provinsi Nusa Tenggara TimurTahun 2027 untuk **"Peningkatan Pelayanan Dasar dan Sumber Daya Manusia Berkualitas"**. Selain itu tema pembangunan 2027 Kabupaten Sikka juga mendukung Fokus tahapan RPJMN pada tahun 2027 yaitu Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, investasi dan Industri.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah, RKPD mempunyai nilai yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:

1. Merupakan instrumen pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah jangka menengah;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, berupa program/kegiatan OPD dan/atau lintas OPD;
3. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD; dan
5. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan dilaksanakan melalui melalui 6 (enam) tahapan, mulai dari persiapan penyusunan RKPD; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan Musrenbang

yang dimulai dari tingkat desa/Kelurahan sampai ke tingkat Kabupaten; perumusan rancangan akhir dan penetapan RKPD.

Penjelasan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan RKPD
   a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
   b. b. Orientasi mengenai RKPD oleh Tim Penyusun RKPD;
   c. c. Penyusunan agenda tim kerja penyusunan RKPD; dan
   d. d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD
   a. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
   b. Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
   c. Analisis kapasitas keuangan daerah;
   d. Penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah;
   e. Penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah;
   f. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
   g. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
   h. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dengan program strategis nasional;
   i. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD; Perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
   j. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

   Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

3. Penyusunan Rancangan RKPD
   Penyusunan Rancangan RKPD sebagai proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2027 berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan dengan penyelarasan tema pembangunan, prioritas dan arah kebijakan pembangunan baik Nasional, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Sikka.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
   Musrenbang RKPD sebagai forum pemangku kepentingan, dilaksanakan untuk membahas Rancangan RKPD. Musrenbang RKPD di tingkat Kabupaten Sikka merupakan rangkaian proses perencanaan yang dimulai dari Pra Musrenbang di tingkat RT dan RW, Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, Forum Konsultasi Publik dan Forum Perangkat Daerah. Proses Musrenbang RKPD ini melibatkan berbagai stakeholders seperti unsur pemerintah daerah beserta jajarannya, DPRD, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat dan tokoh agama, termasuk pelibatan perempuan dan anak secara terintegrasi dan partisipatif.

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD
   Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan Rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Sikka. Rancangan Akhir RKPD yang telah disempurnakan disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh perangkat daerah untuk memastikan seluruh program dan kegiatan perangkat daerah telah diakomodir.

6. Penetapan RKPD Tahun 2027
   Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD yang telah disempurnakan disampaikan oleh kepala Bappeda kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan penetapan dan pengundangan. Kedudukan dokumen RKPD sangat strategis dan terkait erat dengan dokumen penganggaran daerah, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasal 17 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2027 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Walikota) menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 untuk menyusun APBD Tahun Anggaran 2027.

RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan yang memuat Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi serta Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan tahunan tetap mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Bupati.

Dokumen RKPD merupakan penjabaran dari kebijakan nasional yang juga disusun dengan menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan evaluasi Standar Pelayanan Minimal, Monitoring, Center for Strategis Prevencion (MCSP KPK) dan Reviu Inspektorat.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rujukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112)

23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 91);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
35. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);
36. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2025 Nomor 006);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sikka Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor 3);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 147);
40. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 5);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 3);
42. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 43 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2027 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 043.

1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

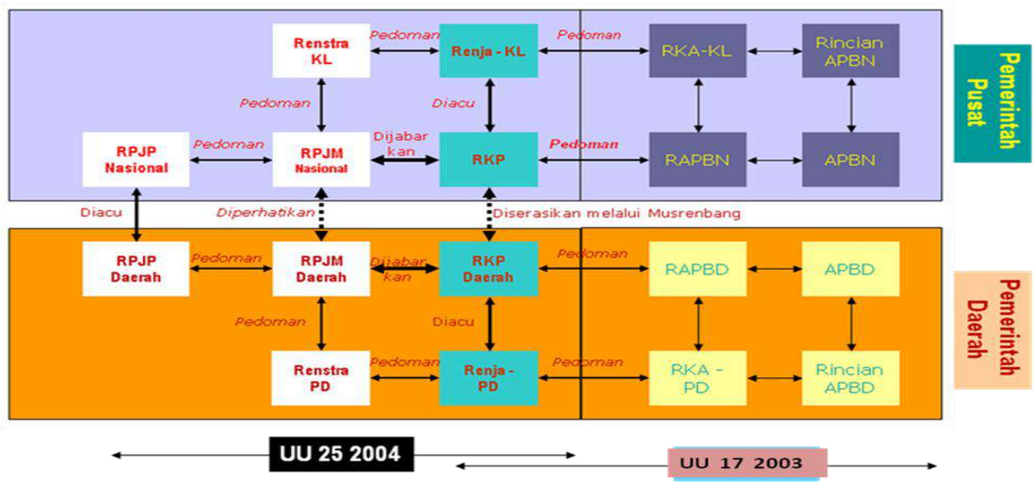
Hubungan Antar Dokumen RKPD RKPD Kabupaten Sikka tahun 2027 memiliki hubungan erat dengan beberapa dokumen perencanan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. RKPD dan RPJPD 2025-2045
   RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2027 merupakan penjabaran periode kedua RPJPD yakni periode 2025-2029. RKPD berisikan prioritas program dan kegiatan berdasarkan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Sikka Tahap kedua yang telah disesuaikan dengan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timurdan RPJPN.
2. RKPD dengan RPJMD 2025-2029
   RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMD tahun 2025-2029 yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan. RKPD berisi penjabaran program pembangungan dan capaian kinerja tahunan dalam mendukung target capaian lima tahunan. Melalui RKPD, dapat dilakukan upaya penyesuaian dalam mencapai target pembangunan akhir periode RPJMD.
3. RKPD dan Renja PD
   RKPD sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen tahunan OPD yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan dan mengacu pada Renstra OPD.
4. RKPD dan APBD
   RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berdasarkan RKPD.
5. RKPD dan RTRW
   Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai rencana pola ruang, rencana struktur ruang, dan rencana kawasan strategis Kabupaten Sikka sebagai dasar untuk memantapkan lokasi kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.
6. RKPD dan RPKD
   Dalam penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2027, di mana program program dalam RPKD telah masuk ke dalam RKPD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam hal penurunan angka kemiskinan.
7. RKPD dan TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
   Dalam penyusunan RKPD telah memuat empat pilar pembangunan TPB, yang telah masuk dalam program kegiatan di RKPD
8. RKPD dan SPM
   Dalam penyusunan RKPD telah memuat indikator SPM ke dalam indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana SPM.
9. RKPD dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Provinsi
   Dalam siklus manajemen pembangunan yang meliputi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, RKPD memiliki fungsi dan peran yang cukup krusial.

RKPD merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan 20 tahunan yaitu RPJPD dan dokumen perencanaan 5 tahunan yaitu RPJMD serta memperhatikan dan mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi. Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah.

Secara normatif, keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan keuangan negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1. Posisi dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran dari RPJMD.

Gambar 1.1. Hubungan RKPD dengan Dokumen Lainnya



Tabel 1.1
Keselarasan Tema Pembangunan Nasional,
Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Sikka Tahun 2027

RKP Nasional	RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur	RKPD Kabupaten Sikka
TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2027		
Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, investasi dan Industri	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Penguatan Kapasitas dan Sistem Lintas Sektor yang Efektif dan Berkelanjutan **"**Pemantapan sistem pembangunan manusia lintas sektor, memperkuat sektor ekonomi berkelanjutan, integrasi pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup dengan teknologi, serta penguatan kolaborasi tata kelola pemerintahan"
TARGET SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027		
Pertumbuhan Ekonomi (%)		
5,9-7,5	4,78 – 5,65	5,06
GNI Per Capita(US$)		
5.900-5.990		
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)		
39,57		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		

RKP Nasional	RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur	RKPD Kabupaten Sikka
76,84		80,66
Tingkat Kemiskinan (%)		
6,0-6,5	16,50-17,00	10,76
Rasio Gini		
0,362-0,367	0,295-0,301	0,323
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
4,30-4,87	2,30-2,89	2,47
Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia		
0,58	0,500	73,73

Selain berpedoman pada Dokumen Pusat dan Provinsi yang merupakan dokumen wajib yang perlu diselaraskan, RKPD Kabupaten Sikka tahun 2027 juga mengacu pada dokumen dokumen sektoral yang menjadi salah satu sumber informasi penting untuk digunakan sebagai bahan telaahan dalam menentukan permasalahan dan isu strategis pembangunan. Selanjutnya akan menjadi salah satu dasar penentuan prioritas dan sasaran pembangunan, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah serta penyelarasan program prioritas dan pagu indikatif.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka Tahun 2027 dimaksudkan untuk :

1. Sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 dan menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
2. Sebagai acuan dalam menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian target indikator utama pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2045;
3. Sebagai acuan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2027.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka Tahun 2027 bertujuan untuk :

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berisikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2027;
2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2027 yang berpedoman pada dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Tahun 2025-2029;
3. Memberikan arah, acuan dan indikator capaian yang harus dipenuhi serta menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
4. Sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2027 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, yang menguraikan tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penyusunan RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM, yang memuat tentang Kondisi Umum daerah dari Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing, Aspek Pelayanan Umum`, Evaluasi dan Capaian Pelaksanaan Pembangunan, Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, yang memuat tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Kinerja Keuangan Daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN, yang memuat tentang Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027, Arah Kebijakan Pembangunan, Program Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN, yang memuat tentang Rencana Target Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dan Program, Indikator, Target Kinerja dan Anggaran

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, yang memuat tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah yang menjadi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Geografi

Secara geografis, Kabupaten Sikka terletak pada 8022'– 8050' Lintang Selatan dan 121055'40" – 122041'30" Bujur Timur di Pulau Flores. Kabupaten Sikka memiliki luas wilayah 1.731,91 Km^2 atau 173.191 Ha dengan batas-batas administrasi wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Flores;
Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Flores Timur;
Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Ende; dan
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Laut Sawu.

Gambar 2.1
Peta Geografis Kabupaten Sikka



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2024

Secara administratif Kabupaten Sikka terbagi atas 21 Kecamatan, 13 Kelurahan, 181 Desa. Kecamatan dengan desa terbanyak terdapat di Kecamatan Talibura sebanyak 20 desa, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Mapitara dan Alok Barat masing-masing sebanyak 4 desa/kelurahan. Nama ibu kota kecamatan dan luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Ibu Kota Kecamatan dan Luas Wilayah Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Wilayah (km)	Persentase Luas (%)
1	Paga	Paga	82,85	4,78
2	Tanawawo	Wolofeo	79,78	4,61
3	Mego	Lekebai	111,26	6,42
4	Lela	Lela	31,33	1,81
5	Bola	Bola	56,83	3,28
6	Doreng	Edat	30,41	1,76
7	Mapitara	Hebing	81,02	4,61
8	Talibura	Talibura	260,11	15,02
9	Waiblama	Tanarawa	144,36	8,34
10	Waigete	Waigete	217,65	12,57
11	Kewapante	Kewapante	24,14	1,39
12	Hewokloang	Baowunut	17,58	1,02
13	Kangae	Waipare	38,43	2,22
14	Nelle	Nelle Urung	14,65	0,85
15	Koting	Koting B	23,56	1,36

No.	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Wilayah (km)	Persentase Luas (%)
16	Palue	Uwa	41	2,37
17	Nita	Nita	141,07	8,15
18	Magepanda	Magepanda	166,15	9,59
19	Alok	Kota Uneng	14,64	0,85
20	Alok Barat	Wailiti	62,75	3,62
21	Alok Timur	Waioti	92,34	5,33
Jumlah			1.731,91	100

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

Berdasarkan data luas wilayah per kecamatan di atas dapat dijelaskan bahwa kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Talibura dengan luas wilayah 260,11 Km^2 atau 15,02 persen, sedangkan kecamatan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Alok 14,64 Km^2 atau 0,85 persen.

Kabupaten Sikka secara nasional ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT). Hal ini ditetapkan dan dijabarkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sikka Tahun 2025–2044, yang mengidentifikasi kawasan strategis kabupaten berdasarkan dua pendekatan utama, yakni dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi serta dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Penetapan kawasan strategis dari perspektif ekonomi bertujuan untuk mendorong akselerasi pembangunan berbasis potensi unggulan wilayah serta memperkuat struktur ruang ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan. Adapun kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis ekonomi meliputi:

a) Kawasan Strategis agropolitan bertujuan sebagai pusat kegiatan sektor unggulan yang dapat menggerakan pertumbuhan ekonomi Daerah berada di Kecamatan Magepanda, Kecamatan Paga, Kecamatan Palue, Kecamatan Talibura, dan Kecamatan Waigete.
b) Kawasan Strategis Perkotaan Maumere bertujuan sebagai pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah berada di Kecamatan Alok, Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Alok Timur, dan Kecamatan Nita.
c) Kawasan Strategis Perkotaan Baru bertujuan sebagai pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah di Kecamatan Kewapante.
d) Kawasan Strategis Sentral Kerajinan Tenun bertujuan sebagai pusat pengembangan produk unggulan berada di Kecamatan Bola dan Kecamatan Nita.

Selanjutnya, kawasan strategis berdasarkan fungsi lingkungan hidup untuk menjamin kelestarian sumber daya alam, keanekaragaman hayati, dan daya dukung lingkungan yang menjadi penyangga sistem kehidupan masyarakat dan ekosistem adalah:
Kawasan Strategis Penyangga Hutan Lindung Gunung Egon bertujuan sebagai tempat perlindungan keanekaragaman hayati berada di Kecamatan Mapitara dan Kecamatan Waigete.

Berdasarkan data luas wilayah per kecamatan di atas dapat dijelaskan bahwa kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Talibura dengan luas wilayah 260,11 Km^2 atau 15,02 persen, sedangkan kecamatan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Alok 14,64 Km^2 atau 0,85 persen.

Kondisi kemiringan tanah (kelerengan) di wilayah Kabupaten Sikka cukup bervariasi, berkisar dari 0-70 persen dan didominasi oleh kemiringan tanah yang lebih besar dari 40 persen dengan luas 81.167 Ha atau 46,87 persen dari total luas wilayah Kabupaten Sikka. Kondisi iklim wilayah Kabupaten Sikka dan Nusa Tenggara Timur, umumnya sangat menentukan besarnya potensi air hujan. Iklim di Kabupaten Sikka adalah iklim kering yang dipengaruhi oleh angin Muson, dengan musim hujan yang pendek, yang jatuh pada sekitar bulan November hingga bulan Mei. Wilayah Kabupaten Sikka mempunyai curah hujan rata-rata sebesar 1000-1500 mm/tahun.

Akibat rendahnya curah hujan dengan hari hujan dan intensitas yang bervariasi tinggi menyebabkan bentang alam Kabupaten Sikka menjadi relatif kering yang sangat mempengaruhi keadaan air tanah. Kecepatan angin maksimum terjadi pada bulan Agustus yaitu 18,00 (m/det). Sedangkan kecepatan angin minimum terjadi pada bulan Maret sebesar

2,40 (m/det). Selanjutnya untuk tekanan udara minimum terjadi pada bulan Desember yaitu 1.007,30 (mb), sedangkan untuk tekanan udara maksimum terjadi pada bulan Juni sebesar 1.016,60 (mb).

Berdasarkan kondisi iklim yang telah dijelaskan sebelumnya, distribusi curah hujan di Kabupaten Sikka cenderung tidak merata antar wilayah, yang berdampak langsung pada ketersediaan air, khususnya pada musim kemarau.

Topografi Kabupaten Sikka dapat diklasifikasikan menjadi lima kelas sebagai berikut

1. Topografi dengan ketinggian 0-25 mdpl, yaitu dengan luas 29.863 Ha atau 17,24 persen dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, meliputi sebagian besar daerah pesisir pantai utara dan daerah pesisir pantai selatan serta daerah pesisir pantai pulau-pulau kecil lainnya;
2. Topografi dengan ketinggian 25-100 mdpl, yaitu dengan luas 20.843 Ha atau 12,03 persen persen dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan wilayah lanjutan daerah pesisir yang sebagian besar juga terdapat di bagian utara wilayah Kabupaten Sikka dan sebagian kecilnya di bagian selatan dan pulau-pulau kecil lainnya;
3. Topografi dengan ketinggian 100-500 mdpl, yaitu seluas 48.171 Ha atau 27,81 persen dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan wilayah lereng atau kaki gunung dan perbukitan yang juga merupakan daerah peralihan dari dataran rendah ke dataran tinggi atau pegunungan, yang tersebar di wilayah Kabupaten Sikka;
4. Topografi dengan ketinggian 500-1000 mdpl, yaitu seluas 70.216 Ha atau 40,54 persen dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan daerah pegunungan yang tersebar di wilayah Kabupaten Sikka;
5. Topografi dengan ketinggian lebih dari 1000 m dpl, yaitu seluas 4.098 ha atau 2,37 persen dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan daerah pegunungan atau dataran tinggi, yang tersebar di wilayah Kabupaten Sikka.

Topografi Kabupaten Sikka yang bervariasi, mulai dari dataran rendah pesisir hingga kawasan perbukitan dan pegunungan dapat dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan wilayah. Wilayah pesisir yang berada pada ketinggian 0–100 meter di atas permukaan laut menawarkan potensi besar untuk pengembangan sektor perikanan tangkap, budidaya laut, serta pariwisata bahari dan budaya.

Sementara itu, wilayah perbukitan dengan ketinggian 100–500 mdpl sangat cocok untuk pengembangan pertanian lahan kering, hortikultura, dan agroforestri, terutama untuk komoditas unggulan seperti kemiri, kakao, kopi, dan vanili. Kawasan pegunungan yang mendominasi hampir separuh wilayah Sikka juga memiliki nilai strategis sebagai wilayah konservasi sumber daya alam.

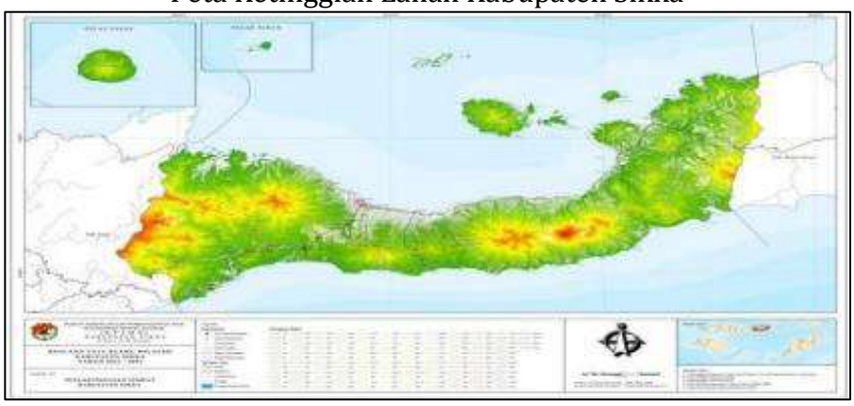
Kabupaten Sikka dikelilingi oleh Laut Flores dan Laut Sawu dengan iklim tropis yang terbagi menjadi dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Wilayah di kabupaten Sikka memiliki suhu yang cenderung panas. Dari data Kabupaten Sikka Dalam Angka Tahun 2025 tercatat suhu maksimum pada tahun 2024 adalah pada bulan Oktober 37,70°C dan suhu minimum pada bulan juli 17,80°C. Kelembaban udara minimum terjadi pada bulan September dengan kelembaban udara sebesar 35 persen. Sebaliknya kelembaban tertinggi terjadi pada Bulan Januari, Maret, April dan Desember dengan besaran 100 persen. curah hujan terendah terjadi pada Bulan September sebesar 0,70 mm, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Desember sebesar 431,40 mm, persentase penyinaran matahari pada tahun 2024 terendah pada bulan Maret sebesar 83,87 persen dan tertinggi pada bulan Mei, Juli, Agustus, Oktober dan November sebesar 100 persen

Kabupaten Sikka memiliki sistem hidrologi yang terdiri atas delapan sungai utama dengan total panjang mencapai 422,37 kilometer. Sungai-sungai tersebut meliputi Sungai Mati (60 km), Sungai Warlelau (70 km), Sungai Ili Getang (70 km), Sungai Mebe (80 km), Sungai Kaliwajo (51 km), Sungai Napun Gete (9,37 km), Sungai Mego (43 km), dan Sungai Kowi (39 km). Sungai Mebe tercatat sebagai sungai terpanjang, sedangkan Napun Gete merupakan yang terpendek.

2.1.2 Topografi

Topografi Kabupaten Sikka dapat diklasifikasikan menjadi lima kelas, hal ini dapat dilihat dari peta ketinggian lahan berikut:

Gambar 2.2
Peta Ketinggian Lahan Kabupaten Sikka



Sumber: RTRW Kabupaten Sikka, 2025-2044

Berdasarkan peta ketinggian lahan tersebut, lima kelas ketinggian lahan Kabupaten Sikka diuraikan sebagai berikut:

a) Topografi dengan ketinggian 0-25 mdpl, yaitu dengan luas 29.863 Ha atau 17,24 persen dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, meliputi sebagian besar daerah pesisir pantai utara dan daerah pesisir pantai selatan serta daerah pesisir pantai pulau-pulau kecil lainnya;
b) Topografi dengan ketinggian 25-100 mdpl, yaitu dengan luas 20.843 Ha atau 12,03 persen persen dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan wilayah lanjutan daerah pesisir yang sebagian besar juga terdapat di bagian utara wilayah Kabupaten Sikka dan sebagian kecilnya di bagian selatan dan pulau-pulau kecil lainnya;
c) Topografi dengan ketinggian 100-500 mdpl, yaitu seluas 48.171 Ha atau 27,81 persen dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan wilayah lereng atau kaki gunung dan perbukitan yang juga merupakan daerah peralihan dari dataran rendah ke dataran tinggi atau pegunungan, yang tersebar di wilayah Kabupaten Sikka;
d) Topografi dengan ketinggian 500-1000 mdpl, yaitu seluas 70.216 Ha atau 40,54 persen dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan daerah pegunungan yang tersebar di wilayah Kabupaten Sikka;
e) Topografi dengan ketinggian lebih dari 1000 m dpl, yaitu seluas 4.098 ha atau 2,37 persen dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan daerah pegunungan atau dataran tinggi, yang tersebar di wilayah Kabupaten Sikka.

Topografi Kabupaten Sikka yang bervariasi, mulai dari dataran rendah pesisir hingga kawasan perbukitan dan pegunungan dapat dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan wilayah. Wilayah pesisir yang berada pada ketinggian 0–100 meter di atas permukaan laut menawarkan potensi besar untuk pengembangan sektor perikanan tangkap, budidaya laut, serta pariwisata bahari dan budaya.

Sementara itu, wilayah perbukitan dengan ketinggian 100–500 mdpl sangat cocok untuk pengembangan pertanian lahan kering, hortikultura, dan agroforestri, terutama untuk komoditas unggulan seperti kemiri, kakao, kopi, dan vanili. Kawasan pegunungan yang mendominasi hampir separuh wilayah Sikka juga memiliki nilai strategis sebagai wilayah konservasi sumber daya alam.

2.1.3 Klimatologi

Klimatologi merupakan gambaran dan penjelasan sifat iklim di suatu wilayah yang terdiri dari komponen suhu udara, kelembaban udara, tekanan udara, curah hujan, dan hari hujan. Kondisi suhu udara dan kelembaban udara di wilayah Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Kondisi Suhu Udara dan Kelembaban Udara di Kabupaten Sikka

Bulan	Suhu Udara (˚C)		Kelembaban Udara (%)	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
Januari	23,60	33,20	87,81	100
Februari	23,60	32,20	87,75	100
Maret	24,00	33,00	86,80	100
April	21,80	34,00	81,18	100
Mei	23,40	33,80	82,01	100
Juni	22,50	33,80	78,11	100
Juli	20,50	33,20	75,48	100
Agustus	20,80	33,80	72,01	93
September	20,70	35,20	73,80	98
Oktober	22,50	36,00	75,77	98
November	24,40	36,20	79,11	100
Desember	22,70	34,40	85,33	100

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Sikka dikelilingi oleh Laut Flores dan Laut Sawu dengan iklim tropis yang terbagi menjadi dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Wilayah di kabupaten Sikka memiliki suhu yang cenderung panas. Dari data Kabupaten Sikka Dalam Angka Tahun 2026 tercatat suhu maksimum pada tahun 2025 adalah pada bulan november 36,20°C dan suhu minimum pada bulan juli 20,50°C. Kelembaban udara minimum terjadi pada bulan agustus dengan kelembaban udara sebesar 72,01 persen. Sebaliknya kelembaban tertinggi terjadi pada Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, November dan Desember dengan besaran 100 persen. Sedangkan secara umum rata-rata curah hujan dan hari hujan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Jumlah Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan di Kabupaten Sikka

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	303,40	18,00	4,60
Februari	72,90	18,00	3,80
Maret	56,10	18,00	5,10
April	98,20	13,00	7,40
Mei	124,70	13,00	7,30
Juni	14,00	5,00	6,60
Juli	0,00	0,00	8,50
Agustus	0,00	0,00	9,20
September	15,80	4,00	8,90
Oktober	32,00	5,00	9,10
November	93,50	11,00	7,50
Desember	174,40	23,00	4,90

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa secara umum, curah hujan terendah terjadi pada Bulan juli dan agustus sebesar 0,00 mm, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Desember sebesar 174,40 mm, persentase penyinaran matahari pada tahun 2026 terendah pada bulan Maret sebesar 4,90 persen dan tertinggi pada Agustus November sebesar 9,20 persen. Sedangkan untuk informasi tekanan udara, dan kecepatan angin di Kabupaten Sikka secara detail dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Rata-Rata Tekanan Udara dan Kecepatan Angin di Kabupaten Sikka

Bulan	Kecepatan Angin (m/det)		Tekanan Udara (mb)	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
Januari	2,98	13	1.005,20	1.008,80
Februari	3,01	20	1.005,93	1.012,00
Maret	2,76	10	1.005,60	1.009,70
April	3,46	12	1.006,89	1.010,80

Bulan	Kecepatan Angin (m/det)		Tekanan Udara (mb)	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
Mei	3,81	16	1.007,19	1.010,70
Juni	4,53	12	1.008,78	1.011,30
Juli	5,61	15	1.008,68	1.011,40
Agustus	5,22	16	1.009,35	1.012,20
September	4,47	17	1.008,82	1.011,90
Oktober	4,01	14	1.007,27	1.011,40
November	3,52	15	1.005,88	1.010,40
Desember	2,93	15	1.004,96	1.009,20

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

Berdasarkan tabel di atas Kecepatan angin maksimum terjadi pada bulan Februari yaitu 20,00 (m/det). Sedangkan kecepatan angin minimum terjadi pada bulan Maret sebesar 2,76 (m/det). Selanjutnya untuk tekanan udara minimum terjadi pada bulan Desember yaitu 1.004,96 (mb), sedangkan untuk tekanan udara maksimum terjadi pada bulan Agustus sebesar 1.012,20 (mb).

2.1.4 Morfologi

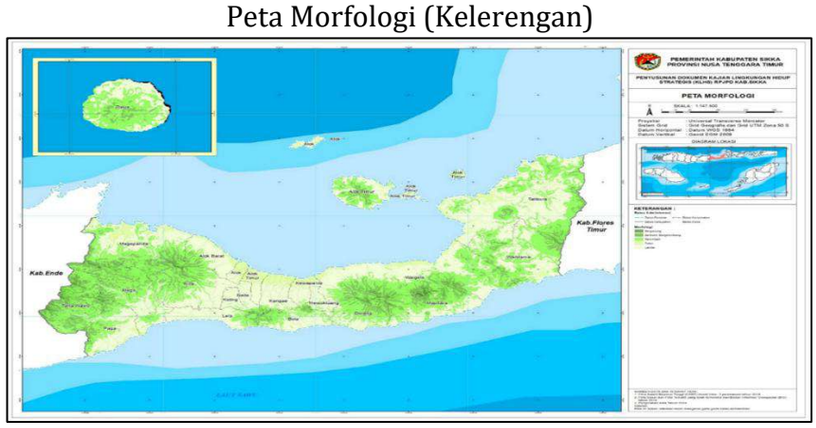
Kondisi kemiringan tanah (kelerengan) di wilayah Kabupaten Sikka cukup bervariasi, berkisar dari 0-70 persen dan didominasi oleh kemiringan tanah yang lebih besar dari 40 persen dengan luas 81.167 Ha atau 46,87 persen dari total luas wilayah Kabupaten Sikka.

Berdasarkan data geologi tata lingkungan, wilayah Kabupaten Sikka dikelompokkan menjadi lima satuan morfologi, yaitu:

1. Satuan morfologi dataran rendah, menempati daerah yang cukup luas di sepanjang pantai utara, pantai selatan dan pada alur-alur sungai dengan kemiringan antara 0- 5 persen;
2. Satuan morfologi perbukitan halus terdapat di sekitar selatan Kota Maumere dan Kecamatan Kewapante dan Kecamatan Kangae dengan kemiringan antara 5-15 persen;
3. Satuan morfologi perbukitan sedang berelief sedang terdapat di sepanjang pantai selatan, Pulau Besar, Pulau Babi, Pulau Pemana Besar, sebelah utara perbatasan Kabupaten Sikka dengan Kabupaten Flores Timur dan di Kecamatan Magepanda dengan kemiringan antara 15-30 persen;
4. Satuan morfologi perbukitan kasar tersebar hampir 70 persen dari luas wilayah Kabupaten Sikka dengan kemiringan antara 30-70 persen;
5. Satuan morfologi pegunungan terdapat di Gunung Egon, Gunung Kimangbuleng, Gunung Jele dan Gunung Dobo dengan kemiringan antara 50-70 persen.

Kondisi Morfologi (kelerengan) di wilayah Kabupaten Sikka dapat dilihat pada Gambar 2.3 di bawah ini.

Gambar 2.3
Peta Morfologi (Kelerengan)



Sumber: KLHS Kabupaten Sikka, 2025-2029

2.1.5 Hidrologi

Berdasarkan kondisi hidrologi Kabupaten Sikka, dapat dijelaskan bahwa potensi sumber air di wilayah Kabupaten Sikka dapat diidentifikasi dari 3 (tiga) sumber, yaitu air hujan, air tanah dan air permukaan.

Kondisi iklim wilayah Kabupaten Sikka dan Nusa Tenggara Timur, umumnya sangat menentukan besarnya potensi air hujan. Iklim di Kabupaten Sikka adalah iklim kering yang dipengaruhi oleh angin Muson, dengan musim hujan yang pendek, yang jatuh pada sekitar bulan November hingga bulan Mei. Wilayah Kabupaten Sikka mempunyai curah hujan rata-rata sebesar 1000-1500 mm/tahun. Akibat rendahnya curah hujan dengan hari hujan dan intensitas yang bervariasi tinggi menyebabkan bentang alam Kabupaten Sikka menjadi relatif kering yang sangat mempengaruhi keadaan air tanah.

Berdasarkan kondisi iklim yang telah dijelaskan sebelumnya, distribusi curah hujan di Kabupaten Sikka cenderung tidak merata antar wilayah, yang berdampak langsung pada ketersediaan air, khususnya pada musim kemarau. Untuk memahami variasi spasial curah hujan secara lebih rinci, berikut ini disajikan data curah hujan bulanan berdasarkan masing-masing kecamatan di Kabupaten Sikka untuk menggambarkan potensi dan tantangan dalam pengelolaan sumber daya air hujan di setiap wilayah yang dapat dilihat pada tabel – tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Curah Hujan (mm/tahun) Kecamatan Nita dari Pos Hujan Ledalero

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2020	105,0	225,0	275,0	85,0	86,0	34,0	0,0	5,0	1,0	24,0	36,0	277,0
2021	323,5	645,0	237,0	263,0	2,0	0,0	0,0	28,0	90,5	25,0	370,5	554,9
2022	372,5	615,0	217,5	102,0	36,0	104,0	13,5	18,0	97,0	122,0	269,0	136,0
2023	109,5	520,0	86,5	67,5	4,5	36,0	125,5	3,0	0,0	0,0	41,0	127,0
2024	116,0	213,0	635,5	506,5	7,0	80,0	34,5	0,0	0,0	167,0	152,5	486,0

Sumber: BMKG Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data curah hujan bulanan dari Pos Hujan Ledalero di Kecamatan Nita untuk tahun 2020 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa pola curah hujan menunjukkan karakteristik iklim monsun tropis dengan musim hujan yang dominan terjadi pada bulan November hingga Maret dan musim kemarau pada bulan Juni hingga September. Data menunjukkan curah hujan tertinggi cenderung terjadi pada bulan Januari dan Februari, sebagaimana terlihat pada tahun 2021 (645 mm di Februari), tahun 2022 (615 mm di Februari), dan tahun 2023 (520 mm di Februari). Sebaliknya, bulan-bulan dengan curah hujan terendah umumnya terjadi pada Juli dan Agustus, di mana beberapa tahun mencatat curah hujan mendekati nol, seperti Juli 2021 (0,0 mm), Agustus 2023 (3,0 mm), dan Agustus 2024 (0,0 mm). Setiap pos bulan menunjukkan dinamika musiman yang konsisten, mencerminkan periode basah dan kering yang cukup kontras, dengan fluktuasi antartahun yang menunjukkan adanya variasi iklim tahunan. Keseluruhan data mengindikasikan bahwa Kecamatan Nita, khususnya pada Pos Ledalero, mengalami siklus hidrologi yang tajam antara musim hujan dan kemarau, yang perlu menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan sektor pertanian, konservasi air, dan mitigasi risiko kekeringan maupun banjir.

Tabel 2.6
Curah Hujan (mm/tahun) Kecamatan Paga dari Pos Hujan Paga

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2020	86,5	233,0	107,0	170,0	68,5	0,0	4,5	8,0	8,0	46,5	21,5	289,5
2021	330,6	365,0	176,5	208,5	22,0	35,0	26,0	58,0	53,5	22,0	90,0	192,5
2022	283,0	294,5	182,0	34,0	22,0	333,0	142,5	22,0	49,0	145,0	81,5	74,5
2023	85,5	295,5	107,5	146,0	30,6	12,5	106,0	38,5	0,0	0,0	65,5	143,3
2024	43,5	91,0	344,5	234,5	157,0	68,0	26,0	16,0	22,0	78,0	41,0	383,5

Sumber: BMKG Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data curah hujan bulanan dari Pos Hujan Paga di Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, selama periode 2020 hingga 2024, terlihat bahwa pola hujan mengikuti karakteristik iklim monsun dengan curah hujan tinggi pada bulan Januari hingga April, serta

bulan November hingga Desember, sementara curah hujan cenderung rendah pada bulan Juni hingga September. Curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Maret 2024 sebesar 344,5 mm, disusul oleh bulan Desember 2024 sebesar 383,5 mm, yang menunjukkan anomali peningkatan intensitas hujan pada akhir tahun. Di sisi lain, bulan-bulan kering seperti Juni 2020 (0,0 mm), September 2023 (0,0 mm), dan nilai rendah lainnya pada Juli dan Agustus memperlihatkan ketimpangan distribusi hujan yang tajam. Setiap tahun, Pos Paga menunjukkan fluktuasi intensitas curah hujan yang mencerminkan adanya variabilitas iklim, baik dari sisi intensitas maupun distribusi waktunya. Hal ini menandakan pentingnya strategi adaptif dalam pengelolaan sumber daya air, pertanian, dan mitigasi risiko bencana hidrometeorologi di wilayah Kecamatan Paga.

Tabel 2.7
Curah Hujan (mm/tahun) Kecamatan Lela dari Pos Hujan Lela

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2020	150,0	145,0	151,0	115,0	84,0	24,0	2,0	41,0	14,0	133,0	112,0	420,0
2021	411,0	451,0	496,0	304,0	75,0	12,0	44,0	24,0	90,0	133,0	372,0	204,0
2022	522,0	586,0	96,0	76,0	49,0	115,0	29,0	22,0	124,0	146,0	187,0	99,0
2023	252,0	450,0	73,0	455,0	44,0	2,0	185,0	22,0	0,0	0,0	181,0	151,0
2024	103,0	160,0	322,0	310,0	151,0	58,0	33,0	0,0	10,0	126,0	37,0	277,0

Sumber: BMKG Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data curah hujan bulanan dari Pos Hujan Lela di Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, selama periode 2020 hingga 2024, terlihat bahwa distribusi curah hujan menunjukkan pola musiman yang konsisten dengan puncak hujan umumnya terjadi pada bulan Januari hingga April serta bulan November hingga Desember. Curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Februari 2022 sebesar 586,0 mm, yang mencerminkan intensitas hujan yang sangat tinggi di awal tahun tersebut. Sebaliknya, bulan-bulan seperti Juli dan Agustus, terutama pada tahun 2024 (Agustus 0,0 mm), menunjukkan curah hujan sangat rendah yang identik dengan periode musim kemarau. Variabilitas tahunan juga terlihat dari perbedaan signifikan curah hujan antar tahun, seperti pada bulan Maret yang mencapai 496,0 mm di tahun 2021, namun hanya 73,0 mm di tahun 2023. Setiap pos bulan mengindikasikan dinamika iklim tropis basah-kering yang tajam, sehingga data dari Pos Lela menjadi representasi penting untuk memahami kondisi iklim lokal di Kecamatan Lela.

Tabel 2.8
Curah Hujan (mm/tahun) Kecamatan Alok Timur dari Pos Hujan Stamet Maumere

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2020	80,7	101,0	79,8	103,0	154,4	24,1	0,0	0,0	1,5	71,0	54,5	218,0
2021	179,5	567,7	151,5	94,3	0,0	22,8	0,0	9,3	26,6	28,0	286,9	210,5
2022	248,3	435,3	151,6	27,9	6,0	98,8	13,2	0,0	20,9	41,3	263,8	117,1
2023	119,8	372,6	51,0	110,2	0,0	65,6	19,2	0,0	0,0	1,0	38,0	79,7
2024	52,3	54,2	196,0	384,1	2,0	9,0	8,9	2,1	0,7	33,7	39,0	433,9

Sumber: BMKG Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data curah hujan bulanan dari Pos Hujan Stamet Maumere yang merepresentasikan wilayah Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, selama periode 2020 hingga 2024, pola hujan menunjukkan tipikal iklim monsun tropis dengan konsentrasi curah hujan tinggi pada bulan Januari hingga April serta November hingga Desember, dan curah hujan rendah atau hampir tidak ada pada bulan Juni hingga September. Curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Februari 2021 sebesar 567,7 mm, sementara curah hujan terendah atau nihil terlihat pada beberapa bulan musim kemarau, seperti Juli dan Agustus 2020 serta Juli dan Agustus 2023. Lonjakan curah hujan ekstrem juga tampak pada bulan Desember 2024 sebesar 433,9 mm, yang mengindikasikan pergeseran intensitas hujan ke akhir tahun. Variabilitas antar tahun cukup signifikan, misalnya pada bulan Maret yang berkisar dari 51,0 mm (2023) hingga 196,0 mm (2024). Secara keseluruhan, data dari Pos Stamet Maumere

menunjukkan bahwa Kecamatan Alok Timur mengalami dinamika hujan yang cukup tajam antara musim hujan dan musim kemarau.

Tabel 2.9
Curah Hujan (mm/tahun) Kecamatan Magepanda dari Pos Hujan Magepanda

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2020	590,3	171,0	233,0	39,0	146,0	0,0	0,0	2,0	10,0	34,0	20,3	441,0
2021	482,0	418,0	135,0	183,0	0,0	33,8	0,0	0,0	21,0	0,0	304,0	249,0
2022	230,9	686,0	148,0	108,0	3,0	25,0	18,0	0,0	12,0	189,0	86,0	166,0
2023	114,0	658,0	109,0	54,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	94,0
2024	273,0	156,0	204,0	247,0	5,0	0,0	10,0	0,0	0,0	2,0	10,0	698,0

Sumber: BMKG Kabupaten Sikka, 2025

Data curah hujan bulanan di Kecamatan Magepanda yang tercatat melalui Pos Hujan Magepanda selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan pola fluktuasi yang khas dengan dominasi curah hujan tinggi pada bulan-bulan basah, terutama Januari hingga Maret dan November hingga Desember. Pencatatan tertinggi terjadi pada bulan Desember 2024 sebesar 698,0 mm dan Februari 2022 sebesar 686,0 mm, sementara curah hujan sangat rendah atau bahkan nihil umum ditemukan pada bulan Juni hingga September seperti pada Juli dan Agustus 2021 maupun 2023 yang mencatatkan angka 0,0 mm. Variasi yang mencolok juga terlihat pada bulan Januari dengan perbedaan signifikan antara tahun 2020 (590,3 mm) dan tahun 2023 (114,0 mm). Pos Hujan Magepanda menjadi sumber penting dalam merekam dinamika iklim lokal yang secara umum mencerminkan kondisi iklim musiman dengan perbedaan ekstrem antara periode basah dan kering. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa Magepanda menghadapi ketimpangan distribusi curah hujan tahunan yang cukup tajam sehingga pengelolaan sumber daya air dan strategi adaptasi iklim menjadi aspek vital dalam mendukung pembangunan wilayah secara berkelanjutan.

Tabel 2.10
Curah Hujan (mm/tahun) Kecamatan Waigete dari Pos Hujan Waigete

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2020	458,0	231,0	107,0	26,0	220,0	0,0	0,0	0,0	N/A	37,0	113,0	633,0
2021	385,0	972,0	519,0	426,0	0,0	0,0	0,0	7,0	15,0	16,0	270,0	386,0
2022	377,0	1017,0	121,0	14,0	11,0	48,0	109,0	2,0	3,0	44,0	222,0	389,0
2023	130,0	563,0	106,0	241,0	0,0	19,0	32,0	0,0	0,0	0,0	22,0	127,0
2024	294,0	129,0	434,0	368,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	28,0	100,0	878,0

Sumber: BMKG Kabupaten Sikka, 2025

Pos Hujan Waigete yang merekam curah hujan bulanan di Kecamatan Waigete selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika iklim yang sangat kontras antara musim hujan dan kemarau. Curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Februari 2022 sebesar 1.017,0 mm dan Desember 2024 mencapai 878,0 mm, menandakan puncak musim hujan yang cukup ekstrem di awal dan akhir tahun. Sebaliknya, sejumlah bulan seperti Mei hingga September di beberapa tahun seperti 2021 dan 2024 tercatat tanpa hujan sama sekali atau hanya menunjukkan nilai yang sangat minim, yang menunjukkan periode kekeringan yang cukup signifikan. Angka curah hujan pada bulan Maret juga menunjukkan variasi cukup besar, dari hanya 106,0 mm di tahun 2023 hingga 519,0 mm di tahun 2021. Keberadaan nilai N/A pada bulan September 2020 mengindikasikan kekosongan data yang perlu diperhatikan dalam analisis lebih lanjut.

Tabel 2.11
Curah Hujan (mm/tahun) Kecamatan Bola dari Pos Hujan Bola

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2020	152,4	252,7	148,6	135,7	125,5	27,0	N/A	34,0	0,5	83,7	133,4	458,1
2021	345,2	505,1	316,0	140,0	105,0	20,5	35,0	0,0	147,2	74,0	240,6	208,4
2022	348,0	562,8	146,2	142,0	59,3	148,6	11,0	18,2	64,1	142,1	110,4	277,1
2023	223,2	263,6	193,0	233,9	15,7	37,8	61,1	0,0	0,0	0,0	429,9	273,3
2024	93,9	58,3	249,0	294,2	13,2	11,6	12,5	0,0	38,0	61,0	29,3	392,7

Sumber: BMKG Kabupaten Sikka, 2025

Rekaman curah hujan dari Pos Hujan Bola yang berlokasi di Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, memperlihatkan variasi hujan bulanan yang cukup nyata selama rentang

waktu 2020 hingga 2024. Beberapa bulan mencatat intensitas tinggi, seperti Februari 2022 dengan 562,8 mm dan Desember 2020 yang mencapai 458,1 mm. Sebaliknya, periode kemarau sangat terasa pada bulan Agustus yang beberapa kali mencatat curah hujan nol, seperti pada tahun 2021, 2023, dan 2024. Data juga menunjukkan adanya catatan tidak tersedia (N/A) pada bulan Juli 2020, yang menandakan adanya kekosongan data dan perlu dicermati dalam evaluasi longitudinal. Fluktuasi signifikan terlihat pada bulan Oktober, di mana tahun 2023 sama sekali tidak mencatat curah hujan, sedangkan tahun 2022 mencapai 142,1 mm. Pola hujan di Kecamatan Bola menunjukkan ketergantungan tinggi pada musim basah sebagai sumber utama pasokan air, sementara musim kering cenderung panjang dan minim hujan. Hal ini mencerminkan perlunya sistem pengelolaan air yang adaptif dan terencana, baik untuk mendukung aktivitas pertanian maupun mengantisipasi risiko kekeringan di masa mendatang.

Tabel 2.12
Curah Hujan (mm/tahun) Kecamatan Mego dari Pos Hujan Nangablo

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2020	241,0	366,0	407,0	21,0	30,0	11,0	0,0	0,0	8,0	16,0	6,0	353,0
2021	687,0	448,0	192,5	250,5	1,0	0,0	2,0	2,0	4,0	42,0	49,0	39,0
2022	259,0	428,0	23,0	10,0	7,0	63,0	11,0	4,0	91,0	27,0	45,0	75,0
2023	117,0	349,0	116,0	131,0	23,0	55,0	61,0	6,0	0,0	0,0	29,0	77,0
2024	51,0	50,0	308,0	261,0	40,0	59,0	37,0	0,0	19,0	43,0	22,0	357,0

Sumber: BMKG Kabupaten Sikka, 2025

Data curah hujan dari Pos Hujan Nangablo yang berlokasi di Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka, memperlihatkan fluktuasi musiman yang cukup mencolok selama periode 2020 hingga 2024. Beberapa puncak curah hujan terjadi pada bulan Januari 2021 sebesar 687,0 mm serta Maret 2020 dan Desember 2024 masing-masing mencapai 407,0 mm dan 357,0 mm. Sebaliknya, bulan-bulan seperti Juni hingga September secara konsisten menunjukkan intensitas rendah bahkan nihil, misalnya Juli 2020 dan Agustus 2024 yang mencatatkan 0,0 mm. Sebaran hujan di bulan April hingga Juni umumnya tidak signifikan, menunjukkan transisi menuju musim kering. Meskipun terdapat variasi antartahun, terlihat bahwa musim hujan cenderung terkonsentrasi pada kuartal pertama dan akhir tahun.

2.1.6 Demografi

Kabupaten Sikka merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki karakteristik demografi unik dengan dinamika pertumbuhan penduduk, sebaran geografis, serta struktur usia yang memengaruhi perencanaan pembangunan. Pemahaman menyeluruh tentang kondisi demografi ini menjadi dasar perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 guna memastikan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat (2) yang dimaksud dengan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Penduduk suatu negara atau daerah bisa diartikan menjadi dua, yaitu orang yang tinggal di daerah tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal atas daerah tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dalam sosiologi penduduk adalah kumpulan manusia yang telah menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk dalam suatu daerah dapat bertumbuh negatif maupun positif. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah dari penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna dalam memprediksi jumlah penduduk di suatu wilayah pada masa yang akan datang titik dengan diketahui jumlah dari penduduk maka akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk dalam aspek sosial, ekonomi maupun politik. Pertumbuhan penduduk mempengaruhi secara langsung upaya peningkatan mutu maupun manfaat sumber daya

manusia. pertumbuhan penduduk juga bisa berpengaruh terhadap kemampuan sumber daya alam untuk memberikan daya dukung dan daya tampung.

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk (jiwa) Kabupaten Sikka Menurut Kecamatan Tahun 2021-2025

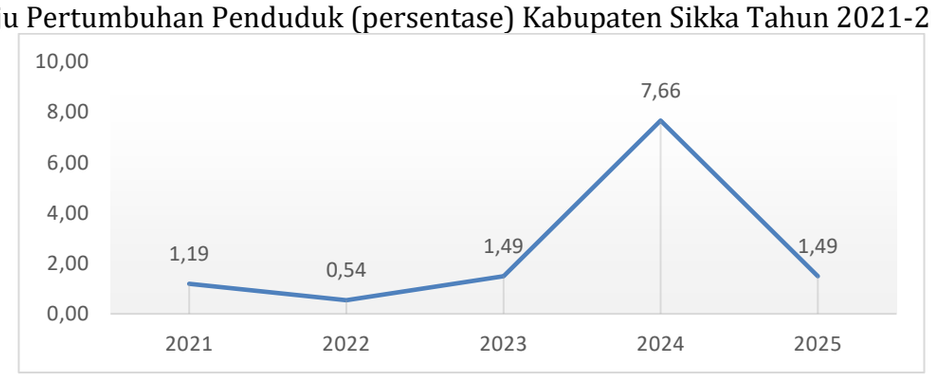
Kecamatan	2021	2022	2023	2024	2025
Paga	16.798	16.801	17.308	16.692	17.379
Mego	13.408	13.489	13.816	13.523	13.953
Tanawawo	9.101	9.219	9.572	9.169	9.351
Lela	11.835	11.803	11.949	11.821	11.995
Bola	10.933	10.829	10.893	11.010	11.174
Doreng	12.228	12.085	12.382	12.862	12.842
Mapitara	6.792	6.726	7.022	6.914	7.094
Talibura	23.392	23.401	24.436	23.477	24.251
Waigete	25.866	26.171	26.998	26.291	27.289
Waiblama	8.395	8.308	8.536	8.564	8.923
Kewapante	14.872	14.918	15.334	15.477	15.992
Hewokloang	9.548	9.541	9.691	9.409	9.711
Kangae	18.444	18.545	19.039	18.930	19.572
Palue	9.417	9.449	9.874	9.681	9.824
Koting	6.506	6.513	6.751	6.702	6.835
Nelle	6.230	6.202	6.331	6.375	6.544
Nita	22.409	22.246	22.796	23.661	24.334
Magepanda	13.225	13.477	14.152	13.358	13.822
Alok	32.483	32.524	32.673	33.261	33.751
Alok Barat	22.661	22.993	23.890	24.668	26.438
Alok Timur	32.711	32.959	33.568	33.621	34.343
Jumlah	327.254	328.199	337.011	335.360	345.319

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

Dari tabel di atas, jumlah penduduk terbanyak terdapat di kecamatan Alok Timur sebanyak 34.343 jiwa, Kecamatan Alok sebanyak 33.751 jiwa dan Kecamatan Waigete sebanyak 27.289 jiwa. Sedangkan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Nelle berjumlah 6.544 Jiwa.

Dari pertambahan penduduk Kabupaten Sikka selama antar periode tersebut yang terus meningkat jumlahnya menunjukkan laju pertumbuhan. Meskipun di tahun 2025 mengalami penurunan akan tetapi pertumbuhan ini mengindikasikan adanya dinamika demografi yang perlu diantisipasi. Laju pertambahan penduduk tersebut, pada akhirnya juga berkorelasi dengan persoalan penyediaan pangan, energi, fasilitas permukiman yang layak, pelayanan kesehatan yang memadai, fasilitas pendidikan yang berkualitas, dan bahkan subsidi BBM. Selain itu, kemampuan bumi yang terbatas juga tidak mampu secara cepat menyuplai kebutuhan manusia yang bertambah dengan cepat. Faktor alam yang menjadi bahan pertimbangan utama adalah tanah, air, dan ruang. Akibatnya, selain terjadi penurunan daya dukung lingkungan, kesejahteraan penduduk pun mengalami penurunan. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sikka dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan Penduduk (persentase) Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025



Sumber: BPS, Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

Meskipun dari segi jumlah penduduk Kabupaten Sikka secara keseluruhan mengalami kenaikan, dilihat dari angka laju pertumbuhan penduduk cenderung mengalami fluktuatif, dari tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 1,49 persen dari 0,54 pada tahun 2022. Tren peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 7,66 persen. Kemudian turun menjdai 1,49 persen pada tahun 2025. Sejak dicanangkan program KB nasional, maka laju pertumbuhan penduduk secara perlahan tapi pasti dapat ditekan secara bertahap. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sikka dari periode 2022 ke 2024 mengalami peningkatan mungkin disebabkan karena teknologi di bidang kesehatan semakin berkembang dan pemahaman masyarakat akan kesehatan semakin baik, sehingga dapat menekan angka kematian bayi.

2. Rasio Penduduk

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Perhitungan ini dapat menjadi pertimbangan untuk mengetahui dinamika kependudukan berdasarkan jenis kelamin, serta secara lebih jauh dapat diarahkan pada rasio ketergantungan (*dependency ratio*). *Sex ratio* Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk menurut Rasio Jenis Kelamin Tahun 2025

Kecamatan	Persentase Penduduk (%)	Rasio Jenis Kelamin (%)
Paga	5,03	95
Mego	4,04	95
Tanawawo	2,71	103
Lela	3,47	93
Bola	3,24	90
Doreng	3,72	94
Mapitara	2,05	97
Talibura	7,02	94
Waigete	7,90	95
Waiblama	2,58	102
Kewapante	4,62	89
Hewokloang	2,81	92
Kangae	5,67	91
Palue	2,84	90
Koting	1,98	96
Nelle	1,90	91
Nita	7,05	103
Magepanda	4,00	93
Alok	9,77	97
Alok Barat	7,66	98
Alok Timur	9,92	96
Total		95,11

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata *sex ratio* Kabupaten Sikka adalah sebesar 95,11 yang berarti dari setiap 100 penduduk perempuan hanya terdapat sekitar 94-95 penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Jika diamati masing-masing kecamatan, maka terlihat bahwa *sex ratio* tertinggi terdapat di Kecamatan Nita dan Kecamatan Tanawawo yaitu 103. Sementara itu, *sex ratio* paling rendah terdapat di Kecamatan Kewapante yaitu sebesar 89.

Administrasi Kependudukan sebagai sistem pengelolaan dan pemeliharaan data penduduk. Tentunya ini mencakup berbagai kegiatan terkait dengan identifikasi, registrasi, dan pemeliharaan catatan tentang individu yang tinggal di suatu wilayah khususnya di Kabupaten Sikka, termasuk penduduk asli, pendatang, serta mereka yang lahir atau meninggal di wilayah tersebut. Administrasi kependudukan juga meliputi pemberian dan pemeliharaan dokumen-dokumen identifikasi resmi, seperti kartu identitas, akte kelahiran,

dan lain sebagainya. Capaian kinerja pelayanan kependudukan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.15
Capaian Kinerja Pelayanan Kependudukan Tahun 2021-2025

No.	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Rasio penduduk ber-KTP	94,34	95,5	99,03	99,44	100
2.	Rasio anak 0-17 yang memiliki akte Kelahiran	86,04	85,08	85,27	87,34	92,90
3.	Rasio pasangan berakte nikah	49,15	51,62	53,60	55,69	58,35
4.	Kepemilikan KTP	214.290	226.210	242.040	245.940	338.862
5.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	461:1000	464:1000	464:1000	160.524	167.774
6.	Rasio anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	*)	34,96	36,63	40,76	45,11
7.	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Ada (1)	Ada (1)	Ada (1)	Ada	Ada
8.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

*Keterangan : *) = tidak dilakukan perhitungan*
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, 2026

Tabel 2.16
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sikka Tahun 2025

Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Kepadatan Penduduk Per km^2
Paga	76,23	17.379	227,99
Mego	81,52	13.953	138,71
Tanawawo	100,59	9.351	114,70
Lela	45,47	11.995	263,82
Bola	43,97	11.174	254,15
Doreng	54,43	12.842	235,92
Mapitara	83,28	7.094	85,18
Talibura	273,07	24.251	88,81
Waigete	141,28	27.289	120,34
Waiblama	226,76	8.923	63,16
Kewapante	22,89	15.992	698,73
Hewokloang	19,33	9.711	502,37
Kangae	39,24	19.572	498,83
Palue	13,42	9.824	255,47
Koting	16,62	6.835	411,17
Nelle	38,46	6.544	487,70
Nita	117,27	24.334	207,51
Magepanda	130,10	13.822	106,24
Alok	19,37	33.751	1.742,09
Alok Barat	48,84	26.438	541,34
Alok Timur	74,46	34.345	459,93
Jumlah	1.675,36	345.319	206,12

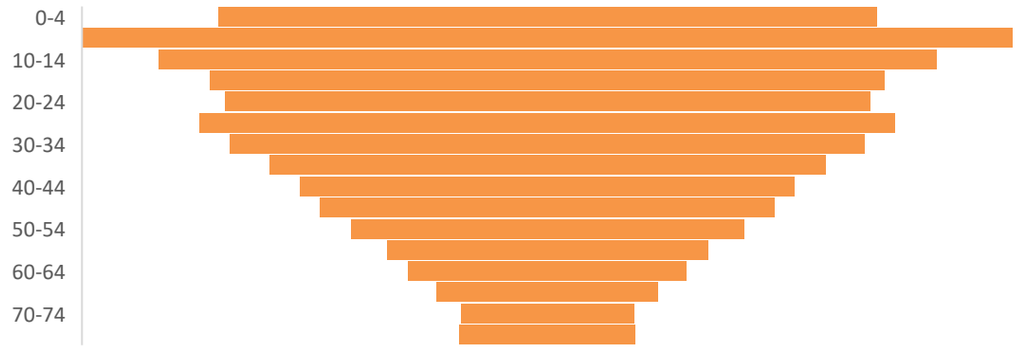
Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

Dari tabel di atas, kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Sikka menunjukkan kepadatan penduduk yang signifikan, dimana kecamatan Alok menjadi kecamatan terpadat dengan 1.742,09 jiwa per km2 dan kecamatan Kewapante juga memiliki kepadatan yang sangat tinggi, yaitu 698,73 jiwa per km2. Beberapa kecamatan seperti Lela (263,82 jiwa/km2), Palue (255,47 jiwa/km2), Bola (254,15 jiwa/km2), Doreng (235,92 jiwa/km2), dan Paga (227,99 jiwa/km2) menunjukkan kepadatan di atas rata-rata kabupaten namun tidak setinggi area perkotaan. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan relatif rendah, yaitu Waiblama (63,16 jiwa/km2), Mapitara (85,18 jiwa/km2), Talibura (88,81 jiwa/km2), Magepanda (106,24 jiwa/km2), dan Tanawawo (114,7 jiwa/km2) memiliki kepadatan penduduk yang jauh di bawah rata-rata kabupaten. Wilayah ini umumnya memiliki karakteristik geografis yang lebih luas atau topografi yang menantang.

1) Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Komposisi penduduk adalah perbandingan atau susunan penduduk berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara lain kelompok umur, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan dan ekonomi. Komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.2
Piramida Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2025



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka 2026

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan, jumlah penduduk terbanyak adalah kelompok umur 5-9 tahun diikuti 10-14 tahun diikuti 25-29 tahun dan 15-19 tahun. Jumlah penduduk paling sedikit adalah kelompok umur 70-74 tahun. Usia produktif di Kabupaten Sikka pada kelompok umur 15-64 tahun sebanyak 108.878 jiwa atau sekitar 63,67 persen dan jumlah penduduk usia non produktif sebanyak 62.131 jiwa atau sekitar 36,33 persen.

2) Penduduk Menurut Jenis Kegiatan

Penduduk Kabupaten Sikka yang tergolong angkatan kerja sebanyak 178.805 dari jumlah usia angkatan kerja Kabupaten Sikka dengan komposisi laki-laki sebanyak 95.655 atau 53,4 persen dan perempuan sebanyak 80.692 atau 46,6 persen. Pada usia angkatan kerja terdapat pula Pengangguran terbuka sebanyak 2.235 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang bukan merupakan angkatan kerja di Kabupaten Sikka sebanyak 69.386.

Tabel 2.17
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas (jiwa) menurut Jenis Kegiatan di Tahun 2025

Kegiatan Utama	Laki laki	Perempuan	Jumlah
I. Angkatan Kerja	95.655	83.150	178.805
Bekerja/Working	93.420	80.692	174.112
Pengangguran Terbuka	2.235	2.458	4.693
II. Bukan Angkatan Kerja	23.022	46.364	69.386
Sekolah/Attending School	9.861	10.542	20.403
Mengurus Rumah Tangga	2.434	30.535	32.969
Lainnya/Others	10.727	5.287	16.014
Jumlah	118.677	129.514	248.191

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

3) Penduduk Menurut Agama

Komposisi penduduk menurut agama digunakan sebagai dasar untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan. Secara umum terdapat lima agama di Kabupaten Sikka yaitu Katolik, Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Jumlah penduduk menurut agama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18
Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut (jiwa) Per Kecamatan Tahun 2025

Kecamatan	Islam	Protestan	Katholik	Hindu	Budha	Konghucu	Lainnya	Jumlah
PAGA	836	34	16.877	5	-	-	1	17.753
MEGO	194	81	14.325	-	-	-	-	14.600
LELA	7	10	10.002	-	-	-	-	10.019
NITA	20	40	12.133	5	-	-	-	12.198
ALOK	8	24	11.142	-	1	-	-	11.175
PALUE	35	30	12.947	-	-	-	-	13.012
NELLE	12	15	7.505	-	-	-	-	7.532
TALIBURA	4.641	112	21.016	1	-	-	-	25.770
WAIGETE	464	156	27.416	-	-	-	-	28.036
KEWAPANTE	23	17	9.090	-	-	-	-	9.130
BOLA	1.430	230	14.169	4	8	-	-	15.841
MAGEPANDA	33	17	10.035	-	-	-	1	10.086
WAIBLAMA	1.210	277	18.287	6	1	-	-	19.781
ALOK BARAT	7	43	10.420	1	-	-	-	10.471
ALOK TIMUR	19	33	6.710	-	-	-	-	6.762
KOTING	26	42	6.310	7	-	-	-	6.385
TANAWAWO	60	83	23.666	-	-	-	-	23.809
HEWOKLOANG	1.485	80	13.364	1	-	-	-	14.930
KANGAE	10.383	1.186	21.735	40	21	1	-	33.366
DORENG	8.179	1.164	15.711	14	1	-	1	25.070
MAPITARA	7.242	2.208	25.408	98	32	1	-	34.989
	36.314	5.882	308.268	182	64	2	3	350.715

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementrian Dalam Negeri Semester II Tahun 2025

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk menurut agama yang dianut di Kabupaten Sikka berturut-turut dari yang terbanyak sebagai berikut, Katolik sebanyak 87,90 persen, Islam sebanyak 10,35 persen, Protestan sebanyak 1,68 persen, Hindu sebanyak 0,05 persen, Budha sebanyak 0,02 persen dan Konghucu 0,001 persen. Pada 21 kecamatan memiliki penduduk dengan agama yang dianut beragama. Walau adanya keberagaman agama di Kabupaten Sikka, akan tetapi kerukunan antarumat beragama senantiasa terjaga.

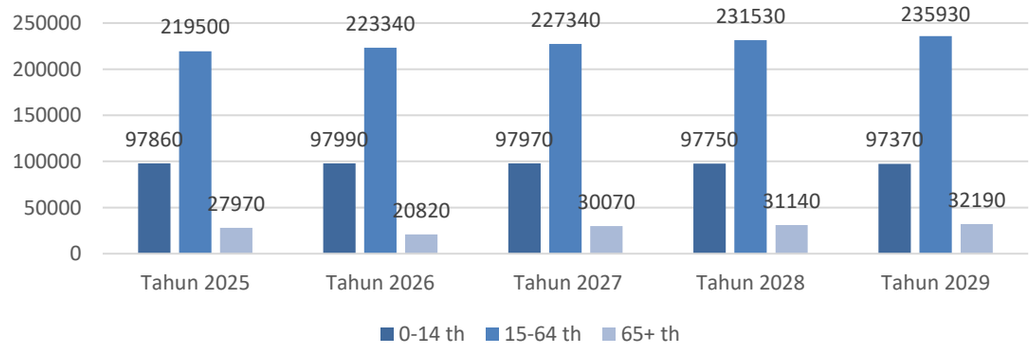
3) Bonus Demografi

Pemanfaatan bonus demografi harus maksimal dengan merealisasikan pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bonus demografi merujuk pada periode ketika jumlah penduduk usia produktif dalam rentang usia 15-64 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif seperti anak-anak dan lansia. Kabupaten Sikka berpotensi untuk memanfaatkan bonus demografi ini sebagai peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Dengan manajemen bonus demografi yang baik agar menciptakan potensi ekonomi dapat dimanfaatkan secara maksimal, termasuk dalam hal pendidikan, pelatihan, penciptaan lapangan kerja, dan penyediaan layanan sosial yang memadai.

Komposisi penduduk menurut umur juga menginformasikan tentang rasio ketergantungan, yaitu perbandingan komposisi usia non produktif dengan usia produktif. Indikator ini mengindikasikan daya dukung antar generasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial, yaitu menghubungkan kelompok yang berpotensi untuk bergantung dengan kelompok yang aktif secara ekonomi. Indikator ini juga dapat dirinci menurut kelompok umur, yaitu kelompok anak-anak dan usia lanjut. Dalam metode Cheung et al. (2003) suatu negara atau daerah dinyatakan telah mengalami bonus demografi ketika rasio ketergantungan (*dependency ratio*) berada di bawah 50. Berdasarkan proyeksi

kependudukan Kabupaten Sikka, komposisi penduduk produktif dan nonproduktif pada periode 2025-2029 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.3
Proyeksi Komposisi Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif (jiwa) Tahun 2025-2029



Sumber: Rantek RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

Dari proyeksi komposisi penduduk diperkirakan bahwa dalam periode tersebut Kabupaten Sikka akan masuk dalam bonus demografi. Dari sisi ekonomi, persentase usia produktif yang tinggi menandakan adanya potensi ekonomi yang besar. Jika dimanfaatkan dengan baik, potensi tenaga kerja yang besar ini dapat menjadi dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Sikka. Dengan mayoritas penduduk berada dalam usia produktif, ada peluang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi 2 (dua) fokus yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dan fokus pada kesejahteraan sosial. Berikut data dan analisis atas kedua fokus tersebut.

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

1. Struktur Ekonomi Wilayah

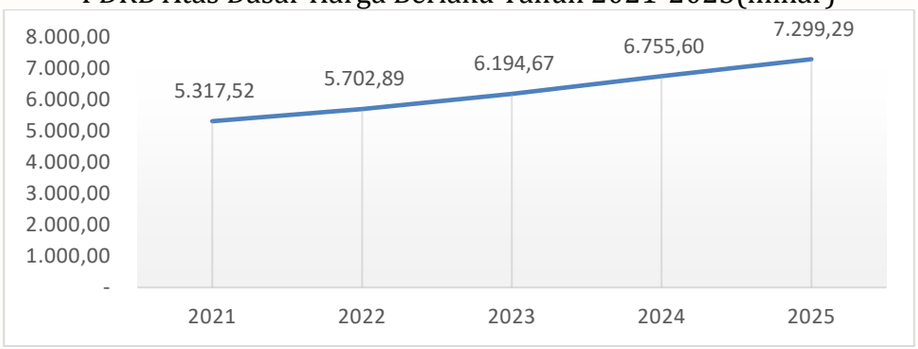
Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor usaha. Indikator-indikator lain yang tidak kalah penting antara lain inflasi, kemiskinan, investasi, nilai tukar, dan lain-lain. Analisis ekonomi daerah dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah. Penjabaran lebih lanjut mengenai indikator-indikator ekonomi daerah sebagai berikut:

2. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan ekonomi dari masyarakat dalam wilayah domestik suatu daerah. PDRB terdiri dari:

a) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
   PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun perhitungan. PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.4
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021-2025(miliar)



Sumber Data : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 mengalami peningkatan. PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun 2021 sebesar Rp5.317,52,- miliar mengalami kenaikan pada Tahun 2022 menjadi sebesar Rp5.702,89,- miliar pada tahun 2023 meningkat lagi menjadi Rp6.194,67, miliar pada tahun 2024 naik menjadi sebesar Rp6.755,60 miliar dan pada Tahun 2025 naik menjadi sebesar Rp7.299,29 miliar.

b) PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

PDRB ADHK dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Selanjutnya Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.5
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2021-2025 (miliar)



Sumber : Data Olahan dari Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

PDRB ADHK Kabupaten Sikka dari Tahun 2021-2025 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2021 PDRB ADHK sebesar Rp3.375,93 triliun mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp3.489,47, triliun naik pada Tahun 2023 menjadi sebesar Rp3.620,86 triliun dan naik pada tahun 2024 sebesar Rp3.763,88 triliun dan naik lagi pada tahun 2025 menjadi sebesar Rp3.955,83.

c) Pembentukan Sektor dalam PDRB

Pembentukan Nilai PDRB dari masing-masing Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.19
Nilai Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2021-2025

No	Sektor	Nilai (Rp. Juta)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.203.838,17	1.255.464,77	1.309.050	1.351.600	1.415.020
2	Pertambangan dan Penggalian	45.765,52	46.792,06	47.770	49,410	48,82
3	Industri Pengolahan	54.780,10	58.362,76	62,760	65,170	73,79

4	Pengadaan Listrik dan Gas	4.591,35	4.670,87	5.200	5,670	5,84
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.757,46	3.788,48	3.850	3,920	3,92
6	Konstruksi	173.110,78	174.588,89	188.310	192,860	186,63
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	362.122,77	387.588,56	409.900	447,160	493,77
8	Transportasi dan Pergudangan	178.803,10	186.938,10	191.300	182,870	213,39
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	20.946,90	22.067,05	23.530	24,750	27,16
10	Informasi dan Komunikasi	315.765,87	331.317,48	344.760	360,250	365,90
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	113.940,61	114.825,90	115..740	119,500	126,29
12	Real Estate	68.829,71	71.260,99	73.690	76,500	77,39
13	Jasa Perusahaan	5611,22	5772,34	6.120	6,460	6,81
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	426.170,20	427.024,36	427.570	443,730	457,09
15	Jasa Pendidikan	284.115,88	283.636,58	292.000	309,850	326,40
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	72.695,28	73.963,49	75.470	78,810	81,09
17	Jasa lainnya	41.186,00	41.761,91	43.800	45,360	46,52
	PDRB	**3.376.030,93**	**3.489.820**	**3.620.860**	**3.763.880**	**3.955.830**

Sumber: *Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026*

Dilihat dari sumber pembentuknya, PDRB Kabupaten Sikka hingga saat ini masih didominasi oleh sektor pertanian, dengan nilai sekitar Rp1,4 triliun lebih. Hal ini dapat dilihat dari Nilai Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2025, Nilai sektor sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp1.415,020 triliun, disusul sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp493,770,- dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp457,090 triliun. Sedangkan nilai sektor yang paling kecil pada sektor Jasa Perusahaan sebesar Rp6.810 triliun, sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar Rp5.840 triliun dan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar Rp3.920 triliun.

Dari Besaran pembentukan Nilai PDRB dari masing-masing Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 secara Persentase dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.20
Persentase Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021-2025

No	Sektor	Kontribusi (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	37,43	38,17	38,53	38,51	38,08
2	Pertambangan dan Penggalian	1,12	1,09	1,04	0,99	0,9
3	Industri Pengolahan	1,7	1,71	1,84	1,85	2,04
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,13	0,14	0,13	0,13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07
6	Konstruksi	4,76	4,71	4,85	4,62	4,35
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,36	10,79	11,12	11,41	11,89
8	Transportasi dan Pergudangan	5,06	5,39	5,57	4,97	5,58
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,62	0,62	0,62	0,61	0,62
10	Informasi dan Komunikasi	6,3	6,19	5,96	5,88	5,63
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,92	3,95	3,75	3,61	3,59
12	Real Estate	1,91	2	2,06	2,17	2,14
13	Jasa Perusahaan	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17

No	Sektor	Kontribusi (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,86	12,08	11,55	11,88	11,61
15	Jasa Pendidikan	10,17	9,65	9,41	9,63	9,72
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,24	2,14	2,19	2,39	2,4
17	Jasa lainnya	1,16	1,13	1,11	1,1	1,08
	PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: *Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026*

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa kontribusi PDRB Kabupaten Sikka hingga tahun 2025 masih didominasi dari sektor pertanian sebesar 38,08%, disusul sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencapai 11,89%, dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,61%. Sedangkan kontribusi sektor yang paling kecil pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,07%, sektor Jasa Perusahaan sebesar 0,17% dan sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,13%.

3. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita dihitung dengan membagi total pendapatan (seperti Produk Domestik Bruto/PDB) dengan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita Kabupaten Sikka dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami kenaikan.

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan tren peningkatan di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dan secara nasional selama periode 2020 hingga 2024. Namun, jika dibandingkan secara relatif, PDRB per kapita Kabupaten Sikka masih tertinggal cukup signifikan dibandingkan dengan Provinsi NTT maupun rata-rata nasional. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.21
Pendapatan Per Kapita Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024
(juta rupiah)

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Sikka	15,9	16,3	17,3	18,5	19,9
Provinsi Nusa Tenggara Timur	20,1	20,6	21,7	23,1	24,3
Nasional	57,2	62,3	71	75	78,6

Sumber: Data BPS, 2025

Dari data diatas terlihat pada tahun 2020, PDRB per kapita Kabupaten Sikka tercatat sebesar Rp15,9 juta, sedikit di bawah rata-rata provinsi sebesar Rp20,1 juta, dan jauh di bawah angka nasional sebesar Rp 57,2 juta. Ketimpangan ini berlanjut hingga tahun 2024, meskipun terjadi peningkatan nilai PDRB per kapita di semua level. Pada 2024, Sikka mencatat Rp19,9 juta, sedangkan Provinsi NTT Rp24,3 juta, dan nasional Rp 78,6 juta.

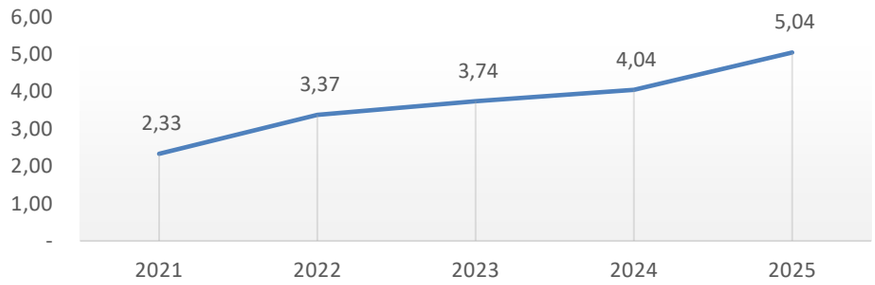
Pertumbuhan tahunan PDRB per kapita Sikka relatif stabil, dengan peningkatan sekitar Rp1 juta per tahun. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aktivitas ekonomi dan distribusi pendapatan di wilayah tersebut, meskipun lajunya masih lebih lambat dibandingkan pertumbuhan pendapatan rata-rata nasional. Gap antara Sikka dan rata-rata nasional yang mencapai hampir Rp 59 juta pada 2024 menunjukkan tantangan besar dalam mempersempit kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti struktur ekonomi yang masih dominan di sektor primer, rendahnya industrialisasi dan hilirisasi, serta terbatasnya akses terhadap pasar dan infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, perlu ada strategi pembangunan ekonomi yang lebih agresif dan inklusif di Sikka untuk mendorong nilai tambah sektor-sektor potensial dan memperkuat daya saing lokal.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka selama periode tahun 2021–2025 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 sebesar 2,33%, meningkat pada tahun 2022 sebesar 3,37%. Pada tahun 2023 meningkat sebesar 3,74%, dan meningkat menjadi 4,04% pada tahun 2024. Pada Tahun 2025 meningkat sebesar 5,04%.

Grafik 2.6
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka dilihat dari Pertumbuhan masing-masing sektor PDRB menurut sektor/lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.22
Laju Pertumbuhan PDRB (persentase) Menurut Sektor/Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,58	4,24	4,32	3,25	4,54
2.	Pertambangan dan Penggalian	2,16	2,24	2,1	3,42	-1,25
3.	Industri Pengolahan	0,95	6,54	7,53	3,84	13,09
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	6,12	1,73	11,28	9,16	2,09
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,71	0,83	1,73	1,65	0,12
6.	Konstruksi	2,54	0,85	7,86	2,42	-3,23
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,42	7,03	5,71	9,2	10,42
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,11	4,5	2,33	-4,41	16,69
9.	Penyediaan Akomodasi makan dan Minum	3,63	5,35	6,19	5,21	10,13
10.	Informasi dan Komunikasi	4,46	4,93	4,06	4,49	1,57
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,77	0,78	0,79	3,25	5,66
12.	Real Estate	2,95	3,53	3,41	3,81	1,16
13.	Jasa Perusahaan	-10,12	2,87	6,09	5,5	5,39
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,11	0,2	0,13	3,78	3
15.	Jasa Pendidikan	-1,61	-0,17	2,96	5,95	5,34
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,57	1,74	2,04	4,43	2,9
17.	Jasa Lainnya	-4,35	1,4	4,87	3,58	2,54
	Total	2,13	3,37	3,77	3,95	5,04

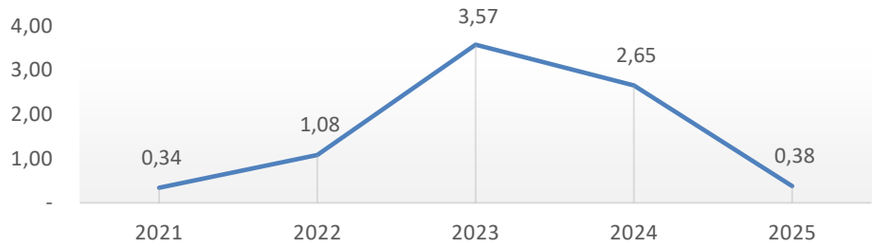
Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dari masing-masing sektor lapangan usaha kontribusi PDRB Kabupaten Sikka tahun 2025 tertinggi pada sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 16,69, meningkat dari Tahun 2024 sebesar -4,41. Sedangkan sektor Konstruksi mengalami perlambatan, pada Tahun 2024 sebesar 2,42 menurun menjadi -3,23 pada Tahun 2025.

5. Inflasi

Inflasi adalah proses kenaikan harga barang-barang secara umum. Apabila terjadi kenaikan harga barang (inflasi) tanpa dibarengi dengan kenaikan pendapatan masyarakat, maka akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan akibatnya adalah terjadinya kemacetan transaksi yang selanjutnya akan berdampak pada sektor produksi dan perekonomian secara keseluruhan.

Grafik 2.7
Inflasi Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 (Persentase)



Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa inflasi Kabupaten Sikka mengalami fluktuatif. Pada tahun 2021 inflasi sebesar sebesar 0,34 persen. Pada tahun 2022 naik menjadi sebesar 1,08 persen, naik lagi pada tahun 2023 menjadi sebesar 3,57 persen dan turun pada tahun 2024 menjadi sebesar 2,56 persen. Pada tahun 2025 turun menjadi sebesar 0,38 persen.

Jika dibandingkan dengan Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2024 sebesar 0,47 dan Nasional sebesar 1,57, maka Inflasi Kabupaten Sikka masih terlalu tinggi. Perbandingan Inflasi Kabupaten Sikka dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.23
Inflasi Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2021-2025 (persentase)

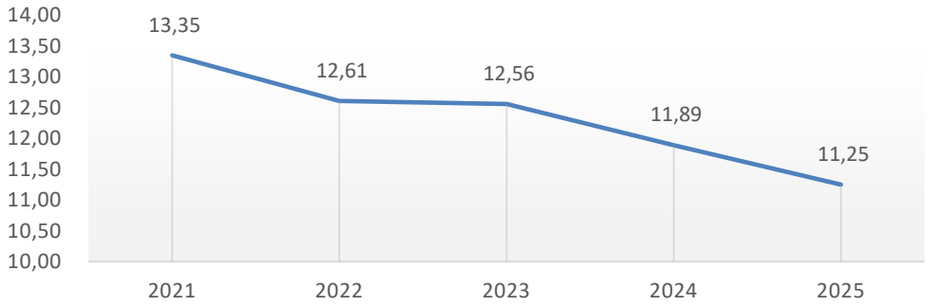
No	Wilayah	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kabupaten Sikka	0,34	1,08	3,57	2,65	0,38
2.	Provinsi NTT	1,67	6,65	2,42	0,47	2,39
3.	Nasional	1,87	5,51	2,61	1,57	2,92

Sumber : NTT dalam Angka, 2026

6. Angka Kemiskinan

Kesuksesan pembangunan dapat diukur dengan angka kemiskinan yang dihitung berdasarkan persentase orang miskin di suatu wilayah. Persentase orang miskin di Kabupaten Sikka lebih rendah dibandingkan dengan tingkat provinsi, namun lebih tinggi dari nasional. Jika dibandingkan dengan penurunan kemiskinan di tingkat provinsi dan nasional, penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sikka mengalami perkembangan yang positif. Kabupaten Sikka relatif mampu bertahan dengan lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi di provinsi, terutama karena daerah ini memiliki basis ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian di wilayah pedesaan. Hal Ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah dengan basis pertanian cenderung lebih kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi dibandingkan dengan wilayah yang bergantung pada sektor perdagangan maupun industri.

Grafik 2.8
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

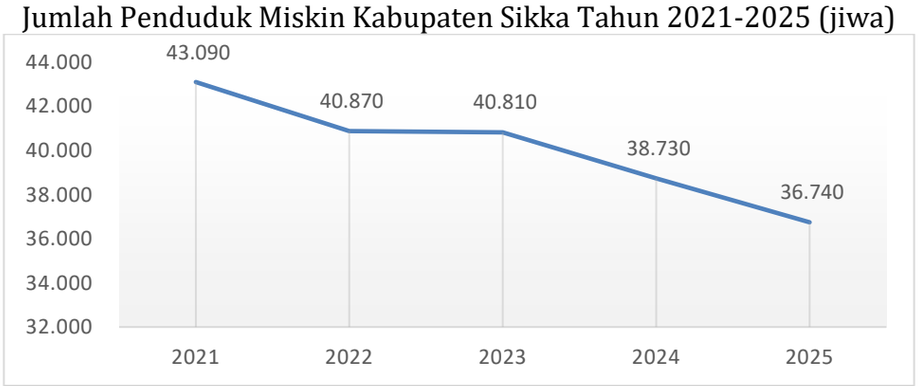


Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026 (diolah)

Dari grafik di atas dapat dijelaskan, untuk persentase penduduk miskin di Kabupaten Sikka menunjukkan adanya tren penurunan dalam periode 2021-2025. Pada tahun 2021 angka kemiskinan sebesar 13,35 persen. Namun, setelah tahun 2022, Kabupaten Sikka berhasil menunjukkan tren positif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2022, persentase penduduk miskin menurun signifikan menjadi 12,61 persen, dan berlanjut meskipun sedikit melambat di tahun 2023 menjadi 12,56 persen. Pencapaian paling baik terlihat pada tahun 2024, di mana persentase penduduk miskin Kabupaten Sikka berhasil ditekan hingga mencapai 11,89 persen dan tahun 2025 menjadi 11,25 persen. Angka ini merupakan yang terendah dalam periode 2021-2025.

Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Sikka terlihat kesesuaian antara persentase kemiskinan yang menunjukkan mengalami puncak peningkatan pada tahun 2021 sebesar 43.090 jiwa, kemudian pada tahun 2022 secara agregat menurun menjadi 40.870 jiwa. Pada Tahun 2023 menurun sebesar 40.810, dan pada tahun 2024 dan tahun 2025 menurun menjadi 36.740 jiwa yang dapat dilihat pada grafik berikut.

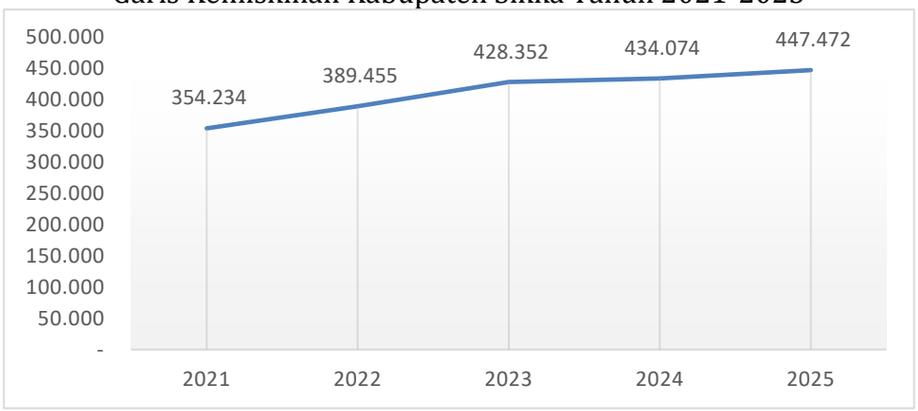
Grafik 2.9
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 (jiwa)



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

Garis kemiskinan Kabupaten Sikka pada tahun 2025 sebesar Rp 447.472, hal ini menunjukkan setiap individu di Kabupaten Sikka yang memiliki pengeluaran atau pendapatan rata-rata per kapita per bulan di bawah Rp 447.472 dianggap sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan (GK) adalah ambang batas pendapatan minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, baik pangan maupun non-pangan, dalam periode waktu tertentu (biasanya satu bulan). Seseorang atau rumah tangga dikategorikan miskin jika pendapatannya berada di bawah Garis Kemiskinan.

Grafik 2.10
Garis Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025



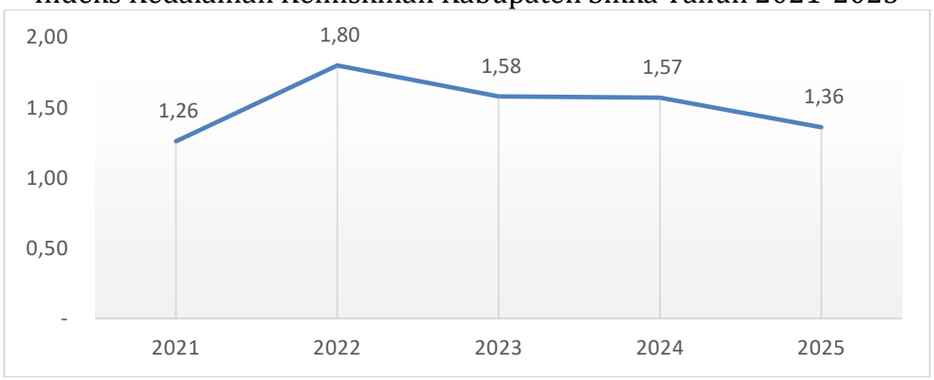
Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka 2026

Dengan demikian, jika dibuat perbandingan antara daya beli masyarakat dari rata-rata pengeluaran perkapita masyarakat Sikka yang terus meningkat dan mencapai Rp 956.113 pada tahun 2025 dengan garis kemiskinan Kabupaten Sikka sebesar Rp 447.472, maka seharusnya Angka kemiskinan di Kabupaten Sikka sudah mampu diatasi dengan cukup baik. Namun, angka garis kemiskinan di Kabupaten Sikka yang tiap tahun terus-menerus meningkat membuat daya beli masyarakat miskin menjadi lebih rendah yang berakibatkan ketidakberdayaan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketidakharmonisan antara Jumlah pendapatan perkapita dengan garis kemiskinan secara langsung akan mengakibatkan bertambahnya jumlah orang miskin di Kabupaten Sikka dengan demikian Pemerintah Kabupaten Sikka harus merancang strategi yang ideal dalam mengentaskan kemiskinan di daerahnya.

Kekurangan kedua berkaitan dengan keterlibatan dalam proses pengambilan kebijakan, di mana kebanyakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak melibatkan partisipasi dari golongan miskin yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Keterbatasan partisipasi dari pihak yang terkena dampak kebijakan menyebabkan ketidakcocokan antara kebutuhan yang sebenarnya dan kebijakan yang diterapkan. Akibatnya, kebijakan tersebut seringkali gagal mencapai tujuan yang diharapkan, meskipun telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pelaksanaannya. Dengan demikian, penyesuaian antara kebutuhan dan pemberian akan menjadi solutif yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan berdasarkan keterlibatan dari objek kebijakan.

Ketiga adalah *vulnerability* atau kerentanan terhadap kemiskinan. Dalam konteks ini, kerentanan terhadap kemiskinan terkait dengan kelompok masyarakat yang berada di atas garis kemiskinan tetapi sangat rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan karena perubahan yang terjadi, dikenal sebagai kelompok near poor. Namun demikian data mengenai kelompok *near poor* ini tidak tersedia, untuk itu kerentanan didekati melalui dua mekanisme, yakni Angka kedalaman kemiskinan dan Angka keparahan kemiskinan. Semakin dalam Angka kemiskinan dan keparahan kemiskinan maka akan semakin banyak orang yang berada pada jalur kerentanan. Persoalan kemiskinan bukan hanya tentang jumlah dan persentase penduduk miskin, oleh karena itu perlu diperhatikan juga indeks kedalaman (*Poverty gap index*) dan indeks keparahan (*poverty severity index*). Dengan demikian, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan atas kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan.

Grafik 2.11
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

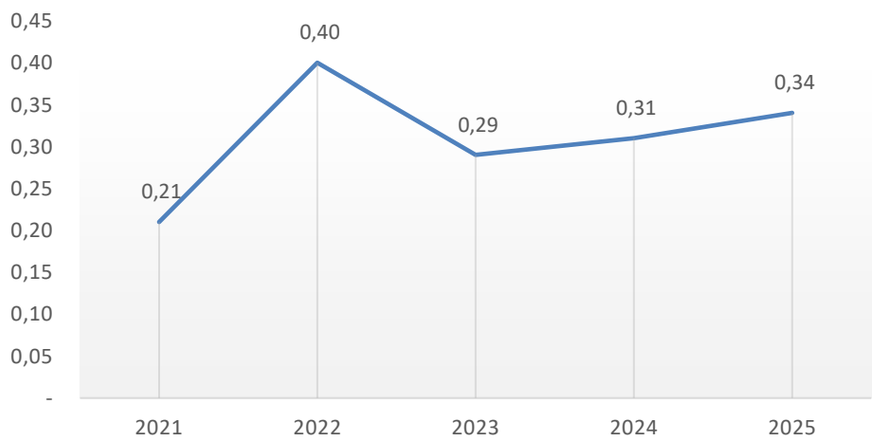


Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka 2026

Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*) dan Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*) memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi kemiskinan di suatu wilayah. Indeks kedalaman kemiskinan mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Sikka menunjukkan fluktuasi namun dengan tren penurunan secara keseluruhan. Pada tahun 2021, indeks kedalaman kemiskinan tercatat sebesar 1,26 yang menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, rata-rata pengeluaran penduduk miskin lebih dekat ke garis kemiskinan dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian, nilai indeks sedikit meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 1,80 yang berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin kembali menjauh dari garis kemiskinan. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan kembali menjadi 1,58 dan terus menurun tipis menjadi 1,57 pada tahun 2024, dan Tahun 2025 menurun menjadi 1,36.

Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan mengukur distribusi pengeluaran diantara penduduk miskin, yang mencerminkan seberapa parah ketimpangan di antara penduduk miskin itu sendiri. Semakin tinggi kedalaman kemiskinan yang dimiliki, akan semakin lebar pula kesenjangan kemiskinan yang menyebabkan banyak orang yang masuk pada kategori rentan. Pada tahun 2021, indeks keparahan kemiskinan berada di angka 0,21 dan naik pada tahun 2022 menjadi 0,40. Pada tahun 2023 terjadi penurunan signifikan kembali menjadi 0,29 dan pada tahun 2024, indeks sedikit meningkat menjadi 0,31 dan pada tahun 2025 diangka 0,34. Indeks keparahan kemiskinan di wilayah Kabupaten Sikka yang dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.12
Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

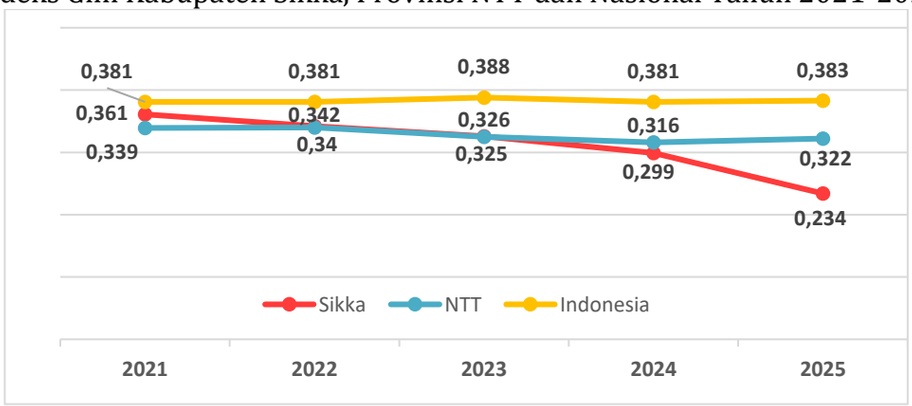


Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka 2026 (diolah)

7. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu wilayah. Rasio Gini erat berkaitan dengan corak dan karakter ekonomi yang mewarnai suatu daerah. Rasio Gini menghasilkan angka antara 0 dan 1, dimana nilai 0 mengindikasikan adanya kesetaraan sempurna, sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan ekstrem. Pada tahun 2021, koefisien Gini Kabupaten Sikka tercatat sebesar 0,361, sedikit lebih tinggi dengan rata-rata provinsi sebesar 0,339 dan lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 0,381. Namun hingga tahun 2025 angga ketimpangan di Sikka terus menurun secara konsisten hingga mencapai 0,234 yang berarti bahwa Tingkat ketimpangan pendapatan di Sikka lebih rendah dari rata-rata Provinsi (0,322) maupun nasional (0,383) Hal tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.13
Indeks Gini Kabupaten Sikka, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2021-2025



Sumber: BPS, 2026

Pemerataan pendapatan di Kabupaten Sikka Semakin membaik dan lebih baik dari angka nasional maupun provinsi. Penurunan koefisien Gini di Sikka mengindikasikan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan, atau dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi mulai lebih merata di antara kelompok masyarakat. Hal ini bisa disebabkan oleh peningkatan akses terhadap sumber penghidupan, pemerataan bantuan sosial atau subsidi, atau peningkatan produktivitas ekonomi di sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja dalam skala luas seperti pertanian, perdagangan kecil, dan jasa informal.

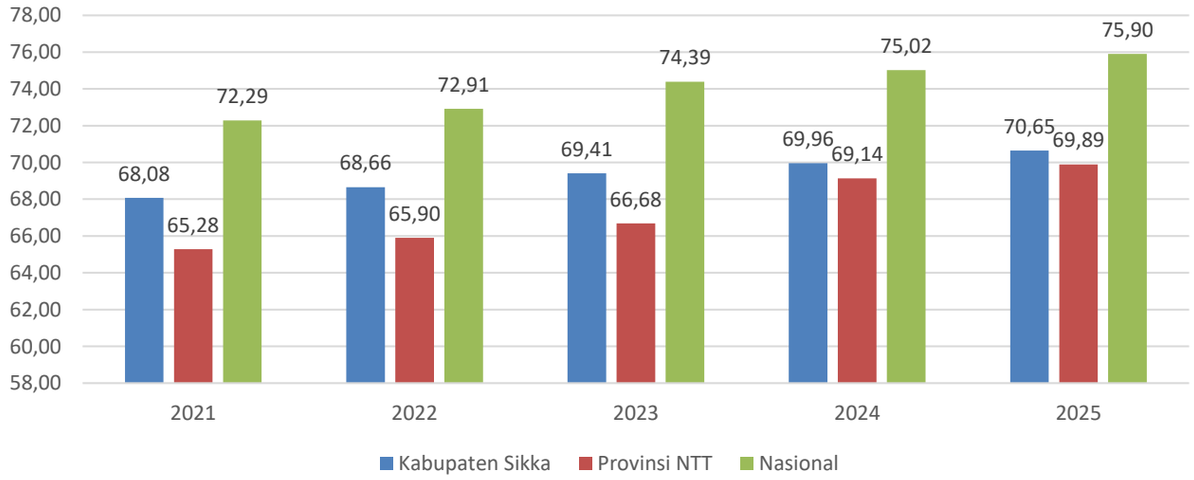
Sebaliknya, angka nasional relatif stabil di sekitar 0,38 selama lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa secara umum ketimpangan pendapatan belum menunjukkan perubahan berarti di tingkat nasional. Namun demikian, meskipun ketimpangan menurun, angka 0,234 di Kabupaten Sikka belum berarti bahwa distribusi pendapatan sudah ideal. Angka ini masih mengindikasikan adanya kesenjangan, meskipun tidak ekstrim. Untuk itu, penguatan ekonomi lokal yang inklusif tetap diperlukan, khususnya melalui pengembangan UMKM, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan kerja, serta perluasan lapangan kerja yang berkualitas.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dalam kerangka kualitas hidup manusia, untuk mencapai kualitas hidup manusia yang baik memerlukan prasyarat pendukung yang mencakup komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaan, keterlibatan pemerintah dan lintas-sektor, serta kapasitas untuk melaksanakannya. Kualitas hidup manusia perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi yang antara lain ditandai dengan meningkatnya IPM. IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

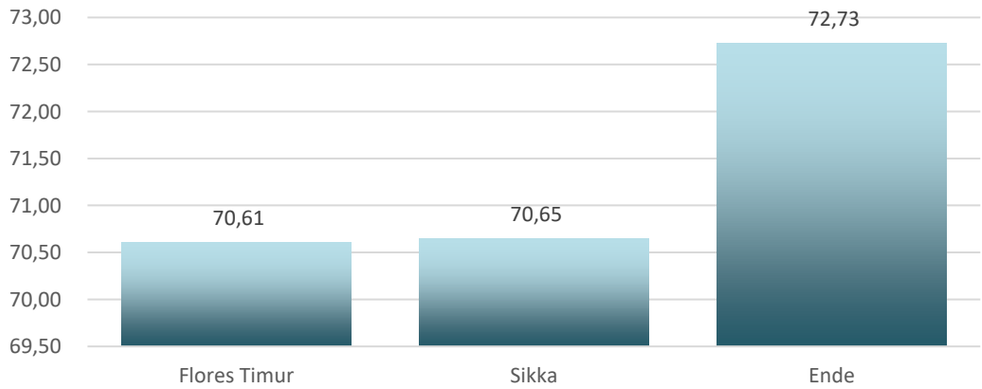
Grafik 2.14
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021-2025



Sumber: BPS, Kabupaten Sikka Dalam Angka 2026, Provinsi NTT Dalam Angka 2026, Statistik Indonesia 2021-2025

IPM Kabupaten Sikka pada tahun 2025 sebesar 70,65 dengan kenaikan sebesar 0,69 poin dari capaian tahun sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sikka tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi NTT dan lebih rendah dibandingkan IPM Nasional.

Grafik 2.15
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sikka, Ende dan Flores Timur 2025



IPM Kabupaten Sikka pada tahun 2025 lebih tinggi Jika dibandingkan dengan Kabupaten Flores Timur, dan masih lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Ende sebesar.

Kualitas pembangunan manusia diukur dengan sejumlah komponen dasar yaitu, yaitu pendidikan, kesehatan dan hidup yang layak. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mewakili dimensi pendidikan, kualitas hidup yaitu angka harapan hidup mewakili dimensi kesehatan, dan rata-rata pengeluaran per kapita mewakili dimensi hidup layak. Ringkasan capaian dari faktor pembentuk IPM di Kabupaten Sikka dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.24
Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya
Tahun 2021-2025

No	Komponen	2021	2022	2023	2024	2025
1	Angka Harapan Hidup	73,49	73,75	73,97	74,24	74,64
2	Rata-Rata Lama Sekolah	8,24	8,67	9,18	9,22	9,39
3	Angka Harapan Lama Sekolah	13,43	13,44	15,97	16,01	16,17

No	Komponen	2021	2022	2023	2024	2025
4	Usia Harapan Hidup	67,45	67,86	73,97	74,24	74,64
5	Pengeluaran per Kapita (Rp.000)	8.021,00	8.362,00	8.678,00	923.314,70	956.113
6.	IPM	68,08	68,66	69,41	69,96	70,65

Sumber: BPS, Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

a) Sektor Pendidikan

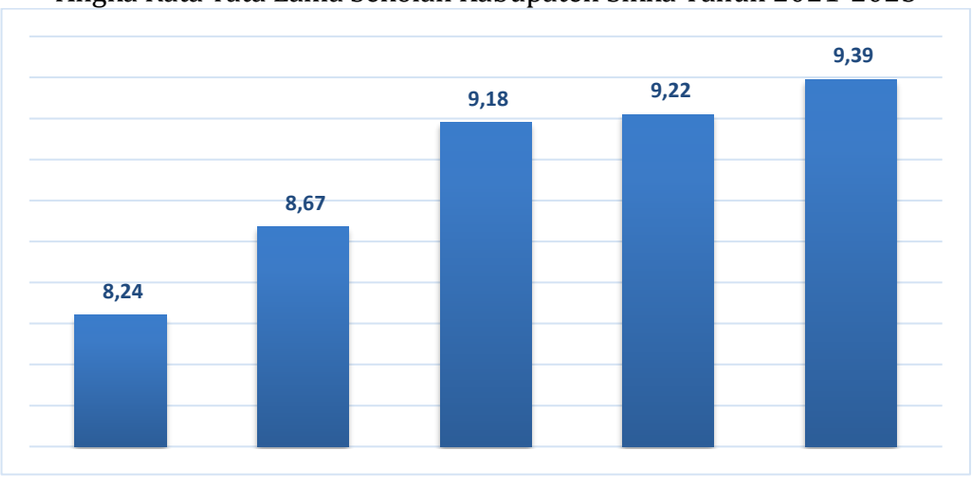
Aspek pendidikan merupakan komponen penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat tercermin dari komponen pendidikan yang di bangun pada suatu daerah. Komponen pertama pada sektor pendidikan diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menempuh semua jenis pendidikan yang dijalani. Indikator kedua pada aspek pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) yang merupakan ukuran lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dijalani oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Pada aspek ini juga akan memperhitungkan Angka Literasi/Numerasi yang berkaitan dengan kemampuan berpikir tentang, dan dengan, bahasa serta matematika, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), dan Indeks Literasi Digital.

a. Rata-rata Lama Sekolah

Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menempuh semua jenis pendidikan yang dijalani.

Capaian RLS pada tahun 2021 sebesar 8,24. Pada Tahun 2022 meningkat sebesar 8,67, meningkat lagi sebesar 9,18 pada Tahun 2023. Pada Tahun 2024 meningkat sebesar 9,22 dan pada tahun 2025 meningkat sebesar 9,39. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Sikka dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.16
Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

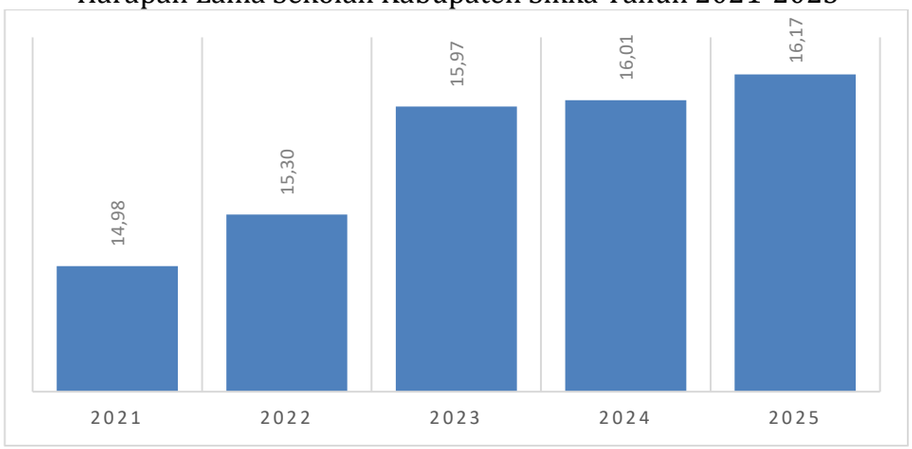


Sumber: Dinas PKO Kabupaten Sikka, 2026

b. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan ukuran lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dijalani oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mendapatkan segala jenis pendidikan pada waktu tertentu. Di Kabupaten Sikka, HLS pada tahun 2021 adalah 14,98 tahun, terus meningkat hingga tahun 2025 menjadi 16,17 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak yang berusia 7 tahun pada tahun 2024 memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 16,01 tahun (atau setingkat S1/D4). Data Harapan Lama Sekolah (HLS) selama tahun 2021-2025 menunjukkan tren kenaikan yang cukup signifikan.

Grafik 2.17
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas PKO Kabupaten Sikka, 2025

c. Angka Literasi/Numerasi

Kemampuan literasi adalah kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan Kemampuan numerasi merupakan kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. (Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka, 2025).

Numerasi dan literasi berkaitan dengan kemampuan berpikir tentang, dan dengan, bahasa serta matematika diperlukan dalam berbagai konteks, baik personal, sosial, maupun profesional. Berdasarkan informasi yang tersedia (Dinas PKO, 2025), pengukuran komprehensif terhadap angka literasi/numerasi di seluruh Kabupaten Sikka belum dilakukan secara menyeluruh. Data yang ada saat ini berasal dari beberapa jenjang pendidikan dan tahun tertentu, memberikan gambaran awal namun belum mencakup keseluruhan populasi atau tingkatan.

Pada tahun 2023, capaian literasi SD Kabupaten Sikka adalah 45,96 dan kemudian terjadi peningkatan yang cukup baik pada tahun 2024 menjadi 51,64 dan pada tahun 2025 miningkat sebesar 54,25. Literasi SMP Kabupaten Sikka pada tahun 2023 adalah 52 dan tahun 2024 sebesar 55,56 dan menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2025 menjadi 66,15.

Untuk Numerasi SD Kabupaten Sikka pada tahun 2023 adalah 30,46 dan terlihat peningkatan signifikan pada tahun 2024 menjadi 41,43 kemudian tahun 2025 kembali meningkat menjadi 49,77. Sedangkan, Numerasi SMP Kabupaten Sikka pada tahun 2023 adalah 30,89 dan terjadi lonjakan yang substansial menjadi 49,35 pada tahun 2024 dan menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2025 menjadi 59.

Terjadi peningkatan yang konsisten dan cukup signifikan pada semua indikator literasi dan numerasi baik di jenjang SD maupun SMP. Peningkatan terutama pada numerasi menunjukkan adanya upaya perbaikan kualitas pembelajaran matematika dan logika di sekolah.

d. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Karakteristik IPLM lebih memfokuskan pada sisi hulu yakni pengembangan dan penguatan kelembagaan dan infrastruktur perpustakaan. Hal inilah yang membedakannya dengan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) yang lebih

memfokuskan pada sisi hilir yakni pengembangan budaya baca, kegemaran membaca, dan literasi masyarakat.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dilahirkan sebagai upaya formulasi kebijakan, serta pengembangan dan pembinaan semua jenis perpustakaan di Indonesia di mana ada kebutuhan akan ketersediaan data yang akurat dan holistik tentang semua jenis perpustakaan pada aspek-aspek yang berdasar pada Standar Nasional Perpustakaan. Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) bertujuan untuk mengetahui kondisi semua jenis perpustakaan, baik dari aspek sebaran perpustakaan, koleksi, tenaga perpustakaan, hingga pemustaka yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat telah menjadi suatu metode pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan di wilayahnya sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Sebelum tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Sikka belum pernah melakukan pengukuran terhadap Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Pada tahun 2023, Kabupaten Sikka telah memulai upaya pengukuran IPLM melalui kerja sama dengan Universitas Nusa Nipa. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwa skor Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Sikka berada pada kategori sangat rendah, dengan besaran skor 11,37. Namun pada tahun 2024, terdapat data yang menunjukkan peningkatan angka IPLM Kabupaten Sikka menjadi 48,66. Hal ini menandakan adanya upaya masif serta keberhasilan signifikan dalam mendorong literasi masyarakat di Kabupaten Sikka.

Tahun 2025 terdapat perubahan dimensi, variabel dan indikator dalam perhitungan IPLM dan TGM/TKM sesuai dengan Peraturan Perpustakaan Nasional No. 7 Tahun 2025. Pengukuran ini dibagi menjadi 2 dimensi utama dengan total 4 variabel utama yang mencakup kepatuhan administratif dan kinerja nyata. Tahun 2025 IPLM Kabupaten Sikka berada pada skor 1,48.

e. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan daerah. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2025 sebesar 40,27.

f. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah alat ukur yang komprehensif untuk melihat capaian pembangunan kepemudaan di suatu wilayah. Indeks Pembangunan Pemuda mencakup pembangunan pemuda di lima domain dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. IPP menjadi indikator krusial dalam merumuskan kebijakan dan program yang berfokus pada pengembangan potensi pemuda, yang merupakan aset penting bagi masa depan daerah. Nilai IPP daerah Kabupaten Sikka tahun 2025 sebesar 58. Ini memberikan gambaran umum Tingkat pembangunan pemuda di skala kabupaten.

g. Indeks Literasi Digital

Pengukuran indeks literasi digital diperlukan agar bisa mengukur kemampuan literasi digital di Indonesia dari berbagai sudut pandang, guna meningkatkan kebijakan berbasis bukti dan pengaruhnya terhadap penyediaan program-program yang tepat untuk peningkatan literasi digital penduduk Indonesia. Pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia Tahun 2022 mengacu pada kerangka kerja dalam Road Map Literasi Digital 2020-2024, dengan empat pilar pengukuran literasi digital yaitu *Digital Skill, Digital Ethics, Digital Safety, dan Digital Culture*. Berdasarkan data yang tersedia pada tahun 2021, Indeks Literasi Digital Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat sebesar 3.62. Angka ini memberikan gambaran umum tingkat literasi digital di tingkat provinsi. Namun, perlu digaris bawahi

bahwa untuk Kabupaten Sikka sendiri, sampai saat ini belum dilakukan pengukuran Indeks Literasi Digital secara spesifik.

b. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan generasi muda juga menjadi salah satu bagian dari pembangunan masyarakat dan kemajuan suatu daerah sehingga untuk mencapai hal itu generasi muda memiliki peran untuk meningkatkan pendidikan, keahlian dan keterampilan diri mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Selain itu, pentingnya dimensi kepemudaan ini didasarkan pada premis bahwa pemuda adalah "sumber daya yang harus dikembangkan, bukan masalah yang harus dipecahkan". Dengan demikian untuk mengembangkan kepemudaan dibutuhkan suatu proses yang disengaja melalui pemberian dukungan, hubungan, pengalaman, sumber daya, dan peluang kepada pemuda yang diperlukan untuk menjadi orang dewasa yang sukses dan kompeten. Upaya peningkatan kualitas pemuda di Indonesia telah menjadi salah satu agenda strategis untuk mendapatkan manfaat bonus demografi. Namun, pengembangan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Sikka tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dalam lima tahun terakhir (2020-2024), presentasi organisasi pemuda yang aktif stagnan. Sedangkan data terkait wirausaha muda tidak tersedia.

Tabel 2.25
Organisasi Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2025

No	Indikator	T				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	15	15	15	15	15
2.	Persentase wirausaha muda terhadap total wirausaha	-	-	-	-	-
3.	Jumlah organisasi olahraga	8	8	8	18	18
4.	Jumlah prestasi olahraga	2	6	6	6	6
5.	Jumlah atlet berprestasi	7	28	28	28	28

Sumber: Dinas PKO Kabupaten Sikka, 2026

c. Kebudayaan

Berdasarkan Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa Sub Urusan Budaya menjadi urusan konkuren pemerintah pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Oleh karena itu Pemerintah daerah Kabupaten Sikka melaksanakan amanat UU ini. Untuk indikator Fokus seni dan budaya Kabupaten Sikka pada tahun 2021 dilaksanakan 1 festival, tahun 2022 tidak dilaksanakannya festival kebudayaan dan pada tahun 2023 sampai tahun 2025 tetap dilaksanakan festival kebudayaan.

Keberagaman budaya Indonesia adalah modal dasar yang kuat dalam pembangunan. Pemerintah telah menyadari bahwa khazanah kebudayaan di Indonesia merupakan aset yang sangat berharga. Pembangunan kebudayaan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia di Indonesia. Budaya mempunyai peranan dalam pembangunan manusia Indonesia. Indonesia dapat membangun bangsa sesuai dengan karakteristik budaya masing-masing. Kabupaten Sikka memiliki budaya dan seni tradisional begitu beragam, salah satunya adalah tarian dan musik Sikka. Seni tari dan musik dalam tataran budaya tak bisa dipisahkan. Tari musik dan doa, dipadukan dan dijalankan dalam berbagai ritus tahunan daerah. Berbagai tarian di Sikka dengan gerak improvisasi beragam, uniknya tak membutuhkan garapan seorang seniman khusus, kecuali tarian tersebut telah dipadu dengan berbagai unsur-unsur gerak modern.

Tabel 2.26
Kinerja Fokus Seni dan Budaya Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	1	0	1	1	1
2.	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	69,23	44,44	44,44	72,41	72,41
3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	2	0	2	3	10
4.	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	19	20	20	21	21

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, 2026

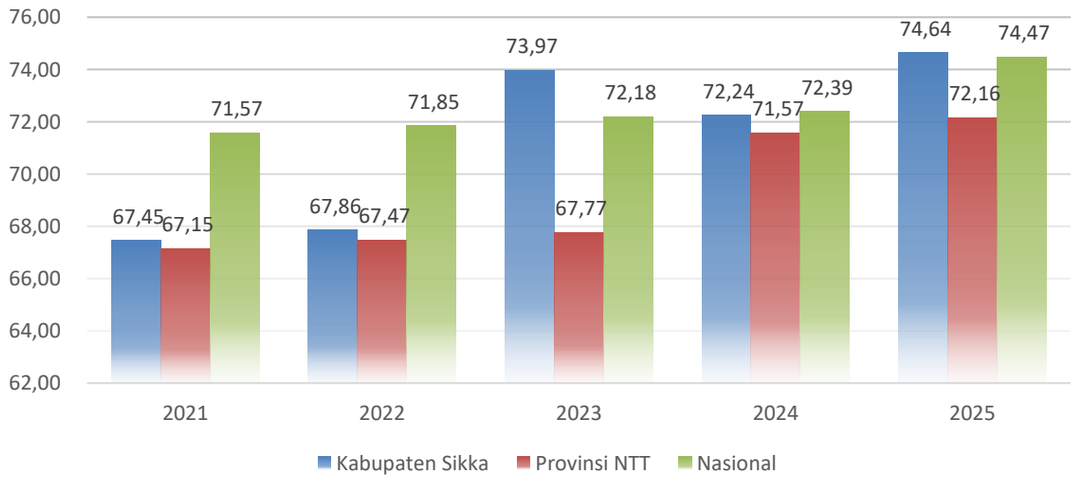
b) Usia Harapan Hidup

a. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Semakin tinggi angka kematian maka semakin tinggi UHH. UHH digunakan sebagai indikator derajat kesehatan penduduk dan kemampuan pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan, terpenuhinya kecukupan gizi dan kalori penduduk, dan kesehatan lingkungan yang baik. UHH diketahui melalui jumlah umur semua orang yang meninggal di Kabupaten Sikka dijumlah kemudian dibagi jumlah orang yang meninggal pada tahun tersebut.

Faktor dominan yang memengaruhi Angka Harapan Hidup adalah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Hal-hal yang memengaruhi kelangsungan hidup lebih lama meliputi pola makan, penyakit bawaan dari lahir/penyakit degeneratif, lingkungan tempat tinggal, dan stres atau tekanan. Disisi lain, faktor-faktor kesehatan yang memengaruhi dan berhubungan dengan Angka Harapan Hidup, termasuk kebiasaan merokok, status gizi, menopause, dan osteoporosis.

Grafik 2.18
Usia Harapan Hidup Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2020-2025



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

Dari perbandingan tren data UHH di Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional pada grafik diatas, maka Angka Kematian Bayi yang berusia 0 tahun turut memengaruhi capaian UHH di Kabupaten Sikka secara signifikan. Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Sikka pada tahun 2025 mencapai 74,64 tahun, meningkat dari tahun 2024.

b. Indeks Keluarga Sehat

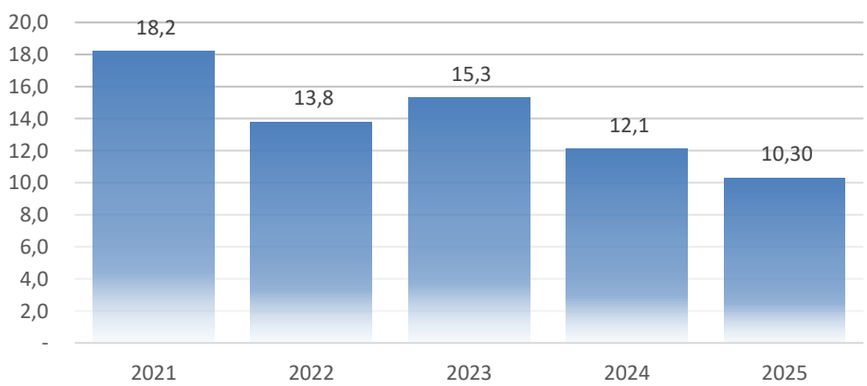
Upaya peningkatan kualitas kesehatan keluarga merupakan pilar fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkelanjutan di Kabupaten Sikka. Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesehatan masyarakat. Dalam perencanaan sebelumnya, Indeks Keluarga Sehat (IKS) sering digunakan sebagai tolok ukur. IKS terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek gizi, kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai. Sesuai informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka (2025), Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Sikka menunjukkan fluktuasi dalam periode 2020-2023. Pada tahun 2020, IKS Kabupaten Sikka tercatat sebesar 0,22 dan mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 menjadi 0,12. Pada tahun 2022, IKS menunjukkan perbaikan dengan peningkatan menjadi 0,18 dan berlanjut di tahun 2023 yang meningkat mencapai 0,22.

Seiring dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan pengukuran yang lebih spesifik dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah, pendekatan pengukuran telah mengalami penyesuaian. Saat ini, Indeks Keluarga Sehat (IKS) tidak lagi digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur kualitas kesehatan keluarga. Sebagai gantinya, Pemerintah Kabupaten Sikka akan menggunakan indikator proksi yang diselaraskan dengan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) Pemerintah Daerah. Pendekatan ini memungkinkan pengukuran yang lebih relevan dan terhubung langsung dengan target kinerja daerah serta intervensi kesehatan yang lebih spesifik. Dari 11 Indikator Kinerja RIBK yang diselaraskan dengan RPJMD (Kepala Daerah), terdapat 7 indikator utama yang akan menjadi fokus untuk merefleksikan dan mengukur peningkatan kualitas kesehatan keluarga secara komprehensif, yaitu Angka Kematian Ibu (AKI); Angka Kematian Balita; Prevalensi Stunting; Cakupan Kepesertaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional); Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Tuberkulosis); Persentase Hipertensi dalam Pengendalian; Cakupan Penduduk Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis. Ketujuh indikator ini secara kolektif memberikan gambaran yang holistik tentang berbagai aspek kualitas kesehatan keluarga, mulai dari kesehatan ibu dan anak, status gizi, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, hingga akses terhadap layanan kesehatan.

c. Prevalensi Stunting

Indikator yang perlu mendapat perhatian adalah stunting (kerdil), yaitu kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan umur bersangkutan. Prevalensi balita stunting merupakan salah satu indikator kunci dalam mengukur kualitas kesehatan dan gizi anak di bawah lima tahun, yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.19
Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2025



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka 2025

Berdasarkan data yang tersedia dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, prevalensi balita stunting di Kabupaten Sikka menunjukkan tren yang fluktuatif namun dengan penurunan yang signifikan secara keseluruhan dari tahun 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021, prevalensi stunting tercatat sebesar 18,2 persen, kemudian angka ini sedikit menurun signifikan pada tahun 2022 menjadi 13,8 persen. Namun pada tahun 2023, terjadi sedikit peningkatan kembali menjadi 15,3 persen. Kemudian mengalami penurunan sebesar 12,1 persen pada tahun 2024, dan kembali menurun pada tahun 2025 menjadi 10,30 persen. Tren penurunan prevalensi balita stunting dari 18,2 persen di tahun 2021 menjadi 10,30 persen di tahun 2025 adalah capaian yang sangat positif bagi Kabupaten Sikka. Penurunan ini menunjukkan efektivitas program dan intervensi yang telah dilakukan dalam rangka perbaikan gizi dan kesehatan ibu serta anak.

d. SPM Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan merupakan tolak ukur penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah telah memenuhi hak dasar masyarakat akan pelayanan kesehatan. SPM merujuk pada standar minimum yang harus dipenuhi dalam penyediaan layanan kesehatan esensial. Standar ini sangat penting untuk memastikan tingkat kualitas dasar dan akses terhadap layanan kesehatan bagi seluruh warga negara. Capaian SPM yang tinggi mengindikasikan komitmen dan efektivitas pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan yang esensial. Evaluasi terhadap capaian SPM menjadi krusial untuk mengidentifikasi area kekuatan dan kelemahan, serta merumuskan strategi peningkatan pelayanan kesehatan di masa depan.

Tabel 2.27
Data Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

No	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM	Capaian SPM (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	76	90	69	71	66
2	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	88	89	84	79	85
3	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	90	82	87	82	87
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita	64	91	85	78	75
5	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	85	86	90	98	98
6	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	20	38	29	48	53
7	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	113	93	122	105	83
8	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	32	82	9	19	44
9	Cakupan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	78	85	38	34	51
10	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	90	89	88	52	90
11	Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	172	82	109	107	158
12	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau human *immunodeficiency* virus	73	48	101	98	107

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2026

2. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran per kapita masyarakat Sikka berdasarkan data BPS tahun 2021-2025 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, pengeluaran per

kapita masyarakat Sikka sebesar Rp 8.021.000,00. Terjadi peningkatan setiap tahun dan mencapai Rp 9.561.000,00 pada tahun 2025.

Tabel 2.28
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional
Tahun 2021-2025 (juta rupiah)

Wilayah	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Sikka	8.021,00	8.362,00	8.678,00	9.233,00	9.561,00
Propinsi NTT	7.554,00	7.977,00	8.248,00	9.758,00	8.735,00
Nasional	11.156,00	11.479,00	11.899,00	11.479,00	12.802,00

Sumber: BPS, Kabupaten Sikka Dalam Angka 2026, Provinsi NTT Dalam Angka 2025, Statistik Indonesia 2021-2025

3. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Indeks Ketahanan Pangan adalah Ukuran dari indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Indikator ketahanan pangan meliputi ketersediaan pangan, akses terhadap pangan serta pemanfaatan pangan sebagai aspek-aspek utama penopang ketahanan pangan (Sulistyo & Winarko, 2015). Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabitas pasokan dan harga pangan. Hasil perhitungan IKP 2025 berdasarkan sembilan indikator untuk wilayah kabupaten dan delapan indikator untuk wilayah kota yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan cut off point IKP. Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Indeks Ketahanan Pangan Provinsi NTT pada tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29
Data Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Kabupaten Sikka dan
Provinsi NTT Tahun 2021 – 2025

Wilayah	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Sikka	73,54	75,72	73,89	72,81	61,79
Provinsi NTT	67,35	68,42	68,42	68,42	59,5

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Nasional, 2025

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa selama kurun waktu dari tahun 2021 sampai pada tahun 2025 indeks ketahanan pangan di Kabupaten Sikka mengalami fluktuatif. indeks ketahanan pangan di Kabupaten Sikka lebih tahan (baik) dibandingkan dengan Provinsi NTT. Hal ini dapat menunjukkan bahwa ketahanan pangan di Kabupaten Sikka lebih baik di bandingkan provinsi NTT karena Kabupaten Sikka merupakan daerah agraris.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis pada kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan.

Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik. Survei kepuasan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sikka merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan partisipasi masyarakat terutama dalam memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penilaian masyarakat dalam survei IKM dijadikan dasar pertimbangan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka dalam proses perencanaan pembangunan diwaktu yang akan datang.

Tabel 2.30
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
IKM Pelayanan Perizinan	90,25%	91,75%	91,75%	91,75%	91,75%
IKM Pelayanan Kependudukan	-	72,77%	72,77%	72,77%	72,77%

Sumber: Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah 2024-2026

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

1. Pendidikan

Pemenuhan atas hak mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan sebuah keadilan atas hasil pembangunan dan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Warga negara Indonesia akan mendapatkan kecakapan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan pemerataan, akses dan peningkatan mutu pendidikan. Maka dari itu pembangunan manusia melalui dimensi pendidikan menjadi fokus bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan agenda kebijakan pendidikan yang sangat berkualitas dan berkelanjutan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pendidikan (anak usia dini dan non-formal) serta pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Urusan pendidikan pada jenjang SMA dan SMK serta pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Kondisi ini menegaskan bahwa pemerintah daerah telah memiliki kewenangan secara otonom dalam memahami masalah, kebutuhan dan lebih bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan agar kemajuan daerahnya masing-masing dan pelayanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat.

Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. Bila ukuran seperti perubahan jumlah murid digunakan, bisa jadi ditemukan penurunan jumlah murid

sekolah dasar dengan interpretasi terjadi penurunan partisipasi sekolah. Namun, bila digunakan APS, maka akan ditemukan peningkatan partisipasi di tingkat SD yang disebabkan semakin rendahnya jumlah penduduk usia SD.

Gambaran mengenai partisipasi sekolah penduduk pada umumnya dapat dilihat pada beberapa indikator, antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan jumlah siswa di masing-masing kelompok usia sekolah dibagi jumlah penduduk pada kelompok umur bersangkutan, misalnya APS usia 7-12 tahun adalah jumlah siswa berusia 7-12 tahun dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun, dan seterusnya untuk kelompok usia 13-15 tahun, dan 16-18 tahun. Dalam hal ini bisa saja siswa berusia 12 tahun sudah duduk di bangku SMP atau siswa berusia 16 tahun tetapi masih duduk di bangku SMP.

Dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat dilihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada. Meningkatnya partisipasi sekolah menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Dalam konteks penuntasan Program Wajib Belajar 13 Tahun, angka partisipasi sangat krusial, karena berhubungan dengan sasaran-sasaran yang hendak dicapai dalam rangka mencapai angka partisipasi 100 persen di jenjang SMP/MTs. Seperti APS, Angka Partisipasi Sekolah Murni (APM) juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Tabel 2.31
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni
Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

No	Jenjang Pendidikan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	APK					
	SD/MI/Paket A	112,07	110,21	109,83	101,17	98
	SMP/MTs/Paket B	113,16	109,41	102,75	91,03	99
2.	APM					
	SD/MI/Paket A	96,66	96,74	96,93	88,01	94
	SMP/MTs/Paket B	83,03	85,29	88,98	69,56	84
3.	APS					
	SD/MI/Paket A	99,34	99,38	99,92	99,92	99,92
	SMP/MTs/Paket B	97,7	97,76	98,13	98,13	98,13

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka; Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka, 2025; dan Statistik Pendidikan NTT, 2025

Data menunjukkan adanya variasi nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) dari tahun ke tahun, baik pada tingkat SD, SMP, maupun SMA. Di tingkat SD, APK pada tahun pada tahun 2021 naik menjadi 112,07 persen, tahun 2022 turun menjadi 110,21 persen, tahun 2023 turun menjadi 109,83 persen, tahun 2024 turun 101,17 persen dan pada tahun 2025 turun lagi menjadi 98. Sementara itu, di tingkat SMP, APK mengalami fluktuasi dengan tren naik-turun, Tahun 2025 sebesar 99 . Meskipun demikian, fluktuasi ini menunjukkan peningkatan jumlah penduduk usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan tingkat pendidikan yang sesuai.

Selain APK, APM juga mengalami fluktuasi dalam periode 2021-2025 untuk tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA. APM di tingkat SD pada tahun 2021 sebesar 96,66 persen, kemudian naik menjadi 96,93 persen pada tahun 2023 dan turun menjadi 88,01 pada tahun 2024 dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2025 menjadi 94. Di tingkat SMP, APM mengalami kecenderungan meningkat dari tahun 2021 sampai 2023 yaitu 83,03 persen pada tahun 2021, 85,03 persen pada tahun 2022, 88,98 pada tahun 2023 dan turun menjadi 69,56

tahun 2024 kemudian mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 84 persen tahun 2025.

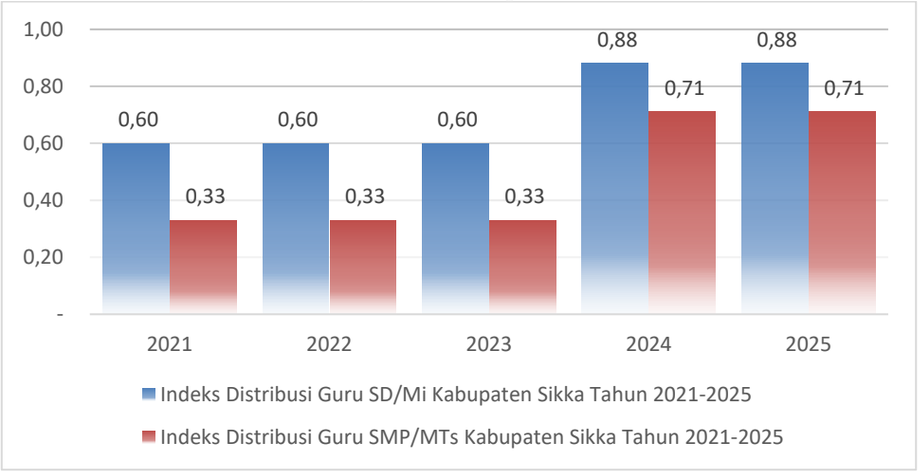
Indeks APK adalah indikator lain dalam aspek pendidikan. APS Kabupaten Sikka pada tingkat SD dan terus mengalami peningkatan dalam periode 2021-2025.

Meningkatnya partisipasi penduduk dalam pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah seharusnya sejalan dengan peningkatan fasilitas pendidikan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, rasio antara rombongan belajar dan ketersediaan ruang kelas diatur. Dalam aturan ini, rasio antara kelas dan rombongan belajar yang ideal yaitu 1:28 (per kelas diisi maksimum 28 siswa). Namun, indikator ini sudah tidak dihitung lagi di Kabupaten Sikka karena ada perubahan indikator sasaran utama. Padahal, Keberadaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan hal yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan baik pada jenjang SD/sederajat maupun SMP/sederajat pada lingkup pemerintah kota atau kabupaten.

Sarana dan prasarana ini mencakup perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Terkait dengan hal ini, prasarana belajar yang penting untuk dimiliki dan diperhatikan oleh setiap satuan pendidikan adalah keberadaan ruang kelas untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Rasio guru terhadap murid disesuaikan melalui asesmen nasional menjadi indeks distribusi guru. Indeks Distribusi Guru adalah alat ukur untuk mengetahui ketidakmerataan guru disuatu wilayah. Indeks Distribusi Guru SD Tahun 2021 sebesar 0,6, Tahun 2022 sebesar 0,6, Tahun 2023 sebesar 0,6, Tahun 2024 dan 2025 sebesar 0,88. Sedangkan Indeks distribusi Guru SMP Tahun 2021 sebesar 0,33, Tahun 2022 sebesar 0,33, Tahun 2023 sebesar 0,33, Tahun 2024 dan 2025 sebesar 0,71. Indeks Distribusi Guru SD dan SMP/MTs Kabupaten Sikka pada Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.20
Indeks Distribusi Guru SD/SMP Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas PKO Kabupaten Sikka, 2026.

2. Kesehatan

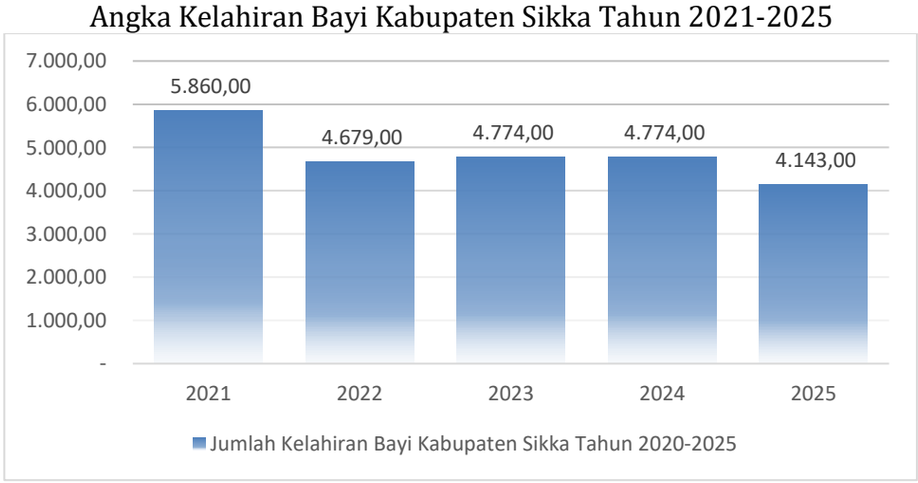
Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warga negara. Mengingat kebutuhan warga negara terhadap barang/jasa kesehatan sangat vital dan dengan karakteristik barang/jasa kesehatan yang unik dan kompleks, maka peranan pemerintah di bidang kesehatan harus distandarisasi agar warga negara dapat memenuhi kebutuhannya di bidang kesehatan sehingga pelaksanaannya mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Setiap daerah membuat program dan strategi untuk mewujudkan masyarakat yang sehat melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan

kesehatan, baik berupa pengembangan SDM, pembangunan infrastruktur, maupun pengembangan sistem pelayanan kesehatan. Keberhasilan atas upaya- upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan seperti Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

a) Angka Kelahiran Bayi dan Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka Kelahiran Bayi, juga dikenal sebagai Angka Kelahiran Total, adalah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa suburnya. TFR digunakan untuk membandingkan keberhasilan antarwilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan meningkatkan rata-rata usia kawin, dan meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan denyut nadi. Angka Kelahiran Bayi tahun 2018 sebesar 5.200 yang menunjukkan seorang ibu melahirkan 9 anak semasa reproduksinya. *Total Fertility Rate* (TFR) terus menurun mencapai angka 4.143 pada tahun 2025.

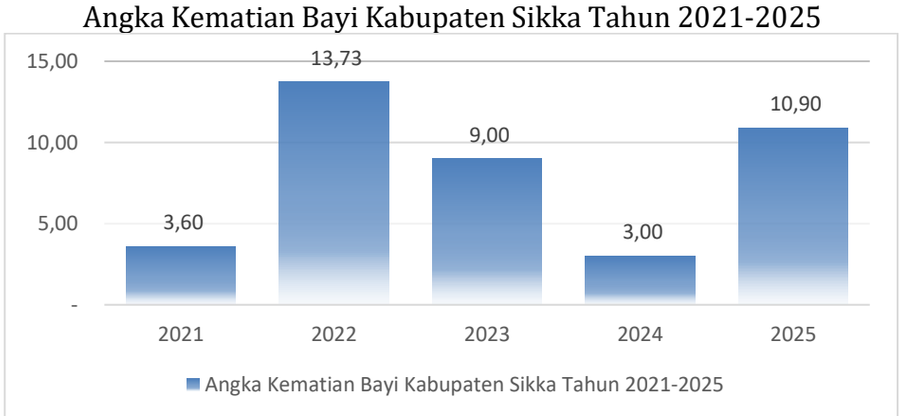
Grafik 2.21
Angka Kelahiran Bayi Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTT, 2026

Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator yang berkaitan langsung dengan tingkat kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal anak-anak termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka kematian Bayi per 1000 kelahiran pada Tahun 2021 sebesar 3,6 per 1000 kelahiran namun pada Tahun 2022 meningkat menjadi 13,73 per 1000 kelahiran. Sedangkan pada Tahun 2023 menurun menjadi 9 per 1000 KLH, pada Tahun 2024 menurun menjadi 3 per 1000 KLH dan Tahun 2025 naik menjadi 10,90 per 1000 KLH. Angka Kematian Bayi Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.22
Angka Kematian Bayi Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2026

b) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Sikka. Angka kematian ibu menggambarkan jumlah ibu atau wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) Tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu berguna dalam menggambarkan status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, ibu waktu melahirkan dan masa nifas.

Grafik 2.23
Angka Kematian Ibu Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2026.

Dilihat dari grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa kematian ibu di Kabupaten Sikka mengalami fluktuasi, walaupun masih dibawah target nasional. AKI Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi. Tahun 2021 179,5 per 100.000 KH dan pada Tahun 2022 sebanyak 166,4 per 100.000 KH (8 kasus), sedangkan pada Tahun 2023 turun menjadi 69,1 per 100.000 KH (3 kasus, pada Tahun 2024 menjadi 49,1 per 100.000 KH (2 kasus) dan pada Tahun 2025 menjadi 122 per 100.000 KH (5 kasus).

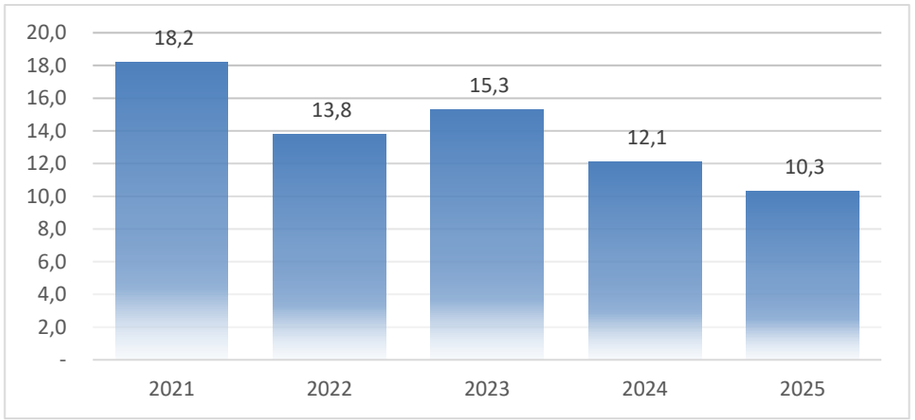
c) Balita Gizi Buruk

Berdasarkan hasil penimbangan Balita di Posyandu Tahun 2021-2025 kasus gizi kurang yang mendapatkan perhatian dan penanganan dari Pemerintah Kabupaten Sikka yaitu sebesar 100% atau semua balita gizi kurang telah mendapatkan perhatian dari Pemerintah.

d) Prevalensi Stunting

Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupangizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standard usianya. Masalah *stunting* dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan kualitas gizi,pola asuh yang kurang baik, rendahnya akses pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya adalah akses sanitasi dan air bersih. Prevalensi Stunting Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.24
Prevalensi Stunting Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2026.

Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa capaian data *stunting* di Kabupaten Sikka sejak Tahun 2021 sampai 2025 mengalami fluktuasi. Kondisi data *stunting* di Kabupaten Sikka pada tahun 2021 tercatat sebesar 18,2 %, pada Tahun 2022 ini mengalami penurunan menjadi 13,8%, pada Tahun 2023 menjadi 15,3 %, pada Tahun 2024 menjadi 12,1% dan pada Tahun 2025 turun menjadi 10,3 %.

e) Sarana Kesehatan dan Paramedis

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan, Puskesmas didukung oleh beberapa jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Sikka. Jaringan pelayanan Puskesmas terdiri dari puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan bidan desa sedangkan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium dan fasilitas kesehatan lainnya.

Tabel 2.32
Rasio Penduduk terhadap Sarana Kesehatan dan Paramedis
Kabupaten Sikka Tahun 2020-2025

No	Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Rasio Posyandu per satuan balita	25,36	31,66	36,73	33,54	32,4	34,83
2	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007
3	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,000009	0,000009	0,000009	0,000009	0,000009	0,000009
4	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	01:00,0	01:00,0	01:00,0	01:00,0	01:00,0	01:00,0
5	Rasio cakupan Desa Uci	91.30	95	96,9	95	80,3	50,1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2026

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan akses kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar atau sosial untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi termasuk Keluarga Berencana, imunisasi bagi para balita gizi dan penanggulangan diare.

Berdasarkan data di atas, rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Sikka pada tahun 2020 sebesar 25,36. Hal ini menunjukkan dari 1000 balita terdapat 25,36 atau 26 posyandu. Rasio posyandu per satuan balita terus meningkat sampai Tahun 2025 dengan rasio sebesar 34,83 per 1000 balita. Rasio ideal posyandu per satuan balita menurut

Kementerian Kesehatan adalah 1:1000. Dengan demikian kecenderungan arah perkembangan cakupan ini sejak tahun 2020 senantiasa masih berada dalam tuntutan ideal.

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan dimana dalam menyelenggarakan upaya kesehatan bagi masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Idealnya rasio puskesmas dengan jumlah penduduk yaitu 1 puskesmas berbanding 1000 penduduk. sebagaimana ketentuan dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas bahwa fungsi Puskesmas Pembantu adalah untuk menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan puskesmas di wilayah kerjanya, yang didirikan dengan perbandingan 1 postu untuk melayani 2 sampai 3 Kelurahan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, rumah sakit didefinisikan sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan rawat inap dan gawat darurat. Rumah sakit di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 1 unit yang mulai beroperasi pada Tahun 2022. Rasio rumah sakit per 1000 penduduk di Kabupaten Sikka tahun 2020 hingga tahun 2023 mencapai 0,009.

Rasio tenaga medis per satuan penduduk adalah ukuran yang digunakan untuk menilai ketersediaan tenaga medis dalam suatu wilayah atau negara. Rasio ini dapat dihitung dengan membagi jumlah tenaga medis dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada suatu periode tertentu. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa banyak tenaga medis yang tersedia untuk memberikan layanan kesehatan kepada penduduk. Rasio tenaga medis per satuan penduduk dapat bervariasi antarnegara dan wilayah, tergantung pada faktor-faktor seperti kebijakan kesehatan, distribusi geografis penduduk, tingkat kesehatan, dan faktor-faktor lainnya. Rasio ini dapat dihitung untuk berbagai jenis tenaga medis, termasuk dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Rasio tenaga medis di Kabupaten Sikka pada tahun 2018 mencapai 35 kemudian meningkat menjadi 71 pada tahun 2022.

Desa UCI (*Universal Child Immunization*) adalah desa/kelurahan dimana 90 persen jumlah bayi yang ada di desa/kelurahan tersebut imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Di Kabupaten Sikka pada tahun 2020, rasio cakupan desa UCI sebesar 91,30 persen. Namun pada tahun 2021 meningkat menjadi 95 persen dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan 96,9 persen. Pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 95 persen dan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 80,3 persen. Pada tahun 2025 mengalami penurunan kembali menjadi 50,1 persen.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penilaian kualitas dan kondisi infrastruktur di Kabupaten Sikka mencerminkan dinamika pembangunan infrastruktur yang berlangsung dalam tiga tahun terakhir. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI), yang merepresentasikan persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh infrastruktur, tercatat mencapai nilai 56,40 pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang relatif baik terhadap layanan infrastruktur, mengindikasikan adanya respons yang cukup positif terhadap aspek aksesibilitas, kenyamanan, dan keandalan pelayanan infrastruktur publik. Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar Kabupaten Sikka Tahun 2023-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.33
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Tahun 2023 dan Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID) Kabupaten Sikka Tahun 2024-2025

Indikator	Tahun	Realisasi
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	2023	56,40
Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID)	2024	56,79
Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID)	2025	55,51

Sumber: Dinas PUPR, Kabupaten Sikka, 2025

Sementara itu, Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID), yang mengukur aspek fisik dan ketersediaan infrastruktur dasar secara obyektif, menunjukkan angka yang lebih rendah. Pada tahun 2024, nilai IKID tercatat 56,79 dan mengalami penurunan pada tahun 2025 dengan Nilai IKID tercatat 55.51. Nilai ini mencerminkan adanya tantangan struktural dalam hal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, seperti jaringan jalan, sistem drainase, air bersih, serta fasilitas sanitasi yang belum sepenuhnya memenuhi standar kualitas maupun kuantitas pelayanan.

Perbedaan yang cukup mencolok antara nilai IKLI dan IKID mengindikasikan adanya kesenjangan antara persepsi layanan yang diterima masyarakat dan kondisi nyata dari infrastruktur itu sendiri. Hal ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Sikka dalam merancang strategi pembangunan ke depan, agar tidak hanya memperbaiki persepsi layanan, tetapi juga memastikan peningkatan kualitas fisik infrastruktur dasar secara berkelanjutan. Ke depan, pendekatan yang terintegrasi antara evaluasi teknis dan partisipatif menjadi kunci untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang berdaya guna dan berkelanjutan.

a) Kondisi Infrastruktur Jalan

Kondisi infrastruktur jalan memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam konteks konektivitas wilayah dan aksesibilitas antar pusat pelayanan dan produksi. Pembangunan dan pemeliharaan jalan yang merata serta berkualitas merupakan salah satu indikator penting dalam penilaian Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar, khususnya di daerah kepulauan seperti Kabupaten Sikka yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Sikka Tahun 2022–2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34
Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2022–2025 (km)

Kondisi Jalan	2022	2023	2024	2025
Baik	375,34	376,15	389,31	389,31
Sedang	161,30	161,30	88,18	88,19
Rusak Ringan	108,55	108,55	67,82	67,82
Rusak Berat	199,06	198,25	336,11	336,10
Total Jalan Kabupaten	844,250	844,250	881,42	881,42
Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	63,56	63,66	54,17	54,17

Sumber: Dinas PUPR, Kabupaten Sikka, 2026

Berdasarkan data panjang jalan Kabupaten Sikka tahun 2022 hingga 2025, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat peningkatan total panjang jalan dari 844,25 km menjadi 881,42 km pada tahun 2024, namun persentase jalan kabupaten yang berada dalam kondisi baik justru mengalami penurunan signifikan dari 63,56 persen pada 2022 menjadi 54,17 persen pada 2025. Pada tahun 2021, panjang jalan dalam kondisi baik tercatat 375,34 km dan meningkat konsisten hingga 389,31 km pada 2025. Namun demikian, peningkatan jalan rusak berat dari 199,06 km pada 2021 menjadi 336,10 km pada 2025 menjadi indikasi penurunan kualitas infrastruktur secara keseluruhan.

Penurunan signifikan juga terjadi pada panjang jalan kondisi sedang dan rusak ringan, yang menunjukkan adanya pergeseran ke kondisi yang lebih ekstrim, yaitu baik atau rusak berat. Fakta ini mencerminkan adanya tantangan serius dalam pemeliharaan dan rehabilitasi jalan kabupaten yang perlu mendapatkan perhatian prioritas dalam perencanaan pembangunan infrastruktur daerah.

b) Kondisi Infrastruktur Jembatan

Kondisi infrastruktur jembatan merupakan komponen penting dalam pengukuran Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar, karena jembatan berperan sebagai elemen penghubung vital dalam sistem transportasi dan distribusi wilayah, terutama di daerah kepulauan seperti Kabupaten Sikka. Keandalan jembatan mendukung kelancaran mobilitas masyarakat,

distribusi barang dan jasa, serta memperkuat konektivitas antar wilayah perkotaan dan perdesaan. Kualitas Jembatan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sikka Tahun 2020–2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35
Kualitas Jembatan dalam Kondisi Baik Tahun 2021–2025

Kondisi Jembatan	2021	2022	2023	2024	2025
Baik	66	67	68	56	56
Jumlah Jembatan	66	67	68	56	56
Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas PUPR, Kabupaten Sikka, 2026

Berdasarkan data yang dihimpun dari tahun 2021 hingga 2025, seluruh jembatan yang tercatat di Kabupaten Sikka berada dalam kondisi baik, dengan persentase mencapai 100 persen setiap tahunnya. Jumlah jembatan yang tercatat dalam kondisi baik mengalami peningkatan secara bertahap dari 66 unit pada 2021, menjadi 67 unit di 2022, dan mencapai 68 unit pada 2023. Namun pada tahun 2024, jumlah jembatan yang tercatat menurun menjadi 56 unit, seiring dengan adanya pemutakhiran data dan dikeluarkannya 12 jembatan berbahan kayu. Sama halnya dengan tahun 2025.

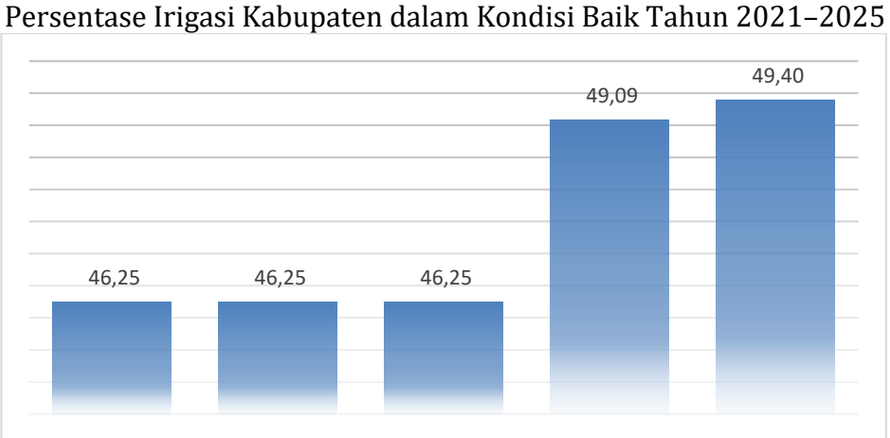
Meskipun terdapat penurunan jumlah total jembatan pada 2024, hal tersebut tidak mencerminkan degradasi kondisi infrastruktur, melainkan merupakan bagian dari proses validasi dan penyempurnaan basis data teknis yang mengacu pada standar klasifikasi infrastruktur yang lebih terukur dan sesuai pedoman nasional. Oleh karena itu, secara substansi, capaian 100 persen jembatan dalam kondisi baik tetap mencerminkan kinerja positif Pemerintah Kabupaten Sikka dalam menjaga kualitas dan keandalan sarana penghubung antarwilayah.

Capaian ini menunjukkan efektivitas program pemeliharaan dan rehabilitasi jembatan yang dilakukan secara berkala, serta komitmen daerah dalam menjaga keberlangsungan fungsi layanan infrastruktur strategis. Ke depan, tantangan yang perlu diantisipasi adalah keberlanjutan anggaran pemeliharaan, adaptasi terhadap potensi dampak perubahan iklim seperti banjir dan tanah longsor, serta penguatan basis data infrastruktur agar semakin akurat dan responsif terhadap dinamika kebutuhan pelayanan publik.

c) Irigasi

Sektor irigasi memegang peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan sektor pertanian, yang merupakan salah satu pilar utama perekonomian di Kabupaten Sikka. Infrastruktur irigasi yang berfungsi optimal menjadi faktor penentu produktivitas lahan, efisiensi penggunaan air, serta ketahanan petani terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, kualitas jaringan irigasi menjadi indikator yang berpengaruh langsung terhadap Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar, khususnya di wilayah perdesaan yang bergantung pada sektor pertanian. Kualitas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sikka Tahun 2021–2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.25
Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Tahun 2021–2025



Sumber: Dinas PUPR, Kabupaten Sikka, 2026

Berdasarkan data dari tahun 2021 hingga 2025, persentase jaringan irigasi kabupaten yang berada dalam kondisi baik menunjukkan fluktuasi ringan namun relatif stagnan. Pada tahun 2021, kondisi irigasi yang baik tercatat sebesar 46,25 persen dan tidak mengalami perubahan selama dua tahun berikutnya (2022 dan 2023). Baru pada tahun 2024 tercatat peningkatan menjadi 49,09 persen. Dan Tahun 2025 menjadi 49,4. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan atau rehabilitasi jaringan irigasi masih terus dilakukan dan meningkatkan proporsi infrastruktur irigasi yang layak dalam skala signifikan. Rendahnya persentase irigasi dalam kondisi baik dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain usia infrastruktur yang sudah tua, kerusakan akibat faktor alam seperti sedimentasi atau banjir, serta keterbatasan anggaran pemeliharaan dan pembangunan baru. Oleh karena itu, indikator ini perlu mendapat perhatian khusus dalam kerangka perencanaan pembangunan infrastruktur ke depan. Pentingnya peningkatan kualitas dan cakupan irigasi yang baik tidak hanya akan mendongkrak kepuasan layanan infrastruktur secara umum, tetapi juga akan berdampak langsung pada stabilitas produksi pertanian dan kesejahteraan petani di wilayah Kabupaten Sikka.

d) Akses Air Minum

Penyediaan akses air minum yang layak merupakan aspek fundamental dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mencerminkan kinerja layanan infrastruktur dasar di suatu daerah. Di Kabupaten Sikka, kualitas dan cakupan sistem penyediaan air minum menjadi indikator utama dalam pengukuran Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar karena berperan langsung terhadap kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Akses Masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Sikka Tahun 2022–2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2022–2025

Indikator	2022	2023	2024	2025
Jiwa Terlayani Akses Air Minum Layak	172.390	176.270	182.925	185.749
Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	34.478	35.254	36.585	46.437
Jumlah Total Penduduk (Jiwa)	322.181	322.181	324.252	324.252
Jumlah Total Rumah Tangga	64.436	64.436	64.850	81.063
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	53,51	54,71	56,41	57,29

Sumber: Dinas PUPR, Kabupaten Sikka, 2026

Berdasarkan data tahun 2022 hingga 2025, terjadi peningkatan bertahap dalam jumlah jiwa dan rumah tangga yang memperoleh akses terhadap air minum layak. Pada tahun 2022, jumlah jiwa yang terlayani mencapai 172.390 jiwa, dan meningkat menjadi 176.270 jiwa pada 2023, pada tahun 2024 mencapai 182.925 jiwa dan meningkat lagi pada tahun 2025 sebesar 185.749 jiwa. Secara paralel, jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak juga meningkat dari 34.478 rumah tangga di tahun 2022 menjadi 46.437 rumah tangga pada tahun 2025. Jika dilihat dari proporsi terhadap total rumah tangga, persentase rumah tangga dengan akses air minum layak mengalami tren positif sebesar 53,51 persen pada tahun 2022 dan mencapai 57,29 di tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas kebijakan dan program pemerintah daerah dalam memperluas cakupan layanan air minum yang layak dan aman.

Kendati mengalami peningkatan yang stabil, angka ini masih menunjukkan bahwa hampir setengah dari rumah tangga di Kabupaten Sikka belum memiliki akses terhadap air minum layak sesuai standar pelayanan minimum. Tantangan yang dihadapi antara lain terbatasnya cakupan jaringan perpipaan, kondisi geografis kepulauan yang menyulitkan distribusi, serta keterbatasan kapasitas operasional penyedia layanan air minum.

e) Sistem Drainase

Sistem drainase merupakan infrastruktur vital dalam mendukung kualitas permukiman, pengendalian banjir, serta menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

Efektivitas jaringan drainase sangat menentukan kenyamanan, keamanan, dan kelangsungan aktivitas sosial ekonomi masyarakat, terutama di wilayah perkotaan dan pusat pertumbuhan baru. Oleh karena itu, kualitas drainase menjadi indikator penting dalam pengukuran Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar di Kabupaten Sikka. Panjang drainase dalam kondisi baik di Kabupaten Sikka Tahun 2021–2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37
Panjang Drainase dalam Kondisi Baik Tahun 2022–2025

Kondisi Drainase	2022	2023	2024	2025
Panjang Drainase dalam Kondisi Baik	15.590	15.590	15.690	15.690
Total Panjang Drainase	24.005,05	24.005,05	24.005,05	24.005,05
Persentase Drainase Kondisi Baik	64,94	64,94	65,36	65,36

Sumber: Dinas PUPR, Kabupaten Sikka, 2026

Data dari tahun 2022 hingga 2025 menunjukkan tren positif dalam peningkatan panjang drainase yang berada dalam kondisi baik. Pada tahun 2021, panjang drainase dalam kondisi baik tercatat sebesar 14.803 meter, atau setara dengan 61,67 persen dari total panjang jaringan drainase sepanjang 24.005,05 meter. Upaya peningkatan kualitas jaringan ini terus dilakukan secara bertahap, yang menghasilkan peningkatan panjang drainase baik menjadi 15.590 meter pada tahun 2022 dan 2023, dengan persentase 64,94 persen.

Pada tahun 2024 hingga 2025, terjadi peningkatan meskipun berskala kecil, yakni panjang drainase baik menjadi 15.690 meter, yang mendorong kenaikan persentase menjadi 65,36 persen dari total jaringan. Kenaikan yang konsisten ini menunjukkan adanya program rehabilitasi dan peningkatan kualitas drainase yang dijalankan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka. Meski demikian, sekitar 35 persen jaringan drainase masih berada dalam kondisi kurang layak, yang berpotensi menghambat aliran air, memicu genangan, serta menurunkan kualitas lingkungan permukiman. Tantangan ini umumnya bersumber dari sedimentasi, penyumbatan oleh sampah, serta kerusakan fisik pada struktur saluran akibat usia teknis maupun bencana.

f) Tenaga Kerja Konstruksi

Ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan bersertifikat merupakan aspek fundamental dalam menjamin mutu, keselamatan, dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di daerah. Tenaga kerja konstruksi dengan kualifikasi terampil tidak hanya menjadi syarat dalam pelaksanaan proyek yang efisien dan sesuai standar teknis, tetapi juga mencerminkan tingkat profesionalisme dan kesiapan daerah dalam mendukung percepatan pembangunan. Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil di Kabupaten Sikka Tahun 2021–2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38
Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil Tahun 2022–2025

Kondisi Tenaga Kerja	2022	2023	2024	2025
Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil (%)	0	0	8,22	22,44
Jumlah Tenaga Kerja (orang)	450	450	450	450

Sumber: Dinas PUPR, Kabupaten Sikka, 2026

Di Kabupaten Sikka, berdasarkan data tahun 2022 hingga 2025, jumlah tenaga kerja konstruksi yang tercatat secara konsisten adalah 450 orang. Namun, hingga tahun 2023, persentase tenaga kerja dengan kualifikasi terampil bersertifikat adalah 0 persen, menandakan bahwa selama periode tersebut belum terdapat kegiatan pelatihan atau sertifikasi formal yang dilaksanakan.

Baru pada tahun 2024 dilakukan kegiatan pelatihan atau sertifikasi formal kepada tenaga kerja konstruksi sebesar 8,22 persen, dan meningkat menjadi 22,44 persen pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya intervensi program pelatihan dan sertifikasi yang mulai dijalankan, meskipun realisasinya masih rendah. Kondisi ini mencerminkan dua tantangan utama. Pertama, belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan kapasitas sumber daya manusia konstruksi di tahun-tahun sebelumnya.

Kedua, rendahnya tingkat partisipasi tenaga kerja dalam mengikuti pelatihan dan sertifikasi, yang dapat disebabkan oleh kurangnya informasi, insentif, atau akses terhadap lembaga pelatihan bersertifikasi.

Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi secara sistematis akan memperkuat kualitas hasil pekerjaan infrastruktur, mempercepat proses pembangunan di Kabupaten Sikka. Selain itu, tenaga kerja terampil yang tersertifikasi juga akan lebih siap menghadapi tantangan industri konstruksi yang semakin kompetitif dan adaptif terhadap teknologi.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Pemenuhan hak atas hunian layak merupakan bagian integral dari pembangunan manusia dan pengurangan kemiskinan. Hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan tidak hanya memberikan tempat tinggal yang aman dan sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, termasuk dari sisi kesehatan, pendidikan, dan produktivitas ekonomi. Oleh karena itu, akses terhadap hunian layak menjadi salah satu indikator utama dalam pembangunan infrastruktur sosial di Kabupaten Sikka.

Akses Hunian Layak, terjangkau dan berkelanjutan di Kabupaten Sikka Tahun 2021–2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39
Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Tahun 2021–2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase KK yang Menempati Rumah Layak Huni	53,41	60,69	60,69	76,06	76,06
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	49,34	50,97	51,28	51,03	87,12
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	1,40	1,76	1,76	1,76	1,76
Luas pengurangan kumuh setelah diintervensi	6,28 ha	6,28 ha	6,28 ha	6,28 ha	6,28 ha
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	73,96	74,74	74,24	76,06	76,06

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka, 2026

Berdasarkan data tahun 2021–2025, capaian persentase rumah tangga dengan akses hunian layak di Kabupaten Sikka menunjukkan tren yang stabil dan meningkat. Pada tahun 2021 sebesar 73,96 persen, kemudian naik menjadi 74,74 persen di tahun 2022. Pada tahun 2023 menurun menjadi 74,24 persen, kemudian meningkat menjadi 76,06 persen pada tahun 2024 dan tahun 2025. Peningkatan ini menandakan adanya intervensi program perumahan dan permukiman yang konsisten, baik melalui bantuan stimulan rumah swadaya, program penataan kawasan kumuh, maupun pembangunan rumah layak huni berbasis komunitas.

Sementara itu, indikator persentase kepala keluarga (KK) yang menempati rumah layak huni mulai tersedia datanya sejak tahun 2021 dengan capaian 53,41 persen, kemudian mengalami peningkatan bertahap hingga mencapai 76,06 persen pada tahun 2024. Ini menunjukkan perbaikan signifikan dalam kualitas fisik hunian, yang mencakup struktur bangunan, luas ruang, sirkulasi udara, dan akses terhadap sarana dasar seperti air bersih dan sanitasi.

Dalam periode 2020 hingga 2024, akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Kabupaten Sikka menunjukkan perkembangan yang belum optimal. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak meningkat secara bertahap dari 49,34 persen pada tahun 2021 menjadi 50,97 persen di tahun 2022, lalu mencapai 51,28 persen pada 2023, meskipun mengalami sedikit penurunan menjadi 51,03 persen di tahun 2024. Sementara itu, persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan justru menunjukkan tren peningkatan, dari 0,39 persen pada tahun 2020 menjadi 1,40 persen di 2021, dan terus naik hingga mencapai 1,76 persen pada tahun 2022 yang bertahan hingga 2024. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan serius dalam penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sanitasi, sehingga perlu strategi terpadu yang mencakup penguatan

kebijakan perumahan, peningkatan infrastruktur dasar, serta pendekatan kolaboratif lintas sektor untuk menjamin hak atas hunian yang layak bagi seluruh masyarakat.

Data RTLH di Kabupaten Sikka tahun 2025 mencapai 19.681 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.264 unit atau sekitar 42 persen berada di kawasan pesisir, sementara 11.417 unit (58 persen) berada di wilayah pedesaan. Kecamatan dengan jumlah RTLH tertinggi adalah Nita (1.598 unit), diikuti oleh Alok Timur (1.615 unit), Waigete (1.593 unit), dan Talibura (1.368 unit). Sementara itu, kecamatan dengan jumlah RTLH terendah tercatat di Nelle (293 unit) dan Mapitara (488 unit). Beberapa kecamatan seperti Hewokloang, Koting, Nita, Tanawawo, dan Mapitara seluruh RTLH-nya berada di wilayah pedesaan, menandakan bahwa persoalan hunian layak di sana lebih dominan terjadi di pedalaman. Sebaliknya, kecamatan seperti Alok, Waigete, dan Lela memiliki proporsi RTLH pesisir yang cukup besar, menunjukkan kerentanan kawasan pesisir terhadap akses permukiman layak.

Data di atas memberikan gambaran bahwa tantangan pembangunan permukiman di Kabupaten Sikka bersifat terdistribusi dan sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis serta status kepemilikan tanah. Kawasan pesisir tampak lebih rentan terhadap keterbatasan hunian layak, terutama di wilayah yang padat permukiman seperti Alok dan Waigete, yang merupakan sentra pertumbuhan pesisir. Sementara itu, kawasan pedesaan yang memiliki RTLH tinggi umumnya tersebar di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas, seperti Nita dan Talibura. Informasi ini penting dalam penyusunan program prioritas, baik untuk perbaikan rumah, legalisasi tanah, maupun pengembangan infrastruktur dasar permukiman secara lebih terfokus dan kontekstual.

Tabel 2.40
Jumlah Keluarga dengan Rumah Tidak Layak Huni

No	Nama Kecamatan	Jumlah RTLH
1.	Alok	875
2.	Alok Barat	636
3.	Alok Timur	1615
4.	Bola	868
5.	Doreng	670
6	Hewokloang	774
7.	Kangae	1340
8.	Kewapante	976
9.	Koting	752
10.	Lela	960
11.	Magepanda	902
12.	Mapitara	488
13.	Mego	852
14.	Nelle	293
15.	Nita	1598
16.	Paga	911
17.	Palue	792
18.	Talibura	1368
19	Tanawawo	650
20.	Waiblama	768
21	Waigete	1593

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka, 2026

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) permukiman merupakan elemen penting dalam mewujudkan hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan. PSU mencakup akses terhadap listrik, air bersih dan jalan lingkungan yang mendukung fungsi hunian serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Sikka, penguatan penyediaan PSU menjadi bagian strategis dalam pencapaian target perumahan dan permukiman yang layak bagi seluruh warga. Penyediaan PSU Permukiman di Kabupaten Sikka Tahun 2022–2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41
Penyediaan PSU Permukiman Tahun 2022–2025

Indikator	2022	2023	2024	2025
Persentase Rumah Tangga yang dilayani Listrik	94,77%	94,77%	*)	98,89
Persentase Rumah Tangga yang terlayani air minum bersih	*)	*)	*)	*)
Persentase jalan lingkungan yang dibangun	*)	*)	*)	*)

*Keterangan : *) = tidak dilakukan perhitungan*
Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka, 2026

Berdasarkan data tahun 2022–2025, penyediaan PSU permukiman di Kabupaten Sikka menunjukkan perkembangan yang tidak merata antar aspek. Pada indikator persentase rumah tangga yang dilayani listrik, terjadi peningkatan signifikan dari 1,44 persen pada tahun 2022 menjadi 94,77 persen pada tahun 2022, dan angka tersebut tetap bertahan pada tahun 2023. Capaian ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan listrik ke permukiman warga secara masif dalam kurun waktu singkat. Namun, pada tahun 2024 tidak dilakukan perhitungan indikator. Kemudian pada Tahun 2025 diukur kembali dengan capaian indikator persentase rumah tangga yang dilayani listrik sebesar 98,89.

Di sisi lain, untuk indikator rumah tangga yang terlayani air minum bersih, data hanya tersedia pada tahun 2021, yaitu sebesar 0,03 persen. Ketiadaan data pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan bahwa belum terdapat pelaporan yang memadai atau bahwa program penyediaan air bersih belum berjalan secara signifikan pada periode tersebut. Kondisi ini mengindikasikan masih rendahnya cakupan pelayanan air minum di wilayah permukiman, yang menjadi tantangan serius dalam penyediaan hunian yang sehat dan memenuhi standar kebutuhan dasar.

Sementara itu, untuk indikator persentase jalan lingkungan yang dibangun, data hanya tercatat pada tahun 2021 sebesar 0,55 persen. Ketidaktercapaian data lanjutan pada tahun-tahun berikutnya juga menunjukkan perlunya peningkatan sistem dokumentasi, pemetaan progres, dan pelaporan pembangunan fisik PSU secara menyeluruh.

Secara umum, ketidakseimbangan dalam penyediaan berbagai elemen PSU menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring lintas sektor. Di satu sisi, capaian elektrifikasi menunjukkan progres luar biasa, namun di sisi lain air bersih dan jalan lingkungan justru masih belum menunjukkan perbaikan yang memadai.

.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tingkat kejahatan rendah dan suasana yang aman membuat warga dan pengunjung merasa nyaman beraktivitas. Ketentraman mengacu pada keadaan di wilayah atau masyarakat berada dalam keadaan damai, tenang dan bebas dari gangguan atau ancaman yang dapat menimbulkan ketidakamanan atau kecemasan. Ketertiban umum mengacu pada keadaan dimana masyarakat mematuhi aturan, norma, dan hukum yang berlaku. Hal ini seperti perilaku warga yang tidak melanggar norma-norma sosial atau hukum, sehingga menciptakan lingkungan yang teratur, terkendali dan aman bagi seluruh anggota masyarakat. Perlindungan masyarakat merujuk pada upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk melindungi keamanan, hak dan kesejahteraan warga dari potensi ancaman atau bahaya baik dari faktor internal maupun eksternal. Berikut data angka kriminalitas di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.42
Angka Kriminalitas Kabupaten Sikka Tahun 2021-2024

No	Jenis Kriminal	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kasus Narkoba	1	1	1	-
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	4	3	3	-
3	Jumlah Kejahatan Seksual	1	5	5	-

No	Jenis Kriminal	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	36	54	54	-
5	Jumlah Kasus Pencurian	98	41	41	-
6	Jumlah Kasus Penipuan	10	1	1	-
7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	0	0	0	-
8	Jumlah Tindak Kriminal selama 1 tahun	190	286	286	303
9	Jumlah Penduduk	324.252	327.000	327.000	346.614
10	Angka Kriminalitas (8)/(9)	0,00058	0,00087	0,00087	0,00087

Sumber: Statistik Kriminal Provinsi NTT 2022-2025, Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data tersebut datas, menunjukkan pentingnya upaya yang berkelanjutan dalam memperkuat tindakan keamanan dan pencegahan kejahatan di Kabupaten Sikka ini. Pihak berwenang perlu melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi penyebab fluktuasi ini dan mengimplementasikan strategi yang tepat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sikka. Selanjutnya akan dibahas terkait penegakan perda dan tingkat penyelesaian pelanggaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Tabel berikut ini menyajikan datanya.

Tabel 2.43
Indikator Kinerja Satpol PP Kab. Sikka Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Persen)	100	100	100	100	100
2	Persentase Penegakan PERDA	100	100	100	100	100
3	Angka Kriminalitas (Jumlah Tindak Pidana)	190	286	286	67	280
4	Persentase perda dan perkada yang ditegakan	44,44	33,33	33,33	55,55	71,42
5	Persentase penyelenggarann Trantibumlinmas	315,55	60	170	223,33	100
6	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	100	100	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka, 2026

Kabupaten Sikka memiliki tingkat penyelesaian penyelenggaraan K3 yang bagus dalam lima tahun terakhir, begitu juga dengan penegakan Perda dan cakupan perlindungan masyarakat. Hal ini menunjukan upaya yang telah dikeluarkan dalam penegakan hukum memperlihatkan hasil serta komitmen dan kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sikka dalam mengelola dan mempertahankan standar tinggi terkait keselamatan dan kesehatan kerja serta kepatuhan terhadap aturan hukum setempat. Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga memberikan dampak positif pada kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sikka. Hal ini kemudian diikuti dengan persentase penegakan perda dan perkada yang juga turut meningkat di tahun 2025. Dalam hal pelaksanaan kewajiban dalam penyelenggaraan trantibulinmas, sebagaimana telah disebutkan kinerja yang telah dilakukan mendorong nilai penyelenggaraan menjadi di angka 100 persen. Sehingga Kab. Sikka dalam hal keamanan di masyarakat sudah sangat terjamin, meski dapat dilakukan peningkatan dalam penegakan tidak hanya perda tapi juga perkada.

Tabel 2.44
Kinerja Pelayanan Umum Perlindungan Masyarakat Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	3:10000	3:10000	3:10000	3:10000	3:10000
2.	Jumlah linmas per 10.000 penduduk	-	78:1000	78:1000	74:10000	79:1000
3.	Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan	03:01	03:01	03:01	03:01	03:01

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
4.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	18 Menit	18 Menit	18 Menit	-	7,88 Menit
5.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	21.69%	21.69%	21.69%	21.69%	21.69%

Sumber: RKPD Kabupaten Sikka, 2026

Indikator Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), terdapat perlambatan tingkat waktu tanggap yang mencapai 18 menit, yang mana standar yang seharusnya adalah 15 menit. Waktu tanggap merupakan indikator krusial dalam mengevaluasi kinerja tim pemadam kebakaran dalam merespon situasi darurat. Perlunya upaya untuk memperbaiki respon dan memastikan bahwa tim dapat tiba di lokasi secepat mungkin. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan dalam waktu tanggap dan mengambil tindakan yang tepat, WMK dapat memperbaiki kinerja mereka dalam memberikan layanan yang cepat dan efektif dalam situasi darurat kebakaran. Lebih lanjut dalam hal cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota pada tahun 2019 dan 2020, cakupan pelayanan bencana kebakaran naik presentasenya dari 5 persen ke 21 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada awal periode, pelayanan terkait kebakaran di Kabupaten Sikka masih belum mengalami perkembangan yang signifikan. Tahun 2025 cakupan pelayanan bencana kebakaran, mencapai 21,69 persen. Ini menandakan kemajuan yang berarti dalam upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki kesiapan dan respon terhadap kebakaran.

6. Sosial

Pelayanan urusan sosial yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sikka menyasar kepada masyarakat yang masuk dalam kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). PMKS sendiri merupakan seseorang keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan oleh karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut bisa berupa kemiskinan, keterlantaran, kejahatan, ketunaan, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan yang kurang mendukung.

Tabel 2.45
Indikator Pelayanan Urusan Sosial Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase PMKS/PPKS yang memperoleh bantuan sosial	27,11	53,77	53,77	62,81	*
2.	Persentase PMKS yang tertangani	11,808	1,8	1,8	4,53	*
3.	Persentase Panti Sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0	0	0	0	*
4	Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social	6,25	6,25	6,25	6,25	*
5	Persentase penduduk miskin yang tergraduasi	**	**	**	**	0,02
6	Persentase PPKS diluar panti yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial dasar	**	**	**	**	9,86
7	Persentase PPKS yang bekerja sama dengan dinas sosial	**	**	**	**	94,24
8	Persentase korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial saat bencana	**	**	**	**	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sikka, 2026

Keterangan:
**Indikator baru dimulai tahun 2025*
***sebelum tahun 2025 indikator ini belum ada*

Dalam rangka mengurangi jumlah Penduduk Miskin dan Keluarga Sasaran (PMKS), pemerintah daerah berupaya memberikan bantuan dan mengatasi masalah kesejahteraan sosial. Persentase PMKS yang menerima bantuan sosial dari pemerintah daerah menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, namun dengan tren peningkatan yang positif di tahun-tahun terakhir. Peningkatan drastis terjadi pada tahun 2022 menjadi 53,77 persen dari angka sebelumnya yaitu 27,11 persen tahun 2021. Capaian tertinggi terlihat pada tahun 2024, di mana persentase ini mencapai 62,81 persen. Sedangkan persentase PMKS yang tertangani pada tahun 2020 sebanyak 1,349 persen, kemudian meningkat signifikan tahun 2021 menjadi 11,808 persen. Angka ini menurun drastis menjadi 1,8 persen pada tahun 2022 dan bertahan di angka 1,8 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024, persentase ini kembali meningkat menjadi 4,53 persen. Ini menunjukkan komitmen serius pemerintah daerah dalam mengurangi jumlah PMKS di Kabupaten Sikka. Namun, pemerintah daerah belum melaksanakan indikator persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya, serta persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial, karena belum ada pembangunan panti sosial yang dilakukan.

7. Tenaga Kerja

Kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah dapat dipandang sebagai refleksi perekonomian dari wilayah tersebut. Sehingga perubahan perekonomian yang terjadi pada suatu wilayah akan berdampak pada masalah ketenagakerjaan yang diantaranya berkaitan dengan masalah pasar kerja di wilayah itu. Kondisi pasar kerja tersebut merupakan elemen penting dalam penentuan permintaan barang dan jasa dalam perekonomian. Permintaan terhadap barang dan jasa ini selanjutnya akan menentukan permintaan terhadap pekerja yang berarti juga memengaruhi sisi penawaran pekerja. Selain itu, perubahan komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin menentukan siapa yang berpotensi masuk dalam pasar kerja, disamping mutu pendidikan juga memengaruhi pasar kerja. Secara teoritis, ketenagakerjaan (khususnya sisi penawaran tenaga kerja) dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk jumlah penduduk, struktur umur, jenis kelamin, tingkat pendapatan riil dan distribusinya, angka upah riil, struktur ekonomi, partisipasi dalam sistem pendidikan, kebiasaan atau tradisi peran kerja dan partisipasi kerja. Tanpa pertambahan penduduk sekalipun, sebagian besar angkatan kerja di masa mendatang kini sudah lahir.

Sektor ketenagakerjaan merupakan pilar penting dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dinamika pasar kerja, penempatan, penyerapan tenaga kerja, hingga isu perselisihan hubungan industrial menjadi cerminan kondisi ketenagakerjaan suatu daerah. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri menunjukkan angka di bawah 1 persen dari tahun 2022 hingga 2024 dan meningkat signifikan pada tahun 2025 menjadi 3,59. Persentase tenaga kerja tingkat kabupaten yang ditempatkan di dalam negeri dapat meningkat karena adanya pertumbuhan investasi daerah, efektivitas layanan bursa kerja lokal (Antar Kerja Lokal), dan perluasan program pelatihan berbasis kompetensi salah satunya dengan Pelatihan Kerja di BLK.

Sedangkan, persentase tenaga kerja yang ditempatkan di luar negeri juga masih sangat kecil, meskipun ada sedikit peningkatan dari 0,02 persen (2020) menjadi 0,54 persen (2025). Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di luar negeri masih rendah disebabkan karena rendahnya kompetensi bahasa asing, ketatnya standar kualifikasi negara tujuan, dan tingginya biaya pelatihan serta sertifikasi mandiri

Persentase pemberi kerja yang menerapkan perlindungan hak pekerja dan dialog sosial menunjukkan angka yang berfluktuasi rendah antara 2,43 persen hingga 3,99 persen. Ini mengindikasikan bahwa penerapan perlindungan hak pekerja dan dialog sosial di tingkat pemberi kerja masih sangat minim.

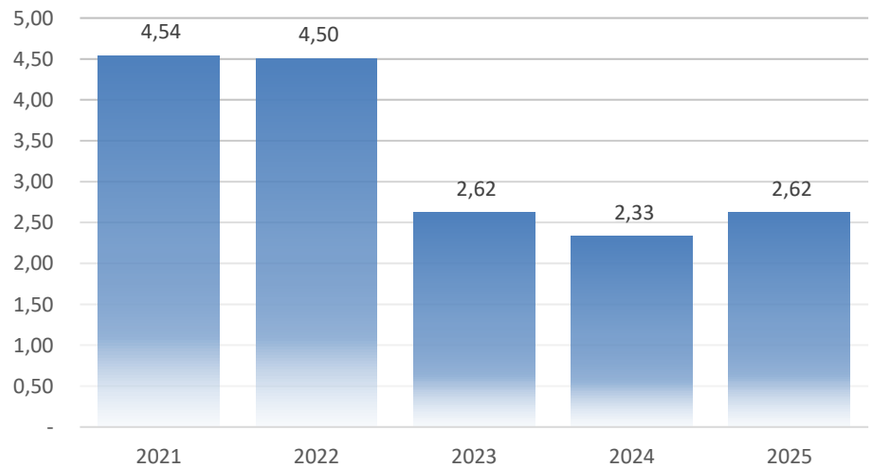
Tabel 2.46
Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	-	0,78	0,74	0,73	3,59
2	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Luar Negeri	0,02	0,12	0,23	0,30	0,54
3	Persentase pemberi kerja yang menerapkan perlindungan hak pekerja dan dialog sosial di dalam negeri dan luar negeri	3,35	2,43	3,78	3,72	3,99

Sumber: Dinas Nakertrans, 2026

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator penting dalam melihat kondisi pasar kerja dan efektivitas pembangunan sumber daya manusia di suatu daerah. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Capaian TPT Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.26
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sikka Tahun 2021–2025



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 hingga 2025, terjadi tren fluktuaktif. Pada tahun 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sikka tercatat sebesar 4,54 persen, kemudian menurun pada tahun 2022 menjadi 4,50 persen. Namun pada tahun 2023, Kabupaten Sikka berhasil menunjukkan perbaikan signifikan dengan penurunan TPT menjadi 2,62 persen dan penurunan berlanjut pada tahun 2024, dimana TPT kembali menurun menjadi 2,33 persen. Namun pada tahun 2025 tercatat meningkat menjadi 2,62 persen.

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah serangkaian kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengelola pertumbuhan populasi dalam wilayah khususnya di Kabupaten Sikka. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara jumlah penduduk dengan sumber daya yang tersedia, sehingga dapat memastikan kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Keluarga yang berkualitas ditandai dengan perencanaan yang matang dalam hal jumlah anak, kesehatan ibu dan anak, serta pemenuhan hak-hak dasar setiap anggota keluarga.

Tabel 2.47
Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	2,50	2,40	2,30	2,20	2,19
2.	Total Fertility Rate (TFR)	1,9	2,20	2,20	2,18	2,19
3.	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	2,49	2,6	2,6	2,5	2,5
4.	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (MCPR)	65,84	65,91	65,98	40	39,29
5.	Persentase Kebutuhan BerKB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	22,40	22,80	23,50	24,70	39,45

Sumber: Dinas P2KBP3A Kabupaten Sikka, 2026

Angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun (ASFR) menunjukkan tren penurunan yang konsisten di Kabupaten Sikka. Pada tahun 2021 tercatat 2,50 dan terus menurun menjadi 2,19 pada tahun 2025. Penurunan ASFR ini mencerminkan keberhasilan upaya edukasi kesehatan reproduksi remaja dan pencegahan pernikahan dini, yang merupakan fondasi penting bagi keluarga berkualitas.

Total Fertility Rate di Kabupaten Sikka menunjukkan fluktuasi, namun secara umum berada di kisaran yang relatif stabil. Pada tahun 2021 tercatat TFR adalah 1,9, namun hingga Tahun 2025 meningkat menjadi menjadi 2,19. TFR yang mendekati angka sekitar 2,1 anak per perempuan, menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk cenderung terkendali, memungkinkan keluarga untuk lebih fokus pada kualitas pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak.

Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Sikka juga menunjukkan tren fluktuaktif dari tahun ke tahun. Dimulai dari 2,49 anak per keluarga di tahun 2021, naik menjadi 2,6 di tahun 2022 dan tahun 2023, kemudian sedikit menurun menjadi 2,5 di tahun 2024 dan tahun 2025. Penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga mendukung konsep keluarga kecil bahagia dan berkualitas, karena orang tua dapat memberikan perhatian dan sumber daya yang lebih optimal bagi setiap anak.

Capaian *Modern Contraceptive* (mCPR) menunjukkan keberhasilan yang baik di tahun-tahun awal, namun mengalami penurunan drastis di tahun terakhir. Pada tahun 2021, mCPR sebesar 65,84 persen dan meningkat hingga 66 persen di tahun 2023. Namun menurun signifikan menjadi 39,29 hingga tahun 2025. Penurunan signifikan ini merupakan alarm untuk pemerintah Kabupaten Sikka, karena penggunaan kontrasepsi modern adalah pilar utama dalam perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi.

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi mengalami peningkatan. Dimulai dari 22,4 persen di tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 22,8 persen di tahun 2022, meningkat menjadi 23,5 persen di tahun 2023, terus meningkat menjadi 24,7 persen di tahun 2024, dan mencapai 39,45 persen di tahun 2025. Peningkatan unmet need ini mengindikasikan bahwa semakin banyak pasangan usia subur di Kabupaten Sikka yang sebenarnya ingin menunda atau membatasi kehamilan, tetapi tidak memiliki akses atau tidak menggunakan metode KB yang efektif.

1. Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga)

Keluarga merupakan unit terkecil sekaligus fondasi utama dalam pembangunan suatu bangsa. Kualitas sebuah keluarga tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari ketahanan dan keberfungsiannya dalam menjalankan peran-peran sosial, kesehatan, pendidikan, dan spiritual. Untuk mengukur dimensi kompleks ini, digunakan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Indeks ini menjadi tolok ukur penting dalam upaya pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Sikka, untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari Dinas P2KBP3A (2025), capaian iBangga di Kabupaten Sikka pada tahun 2021 tercatat sebesar 48,53 kemudian meningkat menjadi 49,09 pada tahun 2022, dan meningkat kembali yang cukup besar pada tahun 2023, di mana nilai iBangga mencapai 55,49. Meskipun data untuk tahun 2020 dan 2024 tidak

tersedia, tren peningkatan dari 2021 ke 2023, terutama di tahun 2023, merupakan capaian yang positif bahwa upaya pembangunan keluarga di Kabupaten Sikka mulai menunjukkan hasil. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam dimensi-dimensi yang membentuk kualitas keluarga, seperti dimensi ketahanan keluarga, dimensi keberfungsian keluarga, dan dimensi dukungan keluarga.

Peningkatan nilai iBangga, yang merupakan gabungan dari berbagai dimensi, secara spesifik mengindikasikan bahwa sub-indikator di dalamnya juga mengalami perbaikan. Salah satu indikator proksi yang sangat relevan dengan iBangga dan secara langsung mencerminkan kualitas keluarga adalah Indeks Ketahanan Keluarga. Indeks Ketahanan Keluarga mengukur kemampuan keluarga untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit dari berbagai tantangan, serta memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anggotanya. Periode selanjutnya, pembangunan keluarga di Kabupaten Sikka akan menggunakan indikator Indeks Ketahanan Keluarga untuk membangun fondasi masyarakat yang lebih kuat dan sejahtera dari unit terkecilnya, yaitu keluarga berkualitas.

2. Keluarga Sejahtera(KS)

Keluarga adalah fondasi masyarakat. Keluarga yang sejahtera dan berkualitas merupakan cerminan dari pembangunan yang berhasil, dimana setiap anggotanya dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Salah satu strategi kunci untuk mencapai hal ini adalah melalui pemberdayaan keluarga itu sendiri dan peran serta aktif masyarakat dalam berbagai kelompok kegiatan ketahanan keluarga. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat fungsi keluarga dari dalam dan menciptakan lingkungan yang mendukung.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas P2KBP3A, yaitu Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Sikka pada tahun 2020 masih di angka 0,00 persen. Ini menunjukkan bahwa pada awal periode, inisiatif atau partisipasi dalam kegiatan semacam ini belum berjalan. Terjadi peningkatan yang sangat kecil pada tahun 2021 menjadi 0,05 persen, terlihat adanya peningkatan yang lebih signifikan menjadi 4,09 persen pada tahun 2022, kemudian berlanjut pada tahun 2023 menjadi 7,02 persen dan pada tahun 2024 capaian kembali meningkat menjadi 10,59 persen. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan dalam partisipasi keluarga di Kabupaten Sikka dalam kelompok kegiatan ketahanan keluarga, terutama dalam tiga tahun terakhir (2022-2024). Meskipun angka 10,59 persen di tahun 2024 masih tergolong relatif kecil dibandingkan total keluarga, kenaikan yang signifikan dari angka nol di tahun 2020 mengindikasikan adanya upaya sistematis dan kesadaran yang mulai tumbuh di masyarakat.

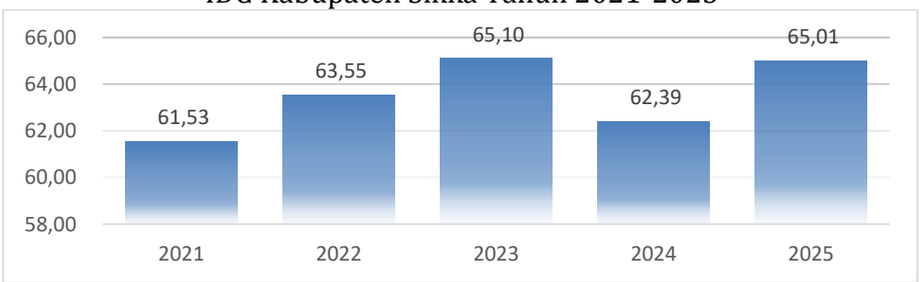
Selain membangun Keluarga Sejahtera (KS), pemerintah Indonesia juga menginisiasi program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), yang kini berkembang menjadi Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri. Program ini merupakan miniatur pembangunan keluarga yang terintegrasi di tingkat desa/kelurahan, melibatkan berbagai sektor untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari hulu hingga hilir. Di Kabupaten Sikka, komitmen terhadap program ini menunjukkan peningkatan yang sangat pesat dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Pada periode 2020 hingga 2023, jumlah Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri di Kabupaten Sikka tercatat sebanyak 28 kampung. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan yang pesat dengan Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri meningkat drastis menjadi 194 kampung. Kenaikan signifikan ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk menjadikan program keluarga berkualitas sebagai prioritas pembangunan. Keberhasilan pembentukan Kampung KB Mandiri yang demikian banyak juga tidak lepas dari peran serta aktif masyarakat. Ini mengindikasikan adanya kesadaran dan kemauan dari komunitas lokal untuk terlibat dalam upaya peningkatan kualitas hidup mereka.

Upaya pembangunan manusia terdapat istilah mengenai pembangunan berbasis gender yang mencakup pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Keberhasilan sebuah pembangunan memiliki ketergantungan pada sejauh mana keseimbangan partisipasi perempuan dan laki-laki terus didorong secara maksimal di semua aspek kehidupan. Meningkatkan partisipasi laki-laki dan perempuan, keterbukaan terhadap akses yang setara beserta kontrol yang seimbang menjadi prasyarat, sehingga manfaat yang diperoleh dapat secara adil dan merata. Untuk tujuan tersebut, urgensi kesetaraan gender semakin terlihat di

semua bidang pembangunan, baik pada bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial maupun politik. Menyertakan perempuan dalam proses pembangunan bukanlah berarti hanya sebagai suatu tindakan yang dipandang dari sisi humanisme belaka. Namun peran yang dilakukan oleh perempuan dalam kesertaannya di bidang pembangunan merupakan tindakan dalam rangka mengangkat harkat serta kualitas dari perempuan itu sendiri.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik dan manajerial. Tiga indikator yang digunakan yaitu Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, Keterlibatan perempuan di parlemen, dan Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi, dan teknisi (Kemen-PPPA, 2020). Indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Sikka meskipun bervariatif cenderung naik dan turun, namun masih rendah. IDG Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2025 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.27
IDG Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

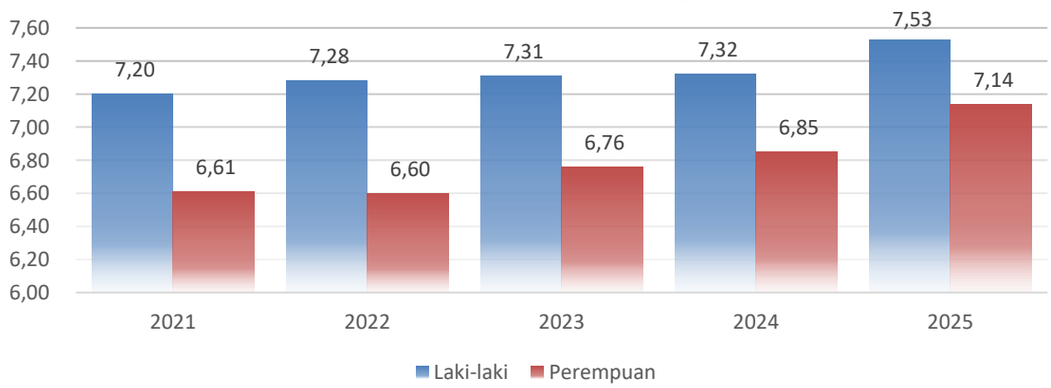


Sumber: BPS, 2025

Dari tahun 2021-2025 angka IDG Kabupaten Sikka mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2021, IDG Kabupaten Sikka sebesar 61,53, meningkat menjadi 63,55 pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 65,10 pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 62,39, dan tahun 2025 kembali meningkat menjadi 65,01.

Pembangunan aspek gender juga tercermin dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan kemandirian. Tingkat IPM yang rendah di Kabupaten Sikka sejalan dengan kurangnya kesempatan yang setara bagi perempuan di wilayah tersebut untuk mengakses pendidikan. Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Sikka Tahun 2020-2025 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.28
Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025



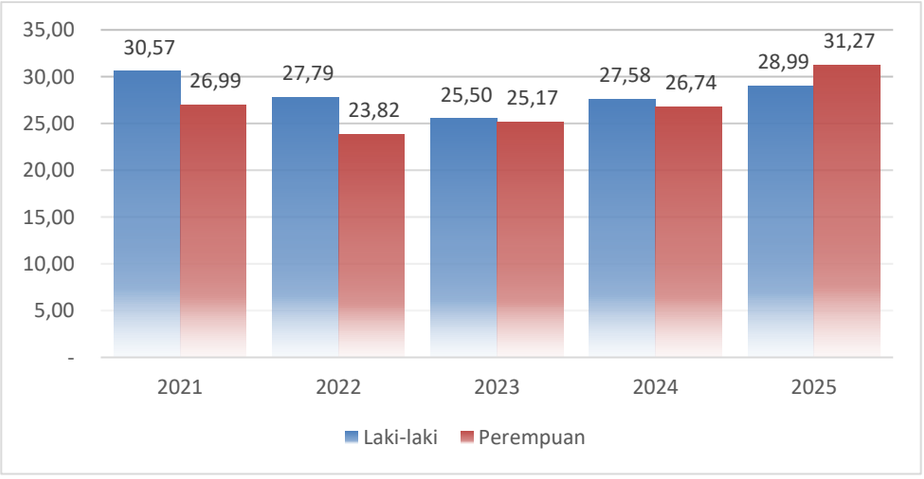
Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka. 2025

Data menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan yang ditempuh oleh penduduk perempuan di Kabupaten Sikka lebih rendah daripada penduduk laki-laki, seperti tercermin dari Rata-rata Lama Sekolah perempuan yang selalu lebih rendah daripada laki-laki dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2025, Rata-rata Lama Sekolah untuk laki-laki mencapai 7,53 tahun, sementara untuk perempuan hanya 7,14 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki di Kabupaten Sikka cenderung menempuh pendidikan hingga tingkat yang

lebih tinggi, setara dengan kelas dua sekolah menengah pertama, sedangkan perempuan hanya mencapai tingkat pendidikan setara dengan kelas satu sekolah menengah pertama.

Kurangnya rata-rata tahun pendidikan yang ditempuh oleh penduduk perempuan dibandingkan dengan laki-laki di Kabupaten Sikka menunjukkan bahwa masih ada sebagian perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan mereka, sehingga pendidikan perempuan di wilayah tersebut dapat dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini selaras dengan data tingkat partisipasi sekolah untuk penduduk di atas 25 tahun. Perempuan di Kabupaten Sikka mengalami tingkat partisipasi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Persentase Penduduk Usia 25 Tahun Ke Atas dengan Pendidikan SMA Ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.29
Persentase Penduduk Usia 25 Tahun Ke Atas dengan Pendidikan SMA Ke Atas Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021-2025



Sumber: NTT Dalam Angka. 2025

Data menunjukkan bahwa persentase penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Sikka yang telah menyelesaikan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) atau lebih tinggi, baik pada laki-laki maupun perempuan di Kabupaten Sikka mengalami peningkatan namun masih didominasi oleh laki-laki sejak tahun 2021 hingga 2024. Namun pada tahun 2025, didominasi oleh perempuan.

Meskipun demikian, perempuan di Kabupaten Sikka memiliki harapan untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini terlihat dalam data lima tahun terakhir yang menunjukkan bahwa harapan lama sekolah perempuan di Kabupaten Sikka lebih tinggi daripada laki-laki. Pada tahun 2025, harapan lama sekolah perempuan mencapai 14,05 tahun, setara dengan akhir Sekolah Menengah Atas sementara harapan lama sekolah laki-laki adalah 13,56 tahun.

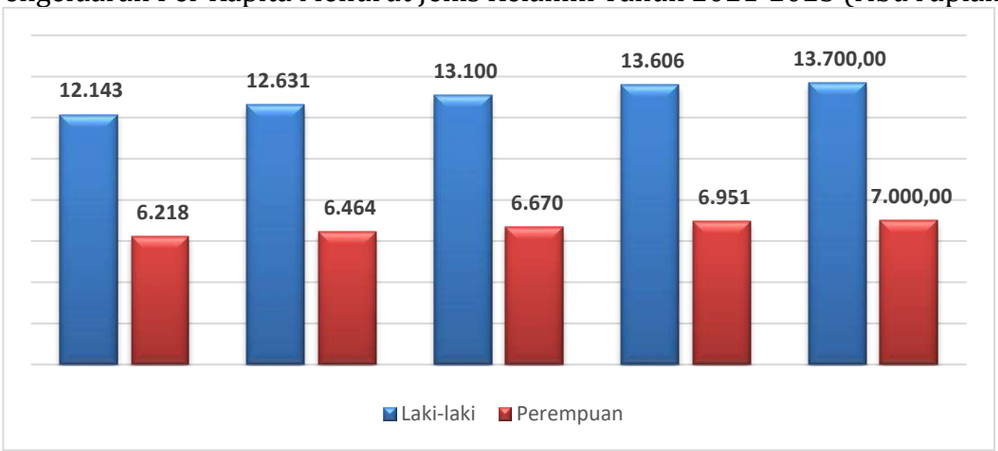
Grafik 2.30
Harapan Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021-2025



Sumber: NTT dalam Angka. 2026

Dari perspektif kemandirian ekonomi, perempuan di Kabupaten Sikka juga menunjukkan tingkat kemandirian yang lebih rendah daripada laki-laki sejak tahun 2021 hingga 2025. Pada tahun 2025, pengeluaran rata-rata laki-laki mencapai Rp13.700, sedangkan perempuan mencapai Rp7.000. Hal ini menandakan bahwa kemandirian ekonomi perempuan di Kabupaten Sikka mulai mendekati tingkat yang sebanding dengan laki-laki (lihat grafik 2.44).

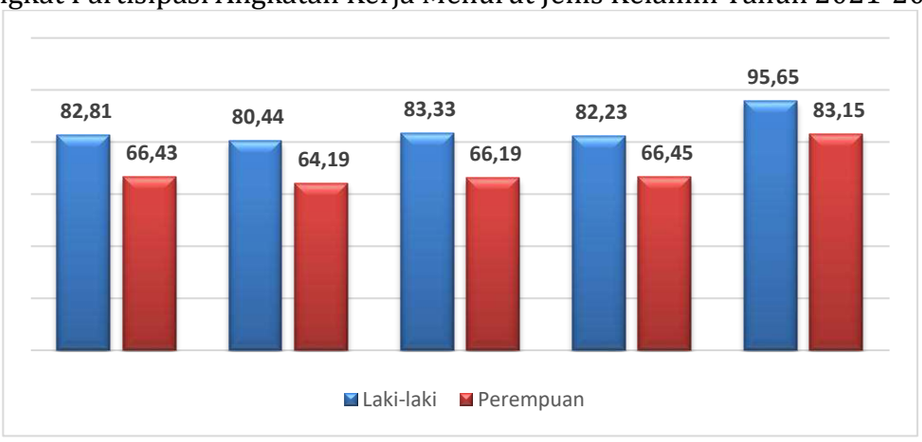
Grafik 2.31
Pengeluaran Per Kapita Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021-2025 (ribu rupiah)



Sumber: NTT dalam Angka, 2026

Pendidikan bagi perempuan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemandirian pribadi, tetapi juga memiliki manfaat yang signifikan bagi keluarga dan masyarakat secara luas. Peran aktif perempuan dalam proses pembangunan tercermin melalui partisipasinya dalam dunia kerja, yang merupakan indikator yang jelas dan dapat dianalisis secara langsung. Meskipun demikian, perempuan cenderung lebih banyak terlibat dalam pekerjaan yang tidak tergolong dalam kategori yang berubah atau yang dilakukan di luar rumah, sehingga kadang kala kontribusi mereka dalam dunia kerja tidak terlihat secara mencolok.

Grafik 2.32
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2026

Perempuan di Kabupaten Sikka yang belum mencapai tingkat kemandirian juga dipengaruhi oleh rendahnya upaya pemberdayaan terhadap mereka. Tingkat pemberdayaan yang rendah disebabkan oleh minimnya partisipasi politik perempuan di Kabupaten Sikka, baik dalam hal pemahaman tentang politik maupun aktif terlibat dalam kegiatan politik. Kurangnya pemberdayaan juga berdampak pada kesulitan bagi perempuan untuk mencapai kemandirian ekonomi dan menjadi pekerja profesional yang mandiri secara finansial.

9. Pangan

Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun tidak, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Ketersediaan pangan merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui tingkat pemenuhan kebutuhan pokok akan pangan. Untuk mengetahui ketersediaan pangan, informasi mengenai pengadaan pangan menjadi penting. Ketersedian pangan mencakupi produksi, Pasokan, Cadangan pangan dan bantuan Pangan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan makanan suatu wilayah atau negara. Pengukuran tingkat ketahanan pangan dilakukan melalui skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencerminkan tingkat ketersediaan dan kualitas gizi dan variasi pola konsumsi penduduk.

Kebutuhan pangan yang cukup tinggi tersebut, ternyata sebagian besar dipenuhi oleh pasokan dari luar daerah. Sumber utama pemasok pangan untuk Sikka tercatat adalah Jawa dan Sulawesi. Dari data yang disajikan terlihat bahwa yang mampu dipenuhi oleh daerah hanya sekitar 10 persen sampai 15 persen. Angka ini mengirimkan pesan yang sangat kuat betapa besar risiko yang dihadapi oleh Kabupaten Sikka, jika sesuatu terjadi di daerah pemasok ataupun rantai distribusi terhambat. Risiko tersebut tidak hanya karena pasokan dari luar daerah, bahkan risiko rawan pangan juga muncul dari dalam daerah. Diberitakan oleh media massa bahwa pada tahun 2023 terdapat 4 desa di Sikka mengalami rawan pangan akibat kekeringan.

Tabel 2.48
Kebutuhan, Produksi dan Ketersediaan Pangan (Per Kapita Per Tahun) Tahun 2021-2024

Tahun	Kebutuhan Pangan (Kg)	Ketersediaan Pangan Berdasarkan Produksi (Kg)	Ketersediaan Pangan dari Luar Daerah (Kg)	Ketersediaan Pangan (Ton)
2021	111,5	21	271	292
2022	106,3	20	225	245
2023	108,3	21,75	139,62	161,37
2024	107,2	21,87	185,69	207,56

Sumber: Statistik Ketahanan Pangan 2021-2024 (Badan Ketahanan Pangan)

Berdasar tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat ketercukupan pangan dapat dipenuhi dengan baik, jauh melebihi kebutuhannya. Dilihat dari aspek kebutuhan pangan per kapita, penduduk Kabupaten Sikka relatif lebih tinggi dari angka nasional. Berdasar data BPS tahun 2022, rata rata kebutuhan konsumsi pangan per berkisar pada angka 90 kg per tahun, namun penduduk Sikka membutuhkan lebih dari 100 kg. Namun demikian dilihat dari perkembangannya angka kebutuhan itu terus menunjukkan penurunan, angka ini mengindikasikan terus meningkatnya diversifikasi pangan.

Ketersediaan pangan yang bergantung pada pasokan dari luar daerah itu dikonfirmasi oleh nilai skor PPH ketersediaan Kabupaten Sikka yang juga relatif rendah. Ketika nasional telah mencapai angka di atas 90, karena terus mengalami peningkatan, Kabupaten Sikka tetap berada pada angka 65,2. Angka skor PPH ketersediaan ini dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, angka ini menyatakan bahwa ketergantungan Sikka terhadap bahan pangan dari luar semakin tinggi.

Tabel 2.49
Skor PPH Ketersediaan Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2021-2024

Tahun	Kabupaten Sikka	Provinsi NTT	Nasional
2021	65,2	69,54	96,7
2022	65,2	65,23	92,9
2023	89,5	75,28	94,1
2024	83,9	72,38	93.5

Sumber: Statistik Ketahanan Pangan 2021-2024

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan suatu konsep yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai panduan untuk masyarakat dalam memilih dan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. PPH didasarkan pada prinsip bahwa pola makan yang seimbang dan beragam adalah kunci untuk menjaga kesehatan tubuh dan mencegah terjadinya berbagai penyakit. PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan agama. PPH mengacu pada kebutuhan gizi yang dianjurkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan organisasi kesehatan internasional lainnya. PPH menekankan pentingnya mengkonsumsi berbagai macam makanan dari berbagai kelompok pangan, termasuk sumber karbohidrat kompleks (seperti beras,gandum, dan umbi-umbian), protein nabati dan hewani, lemak sehat, sayuran, buah-buahan, dan susu serta produk olahannya. Prinsip utama yang menjadi dasar PPH ini adalah keseimbangan proporsi pangan, variasi atau ragamnya, frekuensi dan porsi makan serta kualitas makanan. Semua itu merupakan kesatuan yang dapat mendukung tercapainya PPH. Dalam perspektif konsumsi, skor PPH Kabupaten Sikka juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi NTT maupun Nasional. Dilihat dari tren yang terjadi, skor PPH Kabupaten Sikka terus mengalami penurunan, sejalan dengan penurunan yang terjadi di Provinsi NTT. Kecenderungan penurunan trend skor PPH ini menunjukkan bahwa diversifikasi pangan di Sikka semakin memburuk. Diversifikasi yang makin buruk harus menjadi perhatian karena dampak dari kondisi pangan yang semakin buruk akan berdampak luas pada kesehatan secara keseluruhan.

10. Pertanahan

Pertanahan dalam suatu wilayah mengacu pada area atau kawasan tertentu di wilayah yang memiliki dokumentasi resmi berupa sertifikat sebagai bukti legal atas kepemilikan atau hak atas tanah yang mencakup informasi terkait luas dan batas-batas tertentu dari tanah tersebut. Sertifikat ini menunjukkan bahwa pihak yang tercatat dalam dokumen tersebut memiliki hak sah untuk memiliki, mengelola, atau menggunakan tanah tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sertifikat ini berperan penting dalam menjamin kepastian hukum terkait kepemilikan dan penggunaan tanah di wilayah tersebut.

Tabel 2.50
Kinerja Pertanahan di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

No.	Indikator	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	-	-	-	-
2	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara	100	100	60	66,66
3	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	100	100	100	-

Sumber: Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

Pada rentang tahun 2021 hingga 2024, Kabupaten Sikka berhasil menyelesaikan seluruh kasus tanah negara yang ada. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen dan efisiensi pihak berwenang dalam menangani masalah kepemilikan tanah yang terkait dengan status hukum negara. Dengan mencapai tingkat penyelesaian 100 persen berarti semua sengketa atau permasalahan terkait tanah negara telah di atasi dan diselesaikan dengan baik selama periode tersebut. Hal ini mencerminkan upaya keras untuk memastikan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah di wilayah Sikka, yang pada gilirannya dapat berdampak positif terhadap stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut. Hal ini juga selaras dengan penyelesaian izin lokasi yang keseluruhannya mencapai 100 persen.

11. Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator komposit yang mencerminkan kondisi lingkungan suatu wilayah berdasarkan tiga dimensi utama: kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Nilai IKLH menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup dan dampak kebijakan pembangunan terhadap kelestarian sumber daya alam.

Tabel 2.51
Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,60	68,98	75,44	72,82	72,82
Indeks Kualitas Air	53,45	50,00	60,00	53,33	53,33
Indeks Kualitas Udara	91,67	92,37	93,30	93,72	93,72
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	41,17	65,66	68,91	67,60	67,60

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2026

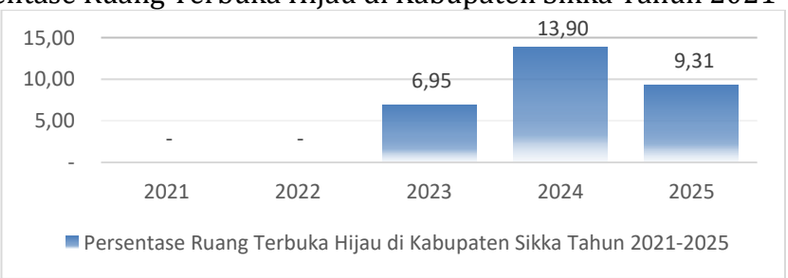
Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, capaian IKLH Kabupaten Sikka selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang relatif fluktuatif. Pada tahun 2021, IKLH berada pada angka 60,60. Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan lingkungan yang cukup signifikan, terutama pada sektor air dan tutupan lahan. Selanjutnya, pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 68,98, dan kembali meningkat pada tahun 2023 hingga mencapai titik tertinggi selama periode lima tahun, yaitu 75,44. Meskipun demikian, pada tahun 2024 dan 2025 terjadi sedikit penurunan menjadi 72,82, meski masih berada pada kategori sedang menuju baik.

Secara lebih rinci, penurunan IKLH pada tahun 2021 dipengaruhi oleh rendahnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang hanya sebesar 41,17, meskipun Indeks Kualitas Udara tetap tinggi yaitu 91,67. Tren positif IKLH tahun 2023 didorong oleh perbaikan kualitas tutupan lahan hingga 68,91 dan kualitas air yang meningkat menjadi 60,00. Namun, pada 2024, penurunan kualitas air menjadi 53,33 menjadi faktor utama turunnya kembali IKLH, meskipun kualitas udara terus meningkat hingga 93,72 dan kualitas tutupan lahan sedikit menurun menjadi 67,60.

Data tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Sikka masih menghadapi tantangan, terutama dalam pengendalian pencemaran air dan konservasi lahan. Sementara kualitas udara cenderung stabil dan terus meningkat, upaya peningkatan kualitas air dan pelestarian tutupan lahan harus menjadi prioritas dalam kebijakan lingkungan hidup ke depan. Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pengawasan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Keanekaragaman hayati adalah komponen utama yang menopang stabilitas dan keberlanjutan ekosistem, serta menjadi indikator penting dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas. Di tingkat daerah, keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi salah satu parameter kunci dalam mengukur kondisi lingkungan yang mendukung pelestarian biodiversitas. Fungsi ekologis RTH tidak hanya sebagai paru-paru kota, tetapi juga sebagai habitat bagi flora dan fauna lokal, kawasan resapan air, serta penyeimbang iklim mikro yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Grafik 2.33
Persentase Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2026

Di Kabupaten Sikka, perkembangan persentase RTH menunjukkan tren peningkatan meskipun masih berada di bawah target ideal nasional sebesar 30 persen dari luas wilayah

perkotaan. Berdasarkan data yang tersedia, pada tahun 2021 hingga 2022 belum terdapat data resmi mengenai luasan atau persentase RTH. Baru pada tahun 2023, RTH tercatat sebesar 6,95 persen, dan meningkat cukup signifikan menjadi 13,9 persen pada tahun 2024. Namun pada tahun 2025 menurun lagi menjadi 9,31.

Pengelolaan sampah yang efektif merupakan bagian krusial dalam menciptakan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dalam konteks Kabupaten Sikka, tantangan geografis kepulauan serta pertumbuhan kawasan permukiman menuntut sistem pengelolaan sampah yang responsif, inklusif, dan berbasis masyarakat. Kualitas pengelolaan sampah berkontribusi langsung terhadap pengurangan pencemaran tanah dan air, peningkatan kesehatan masyarakat, serta pelestarian tutupan lahan dari tekanan alih fungsi sebagai tempat pembuangan tidak resmi.

Tabel 2.52
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2024

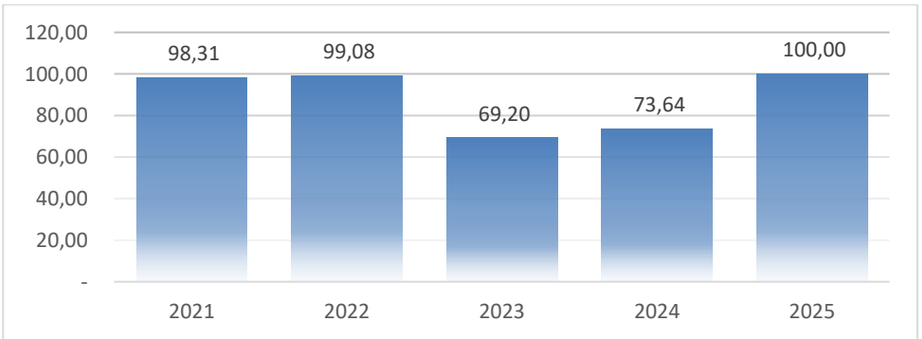
Indikator	2021	2022	2023	2024
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	*)	*)	*)	15,50

Keterangan: *) = tidak dilakukan perhitungan
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2026

Berdasarkan data yang tersedia, indikator kinerja pengelolaan sampah pada tahun 2025 beu baru mulai terukur secara resmi pada tahun 2024, dengan nilai indeks sebesar 15,50. Ini menjadi baseline awal untuk menilai efektivitas sistem pengelolaan sampah daerah dan menggambarkan bahwa meskipun terdapat upaya peningkatan, masih diperlukan perbaikan besar dalam aspek kelembagaan, teknis, dan partisipasi publik.

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan salah satu aspek krusial dalam menjaga kualitas lingkungan hidup, terutama di wilayah yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan dan aktivitas industri. Di Kabupaten Sikka, indikator Persentase Limbah B3 yang Terkelola menunjukkan dinamika capaian yang signifikan dalam kurun waktu 2020 hingga 2024.

Grafik 2.34
Persentase Limbah B3 yang Terkelola di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2026

Pada tahun 2021, persentase limbah B3 yang terkelola mencapai 98,31 persen dan kembali naik menjadi 99,08 persen di tahun 2022. Capaian tinggi ini mencerminkan efektivitas sistem pengelolaan limbah medis dan bahan berbahaya lainnya, terutama dari fasilitas pelayanan kesehatan seperti RSUD TC Hillers dan unit-unit pelayanan kesehatan yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka.

Namun demikian, pada tahun 2023 terjadi penurunan drastis dalam persentase pengelolaan limbah B3 menjadi 69,2 persen, yang kemudian hanya sedikit membaik di tahun 2024 menjadi 73,64 persen. Dan Tahun 2025 menjadi 100 persen. Penurunan signifikan ini disebabkan oleh gangguan pada insinerator, yakni alat pembakar limbah yang menjadi komponen vital dalam proses pemusnahan limbah B3. Gangguan teknis ini mengakibatkan

tidak optimalnya proses pembakaran, sehingga volume limbah yang berhasil dimusnahkan jauh menurun dibandingkan dengan volume yang dihasilkan. Hal ini berdampak langsung terhadap capaian kinerja lingkungan dan meningkatkan risiko pencemaran apabila tidak segera ditangani.

Fluktuasi ini menunjukkan pentingnya keberlangsungan fungsi fasilitas pengolah limbah, serta perlunya sistem pemantauan, pemeliharaan, dan investasi teknologi yang memadai dalam manajemen limbah berbahaya. Selain itu, kondisi ini juga menyoroti perlunya strategi mitigasi risiko, termasuk pengembangan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pemrosesan limbah dan diversifikasi teknologi pengelolaan limbah yang lebih andal.

Kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan merupakan salah satu aspek dalam menjamin kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Indikator ini mencerminkan tingkat ketaatan pelaku usaha dan kegiatan pembangunan terhadap peraturan lingkungan hidup, termasuk pemenuhan izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), serta peraturan perundang-undangan lingkungan lainnya.

Tabel 2.53
Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat	41	31	18	69	69
Jumlah pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan	100	64	34	208	86
Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (Persen)	41,00	48,44	52,94	33,17	18,84

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2026

Dalam rentang waktu 2021–2025, tren kepatuhan menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2021, dari 100 kegiatan atau usaha yang diawasi, hanya 41 yang dinyatakan taat, menghasilkan tingkat ketaatan sebesar 41,00 persen. Pada Tahun 2022, dari 64 kegiatan atau usaha yang diawasi, hanya 31 yang dinyatakan taat, menghasilkan tingkat ketaatan sebesar 48,44 persen. Pada Tahun 2023, dari 34 kegiatan atau usaha yang diawasi, hanya 18 yang dinyatakan taat, menghasilkan tingkat ketaatan sebesar 52,94 persen.

Namun demikian, pada tahun 2024, tingkat kepatuhan mengalami penurunan tajam menjadi 33,17 persen, meskipun jumlah kegiatan usaha yang diawasi meningkat drastis menjadi 208, dengan 69 kegiatan dinyatakan taat. Pada tahun 2025 kembali menurun menjadi 18,84 persen, jumlah kegiatan usaha yang diawasi pun menurun menjadi 86 kegiatan usaha yang diawasi, dengan 69 kegiatan yang taat.

Penurunan ini perlu dicermati lebih lanjut, mengingat peningkatan intensitas pengawasan seharusnya berdampak positif terhadap kinerja kepatuhan. Penurunan tingkat kepatuhan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara peningkatan pengawasan dan efektivitas pelaksanaan pembinaan serta sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi persetujuan lingkungan.

Untuk mendorong perbaikan ke depan, Pemerintah Kabupaten Sikka perlu meningkatkan sinergi lintas sektor dalam pembinaan lingkungan, memperkuat edukasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya kepatuhan lingkungan, serta mengembangkan sistem informasi lingkungan yang transparan dan berbasis risiko. Peningkatan kepatuhan ini sangat penting dalam memperbaiki Indeks Kualitas Lingkungan Hidup secara menyeluruh, khususnya dalam mengurangi dampak negatif kegiatan usaha terhadap air, udara, tanah, dan ekosistem wilayah Sikka.

Kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) merupakan komponen penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Di Kabupaten Sikka, indikator ini mencerminkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam upaya menjaga kualitas lingkungan, baik melalui kegiatan pengawasan, pelestarian sumber daya alam, maupun inisiatif-inisiatif lokal berbasis komunitas.

Tabel 2.54
Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Kelompok masyarakat yang terlibat dalam PPLH	10	11	11	10	10
Jumlah Partisipasi kelompok	10	11	11	10	10
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2026

Dalam rentang waktu 2021 hingga 2025, kinerja partisipasi masyarakat dalam PPLH ditunjukkan melalui jumlah kelompok masyarakat yang terlibat serta total partisipasi kelompok, yang keduanya secara konsisten mencerminkan 100 persen tingkat partisipasi berdasarkan kelompok yang diidentifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pada tahun 2020, terdapat 14 kelompok masyarakat yang terlibat secara aktif dalam kegiatan PPLH. Namun, jumlah ini menurun pada tahun 2021 menjadi 10 kelompok dan relatif stabil pada tahun-tahun berikutnya: 11 kelompok di tahun 2022 dan 2023, lalu kembali menjadi 10 kelompok pada 2024 hingga 2025.

Penurunan jumlah kelompok masyarakat yang terlibat tidak serta-merta menurunkan tingkat partisipasi, karena seluruh kelompok yang tercatat senantiasa menunjukkan komitmen penuh, tercermin dalam capaian 100 persen partisipasi masyarakat selama lima tahun berturut-turut. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah kelompok yang terlibat mengalami sedikit fluktuasi, kualitas keterlibatan dan efektivitas peran kelompok tersebut tetap terjaga. Partisipasi ini mencakup aktivitas seperti penghijauan, pemantauan lingkungan, pengelolaan sampah berbasis komunitas, serta edukasi publik terkait konservasi dan adaptasi perubahan iklim.

Kinerja ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sikka telah berhasil mempertahankan model partisipatif dalam pengelolaan lingkungan, yang sejalan dengan prinsip inklusivitas dan desentralisasi dalam kebijakan lingkungan hidup nasional. Namun demikian, tantangan ke depan terletak pada upaya meningkatkan kuantitas kelompok masyarakat yang terlibat serta memperluas jangkauan geografis dan substansi kegiatan PPLH, terutama di wilayah pesisir, pedalaman, dan daerah rawan bencana ekologis.

Selain itu, untuk meningkatkan kontribusi partisipasi masyarakat terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Pemerintah Kabupaten Sikka perlu memperkuat kelembagaan komunitas lingkungan, menyediakan insentif dan pelatihan bagi kader lingkungan, serta mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, LSM, akademisi, dan dunia usaha. Kinerja yang telah dicapai selama lima tahun terakhir menjadi modal sosial yang penting dalam membangun ketangguhan ekologis dan memperkuat tata kelola lingkungan berbasis masyarakat.

Efektivitas kajian lingkungan dalam memitigasi dampak kegiatan, rencana, dan/atau program (KRP) menjadi tolok ukur penting dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sikka. Kajian ini mencakup berbagai instrumen lingkungan hidup seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), maupun dokumen lingkungan lainnya yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Tabel 2.55
Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak Kegiatan, Rencana, dan/atau Program (KRP) di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Total jumlah Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	136	94	87	65	65

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2026

Selama periode 2021–2025, efektivitas kajian lingkungan diukur melalui dua indikator utama: total jumlah rekomendasi hasil kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti, dan persentase rekomendasi yang benar-benar diakomodasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, atau revisi kebijakan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, seluruh rekomendasi yang dikeluarkan setiap tahunnya selalu ditindaklanjuti dengan tingkat kepatuhan 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa rekomendasi hasil kajian tidak hanya bersifat formalitas administratif, tetapi secara nyata telah digunakan untuk pengambilan keputusan dan pengendalian dampak lingkungan.

Pada tahun 2020, terdapat 49 rekomendasi hasil kajian yang ditindaklanjuti, kemudian meningkat signifikan menjadi 136 rekomendasi pada 2021, sebelum menurun kembali menjadi 94 pada 2022, 87 pada 2023, 65 pada 2024 dan 2025. Penurunan jumlah ini tidak menunjukkan penurunan efektivitas, melainkan dapat diartikan sebagai hasil dari konsolidasi kebijakan lingkungan yang semakin matang, penyempurnaan sistem evaluasi lingkungan, serta penurunan jumlah KRP yang berpotensi menimbulkan dampak besar.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Sikka perlu terus memastikan bahwa rekomendasi hasil kajian lingkungan tidak hanya dilaksanakan dalam bentuk tindakan korektif, tetapi juga menjadi acuan utama dalam perencanaan program pembangunan jangka menengah dan panjang. Selain itu, efektivitas ini akan semakin optimal bila didukung oleh keterlibatan masyarakat, transparansi informasi, dan penguatan sistem pemantauan serta evaluasi dampak lingkungan secara digital dan terintegrasi.

Kapasitas sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen mendasar dalam mendukung efektivitas tata kelola lingkungan hidup di tingkat daerah. SDM yang kompeten dan terlatih sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan, pengawasan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di Kabupaten Sikka, kapasitas SDM bidang lingkungan hidup selama periode 2020–2024 masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kelembagaan yang signifikan. Salah satu indikator utama yang menandai lemahnya kapasitas kelembagaan adalah tidak tersedianya data terkait jumlah maupun persentase penyuluh lingkungan hidup yang telah ditingkatkan kompetensinya sepanjang lima tahun terakhir. Selain itu, berdasarkan catatan Dinas Lingkungan Hidup, belum terdapat tenaga penyuluh lingkungan hidup yang secara khusus ditugaskan atau diberikan pelatihan kompetensi berbasis lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan fungsi edukatif dan fasilitatif di tingkat akar rumput yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat literasi lingkungan, advokasi masyarakat, serta implementasi program-program berbasis komunitas.

Minimnya penyuluh lingkungan hidup yang tersertifikasi maupun yang memiliki pelatihan teknis berdampak langsung pada keterbatasan daerah dalam membina masyarakat, mendampingi pelaku usaha, dan melakukan pengawasan lingkungan di lapangan secara berkelanjutan. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang melemahkan efektivitas instrumen-instrumen seperti AMDAL, UKL-UPL, dan dokumen RKL-RPL dalam implementasinya. Lebih lanjut, lemahnya kapasitas SDM lingkungan hidup juga membatasi daya serap Kabupaten Sikka terhadap program-program nasional dan provinsi yang berbasis pelibatan masyarakat, seperti Program Kampung Iklim (ProKlim), konservasi berbasis masyarakat, atau skema insentif hijau lainnya. Padahal, keberadaan penyuluh lingkungan hidup yang kompeten merupakan kunci untuk mendorong transformasi perilaku dan penguatan pengawasan partisipatif di tingkat lokal.

Penyelesaian sengketa dan tindak pidana lingkungan hidup merupakan indikator penting dalam sistem penegakan hukum dan pengelolaan lingkungan yang adil, akuntabel, dan berkelanjutan. Kinerja dalam aspek ini mencerminkan kapasitas institusional Pemerintah Kabupaten Sikka, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, dalam menanggapi aduan masyarakat, menangani konflik sumber daya alam, serta menindak pelanggaran hukum yang berdampak terhadap lingkungan hidup.

Tabel 2.56
Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup
Di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah penanganan pengaduan lingkungan hidup	16	26	26	25	22
Jumlah penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	16	16	12	17	17
Persentase Penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	100%	61,54%	46,15%	68,00%	68,00%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2026

Selama periode 2021–2025, tren penanganan dan penyelesaian kasus lingkungan hidup menunjukkan dinamika yang signifikan. Pada tahun 2021, seluruh pengaduan lingkungan yang diterima berhasil diselesaikan secara tuntas sebanyak 16 kasus, dengan tingkat penyelesaian mencapai 100 persen. Capaian ini mencerminkan efektivitas koordinasi lintas sektor, respons cepat terhadap aduan masyarakat, dan keberhasilan dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur administratif maupun non-litigasi.

Namun, sejak tahun 2022 terjadi penurunan drastis dalam persentase penyelesaian sengketa. Dari 26 pengaduan yang diterima pada 2022, hanya 16 yang berhasil diselesaikan (61,54 persen). Penurunan ini berlanjut pada tahun 2023, dengan hanya 12 dari 26 kasus yang dapat ditangani tuntas (46,15 persen). Kendati demikian, pada tahun 2024 hingga 2025 terdapat perbaikan dengan meningkatnya jumlah penyelesaian menjadi 17 dari 25 kasus (68,00 persen). Fluktuasi ini menunjukkan adanya tantangan kapasitas dalam penegakan hukum lingkungan, baik dari sisi teknis, yuridis, maupun sumber daya manusia. Penurunan tingkat penyelesaian dapat disebabkan oleh kompleksitas kasus, keterbatasan kewenangan administratif, lemahnya pembuktian, hingga rendahnya partisipasi pelaku usaha dalam penyelesaian sengketa secara kooperatif. Di sisi lain, peningkatan kembali pada 2024 dan 2025 mengindikasikan adanya perbaikan mekanisme penyelesaian dan penguatan fungsi pengawasan lingkungan.

Secara keseluruhan, meskipun Kabupaten Sikka telah menunjukkan komitmen dalam merespons aduan lingkungan hidup, efektivitas penyelesaian sengketa masih perlu ditingkatkan secara sistemik. Perbaikan ini merupakan bagian integral dari peningkatan lingkungan hidup berkualitas, serta menjadi fondasi penting bagi tata kelola lingkungan yang responsif, inklusif, dan berbasis keadilan ekologis.

b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Sanitasi layak merupakan bagian esensial dari layanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjamin lingkungan yang bersih dan sehat. Akses terhadap sanitasi yang layak tidak hanya berdampak pada penurunan angka penyakit berbasis lingkungan, tetapi juga mencerminkan keberhasilan pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik yang inklusif.

Grafik 2.35
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak
di Kabupaten Sikka Tahun 2021 – 2025



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, 2026

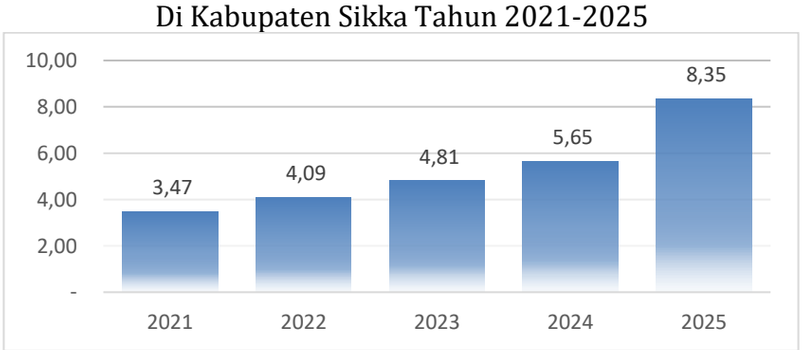
Berdasarkan data persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak di Kabupaten Sikka pada periode 2021 hingga 2024, terjadi peningkatan yang relatif lambat dan belum signifikan. Pada tahun 2021, akses sanitasi layak baru menjangkau 49,34 persen rumah tangga, kemudian meningkat menjadi 50,97 persen pada 2022. Kenaikan ini berlanjut tipis pada 2023 sebesar 51,28 persen, namun mengalami sedikit penurunan menjadi 51,03 persen pada 2024. Tahun 2025 sebesar 51,31. Tren ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi perbaikan secara bertahap, upaya percepatan perlu terus diperkuat, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur sanitasi yang layak, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor agar target akses sanitasi universal dapat tercapai secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Sikka.

Pemerintah Kabupaten Sikka perlu memperkuat strategi intervensi sanitasi yang terintegrasi dengan program perumahan, pengelolaan air limbah domestik, dan perlindungan lingkungan. Pendekatan berbasis wilayah dan komunitas perlu diintensifkan, dengan dukungan regulasi daerah, kolaborasi antar perangkat daerah, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan pendanaan. Diperlukan pula penguatan sistem monitoring dan evaluasi agar capaian sanitasi layak dapat terukur secara akurat dan berkelanjutan menuju target nasional RPJMN dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Pengelolaan sampah yang efektif menjadi salah satu indikator utama dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan tersebut adalah kemampuan daerah dalam mengolah timbulan sampah melalui fasilitas pengolahan yang tersedia. Tingkat timbulan sampah yang terolah tidak hanya mencerminkan efisiensi sistem pengelolaan, tetapi juga kesiapan infrastruktur dan kesadaran masyarakat dalam pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya.

Grafik 2.36
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025



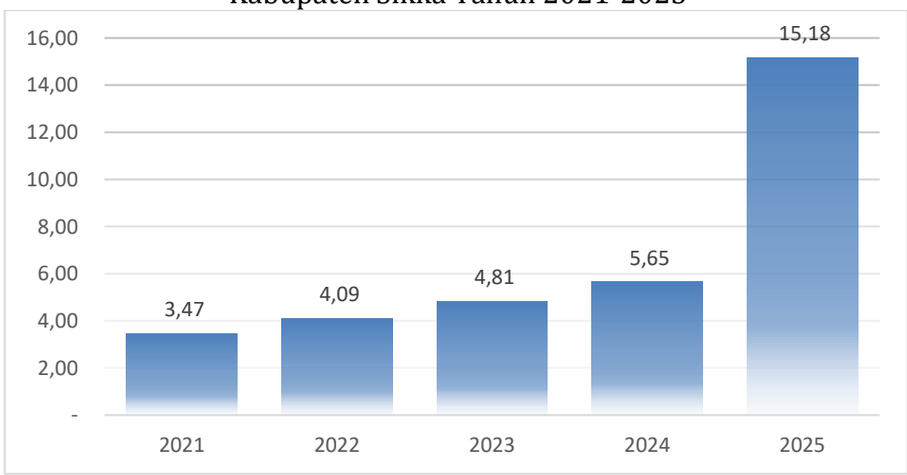
Keterangan: Satuan Kilogram
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2026

Berdasarkan tabel di atas, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah timbulan sampah yang berhasil diolah di fasilitas pengolahan selama periode 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021, jumlah timbulan sampah yang terolah tercatat sebesar 3,47 persen. Angka ini meningkat secara bertahap pada tahun 2022 menjadi 4,09 persen, dan kembali naik menjadi 4,81 persen pada tahun 2023 dan 5,65 pada tahun 2024. Peningkatan tajam mulai terjadi pada tahun 2025, di mana volume sampah terolah melonjak dibandingkan tahun sebelumnya, yakni mencapai 8,35 persen. Tren positif ini merupakan capaian positif selama lima tahun terakhir. Kenaikan drastis ini mengindikasikan adanya penguatan kapasitas pengelolaan sampah di tingkat daerah, baik dari sisi pengadaan dan operasionalisasi fasilitas, peningkatan kapasitas SDM, maupun partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Meskipun demikian, peningkatan volume sampah terolah juga menjadi indikator meningkatnya timbulan sampah secara keseluruhan yang perlu diantisipasi dengan strategi pengurangan dari hulu, seperti kampanye pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), serta penguatan regulasi daerah terkait pengelolaan sampah berbasis kewilayahan.

d. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Layanan pengumpulan sampah yang menjangkau secara penuh seluruh rumah tangga merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan sehat. Cakupan layanan ini tidak hanya mencerminkan kapasitas operasional pemerintah daerah dalam mengelola sampah domestik, tetapi juga menjadi indikator penting bagi kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.

Grafik 2.37
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2026

Berdasarkan grafik di atas, proporsi rumah tangga yang telah terlayani penuh oleh sistem pengumpulan sampah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021, cakupan layanan pengumpulan sampah baru menjangkau 3,47 persen rumah tangga. Angka ini naik menjadi 4,09 persen pada tahun 2022, dan terus meningkat menjadi 4,81 persen pada tahun 2023 dan tahun 2024 dengan capaian 5,65 persen, Peningkatan ini berlanjut secara progresif di tahun 2025 hingga mencapai 15,18 persen. Meskipun terjadi tren pertumbuhan positif, capaian ini masih tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan ideal cakupan layanan pengumpulan sampah yang menjangkau seluruh wilayah permukiman, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan.

Rendahnya proporsi ini menunjukkan masih terbatasnya cakupan layanan pengumpulan sampah oleh pemerintah daerah, yang kemungkinan besar disebabkan oleh keterbatasan armada, tenaga operasional, sistem manajemen pengangkutan, serta tantangan geografis dan persebaran permukiman yang menyulitkan distribusi layanan. Selain itu, aspek kesadaran masyarakat dalam mengikuti skema layanan formal juga menjadi faktor penentu efektivitas pengumpulan sampah.

Pemerintah Kabupaten Sikka perlu memperluas cakupan layanan pengumpulan sampah secara bertahap dan merata melalui penguatan kelembagaan pengelolaan sampah, optimalisasi armada dan infrastruktur, serta integrasi sistem layanan berbasis zonasi dan komunitas. Perlu juga dilakukan pembaruan kebijakan layanan persampahan dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui edukasi dan insentif layanan, sehingga sistem pengumpulan sampah dapat berjalan lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan.

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi Kependudukan sebagai sistem pengelolaan dan pemeliharaan data penduduk. Tentunya ini mencakup berbagai kegiatan terkait dengan identifikasi, registrasi, dan pemeliharaan catatan tentang individu yang tinggal di suatu wilayah khususnya di Kabupaten Sikka, termasuk penduduk asli, pendatang, serta mereka yang lahir atau meninggal di wilayah tersebut. Administrasi kependudukan juga meliputi pemberian dan pemeliharaan dokumen-dokumen identifikasi resmi, seperti kartu identitas, akte kelahiran, dan lain sebagainya.

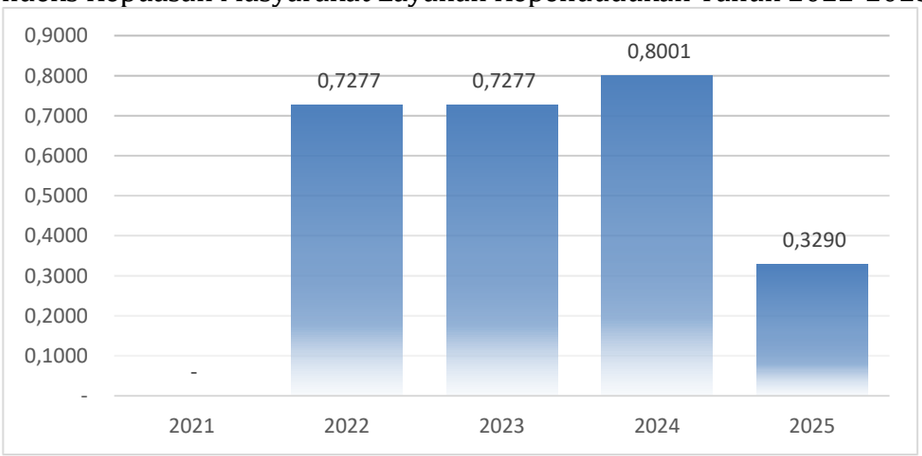
Tabel 2.57
Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan
Catatan Sipil Tahun 2021-2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Kepemilikan E-KTP	94,34	95,51	99,03	100	98,13
Persentase Kepemilikan KIA	34,54	34,96	36,63	40,76	45,11
Persentasi Aktivasi IKD	*)	*)	0,01	0,03	3,24
Persentase Akta Kematian	100	100	100	100	100
Persentase Akta Kelahiran	45,35	46,33	47,17	47,69	
Persentase Akta Perkawinan	49,15	51,63	53,6	55,69	52,16
Persentase Akta Perceraian	22,13	29,1	31,75	34,02	
Jumlah informasi kependudukan yang dimanfaatkan	*)	6 OPD	6 OPD	9 OPD	11 OPD
Cakupan pengelolaan profil kependudukan	1	1	1	1	1

Keterangan : *) = tidak dilakukan perhitungan
Sumber: Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, 2026

Dalam kepemilikan dokumen kependudukan seperti E-KTP dan akta kematian, Disdukcapil Kabupaten Sikka sudah mempunyai angka yang bagus dengan pencapaian angka mendekati 100 persen untuk kepemilikan E-KTP dan 100 persen untuk angka kematian. Hal ini menunjukkan bawah pengukuran masyarakat utamanya yang sudah ada di atas batas umur sudah sangat baik. Namun, angka ini perlu dicermati kembali dengan melihat kepemilikan KIA, akta kelahiran, akta perceraian dan akta perkawinan yang angkanya masih di kisaran 50 persen atau di bawah angka tersebut. Masih diperlukannya usaha dari Disdukcapil untuk dapat meningkatkan pencatatan tersebut. Terutama dalam hal akta kelahiran dan perceraian yang jumlahnya jauh di bawah 50 persen. Akta kelahiran merupakan identitas seseorang yang didasarkan pada hukum, pada dasarnya hal ini tidak hanya berkaitan pada administrasi, tapi juga untuk keperluan pembangunan daerah. Akta kelahiran merupakan sebuah kebutuhan untuk mendapatkan akses layanan dasar, serta pencetakan dokumen administrasi lainnya. Dalam peningkatan akta ini dapat diciptakan strategi perencanaan yang tepat sasaran dengan angka yang akurat. Tidak hanya itu, semakin banyak punya jumlah informasi kependudukan yang dimanfaatkan oleh beragam OPD setiap tahunnya.

Grafik 2.38
Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kependudukan Tahun 2022-2025



Sumber: Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, 2026

Terkait pelayanan kependudukan, Disdukcapil Kabupaten Sikka sudah mempunyai pelayanan yang sangat baik, terutama dengan peningkatan pesat di tahun 2024 yang awalnya ada di kisaran 70 persen, menjadi 80 persen. Sehingga dengan meningkatnya IKM ini menunjukkan kualitas pelayanan yang sudah cukup bagus, serta pelayanan administrasi

dijalankan tidak hanya sesuai dengan proses bisnisnya, tapi juga dengan efektif dan efisien sehingga menimbulkan rasa kepuasan dari sisi masyarakat. Namun demikian, hal ini masih memiliki kesempatan untuk lebih ditingkatkan

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Data capaian pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sikka dari tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan beberapa indikator yang mencerminkan perkembangan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan diri. Pertama, rata-rata jumlah kelompok binaan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) cukup stabil dalam 5 tahun terakhir, namun dalam 5 tahun belum terlihat LPM yang berprestasi. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan terhadap dorongan dan dukungan bagi LPM untuk mendapatkan pembinaan dan pendampingan agar dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan desa. Kedua, rata-rata jumlah kelompok binaan PKK juga cukup stabil dan menunjukkan adanya konsistensi dan kekuatan keterlibatan dari PKK dalam pemberdayaan keluarga dan menggerakkan kesejahteraan masyarakat.

Terakhir, terdapat partisipasi aktif dari kelompok PKK serta peningkatan partisipasi dalam dua tahun terakhir dari Posyandu yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam menggerakkan partisipasi aktif masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sikka.

Tabel 2.58
Capaian Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021-2025

No	Pemberdayaan Masyarakat	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	13 dan 147	13 dan 147	13 dan 147	13 dan 181	13 dan 181
2.	Jumlah kelompok binaan PKK	3741	3741	3741	3741	3741
3.	Jumlah LSM	4	4	4	4	4
4.	LPM Berprestasi	0	0	0	0	0
5.	PKK aktif	169	169	169	169	169
6.	Posyandu aktif	650	650	650	591	591

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Sikka, 2026

Berdasarkan data fasilitasi kerja sama desa di Kabupaten Sikka, terlihat adanya beragam tingkat partisipasi desa dalam menjalin kerja sama antar desa maupun dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan sosial dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Analisis dari data tersebut menunjukkan adanya ketimpangan fokus dan partisipasi desa terhadap berbagai isu tematik. Hingga saat ini, dari seluruh desa di Kabupaten Sikka, tercatat sebanyak 181 desa telah melaksanakan kerja sama dalam upaya penekanan angka AIDS, TBC, dan Malaria (ATM). Angka ini sangat dominan dan mencerminkan bahwa isu kesehatan menular masih menjadi prioritas dan perhatian utama di tingkat desa. Hal ini menunjukkan kesadaran kolektif serta dukungan kebijakan daerah dalam menanggulangi penyakit menular yang mengancam masyarakat secara luas. Besarnya jumlah ini juga dapat mencerminkan keberhasilan fasilitasi pemerintah daerah dalam membangun jaringan kerja sama desa untuk penanganan masalah kesehatan.

Sebaliknya, kerja sama desa dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) hanya melibatkan 5 desa, menandakan masih rendahnya kesadaran atau kapasitas desa dalam menjadikan pendidikan sebagai agenda kerja sama lintas desa. Padahal, ATS merupakan salah satu indikator penting dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan rendahnya angka kerja sama ini menunjukkan perlunya intervensi strategis dari pemerintah daerah, khususnya dalam membangun kemitraan antara desa, sekolah, dan lembaga non-formal pendidikan.

Program Desa Ramah Perempuan dan Anak melibatkan 45 desa, jumlah yang relatif moderat. Hal ini menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran dan kepedulian terhadap isu gender dan perlindungan anak, namun belum merata di seluruh wilayah. Masih dibutuhkan dukungan regulatif dan penguatan kelembagaan untuk memperluas jangkauan program ini secara menyeluruh. Sementara itu, kerja sama dalam kegiatan Desa Cerdas baru mencakup

15 desa, yang menunjukkan bahwa transformasi digital, literasi teknologi, dan inovasi layanan publik berbasis digital masih berada pada tahap awal di sebagian besar desa. Hal ini mengindikasikan tantangan dalam hal infrastruktur, SDM, maupun pemahaman terhadap manfaat teknologi informasi bagi tata kelola pemerintahan desa yang lebih efisien.

Terakhir, kerja sama desa dalam kegiatan Desa Inklusi baru dilakukan oleh 4 desa, mencerminkan masih rendahnya integrasi prinsip inklusi sosial dalam perencanaan dan pembangunan desa. Ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman dan advokasi agar lebih banyak desa dapat melibatkan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok marginal dalam proses pembangunan.

Tabel 2.59
Data Fasilitasi Kerja Sama Desa

No	Data Fasilitasi Kerjasama Desa	Jumlah Desa
1.	Jumlah Desa Yang melaksanakan Kerjasama dalam Melaksanakan Kegiatan Desa Cerdas	15
2.	Jumlah Desa Yang melaksanakan Kerjasama dalam Melaksanakan Kegiatan Desa Inklusi	4
3.	Jumlah Desa Yang melaksanakan Kerjasama dalam Melaksanakan Kegiatan Desa Ramah Perempuan dan Anak	45
4.	Jumlah Desa Yang melaksanakan Kerjasama dalam Melaksanakan Kegiatan Penekanan Angka AID, TBC dan Malaria (ATM)	181
5.	Jumlah Desa Yang melaksanakan Kerjasama dalam Melaksanakan Kegiatan Penurunan Angka Anak Tidak Sekolah (ATS)	5

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk memampukan desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai pemangku kepentingan di tingkat pemerintah desa, masyarakat desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa, menyusun perencanaan pembangunan yang berpihak pada kelompok miskin, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di desa. IDM mengidentifikasi status desa dalam cakupan survei dengan lima status yakni Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri. Perkembangan IDM Kabupaten Sikka selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.60
Indeks Desa Membangun Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

No	Status IDM	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Desa Sangat Tertinggal	13	2	10	5	0
2.	Desa Tertinggal	63	45	47	46	26
3.	Desa Berkembang	57	79	95	82	81
4.	Desa Maju	14	21	26	38	63
5.	Desa Mandiri	0	0	3	10	11
	Jumlah	147	147	181	181	181

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2026

Analisis terhadap perkembangan IDM Kabupaten Sikka selama periode 2020–2024 menunjukkan adanya tren positif dalam pembangunan desa, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan lima tahun ke depan.Secara umum, jumlah desa dengan status sangat tertinggal mengalami penurunan signifikan dari 21 desa pada tahun 2020 menjadi hanya 5 desa pada tahun 2024. Demikian pula, desa tertinggal juga menurun dari 73 desa pada tahun 2020 menjadi 46 desa pada tahun 2024. Penurunan jumlah desa dengan status paling rendah ini mencerminkan adanya peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, perbaikan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas masyarakat desa.

Sementara itu, jumlah desa berkembang menunjukkan tren peningkatan cukup tajam dari 45 desa pada tahun 2020 menjadi puncaknya 95 desa pada tahun 2023, meskipun sedikit menurun menjadi 82 desa pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar desa berada pada fase transisi menuju kemajuan, tetapi masih membutuhkan penguatan dari sisi ekonomi produktif dan tata kelola pemerintahan desa.

Jumlah desa maju dan desa mandiri juga terus meningkat, menunjukkan arah yang progresif dalam pembangunan desa. Desa maju bertambah dari hanya 8 desa pada tahun 2020 menjadi 38 desa pada tahun 2024. Bahkan, pada tahun 2024, Kabupaten Sikka mencatatkan 10 desa mandiri, padahal pada tiga tahun sebelumnya belum ada desa yang mencapai kategori ini. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa intervensi pembangunan yang dilaksanakan mulai menunjukkan hasil di sejumlah desa, terutama dalam aspek kelembagaan, layanan dasar, dan partisipasi masyarakat.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa terjadi perubahan total jumlah desa yang tercatat dari 147 desa pada tahun 2020–2022 menjadi 181 desa pada tahun 2023 dan 2024. Ini menunjukkan adanya pemekaran wilayah administratif desa yang harus disikapi dengan perencanaan pembangunan desa yang lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan lokal. Kemudian jumlah Lembaga Adat yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan di Kabupaten Sikka tidak ada perubahan jumlah yaitu tercatat pada tahun 2020-2024 terdapat 50 Lembaga Adat.

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah serangkaian kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengelola pertumbuhan populasi dalam wilayah khususnya di Kabupaten Sikka. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara jumlah penduduk dengan sumber daya yang tersedia, sehingga dapat memastikan kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Berikut tabel Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022.

Tabel 2.61
Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2025

No.	Indikator Kinerja	Cap				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,54	-	-		
2.	Total Fertility Rate (TFR)	1,90	2,60	2,60	2,55	2,19
3.	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	2,49	2,6	2,19	2,55	2,55
4.	Rasio Akseptor KB	1:0,712	1:0,550	1:0,550		

Sumber: Dinas P2KBP3A Kabupaten Sikka, 2026

Berdasarkan data di atas khususnya pada indikator kinerja Laju Pertumbuhan penduduk atau LPP, Pada tahun 2018, Kabupaten Sikka mengalami laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,19 persen. Angka ini menunjukkan adanya pertumbuhan populasi yang cukup tinggi pada tahun tersebut. Hal ini memicu perhatian untuk mengimplementasikan strategi pengendalian penduduk yang lebih efektif. Selanjutnya pada tahun 2019, Kabupaten Sikka

berhasil menurunkan laju pertumbuhan penduduk menjadi 0,46 persen. Tentunya hal Ini memperlihatkan bahwa upaya-upaya dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana telah memberikan hasil positif dengan mengurangi tingkat pertumbuhan populasi. Setahun berikutnya pada tahun 2020, Kabupaten Sikka terus mempertahankan tren penurunan dengan LPP sebesar 0,36 persen. Capaian ini menunjukkan kesuksesan dalam penerapan program dan kebijakan pengendalian penduduk yang efektif. lebih lanjut pada tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan LPP menjadi 0,54 persen. Meskipun terjadi peningkatan, tingkat pertumbuhan populasi masih berada dalam kisaran yang dapat diterima dan menunjukkan keberlanjutan upaya pengendalian penduduk yang baik. Meskipun terjadi sedikit fluktuasi, Kabupaten Sikka berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan populasi pada tingkat yang dapat diterima, menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam mengelola pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan.

15. Perhubungan

Pengembangan dan kinerja sektor perhubungan memegang peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sikka. Selama periode tahun 2021 hingga 2025, banyak indikator telah digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam bidang ini. Beberapa indikator tersebut mencakup Indeks konektivitas antar kecamatan, jumlah arus penumpang angkutan umum, izin trayek, uji KIR angkutan umum, kepemilikan KIR angkutan umum, layanan angkutan umum, tingkat ketersediaan rambu lalu lintas dan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan.

Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, kinerja urusan perhubungan di Kabupaten Sikka mencerminkan dinamika dalam pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang perlu mendapat perhatian strategis. Rasio konektivitas kabupaten/kota yang pada awalnya berada di angka 72,20 pada tahun 2020 mengalami peningkatan tipis pada 2021 menjadi 72,37, namun cenderung menurun dalam tiga tahun berikutnya, hingga mencapai 69,99 pada tahun 2024. Tren penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan kualitas layanan transportasi dan aksesibilitas wilayah.

Tabel 2.62
Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Rasio Konektivitas Kab/Kota	72,37	71,03	71,32	69,99	73,87
2.	Konektivitas Darat	0,95	0,93	0,94	0,92	0,96
3.	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	0	0	13,12	20,59	56,45
4.	Konektivitas Penyeberangan	0,19	0,19	0,19	0,19	0,22

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2026

Indikator konektivitas darat juga menunjukkan penurunan stabil dari 0,95 pada 2021, menjadi 0,93 di 2022, dan kembali menurun hingga 0,92 di 2024. Meskipun demikian, terdapat perkembangan positif pada aspek kelengkapan jalan terhadap kondisi ideal, yang mulai menunjukkan capaian pada 2023 sebesar 13,12 persen, dan meningkat menjadi 20,59 persen di 2024, dan 2025 sebesar 56,45. Setelah stagnan di angka 0 persen pada tiga tahun sebelumnya. Sementara itu, konektivitas penyeberangan tidak mengalami perubahan signifikan, tetap berada di angka 0,19 sepanjang lima tahun terakhir, mencerminkan belum adanya perluasan layanan penyeberangan secara berarti. Secara umum, meskipun terdapat kemajuan pada kelengkapan infrastruktur jalan, penurunan konektivitas menyeluruh dan stagnasi pada layanan penyeberangan menegaskan perlunya intervensi kebijakan yang lebih progresif, peningkatan investasi, serta penguatan tata kelola sektor transportasi untuk mendukung integrasi wilayah dan memperkuat daya saing daerah.

Transportasi merupakan tulang punggung pembangunan wilayah, khususnya dalam mendukung konektivitas antar kecamatan, antar kabupaten/kota, hingga antarpulau. Bagi Kabupaten Sikka yang memiliki karakter geografis kepulauan, penguatan kualitas layanan

transportasi darat dan laut menjadi bagian krusial dalam memastikan distribusi logistik, mobilitas penduduk, serta integrasi ekonomi lokal dan regional. Oleh karena itu, pengukuran kualitas layanan transportasi menjadi bagian penting dalam Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar. Kualitas Layanan Transportasi Darat dan Laut di Kabupaten Sikka Tahun 2020–2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.63
Kualitas Layanan Transportasi Darat dan Laut Tahun 2021–2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Rasio Konektivitas Kab/Kota	72,37	71,03	71,32	69,99	73,97
Konektivitas Darat	0,95	0,93	0,94	0,92	0,96
Persentase Kelengkapan Jalan yang terlah terpasang terhadap kondisi ideal	*)	*)	13,12	20,59	56,45
Konektivitas Penyeberangan	0,19	0,19	0,19	0,19	0,22

Keterangan : *) = tidak dilakukan perhitungan
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2026

Pada tahun 2021, rasio konektivitas tercatat sebesar 72,37. Namun, tren ini tidak berlanjut karena terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 71,03, diikuti sedikit peningkatan pada tahun 2023 sebesar 71,32, dan kembali menurun menjadi 69,99 pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan perlunya penguatan integrasi moda transportasi serta evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur pendukung agar konektivitas antar wilayah tetap terjaga dan mampu menunjang pemerataan pelayanan serta mobilitas masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Sikka.

Untuk aspek konektivitas darat, nilai rasio sedikit mengalami fluktuasi, yakni berada pada angka 0,95 pada tahun 2020–2021, menurun menjadi 0,93 di tahun 2022, naik sedikit menjadi 0,94 di 2023, dan turun kembali ke 0,92 pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya tantangan dalam kualitas atau kontinuitas jaringan jalan dan moda transportasi darat di wilayah Kabupaten Sikka. Salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya pengembangan dan pemeliharaan jalan yang menghubungkan pusat-pusat permukiman dan layanan publik.

Peningkatan konektivitas juga dapat dilihat dari indikator persentase kelengkapan jalan terhadap kondisi ideal, yang mulai menunjukkan kemajuan pada tahun 2023 dengan capaian 13,12 persen, dan meningkat lagi pada 2024 menjadi 20,59 persen. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan atau rehabilitasi jaringan jalan, meskipun masih jauh dari target kondisi ideal. Capaian ini harus ditindaklanjuti dengan alokasi pembiayaan yang lebih besar untuk infrastruktur konektivitas, serta perencanaan teknis berbasis kebutuhan wilayah terpencil dan pertumbuhan kawasan baru.

Sementara itu, untuk aspek konektivitas penyeberangan laut, rasio tetap berada di angka 0,19 sepanjang lima tahun terakhir. Angka ini menunjukkan masih terbatasnya kapasitas, jangkauan, atau frekuensi layanan penyeberangan yang tersedia. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan konektivitas laut yang inklusif dan mendukung pemerataan pembangunan.

Indeks konektivitas antar kecamatan mencerminkan sejauh mana wilayah- wilayah dalam Kabupaten Sikka terhubung satu sama lain. Sementara jumlah arus penumpang angkutan umum menunjukkan sejauh mana masyarakat dapat mengakses layanan transportasi publik. Izin trayek dan uji KIR angkutan umum mencerminkan regulasi dan standar keselamatan yang diterapkan dalam sektor ini. Sementara kepemilikan KIR angkutan umum dan layanan angkutan umum mencerminkan layanan dan kualitas yang tersedia bagi penduduk. Selain itu, tingkat ketersediaan rambu lalu lintas dan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan merupakan faktor-faktor penting dalam memastikan keselamatan dan keteraturan lalu lintas di Kabupaten Sikka. Capaian tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.64
Capaian Kinerja Bidang Perhubungan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks konektivitas antar-kecamatan (pulau)	100	100	100	100	100
2	Jumlah ijin trayek	58	58	58	58	58
3	Jumlah uji KIR angkutan umum	2.029	2.029	2.029	2.029	2.029
4	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	63,82	63,82	63,82	63,82	63,82
5	Persentase layanan angkutan umum	76,67	76,67	76,67	76,67	76,67
6	Tingkat ketersediaan Rambu	4734	4734	4734	4734	4734
7	Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan	44,226	46,437	48,5779	48,5779	48,5779

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka Tahun 2026

Jika ditilik dari data di atas, selama lima tahun terakhir, Kabupaten Sikka mencapai indeks konektivitas antarkecamatan sebesar 100%. Ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut telah berhasil membangun jaringan transportasi yang kuat dan terintegrasi antarkecamatan, sehingga memungkinkan mobilitas yang baik dalam wilayah. Namun, angka 100% ini hanya dilihat berdasarkan konektivitas antar dua kecamatan. Sehingga jika indeks konektivitas antarkecamatan dilihat secara luas, maka sulit untuk mencapai 100 persen. Dalam konteks Kabupaten Sikka, dari hasil FGD bersama pemangku kepentingan, dapat disimpulkan bahwa angka 100 persen ini adalah pengecualian karena kondisi topografi daerah yang sulit untuk memberikan akses secara baik seperti daerah lain.

Jumlah izin trayek pada tahun 2020 sebanyak 67 dan menurun pada tahun 2021 sampai pada tahun 2024 hanya sebanyak 58 dengan kendaraan umum yang wajib KIR sebanyak 2.029.

Persentase layanan angkutan umum relatif stabil selama periode tersebut, dengan angka sekitar 76,67 persen pada tahun 2022. Ini menunjukkan adanya konsistensi dalam penyediaan layanan angkutan umum. Sampai dengan tahun 2024 Kabupaten Sikka memiliki 4.734 rambu lalu lintas. Jumlah ini mencerminkan upaya yang baik dalam menyediakan tanda-tanda yang diperlukan untuk menjaga keamanan lalu lintas. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir, menunjukkan peningkatan dalam kapasitas jalan yang tersedia untuk mengakomodasi jumlah kendaraan yang semakin meningkat.

Tabel 2.65
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Semua Angkutan Umum)

Tahun	Jumlah Arus Kedatangan di Terminal Darat		Jumlah Arus Kedatangan di Bandara Frans Seda		Jumlah Arus Kedatangan di Pelabuhan L. Say	
	Orang	Barang (Ton)	Orang	Barang (Ton)	Orang	Barang/T/M^3
2020	1.449.288	7.006	72.802	990.062	79.321	62.914
2021	1.275.048	5.894	89.431	1.078.823	72.712	84.138
2022	1.269.936	5.901	97.534	1.078.511	59.925	53.132

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data tabel di atas, Jumlah arus penumpang angkutan umum (semua angkutan umum) terutama pada jumlah arus kedatangan di Pelabuhan L. Say, baik jumlah orang maupun barang mengalami penurunan. Beberapa faktor yang memengaruhi perubahan dalam arus kedatangan ini dapat meliputi perubahan dalam permintaan

transportasi, kebijakan pelabuhan, kondisi ekonomi. Selain itu, fluktuasi dalam jumlah arus kedatangan barang dan penumpang juga dapat mencerminkan perubahan dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan di wilayah tersebut. Upaya perencanaan dan pengelolaan yang baik diperlukan untuk mengatasi fluktuasi ini, terutama dalam konteks pemulihan pasca-pandemi dan peningkatan aktivitas perdagangan.

16. Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informatika adalah bidang yang mencakup pengelolaan informasi, komunikasi, dan teknologi digital dalam suatu wilayah khususnya di Kabupaten Sikka. Hal Ini mencakup berbagai kegiatan terkait dengan pengembangan, implementasi, dan pengawasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta strategi komunikasi publik dan digital. Berikut tabel nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Sikka tahun 2021-2025.

Tabel 2.66
Nilai SPBE Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Nilai/Indeks SPBE	1,11 (Kurang)	1,85 (Cukup)	1,94 (Cukup)	2,67 (Baik)	2,13 (Baik)

Sumber: Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE MenPAN-RB 2021-2025

Berdasarkan data di atas, Kabupaten Sikka memiliki nilai SPBE yang fluktuatif. Tentu hal ini harus menjadi perhatian untuk meningkatkan dan memperbaiki implementasi SPBE di tingkat pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan adanya tantangan atau kendala dalam implementasi SPBE di Kabupaten Sikka. Pada tahun 2025, Kabupaten Sikka mencatat peningkatan yang sangat signifikan dalam nilai SPBE mencapai 2,13 dan mendapat penilaian **baik**. Capaian ini menunjukkan adanya kemajuan yang luar biasa dalam implementasi SPBE di tingkat pemerintahan daerah. Hal ini sebagai hasil dari upaya intensif dan strategi yang lebih efektif dalam mengadopsi teknologi informasi dan elektronik dalam proses pemerintahan.

Capaian Kinerja Telekomunikasi Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.67
Capaian Kinerja Telekomunikasi Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat tingkat kecamatan	-	-	-	-	-
2.	Cakupan layanan telekomunikasi	76,87	96,60	96,60	96,60	96,60
3.	Persentase penduduk yang menggunakan telepon/HP	52,46	50,76	50,76	50,76	50,76
4.	Persentase rumah tangga dengan akses internet (Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet)	44,30	49,32	49,32	49,32	49,32
5.	Persentase rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	-	-	-	-	-
6.	Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan komputer	14,22	12,27	12,27	12,27	12,27

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, 2026; BPS Provinsi NTT, 2026

Berdasarkan data di atas, cakupan layanan telekomunikasi mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar 68,71 menjadi 96,60 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang cukup besar dalam memperluas jangkauan dan aksesibilitas layanan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sikka.

Selanjutnya pada indikator persentase penduduk yang menggunakan telepon menjadi peranan penting dalam telekomunikasi dan memfasilitasi komunikasi serta konektivitas, sebagai aspek kunci dalam pembangunan

ekonomi, sosial, dan budaya suatu daerah khususnya Kabupaten Sikka. Pada tahun 2020 sebesar 45,92 meningkat menjadi 50,76 pada tahun 2024.

Persentase rumah tangga dengan akses internet mencerminkan sejauh mana komunitas dapat memanfaatkan TIK dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun 2020 sebesar 35,60 meningkat menjadi 49,32 pada tahun 2024.

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat tingkat kecamatan. Pada tahun 2020 sebesar 14,14 meningkat menjadi 12,27 pada tahun 2024.

17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah sebuah badan usaha yang didirikan oleh sekelompok orang untuk mencapai kepentingan bersama dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi. Koperasi beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keanggotaan sukarela, pengendalian demokratis oleh anggota, partisipasi ekonomi anggota secara adil, otonomi dan independensi, pendidikan, pelatihan, dan informasi, serta kerja sama antar koperasi.

Salah satu indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja koperasi adalah Indeks Pembangunan Koperasi (IPK). IPK merupakan indikator yang mengukur tingkat perkembangan dan kinerja koperasi dalam mendukung pembangunan di suatu daerah. Indeks ini mencakup berbagai aspek, seperti jumlah koperasi, jumlah anggota koperasi, omset koperasi, kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah, dan lain sebagainya. Jumlah koperasi di Kabupaten Sikka dibagi menjadi beberapa kelompok. Berikut adalah data Kelompok Koperasi di Kabupaten Sikka.

Tabel 2.68
Kelompok Koperasi di Kabupaten Sikka

No	Jenis Koperasi	Jumlah
1	Koperasi Simpan Pinjam	70
2	Koperasi Non Simpan Pinjam	71
3	Koperasi Serba Usaha	46
4	Koperasi Jasa	5
5	Koperasi Pemasaran	2
6	Koperasi Produsen	6
7	Koperasi Konsumen	3

Sumber: Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM Tahun 2024-2026

Berdasar jenis usahanya, 80 persen koperasi yang ada merupakan koperasi simpan pinjam. Namun demikian data yang tersaji menunjukkan bahwa jenis usaha koperasi sangatlah beragam. Dalam koperasi non-simpan pinjam tercatat koperasi pertanian, koperasi jasa, koperasi pemasaran, dan lainnya. Namun demikian dukungan data lain terkait koperasi non-kredit hingga saat ini belum ditemukan.

Berdasarkan data dari Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Sikka Tahun 2024–2026, kondisi kelembagaan koperasi di Kabupaten Sikka menunjukkan bahwa keberadaan koperasi masih cukup beragam, namun belum sepenuhnya mencerminkan potensi sektor produktif yang kuat dalam mendorong ekonomi kerakyatan. Secara umum, koperasi di Kabupaten Sikka didominasi oleh Koperasi Simpan Pinjam (70 koperasi) dan Koperasi Non Simpan Pinjam (71 koperasi). Dominasi dua jenis koperasi ini menunjukkan bahwa aktivitas koperasi di Sikka masih sangat berorientasi pada aspek keuangan dan layanan umum yang bersifat konsumtif. Hal ini tentu memberikan kontribusi pada inklusi keuangan masyarakat, tetapi belum secara optimal menggerakkan sektor-sektor

produktif seperti produksi, pemasaran, dan distribusi hasil pertanian, perikanan, atau UMKM lokal.

Di sisi lain, Koperasi Serba Usaha (46 unit) juga memiliki peran penting karena fleksibilitas usahanya yang dapat menyasar berbagai sektor. Namun, jumlah ini masih tergolong sedang, dan penguatan kelembagaan serta manajemen usaha koperasi jenis ini perlu ditingkatkan agar dapat berkembang menjadi tulang punggung ekonomi desa atau komunitas lokal.

Sementara itu, jumlah koperasi yang secara langsung mendukung sektor produksi dan distribusi seperti Koperasi Produsen (6 koperasi), Koperasi Pemasaran (2 koperasi), dan Koperasi Konsumen (3 koperasi) tergolong sangat rendah. Rendahnya angka ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi lokal, seperti produk pertanian, perikanan, peternakan, maupun hasil olahan UMKM, belum secara maksimal dikelola melalui kelembagaan koperasi. Padahal, koperasi jenis ini memiliki peran strategis dalam mendorong nilai tambah, memperpendek rantai distribusi, dan memperkuat posisi tawar produsen lokal di pasar.

Begitu pula Koperasi Jasa yang hanya berjumlah 5 unit, mengindikasikan masih terbatasnya inovasi kelembagaan koperasi di bidang jasa seperti transportasi, teknologi informasi, atau jasa layanan publik lainnya. Padahal sektor jasa memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai bagian dari transformasi ekonomi daerah berbasis kebutuhan lokal dan potensi wilayah.

Data perkembangan koperasi di Kabupaten Sikka selama lima tahun terakhir (2020–2024) menunjukkan dinamika yang penting untuk dianalisis sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025–2029. Terdapat tiga indikator utama yang digunakan, yaitu jumlah koperasi aktif, koperasi berbadan hukum, dan koperasi sehat. Data dari tiga indikator yang digunakan dalam poin ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2.69
Koperasi di Kabupaten Sikka Berdasarkan Status

No	Koperasi Berdasarkan Status	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Koperasi Aktif	126	130	130	130	130
2	Koperasi Berbadan Hukum	183	187	187	187	187
3	Koperasi Sehat	5	9	7	11	17

Sumber: Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM Tahun 2024-2026

Pertama, jumlah koperasi aktif menunjukkan tren pertumbuhan yang moderat, dari 124 koperasi pada tahun 2020 menjadi 130 koperasi pada tahun 2022, dan jumlah ini stabil hingga tahun 2024. Konsistensi jumlah koperasi aktif ini menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi mampu mempertahankan eksistensinya, meskipun belum ada peningkatan signifikan dalam jumlah koperasi baru yang aktif dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan perlunya dorongan untuk mendorong revitalisasi koperasi lama yang tidak aktif atau penciptaan koperasi baru berbasis potensi lokal.

Kedua, koperasi berbadan hukum juga mengalami sedikit peningkatan dari 183 koperasi pada tahun 2021 menjadi 187 koperasi pada tahun 2022, dan stagnan hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi telah memenuhi aspek legal formalitas, namun belum tentu operasional atau aktif secara ekonomi. Jumlah koperasi berbadan hukum yang lebih tinggi daripada koperasi aktif juga mengindikasikan adanya koperasi yang secara hukum masih tercatat, namun tidak menjalankan kegiatan secara nyata.

Ketiga, dan yang paling mencerminkan kualitas kelembagaan koperasi, adalah jumlah koperasi sehat. Data ini menunjukkan fluktuasi signifikan dari tahun ke tahun, dengan angka yang relatif rendah: hanya 10 koperasi sehat pada tahun 2020, turun drastis menjadi 5 koperasi pada 2021, kemudian naik dan turun kembali hingga mencapai 11 koperasi pada tahun 2024. Rendahnya jumlah koperasi sehat mengindikasikan bahwa sebagian besar koperasi di Kabupaten Sikka masih menghadapi masalah dalam aspek manajemen keuangan, kepengurusan, partisipasi anggota, dan keberlanjutan usaha.

Jika dibandingkan dengan jumlah koperasi aktif (130 koperasi), maka pada tahun 2024 hanya sekitar 8,5 persen koperasi aktif yang tergolong sehat. Ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah koperasi tidak menurun, kualitas dan kinerja koperasi secara umum masih lemah. Hal ini menjadi perhatian serius, karena koperasi yang tidak sehat tidak dapat berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang efektif bagi masyarakat.

Berdasar analisis yang dilakukan kelembagaan koperasi yang telah dikenal sangat baik, masih menyimpan cukup banyak permasalahan. Dari sisi koperasinya pengelolaan yang kurang baik dan jenis usaha yang hanya pada sektor simpan pinjam kurang mampu menjadi fasilitator perkembangan usaha. Pada sisi anggota, pemahaman mengenai hak dan tanggung jawab anggota koperasi, manajemen keuangan juga belum baik. Dua sisi koperasi ini menjadi penyebab belum berdayanya koperasi menjadi lembaga ekonomi lokal yang tangguh.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Beberapa indikator yang umumnya digunakan untuk menilai kinerja UMKM meliputi pertumbuhan jumlah UMKM, kontribusi UMKM terhadap PDB daerah, tingkat ketersediaan akses finansial bagi UMKM, peningkatan daya saing UMKM, tingkat inovasi dan teknologi yang digunakan oleh UMKM, serta tingkat pemberdayaan masyarakat melalui UMKM.

Sejalan dengan data koperasi yang sangat minim, demikian pula data mengenai UMKM. Hingga naskah ini disusun tercatat data jumlah UMKM di Kabupaten Sikka mencapai 5.547 unit. Unit usaha tersebut bergerak dalam 6 bidang usaha industri pengolahan, perdagangan, jasa, pertanian dan perikanan serta peternakan. Dari jumlah tersebut UMKM yang telah memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) baru sebanyak 2.022. Belum adanya NIB berkaitan dengan ketidakpahaman pelaku usaha akibat dari kurangnya upaya yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah pengampunya. Ketiadaan NIB ini menjadi penghalang bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan, karena pada umumnya dasar pembinaan adalah adanya formalitas usaha.

Kabupaten Sikka memiliki beberapa jenis UMKM yang dikelompokkan berdasarkan jenis usaha. Berikut adalah Jenis UMKM Berdasarkan Jenis Usaha di Kabupaten Sikka Tahun 2024.

Tabel 2.70
Jenis UMKM Berdasarkan Jenis Usaha di Kabupaten Sikka Tahun 2024

No	Jenis UMKM	Jumlah
1	Industri Pengolahan	822
2	Perdagangan	5352
3	Jasa	1115
4	Peternakan	807
5	Perikanan	128
6	Pertanian	236
7	Perkebunan	0
Total		8500

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, 2025

Berdasarkan data Jenis UMKM di Kabupaten Sikka Tahun 2024, jumlah keseluruhan UMKM tercatat sebanyak 8.500 unit usaha dengan variasi jenis usaha yang cukup beragam. Struktur UMKM di Kabupaten Sikka didominasi oleh sektor perdagangan, yang mencapai 5.352 unit usaha atau sekitar 63 persen dari total UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Sikka masih bertumpu pada sektor perdagangan sebagai mata rantai utama dalam sirkulasi barang dan jasa. Besarnya porsi perdagangan ini juga mengindikasikan tingginya peran UMKM sebagai penyedia kebutuhan harian masyarakat sekaligus penggerak roda ekonomi lokal.

Sektor jasa menempati posisi kedua dengan 1.115 unit usaha atau sekitar 13 persen, mencerminkan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan non-perdagangan seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, maupun jasa profesional lainnya. Sementara itu, industri pengolahan dengan 822 unit usaha (9,7 persen) menempati urutan ketiga. Angka ini

penting karena sektor industri pengolahan berpotensi memberikan nilai tambah pada komoditas lokal, sehingga dapat mendorong terciptanya hilirisasi produk unggulan daerah.

Di sisi lain, sektor berbasis sumber daya alam seperti peternakan (807 unit usaha, 9,5 persen), pertanian (236 unit usaha, 2,8 persen), dan perikanan (128 unit usaha, 1,5 persen) masih relatif kecil dibandingkan perdagangan. Kondisi ini dapat menunjukkan bahwa potensi sektor primer di Kabupaten Sikka belum tergarap secara optimal, padahal daerah ini memiliki sumber daya pertanian, peternakan, dan perikanan yang cukup besar. Menariknya, pada kategori perkebunan tidak terdapat UMKM yang tercatat, yang bisa mengindikasikan keterbatasan pengembangan kelembagaan usaha perkebunan dalam skala UMKM atau adanya kendala dalam pengelolaan dan pencatatan usaha.

Secara umum, struktur UMKM Kabupaten Sikka memperlihatkan kecenderungan dominasi sektor perdagangan yang bersifat konsumtif, sementara sektor produktif seperti industri pengolahan, pertanian, peternakan, dan perikanan belum berkembang secara signifikan. Hal ini membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk merumuskan strategi penguatan UMKM berbasis produksi dan pengolahan hasil pertanian, perikanan, serta peternakan agar kontribusinya terhadap perekonomian lokal semakin meningkat. Dengan demikian, diversifikasi usaha UMKM tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat tetapi juga dapat menciptakan rantai nilai yang lebih berkelanjutan di Kabupaten Sikka.

Data jumlah UMKM menunjukkan dinamika naik turun yang cukup signifikan selama lima tahun terakhir. Berikut adalah tabel Jumlah UMKM di Kabupaten Sikka, Tahun 2021-2025.

Pada tahun 2021, terdapat 5.994 UMKM yang tercatat, namun pada tahun 2022 jumlah ini justru mengalami penurunan menjadi 5.547 UMKM. Penurunan ini kemungkinan besar masih dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang melemahkan daya tahan usaha kecil dan menengah, terutama di sektor informal.

Namun, pada tahun 2023, terjadi lonjakan tajam menjadi 8.005 UMKM, dan meningkat lagi menjadi 8.500 UMKM pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan mulai pulihnya perekonomian lokal, ditopang oleh semangat kewirausahaan yang tumbuh kembali dan kemungkinan adanya dukungan dari program pemerintah daerah dalam pemulihan UMKM pasca pandemi. Tren ini merupakan sinyal positif bahwa UMKM di Kabupaten Sikka mulai menemukan kembali ruang tumbuhnya dalam ekosistem ekonomi lokal.

Selain data jumlah UMKM pada bagian ini juga menjelaskan pertumbuhan wirausaha di Kabupaten Sikka. Persentase pertumbuhan wirausaha mencerminkan seberapa cepat jumlah pelaku usaha baru bertambah di Kabupaten Sikka. Pada tahun 2020, pertumbuhan wirausaha tercatat cukup tinggi, yaitu 18 persen. Namun pada tahun 2021, terjadi kontraksi sebesar -4 persen, sejalan dengan penurunan jumlah UMKM pada periode yang sama. Ini memperkuat indikasi bahwa pandemi memberikan pukulan berat terhadap kelangsungan usaha kecil.

Tahun 2022 menunjukkan pemulihan awal dengan pertumbuhan 12,56, dan persen melonjak drastis pada 2023 mencapai 30,7 persen, selaras dengan peningkatan signifikan jumlah UMKM. Tahun 2024 masih menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 5,8 persen, meskipun tidak setinggi tahun sebelumnya. Ini menandakan bahwa stimulus ekonomi dan semangat wirausaha masih bertahan, namun perlu dijaga agar tidak menurun kembali di tahun-tahun mendatang.

Aspek daya saing UMKM, yang mengindikasikan kualitas dan kemampuan usaha untuk bertahan dan berkembang, menunjukkan pola yang kurang stabil.

Pada Tahun 2021 stagnan di angka 80 UMKM yang dianggap memiliki daya saing. Namun, lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan 385 UMKM masuk kategori berdaya saing, yang merupakan hasil dari berbagai pelatihan, pendampingan, atau akses pasar yang diperluas. Namun tahun 2023 kembali turun drastis ke angka 80, lalu naik sedikit ke 190 pada 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah UMKM meningkat, daya saingnya belum stabil, dan masih terdapat tantangan dalam menjaga keberlanjutan dan kualitas usaha. Hal ini menjadi perhatian penting agar pertumbuhan kuantitas UMKM tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkualitas dan berorientasi pada keberlanjutan.

Kemitraan UMKM dengan pihak lain, seperti perusahaan besar, koperasi, atau pasar modern, merupakan salah satu indikator kunci penguatan kapasitas usaha. Pada tahun 2020,

proporsi UMKM menjalin kemitraan berada di angka 75, dan naik terus setiap tahun hingga mencapai 237 pada 2024.

Peningkatan signifikan ini mengindikasikan bahwa semakin banyak UMKM di Kabupaten Sikka yang menjalin kerja sama dengan mitra eksternal, yang sangat penting untuk penguatan rantai pasok, pemasaran, dan akses permodalan. Hal ini dapat dianggap sebagai salah satu keberhasilan pembangunan ekosistem UMKM yang inklusif dan kolaboratif.

Data sektoral UMKM pada tahun 2024 menunjukkan dominasi sektor perdagangan, dengan jumlah 3.573 UMKM atau sekitar 64,4 persen dari total. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha di Sikka bergerak di sektor perdagangan barang dan kebutuhan pokok.

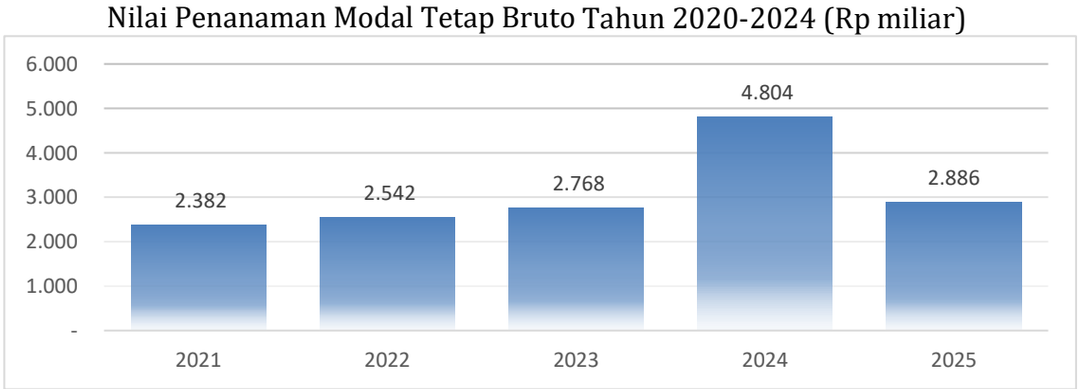
Sektor jasa juga cukup signifikan dengan 594 UMKM, diikuti oleh peternakan (665) yang mengindikasikan potensi sektor primer yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Sektor pertanian (145) dan perikanan (62) memiliki kontribusi lebih kecil, sementara perkebunan bahkan tercatat tidak memiliki UMKM sama sekali. Ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam di sektor pertanian dan perkebunan, serta perlunya intervensi agar sektor-sektor ini lebih terintegrasi dalam ekosistem UMKM.

18. Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan pengeluaran sektor swasta untuk menciptakan nilai tambah melalui berbagai kegiatan, baik produksi maupun jasa. Indikator paling makro dari investasi sebuah wilayah dapat dilihat dari nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang mencerminkan seluruh nilai investasi yang dilakukan oleh masyarakat. Tahun 2024 nilai PMTB Kabupaten Sikka mencapai angka hampir Rp 5 triliun.

Grafik 2.39

Nilai Penanaman Modal Tetap Bruto Tahun 2020-2024 (Rp miliar)



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

PMTB dilakukan oleh investasi asing, nasional maupun investasi masyarakat. Dalam dokumen Badan Penanaman Modal tercatat jumlah investor nasional menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 sampai 2024. sedangkan jumlah investor asing mengalami penurunan dari tahun 2020 sebanyak 11 dan berkurang pada tahun 2024 menjadi 10.

Tabel 2.71

Kinerja Penanaman Modal Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN)	1.478	2.887	2.887	2.887	2.887
2.	Jumlah Investor Berskala Internasional (PMA)	10	10	10	10	10

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sikka, 2026

Nilai investasi di Kabupaten Sikka ditentukan dari 21 sektor yang didominasi oleh transportasi, gudang dan komunikasi, pertambangan, perumahan dan kawasan

perkantoran, industri makanan dan pertanian. Investasi yang tinggi pada sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi erat berhubungan dengan tingginya peran perdagangan antar daerah yang sangat tinggi.

Sektor pertambangan menjadi sektor kedua yang juga paling diminati yang merupakan salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan. Adalah pasir besi dan emas yang menjadi sasaran investasi selain pertambangan Galian C. Namun demikian pertambangan yang izin usahanya telah berpindah ke provinsi ini lebih banyak menciptakan kerusakan lingkungan bagi Kabupaten Sikka dibandingkan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian. Bencana akibat tambang sudah sangat sering terjadi, banjir dan longsor adalah salah satu bencana yang kerap terjadi akibat dari aktivitas pertambangan ini.

Investasi bidang perumahan dan kawasan industri juga perkantoran, berhubungan erat dengan masih berkembangnya kawasan Kabupaten Sikka. Perkembangan jumlah penduduk dengan berbagai aktivitasnya membutuhkan sarana dan prasarana. Permintaan atas kebutuhan penduduk inilah yang menjadi pendorong berkembangnya investasi bidang ini. Namun memang disayangkan bahwa *multiplier effect* untuk sektor ini cukup terbatas. Karakter pembangunan, apalagi jika *input* untuk pembangunan itu didatangkan dari luar daerah maka uang yang telah digunakan untuk pembangunan akan mengalir ke luar daerah. Itulah mengapa *multiplier* yang tercipta menjadi rendah.

Sektor pertanian juga merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan. Lahan yang masih sangat luas merupakan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Investasi bidang pertanian memang bukan investasi yang sangat besar, namun investasi itu banyak dilakukan oleh kelompok kelompok masyarakat. Pada sektor perkebunan difokuskan pada pengolahan biji kakao.

Pada sektor perikanan, investasi yang relatif kecil cukup kontradiktif mengingat banyaknya informasi mengenai peran besar perikanan di Sikka. Saat ini investasi di sektor perikanan di Kabupaten Sikka tercatat PMA 1 unit, PMDN 6 unit dan pengusaha perorangan 43 unit usaha.

Tabel 2.72
Nilai Investasi Berdasar Sektor Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

No	Sektor	Nilai				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tanaman pangan,perkebunan dan peternakan /food crops, plantation and livestock	32096469.9	29374643.4	38.878.502.6		
2	Kehutanan/Forestry	1163573.9	6862701.7	8.603.095.3		
3	Perikanan/Fishery	564859.8	1012170.6	1.214.048.8		
4	Pertambangan/Mining	13755070.4	25517127.3	62.521.629.4		
5	Industri makanan/Food Industry	27872683.1	26517505.8	54.936.992.9		
6	Industri textile/Textile Industry	2103213.6	1972432.1	5.614.713.3		
7	Industri Kayu/Wood Industry	1263401.1	1143672.6	3.587.894.5	6.266.800.000,00	39.139.700.000,00
8	Ind. Kertas dan Percetakan/Paper and Printing Industry	3745918.4	7833499	9.508.171		
9	Ind. Kimia dan farmasi/Chemical and Pharmaceutical Industry	22526107.2	23363669	2.890.5292.9		
10	Ind. Karet dan plastik/Rubber and Plastic Industry	4428666.5	7803026.5	7.369.750.2		
11	Ind. Mineral Non Logam/Non Metallic Mineral Industry	5861895.1	6522138.4	6.367.888.9		
12	Ind. Logam Dasar,Barang Logam,Bukan Mesin dan Peralatannya	8857599.3	15655780	13.950.460.6		
13	Ind. Mesin ,elektronik,instru.Kedokteran,Presisi dan Optik dan jam	1155964.6	535046.5	3693213.6		
14	Ind. Kendaran Bermotor dan alat Transportasi lain	2556491.9	1459308.2	2425202.5		
15	Listrik,Gas dan Air	35518798.8	38727709.6	32107483	346.800.000,00	950.700.000,00
16	Konstruksi	68289297.4	39569360.8	33846519.6	8.083.300.000,00	789.800.000,00
17	Perdagangan dan Reparasi	16748391.3	22432369.7	31051264.2	9.068.300.000,00	19.713.100.000,00
18	Hotel dan Restoran	10203124.3	17819336.4	21579087.4	-	280.000.000,00
19	Transportasi,Gudang dan Komunikasi	93282772.9	61241519.3	75.138.386.7	5.000.000,00	270.000.000,00
20	Perumahan,Kawasan Ind dan Perkantoran	44852761.4	85497814.8	66.167.810.5	-	75.000.000,0
21	Jasa lainnya	14242672.3	24310388.9	38096745.7	469.100.000,00	211.400.000,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sikka, 2026

19. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan generasi muda juga menjadi salah satu bagian dari pembangunan masyarakat dan kemajuan suatu daerah sehingga untuk mencapai hal itu generasi muda memiliki peran untuk meningkatkan pendidikan, keahlian dan keterampilan diri mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Selain itu, pentingnya dimensi kepemudaan ini didasarkan pada premis bahwa pemuda adalah "sumber daya yang harus dikembangkan, bukan masalah yang harus dipecahkan". Dengan demikian untuk mengembangkan kepemudaan dibutuhkan suatu proses yang disengaja melalui pemberian dukungan, hubungan, pengalaman, sumber daya, dan peluang kepada pemuda yang diperlukan untuk menjadi orang dewasa yang sukses dan kompeten. Upaya peningkatan kualitas pemuda di Indonesia telah menjadi salah satu agenda strategis untuk mendapatkan manfaat bonus demografi. Namun, pengembangan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Sikka tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dalam lima tahun terakhir (2020-2024), presentasi organisasi pemuda yang aktif stagnan. Sedangkan data terkait wirausaha muda tidak tersedia.

Tabel 2.73
Organisasi Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2025

No	Indikator	T				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	15	15	15	15	15
2.	Persentase wirausaha muda terhadap total wirausaha	-	-	-	-	-
3.	Jumlah organisasi olahraga	8	8	8	18	18
4.	Jumlah prestasi olahraga	2	6	6	6	6
5.	Jumlah atlet berprestasi	7	28	28	28	28

Sumber: Dinas PKO Kabupaten Sikka, 2026

20. Statistik

Statistik berupa pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyajian data. Tujuan dari statistik adalah untuk menyediakan metode dan alat yang dapat digunakan untuk mengorganisir dan menyajikan informasi numerik secara sistematis. Jumlah Dokumen Statistik yang telah diterbitkan Pada tahun 2020 data tidak tersedia yang menunjukkan keterbatasan dalam penyediaan dan publikasi informasi statistik selama periode tersebut. Tetapi pada tahun 2021 sampai dengan 2024, terjadi lonjakan yang signifikan dalam publikasi dokumen statistik, dengan terbitnya 29 dokumen. Hal ini menunjukkan komitmen dan peningkatan aktivitas dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mempublikasikan data statistik terkait Kabupaten Sikka.

21. Persandian

Persandian adalah sistem pengelolaan dan pertukaran informasi rahasia atau terbatas antara pemerintah atau organisasi dengan tujuan untuk memastikan keamanan, kerahasiaan, dan integritas data atau informasi yang bersifat sensitif atau strategis. Kinerja persandian mengacu pada efisiensi dan efektivitas dari sistem persandian yang diimplementasikan dalam suatu organisasi atau entitas, termasuk pemerintahan daerah seperti Kabupaten Sikka.

Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah pada tahun 2021 sebesar 23,73% meningkat pada tahun 2022 menjadi 27,87%, naik lagi menjadi 28,02% dan meningkat lagi menjadi 59,60 pada tahun 2024 dan 2025.

Hal ini menunjukkan konsistensi dalam praktik Persandian di wilayah yang kemudian diikuti dengan adanya peningkatan kesadaran dan penerapan kebijakan Persandian di Kabupaten Sikka. Nilai ini kemudian meningkat pesat pada tahun 2024 dengan angka mencapai 59,60% menunjukan hasil dari upaya Kab. Sikka yang tinggi dalam menerapkan

keamanan pada sistem digital pemerintahan yang merata pada setiap perangkat daerah. Ini menunjukkan adanya komitmen berkelanjutan dalam menguatkan praktik Persandian di tingkat perangkat daerah.

22. Kebudayaan

Berdasarkan Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa Sub Urusan Budaya menjadi urusan konkuren pemerintah pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Oleh karena itu Pemerintah daerah Kabupaten Sikka melaksanakan amanat UU ini. Untuk indikator Fokus seni dan budaya Kabupaten Sikka pada tahun 2021 dilaksanakan 1 festival, tahun 2022 tidak dilaksanakannya festival kebudayaan dan pada tahun 2023 sampai tahun 2025 tetap dilaksanakan festival kebudayaan.

Keberagaman budaya Indonesia adalah modal dasar yang kuat dalam pembangunan. Pemerintah telah menyadari bahwa khazanah kebudayaan di Indonesia merupakan aset yang sangat berharga. Pembangunan kebudayaan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia di Indonesia. Budaya mempunyai peranan dalam pembangunan manusia Indonesia. Indonesia dapat membangun bangsa sesuai dengan karakteristik budaya masing-masing. Kabupaten Sikka memiliki budaya dan seni tradisional begitu beragam, salah satunya adalah tarian dan musik Sikka. Seni tari dan musik dalam tataran budaya tak bisa dipisahkan. Tari musik dan doa, dipadukan dan dijalankan dalam berbagai ritus tahunan daerah. Berbagai tarian di Sikka dengan gerak improvisasi beragam, uniknya tak membutuhkan garapan seorang seniman khusus, kecuali tarian tersebut telah dipadu dengan berbagai unsur-unsur gerak modern.

Tabel 2.74
Kinerja Fokus Seni dan Budaya Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	1	0	1	1	1
2.	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	69,23	44,44	44,44	72,41	72,41
3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	2	0	2	3	10
4.	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	19	20	20	21	21

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, 2026

23. Perpustakaan

Kualitas suatu bangsa ditentukan oleh kecerdasan dan pengetahuannya, sedangkan kecerdasan dan pengetahuan dihasilkan oleh seberapa ilmu pengetahuan yang didapat, sedangkan ilmu pengetahuan didapat dari informasi yang diperoleh dari lisan maupun tulisan. Indonesia menjadi negara pada urutan kedua terbawah pada ruang lingkup literasi yang ada di dunia, kondisi ini menggambarkan kondisi minat baca masyarakat di Indonesia sangat rendah yakni sebesar 0,001 persen. Angka tersebut bermakna dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan laporan bahwa tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia secara keseluruhan berada di angka 59,52 dengan durasi membaca 4-5 jam per minggu dan 4-5 buku per triwulan. Semakin banyak penduduk suatu wilayah yang semangat mencari ilmu pengetahuan, maka akan semakin tinggi peradabannya. Budaya suatu bangsa biasanya berjalan seiring dengan budaya literasi, faktor kebudayaan dan peradaban dipengaruhi oleh membaca yang dihasilkan dari temuan temuan kaum cendekia yang diabadikan dalam tulisan yang menjadikan warisan literasi informasi yang sangat berguna bagi proses kehidupan sosial yang dinamis.

Perpustakaan merupakan tempat untuk mengakses informasi dalam format apapun, apakah informasi itu disimpan dalam gedung perpustakaan tersebut ataupun tidak. Seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, dalam perpustakaan modern dewasa ini selain tersedia buku-buku tercetak, juga tersedia buku-buku dalam perpustakaan digital. Perpustakaan bertujuan untuk menumbuhkembangkan minat baca dan tulis, mengenalkan teknologi informasi, sebagai akses informasi secara mandiri, dan memupuk bakat dan minat baca. Terkait urusan perpustakaan Di Kabupaten Sikka, data perkembangan perpustakaan umum Kabupaten Sikka selama lima tahun terakhir (2020-2024) dilihat dari jumlah pengunjung, Rasio Perpustakaan persatuan penduduk, jumlah koleksi buku perpustakaan, dan Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.75
Jumlah Perpustakaan, Pengunjung dan Koleksi Buku Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	15.384	3.820	3.480	6.510	7.744
2.	Rasio Perpustakaan persatuan penduduk	0,18	0,18	0,05	0,045	0,045
3.	Jumlah koleksi judul buku di perpustakaan daerah	12336	10245	18246	18.247	18.743
4.	Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sikka, 2026

Tingkat kunjungan pada perpustakaan yang ada di Kabupaten Sikka selama tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 tercatat jumlah pengunjung sebanyak 15.384 orang, terus mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022 yakni sebesar 3820 orang dan 3.480 orang. Kemudian, meningkat kembali pada tahun 2023 sebanyak 3.824. Berdasarkan data kunjungan pemustaka atau semua jenis layanan perpustakaan, ketika dilakukan perbandingan dengan jumlah penduduk Kabupaten Sikka sebagai pengguna potensi perpustakaan, diketahui hanya sekitar 4,9 persen penduduk Kabupaten Sikka yang mengunjungi perpustakaan. Hal tersebut menunjukkan kondisi dimana rendahnya minat baca masyarakat di Kabupaten Sikka. Rendahnya tingkat kunjungan dari masyarakat pada perpustakaan juga disertai dengan belum tersedianya tenaga pustakawan.

Kegemaran membaca merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun masyarakat yang cerdas, inovatif, dan berpengetahuan luas. Minat baca yang tinggi berkorelasi positif dengan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah. Oleh karena itu, mengukur tingkat kegemaran membaca menjadi krusial dalam upaya peningkatan literasi dan pendidikan. Berdasarkan data yang diperoleh (Dinas Perpustakaan, 2025), pada tahun 2023 survei mengenai tingkat kegemaran membaca belum dilaksanakan. Ini mengindikasikan bahwa data pengukuran belum tersedia untuk periode tersebut. Namun pada tahun 2024, Tingkat Kegemaran Membaca di Kabupaten Sikka tercatat sebesar 64,25. Ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Sikka memiliki tingkat kegemaran membaca yang cukup baik, namun masih ada ruang untuk peningkatan yang signifikan. Angka ini memberikan gambaran awal mengenai tingkat kegemaran membaca di Kabupaten Sikka. Meskipun tidak ada data perbandingan dari tahun sebelumnya di Kabupaten Sikka itu sendiri, angka ini dapat menjadi baseline penting untuk evaluasi di masa mendatang.

24. Kearsipan

Kearsipan sebagai proses pengelolaan dan penyimpanan dokumen, rekaman, atau informasi penting secara teratur dan teratur untuk memastikan aksesibilitas, keamanan, dan integritasnya. Tujuan dari kearsipan adalah untuk memudahkan pencarian dan memastikan bahwa dokumen atau informasi tersebut dapat diakses dengan mudah saat diperlukan.

Tabel 2.76
Kinerja Pengelolaan Arsip Tahun 2021-2025

No.	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	27,87	28,02	32,20	11,48	19,61

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sikka, 2026

Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku pada tahun 2021 sebesar 27,87%, meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 28,02% dan naik lagi menjadi 32,20%. Pada Tahun 2024 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku menurun menjadi 11,48% dan naik lagi manjadi 19,61%.

Ini menunjukkan bahwa sebagian sudah mengadopsi praktik pengelolaan arsip yang sesuai dengan standar atau prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada tahun 2022 menunjukkan kestabilan dalam persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku, yaitu sebesar 28,02 persen. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam praktik pengelolaan arsip di wilayah tersebut selama dua tahun berturut-turut. Kemudian di tahun 2023 mencatat peningkatan yang signifikan dalam persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku, mencapai 32,2 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan penerapan praktik pengelolaan arsip yang sesuai dengan standar atau prosedur. Kabupaten Sikka terus memperbaiki kinerja pengelolaan arsip, dengan persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku. Selama periode tahun 2021 hingga 2023, Kabupaten Sikka berhasil mencatat peningkatan yang positif dalam persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku. Peningkatan ini mencerminkan komitmen dan upaya dalam memperkuat sistem pengelolaan arsip, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akurasi, aksesibilitas, dan keamanan informasi yang terdokumentasi.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

1. Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor ekonomi dan aktivitas sosial yang melibatkan perjalanan orang dari satu tempat ke tempat lain untuk tujuan rekreasi, liburan, berwisata, dan mengenal budaya serta alam suatu daerah. Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang perlu diperhatikan dan dikembangkan untuk dapat meningkatkan perekonomian daerah sekaligus memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki oleh Kabupaten Sikka agar dapat lestari dan berkelanjutan.

Kabupaten Sikka memiliki berbagai potensi destinasi wisata yang beragam mulai dari wisata alam hingga wisata keagamaan. Dari data dapat dilihat bahwa terdapat lebih dari 40 destinasi wisata di Kabupaten Sikka. Pantai Koka, Gereja Tua Sikka, Museum Bikon Blewut, Bukit Nilo, Tanjung Kajuwulu, Air Terjun Murusobe, Nusa Kutu, Sanggar Bliran Sina, Kawasan Wisata Alam Egon Blindit, Kojadoi, Taman Wisata Alam Teluk Maumere, Pulau Pemana, Pulau Amano Sikka, Patung Bunda Maria Bunda Segala Bangsa di Bukit Nilo, Replika Kota Betlehem Nelle, Gereja Tua, Patung Kristus Raja, Watu Kruz, Wisung Fatima Lela adalah destinasi destinasi wisata yang direkomendasikan oleh penggiat pariwisata. Potensi Sikka yang juga sudah menarik mata dunia adalah kain tenun. Di Sikka telah terdapat desa yang menjadi Desa Devisa Klaster Tenun NTT rintisan ASEAN Foundation. Ada 22 desa di Sikka yang didampingi sebagai Desa Devisa. Seminari Tinggi Interdiosesan Santo Petrus Ritapiret, juga menjadi tempat bersejarah yang menjadi tempat kunjungan umat Nasrani.

Potensi wisata yang demikian besar hingga hari ini belum sepenuhnya dimanfaatkan, hal ini dapat dilihat melalui data yang disajikan pada tabel berikut. Dari data jumlah kunjungan wisata, tingkat kunjungan wisata di Kabupaten Sikka selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tabel 2.77
Kinerja Pariwisata Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Kunjungan Wisata (orang)	25.933	36.041	36.041	41.861	44.399
2	Lama Kunjungan wisata (hari)	1,49	1,82	1,82	1,88	1,88
3	Jumlah destinasi wisata	87	87	87	126	126
4	Jumlah kelompok masyarakat yang mengelola objek wisata	9	10	10	10	10

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, 2026

Jumlah kunjungan wisata Kabupaten Sikka ini dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota di NTT, berada pada urutan ke tiga. Di Provinsi NTT, tercatat jumlah tamu yang menginap di hotel tahun 2022 paling tinggi adalah Kota Kupang dengan jumlah 313.357 orang, selanjutnya Kabupaten Manggarai Barat dengan jumlah 259.574 orang.

Lama kunjungan wisata sebagai indikator pariwisata juga menunjukkan fluktuasi meskipun terjadi peningkatan sejak tahun 2020 namun belum mampu mendekati lama kunjungan pada tahun 2020-2024. Penurunan kinerja sektor pariwisata di Kabupaten Sikka ini tidak lepas dari adanya pandemi COVID-19 yang memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kunjungan. Jumlah kunjungan wisatawan dan rata-rata lama menginap menentukan besaran belanja yang dilakukan wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka menyatakan bahwa belanja wisatawan, pada 2021 mencapai Rp 27 miliar, sementara pada 2020 mencapai Rp 80 miliar.

Kinerja sektor pariwisata menurut Kemenparekraf bergantung pada upaya dan kinerja 4 pilar pariwisata. Pilar pertama adalah pilar destinasi. Pilar destinasi termasuk di dalamnya adalah atraksi, di Kabupaten Sikka teridentifikasi destinasi yang sangat banyak dan beragam. Dalam hal atraksi, pemerintah Kabupaten Sikka telah berupaya menyelenggarakan atraksi atraksi wisata untuk menarik wisatawan. Bahkan tanpa atraksi wisata, destinasi wisata religi sudah merupakan daya tarik tersendiri. Namun demikian atraksi saja tidak cukup untuk menarik minat wisatawan jika aksesibilitas dan juga fasilitas destinasi tidak tersedia secara memadai. Cukup banyak destinasi wisata yang sangat baik namun ketersediaan sarana dan prasarana sangat terbatas. Demikian juga dengan akses menuju tempat wisata yang sebagian besar masih harus menggunakan kendaraan pribadi, karena belum tersedianya fasilitas transportasi publik ke destinasi wisata.

Aspek kedua adalah pilar promosi. Pilar promosi adalah upaya yang dilakukan untuk memperkenalkan potensi wisata kepada calon wisatawan. Berkaitan dengan pilar promosi, sesungguhnya Kabupaten Sikka diuntungkan dengan potensi yang dimiliki. Tanpa upaya promosi yang berat, destinasi wisata religi telah terpromosikan dengan sendirinya. Pada aspek wisata budaya, masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat telah melakukan berbagai gerakan untuk mempromosikan budaya Sikka yang luar biasa, mulai dari kerajinan, musik, maupun budaya lainnya. Berbagai upaya promosi ini tidak dapat membuahkan hasil jika tidak didukung oleh pilar pilar yang lain.

Pilar selanjutnya adalah pilar industri pariwisata. Industri pariwisata meliputi semua jasa pendukung pariwisata, mulai dari hotel, restoran, agen perjalanan wisata hingga jasa perbankan. Saat ini jumlah hotel di Kabupaten Sikka sudah cukup banyak, walaupun dari data terlihat fluktuatif. Dibandingkan dengan Kota Kupang yang memiliki jumlah kunjungan wisata yang sangat tinggi tentu jumlah hotel di Kabupaten Sikka jauh lebih sedikit.

Tabel 2.78
Jumlah Hotel Tahun 2021-2025

Wilayah	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Sikka	40	42	44	42	42
Kota Kupang	76	57	57	57	57
Provinsi NTT	487	489	489	489	489

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2025

Memenuhi kebutuhan wisatawan dibutuhkan rumah makan dan restoran. Dari data yang tersedia tidak terdapat perubahan jumlah rumah makan di Kabupaten Sikka sejak tahun 2020. Dalam hal biro perjalanan wisata tercatat 3 biro perjalanan wisata yang dapat dideteksi dari situs *web* tentang pariwisata. Kondisi hotel, restoran dan biro perjalanan ini menunjukkan bahwa industri pariwisata di Sikka memang belum cukup berkembang.

Tabel 2.79
Jumlah Rumah Makan/Restoran menurut di Kecamatan Tahun 2021-2025

No	Kecamatan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Paga	2	2	2	2	-
2.	Kewapante	3	35	20	18	1
3.	Kangae	1	11	18	20	5
4.	Nita	1	1	1	2	0
5.	Alok	73	73	78	73	11
6.	Alok Barat	9	9	8	36	3
7.	Alok Timur	6	63	69	62	18
Jumlah		**62**	**194**	**194**	**196**	**41**

Sumber: BPS, Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

Pilar terakhir dari pariwisata adalah kelembagaan pariwisata yang mencerminkan kesiapan masyarakat untuk menjadi masyarakat pariwisata. Kinerja pilar ini dapat dilihat dari jumlah kelompok masyarakat pengelola wisata atau bisa dikenal dengan pokdarwis. Hingga tahun 2021 jumlah pokdarwis tercatat 9, yang di tahun 2022 meningkat menjadi 10 pokdarwis. Jumlah ini jika dibandingkan dengan destinasi wisata yang mencapai 43 sangat jauh dari cukup. Artinya secara umum kesiapan masyarakat untuk menjadi masyarakat pariwisata juga belum cukup. Namun demikian tingkat kesiapan masyarakat itu sangat beragam, ada pokdarwis yang sudah sangat maju dan menjadi masyarakat pariwisata yang sesungguhnya, namun ada masyarakat yang bahkan belum tau mengenai pariwisata.

Pariwisata merupakan sektor ekonomi dan aktivitas sosial yang melibatkan perjalanan orang dari satu tempat ke tempat lain untuk tujuan rekreasi, liburan, berwisata, dan mengenal budaya serta alam suatu daerah. Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang perlu diperhatikan dan dikembangkan untuk dapat meningkatkan perekonomian daerah sekaligus memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki oleh Kabupaten Sikka agar dapat lestari dan berkelanjutan.

Kabupaten Sikka memiliki berbagai potensi destinasi wisata yang beragam mulai dari wisata alam hingga wisata keagamaan. Dari data dapat dilihat bahwa terdapat lebih dari 40 destinasi wisata di Kabupaten Sikka. Pantai Koka, Gereja Tua Sikka, Museum Bikon Blewut, Bukit Nilo, Tanjung Kajuwulu, Air Terjun Murusobe, Nusa Kutu, Sanggar Bliran Sina, Kawasan Wisata Alam Egon Blindit, Kojadoi, Taman Wisata Alam Teluk Maumere, Pulau Pemana, Pulau Anano, Patung Bunda Maria Bunda Segala Bangsa di Bukit Nilo, Replika Kota Betlehem Nelle, Gereja Tua, Patung Kristus Raja, Watu Kruz, Wisung Fatima Lela adalah destinasi destinasi wisata yang direkomendasikan oleh penggiat pariwisata. Potensi Sikka yang juga sudah menarik mata dunia adalah kain tenun. Di Sikka telah terdapat desa yang menjadi Desa Devisa Klaster Tenun NTT rintisan ASEAN Foundation. Ada 22 desa di Sikka yang

didampingi sebagai Desa Devisa. Seminari Tinggi Interdiosesan Santo Petrus Ritapiret, juga menjadi tempat bersejarah yang menjadi tempat kunjungan umat Nasrani.

Potensi wisata yang demikian besar hingga hari ini belum sepenuhnya dimanfaatkan, hal ini dapat dilihat melalui data yang disajikan pada tabel berikut. Dari data jumlah kunjungan wisata, tingkat kunjungan wisata di Kabupaten Sikka selalu mengalami penurunan sejak tahun 2018. Namun angka ini perlu dikonfirmasi, karena data dari BPS Provinsi NTT menunjukkan bahwa data jumlah tamu yang menginap di hotel untuk Sikka mencapai angka 41.473 (Provinsi NTT Dalam Angka 2023). Jumlah kunjungan wisata Kabupaten Sikka ini dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota di NTT, berada pada urutan ke tiga. Di Provinsi NTT, tercatat jumlah tamu yang menginap di hotel tahun 2022 paling tinggi adalah Kota Kupang dengan jumlah 313.357 orang, selanjutnya Kabupaten Manggarai Barat dengan jumlah 259.574 orang.

Lama kunjungan wisata sebagai indikator pariwisata juga menunjukkan fluktuasi meskipun terjadi peningkatan sejak tahun 2020 namun belum mampu mendekati lama kunjungan pada tahun 2018-2019. Penurunan kinerja sektor pariwisata di Kabupaten Sikka ini tidak lepas dari adanya pandemi COVID-19 yang memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kunjungan. Jumlah kunjungan wisatawan dan rata-rata lama menginap menentukan besaran belanja yang dilakukan wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka menyatakan bahwa belanja wisatawan, pada 2021 mencapai Rp 27 miliar, sementara pada 2020 mencapai Rp 80 miliar. Sebelum pandemi COVID-19, pada 2017, 2018, dan 2019, belanja wisatawan mencapai Rp 90 miliar.

2. Pertanian

Pertanian merupakan salah satu sektor utama yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Kabupaten Sikka. Melalui pengembangan pertanian yang berkelanjutan, tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan, tetapi juga mendukung ketahanan pangan, pembangunan ekonomi lokal, serta pelestarian lingkungan.

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja sektor pertanian daerah meliputi produksi pertanian, luas lahan, produktivitas pertanian, pendapatan petani, serta berbagai indikator lainnya. Indikator tersebut memberikan gambaran tentang efektivitas kebijakan dan program yang dilaksanakan dalam meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan sektor pertanian, serta dampaknya terhadap kesejahteraan petani dan masyarakat secara keseluruhan. Berbagai indikator tersebut dirangkum oleh capaian kinerja pertanian seperti disajikan dalam Tabel berikut ini. Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, kinerja makro sektor pertanian cukup fluktuatif.

Tabel 2.80
Kinerja Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB (%)	37,43	38,16	38,53	38,53	38,08
2	Pertumbuhan Sektor Pertanian	3,58	4,24	4,23	3,49	4,54

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2021-2025

Sektor pertanian terdiri dari beberapa subsektor yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Sejalan dengan kontribusi sektor terhadap PDRB, produksi masing masing subsektor juga menunjukkan fluktuasi. Berikut diuraikan kinerja masing masing subsektor.

1. Produksi Tanaman Pangan

Sub sektor tanaman pangan di Kabupaten Sikka memegang peranan yang cukup penting. Selain untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk Kabupaten Sikka, produksi tanaman pangan juga merupakan sumber pendapatan petani. Komoditi tanaman pangan utama yang dibudidayakan di Kabupaten Sikka adalah padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang

hijau dan kacang tanah. Produksi tanaman pangan Kabupaten Sikka tahun 2020 s/d 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.81
Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

No	Komoditi	Produksi (Ton)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Padi	11.398,9	11.345,98	12.456,79	12.710,01	12.710,01
2.	Jagung	30.344,36	29.416	17.202	15.800,2*	15.800,2*
4.	Kacang Tanah	1.191,15	1.218	946	640,6*	640,6*
5.	Kacang Hijau	1.614	1.496	781	597,7*	597,7*
6.	Ubi Kayu	10.7902,04	67.922	72.545	48.778*	48.778*
7.	Ubi Jalar	3.758	3.525	4.401	2.399,4*	2.399,4*

* Angka sementara 2026
Sumber: BPS, 2026

Kabupaten Sikka memiliki jumlah produksi ubi kayu tertinggi jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Provinsi NTT. Pada tahun 2022, produksi ubi kayu Kabupaten Sikka adalah 67.922 ton, angka ini adalah 12 persen dari total produksi ubi kayu di seluruh NTT. Namun demikian, jumlah produksi ubi kayu di Kabupaten Sikka cenderung fluktuatif. Pada komoditas padi, jika dibandingkan dengan NTT secara keseluruhan, produksi padi Kabupaten Sikka relatif rendah. Pada tahun 2022, produksi padi Kabupaten Sikka hanya 1,5 persen dari total produksi padi NTT. Jika dilihat dari trennya, produksi padi Kabupaten Sikka juga fluktuatif. Produksi jagung di Kabupaten Sikka juga relatif fluktuatif dari tahun ke tahun. Produksi jagung di Sikka pada tahun 2022 sebanyak 29.415 ton, angka ini merupakan 4,21 persen dari total produksi jagung yang ada di seluruh Provinsi NTT.

Tabel 2.82
Luas Panen Tanaman Pangan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

No	Komoditi	Luas Panen (Ha)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Padi	2.786	3.212	3.170	3.428	3.428
2.	Jagung	13.314	13.733	8.469	7.779,5	7.779,5
3.	Kacang Tanah	1.851	1.572	1.191	806,8	806,8
4.	Kacang Hijau	2.029	1.694	1.263	967,2	967,2
5.	Ubi Kayu	6.152	3.960	4.156	2.794,5	2.794,5
6.	Ubi Jalar	690	665	781	425,5	425,5

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

Kecenderungan fluktuasi produksi tanaman pangan ini berkaitan dengan beberapa aspek. Pertama, luas areal tanaman pangan yang mengalami tren penurunan setiap tahun. Kedua, hal tersebut berkaitan dengan produktivitas lahan yang fluktuatif. Sebagai contoh, dari data BPS Provinsi NTT, produktivitas padi di Kabupaten Sikka secara berturut-turut sejak tahun 2020, 2021, 2022 adalah 4,13 ton/ha, 3,50 ton/ha, dan 3,90 ton/ha. Ketiga, faktor seperti perubahan iklim dan serangan hama tikus juga berdampak signifikan terhadap penurunan hasil produksi tanaman pangan dan ketahanan pangan di Kabupaten Sikka. Keempat, diketahui bahwa lahan pertanian di Kabupaten Sikka seluas 173 ribu hektar dan baru dimanfaatkan 150 ribu hektar sementara 23 ribu hektar menjadi lahan tidur.

Fluktuasi produksi tanaman pangan dengan berbagai penyebab itu mengirimkan pesan bahwa pengelolaan pertanian tanaman pangan masih bersifat tradisional/seadanya. Karakter tradisional di satu sisi berkaitan dengan pengetahuan petani yang masih rendah. Pada sisi lain harga produk pertanian tanaman pangan tidak memiliki cukup insentif bagi petani untuk melakukan pengelolaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari harga produk

pertanian tanaman pangan yang dari tahun ke tahun tidak mengalami perbaikan yang berarti, bahkan cenderung tetap.

2. Produksi Tanaman Hortikultura

Sub sektor selanjutnya adalah hortikultura. Hortikultura terdiri dari 4 (empat) jenis tanaman yakni tanaman sayur-sayuran, buah-buahan (semusim dan tahunan), biofarmaka (obat-obatan dan rempah) serta tanaman hias. Kabupaten Sikka memiliki berbagai jenis komoditi sayuran dan buah-buahan yang bervariasi. Pada tahun 2020, labu siam menjadi salah satu komoditas sayuran dengan produksi tertinggi mencapai 5.121,39 ton dan terendah adalah bawang merah mencapai 211,24 ton. Hal ini disebabkan karena selain sebagai bahan pangan, labu siam juga sebagai pakan ternak. Tahun 2021, wortel menjadi komoditas tertinggi produksinya mencapai 627,44 ton. Tahun 2022, tomat menjadi salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Sikka. Tercatat total produksi komoditi ini mencapai 457,57 ton. Produksi tomat di Kabupaten Sikka sendiri telah menyumbangkan 8,29 persen kontribusi dari seluruh produksi Tomat di Provinsi NTT. Selain dua komoditi di atas, masih terdapat komoditi lain seperti kangkung, terung, bayam, dan sebagainya. Akan tetapi, jika dilihat produksi tanaman sayuran buah semusim di Kabupaten Sikka ini cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti harga jual komoditi yang stagnan dan perubahan iklim cuaca di Kabupaten Sikka.

Tabel 2.83
Produksi Tanaman Sayuran Buah Semusim Tahun 2021-2025

No	Komoditas	Produksi (Ton)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Bawang Merah	37,82	80,45	49,00	116,91	116,91
2	Petsai/Sawi	1.034,7	326,77	313,63	257,78	257,78
3	Wortel	627,44	373,55	220,05	102,65	102,65
4	Tomat	267,10	457,57	377,36	378,90	378,90
5	Terung	142,30	177,64	59,82	143,50	143,50
6	Mentimun	30,31	40,71	40,27	25,34	25,34
7	Labu siam	350,65	183,13	200,05	359,44	359,44
8	Kangkung	226,42	458,09	347,90	392,63	392,63
9	Bayam	128,82	207,69	220,31	162,44	162,44
10	Cabe	113.84	200,45	157,85	248,42	248,42

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

Selanjutnya adalah produksi buah-buahan tahunan. Sub sektor ini terdiri dari beragam komoditas meliputi alpukat, durian, mangga, nangka, nanas, pepaya, pisang, rambutan, dan salak. Komoditas pisang merupakan komoditas unggulan pertama dengan total produksi selama 5 (lima) tahun mencapai 132.767,49 ton. Kemudian disusul dengan komoditas nenas mencapai 36.345,80 ton dan mangga mencapai 18.492,30 ton. Sejak 2 (dua) tahun terakhir ini, tanaman pisang di hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Sikka terkena penyakit layu bakteri atau penyakit darah pisang/moko yang disebabkan oleh bakteri *Raistonia solanecearum* atau dikenal dengan nama *Blood Disease Bacterium* (BDB) sehingga menyebabkan terjadi penurunan produksi pisang secara signifikan di wilayah Kabupaten Sikka.

Tabel 2.84
Produksi Buah dan Sayuran Tahunan Tahun 2021-2025

No	Komoditas	Produksi (Ton)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Alpukat	2.455,62	2.638,3	1.119,6	974,79	974,79
2	Durian	855,21	1.491,04	486,45	131,15	131,15
3	Mangga	4.211,5	1.941,6	1.336,4	2.938,8	2.938,8
4	Nangka	1.802,4	920,2	748,4	811,86	811,86

5	Nenas	2.644,6	3.606,4	675,5	339,6	339,6
6	Pepaya	7.394.03	3.518,1	1.738,23	1.314,9	1.314,9
7	Pisang	28.495,2	15.067,3	5.632,92	1.258,9	1.258,9
8	Rambutan	394,02	256,5	246,6	126,8	126,8
9	Salak	541,9	748,1	224,01	78,2	78,2

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

Golongan hortikultura lain yaitu jenis tanaman biofarmaka yang terdiri dari tanaman rempah dan obat-obatan. Tanaman biofarmaka menjadi subsektor ketiga pada golongan hortikultura. Kabupaten Sikka sendiri memiliki beragam jenis komoditi tanaman biofarmaka seperti jahe, laos, kencur, kunyit, dan temulawak yang menjadi komoditas unggulan dengan tingkat produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan komoditi lainnya. Komoditas jahe menjadi komoditi unggulan pertama tertinggi pada tahun 2020 mencapai 145,63 ton. Angka ini setara dengan 20,26 persen dari total produksi komoditi jahe di Provinsi NTT dan menjadi daerah penghasil komoditi jahe terbesar kedua setelah Kabupaten Manggarai Barat. Akan tetapi, produksi jahe di Kabupaten Sikka masih cenderung fluktuatif setiap tahunnya.

Tabel 2.85
Produksi Tanaman Biofarmaka Tahun 2021-2025

No	Komoditi	Produksi (ton)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jahe	65,27	116,95	91,27	309,831	309,831
2	Laos	67,62	68,43	24,61	350,118	350,118
3	Kencur	15,63	23,26	15,53	59,554	59,554
4	Kunyit	67,81	88,01	44,33	237,598	237,598
5	Temulawak	12,66	0,95	3,85	350,118	350,118

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

Berikutnya kunyit menjadi komoditi unggulan selanjutnya di Kabupaten Sikka dengan total produksi tertinggi terjadi pada tahun 2020 mencapai 105,24 ton. Kondisi produksi yang fluktuatif di satu sisi berkaitan dengan pengelolaan produksi yang sebagian besar masih bersifat tradisional. Pada sisi lain harga produk cenderung fluktuatif karena masih dipasarkan dalam bentuk mentah. Selanjutnya golongan tanaman hortikultura lain yaitu tanaman hias. Untuk tanaman hias di Kabupaten Sikka tidak berkembang dengan baik disebabkan karena luas usahanya berkisar di bawah angka 0,1 ha.

3. Produksi Tanaman Perkebunan

Sub sektor ketiga adalah tanaman perkebunan. Sub sektor ini terdiri banyak tanaman, namun yang tercatat sebagai produk utama adalah tanaman kelapa, jambu mete, kopi, kakao, kemiri, tembakau, cengkeh, pala, vanili, dan lada. Komoditi Kelapa menjadi komoditas unggulan dengan tingkat produksi tertinggi di Kabupaten Sikka dan mengalami tren peningkatan sejak tahun 2021. Produksi tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu 10.590,40 ton atau 37,83 persen dari total keseluruhan produksi perkebunan di Kabupaten Sikka tahun 2024. Produk kelapa ini selanjutnya diolah menjadi kopra oleh petani. Setiap tahun setidaknya petani kelapa Sikka menghasilkan rata-rata 2,5 ton kopra. Cara pengolahan kelapa menjadi kopra hingga saat ini masih banyak dilakukan secara tradisional. Cara pengolahan yang sederhana ini menjadi salah satu penyebab dari relatif rendahnya harga kopra yang dihasilkan. Itulah mengapa potensi pertanian yang demikian tinggi belum mampu menjadi sumber kesejahteraan petani.

Tabel 2.86
Produksi Perkebunan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

No	Komoditi	Produksi (Ton)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kelapa	10.557,54	10.574,5	10.585,27	10.590,4*	10.590,4*
2.	Jambu Mete	8.910,10	8.913,85	8.922,1	8.923,8*	8.923,8*
3.	Kopi	129,6	129.63		131,2*	131,2*
	- Arabika	-	-	-	-	-
	- Robusta	129,6	129,6	130,2	131,2*	131,2*
4.	Kakao	8.056,4	8.015,57	8.023,4	7.026,9*	7.026,9*
5.	Kemiri	193,8	194,3	200,40	211,1*	211,1*
6.	Tembakau	37,49	37,81	40,10	40,20*	40,20*
7	Cengkeh	473,85	461,94	472,2	475,20*	475,20*
8	Pala	89,70	94,6	102	103,9*	103,9*
9	Vanili	112,2	113,79	123,6	128,1*	128,1*
10	Lada	37,75	37,75	43,05	44,05*	44,05*

Ket: *Data sementara olahan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2026

Komoditi terbanyak kedua adalah jambu mete. Meski mengalami fluktuasi produksi setiap tahunnya, mete menjadi komoditas unggulan selanjutnya dengan total produksi pada tahun 2024 mencapai 8.923,80 ton atau 31,88 persen dari total produksi perkebunan Kabupaten Sikka tahun 2024. Sikka merupakan produsen mete kedua tertinggi di NTT. Produksi jambu mete di Provinsi NTT banyak disuplai dari Kabupaten Flores Timur sebesar 14 ribu ton atau 26,92 persen, Kabupaten Sikka 17,73 persen (9 ribu ton), Kabupaten Sumba Barat Daya 11,62 persen (6 ribu ton), Kabupaten Ende 7,83 persen (4 ribu ton), Kabupaten Sumba Timur 6,76 persen (3 ribu ton), dan Kabupaten Alor 5,11 persen (2,6 ribu ton), sisanya sebesar 24,04 persen merupakan kontribusi dari kabupaten lainnya (Pusdatin Kementerian Pertanian, 2022). Dengan potensi yang ada sesungguhnya jambu mete dapat menjadi sumber kesejahteraan petani, namun demikian minimnya hilirisasi, membuat sebagian besar jambu mete masih dijual dalam bentuk mentah, sehingga nilai tambah yang dihasilkan relatif terbatas.

Kakao adalah komoditas unggulan ketiga dengan total produksi kakao pada tahun 2024 mencapai 7.026,90 ton atau 25,10 persen dari total produksi perkebunan di Kabupaten Sikka tahun 2024. Akan tetapi, sama dengan dua komoditas unggulan sebelumnya, produksi Kakao juga masih mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Kakao di Sikka sudah menarik minat banyak investor. Sejak tahun 2013, PT Cargill Indonesia telah bekerja sama dengan petani kakao untuk menghasilkan produk kakao yang baik. Kerja sama ini telah menghasilkan kesejahteraan bagi petani. Namun demikian belum semua petani kakao mendapatkan manfaat dari hasil kerja sama tersebut. Upaya pemerintah daerah yang telah dilakukan adalah dengan mengadakan kerja sama dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka) di Jember, Jawa Timur. Kerja sama meliputi pendampingan dan mendatangkan bibit kakao bersertifikat. Namun masih dibutuhkan upaya yang lebih baik lagi agar kakao mampu menjadi komoditas andalan sumber kesejahteraan petani.

Secara umum kondisi peternakan di Kabupaten Sikka diklasifikasikan berdasarkan jenis yaitu ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas. Ternak besar terdiri atas ternak sapi, kerbau, dan kuda. Ternak kecil terdiri atas kambing dan babi. Ternak unggas terdiri atas ayam buras, ayam potong, ayam petelur, itik, dan aneka unggas. Dari tabel di bawah ini terlihat adanya kecenderungan kenaikan jumlah populasi ternak besar dari tahun 2020 sampai 2024.

Tabel 2.87
Data Populasi Ternak Besar Tahun 2021-2025

No	Ternak Besar	Jumlah Populasi (Ekor)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Sapi potong	16.277	19.531	20.477	24.222	24.222
2	Kerbau	1.843	1.898	1.815	2.050	2.050
3	Kuda	2.792	2.935	3.507	3.544	3.544

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2026

Dari tabel di atas, komoditas sapi potong mengalami peningkatan jumlah populasi sejak tahun 2020 sampai 2024. Hal ini disebabkan karena ketersediaan pakan dan luasan padang penggembalaan yang cukup mendukung kebutuhan ternak. Selain itu adanya peningkatan permintaan daging sebagai salah satu sumber protein hewani menjadi penyebab budidaya ternak sapi berkembang baik. Hal lainnya juga adalah adanya permintaan ternak sapi dari luar wilayah Kabupaten Sikka cukup tinggi sehingga mendorong masyarakat untuk memelihara ternak sapi lebih intensif. Kondisi ini menyebabkan kenaikan jumlah populasi. Untuk ternak kerbau, perkembangan jumlah populasi mengalami fluktuasi. Kerbau di Kabupaten Sikka lebih banyak diarahkan kepada tenaga kerja daripada melakukan budidaya secara intensif. Tenaga kerja disini adalah untuk membajak areal persawahan. Untuk perkembangan populasi kuda di Kabupaten Sikka mengalami perkembangan peningkatan jumlah populasi dari tahun 2020 s/d 2024. Hal ini disebabkan karena ternak kuda memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Selain sebagai ternak potong dan komoditas antar pulau, ternak kuda juga sebagai ternak untuk keperluan adat-istiadat masyarakat Kabupaten Sikka baik peristiwa perkawinan, kematian, dan urusan adat lainnya.

Tabel 2.88
Data Populasi Ternak Kecil Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

No	Ternak Kecil	Jumlah Populasi (Ekor)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kambing	118.209	124.117	129.042	151.443	151.443
2	Babi	9.680	9.487	9.933	11.773	11.773

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2026

Data tabel di atas menunjukkan ternak kambing mengalami peningkatan populasi sejak tahun 2020 sampai 2024. Hal ini karena adanya dukungan lahan padang penggembalaan dan ketersediaan Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang memadai yang mendukung proses tumbuh dan berkembangnya populasi ternak kambing. Faktor lain yang menyebabkan kenaikan jumlah populasi adalah naiknya permintaan ternak kambing dari luar wilayah Kabupaten Sikka serta konsumsi daging kambing dalam wilayah Kabupaten Sikka yang meningkat sehingga menyebabkan petani ternak bersemangat memelihara intensif ternak kambing.

Untuk ternak babi, terjadi fluktuasi terhadap jumlah populasi. Penurunan yang signifikan terjadi dari tahun 2020 ke 2021 karena masuknya wabah penyakit flu babi *African Swine Fever* (ASF) yang menyerang ternak babi dalam jumlah besar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Sikka. Penyakit ini menimbulkan dampak ekonomi yang besar terhadap pendapatan masyarakat. Pendapatan mengalami penurunan dan tidak sedikit yang mengalami kerugian. Dampak negatif adalah masyarakat menjadi takut mengkonsumsi daging babi karena mengandung penyakit. Akibatnya harga jual ternak babi menurun drastis.

Tabel 2.89
Data Populasi Ternak Unggas Tahun 2021-2025

No	Ternak Unggas	Jumlah Populasi (Ekor)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Ayam buras	295.011	309.763	298.284	348.334	348.334
2	Ayam ras petelur	4.836	22.616	27.365	27.434	27.434

No	Ternak Unggas	Jumlah Populasi (Ekor)				
		2021	2022	2023	2024	2025
3	Ayam pedaging	71.066	301.000	10.154	11.427	11.427
4	Itik	900	839	881	2.043	2.043

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2026

Dari tabel di atas, komoditas ayam buras (bukan ras) atau lebih dikenal dengan istilah ayam kampung mengalami fluktuasi peningkatan populasi dari tahun 2020 s/d 2024 karena karena ditunjang oleh naiknya permintaan akan konsumsi daging ayam buras sebagai daging sehat dan memiliki cita rasa nikmat. Karakteristik ayam buras sebagai ternak unggas yang tahan terhadap wabah penyakit, turut memberi andil terhadap naiknya jumlah populasi. Selain itu, kebanyakan masyarakat memelihara ayam buras hanya dilepas begitu saja dan membiarkan ayam mencari makan sendiri di lingkungan sekitar.

Ayam pedaging atau ayam potong mengalami penurunan jumlah populasi yang sangat signifikan dari tahun 2020 ke 2021. Hal ini disebabkan karena timbulnya wabah covid-19 berpengaruh terhadap akses transportasi yang membawa *Day Old Chick* (DOC)/bibit ayam pedaging baik melalui darat, laut, maupun udara ditutup atau tidak beroperasi sama sekali. Semua bibit didatangkan dari luar pulau sehingga sempat terjadi kelangkaan luar biasa terhadap persediaan bibit ayam pedaging saat itu. Lonjakan signifikan terjadi di tahun 2022 karena iklim usaha peternakan sudah pulih kembali pasca wabah covid-19. Namun kemudian turun di tahun 2023. Hal ini karena beberapa pengusaha peternakan ayam pedaging tidak memberikan akses data terkait jumlah populasi sehingga sedikit sekali data yang didapat.

Untuk ayam petelur terjadi penurunan jumlah populasi dari tahun 2020 ke 2021. Alasannya karena pandemi covid-19 yang terjadi saat itu. Seiring berjalannya waktu, perlahan jumlah populasi ayam petelur mengalami peningkatan populasi sejak tahun 2022 sampai 2024. Hal ini karena masyarakat sadar akan pentingnya nilai gizi telur dan perlindungan tubuh pasca wabah COVID-19. Ternak itik di Kabupaten Sikka dipelihara lebih kepada kegemaran atau hobi dan untuk konsumsi sendiri sehingga populasinya tidak begitu banyak.

Tabel 2.90
Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis Tahun 2021-2025

No	Jenis Penyakit Hewan Menular	Jumlah Kasus				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Rabies*	1	5	66	42	42
2	ASF	60.000	1.000	1.500	2.000	2.000
3	SE	-	-	-	65	65
4	PMK	-	-	-	-	-
5	Hoq Cholera	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Antraks	-	-	-	-	-
7	Brucelosis	-	-	-	-	-

* kasus rabies pada hewan

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2026

Bahwa kasus rabies sangat dipengaruhi langsung oleh cakupan vaksinasi terhadap Hewan Penular Rabies (HPR) khususnya anjing dengan rata-rata cakupan per tahun yang masih di bawah 50 persen, masih jauh dari rekomendasi Badan Kesehatan Hewan Dunia yakni minimal cakupan 70 persen untuk dapat menekan kasus pada tahun-tahun berikutnya.

Untuk Penyakit Hewan Menular (PHM) strategis lainnya baik yang zoonosis maupun non zoonosis, dukungan ketersediaan logistik kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (vaksin, obat hewan dan vitamin, desinfektan, alat dan bahan) untuk pengujian laboratorium di laboratorium veteriner dan logistik lainnya ikut berpengaruh secara langsung. Sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 dukungan terhadap hal ini masih sangat terbatas dari segi pembiayaan sehingga belum bisa berdampak kepada penekanan kasus PHM strategis secara signifikan.

Tabel 2.91
Data Populasi Hewan Penular Rabies Anjing dan Realisasi Vaksinasi Hewan Penular Rabies Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

No	Tahun	Populasi HPR (ekor)	Realisasi Vaksinasi HPR (ekor)
1	2021	50.000	-
2	2022	45.000	10.850
3	2023	45.000	11.500
4	2024	40.000	10.700
5	2025	40.000	10.700

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2026

Berdasarkan tabel di atas maka realisasi tertinggi vaksinasi pada anjing terjadi pada tahun 2020 sebanyak 20.000 ekor. Itupun belum mencapai 50 persen dari total keseluruhan populasi anjing di Kabupaten Sikka. Tahun 2021 tidak terjadi pelaksanaan vaksinasi karena pemerintah fokus menyelesaikan dan mengatasi dampak wabah penyakit covid-19. Vaksinasi dilanjutkan kembali pada tahun 2022 sampai 2024 namun dengan tingkat realisasi yang masih juga tidak mencapai 50 persen. Hal ini berkaitan dengan penyediaan vaksin HPR yang masih terbatas di Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.

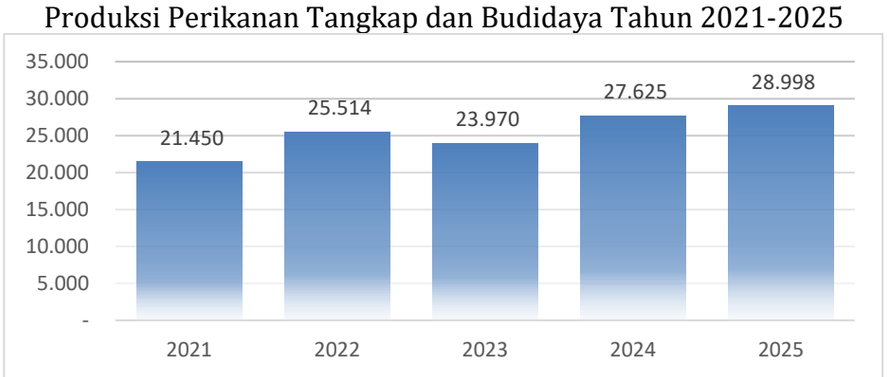
3. Perikanan

Sektor perikanan memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi dan sosial Kabupaten Sikka. Sebagai salah satu kabupaten yang kaya akan sumber daya laut, potensi perikanan Sikka menawarkan peluang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kabupaten Sikka memiliki kawasan dengan potensi ketersediaan ikan di perairan laut, di bagian utara Laut Flores di pesisir pantai bagian utara, yakni kecamatan Alok, Alok Barat, Alok Timur, Kangae, Kewapante, Waigete, Talibura, Magepanda, Palue dan di pesisir pantai bagian selatan Laut Sawu, yakni kecamatan Waiblama, Waigete, Mapitara, Doreng, Bola, Lela, Mego dan Paga. Untuk mengukur dan memantau kemajuan sektor perikanan, sejumlah indikator kinerja yang digunakan adalah produksi perikanan tahunan dalam ton dan jumlah kelompok nelayan yang ada di Kabupaten Sikka.

1. Produksi Perikanan

Produksi Perikanan adalah semua hasil produksi penangkapan, budidaya ikan yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Produksi perikanan di Kabupaten Sikka tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.40
Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Tahun 2021-2025



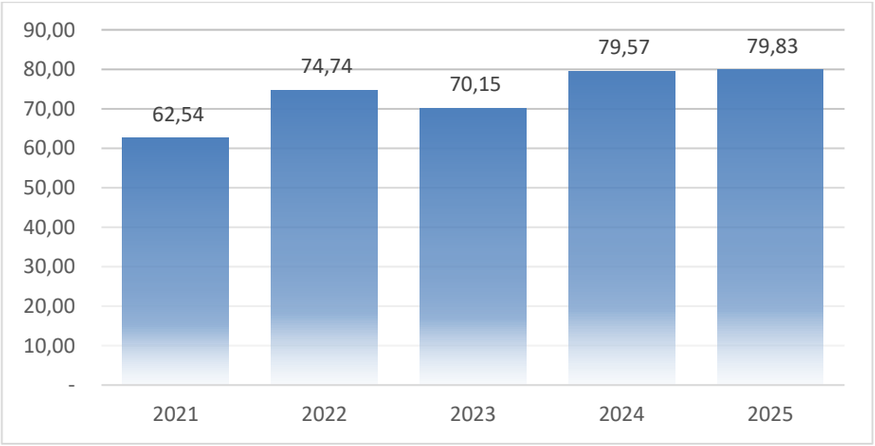
Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2026

Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa produksi perikanan Kabupaten Sikka tahun 2021 sebesar sebesar 21.450,31 ton, tahun 2022 menjadi 25.514,09 ton, tahun 2023 sebesar 23.970,48, tahun 2024 sebesar 27.625,41 ton dan tahun 2025 sebesar 28.998,55.

2. Konsumsi Ikan

Angka Konsumsi Ikan merupakan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg/kapita/tahun. Konsumsi ikan di Kabupaten Sikka selama tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.41
Konsumsi Ikan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2026

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa konsumsi ikan di Kabupaten Sikka tahun 2021 sebesar 62,54 kg/kapita/tahun, tahun 2022 menjadi 74,74 kg/kapita/tahun dan tahun 2023 sebesar 70,15 kg/kapita/tahun sedangkan tahun 2024 sebesar 79,57 kg/kapita/tahun dan tahun 2025 sebesar 79,83 kg/kapita/tahun.

3. Pendapatan Per Kapita Nelayan

Pendapatan nelayan adalah adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya yang dikeluarkan. Penerimaan nelayan adalah perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual. Pendapatan nelayan pada tahun 2019 sebesar Rp 14.790.000, pada tahun 2020 sebesar Rp 14.749.000, tahun 2021 sebesar Rp 14.775.744 pada tahun 2022 sebesar Rp 19.083.980, pada tahun 2023 sebesar Rp 14.157.940.

Selain itu, jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi NTT pada tahun 2019, produksi perikanan tangkap Sikka memiliki kontribusi 15,24 persen terhadap total produksi perikanan tangkap di Provinsi NTT. Angka ini terus naik dari tahun ke tahun dan menjadikan Kabupaten Sikka sebagai salah satu daerah dengan produksi perikanan tangkap terbesar di Provinsi NTT.

Sejak tahun 2019, nelayan Kabupaten Sikka telah berhasil mengekspor komoditas perikanan tangkap hingga ke pasar mancanegara seperti Jepang, Malaysia, Korea Selatan, dan Singapura serta ke daerah-daerah lain di Indonesia. Komoditas utama perikanan tangkap untuk Kabupaten Sikka adalah cakalang, tongkol, dan tuna. Nilai produksi perikanan tangkap Kabupaten Sikka termasuk salah satu yang tertinggi di Provinsi NTT. Sebagai contoh, pada tahun 2020, komoditas cakalang dengan nilai Rp 506.220.587 memiliki kontribusi nilai tertinggi yaitu 12,06 persen dari total nilai produksi Provinsi NTT. Produksi ikan yang tinggi tersebut sebagian besar dihasilkan oleh kelompok-kelompok nelayan.

Tabel 2.92
Nilai Produksi dan Komoditas Utama Perikanan Tangkap Tahun 2021-2025 (Rupiah)

No	Komoditas	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Cakalang	26.933.385	24.897.240	23.924.540	26.846.676	26.846.676
2	Tongkol	47.126.360	26.223.174	25.260.849	29.832.640	29.832.640
3	Tuna	15.360.060	104.617.505	91.281.232	101.854.828	101.854.828

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Database Validasi Nasional Satu Data Kelautan dan Perikanan

4. Armada Perikanan

Kabupaten Sikka menunjukkan tren peningkatan jumlah armada perikanan secara konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Jumlah total armada meningkat dari 1.191 unit pada tahun 2020 menjadi 1.330 unit pada tahun 2024, mencerminkan pertumbuhan sebesar 11,7 persen dalam lima tahun terakhir.

Peningkatan paling signifikan terjadi pada perahu papan kecil/sampan fiberglass berukuran <5 meter, yang melonjak drastis dari 50 unit selama empat tahun berturut-turut (2020–2023) menjadi 332 unit pada tahun 2024. Lonjakan ini menunjukkan adanya penguatan armada perikanan skala kecil yang kemungkinan besar terkait dengan dukungan kebijakan, bantuan sarana produksi perikanan, atau peralihan teknologi oleh nelayan kecil. Sementara itu, perahu papan sedang/sampan fiberglass >5 meter juga mengalami peningkatan stabil, dari 228 unit pada 2020 menjadi 276 unit pada 2024. Ini mengindikasikan adanya pertumbuhan yang moderat dalam armada menengah. Jenis motor tempel <5 GT mengalami peningkatan tajam pada 2020 hingga 2022 (dari 30 ke 88 unit), dan stabil di angka 88 unit hingga 2024. Sementara itu, motor tempel dengan ukuran lebih besar (5–20 GT) belum tercatat atau belum dimiliki oleh nelayan di Sikka selama lima tahun terakhir.

Jenis armada berbasis kapal motor menunjukkan tren peningkatan yang lebih stabil. Kapal motor <5 GT bertambah dari 432 unit (2020) menjadi 454 unit (2024), sedangkan kapal motor 5–10 GT juga naik dari 101 menjadi 104 unit. Namun, kapal motor berukuran lebih besar (>0 GT) relatif stagnan, seperti kapal motor 10–20 GT tetap di angka 8 unit sejak 2022, dan kapal motor 20–30 GT konsisten sebanyak 67 unit. Kapal motor 30–50 GT tetap hanya 1 unit sepanjang periode ini, mencerminkan bahwa penggunaan kapal besar masih sangat terbatas di wilayah ini.

Secara umum, pertumbuhan armada perikanan di Kabupaten Sikka didominasi oleh unit kecil dan menengah, terutama armada non-kapal (perahu dan motor tempel). Ini menunjukkan bahwa sektor perikanan di Sikka masih bertumpu pada nelayan tradisional dan skala kecil, namun menunjukkan adanya dinamika pertumbuhan yang positif dalam jumlah dan jenis armada.

Data tentang armada perikanan yang beroperasi di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.93
Armada Perikanan Tahun 2021-2025

No	Jenis Armada Perikanan	Jumlah Unit				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Perahu papan kecil sampan fibre glass < 5 M	50	50	50	332	373
2.	Perahu Papan Sedang/sampan fiberglass >5 M	228	245	255	276	305
3.	Motor Tempel < 5 GT	55	88	88	88	88
4.	Motor Tempel 5-10 GT	-	-	-	-	-
5.	Motor Tempel 10-20 GT	-	-	-	-	-
6.	Kapal Motor < 5 GT	444	444	452	454	474
7.	Kapal Motor 5-10 GT	101	102	102	104	102
8.	Kapal Motor 10-20 GT	8	8	8	8	10
9.	Kapal Motor 20-30 GT	67	67	67	67	67
10.	Kapal Motor 30-50 GT	1	1	1	1	1
	Jumlah	1.229	1.296	1.323	1.330	1.423

Sumber: Olahan Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2026

5. Alat Tangkap Perikanan

Selama lima tahun terakhir, jumlah dan komposisi alat tangkap perikanan di Kabupaten Sikka mengalami dinamika yang mencerminkan perubahan strategi dan praktik penangkapan ikan oleh nelayan. Secara keseluruhan, jumlah alat tangkap meningkat dari

12.820 unit pada tahun 2020 menjadi puncaknya pada 2023 dengan 13.297 unit, sebelum mengalami penurunan menjadi 12.764 unit pada 2024.

Salah satu alat tangkap yang paling dominan dan menunjukkan tren peningkatan stabil adalah pancing (*hand line*). Alat ini meningkat dari 9.011 unit pada 2020 menjadi 9.771 unit pada 2024. Kenaikan ini menegaskan bahwa pancing merupakan alat tangkap utama bagi sebagian besar nelayan di Sikka, terutama nelayan tradisional skala kecil.

Alat tangkap lain yang juga menunjukkan pertumbuhan adalah jaring insang tetap, yang melonjak signifikan dari 463 unit (2020) menjadi 983 unit pada 2024. Pukat cincin (*purse seine*) juga mengalami peningkatan tajam, hampir dua kali lipat dari 131 unit (2020) menjadi 246 unit (2024), menunjukkan adanya pergeseran sebagian nelayan ke alat tangkap yang lebih produktif untuk skala menengah. Sementara itu, bagan, sebagai alat bantu penangkapan yang umum digunakan di perairan tenang, juga bertambah dari 153 unit menjadi 230 unit pada 2024.

Namun, beberapa alat tangkap mengalami penurunan tajam. Penurunan paling drastis terjadi pada pukat pantai, dari 644 unit selama empat tahun berturut-turut menjadi hanya 107 unit pada 2024. Penurunan ini kemungkinan besar terkait dengan regulasi atau pembatasan penggunaan pukat karena dampaknya terhadap ekosistem pesisir. Bubu dan panah juga menunjukkan penurunan signifikan, masing-masing dari 179 ke 21 unit, dan dari 913 ke 65 unit dalam periode yang sama. Ini bisa mencerminkan perubahan preferensi nelayan terhadap alat tangkap yang lebih efisien atau perubahan dalam ketersediaan sumber daya ikan.

Jenis alat tangkap lainnya seperti longline, rawai dasar, huhate (*pole and line*), dan jala tebar relatif stabil dalam jumlah, menandakan keberlanjutan penggunaannya oleh kelompok nelayan tertentu tanpa perubahan signifikan. Secara keseluruhan, dinamika alat tangkap perikanan di Kabupaten Sikka menunjukkan adanya pergeseran teknologi, adaptasi terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan, serta kemungkinan perubahan pada pola tangkapan dan perilaku nelayan. Perkembangan ini perlu terus dimonitor untuk memastikan keberlanjutan perikanan dan perlindungan sumber daya laut di wilayah tersebut. Jenis alat tangkap yang digunakan Nelayan di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.94
Jenis Alat Tangkap Perikanan di Kabupaten Sikka

No	Jenis alat tangkap	Jumlah unit				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pukat Pantai	644	644	644	107	97
2.	Pukat Cincing/Purse seine	132	149	171	246	203
3.	Jaring Insang Tetap	471	466	466	983	461
4.	Jaring Insang Hanyut	990	990	991	991	981
5.	Bagan	153	169	174	230	172
6.	Longline	3	3	3	3	3
7.	Rawai Dasar	92	92	92	92	83
8.	Huhate / Pole and Line	75	75	75	75	67
9.	Pancing / Hand Line	9.036	9.118	9.423	9.771	9.329
10.	Bubu	179	179	179	21	16
11.	Panah	913	913	913	65	40
12.	Jala Tebar	166	166	166	180	130
	Jumlah	12.854	12.964	13.297	12.764	12.560

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2026 (diolah)

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kinerja urusan energi dan sumber daya mineral merupakan faktor penting dalam mengukur kemajuan dan perkembangan suatu daerah. Hal ini sangat relevan ketika kita mengamati Kabupaten Sikka yang terletak di Provinsi NTT. Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Sikka telah mengalami perubahan yang signifikan dalam hal akses dan

pemanfaatan sumber energi serta sumber daya mineral. Data dan statistik yang terkait dengan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, rasio ketersediaan daya listrik, jumlah keluarga yang mengandalkan listrik PLN maupun sumber listrik non-PLN, dan jumlah keluarga yang masih belum memiliki akses listrik memberikan pandangan yang jelas tentang perjalanan Kabupaten Sikka dalam menghadapi tantangan energi dan sumber daya mineral.

Tabel 2.95
Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase rumah tangga pengguna listrik	90,26	94,77	94,77	94,77	94,77
2.	Rasio ketersediaan daya listrik	97,25%	97,25%	97,25%	97,25%	97,25%
3.	Jumlah keluarga yang menggunakan listrik PLN	52.387	58.899	58.899	58.899	58.899
4.	Jumlah keluarga yang menggunakan listrik Non PLN	5.425	3.080	3.080	3.080	3.080
5.	Jumlah keluarga belum Berlistrik	6.239	3.420	3.420	3.420	3.420
6.	Desa yang menggunakan PLN	103	141	141	141	141
7.	Desa yang menggunakan Non PLN	40	40	40	40	40
8.	Desa Belum Berlistrik	40	40	40	40	40
9.	Persentase pertambangan tanpa izin	-	10	10	10	10

Sumber: RKPD Kabupaten Sikka, 2026

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Sikka dari tahun 2018 hingga 2022. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2021 dan 2022, dengan persentase yang hampir mencapai 95 persen. Ini mengindikasikan upaya yang berhasil dalam meningkatkan akses listrik bagi rumah tangga di daerah tersebut. Rasio ketersediaan daya listrik tetap stabil pada 97.25 persen pada tahun 2021 dan 2022. Hal ini tidak mendukung adanya peningkatan dalam jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik. Kemudian adanya peningkatan yang konsisten dalam jumlah keluarga yang menggunakan listrik dari PLN selama periode 2018-2022. Ini mencerminkan peningkatan distribusi listrik yang efisien di Kabupaten Sikka.

Pada indikator jumlah keluarga yang menggunakan listrik non-PLN mengalami fluktuasi selama periode tersebut. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2019, jumlah tersebut menurun pada tahun 2020 dan 2022. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan preferensi atau perubahan dalam penyediaan listrik non-PLN. Sementara itu, terjadi penurunan yang signifikan dalam indikator jumlah keluarga yang belum memiliki akses listrik selama periode tersebut. Hal ini mencerminkan upaya yang berhasil dalam menyediakan akses listrik kepada lebih banyak rumah tangga di Kabupaten Sikka. Kemudian, dapat dilihat pada indikator desa yang menggunakan listrik non-PLN dan desa belum berlistrik belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Hal ini mengakibatkan ketimpangan wilayah yang cukup tinggi.

5. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan ekonomi suatu daerah, yang memegang peran strategis dalam menggerakkan aktivitas ekonomi, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja sektor perdagangan dapat dilihat melalui berbagai indikator seperti kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB, Pertumbuhan sektor perdagangan, jumlah

pedagang dan kelompok pedagang, dan sebagainya. Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, kontribusi sektor perdagangan di Kabupaten Sikka cukup tinggi, dengan tingkat pertumbuhan yang juga tinggi. Pertumbuhan yang rendah di masa pandemi COVID-19, merupakan anomali yang terjadi pada semua sektor. Aktivitas ini melibatkan lebih dari 6.000 pedagang yang tergabung dalam 80-an kelompok pedagang, yang dari tahun ke tahun angkanya menunjukkan peningkatan.

Tabel 2.96
Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kontribusi Sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dalam PDRB	10,36	10,79	11,12	11,41	11,89
2.	Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	1,42	7,03	5,71	9,20	10,42
3.	Jumlah Pedagang	6.088	6.088	1.000	1.000	1.000
4.	Jumlah kelompok pedagang	82	87	1.505	1.505	1.505

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

Fluktuasi kinerja sektor perdagangan di Kabupaten Sikka dipengaruhi oleh aliran barang yang masuk dan barang yang keluar. Data PDRB berdasar pengeluaran tercatat nilai ekspor bersih Kabupaten Sikka selalu dalam keadaan negatif, dengan nilai yang cukup besar. Sebagai contoh tahun 2023 tercatat net ekspor Kabupaten Sikka mencapai angka minus Rp 2,7 triliun atau sekitar 45 persen dari PDRB. Angka ini memberikan pesan bahwa sekalipun Kabupaten Sikka banyak menghasilkan uang dari ekspornya, namun uang tersebut kembali keluar untuk membeli barang barang dari luar daerah. Ini menjadi kata kunci penting mengapa potensi dan produksi yang dihasilkan belum mampu menciptakan kesejahteraan penduduk Kabupaten Sikka.

Komoditas yang masuk ke Kabupaten Sikka mulai dari kebutuhan pangan hingga bahan bangunan. Selain beras, komoditi pangan lain yang diimpor ke Kabupaten Sikka adalah Jagung yang pada tahun 2022 bahkan mencapai 66 ton. Selain itu, masih terdapat komoditi lain yang masuk ke Kabupaten Sikka pada tahun 2022 seperti tepung sebanyak 14.038 ton, sayuran sebanyak 11.205 ton, dan sebagainya. Hal ini menandakan adanya permintaan yang tinggi terhadap komoditi-komoditi ini sehingga Kabupaten Sikka masih memerlukan pasokan dari daerah lain untuk memenuhi permintaan tersebut.

Untuk produk selain pangan tidak tersedia data secara memadai, namun demikian dari hasil FGD didapatkan informasi bahwa sebagian besar produk bahan bangunan juga didatangkan dari luar daerah. Setara dengan itu bahan pakaian maupun berbagai peralatan rumah tangga yang tidak dapat diproduksi oleh penduduk Sikka juga didatangkan dari luar daerah.

Pada sisi lain perdagangan yakni ekspor, sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, hampir seluruh produk pertanian dan perikanan Kabupaten Sikka merupakan produk produk yang dijual keluar daerah, baik dalam bentuk mentah maupuan telah dilakukan pengolahan, baik ke daerah lain di Indonesia atau ekspor ke negara lain. Beberapa barang yang dijual keluar daerah di antaranya meliputi hewan ternak, komoditi tanaman hortikultura, buah dan sayuran, ikan, hingga produk perkebunan.

Pada tahun 2022, kelapa kupas menjadi barang yang paling banyak dikeluarkan oleh Kabupaten Sikka yaitu sebanyak 2.648 ton. Masih dari produk perkebunan komoditas keluar terbanyak adalah Kakao sebanyak 779 ton. Untuk hewan ternak, sebanyak 1.508 ekor kambing menjadi barang yang paling banyak keluar dari Kabupaten Sikka, disusul oleh kuda (53 ekor), sapi (51 ekor) dan kerbau (46 ekor). Untuk komoditas perikanan telah dijelaskan dalam analisis urusan perikanan.

Analisis atas jenis barang yang dibeli dan yang dijual dari Kabupaten Sikka memberikan informasi yang cukup jelas mengapa net ekspor Kabupaten Sikka memiliki angka negatif. Produk yang dijual dari Sikka seluruhnya merupakan produk pertanian yang sebagian besar dijual dalam bentuk mentah. Secara alamiah produk pertanian yang belum diolah merupakan produk yang cepat rusak. Dalam kondisi produk cepat rusak maka petani sebagai produsen tidak memiliki banyak pilihan untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Itulah sebabnya produksi yang tinggi belum mampu mendatangkan kesejahteraan atau menghasilkan uang yang cukup untuk membeli barang dari luar daerah. Pada sisi lain produk yang dibeli dari luar daerah adalah produk makanan dan produk hasil industri. Produk makanan, merupakan produk kebutuhan pokok yang pasti akan dibeli dengan harga berapapun selama penduduk masih memiliki kemampuan untuk membelinya. Sementara itu produk industri secara alamiah memiliki daya tawar yang cukup tinggi, sebab selain produknya tidak mudah rusak, pada umumnya produk tersebut juga merupakan barang yang dibutuhkan sekalipun untuk memenuhi kebutuhan sekunder, misalnya peralatan rumah tangga.

Berkaitan dengan perdagangan, penting juga untuk mendiskusikan perdagangan di dalam daerah. Aktivitas perdagangan membutuhkan sarana dan prasarana yang dapat dicermati dari jumlah sarana dan prasarana perdagangan. Jumlah pasar tradisional dan modern dapat memberikan gambaran ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan. Jumlah pasar tradisional dan modern mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Semakin banyak pasar, baik tradisional maupun modern, umumnya menandakan tingkat kegiatan jual beli yang aktif di tingkat lokal. Selain itu, jenis pasar juga bisa memberikan gambaran terkait karakteristik konsumen hingga aksesibilitas dan distribusi barang di Kabupaten Sikka. Berikut data terkait jumlah pasar berdasarkan jenisnya yang ada di Kabupaten Sikka yang dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.97
Jumlah Pasar di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

No	Jenis Pasar	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pasar Tradisional	40	40	40	40	40
2.	Pasar Modern	178	178	178	178	178

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2026

Berdasarkan data pada tabel di atas, kondisi pasar yang ada di Kabupaten Sikka pada tahun 2023 telah didominasi oleh pasar modern sebanyak 178 pasar, sedangkan jumlah pasar tradisional pada tahun 2023 hanya ada 40 pasar. Dominasi pasar modern di Kabupaten Sikka yang dimulai sejak tahun 2020 yang menunjukkan adanya potensi peningkatan permintaan terhadap jenis barang yang lebih spesifik dan kemampuan daya beli yang lebih tinggi.

Dilihat dari persebarannya, berdasar data dari Dinas perdagangan Koperasi dan UMKM, pasar tradisional tersedia hampir di setiap kecamatan dengan jumlah pasar yang bervariasi. Dari 21 kecamatan, terdapat 2 kecamatan yang tidak memiliki pasar yakni Kecamatan Koting dan Kecamatan Kangae. Sementara kecamatan dengan pasar tradisional terbanyak adalah Kecamatan Nita sebanyak 7 pasar dan Kecamatan Talibura sebanyak 5 pasar, sedangkan kecamatan lain bervariasi antara 1 sampai 3 pasar.

Untuk pasar modern hanya ada di 4 kecamatan yakni Kewapante, Kangae, Alok dan Alok Timur dengan jumlah terbanyak di Kecamatan Alok (8 pasar) dan Kecamatan Alok Timur (11 pasar). Dua kecamatan ini memiliki pasar modern yang cukup banyak karena secara ekonomi memang di kedua kecamatan inilah aktivitas perekonomian masyarakat tumbuh dengan pesat. Posisinya sebagai pusat pemerintahan menjadikan kedua kecamatan ini berkembang lebih pesat dibandingkan kecamatan lainnya. Data tersebut menyiratkan bahwa kegiatan perekonomian di Sikka khususnya terkait dengan sektor perdagangan masih terpusat di wilayah tertentu. Hal tersebut bisa saja menimbulkan permasalahan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di Kabupaten Sikka.

6. Perindustrian

Sektor perindustrian merujuk pada bagian ekonomi yang terlibat dalam produksi barang-barang secara massal melalui pengolahan bahan mentah atau bahan baku menjadi produk jadi. Ini mencakup berbagai industri seperti manufaktur dan industri lainnya. Beberapa indikator yang umumnya digunakan termasuk pertumbuhan nilai tambah industri, kontribusi sektor perindustrian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri, hingga cakupan bina kelompok pengrajin. Data terkait indikator-indikator tersebut disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.98
Kontribusi Sektor dan Pertumbuhan Industri Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	1,74	1,71	1,84	1,84	2,04
2.	Pertumbuhan sektor industri pengolahan	0,95	6,54	7,60	3,89	13,09

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, Provinsi NTT Dalam Angka, 2026

Pada tabel di atas, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Sikka menunjukkan tren yang relatif stabil dari tahun 2018 hingga 2023, dengan angka sekitar 1,71 hingga 1,84. Indikator ini menunjukkan betapa lemahnya kegiatan peningkatan nilai tambah di Kabupaten Sikka. Namun, pertumbuhan sektor industri pengolahan menunjukkan kinerja yang cukup bagus.

Membaiknya kondisi perindustrian itu didukung oleh terus berkembangnya perusahaan industri baik industri besar maupun industri kecil. Tercatat industri besar dan sedang yang beroperasi di Kabupaten Sikka pada tahun 2022 sebanyak 3 perusahaan, meningkat dari tahun tahun sebelumnya yang hanya 2. Untuk industri kecil dan mikro jumlahnya jauh lebih banyak dan terus mengalami peningkatan (lihat Tabel diatas). Sebagaimana karakter usaha maka usaha kecil secara makro memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan usaha besar, namun demikian jika dilihat per perusahaan penyerapan tenaga kerja usaha besar tentu lebih tinggi dibandingkan usaha mikro dan kecil.

Tabel 2.99
Kinerja Industri Pengolahan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah industri mikro dan kecil	830	923	1.101	1.901	1.901
2	Jumlah tenaga kerja industri mikro dan kecil (orang)	40.283	-	6.687	6.730	6.730
3	Nilai pendapatan industri kecil dan mikro (Rp Miliar)	598,64	-	-		
4	Pendapatan per usaha industri kecil dan mikro (Rp juta)	25,6	-	-		
5	Jumlah industri besar dan sedang	3	-	-	-	-
6	Jumlah tenaga kerja industri besar dan sedang (orang)	-	-	-	2	2
7	Cakupan bina kelompok pengrajin				<2	<2
		9	76	7	7	7

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, Provinsi NTT Dalam Angka, 2026

Pada usaha mikro dan kecil terdapat data yang cukup baik untuk dilakukan analisis yakni pendapatan usaha. Rata rata usaha mikro dan kecil menghasilkan pendapatan/omset sekitar Rp 25 juta per tahun, artinya sekitar Rp 2 juta per bulan. Jika diasumsikan bahwa keuntungan yang didapat adalah 10 persen dari usaha, maka keuntungan yang didapat usaha usaha ini hanyalah Rp 200.000 per bulan, sebuah angka yang sangat kecil. Analisis ini sejalan dengan analisis pada urusan koperasi dan UMKM yang menunjukkan masih sangat lemahnya pelaku usaha UMKM ini.

Lemahnya usaha industri ini secara langsung berkaitan dengan kapasitas pengusaha. Dari data BPS Provinsi diperoleh informasi bahwa rata rata pelaku usaha mikro dan kecil hanya berpendidikan SD atau tidak tamat SD (73,85 persen), dan hanya sekitar 3 persen yang memiliki pendidikan perguruan tinggi. Lemahnya kapasitas pelaku usaha ini berdampak pada lemahnya jiwa kewirausahaan yang merupakan motor bagi pengembangan usaha.

Dilihat dari lapangan usahanya, industri besar dan sedang yang ada di Kabupaten Sikka bergerak di bidang pengolahan produk pertanian dan perikanan. Sementara itu usaha industri kecil dan mikro secara umum bergerak di bidang industri kreatif. Dari berbagai industri kreatif, maka seni dan budaya lokal termasuk kerajinan adalah subsektor yang sangat diunggulkan dan diakui keunggulannya, disusul oleh kuliner, pariwisata dan desain grafis. Kerajinan tenun, seni musik Kabupaten Sikka tidak diragukan lagi memang merupakan unggulan yang telah diakui di tingkat internasional. Banyak desainer dan musisi hebat lahir dari kerajinan dan musik dari kawasan ini.

Upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat bersama lembaga lain termasuk pemerintah daerah hingga saat ini telah membuahkan hasil. Namun demikian sejumlah permasalahan masih menghadang sehingga kesejahteraan pelaku usaha bidang ini masih belum kunjung membaik. Dari kajian yang dilakukan Tjeme (2022), industri kerajinan secara khusus dan industri kreatif Kabupaten Sikka secara umum berhadapan dengan permasalahan- permasalahan berikut. 1) Keterbatasan kepada akses permodalan. Dari analisis bidang koperasi, pada dasarnya permodalan tersedia di lembaga lembaga keuangan maupun koperasi kredit yang banyak tersebar di wilayah Kabupaten Sikka, namun demikian kapasitas yang terbatas dari pelaku usaha membatasi akses untuk mendapatkan modal tersebut. 2) Kurangnya kapasitas pelaku usaha. Kapasitas pelaku usaha atau secara umum dikenal dengan jiwa kewirausahaan adalah sebuah jiwa yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha. Melalui jiwa kewirausahaan, pelaku usaha memiliki pengetahuan dan informasi, keterampilan/ inovasi dalam berproduksi sampai pada memasarkan produknya. 3) Dukungan pemerintah yang kurang tepat. Telah banyak program pemerintah diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil, namun demikian tidak semua program itu sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Permasalahan besar yang dihadapi pelaku usaha adalah pemasaran, namun demikian secara umum program yang dilakukan berada di seputar proses produksi.

Sementara itu bagi usaha industri besar, teridentifikasi permasalahan utama yang dihadapi adalah ketersediaan sarana dan prasarana, baik pada level produksi maupun angkutan. Pada tingkat produksi, apapun usaha yang hendak dilakukan dibutuhkan sejumlah input pendukung, misalnya air dan listrik. Keterbatasan air dan listrik ini menjadi penghambat utama bagi perusahaan besar maupun menengah untuk menjalankan usaha. Ketika produk sudah dihasilkan, dibutuhkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Hal ini masih menjadi kendala yang cukup besar dalam rangka meningkatkan investasi usaha industri besar di Kabupaten Sikka. Sarana dan prasarana usaha sesungguhnya tidak hanya dibutuhkan oleh usaha besar, usaha mikro juga secara tidak langsung membutuhkan hal tersebut. Sarana transportasi yang terbatas berdampak pada biaya angkut yang mahal, ini akan berdampak pada produksi maupun pemasaran.

7. Transmigrasi

Pelaksanaan urusan transmigrasi diarahkan pada pengembangan kawasan transmigrasi lokal. Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sikka mengirimkan warga Kabupaten Sikka ke Kabupaten Mamasaha Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 4 KK. Pada tahun 2023 tidak ada pengiriman warga transmigrasi.

Tabel 2.100
Kinerja Transmigrasi Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase kawasan transmigrasi yang berkembang	25,42%	25,42%	25,42%	25,42%	25,42%
2.	Persentase KK trasmigran yang dibina dan diberdayakan	50%	34%	34%	34%	34%

Pada tahun 2020, terdapat luas lahan total sebesar 1180 hektar yang diperuntukan untuk kebutuhan transmigrasi, pada tahun 2020 sudah di kembangkan sekitar 300 hektar dari total lahan tersebut sehingga dicapai angka sekitar 25,4%. Namun demikian, belum terdapat perkembangan terkait dengan pengembangan lahan dimaksud. Pada tahun 2020 juga terdapat persentase yang tinggi pada KK transmigran yang dibina dan diberdayakan, sayangnya angka tersebut kerap menurun dan mencapai titik terendah di tahun 2022, yang kemudian stagnan di angka 34% hingga 2024. Kab. Sikka masih perlu meningkatkan upaya dalam membina transmigran, serta mengembangkan lahan transmigrasi yang sudah dialokasikan.

2.3.3. Penunjang Urusan Pemerintahan

Kinerja tata kelola pemerintahan dan berbagai urusan yang menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sikka. Analisis diawali dengan indikator kinerja yang dapat menggambarkan kinerja tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sikka seperti Indeks Reformasi Birokrasi, Opini BPK, Nilai AKIP, Nilai LPPD dan IKM.

Tabel 2.101
Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	CC Cukup	C Nilai :48,03 Kurang	C Nilai :48,03 Kurang	CC Nilai :55,92 Kurang	CC Nilai :55,92 Kurang
2.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	*
3.	Nilai AKIP	CC Nilai :59,06 Cukup(memadai)	B Nilai: 61,91 Baik	B Nilai: 61,91 Baik		B Nilai: 69 Baik
4.	Nilai LPPD	-	31,395	31,395		
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	2,34	2,8	2,8	3,33	3,29

Sumber: DPPMD Kabupaten Sikka, 2026

Berdasarkan data di atas, pada Indikator IRB pada tahun 2020 hingga 2021, Kabupaten Sikka mendapat penilaian kategori (CC) dengan predikat cukup. Hal ini menunjukkan bahwa perlu meningkatkan serta memperbaiki dan memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat daerah. Berikutnya, yaitu tahun 2022 hingga 20223, Kabupaten Sikka berhasil memperoleh penilaian kategori (C) dalam Indeks Reformasi Birokrasi. Hal ini menandakan adanya kemajuan dalam reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di wilayah Sikka. Namun pada tahun 2024, Kabupaten Sikka kembali mendapat penilaian kategori Kurang (CC) dengan nilai sebesar 55,92.

Kemudian pada Indikator Opini BPK mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama lima tahun berturut-turut adalah pencapaian luar biasa bagi suatu daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sikka telah berhasil mempertahankan dan memenuhi standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang tinggi, serta menjalankan tata kelola keuangan yang baik.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau AKIP Selama empat tahun pertama, yaitu dari tahun 2018 hingga 2021, Kabupaten Sikka mempertahankan penilaian kategori Cukup Memadai (CC) dalam Nilai AKIP. Terdapat peningkatan progresif dari nilai 55,14 pada tahun 2018 hingga mencapai 59,06 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat upaya berkelanjutan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan di wilayah tersebut. Pada tahun 2022, Kabupaten Sikka mencatat perkembangan signifikan dengan mendapatkan penilaian kategori Baik (B) dalam Nilai AKIP penilaian kategori Baik menunjukkan kemajuan besar dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sikka. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan fokus dan strategi dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan. Selama periode tahun 2018 hingga 2022, Kabupaten Sikka mengalami peningkatan yang positif dalam kinerja tata kelola pemerintahan, sebagaimana tercermin dalam peningkatan nilai AKIP dari tahun ke tahun. Khususnya, pencapaian kategori Baik pada tahun 2022 menandakan kesuksesan besar dalam upaya memperbaiki dan memperkuat tata kelola pemerintahan.

1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan adalah proses sistematis untuk menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi dalam rangka mengatur dan memanfaatkan sumber daya secara optimal guna mencapai pertumbuhan dan kemajuan di berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Berikut data Kinerja Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sikka tahun 2021-2025.

Tabel 2.102
Kinerja Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100	100	100	100	100
2.	Persentase Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	-	-	-	-	-
3.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	-	-	-	-	-

Sumber: BPKAD Kabupaten Sikka, 2026

Berdasarkan data tersebut, pada indikator Persentase Konsistensi Program Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2020, Kabupaten Sikka mencapai tingkat konsistensi program RKPD ke dalam APBD sebesar 96,26 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hampir 95 persen dari program yang direncanakan dalam RKPD berhasil diakomodasi dalam APBD, mencerminkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Kemudian pada tahun 2021, Kabupaten Sikka mencatat tingkat konsistensi program RKPD ke dalam APBD sebesar 93,98 persen. Meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini masih menunjukkan upaya yang kuat dalam memastikan bahwa program- program yang direncanakan terwujud dalam alokasi anggaran.

Konsistensi antara RPJMD dengan RKPD untuk mengukur sejauh mana visi, misi, serta program dan kegiatan strategis dalam RPJMD direalisasikan dalam RKPD. Persentase yang tinggi menunjukkan kesesuaian antara rencana jangka menengah dengan program

kerja tahunan, yang berarti pemerintah daerah sikka konsisten dalam melaksanakan rencana pembangunan. Hal ini ditunjukan dengan pencapaian persentase 100% selama periode 2019-2023, Kabupaten Sikka menunjukkan komitmen yang kuat dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam RPJMD direalisasikan dalam RKPD.

2. Keuangan

Kinerja Keuangan Kabupaten Sikka menunjukkan seberapa baik pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan daerah. Kinerja keuangan Kabupaten Sikka dapat diukur dengan berbagai indikator keuangan antara lain Persentase Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap APBD, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah dan Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 2.103
Kinerja Keuangan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase SILPA terhadap APBD	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04
2.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	5,11	5,28	5,29	5,29	5,29
3.	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	127,33	130,28	130,28	130,28	130,28
4.	Rasio Efektivitas Keuangan Daerah	0,95	0,92	0,92	0,92	0,92
5.	Persentase Peningkatan PAD	-10,94	1,67	11,35	11,35	11,35

Sumber: BPKAD Kabupaten Sikka, 2026

Pada tahun 2020 menunjukkan penurunan sebesar 15,08 persen dalam PAD. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti situasi ekonomi global atau dampak dari pandemi COVID-19. Lebih lanjut Pada tahun 2022, Kabupaten Sikka mencatat peningkatan sebesar 1,67 persen dalam PAD. Meskipun angka ini lebih rendah dari peningkatan pada tahun 2020, masih menunjukkan adanya upaya untuk memperbaiki sumber pendapatan lokal. Pada tahun 2023 dan 2024, Kabupaten Sikka mengalami peningkatan sebesar 11,35 persen dalam PAD. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif dalam sumber pendapatan lokal di wilayah tersebut.

Selanjutnya dalam Persentase SiLPA terhadap APBD ini sebagai salah satu indikator utama dalam mengukur efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Persentase SiLPA terhadap APBD memberikan gambaran tentang seberapa baik keuangan daerah dikelola dan efisiensi dalam penggunaan anggaran yang disediakan. Jika dilihat dari data 2020, Kabupaten Sikka menunjukkan stabilitas dalam persentase SiLPA terhadap APBD, berada di sekitar 0,03 persen dan menurun menjadi 0,02 persen. Selanjutnya tiga tahun setelahnya pada 2021, 2022, 2023 dan 2024 menunjukkan peningkatan kecil dalam persentase SiLPA menjadi 0,04 persen. Meskipun peningkatan ini relatif kecil, hal ini menunjukkan adanya surplus anggaran yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Rasio kemandirian keuangan daerah sebagai salah satu indikator kinerja keuangan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola dan membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dari sumber pendapatan sendiri, tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Selama periode 2020-2024, Kabupaten Sikka menunjukkan stabilitas dalam Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dengan angka yang relatif turun dari tahun ke tahun. Angkanya berada di kisaran 5 persen, yang menunjukkan penurunan dalam kemampuan Kabupaten Sikka untuk membiayai

sebagian besar kegiatannya sendiri. Meskipun ada variasi kecil dari tahun ke tahun, rasio kemandirian yang berada di atas 5 persen menunjukkan Kabupaten Sikka memiliki tingkat kemandirian yang cukup stabil. Menandakan bahwa Kabupaten Sikka memiliki sumber pendapatan yang cukup kuat dari sumber- sumber internal, memungkinkan untuk pelaksanaan program dan proyek pembangunan tanpa terlalu bergantung pada dana transfer.

Lebih lanjut dalam rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio ini mencerminkan bagaimana alokasi dan penggunaan anggaran daerah dapat mendukung pelaksanaan program dan proyek pembangunan dengan optimal. Tahun 2020 Kabupaten Sikka mengalami penurunan dalam Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dengan angkanya turun dari 86,34. Penurunan ini menunjukkan potensi masalah dalam pengelolaan dan efisiensi anggaran di Kabupaten Sikka selama periode tersebut. Namun setelahnya, terjadi perubahan drastis pada tahun 2021 dan 2022, angka efisiensi keuangan daerah melonjak tajam dari 84,87 pada tahun 2020 menjadi 127,33 pada tahun 2021, dan meningkat lagi menjadi 130.28 pada tahun 2022 dan 2023. Peningkatan yang signifikan ini menunjukkan adanya perbaikan atau penyesuaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka dalam pengelolaan sumber daya keuangannya.

Terakhir dalam indikator Rasio Efisiensi Keuangan daerah menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dari tahun 2019 hingga 2020, Kabupaten Sikka menunjukkan kenaikan yang cukup dalam Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, dengan angkanya berkisar antara 0.99 hingga 1.01. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sikka berhasil mempertahankan efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai hasil yang diharapkan selama periode tersebut. Terjadi penurunan pada tahun 2021 dan 2022, dengan rasio masing-masing 0.95 dan 0.92. Penurunan ini menandakan adanya potensi ketidakmampuan dalam memanfaatkan anggaran secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

3. Pengawasan

Pengawasan pada pemerintah dengan kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengacu pada proses sistematis untuk memantau dan menilai kinerja serta kepatuhan pemerintah terhadap standar, aturan, dan prosedur yang berlaku. SPIP adalah rangkaian kebijakan, prosedur, dan tindakan yang bertujuan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam pengelolaan sumber daya pemerintah. Sementara APIP adalah unit organisasi yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi pengawasan intern di lingkungan pemerintah.

Tabel 2.104
Kinerja Pengawasan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Nilai maturitas SPIP	Level 3	Level 2 Nilai: 2,365	Level 2 Nilai: 2,365	Level 2 Nilai: 2,365	Level 2 Nilai: 2,365
2.	Persentase tindak lanjut temuan	54,39	50,85	50,85	36,43	35,92
3.	Jumlah temuan BPK	Rp.147.770.619	-	-	-	-
4.	Nilai Level APIP	Level 3 DC	Level 2 Nilai : 2,40 (Structured)	Level 2 Nilai : 2,40 (Structured)	Level 2 Nilai :2,38 (Structured)	Level 2 Nilai :2,38 (Structured)

Sumber: Inspektorat Kabupaten Sikka, 2026

Berdasarkan data tersebut maka pada indikator Nilai maturitas SPIP, berhasil mempertahankan Level 3 dalam maturitas SPIP pada tahun 2020-2021. Hal Ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pengawasan internal di pemerintah daerah, menandakan bahwa sistem pengendalian intern berjalan dengan baik. Selanjutnya pada tahun 2022 hingga 2024, Kabupaten Sikka kembali ke Level 2 dalam maturitas SPIP. Hal ini menunjukkan adanya tantangan atau perubahan dalam pengawasan internal di tahun tersebut.

Adapun Pengawasan berdasarkan indikator Nilai Level APIP pada tahun 2020 dan 2021 berhasil mempertahankan Level 3 dalam kategori Structured pada APIP. Hal ini menunjukkan bahwa APIP di Kabupaten Sikka telah mencapai tingkat kematangan yang tinggi dan terstruktur. Meskipun perubahan pada 3 tahun terakhir Ini menunjukkan adanya penyesuaian atau perubahan dalam kinerja pengawasan internal di tahun 2022 hingga 2024. Pengawasan yang efektif adalah salah satu pilar utama dalam menjaga integritas dan transparansi pemerintahan daerah. Salah satu mengukur efektivitas pengawasan adalah dari persentase tindak lanjut terhadap temuan yang telah dilakukan.

Pada tahun 2020 dilakukan tindak lanjut temuan BPK yang cukup signifikan di angka 63,55%. Menunjukkan upaya yang tinggi dalam menjalankan tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan, mencerminkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Sikka dalam menanggapi masalah yang diidentifikasi. Selanjutnya pada 2021 terjadi penurunan menjadi 54,39%, hal ini mengindikasikan adanya tantangan atau hambatan tertentu yang mengurangi efektivitas pengawasan selama tahun tersebut. Terakhir di tahun 2022 dan 2023 menunjukkan angka 50,85%, yang sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk angka tindak lanjut terakhir sekaligus terendah ada di tahun 2024 dengan angka 36,43%. Menunjukan turunnya upaya pemerintah dalam menindaklanjuti temuan BPK. Hal ini kemudian menunjukan menurunnya kinerja pengawasan inspektorat daerah Kab. Sikka, sehingga menjadi catatan bahwa diperlukan upaya yang lebih tinggi untuk meningkatkan pengawasan di Kab. Sikka.

4. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Berbicara terkait sumber daya manusia dalam konteks pemerintahan, Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan menjadi aspek kunci dalam memastikan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh entitas pemerintah adalah kompeten, terampil, dan dapat mengemban tugas dan tanggung jawab mereka dengan efektif. Ini adalah faktor penting dalam mencapai tujuan dan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Tabel 2.105
Kinerja Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tah				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	32 (Sangat Rendah)	33,4 (Sangat Rendah)	76,36	76,35	76,35
2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0,013	0,013			
3.	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	44,955	31,726	31,726		
4.	Jumlah pelanggaran pegawai	1	5	5		

Sumber: Data olahan BKPSDM Kabupaten Sikka, 2026

Berdasarkan data tersebut maka pada indikator Indeks Profesionalitas ASN Pada tahun 2020, mencatat skor Indeks Profesionalitas sebesar 30,09 dengan kategori "Sangat Rendah". Hal ini menunjukkan bahwa terdapat tantangan dalam meningkatkan profesionalitas ASN di Kabupaten Sikka pada tahun tersebut. Selama periode tahun 2020 hingga 2022, Kabupaten Sikka mengalami tantangan dalam meningkatkan profesionalitas ASN. Meskipun terdapat peningkatan pada tahun- tahun terakhir, kategori tetap berada pada tingkat "Sangat Rendah". Adapun dalam penilaian Profesionalitas ASN terdapat beberapa komponen ataupun dimensi penilaian seperti kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Peningkatan profesionalitas ASN adalah hal yang penting untuk memastikan bahwa pemerintahan dapat beroperasi dengan efisien, efektif, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Meskipun demikian, Kab. Sikka dapat meningkatkan nilai indeks ini pada tahun 2023 dan 2024 dengan skor masing-masing sebesar 76,36 dan 76,35. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 terdapat perubahan bobot penilaian pada surat yang diberikan oleh BKN untuk masing-masing Kabupaten. Perubahan bobot tersebut kemudian menghasilkan perubahan yang signifikan. Selain itu, pada tahun ini Kab. Sikka juga berkomitmen untuk mengejar nilai BKD dengan memperbaharui data kompetensi dan e-kinerja (SKP), sehingga dapat dicapai hasil yang cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

5. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan (Litbang) pemerintahan merujuk pada upaya yang dilakukan oleh pemerintahan untuk mengeksplorasi, mengidentifikasi, dan mengembangkan solusi atau inovasi terhadap berbagai tantangan dan isu yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aktivitas ini melibatkan proses penelitian untuk memahami masalah, menganalisis data, dan mencari solusi atau perbaikan dalam berbagai aspek tata kelola pemerintahan.

Tabel 2.106
Kinerja Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahu				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100%	100%	99%	72,73%	72,73%
2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	-	-	-		
3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	23,33%	33%	33%		
4.	Indeks Inovasi Daerah	23,29 (Kurang Inovatif)	43,36 (Inovatif	43,36 (Inovatif)	34,73	49,35

Sumber: Bapperida Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data tersebut maka pada indikator Indeks Inovasi Daerah Selama periode tahun 2020 hingga 2022, Kabupaten Sikka mengalami perkembangan dalam Indeks Inovasi Daerah. Pada tahun 2020, Kabupaten Sikka memulai perjalanan inovasinya dengan mencapai skor 46, yang dikategorikan sebagai Kurang Inovatif. Meskipun masih memiliki ruang untuk peningkatan, langkah awal ini menunjukkan upaya untuk menggalakkan inovasi di daerah Sikka. Tahun 2021 mengalami penurunan signifikan dalam Indeks Inovasi Daerah, mencapai skor 23,29 dengan kategori Kurang Inovatif. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti dampak dari pandemi COVID-19 atau perubahan dalam strategi inovasi. Terakhir pada pada tahun 2022, Kabupaten Sikka mengalami lonjakan signifikan dalam Indeks Inovasi Daerah, mencapai skor 43,36 yang menandakan kategori Inovatif. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk mendorong inovasi telah memberikan hasil positif dan daerah tersebut berhasil meningkatkan tingkat

inovasinya. Ada catatan bahwa terdapat perbedaan bobot poin penilaian pada tahun 2020 ke tahun selanjutnya yang menyebabkan penilaian dan kategori penilaian mengalami penyesuaian.

Kemudian pada indikator persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. Pada tahun 2018 dan 2019 data yang disajikan menunjukkan 0 persen untuk kedua tahun ini yang menandakan bahwa bahwa belum ada upaya atau fasilitasi yang dilakukan untuk menerapkan inovasi di perangkat daerah Kabupaten Sikka selama periode ini. setelahnya di tahun 2020 terjadi peningkatan signifikan dengan persentase 3,33 persen. Meskipun angka ini masih relatif rendah, namun terdapat upaya awal dalam mendorong penerapan inovasi di tingkat perangkat daerah. Tahun berikutnya di 2021 terjadi lonjakan yang signifikan dengan persentase mencapai 23,33 persen yang menunjukkan komitmen dan upaya yang lebih besar dari pihak berwenang dalam memfasilitasi penerapan inovasi di perangkat daerah. Terakhir tahun 2022 pencapaian meningkat lagi menjadi 33 persen, menandakan bahwa inisiatif dan strategi yang diterapkan dalam penerapan inovasi terus membuahkan hasil positif.

6. Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan adalah unit atau lembaga yang bertanggung jawab atas penyediaan dukungan administratif, teknis, dan logistik untuk kegiatan dan fungsi Dewan dalam suatu pemerintahan. Fungsi utama dari Sekretariat Dewan adalah memfasilitasi proses legislasi dan mendukung tugas-tugas anggota Dewan.

Tabel 2.107
Kinerja Sekretariat Dewan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

No	Indikat	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Ketetapan penetapan perda APBD Tahun N	3	3	3	3	3
2.	Persentase penetapan ranperda tahun N	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka, 2026

Jika dilihat data tersebut maka Sekretariat Dewan di Kabupaten Sikka telah menunjukkan kinerja yang sangat baik selama periode tahun 2020-2024 dengan persentase penerapan ranperda dan pengawasan penyelenggaran pemerintahan yang sempurna. Tingkat konsistensi dan kedisiplinan yang tinggi dalam menjalankan proses legislatif adalah hal yang sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan regulasi yang diterapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan maka ditarik kesimpulannya, kinerja Sekretariat Dewan di Kabupaten Sikka selama periode tersebut mencerminkan komitmen yang tinggi terhadap efisiensi dan kedisiplinan dalam menjalankan fungsi legislatif. Hal ini merupakan aset penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif.

2.4. ASPEK DAYA SAING

2.4.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita, Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Per Kapita, Produktivitas Total Daerah, dan Nilai Tukar Petani.

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita adalah ukuran yang menggambarkan jumlah rata-rata yang dihabiskan oleh rumah tangga dalam suatu wilayah atau negara untuk

membeli barang dan jasa dalam suatu periode tertentu, biasanya dinyatakan dalam mata uang lokal dan sering kali dibagi dengan jumlah penduduk untuk mendapatkan nilai per kapita. Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai kebutuhan dan keinginan, seperti makanan, pakaian, transportasi, pendidikan, dan hiburan. Tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sering dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu masyarakat. Semakin tinggi nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, semakin tinggi tingkat konsumsi dan kesejahteraan masyarakatnya.

Tabel 2. 108
Angka Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

Indikator	Tahu				
	2021	2022	2023	2024	2025
Rata rata Pengeluaran Rumah Tangga perbulan	736.632	839.377	996.160	996.160	996.160
Persentase pengeluaran makanan	52,51%	50,16%	50,16%	52,81%	52,81%

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

Berdasarkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per bulan di Kabupaten Sikka dari tahun 2020 hingga 2024, terdapat tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, rata-rata pengeluaran rumah tangga per bulan berada pada angka Rp 747.178, dan meningkat secara bertahap menjadi Rp 839.377 pada tahun 2023. Ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan beli masyarakat dalam kurun waktu tersebut, yang bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi yang terkendali, dan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya, dari data tersebut juga terlihat bahwa persentase pengeluaran untuk makanan cenderung mengalami fluktuasi dalam periode yang sama. Meskipun terdapat variasi, namun secara umum persentase pengeluaran untuk makanan cenderung relatif stabil, dengan nilai tertinggi pada tahun 2019 sebesar 55,24 persen dan nilai terendah pada tahun 2022 sebesar 50,16 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam pengeluaran total rumah tangga, proporsi pengeluaran untuk makanan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Ini bisa mengindikasikan bahwa meskipun pendapatan meningkat, masyarakat masih memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan makanan, atau mungkin adanya faktor-faktor lain seperti perubahan pola konsumsi atau harga-harga barang kebutuhan pokok yang cenderung stabil.

2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara harga-harga produk pertanian yang diterima oleh petani dengan harga-harga barang dan jasa yang harus dibayar oleh petani untuk memperoleh *input-input* produksi yang mereka butuhkan. Dalam konteks ekonomi pertanian, Nilai Tukar Petani menggambarkan seberapa banyak produk pertanian yang dapat ditukar dengan *input-input* produksi atau barang konsumsi lainnya. Ini sering digunakan sebagai indikator kesejahteraan petani dan juga dapat memberikan wawasan tentang efisiensi produksi pertanian. Semakin tinggi NTP, semakin baik kondisi ekonomi petani tersebut, karena mereka bisa mendapatkan lebih banyak produk pertanian dalam pertukaran dengan input atau barang lainnya.

Data Nilai Tukar Petani dan Nelayan di Kabupaten Sikka tidak tersedia secara memadai, hanya tersedia data Nilai Tukar Petani tahun 2019 dan 2020 yang masing masing sebesar 105,1 dan 106,26 atau meningkat sebesar 1,1 satuan. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi kesejahteraan petani di Kabupaten Sikka sudah cukup baik. Akan tetapi, angka ini tidak sepenuhnya dapat menggambarkan kondisi petani yang ada di Kabupaten Sikka, karena jumlah data yang sangat minim. Dari data ini juga tidak dapat dilakukan analisis, capaian NTP itu karena harga yang dibayar rendah atau harga yang

diterima yang tinggi. Data Nilai Tukar Petani dan Nelayan di Provinsi NTT tahun 2023 dan 2024 yang masing masing sebesar 98,46 dan 100,96 atau meningkat sebesar 2,5 satuan.

3. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif.

a. **Pilar Pertama** yaitu **pertumbuhan dan perkembangan ekonomi** dengan **sub pilar pertama pertumbuhan ekonomi.** Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi ataupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari di masyarakat dengan indikator pertumbuhan PDRB riil perkapita, share manufaktur terhadap PDRB, rasio kredit perbankan terhadap PDRB nominal. **Sub pilar kedua Kesempatan kerja**. Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian tidak lepas dari demografi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Semakin luas kesempatan kerja suatu wilayah, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi akan semakin meningkat. Kesempatan kerja yang luas secara langsung meningkatkan tingkat produktivitas dan berpengaruh pada tingkat pembangunan ekonomi dengan indikator tingkat kesempatan kerja, persentase penduduk bekerja penuh, persentase tenaga kerja dengan tingkat pendidikan menengah keatas. **Sub pilar ketiga Infrastruktur ekonomi.** Infrastruktur ekonomi mengukur seberapa jauh pertumbuhan ekonomi sudah dapat diakses masyarakat luas. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpaku pada tingginya angka pendapatan, namun juga perlu memperhatikan infrastruktur sebagai daya dukung untuk memperlancar pencapaian target pertumbuhan. Infrastruktur yang dimaksud adalah perangkat dukungan yang dapat memperluas akses bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari tingginya pertumbuhan ekonomi dengan indikator persentase rumah tangga yang menggunakan listrik/ PLN, persentase penduduk yang memiliki telepon genggam, persentase jalan dengan kondisi baik dan sedang
b. **Pilar Kedua** yaitu **pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan** dengan **sub pilar pertama ketimpangan.** Karena pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan dengan indikator rasio pendapatan gini, sumbangan pendapatan perempuan, rasio rata-rata pengeluaran rumah tangga desa dan kota. **Sub pilar kedua kemiskinan.** Pengentasan kemiskinan merupakan syarat cukup pembangunan ekonomi yang inklusif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang disertai angka kemiskinan yang tinggi membuat pertumbuhan itu sendiri tidak berkelanjutan dengan indikator persentase penduduk miskin, rata-rata konsumsi protein perkapita per hari.
c. **Pilar ketiga** yaitu **perluasan akses dan kesempatan** dengan **sub pilar pertama kapabilitas manusia.** Perluasan akses dan kesempatan ini ditandai dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan sejahtera yang di kemudian hari dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif dengan indikator angka harapan lama sekolah, persentase balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap, persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan. **Sub pilar kedua infrastruktur dasar.** Akses terhadap infrastruktur yang lebih luas menunjukkan sebuah pembangunan yang sudah lebih merata juga memudahkan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal untuk mengejar laju pertumbuhan ekonomi. Perluasan akses tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur dasar yang mapan dengan indikator persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak, persentase rumah tangga dengan

fasilitas tempat buang air sendiri. **Sub pilar ketiga keuangan inklusif.** Institusi keuangan memiliki fungsi intermediasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka akses terhadap institusi keuangan yang lebih luas mampu memastikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang inklusif dengan indikator rasio jumlah rekening DPK terhadap penduduk usia produktif, rasio kredit perbankan UMKM.

Tabel 2. 109
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Sikka Tahun 2017-2021

No.	Wilayah	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kab. Sikka	4.93	5.02	5.12	5.04	5.22
2.	Provinsi NTT	4.80	4.82	4.97	4.95	5.24
3.	Nasional	5.76	5.77	5.97	5.54	6.00

sumber : Bappenas, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Sikka dari tahun 2017-2021 fluktuatif dan berada di skala memuaskan. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Sikka pada tahun 2021 lebih rendah dibandingkan Provinsi NTT dan lebih rendah dibandingkan Nasional. Data Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di tahun 2022 dan 2023 belum dilakukan perhitungan oleh Bappenas baik secara Nasional, Provinsi maupun Kab/ Kota.

2.4.2 Daya Saing SDM

1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Sumber Daya Manusia yang berkualitas memiliki peran signifikan dalam mengurangi disparitas kesejahteraan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. Arsitektur persebaran jumlah pekerja di suatu daerah menjadi indikator utama terkait lapangan pekerjaan yang menjadi fokus pergerakan ekonomi di wilayah tersebut. Secara umum, status pekerjaan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pekerja formal dan informal. Pekerja formal mencakup berbagai status, seperti pekerja berusaha dengan dukungan buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sementara pekerjaan informal mencakup aspek lain. kategori pekerjaaan penduduk ini sangat dipengaruhi oleh rasio lulusan penduduk pada jenjang S1/S2/S3. Namun, Kabupaten Sikka tidak memiliki data terkait rasio lulusan S1/S2/S3 dari tahun 2018 hingga 2022, sehingga bagian ini tidak memiliki penjelasan khusus.

2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Pengelompokkan penduduk menurut umur juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah penduduk di suatu wilayah termasuk berstruktur umur muda atau tua. Penduduk suatu wilayah dianggap penduduk muda apabila penduduk usia di bawah 15 tahun mencapai sebesar 40 persen atau lebih dari jumlah seluruh penduduk. Sebaliknya, penduduk disebut penduduk tua apabila jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas di atas 10 persen dari total penduduk. Suatu wilayah yang mempunyai karakteristik penduduk muda akan mempunyai beban besar dalam investasi sosial untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi anak-anak di bawah 15 tahun ini. Dalam hal ini pemerintah harus membangun sarana dan prasarana pelayanan dasar mulai dari perawatan ibu hamil dan kelahiran bayi, bidan dan tenaga kesehatan lainnya, sarana tumbuh kembang anak termasuk penyediaan imunisasi, penyediaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar termasuk guru-guru dan sarana sekolah yang lain. Sebaliknya, suatu wilayah dengan ciri penduduk tua akan mengalami beban yang cukup besar dalam pembayaran pensiun, perawatan kesehatan fisik dan kejiwaan lanjut usia (lansia), pengaturan tempat tinggal dan lain-lain. Penduduk Indonesia termasuk Kabupaten Sikka belum dianggap penduduk tua karena persentase penduduk usia di atas 65 tahun masih kecil, namun karena jumlah penduduk yang besar, maka jumlah orang tua juga cukup besar untuk memperoleh perhatian dari pemerintah.

Dilihat dari komposisi umur, persentase penduduk berumur kurang dari 15 tahun (0-14 tahun) Kabupaten Sikka cenderung mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir, dari 30,76 persen pada tahun 2018 menjadi 29,70 dan pada tahun 2027. Sementara itu, penduduk usia 65 ke atas cenderung meningkat dari 6,41 persen di tahun 2018, terus meningkat setiap tahunnya hingga 8,67 persen di tahun 2022. Dilihat dari komposisi penduduk menurut umur di atas menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Sikka dapat dikategorikan mengarah pada penduduk muda. Penduduk yang tergolong usia produktif (15-64 tahun) mengalami peningkatan dari 62,83 persen pada tahun 2018, kemudian mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 62,63 persen dan menjadi 61,63 persen pada tahun 2023. Jumlah proporsi penduduk usia produktif tersebut akan berdampak pada kesempatan kerja. Tentu kesemuanya ini berkaitan dengan program bagaimana menyiapkan calon pekerja agar mempunyai kualitas tinggi, dengan keterampilan yang memadai.

Tabel 2.110
Struktur Umur dan Umur Median Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

Tahun	Struktur Umur (%)		
	0-14	15-64	65+
2021	30,00	62,63	7,37
2022	29,70	61,63	8,67
2023	25,44	64,7	7,25
2024	24,54	66,74	8,71
2025	24,54	66,74	8,71

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, 2026

Isu mengenai population ageing (penuaan penduduk) telah menjadi suatu isu global. Proses terjadinya "penduduk tua" pada dasarnya karena adanya pergeseran komposisi umur penduduk. Penurunan fertilitas dan mortalitas di satu sisi dan meningkatnya angka harapan hidup (*life expectancy*) di sisi lain menyebabkan terjadinya proses penuaan penduduk, yang ditandai dengan penurunan jumlah penduduk muda dan balita, dan terjadinya peningkatan jumlah penduduk tua (lansia).

Perubahan komposisi penduduk menurut umur di atas memberi dampak pada angka beban ketergantungan yang menggambarkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif (65 tahun ke atas dan kurang dari 15 tahun) untuk suatu periode waktu tertentu. Menurut konsep, penduduk muda di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomi masih tergantung pada orangtua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografis.

Angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah apakah tergolong wilayah maju atau wilayah yang sedang berkembang. Angka beban ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Selama 2020, angka beban ketergantungan di Kabupaten Sikka sebesar 58,30 dan pada tahun 2021 menurun menjadi 51,19 namun pada tahun 2022 sampai dengan 2024 meningkat menjadi 59,12. Berdasarkan data tersebut maka tampak bahwa beban

tanggungan penduduk usia produktif di Kabupaten Sikka masih didominasi oleh penduduk muda.

Tabel 2.111
Rasio Ketergantungan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Penduduk Usia <15 thn	97.267	97.106	97.106	85.071	85.071
2	Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun	23.890	28.336	28.336	30.209	30.209
3	Jumlah Penduduk usia tidak produktif (1 & 2)	121.157	135.442	135.442	115.280	115.280
4	Jumlah Penduduk Usia 15 s/d 64	203.095	201.557	201.557	221.334	221.334
5	Rasio Ketergantungan	51,19	59,12	59,12	59,12	59,12

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

2.4.3 Daya Saing Iklim Berinvestasi

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator Rata- Rata Lama Perijinan dan Jumlah Demonstrasi.

1. Rata-rata Lama Perizinan

Pelayanan publik terkait perizinan di pemerintah daerah adalah proses administratif yang memungkinkan warga atau pihak terkait untuk memperoleh izin atau otorisasi untuk melakukan kegiatan atau proyek tertentu. Rata-rata lama perijinan mengacu pada jumlah waktu yang diperlukan oleh pemerintah daerah untuk memproses dan mengeluarkan izin tersebut kepada pemohon. Berikut rata-rata lama perizinan di Kabupaten Sikka.

Tabel 2.112
Rata-rata Lama Perizinan di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

No	Jenis Perizinan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	11,63 Jam	8 Jam	8 Jam	8 Jam	8 Jam
2.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	0	2 Jam	2 Jam	2 Jam	2 Jam
3.	Surat izin Tempat Usaha (SITU)	0	0	0	0	0
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)	0	0	0	0	0
5.	Surat Izin Tempat Penjualan Beralkohol (SITP-MB)	2 Jam	4 Jam	4 Jam	4 Jam	4 Jam
6.	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	6,75 Jam	0	0	0	0
7.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	0	0	0	0	0
8.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	0	0	0	0	0
9.	Tanda Daftar Gedung (TDG)	0	5,16 Jam	1 Jam	1 Jam	1 Jam
10.	Tanda Daftar Industri (TDI)	0	0	0	0	0
11.	Izin Usaha Industri (IUI)	0	0	0	0	0
12.	Izin Pemasangan Reklame	6 Jam	7 Jam	7 Jam	7 Jam	7 Jam
13.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	0	0	0	0	0

No	Jenis Perizinan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
14.	Izin Trayek (ITR)	6 Jam	5 Jam	5 Jam	5 Jam	5 Jam
15.	Izin Usaha Angkutan (IUA)	6 Jam	5 Jam	5 Jam	5 Jam	5 Jam
16.	Izin Prinsip Penanaman Modal Bagi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)	0	0	0	0	0
17.	Izin Sarana Kesehatan	7 Jam	5 Jam	5 Jam	5 Jam	5 Jam
18.	Izin Praktek Tenaga Kesehatan	1,47 Jam	7 Jam	7 Jam	7 Jam	7 Jam
19.	Izin Penelitian	1 Jam	1 Jam	1 Jam	1 Jam	1 Jam
20.	One Singel Submission (OSS)	1 Jam	1 Jam	1 Jam	1 Jam	1 Jam
21.	Izin Operasional Organisasi Sosial	0	1 Jam	1 Jam	1 Jam	1 Jam
22.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Non Berusaha (PKKPR Non Berusaha)	2 Jam	2 Jam	2 Jam	2 Jam	2 Jam
23.	Izin Operasional Puskesmas	0	4 Jam	4 Jam	4 Jam	4 Jam
24.	Sertifikat/ Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	0	1 Jam	1 Jam	1 Jam	1 Jam

Sumber: DPMTS Kabupaten Sikka

Berdasarkan data tersebut maka pada indikator Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Rata-rata lama proses perizinan di Kabupaten Sikka selama lima tahun terakhir menunjukkan variasi yang menarik. Pada tahun 2019, rata-rata waktu proses perizinan IMB menjadi 12,8 jam. Terdapat peningkatan waktu yang diperlukan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan kebijakan atau peningkatan kompleksitas dalam proses perizinan. kemudian tahun 2020 mencatat rata-rata waktu proses IMB sekitar 11,69 jam. Meskipun mengalami penurunan sedikit dibandingkan tahun sebelumnya, tetap menunjukkan adanya upaya untuk mempertahankan efisiensi dalam pelayanan perizinan. Lanjut pada tahun 2021, rata-rata waktu proses IMB hampir sama dengan tahun sebelumnya, yaitu sekitar 11,63 jam. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam waktu yang diperlukan untuk memproses IMB. Terakhir tahun 2022 mencatat penurunan yang cukup signifikan dalam rata-rata waktu proses IMB menjadi 8 jam. Ini menandakan adanya upaya dan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan proses perizinan. Selain itu adapun beberapa jenis perizinan dengan berbagai waktu yang diperoleh selama lima tahun terakhir dalam periode 2018 hingga 2022 seperti yang ditunjukkan pada Tabel berikut ini

2. Jumlah Demonstrasi

Demonstrasi adalah bentuk ekspresi publik dimana sekelompok orang berkumpul untuk menyuarakan pendapat, kekhawatiran, atau tuntutan mereka terkait suatu isu atau peristiwa tertentu. Demonstrasi dapat berlangsung dalam berbagai bentuk, termasuk aksi protes, rapat umum, pertemuan massa, dan berbagai bentuk kegiatan publik lainnya. Tujuannya dapat bervariasi, seperti menuntut perubahan kebijakan atau undang-undang. Berikut data jumlah demonstrasi di Kabupaten Sikka tahun 2021-2025.

Tabel 2.113
Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Bidang Politik	-	-	-	-	-
2	Ekonomi	-	-	-	-	-
3	Kasus Pemogokan Kerja	-	-	-	-	-
4	Jumlah Unjuk Rasa	-	-	-	-	-

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
5.	Kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang ditangani Pemerintah	56	33	33	33	33

Sumber: Satpol PP Kabupaten Sikka

Selama lima tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Sikka telah menghadapi berbagai kasus PHK yang memerlukan penanganan serius. Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Sikka menghadapi 46 kasus PHK. Tahun 2019 merupakan awal dari rentang lima tahun dimana kasus PHK menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Pada tahun 2020, terdapat 42 kasus PHK yang harus ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Sikka. Meskipun terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, kasus-kasus ini masih memerlukan upaya serius dalam menanggapi dan memberikan solusi bagi para pekerja yang terkena dampak PHK. Tahun 2021 mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah kasus PHK, dengan mencapai angka 56. Faktor-faktor seperti perubahan ekonomi global, dampak pandemi, atau kebijakan-kebijakan tertentu mungkin telah berkontribusi terhadap kenaikan ini. Pada tahun 2022, terjadi penurunan yang cukup tajam dalam jumlah kasus PHK, dengan hanya 33 kasus yang memerlukan penanganan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka. Meskipun masih merupakan tantangan serius, penurunan ini dapat mengindikasikan adanya pemulihan atau perubahan keadaan ekonomi di tingkat lokal.

2.5. Evaluasi

2.5.1 Evaluasi Pencapaian SPM Tahun 2025

Tabel 2.114
Evaluasi Pencapaian SPM Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga				
	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Adaptif berbasis Kearifan Lokal serta Meningkatnya Kehidupan Layak masyarakat yang bermartabat	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	16,47	16,17	98,18
		Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,78	9,39	96,01
	Sasaran 1 : Meningkatnya Intelektualitas dan Karakter Anak Usia Sekolah	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen Nasional (Nilai)	54,00	54,25	100,46
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen Nasional (Nilai)	47,97	49,77	103,75
		Rata-rata Kompetensi Literasi SMP berdasarkan asesmen Nasional (Nilai)	66,03	66,15	100,18
		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP berdasarkan asesmen Nasional (Nilai)	58,83	59,00	100,29
	Sasaran 2 : Meningkatnya Peran Pemuda dalam	Indeks Pembangunan Pemuda	57,82	57,61	99,64

No.	Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
	Pembangunan dan Prestasi Olahraga	Daerah (Indeks)			
		Indeks Partisipasi Olahraga (Indeks)	1,46	0,96	65,75
	Sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	79,50	70,50	88,68
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APMus) (%)	96,15	99,32	103,30
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APMus) (%)	90,81	94,50	104,06
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	8,74	8,00	91,50
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	99,56	100,00	100,44
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	98,73	98,70	99,97
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/Mts (%)	97,30	98,85	101,59
		Angka Partisipasi Kasar (APK SD/MI) (%)	101,25	97,79	96,58
		Angka Partisipasi Kasar (APK SMP/MTs) (%)	91,08	99,09	108,79
		Angka Partisipasi Murni (APM SD/MI) (%)	88,15	94,10	106,75
		Angka Partisipasi Murni (APM SMP/Mts) (%)	72,06	84,00	116,57
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	1,10	1,18	93,22
		Angka Putus Sekolah Dasar (APS) SD (%)	0,55	0,70	78,57
		Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	58,08	55,57	95,68
		Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	56,00	56,32	100,57
		Iklim Keamanan SD (Nilai)	71,23	70,32	98,72
		Iklim Keamanan SMP (Nilai)	67,39	68,76	102,03
		Iklim Kebhinekaan SD (Angka)	72,75	70,23	96,54
		Iklim Kebhinekaan SMP (Nilai)	75,14	70,73	94,13
		Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (Persentase)	81,23	90,01	110,81
		Persentase Angka Melek Aksara penduduk umur >15 tahun (%)	98,93	94,40	95,42
		Persentase Kelulusan SD/MI (%)	100,00	100,00	100,00
		Persentase Kelulusan SMP/MTs (%)	100,00	98,70	98,70
		Persentase Satuan PAUD yang menyelenggaraka n PAUD HI (%)	25,00	31,15	124,60
		Persentase SD Terakreditasi (%)	97,73	78,87	80,70
		Persentase SMP/MTs	93,34	75,82	81,23

No.	Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
		terakreditasi (%)			
		Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)	70,15	65,53	93,41
		Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi minimal B (%)	68,01	67,59	99,38
		Proporsi PTK SD Bersertifikat (%)	33,45	36,89	110,28
		Proporsi PTK PAUD Bersertifikat (%)	30,25	33,10	109,42
		Proporsi PTK SMP Bersertifikat Pendidik (%)	31,40	35,10	111,78
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
	Sasaran : Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Distribusi Guru Sekolah Dasar (SD) (Indeks)	0,89	0,93	104,49
		Indeks Distribusi Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) (Indeks)	0,86	0,63	73,26
2	Dinas Kesehatan				
	Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Sistem Kesehatan Masyarakat untuk Hidup Sehat secara Mandiri Dan Berkelanjutan	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,48	74,64	100,21
	Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	2,00	5,00	250,00
		Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	13,5	10,99	81,41
		Prevalensi Stunting (%)	31,26	10,32	33,01
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	98,38	99,53	101,17
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (%)	90,00	81,82	90,91
		Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	20,00	9,04	45,21
		Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	36,00	41,24	114,56
		Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80,00	50,1	62,63
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00	66,33	66,33
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100,00	85,00	85,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00	87,70	87,70
		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita (%)	100,00	75,60	75,60

No.	Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
		Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar (%)	100,00	98,20	98,20
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif	100,00	53,50	53,50
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut (%)	100,00	83,50	83,50
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi (%)	100,00	44,40	44,40
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	100 ,00	51,20	51,20
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (%)	100,00	90,60	90,60
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tubercolosis (%)	100,00	158,50	158,50
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	100,00	107,20	107,20
3	DINAS SOSIAL				
	Tujuan : Meningkatkan Kehidupan Layak Masyarakat Yang Bermartabat	Angka Kemisikinan	11,51	11,25	97,74
		Pengeluaran per Kapita	9.463.000	9.219.000	97,42
	Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif	Persentase Penduduk Miskin yang Tergraduasi	53,95	0,02	0,04
		Persentase PPKS di Luar Panti Yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar	4,53	9,86	217,66
		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Bekerjasama dengan Dinas Sosial (%)	52,38	95,24	181,83
		Persentase Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial Saat Bencana (%)	100,00	100,00	100,00
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	4,23	3,85	91,02
		Persentase Lansia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	0,16	9,93	6.206
		Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	0,88	12,18	1.384
		Persentase Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	2,50		-
		Presentase Korban Bencana yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	100,00	100,00	100,00
4	Dinas Pekerjaan Umum				

No.	Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
	dan Penataan Ruang				
	Tujuan : Meningkaatnya Kualitas dan Keterjangkauan Aksesibilitas Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID)	57,18	57,18	100,00
	Sasaran : Meningkatnya Akses dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur ke-Puan	55,38	55,51	100,23
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	56,91	57,29	100,67
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	51,28	51,31	100,06
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				
	Tujuan : Meningkaatnya Kualitas dan Keterjangkauan Aksesibilitas Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID)	57,18	57,18	100,00
	Sasaran : Meningkatnya Akses Hunian Layak, terjangkau dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) (Angka)	37,48	43,75	116,73
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100,00	100	100,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				
	Tujuan: Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta layanan pemadam kebakaran yang profesional, responsif dan partisipatif	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Indeks)	68,00	68,60	100,88
		Indeks Kriminalitas (tindak kejahatan per 100.000 penduduk) (angka kriminalitas) (Indeks)	90,00	79,84	88,71
	Sasaran 1: Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas (%)	100,00	100,00	100,00
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota	63,00	63	100,00
		Pemenuhan standar sarana	1,00	1	100,00

No.	Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
		prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)			
		Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	5,00	5	100,00
		Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	55,00	55	100,00
		Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	2,00	2	100,00
	Sasaran 2: Meningkatnya daya tanggap darurat dan cakupan layanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan berbasis kesiapsiagaan	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	100,00	100,00	100,00
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	165	136	82,42
		Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya	25	25	100,00

No.	Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
		informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi			
		Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	3	3	100,00
		Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	6	1	16,67
		Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	130	106	81,54
		Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	1	1	100,00
	Sasaran 3: Meningkatnya kapasitan dan akuntanbilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	65,30	72,05	110,34
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	Tujuan: Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana guna mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	140,81	180,09	127,90
	Sasaran 1: Berkurangnya risiko bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)	34.092	6.892	20,22
		Potensi Kerugian Ekonomi (Rp) (Miliar)	1.000,00	32.882.745	3.288,27
		Potensi Kerugian Fisik (Rp) (Miliar)	1.000,00	90.018.170	9.001,82
		Potensi Kerugian Lingkungan (Ha)	100,00	30,00	30,00
		Indeks Ketahanan Daerah (Angka	0,44	0,55	125,00
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	293	291	99,32
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana	32	30	93,75
		a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	1	0	-
		b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	2	1	50,00
		c. Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani	4	4	100,00

No.	Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
		BNPB (minimal 3)			
		d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)	10	10	100,00
		e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	15	15	100,00
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	261	261	100,00
		Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana	157	157	100,00
		a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	2	2	100,00
		b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	2	2	100,00
		c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100,00
		d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	150	150	100,00
		Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia	29	29	100,00
		a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	4	4	100,00
		b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	12	12	100,00
		c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	100,00
		d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100,00
		e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	100,00
		Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik	75	75	100,00
		a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	55	55	100,00
		b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	9	9	100,00
		c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100,00
		d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100,00
		e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	100,00
		Pelayanan Pencegahan dan	184	184	100,00

No.	Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
		Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	0	0	-
		Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)	0	0	-
		Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi	23	23	100,00
		Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur	12	12	100,00
		a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100,00
		b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100,00
		c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	-
		d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	-
		e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100,00
		f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	100,00
		Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara	11	11	100,00
		a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100,00
		b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	2	2	100,00
		c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	-
		d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100,00
		e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	100,00
		Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	38	38	100,00
		Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise)	6	6	100,00
		a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100,00
		b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100,00
		c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	4	4	100,00
		Gladi Lapang	32	32	100,00
		a. Tersedianya Dokumen latihan	1	1	100,00

No.	Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
		Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)			
		b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100,00
		c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	30	30	100,00
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaaan terhadap Bencana	111	111	100,00
		Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100	100	100,00
		a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	92	92	100,00
		b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	4	4	100,00
		c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	0	0	-
		d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	-
		e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	4	4	100,00
		Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana	7	7	100,00
		a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	2	2	100,00
		b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100,00
		c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100,00
		d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100,00
		Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast	2	2	100,00
		a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100,00
		b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100,00
		Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis	2	2	100,00

No.	Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
		Masyarakat			
		a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100,00
		b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100,00
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	12	12	100,00
		a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	2	2	100,00
		b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	2	2	100,00
		c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100,00
		d. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	7	7	100,00
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	68	68	100,00
		Respon Cepat Darurat Bencana	53	53	100,00
		a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	1	1	100,00
		b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	52	52	100,00
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	15	15	100,00
		a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100,00
		b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	2	2	100,00
		c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	-
		d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100,00
		e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100,00
		f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	100,00
		g. Tersedianya Operator sarana	0	0	-

No.	Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
		dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)			
		h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	100,00
	Sasaran 2: Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	72,5	72,06	99,39

2.5.2 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2025

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029, ada 5 (lima) tujuan pembangunan daerah dengan sasarannya masing – masing yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Berdaya Saing dengan indikatornya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
   Sasaran :
   a. Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Adaptif Berbasis Kearifan Lokal, dengan indikatornya : Rata – rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)
   b. Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Masyarakat untuk Hidup Sehat secara Mandiri Dan Berkelanjutan dengan indikatornya Usia Harapan Hidup (UHH)
   c. Meningkatnya Kehidupan Layak Masyarakat yang Bermartabat dengan indikatornya : Angka Kemiskinan dan Pengeluaran Per Kapita
   d. Terwujudnya Pembangunan Berkeadilan Gender yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan indikatornya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
2. Tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Sikka, dengan indikatornya Pendapatan Per Kapita, Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Gini
   Sasaran :
   a. Tumbuh Kembangnya Sektor Pertanian sebagai Tulang Punggung Ekonomi Lokal Kabupaten Sikka dengan indikatornya : Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Indeks Ketahanan Pangan
   b. Berkembangnya Industri Pengolahan Produk Pertanian sebagai Motor Penggerak Ekonomi Lokal dengan indikatornya : Pertumbuhan Industri Sektor Pengolahan dan Pertumbuhan Pembentuk Modal Tetap Bruto (PMTP)
   c. Terwujudnya Ekonomi Lokal yang Kokoh melalui Dukungan Perdagangan dan Pariwisata dengan indikatornya: Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makan Minum dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan
3. Tujuan Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, Tangguh, dan Mandiri, dengan indikatornya Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID)
   Sasaran : Meningkatnya Kualitas dan Keterjangkauan Aksesibilitas Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan dengan indikatornya Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID)
4. Tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Ekosistem yang Berkelanjutan, dengan indikatornya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
   Sasaran: Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan, dan Pengelolaan Persampahan dengan indikatornya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

5. Tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel dan Efisien serta Bebas KKN dengan indikatornya Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
   Sasaran:
   a. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel dengan indikatornya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
   b. Akuntabilitas Keuangan yang Semakin Baik Diikuti dengan Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah dengan indikatornya Opini BPK atas Laporan Keuangan (Nilai)
   c. Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif dan Transparan dengan indikatornya:
      - Indeks Inovasi Daerah (Indeks)
      - Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)
      - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
      - Indeks Kebijakan Publik (Indeks)
      - Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD.
   d. Meningkatnya Keamanan dan Kerukunan Masyarakat dengan indikatornya :
      - Indeks Kriminalitas (tindak kejahatan per 100.000 penduduk)
      - Indeks Resiko Bencana (IRB)
      - Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
   e. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat dengan indikatornya Indeks Pelayanan Publik

Evaluasi capaian kinerja program pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan capaian indikator kinerja program yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja sudah berorientasi pada capaian hasil atau outcome dari masing-masing program pada Perangkat Daerah. Sedangkan untuk capaian keuangan dihitung dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dalam APBD. Tingkat capaian realisasi kinerja dan keuangan menurut sasaran daerah sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.115
Tingkat Target dan Capaian Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Dalam RKPD Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Tingkat		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,1	73,37	103,19%
	a. Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Adaptif berbasis Kearifan Lokal	Rata-Rata Lama Sekolah	9,78	9,39	96,01%
		Harapan Lama Sekolah	16,47	16,17	98,18%
	b. Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Masyarakat untuk Hidup Sehat secara Mandiri Dan Berkelanjutan	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,48	74,64	100,21%
	c. Meningkatnya kehidupan layak masyarakat yang bermartabat	Angka Kemiskinan	11,51	11,25	97,74%
		Pengeluaran Per Kapita	9,463	9,219	97,42%
	d. Terwujudnya pembangunan Berkeadilan Gender yang Inklusif dan Berkelanjutan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,26	0,26*	100 %
		Indeks Pembangunan Gender	89,99	89,87	99,87%
2.	Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten	Pendapatan Per Kapita	19,3	21,0	108,81%
		Pertumbuhan Ekonomi	3,95	4,28	108,35%

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Tingkat		
			Target	Realisasi	Capaian
	Sikka	Rasio Gini	0,236	0,234	99,15%
	a. Tumbuh kembangnya sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi lokal kabupaten Sikka	Pertumbuhan sektor pertanian	3,25	3,25*	100%
		Indeks Ketahanan Pangan	77,72	61,80	79,52%
	b. Berkembangnya industri pengolahan produk pertanian sebagai motor penggerak ekonomi lokal	Pertumbuhan sektor industri pengolahan	4,00	3,95	98,75%
		Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,60	0,74*	46,25%
	c. Terwujudnya ekonomi lokal yang kokoh melalui dukungan perdagangan dan pariwisata	Pertumbuhan sektor akomodasi makan minum	5,30	5,21	98,30%
		Pertumbuhan sektor perdagangan	9,40	9,2	97,87%
3.	Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, Tangguh, dan Mandiri	Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID)	57,18	56,79*	99,32%
	a. Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan aksesibilitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID)	57,18	56,79*	99,32%
4.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Ekosistem yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,91	80,66	109,13%
	Meningkatnya kualitas air, udara, tutupan lahan dan pengelolaan persampahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,91	80,66	109,13%
5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel dan Efisien serta Bebas KKN	Indeks Reformasi Birokrasi	CC		
	a. Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan yang akuntabel	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B		
	b. Akuntabilitas Keuangan yang semakin baik diikuti dengan meningkatkan kemandirian fiskal daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP		
	c. Terwujudnya sistem pemerintahan yang efektif dan transparan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,50	2,13	85,20%
		Indeks Profesionalitas ASN	78,35	68,75	87,75%
		Indeks Kebijakan Publik	2,75	2,63	95,64%
		Indeks Inovasi Daerah	36,73	49,35	134,36%
		Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	40	74,12	185,30%
	d. Meningkatnya keamanan dan kerukunan masyarakat	Indeks Kriminalitas (tindak kejahatan per 100.000 penduduk) (angka kriminalitas)	90		
		Indeks Penyelenggaraan	68		

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Tingkat		
			Target	Realisasi	Capaian
		Ketentraman dan Ketertiban Umum			
		Indeks Risiko Bencana	140,81		
	e. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Indeks Pelayanan Publik.	2,60	2,49	95,77%

Pelaksanaan Evaluasi berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029:

A. Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Berdaya Saing

Tujuan ini dapat dicapai dengan menghitung indikator Indeks Pembangunan Manusia.

1. Tujuan 1 Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Adaptif Berbasis Kearifan Lokal

Sasaran ini diukur dengan indikator Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Untuk sasaran ini didukung oleh 6 (enam) Program yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah yakni Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Adaptif Berbasis Kearifan Lokal, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.116

Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

NO	Program	Tingkat Capaian yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	99,36	67,41	Dinas PKO, Dinas Kearsipan dan perpustakaan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 99,81 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 67,41 masuk pada kriteria **Rendah**.
2.	Program Pengendalian Perijinan Pendidikan	-	9,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 0,00 dan capaian keuangan sebesar 9,00 masuk pada kriteria **Sangat Rendah**.
3.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	100,00	90,58	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 90,58 masuk pada kriteria **Tinggi**.
4.	Program Pengelolaan Pendidikan	86,14	96,55	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 84,57 masuk pada kriteria **Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 96,07 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi**.
5.	Program Pengembangan Kurikulum	100,00	25,20	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 25,20 masuk pada kriteria **Sangat Rendah**.
6.	Program Pembinaan Perpustakaan	58,72	52,47	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 58,72 dan capaian keuangan sebesar 52,47 masuk pada kriteria **Rendah**.
Tingkat Capaian		**72,85**	**58,65**		**Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 72,85 masuk pada kriteria Sedang dan capaian keuangan sebesar 58,65 masuk pada kriteria Rendah.**

2. **Tujuan 1 Sasaran 2 : Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Masyarakat untuk Hidup Sehat secara Mandiri Dan Berkelanjutan**

Sasaran ini diukur dengan indikator Usia Harapan Hidup (UHH).

Untuk sasaran ini didukung oleh 8 (delapan) Program yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelayanan Anak.

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Masyarakat untuk Hidup Sehat secara Mandiri Dan Berkelanjutan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.117
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

NO	Program	Tingkat Capaian yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	93,31	95,31	Dinas Kesehatan, Dinas 2KBP3A	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 93,21 dan capaian keuangan sebesar 95,31 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
2.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	90,97	92,78	Dinas Kesehatan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 90,97 masuk pada kriteria **Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 92,78 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi**.
3.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	70,37	77,75	Dinas Kesehatan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 70,37 masuk pada kriteria **Sedang** dan capaian keuangan sebesar 77,75 masuk pada kriteria **Tinggi**.
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	69,78	66,49	Dinas Kesehatan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 69,78 dan capaian keuangan sebesar 66,49 masuk pada kriteria **Sedang**.
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100,00	94,67	Dinas Kesehatan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 94,67 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
6.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100,00	104,26	RSUD	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 104,26 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
7.	Program Pengendalian Penduduk	100,00	87,92	Dinas P2KBP3A	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 87,92 masuk pada kriteria **Tinggi**.
8.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	100,00	56,07	Dinas P2KBP3A	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 56,07 masuk pada kriteria **Rendah**.
9.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	100,00	91,26	Dinas P2KBP3A	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 91,26 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
	Tingkat Capaian	**91,60**	**85,17**		**Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 91,60 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 85,17 masuk pada kriteria Tinggi.**

3. Tujuan 1 Sasaran 3 : Meningkatnya kehidupan layak masyarakat yang bermartabat

Sasaran ini diukur dengan indikator Angka Kemiskinan dan Pengeluaran Per Kapita Untuk sasaran ini didukung oleh 13 (tiga belas) Program yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah yakni Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Sosial, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya kehidupan layak masyarakat yang bermartabat, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.118
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

NO	Program	Tingkat Capaian yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	95,50	81,20	Dinas PKO, Dinas Sosial, Dinas Nakertrans	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 95,50 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 81,20 masuk pada kriteria **Tinggi**.
2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	-	19,11	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 0,00 dan capaian keuangan sebesar 19,11 masuk pada kriteria **Sangat Rendah**.
3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	83,33	94,22	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 83,33 masuk pada kriteria **Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 94,22 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi**.
4.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100,00	100,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 100 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
5.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	68,57	92,21	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 68,57 masuk pada kriteria **Sedang** dan capaian keuangan sebesar 92,21 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi**.
6.	Program Penempatan Tenaga Kerja	58,20	22,83	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 58,20 masuk pada kriteria **Rendah** dan capaian keuangan sebesar 22,83 masuk pada kriteria **Sangat Rendah**.
7.	Program Hubungan Industrial	83,75	99,76	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 83,75 masuk pada kriteria **Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 99,76 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi**.
8.	Program Pemberdayaan Sosial	51,55	98,00	Dinas Sosial	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 51,55 masuk pada kriteria **Sangat Rendah** dan capaian keuangan sebesar 98,00 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi**.
9.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	100,00	90,00	Dinas Sosial	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 90,00 masuk pada kriteria **Tinggi**.
10.	Program Penanganan Bencana	100,00	92,81	Dinas Sosial	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 92,81 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
11.	Program Rehabilitasi Sosial	91,22	75,45	Dinas Sosial	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 91,22 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 75,45 masuk pada kriteria **Sedang**.
12.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	92,04	86,18	Dinas Sosial	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 92,04 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 86,18 masuk pada kriteria **Tinggi**.
13.	Program Pengelolaan	100,00	43,90	Dinas Sosial	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria

NO	Program	Tingkat Capaian yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
	Taman Makam Pahlawan				**Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 43,90 masuk pada kriteria **Sangat Rendah**.
Tingkat Capaian		**78,78**	**76,59**		**Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 78,78 dan capaian keuangan sebesar 76,59 di kategorikan masuk pada kriteria Tinggi.**

4. Tujuan 1 Sasaran 4 : Terwujudnya Pembangunan Berkeadilan Gender yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Sasaran ini diukur dengan indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dan Indeks Pembangunan Gender.

Untuk sasaran ini didukung oleh 6 (enam) Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) Organisasi Perangkat Daerah yakni Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelayanan Anak.

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Terwujudnya Pembangunan Berkeadilan Gender yang Inklusif dan Berkelanjutan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.119
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

NO	Program	Tingkat Capaian yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	93,33	92,66	Dinas P2KBP3A	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 93,33 dan capaian keuangan sebesar 92,66 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi**.
2.	Program Perlindungan Perempuan	100,00	98,92	Dinas P2KBP3A	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 98,92 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	100,00	87,85	Dinas P2KBP3A	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 87,85 masuk pada kriteria **Tinggi**.
4.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100,00	99,64	Dinas P2KBP3A	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 99,64 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
5.	Program Perlindungan Khusus Anak	100,00	-	Dinas P2KBP3A	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 0,00 masuk pada kriteria **Sangat Rendah**.
Tingkat Capaian		**98,67**	**75,81**		**Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 98,67 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 75,81 masuk pada kriteria Sedang.**

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan Meningkatkan Kualitas Daya Saing SDM dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja program pendukung sebesar 85,48% sehingga berdasarkan penilaian peringkat kinerja masuk pada kriteria Tinggi dan untuk capaian keuangan sebesar 74,06% masih masuk pada kriteria Sedang.

B. Tujuan 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Sikka

Tujuan ini dapat dicapai dengan menghitung indikator Pendapatan Per Kapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Gini.

1. Tujuan 2 Sasaran 1 : Tumbuh Kembangnya Sektor Pertanian sebagai Tulang Punggung Ekonomi Lokal Kabupaten Sikka

Sasaran ini diukur dengan indikator Pertumbuhan sektor pertanian dan Indeks Ketahanan Pangan

Untuk sasaran ini didukung oleh 13 (tiga belas) Program yang dilaksanakan oleh 4 (empat) Organisasi Perangkat Daerah yakni Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Perikanan.

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Tumbuh Kembangnya Sektor Pertanian sebagai Tulang Punggung Ekonomi Lokal Kabupaten Sikka, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.120
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

NO	Program	Tingkat Capaian yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		K	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	92,74	78,76	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, DPMD, Dinas Perikanan.	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 92,74 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 78,76 masuk pada kriteria **Tinggi**.
2.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100,00	7,25	Dinas Pertanian	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 7,25 masuk pada kriteria **Sangat Rendah**.
3.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	90,00	66,23	Dinas Pertanian	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 90,00 masuk pada kriteria **Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 66,23 masuk pada kriteria **Sedang**.
4.	Program Penyuluhan Pertanian	95,51	29,52	Dinas Pertanian	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 95,51 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 29,52 masuk pada kriteria **Sangat Rendah**.
5.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100,00	97,09	Dinas Pertanian	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 97,09 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
6.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100,00	72,17	Dinas Ketahanan Pangan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 72,17 masuk pada kriteria **Sedang**.
7.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	100,00	59,59	Dinas Ketahanan Pangan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 59,59 masuk pada kriteria **Rendah**.
8.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	100,00	55,40	Dinas Ketahanan Pangan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 55,40 masuk pada kriteria **Rendah**.
9.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan	100,00	98,96	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 98,96 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**

NO	Program	Tingkat Capaian yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		K	RP		
	Masyarakat Hukum Adat				
10.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	61,11	92,80	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 61,11 masuk pada kriteria **Rendah** dan capaian keuangan sebesar 92,80 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi**.
11.	Program Penataan Desa	100,00	99,84	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 99,84 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
12.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	79,83	37,50	Dinas Perikanan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 79,83 masuk pada kriteria **Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 37,50 masuk pada kriteria **Sangat Rendah**.
13.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	91,54	99,00	Dinas Perikanan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 91,54 dan capaian keuangan sebesar 99,00 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
	Tingkat Capaian	**93,13**	**68,77**		**Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 93,13 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 68,77 masuk pada kriteria Sedang.**

2. Tujuan 2 Sasaran 2 : Berkembangnya Industri Pengolahan Produk Pertanian sebagai Motor Penggerak Ekonomi Lokal

Sasaran ini diukur dengan indikator Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Pertumbuhan sektor industri pengolahan.

Untuk sasaran ini didukung oleh 11 (sebelas) Program yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah yakni Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Berkembangnya Industri Pengolahan Produk Pertanian sebagai Motor Penggerak Ekonomi Lokal, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.121
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

NO	Program	Tingkat Capaian yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		K	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	91,13	72,34	Dinas PerdagKop dan UMKM, Dinas PM dan PTSP	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 91,13 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 72,34 masuk pada kriteria **Sedang**.
2.	Program Pengembangan UMKM	72,73	19,64	Dinas PerdagKop dan UMKM	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 72,73 masuk pada kriteria **Sedang** dan capaian keuangan sebesar 19,64 masuk pada kriteria **Sangat Rendah**.
3.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	100,00	52,17	Dinas PerdagKop dan UMKM	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 52,17 masuk pada kriteria **Rendah**.
4.	Program	100,00	69,65	Dinas	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja

NO	Program	Tingkat Capaian yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		K	RP		
	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi			PerdagKop dan UMKM	untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 69,65 masuk pada kriteria **Sedang**.
5.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	100,00	60,75	Dinas PerdagKop dan UMKM	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 60,75 masuk pada kriteria **Rendah**.
6.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	100,00	77,09	Dinas PerdagKop dan UMKM	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 77,09 masuk pada kriteria **Tinggi**.
7.	Program Promosi Penanaman Modal	100,00	93,94	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 93,94 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
8.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100,00	79,91	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 79,91 masuk pada kriteria **Tinggi**.
9.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100,00	99,68	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 99,68 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
10.	Program Pelayanan Penanaman Modal	100,00	97,58	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 97,58 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
11.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100,00	99,96	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 99,96 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
	Tingkat Capaian	**96,71**	**74,79**		**Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 96,71 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 74,79 masuk pada kriteria Sedang.**

3. Tujuan 2 Sasaran 3 : Terwujudnya Ekonomi Lokal yang Kokoh melalui Dukungan Perdagangan dan Pariwisata.

Sasaran ini diukur dengan indikator Pertumbuhan sektor perdagangan dan indikator Pertumbuhan sektor akomodasi makan minum.

Untuk sasaran ini didukung oleh 10 (sepuluh) Program yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah yakni Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Terwujudnya Ekonomi Lokal yang Kokoh melalui Dukungan Perdagangan dan Pariwisata, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.122
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

NO	Program	Tingkat Capaian yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		K	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	92,09	64,84	Dinas PerdagKop dan UMKM, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 92,09 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 64,84 masuk pada kriteria **Rendah**.
2.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	100,00	95,72	DP2KUKM	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 95,72 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
3.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	100,00	56,08	DP2KUKM	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar56,08 masuk pada kriteria **Rendah**.
4.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	100,00	18,80	DP2KUKM	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 18,80 masuk pada kriteria **Sangat Rendah**.
5.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	100,00	85,76	DP2KUKM	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 85,76 masuk pada kriteria **Tinggi**.
6.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	66,67	44,40	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 66,67 masuk pada kriteria **Sedang** dan capaian keuangan sebesar 44,40 masuk pada kriteria **Sangat Rendah**.
7.	Program Pemasaran Pariwisata	77,78	99,44	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 77,78 masuk pada kriteria **Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 99,44 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi**.
8.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	76,23	7,65	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 76,23 masuk pada kriteria **Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 7,65 masuk pada kriteria **Sedang**.
9.	Program Pengembangan Kebudayaan	94,44	95,93	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 94,44 dan capaian keuangan sebesar 95,93 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
10.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	100,00	100,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 100 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
	Tingkat Capaian	**90,72**	**66,86**		**Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 90,72 masuk pada kriteria Tinggi dan capaian keuangan sebesar 66,86 masuk pada kriteria Sedang.**

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja program pendukung sebesar 93,52% sehingga berdasarkan penilaian peringkat kinerja masuk dalam kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 70,14% masuk pada kriteria Sedang.

C. Tujuan 3 : Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, Tangguh, dan Mandiri

Tujuan ini dapat dicapai dengan menghitung indikator Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar.

Sasaran dari tujuan ini adalah untuk Meningkatnya Kualitas dan Keterjangkauan Aksesibilitas Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan dengan indikatornya Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID).

Untuk sasaran ini didukung oleh 12 (dua belas) Program yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah yakni Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan KPP.

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas dan Keterjangkauan Aksesibilitas Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.123
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

NO	Program	Tingkat Capaian yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	94,18	92,54	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan KPP	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 94,18 dan capaian keuangan sebesar 92,54 masuk pada kriteria **Tinggi.**
2.	Program Penyelenggaraan Jalan	92,24	77,02	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 92,24 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 77,02 masuk pada kriteria **Tinggi**.
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	100,00	70,48	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 70,48 masuk pada kriteria **Sedang**.
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	71,43	75,21	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 71,43 dan capaian keuangan sebesar 75,21 di kategorikan masuk pada kriteria **Sedang.**
5.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	67,74	52,47	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 67,74 masuk pada kriteria **Sedang** dan capaian keuangan sebesar 52,47 masuk pada kriteria **Rendah**.
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	100,00	79,36	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 79,36 masuk pada kriteria **Tinggi**.
7.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	100,00	80,12	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 80,12 masuk pada kriteria **Tinggi**.
8.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100,00	83,46	Dinas Perhubungan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 83,46 masuk pada kriteria **Tinggi**.
9.	Program Pengelolaan Pelayaran	100,00	99,43	Dinas Perhubungan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 99,43 di kategorikan masuk

NO	Program	Tingkat Capaian yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
					pada kriteria **Sangat Tinggi.**
10.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	100,00	86,46	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 86,46 masuk pada kriteria **Tinggi**.
11.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	100,00	74,24	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 74,24 masuk pada kriteria **Sedang**.
12.	Program Pengembangan Perumahan	64,09	12,62	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 64,09 masuk pada kriteria **Sangat Rendah** dan capaian keuangan sebesar 12,62 masuk pada kriteria **Sangat Rendah**.
	Tingkat Capaian	**90,81**	**73,62**		**Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 90,81 masuk pada kriteria Tinggi dan capaian keuangan sebesar 73,62 masuk pada kriteria Sedang.**

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja program pendukung sebesar 90,81% sehingga berdasarkan penilaian peringkat kinerja masuk pada kriteria Tinggi dan untuk capaian keuangan sebesar 73,62% masih masuk pada kriteria Sedang.

D. Tujuan 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Ekosistem yang Berkelanjutan

Tujuan ini dapat dicapai dengan menghitung indikator Indeks Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sasaran dari tujuan ini adalah untuk Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan, dan Pengelolaan Persampahan dengan indikatornya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Untuk sasaran ini didukung 9 (sembilan) program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) Organisasi Perangkat Daerah yakni Dinas Lingkungan Hidup. Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan, dan Pengelolaan Persampahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.124
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

NO	Program	Tingkat Capaian yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	98,12	90,59	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 98,12 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 90,59 masuk pada kriteria **Tinggi**.
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	100,00	99,73	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 99,73 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
3.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100,00	98,65	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 98,65 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**

NO	Program	Tingkat Capaian yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
4.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100,00	97,05	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 97,05 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
5.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	100,00	97,76	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 97,76 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
6.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	100,00	99,77	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 99,77 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
7.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100,00	97,97	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 97,97 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
8.	Program Pengelolaan Persampahan	64,46	95,34	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 64,46 masuk pada kriteria **Rendah** dan capaian keuangan sebesar 95,34 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi**.
9.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100,00	95,11	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 95,11 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
	Tingkat Capaias	**95,84**	**96,89**		**Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 95,84 dan capaian keuangan sebesar 96,89 di kategorikan masuk pada kriteria Sangat Tinggi.**

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan dapat dilihat bahwa rata – rata tingkat capaian kinerja program pendukung sebesar 95,84% dan capaian keuangan sebesar 96,89% yang dikategorikan pada kriteria Sangat Tinggi.

E. Tujuan 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel dan Efisien serta Bebas KKN

Tujuan ini dapat dicapai dengan menghitung indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).

1. Tujuan 5 Sasaran 1 : Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel

Sasaran ini diukur dengan indikator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Untuk sasaran ini didukung oleh 5 (lima) Program yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah yakni Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah.

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.125
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

No	Program	Tingkat Capaian yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	96,69	92,31	Inspektorat, Bapperida	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar **96,69** dan capaian keuangan sebesar **92,31** di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	99,75	99,75	Inspektorat	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 99,75 dan capaian keuangan sebesar 99,75 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
3.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	99,81	99,81	Inspektorat	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 99,81 dan capaian keuangan sebesar 99,81 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
4.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	92,59	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 92,59 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
5.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100,00	88,76	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 88,76 masuk pada kriteria **Tinggi.**
	Tingkat Capaian	**99,25**	**94,64**		Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar **99,25** dan capaian keuangan sebesar **94,64** di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**

2. Tujuan 5 Sasaran 2 : Akuntabilitas Keuangan yang Semakin Baik Diikuti dengan Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah

Sasaran ini diukur dengan indikator Opini BPK Atas Laporan Keuangan

Untuk sasaran ini didukung oleh 2 (dua) Program yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah.

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Akuntabilitas Keuangan yang Semakin Baik Diikuti dengan Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.126
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

No	Program	Tingkat Capaian yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	94,21	65,73	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 94,21 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 65,73 masuk pada kriteria **Rendah.**

No	Program	Tingkat Capaian yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00	83,04	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 83,04 masuk pada kriteria **Tinggi.**
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100,00	83,81	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 83,81 masuk pada kriteria **Tinggi.**
4.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	100,00	78,06	Badan Pendapatan Daerah	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 78,06 masuk pada kriteria **Tinggi**.
	Tingkat Capaian	**98,55**	**77,66**		Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 98,55 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 77,66 masuk pada kriteria **Tinggi.**

3. Tujuan 5 Sasaran 3 : Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif dan Transparan

Sasaran ini diukur dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Indeks Inovasi Daerah, Indeks Kebijakan Publik, Indeks Profesionalitas ASN, Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD.

Untuk sasaran ini didukung oleh 15 (lima belas) Program yang dilaksanakan oleh 7 (tujuh) Organisasi Perangkat Daerah yakni Bapperida, Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan SDM, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif dan Transparan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.127
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

No	Program	Tingkat Capaian yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90,81	92,00	Bapperida, Dinas Kominfo, Setda, BKPSDM, Setwan, DKPP, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 90,81 masuk pada kriteria **Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 92,00 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
2.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100,00	88,20	Bapperida	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 88,20 masuk pada kriteria **Tinggi.**
3.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	0,29	99,62	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 0,29 masuk pada kriteria **Sangat Rendah** dan capaian keuangan sebesar 99,62 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi**.
4.	Program Pengelolaan Informasi dan	78,54	93,81	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar

No	Program	Tingkat Capaian yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
	Komunikasi Publik				78,54 masuk pada kriteria **Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 93,81 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi**.
5.	Program Aplikasi Informatika	68,63	92,86	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 68,63 masuk pada kriteria **Sedang** dan capaian keuangan sebesar 92,26 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi**.
6.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100,00	98,26	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 98,26 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
7.	Program Perekonomian dan Pembangunan	83,42	79,15	Sekretariat Daerah	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 83,42 dan capaian keuangan sebesar 79,15 di kategorikan masuk pada kriteria **Tinggi.**
8.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	89,32	65,06	Sekretariat Daerah	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 89,32 masuk pada kriteria **Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 65,06 masuk pada kriteria **Rendah**
9.	Program Kepegawaian Daerah	92,31	90,65	BKPSDM	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 92,31 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 90,65 masuk pada kriteria **Tinggi.**
10.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	100,00	50,57	BKPSDM	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 50,57 masuk pada kriteria **Sangat Rendah.**
11.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	100,00	94,07	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 94,07 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
12.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	0,54	25,36	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 0,54 dan capaian keuangan sebesar 25,36 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Rendah.**
13.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100,00	99,93	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 99,93 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
14.	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	83,33	93,46	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 83,33 masuk pada kriteria **Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 93,46 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi**.
15.	Program Pengelolaan Arsip	88,89	65,44	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 88,89 masuk pada kriteria **Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 65,44 masuk pada kriteria **Rendah**.
	Tingkat Capaian	**78,41**	**81,90**		Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar **78,41** dan capaian keuangan sebesar **81,90** di kategorikan masuk pada kriteria **Tinggi.**

4. Tujuan 5 Sasaran 4 : Meningkatnya Keamanan dan Kerukunan Masyarakat

Sasaran ini diukur dengan indikator Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Indeks Kriminalitas (tindak kejahatan per 100.000 penduduk) (angka kriminalitas), Indeks Risiko Bencana.

Untuk sasaran ini didukung oleh 9 (sembilan) Program yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah yakni Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Keamanan dan Kerukunan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.128
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

No	Program	Tingkat Capaian yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	96,98	91,55	Sat Pol PP Damkar, Badan Kesbangpol, BPBD	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 96,98 dan capaian keuangan sebesar 91,55 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
2.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	50,00	97,89	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 50,00 masuk pada kriteria **Sangat Rendah** dan capaian keuangan sebesar 97,89 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi**.
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	85,71	79,19	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 85,71 dan capaian keuangan sebesar 79,19 masuk pada kriteria **Tinggi**.
4.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100,00	99,70	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 99,70 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100,00	61,56	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 61,56 masuk pada kriteria **Rendah.**
6.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100,00	98,22	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 98,22 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
7.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	100,00	98,35	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 98,35 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**

No	Program	Tingkat Capaian yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
8.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100,00	99,76	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 99,76 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
9.	Program Penanggulangan Bencana	100,00	77,25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 77,25 masuk pada kriteria **Tinggi.**
	Tingkat Capaian	**92,52**	**89,27**		Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar **92,52** masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar **89,27** masuk pada kriteria **Tinggi.**

5. Tujuan 5 Sasaran 5 : Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat.

Sasaran ini diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik.

Untuk sasaran ini didukung oleh 11 (sebelas) Program yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta 21 (dua puluh satu) Kecamatan.

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.129
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

No	Program	Tingkat Capaian yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	86,63	90,56	Dinas Dukcapil, Dinas Nakertrans, Kecamatan Kelurahan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 86,63 dan capaian keuangan sebesar 90,56 di kategorikan masuk pada kriteria **Tinggi.**
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	88,64	79,83	Kecamatan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 88,64 dan capaian keuangan sebesar 79,83 masuk pada kriteria **Tinggi.**
3.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	96,96	83,83	Kecamatan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 96,96 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 83,83 masuk pada kriteria **Tinggi.**
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	88,45	86,13	Kecamatan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 88,45 dan capaian keuangan sebesar 86,13 masuk pada kriteria **Tinggi.**

No	Program	Tingkat Capaian yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	91,40	60,46	Kecamatan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 91,40 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 60,46 masuk pada kriteria **Rendah.**
6.	Program Pencatatan Sipil	100,00	94,69	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 94,69 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
7.	Program Pendaftaran Penduduk	100,00	99,93	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 99,93 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
8.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	90,26	94,70	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 90,26 masuk pada kriteria **Tinggi** dan capaian keuangan sebesar 94,70 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
9.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	100,00	99,85	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 dan capaian keuangan sebesar 99,85 di kategorikan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
10.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	20,00	98,68	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 20,00 masuk pada kriteria **Sangat Rendah** dan capaian keuangan sebesar 98,68 masuk pada kriteria **Sangat Tinggi.**
	Tingkat Capaian	**86,23**	**88,87**		Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 86,23 dan capaian keuangan sebesar 88,87 di kategorikan masuk pada kriteria **Tinggi.**

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja program pendukung sebesar 90,99% dan capaian keuangan sebesar 86,47% dikategorikan pada kriteria **Tinggi**.

Tingkat capaian kinerja berdasarkan OPD pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.130
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Dalam RKPD Tahun 2025

No	Nama Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian	Realisasi Keuangan	Kriteria Penilaian
01	Dinas Pendidikan Dan Kepemudaan Dan Olahraga	66,94	S	62,76	R
02	Dinas Kesehatan	87,85	T	85,93	T
03	Rsud Dr. T. C. Hillers Maumere	79,49	T	98,89	ST
04	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	145,86	ST	66,39	S
05	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	100,60	ST	66,44	S
06	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	95,24	ST	89,86	T
07	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	95,47	ST	84,27	T
08	Dinas Sosial	93,43	ST	75,37	S
09	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	96,77	ST	80,70	T
10	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	99,26	ST	91,50	ST
11	Dinas Ketahanan Pangan	100,00	ST	69,47	S
12	Dinas Lingkungan Hidup	111,43	ST	96,86	ST
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	88,94	T	96,48	ST
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	95,00	ST	95,17	ST
15	Dinas Perhubungan	98,62	ST	90,49	T
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	102,09	ST	95,17	ST
17	Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	97,27	ST	61,91	R
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	77,67	T	92,41	ST
19	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	78,93	T	75,29	S
20	Dinas Perikanan	87,08	T	73,35	S
21	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	95,14	ST	73,40	S
22	Dinas Pertanian	96,60	ST	70,47	S
23	Sekretariat Daerah	77,44	T	77,15	T
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	115,12	ST	95,81	ST
25	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah	100,00	ST	90,20	T
26	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	93,56	ST	79,91	T
27	Badan Pendapatan Daerah	100,00	ST	85,92	T
28	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	98,82	ST	77,56	T
29	Inspektorat Daerah	97,68	ST	97,64	ST
30	Kecamatan Alok	100,00	ST	98,22	ST
31	Kecamatan Alok Barat	94,90	ST	95,76	ST
32	Kecamatan Alok Timur	100,00	ST	94,36	ST

No	Nama Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian	Realisasi Keuangan	Kriteria Penilaian
33	Kecamatan Bola	60,39	R	50,77	SR
34	Kecamatan Doreng	97,61	ST	82,40	T
35	Kecamatan Hewokloang	93,80	ST	97,28	ST
36	Kecamatan Kangae	74,22	S	75,84	S
37	Kecamatan Kewapante	82,96	T	95,14	ST
38	Kecamatan Koting	97,95	ST	91,14	ST
39	Kecamatan Lela	99,98	ST	94,00	ST
40	Kecamatan Magepanda	78,91	T	62,68	R
41	Kecamatan Mapitara	93,30	ST	88,78	T
42	Kecamatan Nelle	100,00	ST	95,92	ST
43	Kecamatan Nita	96,17	ST	63,21	R
44	Kecamatan Paga	100,00	ST	73,49	S
45	Kecamatan Palue	86,12	T	55,83	R
46	Kecamatan Talibura	100,00	ST	98,50	ST
47	Kecamatan Tana Wawo	90,97	T	80,90	T
48	Kecamatan Waiblama	99,94	ST	92,59	ST
49	Kecamatan Waigete	99,83	ST	76,36	T
50	Kecamatan Mego	100,00	ST	65,52	R
51	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	100,00	ST	91,69	ST

Dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Sikka yang diuraikan per Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

- Untuk penilaian kinerja Sangat Tinggi dicapai oleh 37 Perangkat Daerah dengan presentase kinerjanya diatas 100% yaoti Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan Sekretariat Dewan sedangkan Perangkat Daerah lain presentase kinerjanya antara 91 sampai dengan 100%.
- Untuk penilaian kinerja Tinggi dicapai oleh 11 Perangkat Daerah
- Untuk penilaian kinerja Sedang dicapai oleh 2 Perangkat Daerah yaitu Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dan Kecamatan Kangae.
- Untuk penilaian kinerja Sangat Rendah oleh Perangkat Daerah Kecamatan Bola.

Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Sikka tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 2.131
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
Periode Pelaksanaan : Tahun 2025

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**389.209.328.869**		288.901.837.471	**122,97**	**74,23**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**295.137.307.805**		198.610.906.383	**88,11**	**67,29**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Persentase kinerja aparatur dalam pelayanan publik (%)	100		0		0		
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			99,36		0		
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			34.198.300		31.461.300	83,33	92	
	Jumlah Dokumen Perencanaan, dan Pelaporan Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		4		100		
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100		
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100		
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2		0		0		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4		4		100		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4		4		100		
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			9.288.000		8.838.000	100	95,16	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		4		100		
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2.579.700		2.084.200	100	80,79	
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100		
1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			3.129.700		2.914.500	100	93,12	
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100		
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			-		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2		0		0		
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			13.582.100		12.455.200	100	91,7	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4		4		100		
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.618.800		5.169.400	100	92	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4		4		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			294.188.347.193		198.244.789.553	601,06	67,39	
	Persentase Realisasi Anggaran dan pelaporann keuang tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2734		32.808		1200		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	565		12		2,12		
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			294.068.395.193		198.131.829.553	1200	67,38	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2734		32.808		1200		
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			119.952.000		112.960.000	2,12	94,17	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	565		12		2,12		
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			42.103.800		37.959.400	66,67	90,16	
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Kepegawaian sesuai ketentuan dan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4		4		100		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	420		0		0		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	420		420		100		
1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			29.603.800		25.639.400	100	86,61	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4		4		100		
1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-	0	0	
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	420		0		0		
1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			12.500.000		12.320.000	100	98,56	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	420		420		100		
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			505.927.000		128.812.476	1,56	25,46	
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	138		1		0,72		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	480		4		0,83		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	64		4		6,25		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	399		4		1		
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	138		0		0		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	564		12		2,13		
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			19.268.200		3.031.500	0,72	15,73	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	138		1		0,72		
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			198.494.500		31.989.200	0,83	16,12	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	480		4		0,83		
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			17.070.000		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			19.898.000		11.400.000	6,25	57,29	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	64		4		6,25		
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			97.075.800		31.338.317	1	32,28	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	399		4		1		
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			20.925.500		-	0	0	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	138		0		0		
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			133.195.000		51.053.459	2,13	38,33	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	564		12		2,13		
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			319.000.112		130.635.119	34,11	40,95	
	Terpenuhinya Jasa Penunjang SKPD sesuai kebutuhan dan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	517		12		2,32		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		0		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			219.592.858		47.404.450	2,32	21,59	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	517		12		2,32		
1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.070.100		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		0		
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			95.337.154		83.230.669	100	87,3	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			47.731.400		37.248.535	5,56	78,04	
	Persenterasi Barang Milik Daerah terpelihara dalam 1 Tahun	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18		2		11,11		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			47.731.400		37.248.535	11,11	78,04	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18		2		11,11		
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**93.963.611.764**		90.243.572.588	**137,67**	**96,04**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah dan Mutu Layanan Pendidikan Dasar, Pendidikan Usia Dini,	Iklim Kebhinekaan SMP (Nilai)			0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)			0		0		
		Angka Putus Sekolah Dasar (APS) SD (%)			0		0		
		Persentase Satuan PAUD yang menyelenggarakan PAUD HI (%)			0		0		
		Angka Partisipasi Kasar (APK SD/MI) (%)			0		0		
		Persentase SMP/MTs terakreditasi (%)			0		0		
		Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)			0		0		
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/Mts (%)			0		0		
		Angka Partisipasi Kasar (APK SMP/MTs) (%)			0		0		
		Persentase Kelulusan SMP/MTs (%)			0		0		
		Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi minimal B (%)			0		0		
		Angka Partisipasi Murni (APM SD/MI) (%)			0		0		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APMus) (%)			92,07		0		
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)			0		0		
		Proporsi PTK Bersertifikat (%)			0		0		
		Iklim Kebhinekaan SD (Angka)			0		0		
		Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)			0		0		
		Angka Partisipasi Murni (APM SMP/Mts) (%)			0		0		
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)			0		0		
		Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (Persentase)			90,01		0		
		Persentase Angka Melek Aksara penduduk umur >15 tahun (%)			0		0		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APMus) (%)			70,15		0		
		Iklim Keamanan SMP (Nilai)			0		0		
		Iklim Keamanan SD (Nilai)			0		0		
		Persentase SD Terakreditasi (%)			0		0		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)			8		0		
		Iklim Inklusivitas SD (Nilai)			0		0		
		Proporsi PTK SMP Bersertifikat Pendidik (%)			0		0		
		Persentase Kelulusan SD/MI (%)			0		0		
		Proporsi PTK PAUD Bersertifikat (%)					0		
		Persentase tercapainya target layanan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal (%)	100		0		0		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			54.480.636.079		52.081.232.112	93,06	95,6	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Persentase Capaian Layanan Dasar pada Jenjang SD	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	5		1		20		
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	4		0		0		
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	6		0		0		
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	7		8		114,29		
		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1		0		0		
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	6		4		66,67		
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		0		
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		3		60		
		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5		0		0		
		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	12		21		175		
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	48		48		100		
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	877		5.400		615,74		
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	200		150		75		
		Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	336		336		100		
		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	336		670		199,4		
		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	336		336		100		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	150		150		100		
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	150		3		2		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	6		4		66,67		
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	2		2		100		
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	21		21		100		
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	2		2		100		
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	6		3		50		
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	8		8		100		
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	180		180		100		
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	336		336		100		
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	120		103		85,83		
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	12		9		75		
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			160.690.000		116.100.000	20	72,25	
	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	5		1		20		
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			-		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	4		0		0		
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			-		-	0	0	
	Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	6		0		0		
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			999.789.900		999.398.880	114,29	99,96	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	7		8		114,29		
1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			-		-	0	0	
	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1		0		0		
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			447.663.500		433.488.900	66,67	96,83	
	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	6		4		66,67		
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			-		-	0	0	
	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		0		
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			267.932.000		265.637.000	60	99,14	
	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		3		60		
1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			-		-	0	0	
	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5		0		0		
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah			2.690.368.500		2.689.423.548	175	99,96	
	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	12		21		175		
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			19.152.400		16.232.508	100	84,75	
	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	48		48		100		
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			3.410.385.889		3.376.122.904	615,74	99	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	877		5.400		615,74		
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			73.541.000		44.862.100	75	61	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	200		150		75		
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			535.126.300		533.100.000	100	99,62	
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	336		336		100		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			33.787.073.840		33.708.375.400	199,4	99,77	
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	336		670		199,4		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			18.746.200		18.000.000	100	96,02	
	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	336		336		100		
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			94.026.400		90.215.760	100	95,95	
	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	150		150		100		
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			74.305.700		72.250.000	2	97,23	
	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	150		3		2		
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			131.627.600		100.403.710	66,67	76,28	
	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	6		4		66,67		
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			30.230.000		22.179.964	100	73,37	
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	2		2		100		
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			44.024.000		37.750.000	100	85,75	
	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	21		21		100		
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			25.072.600		18.250.000	100	72,79	
	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	2		2		100		
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru			617.781.700		612.201.700	50	99,1	
	Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	6		3		50		
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			635.928.800		603.970.000	100	94,97	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	8		8		100		
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			147.700.600		143.070.000	100	96,86	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	180		180		100		
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			71.667.000		54.754.000	100	76,4	
	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	336		336		100		
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			7.740.848.250		7.677.402.981	85,83	99,18	
	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	120		103		85,83		
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			2.456.953.900		448.042.757	75	18,24	
	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	12		9		75		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			29.651.924.324		29.202.165.661	91,61	98,48	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Persentase Capaian Layanan Dasar pada Jenjang SMP	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1		1		100		
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	4		1		25		
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	6		0		0		
		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	6		0		0		
		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1		0		0		
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	4		2		50		
		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	21		6		28,57		
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		0		
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5		0		0		
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	20		3		15		
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	28		28		100		
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	379		2.676		706,07		
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	150		120		80		
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	86		90		104,65		
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	90		180		200		
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	86		90		104,65		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	86		90		104,65		
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	3		3		100		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	4		4		100		
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	2		2		100		
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	8		8		100		
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	2		2		100		
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	86		90		104,65		
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	11		5		45,45		
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	86		90		104,65		
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		0		
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	8		8		100		
1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			1.466.840.000		1.414.541.000	100	96,43	
	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1		1		100		
1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			421.080.000		417.319.000	25	99,11	
	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	4		1		25		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			-		-	0	0	
	Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	6		0		0		
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium			-		-	0	0	
	Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	6		0		0		
1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			-		-	0	0	
	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1		0		0		
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			172.360.000		172.051.000	50	99,82	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	4		2		50		
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			448.472.400		447.036.200	28,57	99,68	
	Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	21		6		28,57		
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			-		-	0	0	
	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		0		
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			-		-	0	0	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5		0		0		
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah			813.794.700		810.164.419	15	99,55	
	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	20		3		15		
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			16.150.000		15.995.000	100	99,04	
	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	28		28		100		
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.711.040.238		1.698.903.442	706,07	99,29	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	379		2.676		706,07		
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			57.537.000		33.650.000	80	58,48	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	150		120		80		
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			11.950.700		11.600.000	104,65	97,07	
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	86		90		104,65		
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			19.827.008.826		19.724.471.700	200	99,48	
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	90		180		200		
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			16.449.700		15.600.000	104,65	94,83	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	86		90		104,65		
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			58.557.700		57.600.000	104,65	98,36	
	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	86		90		104,65		
1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			60.391.700		57.600.000	100	95,38	
	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	3		3		100		
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			60.040.700		54.128.900	100	90,15	
	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	4		4		100		
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			14.499.700		11.535.000	100	79,55	
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	2		2		100		
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			14.499.700		14.300.000	100	98,62	
	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	8		8		100		
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			19.714.700		19.584.700	100	99,34	
	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	2		2		100		
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			24.102.700		19.420.000	104,65	80,57	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	86		90		104,65		
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru			3.292.920.860		3.084.248.000	45,45	93,66	
	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	11		5		45,45		
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			57.081.000		56.000.000	104,65	98,11	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	86		90		104,65		
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			-		-	0	0	
	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		0		
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			1.087.432.000		1.066.417.300	100	98,07	
	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	8		8		100		
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			8.651.310.461		7.927.605.595	280,2	91,63	
	Persentase Capaian Layanan Dasar pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	4		3		75		
		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	20		6		30		
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	16		480		3000		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	82		45		54,88		
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	270		270		100		
		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	290		540		186,21		
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	270		270		100		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	4		2		50		
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		1		100		
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	12		12		100		
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	45		12		26,67		
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	4		4		100		
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	8		0		0		
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	270		0		0		
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			444.908.000		444.539.000	75	99,92	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	4		3		75		
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD			1.132.819.100		1.124.530.396	30	99,27	
	Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	20		6		30		
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			240.000.000		240.000.000	3000	100	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	16		480		3000		
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			67.277.900		34.650.000	54,88	51,5	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	82		45		54,88		
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			25.621.800		20.660.000	100	80,63	
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	270		270		100		
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD			5.714.370.000		5.089.388.500	186,21	89,06	
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	290		540		186,21		
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD			40.074.000		38.400.000	100	95,82	
	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	270		270		100		
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			30.579.700		16.778.900	50	54,87	
	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	4		2		50		
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			12.989.300		8.120.000	100	62,51	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		1		100		
1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			19.139.300		11.900.000	100	62,18	
	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	12		12		100		
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			426.202.900		423.485.799	26,67	99,36	
	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	45		12		26,67		
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			479.123.761		475.153.000	100	99,17	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	4		4		100		
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD			-		-	0	0	
	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	8		0		0		
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			18.204.700		-	0	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	270		0		0		
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.179.740.900		1.032.569.220	208,73	87,53	
	Persentase Capaian Layanan Dasar pada Jenjang Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	15		144		960		
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	270		1		0,37		
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	4		10		250		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	4		2		50		
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		1		100		
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	695		5		0,72		
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	1		1		100		
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			72.000.000		72.000.000	960	100	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	15		144		960		
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan			5.669.900		1.925.000	0,37	33,95	
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	270		1		0,37		
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			617.300.000		629.660.000	250	102	
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	4		10		250		
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			11.410.600		6.300.000	50	55,21	
	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	4		2		50		
1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			47.217.900		8.137.500	100	17,23	
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		1		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			191.293.500		81.500.000	0,72	42,6	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	695		5		0,72		
1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan			234.849.000		233.046.720	100	99,23	
	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	1		1		100		
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**			**56.546.900**		14.248.500	**100**	**25,2**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Jumlah sekolah yang mengembangkan kurikulum Muatan Lokal (Mulok) Daerah (%)	100		100		100		
		Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum mulok bahasa dan sastra daerah (%)			100		0		
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			56.546.900		14.248.500	100	25,2	
	Jumlah satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum Tenun Ikat, Bahasa dan Budaya Daerah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang)	40		40		100		
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			56.546.900		14.248.500	100	25,2	
	Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang)	40		40		100		
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**			**34.862.400**		31.580.000	**100**	**90,58**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Distribusi Guru Sekolah Dasar (SD) (Indeks)			0,88		0		
		Indeks Distribusi Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) (Indeks)			0,71		0		
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			34.862.400		31.580.000	100	90,58	
	Meningkatnya Indeks Distribusi Guru	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3		3		100		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3		3		100		
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			18.692.000		17.240.000	100	92,23	
	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	3		3		100		
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			16.170.400		14.340.000	100	88,68	
	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	3		3		100		
1.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**			**17.000.000**		1.530.000	**0**	**9**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase kelayakan operasional (%)	100		0		0		
		Persentase satuan pendidikan yang memenuhi kelayakan operasional (%)			0		0		
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			11.900.000		-	0	0	
	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan masyarakat memiliki kelayakan Ijin	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1		0		0		
1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			11.900.000		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1		0		0		
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			5.100.000		1.530.000	0	30	
	Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang diselenggarakan Masyarakat memiliki kelayakan Iijn	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1		0		0		
1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			5.100.000		1.530.000	0	30	
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1		0		0		
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**332.272.211.119**		247.931.844.428	**39,78**	**74,62**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**77.254.098.975**		75.687.170.316	**87,77**	**97,97**	DINAS KESEHATAN
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			197,25		0		
		Persentase capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100		97,25		97,25		
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			120.274.800		90.560.000	66,67	75,29	
	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	78		0		0		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5		5		100		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12		12		100		
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-		-	0	0	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	78		0		0		
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			55.042.800		44.460.000	100	80,77	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5		5		100		
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			65.232.000		46.100.000	100	70,67	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12		12		100		
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			75.989.614.232		74.677.474.489	100	98,27	
	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4175		4.175		100		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			75.544.699.332		74.233.492.489	100	98,26	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4175		4.175		100		
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			444.914.900		443.982.000	100	99,79	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			25.201.600		23.414.000	100	92,91	
	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12		12		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2		2		100		
1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			13.197.200		13.014.000	100	98,61	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12		12		100		
1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			12.004.400		10.400.000	100	86,63	
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2		2		100		
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			253.960.500		181.048.525	94,64	71,29	
	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7		7		100		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	18		18		100		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		100		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	28		22		78,57		
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			43.797.900		43.794.413	100	99,99	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7		7		100		
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			42.152.600		41.773.102	100	99,1	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	18		18		100		
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			30.000.000		29.986.608	100	99,96	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		100		
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			138.010.000		65.494.402	78,57	47,46	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	28		22		78,57		
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			32.627.800		22.723.219	100	69,64	
	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	79		79		100		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		2		200		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			8.388.400		8.385.218	100	99,96	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	79		79		100		
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			24.239.400		14.338.001	200	59,15	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		2		200		
1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			143.250.870		83.229.213	50,65	58,1	
	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	77		1		1,3		
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			136.050.870		81.029.213	100	59,56	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.200.000		2.200.000	1,3	30,56	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	77		1		1,3		
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			689.169.173		608.720.870	100	88,33	
	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	48		48		100		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100		
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			439.212.000		371.763.870	100	84,64	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	48		48		100		
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			249.957.173		236.957.000	100	94,8	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100		
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**120.320.999.539**		93.210.167.967	**20,21**	**77,47**	DINAS KESEHATAN
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar (%)			98,2		0		
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)			11		0		
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi (%)			9,04		0		
		Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar (%)			0		0		
		Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna (%)			26,67		0		
		Indeks Keluarga Sehat (Indeks)	0,7		0		0		
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif (%)			53,5		0		
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tubercolosis (%)			158,5		0		
		Persentasi Capaian SPM Rumah Sakit yang memenuhi standar (persen)	87		0		0		
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%)			87,7		0		
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi (Angka)			33		0		
		Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)			44		0		
		Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko (%)			1,1		0		
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus (%)			51,2		0		
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%)			66,33		0		
		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita (%)			75,6		0		
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (%)			107,17		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)			2,16		0		
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))			47,89		0		
		Positifity rate Malaria (%)			0,4		0		
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut (%)			83,5		0		
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan (%)			89,61		0		
		Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan (Angka)			319		0		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)			85,1		0		
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)			0,63		0		
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (%)			90,6		0		
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM (Persen)	100		0		0		
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)			66,67		0		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			36.790.209.945		24.223.924.079	41,56	65,84	
	Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	1		0		0		
		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	14		1		7,14		
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	2		2		100		
		Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	1		0		0		
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	481		25		5,2		
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1		1		100		
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	94		5		5,32		
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	2559		250		9,77		
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	197		225		114,21		
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	31652		225		0,71		
		Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	30012		0		0		
		Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan)	25		15		60		
		Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	87		120		137,93		
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya			-		-	0	0	
	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	1		0		0		
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas			13.377.269.903		9.049.591.922	7,14	67,65	
	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	14		1		7,14		
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1.011.196.060		929.386.209	100	91,91	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	2		2		100		
1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			-		-	0	0	
	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	1		0		0		
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas			6.195.780.651		3.571.124.229	5,2	57,64	
	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	481		25		5,2		
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1.543.582.900		255.200.000	100	16,53	
	Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1		1		100		
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			1.518.438.703		1.207.993.952	5,32	79,56	
	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	94		5		5,32		
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			468.395.970		189.359.700	9,77	40,43	
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	2559		250		9,77		
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			163.833.000		163.504.800	114,21	99,8	
	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	197		225		114,21		
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			11.955.883.921		8.467.829.320	0,71	70,83	
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	31652		225		0,71		
1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			-		-	0	0	
	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	30012		0		0		
1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)			269.141.236		142.425.400	60	52,92	
	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan)	25		15		60		
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			286.687.600		247.508.547	137,93	86,33	
	Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	87		120		137,93		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			83.170.619.394		68.903.256.955	13,61	82,85	
	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10587		3.190		30,13		
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9904		954		9,63		
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	7942		4.000		50,37		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	39103		0		0		
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	120523		0		0		
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	335031		0		0		
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	36967		31.066		84,04		
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	135136		0		0		
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4132		0		0		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1775		969		54,59		
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	10451		6.522		62,41		
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	12600		6.861		54,45		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	95		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	76		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	288		3		1,04		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	147		12		8,16		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	251		12		4,78		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	106		12		11,32		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	74		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	266		125		46,99		
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	12725		125		0,98		
		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	190		12		6,32		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	25		3		12		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	708		12		1,69		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	24		12		50		
		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	92		12		13,04		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	25		0		0		
		Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan	26		0		0		
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	342		12		3,51		
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	42		12		28,57		
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	26		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	200		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	62		0		0		
		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1701		623		36,63		
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1353		0		0		
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	12897		12		0,09		
		Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	72		0		0		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	204		12		5,88		
		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)	12		0		0		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	531		12		2,26		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	125		12		9,6		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	50		12		24		
		Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	12		0		0		
		Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	12		0		0		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			2.310.475.000		1.969.915.000	30,13	85,26	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10587		3.190		30,13		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			285.950.860		275.880.860	9,63	96,48	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9904		954		9,63		
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			55.280.000		10.280.000	50,37	18,6	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	7942		4.000		50,37		
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			-		-	0	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	39103		0		0		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			1.168.334.000		1.087.490.000	0	93,08	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	120523		0		0		
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			-		-	0	0	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	335031		0		0		
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			59.270.000		54.360.000	84,04	91,72	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	36967		31.066		84,04		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			-		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	135136		0		0		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			-		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4132		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			603.620.000		548.160.000	54,59	90,81	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1775		969		54,59		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			437.190.000		362.050.000	62,41	82,81	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	10451		6.522		62,41		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			5.280.000		5.280.000	54,45	100	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	12600		6.861		54,45		
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			2.720.000		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	95		0		0		
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			-		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	76		0		0		
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			10.877.437.700		9.847.676.900	1,04	90,53	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	288		3		1,04		
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			535.578.600		432.118.307	8,16	80,68	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	147		12		8,16		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			550.006.000		473.462.783	4,78	86,08	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	251		12		4,78		
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			430.643.200		427.120.926	11,32	99,18	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	106		12		11,32		
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			-		-	0	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	74		0		0		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1.378.276.750		1.010.770.600	46,99	73,34	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	266		125		46,99		
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			257.000.000		231.940.000	0,98	90,25	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	12725		125		0,98		
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			11.670.000		11.670.000	6,32	100	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	190		12		6,32		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			4.630.000		4.180.000	12	90,28	
	Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	25		3		12		
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			3.594.101.000		3.114.792.801	1,69	86,66	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	708		12		1,69		
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			46.119.507.429		37.492.453.486	50	81,29	
	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	24		12		50		
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			46.787.000		45.562.000	13,04	97,38	
	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	92		12		13,04		
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			-		-	0	0	
	Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	25		0		0		
1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan			-		-	0	0	
	Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	26		0		0		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			10.495.634.026		8.461.287.466	3,51	80,62	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	342		12		3,51		
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1.345.636.329		1.237.901.626	28,57	91,99	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	42		12		28,57		
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			-		-	0	0	
	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	26		0		0		
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			-		-	0	0	
	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	200		0		0		
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			-		-	0	0	
	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	62		0		0		
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			11.280.000		11.280.000	0	100	
	Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			1.320.000		1.320.000	36,63	100	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1701		623		36,63		
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			-		-	0	0	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1353		0		0		
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			158.182.500		112.630.000	0,09	71,2	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	12897		12		0,09		
1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok			-		-	0	0	
	Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	72		0		0		
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			848.740.000		597.270.000	5,88	70,37	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	204		12		5,88		
1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota			-		-	0	0	
	Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)	12		0		0		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			207.659.000		176.194.200	2,26	84,85	
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	531		12		2,26		
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			982.440.000		540.860.000	9,6	55,05	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	125		12		9,6		
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			385.970.000		359.350.000	24	93,1	
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	50		12		24		
1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik			-		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	12		0		0		
1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji			-		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	12		0		0		
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			60.579.000		-	0	0	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	76		0		0		
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			60.579.000		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	76		0		0		
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			299.591.200		82.986.933	33,33	27,7	
	Meningkatnya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	1		0		0		
		Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	9		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	25		25		100		
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya			-		-	0	0	
	Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	1		0		0		
1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-	0	0	
	Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	9		0		0		
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			299.591.200		82.986.933	100	27,7	
	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	25		25		100		
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**4.061.982.426**		2.700.782.117	**139,52**	**66,49**	DINAS KESEHATAN
	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase faskes dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya (%)	25		0		0		
		Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar (Persentase)			0		0		
		Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)			0		0		
		Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar (%)	100		0		0		
		Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terhadap Populasi (Rasio)			0		0		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			2.609.044.226		2.177.159.573	180,86	83,45	
	Meningkatnya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	350		916		261,71		
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	12		12		100		
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			2.485.198.626		2.063.500.023	261,71	83,03	
	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	350		916		261,71		
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			123.845.600		113.659.550	100	91,78	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	12		12		100		
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.452.938.200		523.622.544	56,84	36,04	
	Meningkatnya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	607		345		56,84		
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.452.938.200		523.622.544	56,84	36,04	
	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	607		345		56,84		
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			**431.854.900**		400.688.271	**60,65**	**92,78**	DINAS KESEHATAN
	Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)			0		0		
		Persentase pengawasan sarana produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan serta sarana pengolahan makanan dan minuman (%)	100		90,97		90,97		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)			0		0		
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		155.667.000		152.566.100	93,62	98,01	
	Meningkatnya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat	47		44		93,62		
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		155.667.000		152.566.100	93,62	98,01	
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	47		44		93,62		
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		-		-	0	0	
	Meningkatnya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin	70		0		0		
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		-		-	0	0	
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	70		0		0		
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		276.187.900		248.122.171	88,32	89,84	
	Meningkatnya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	137		121		88,32		
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		276.187.900		248.122.171	88,32	89,84	
	Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	137		121		88,32		
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**1.407.440.600**		1.332.493.461	**7,68**	**94,67**	DINAS KESEHATAN
	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat (%)			200		0		
		Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (%)	50		0		0		
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.020.255.000		1.020.254.605	17,39	100	
	Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	69		12		17,39		
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			1.020.255.000		1.020.254.605	17,39	100	
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	69		12		17,39		
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-		-	0	0	
	Meningkatnya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	13		0		0		
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		-		-	0	0	
	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	13		0		0		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			387.185.600		312.238.856	5,63	80,64	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	213		12		5,63		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			387.185.600		312.238.856	5,63	80,64	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	213		12		5,63		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**46.029.822.430**		-	**50**	**0**	RSUD dr. T. C. HILLERS MAUMERE
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)					0		
		Presentasi Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang Mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah (%)	100		58,98		58,98		
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			41.527.557.430		-	100	0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7266		7.266		100		
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			41.527.557.430		-	100	0	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7266		7.266		100		
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.502.265.000		-	0	0	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		
1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4.502.265.000		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**82.766.012.250**		74.600.542.296	**71,64**	**90,13**	RSUD dr. T. C. HILLERS MAUMERE
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Tercapainya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (%)	100		100		100		
		Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (%)					0		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			17.214.735.000		14.408.074.059	43,28	83,7	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	67		29		43,28		
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			17.214.735.000		14.408.074.059	43,28	83,7	
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	67		29		43,28		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			65.551.277.250		60.192.468.237	100	91,83	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	12		12		100		
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			65.551.277.250		60.192.468.237	100	91,83	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	12		12		100		
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**22.428.145.604**		15.830.020.176	**89,52**	**70,58**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6.528.206.136**		5.526.492.579	**97,14**	**84,66**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Meningkatnya Kinerja Administrasi Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPUPR (%)	100		98,8		98,8		
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			98,8		0		
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			150.012.000		135.054.000	121,43	90,03	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7		10		142,86		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4		4		100		
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			57.432.000		48.489.000	142,86	84,43	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7		10		142,86		
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			92.580.000		86.565.000	100	93,5	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4		4		100		
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.881.274.770		4.415.385.526	150	90,46	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	61		61		100		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		2		200		
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.742.682.770		4.279.421.526	100	90,23	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	61		61		100		
1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			138.592.000		135.964.000	200	98,1	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		2		200		
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			355.584.600		161.128.070	120	45,31	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		10		100		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		2		200		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		5		100		
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.847.100		2.365.500	100	83,08	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			30.897.500		26.578.527	100	86,02	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			7.875.000		7.650.000	100	97,14	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		10		100		
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			7.250.000		2.680.800	200	36,98	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		2		200		
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			306.715.000		121.853.243	100	39,73	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		5		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			406.873.050		153.626.085	40	37,76	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		
		Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	1		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		
		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	6		6		100		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		100		
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		-	0	0	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		
1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar			-		-	0	0	
	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	1		0		0		
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			194.414.050		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		
1.03.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			50.937.200		2.442.000	100	4,79	
	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	6		6		100		
1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			161.521.800		151.184.085	100	93,6	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		100		
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			393.669.096		373.963.159	100	94,99	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		3		100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			98.201.500		79.301.488	100	80,75	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		3		100		
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			295.467.596		294.661.671	100	99,73	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			340.792.620		287.335.739	100	84,31	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10		10		100		
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	2		2		100		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		4		100		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100		
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			180.215.720		177.100.086	100	98,27	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10		10		100		
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			49.192.300		3.420.000	100	6,95	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	2		2		100		
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4.950.000		867.000	100	17,52	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		4		100		
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			106.434.600		105.948.653	100	99,54	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100		
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**			**75.000.000**		-	**0**	**0**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi	Persentase Irigasi Kabupaten Kondisi Baik (%)			49,4		0		
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			75.000.000		-	0	0	
	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	0.6		0		0		
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	0.8		0		0		
		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	1		0		0		
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			-		-	0	0	
	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	0.6		0		0		
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			-		-	0	0	
	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	0.8		0		0		
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa			75.000.000		-	0	0	
	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	1		0		0		
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**			**5.505.915.335**		4.140.778.247	**50**	**75,21**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak (%)			57,29		0		
		Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (%)	100		50		50		
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			5.505.915.335		4.140.778.247	50	75,21	
	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	50		50		100		
		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	20		0		0		
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			4.931.044.635		4.140.778.247	100	83,97	
	Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	50		50		100		
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			574.870.700		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	20		0		0		
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**			**100.000.000**		-	**0**	**0**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)			64,06		0		
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000		-	0	0	
	Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	1		0		0		
1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan			100.000.000		-	0	0	
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	1		0		0		
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			**3.598.899.100**		2.536.518.264	**50**	**70,48**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)			51,71		0		
		Persentase Pengembangan Sistem Air Limbah (%)	100		100		100		
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			3.598.899.100		2.536.518.264	50	70,48	
	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan (MÂ³/Hari)	20		20		100		
		Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (MÂ³/Hari)	10		0		0		
1.03.05.2.01.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat			3.598.899.100		2.536.518.264	100	70,48	
	Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan (MÂ³/Hari)	20		20		100		
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)			-		-	0	0	
	Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (MÂ³/Hari)	10		0		0		
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**			**113.940.000**		13.490.000	**0**	**11,84**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)			65,36		0		
		Persentase Pengelolaan Sistem Drainase (%)	100		0		0		
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			113.940.000		13.490.000	0	11,84	
	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	20		0		0		
		Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi (M)	0		0		0		
1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan			100.000.000		-	0	0	
	Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	20		0		0		
1.03.06.2.01.0020	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan			13.940.000		13.490.000	0	96,77	
	Teroptimalisasinya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi (M)	0		0		0		
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**			**87.087.700**		69.114.481	**266,67**	**79,36**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Penataan Bangunan Gedung (%)	100		100		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik (%)			99,26		0		
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		87.087.700		69.114.481	266,67	79,36	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran	30		80		266,67		
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan		87.087.700		69.114.481	266,67	79,36	
	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	30		80		266,67		
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**			**150.000.000**		-	**0**	**0**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)			0		0		
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			150.000.000		-	0	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1		0		0		
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya			150.000.000		-	0	0	
	Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata (Kawasan)	1		0		0		
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			**6.160.322.633**		3.467.322.633	**40**	**56,28**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)			54,17		0		
		Persentase penanganan Jalan (%)	100		50		50		
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			6.160.322.633		3.467.322.633	40	56,28	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	3		0		0		
		Panjang Jalan yang Dibangun (KM)	6		0		0		
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	2.5		0		0		
		Jumlah Jembatan yang Dibangun (Jembatan)	1		1		100		
		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	100		100		100		
		Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	0		6		0		
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			-		-	0	0	
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	3		0		0		
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan			4.641.841.790		-	0	0	
	Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (KM)	6		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan			750.000.000		-	0	0	
	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	2.5		0		0		
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan			604.524.043		604.524.043	100	100	
	Terbangunnya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun (Jembatan)	1		1		100		
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			163.956.800		160.956.800	100	98,17	
	Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	100		100		100		
1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan			-		2.701.841.790	0	0	
	Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	0		6		0		
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**			**39.219.900**		20.578.465	**80**	**52,47**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi (%)	100		83,33		83,33		
		Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Teknis/Terampil (%)			22,44		0		
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			26.616.500		8.829.977	50	33,17	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen)	1		1		100		
		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	30		0		0		
1.03.11.2.01.0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis			1.586.100		1.476.795	100	93,11	
	Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen)	1		1		100		
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis			25.030.400		7.353.182	0	29,38	
	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	30		0		0		
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			4.590.700		4.074.870	100	88,76	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1		1		100		
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota			4.590.700		4.074.870	100	88,76	
	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1		1		100		
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			8.012.700		7.673.618	100	95,77	
	Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha,Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	15		15		100		
		Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun (Dokumen)	1		1		100		
1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota			6.050.200		6.023.618	100	99,56	
	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	15		15		100		
1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi			1.962.500		1.650.000	100	84,08	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Tersusunnya SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun (Dokumen)	1		1		100		
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**			**69.554.800**		55.725.507	**420**	**80,12**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	100		100		100		
		Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW (%)			100		0		
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			40.333.100		40.241.979	840	99,77	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	20		168		840		
1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang			40.333.100		40.241.979	840	99,77	
	Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	20		168		840		
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			29.221.700		15.483.528	0	52,99	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1		0		0		
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			29.221.700		15.483.528	0	52,99	
	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1		0		0		
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**10.138.301.046**		4.827.304.522	**627,04**	**47,61**	
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.569.449.346**		2.748.026.518	**955,6**	**106,95**	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Meningkatnya Kinerja Administrasi Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			99,99		0		
		Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100		100		100		
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30.544.100		30.115.000	100	98,6	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7		7		100		
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			30.544.100		30.115.000	100	98,6	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7		7		100		
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.267.230.424		2.381.855.317	628	105,06	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25		14		56		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		12		1200		
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.213.530.424		2.328.155.317	56	105,18	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25		14		56		
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			53.700.000		53.700.000	1200	100	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		12		1200		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			67.327.800		80.102.504	2066,67	118,97	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		25		2500		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		12		1200		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		25		2500		
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.367.800		7.367.800	2500	100	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		25		2500		
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			4.500.000		4.292.400	1200	95,39	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		12		1200		
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			55.460.000		68.442.304	2500	123,41	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		25		2500		
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			148.036.222		206.427.339	800	139,44	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		12		400		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		12		1200		
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			24.006.076		20.729.220	400	86,35	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		12		400		
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			124.030.146		185.698.119	1200	149,72	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		12		1200		
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			56.310.800		49.526.358	200	87,95	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		12		300		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		4		100		
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			53.910.800		47.126.358	300	87,42	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		12		300		
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.400.000		2.400.000	100	100	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		4		100		
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			**667.155.900**		58.937.800	**83,33**	**8,83**	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan Yang Terkena Relokasi Akibat	Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang Ditangani (Angka)			0		0		
		Persentase Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana (%)			103,57		0		
		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)			1,56		0		
		Persentase Pengembangan Perumahan (%)	100		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
		Persentase Pengembangan Perumahan (%)	100		0		0		
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)			14		0		
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			661.534.300		53.360.000	75	8,07	
	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	12		6		50		
		Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	2		2		100		
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			503.697.400		44.920.000	50	8,92	
	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	12		6		50		
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			157.836.900		8.440.000	100	5,35	
	Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	2		2		100		
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			5.621.600		5.577.800	100	99,22	
	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Laporan)	1		1		100		
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun			5.621.600		5.577.800	100	99,22	
	Terfasilitasinya Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Laporan)	1		1		100		
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**			-		-	**0**	**0**	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Jumlah KK yang mendiami RLH (%)			76,06		0		
		Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Yang Ditangani (Ha)			0		0		
		Persentase Kawasan Permukiman (%)	100		0		0		
		Persentase Luas Kawasan Kumuh di Bawah 10 HA yang ditangani (%)			0		0		
		Jumlah Rumah Keseluruhan (Angka)			81,865		0		
		Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)			0		0		
		Jumlah Rumah Layak Huni (Unit)			60,808		0		
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			-		-	0	0	
	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	9		0		0		
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			-		-	0	0	
	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	9		0		0		
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**			**2.336.693.900**		2.020.340.204	**226,67**	**86,46**	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)			24,85		0		
		Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (%)	100		0		0		
		Persentase Penurunan RTLH MBR diluar Kawasan Permukiman Kumuh (%)			100		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) (Angka)			19,509		0		
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			2.336.693.900		2.020.340.204	226,67	86,46	
	Tersedianya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas	30		68		226,67		
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			2.336.693.900		2.020.340.204	226,67	86,46	
	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	30		68		226,67		
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**			**4.565.001.900**		-	**0**	**0**	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Pelanggan Listrik (Angka)			71,238		0		
		Jumlah Sambungan Rumah Air Minum (Angka)			21,717		0		
		Persentase SR Air Minum (%)			26,57		0		
		Persentase Pelanggan Listrik (%)			98,89		0		
		Persentase Permukiman yang Sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)			0		0		
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			4.565.001.900		-	0	0	
	Tersedianya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Lokasi)	21		0		0		
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			4.565.001.900		-	0	0	
	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjangi Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Lokasi)	21		0		0		
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**8.405.133.414**		7.630.494.149	**175,96**	**90,78**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.166.455.795**		3.854.076.177	**207,16**	**92,5**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Persentase Peningkatan Kelancaran Tugas dan Fungsi Sat Pol PP dan Damkar (%)	100		0		0		
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			100		0		
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.800.000		4.600.000	100	33,33	
	Terlaksana penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8		8		100		
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			13.800.000		4.600.000	100	33,33	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8		8		100		
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.959.057.870		2.769.427.196	217,95	93,59	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	39		14		35,9		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3		12		400		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.920.447.870		2.731.249.196	35,9	93,52	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	39		14		35,9		
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			38.610.000		38.178.000	400	98,88	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3		12		400		
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			61.704.000		58.879.901	112,5	95,42	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		3		150		
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			14.154.000		12.861.600	100	90,87	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			9.540.000		9.500.000	100	99,58	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			10.000.000		9.311.400	100	93,11	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			28.010.000		27.206.901	150	97,13	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		3		150		
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			20.928.800		20.002.200	50	95,57	
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		4		100		
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		-	0	0	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			20.928.800		20.002.200	100	95,57	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		4		100		
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			846.484.125		817.969.694	650	96,63	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		12		1200		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			20.856.285		9.363.248	1200	44,89	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		12		1200		
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			825.627.840		808.606.446	100	97,94	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			264.481.000		183.197.186	100	69,27	
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8		8		100		
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			264.481.000		183.197.186	100	69,27	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8		8		100		
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**804.066.800**		787.064.280	**155,83**	**97,89**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada, penanganan gangguan ketenteraman dan	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)			71,42		0		
		Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	77,78		100		128,57		
		Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)			6,73		0		
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)			100		0		
		Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)			100		0		
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			804.066.800		787.064.280	207,78	97,89	
	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan	1		3		300		
		Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	75		55		73,33		
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan	12		30		250		
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			18.108.000		17.608.280	300	97,24	
	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	1		3		300		
1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas			37.793.800		37.080.000	73,33	98,11	
	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	75		55		73,33		
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			748.165.000		732.376.000	250	97,89	
	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	12		30		250		
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			-		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	2		0		0		
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			-		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	2		0		0		
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**			**319.234.400**		252.808.992	**172,22**	**79,19**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)			100		0		
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)			7,88		0		
		Persentase penanganan gangguan bencana kebakaran (%)	100		0		0		
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			273.229.600		212.048.992	208,33	77,61	
	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1		4		400		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	6		1		16,67		
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			77.422.000		66.240.000	400	85,56	
	Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1		4		400		
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			195.807.600		145.808.992	16,67	74,47	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	6		1		16,67		
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			46.004.800		40.760.000	100	88,6	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	13		13		100		
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran			46.004.800		40.760.000	100	88,6	
	Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	13		13		100		
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.599.047.019**		2.328.974.176	**182,44**	**89,61**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			90,94		0		
		Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100		0		0		
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19.373.200		19.326.200	100	99,76	
	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		6		100		
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			19.373.200		19.326.200	100	99,76	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		6		100		
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.951.761.091		1.747.614.211	108,33	89,54	
	Terselenggaranya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12		14		116,67		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.877.073.091		1.672.928.211	116,67	89,12	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12		14		116,67		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			74.688.000		74.686.000	100	100	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			133.513.500		131.603.239	380	98,57	
	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		4		400		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		20		100		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		12		100		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		12		1200		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12		100		
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.712.700		1.199.000	400	70,01	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		4		400		
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.584.600		7.402.550	100	97,6	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		20		100		
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10.500.000		10.470.000	100	99,71	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		12		100		
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			6.751.200		6.751.200	1200	100	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		12		1200		
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			106.965.000		105.780.489	100	98,89	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12		100		
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			14.338.800		14.102.550	50	98,35	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		4		100		
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			-		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		0		0		
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			14.338.800		14.102.550	100	98,35	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		4		100		
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			92.434.848		70.618.722	100	76,4	
	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			63.944.860		48.986.431	100	76,61	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			28.489.988		21.632.291	100	75,93	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			387.625.580		345.709.254	73,33	89,19	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10		12		120		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		10		100		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			378.025.580		341.004.254	120	90,21	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10		12		120		
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			9.600.000		4.705.000	100	49,01	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		10		100		
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**			**516.329.400**		407.570.524	**100**	**78,94**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penanganan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Orang)			6.292		0		
		Persentase penanganan pra bencana (%)			100		0		
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Orang)			600		0		
		Persentase Penanggulangan Bencana (%)	100		100		100		
		Persentase Penanggulangan Bencana sosial (%)	100		0		0		
		Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana (%)			100		0		
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Orang)			600		0		
		Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)			100		0		
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			156.823.100		120.654.296	100	76,94	
	Meningkatnya pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai	400		400		100		
		Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		1		100		
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)			61.562.600		48.798.420	100	79,27	
	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	400		400		100		
1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota			95.260.500		71.855.876	100	75,43	
	Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		1		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			271.328.100		199.122.028	100	73,39	
	Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	3		3		100		
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	100		100		100		
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			198.073.700		172.159.357	100	86,92	
	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	3		3		100		
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			73.254.400		26.962.671	100	36,81	
	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	100		100		100		
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			88.178.200		87.794.200	100	99,56	
	Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang	12		12		100		
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			88.178.200		87.794.200	100	99,56	
	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	12		12		100		
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**4.178.530.392**		3.400.700.002	**103,36**	**81,39**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.156.961.892**		2.656.153.014	**156,63**	**84,14**	DINAS SOSIAL
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			93,43		0		
		Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100		0		0		
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11.400.000		10.860.000	25	95,26	
	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4		1		25		
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			11.400.000		10.860.000	25	95,26	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4		1		25		
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.199.542.785		1.964.662.479	516,67	89,32	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	33		308		933,33		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4		4		100		
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.134.128.385		1.899.255.679	933,33	88,99	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	33		308		933,33		
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			65.414.400		65.406.800	100	99,99	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4		4		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			80.352.100		58.411.782	90	72,69	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		3		300		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		2		66,67		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		0		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		1		50		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		4		33,33		
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.903.000		11.325.191	300	290,17	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		3		300		
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			11.839.500		11.325.191	66,67	95,66	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		2		66,67		
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			7.500.000		2.650.000	0	35,33	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		0		
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			9.554.600		9.538.400	50	99,83	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		1		50		
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			47.555.000		23.573.000	33,33	49,57	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		4		33,33		
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			43.335.300		3.643.200	312,5	8,41	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		25		625		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		0		
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			4.245.000		3.643.200	625	85,82	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		25		625		
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			39.090.300		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		0		
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			737.189.407		560.847.649	66,67	76,08	
	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		0		0		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			575.000		104.500	0	18,17	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		0		0		
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			45.162.467		29.949.000	100	66,31	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			691.451.940		530.794.149	100	76,77	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			85.142.300		57.727.904	57,58	67,8	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		5		100		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	11		8		72,73		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8		0		0		
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			69.018.400		54.397.404	100	78,82	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		5		100		
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.500.000		3.330.500	72,73	95,16	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	11		8		72,73		
1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			12.623.900		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8		0		0		
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**			**171.992.200**		150.632.745	**41,07**	**87,58**	DINAS SOSIAL
	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase PSKS Yang Bekerja sama Dalam Penanganan PPKS (%)	100		15,77		15,77		
		Persentase lembaga di bidang Kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)			0		0		
		Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)			0		0		
		Persentase TKS/Relawan Sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana (%)			0		0		
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			694.500		-	0	0	
	Terlaksananya Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	10		0		0		
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			694.500		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	10		0		0		
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			171.297.700		150.632.745	54,76	87,94	
	Terselenggaranya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	21		0		0		
		Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	70		45		64,29		
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	20		20		100		
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota			19.057.100		-	0	0	
	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	21		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			26.286.700		26.045.195	64,29	99,08	
	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	70		45		64,29		
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			125.953.900		124.587.550	100	98,92	
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	20		20		100		
1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**			**16.077.400**		6.690.450	**36**	**41,61**	DINAS SOSIAL
	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekeraran	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial (%)			36		0		
		Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani (%)	100		0		0		
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			16.077.400		6.690.450	36	41,61	
	Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	25		9		36		
1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			16.077.400		6.690.450	36	41,61	
	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25		9		36		
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			**419.962.400**		303.855.902	**47,14**	**72,35**	DINAS SOSIAL
	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial (%)	100		36		36		
		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti (%)			0		0		
		Persentase PSKS Yang Bekerja sama Dalam Penanganan PPKS (%)			106,94		0		
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti (%)			0		0		
		Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti (%)			12,18		0		
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			419.962.400		190.283.216	47,14	45,31	
	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	40		0		0		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15		0		0		
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	300		0		0		
		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	275		275		100		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		115		230		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20		0		0		
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	12		0		0		
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan			67.546.600		-	0	0	
	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	40		0		0		
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu			47.977.800		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15		0		0		
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			-		-	0	0	
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	300		0		0		
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			218.884.900		175.470.450	100	80,17	
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	275		275		100		
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			15.655.700		14.812.766	230	94,62	
	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		115		230		
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan			57.817.900		-	0	0	
	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20		0		0		
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan			12.079.500		-	0	0	
	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	12		0		0		
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			-		113.572.686	0	0	
	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0		40		0		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0		35		0		
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0		12		0		
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan			-		59.037.670	0	0	
	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0		40		0		
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu			-		47.645.568	0	0	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0		35		0		
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan			-		6.889.448	0	0	
	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0		12		0		
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**			**347.709.800**		228.998.621	**66,8**	**65,86**	DINAS SOSIAL
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	100		157,16		157,16		
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			11.256.100		11.159.856	100	99,14	
	Terlaksananya Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	75		75		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar			11.256.100		11.159.856	100	99,14	
	Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	75		75		100		
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			336.453.700		217.838.765	50,2	64,75	
	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (Keluarga)	34673		34.814		100,41		
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	48924		0		0		
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			244.392.900		217.838.765	100,41	89,13	
	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (Keluarga)	34673		34.814		100,41		
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			92.060.800		-	0	0	
	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	48924		0		0		
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**			**52.075.100**		48.331.770	**124,07**	**92,81**	DINAS SOSIAL
	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial dan/atau Non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar (%)			0		0		
		Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Pelayanan (%)	100		117,54		117,54		
		Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (%)			0		0		
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			52.075.100		48.331.770	124,07	92,81	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	54		67		124,07		
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			52.075.100		48.331.770	124,07	92,81	
	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	54		67		124,07		
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**			**13.751.600**		6.037.500	**50**	**43,9**	DINAS SOSIAL
	Meningkatnya tata kelola taman makan pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik (%)			100		0		
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			13.751.600		6.037.500	50	43,9	
	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	2		1		50		
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			13.751.600		6.037.500	50	43,9	
	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	2		1		50		
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**7.353.933.281**		6.626.742.580	**156,22**	**90,11**	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.765.612.007**		2.489.109.848	**87,48**	**90**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100		97,19		97,19		
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			96,84		0		
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			33.905.100		33.819.229	100	99,75	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7		7		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			33.905.100		33.819.229	100	99,75	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7		7		100		
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.433.487.731		2.213.912.289	73,08	90,98	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26		12		46,15		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7		7		100		
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.360.619.531		2.142.264.289	46,15	90,75	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26		12		46,15		
2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			72.868.200		71.648.000	100	98,33	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7		7		100		
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			86.056.300		85.637.083	97,92	99,51	
	Jumlah Administrasi umum OPD yang disiapkan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	35		35		100		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		14		116,67		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	16		12		75		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		5		100		
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			14.481.300		14.392.500	100	99,39	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	35		35		100		
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			7.415.000		7.410.000	116,67	99,93	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		14		116,67		
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			12.005.000		11.995.173	75	99,92	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	16		12		75		
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			52.155.000		51.839.410	100	99,39	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		5		100		
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			14.338.800		14.322.330	33,33	99,89	
	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		1		33,33		
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			14.338.800		14.322.330	33,33	99,89	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		1		33,33		
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			132.712.376		79.266.713	87,5	59,73	
	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		9		75		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			56.604.000		25.222.610	100	44,56	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			76.108.376		54.044.103	75	71,01	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		9		75		
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			45.036.700		42.207.204	95,54	93,72	
	Terpeliharanya barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7		9		128,57		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8		5		62,5		
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			42.036.700		39.257.204	128,57	93,39	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7		9		128,57		
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.000.000		2.950.000	62,5	98,33	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8		5		62,5		
2.07.01.2.13	Penataan Organisasi			20.075.000		19.945.000	100	99,35	
	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	12		12		100		
2.07.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			20.075.000		19.945.000	100	99,35	
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	12		12		100		
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**			**4.413.129.800**		4.069.358.038	**363,54**	**92,21**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja (%)	98,14		384,07		391,35		
		Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha (%)					0		
		Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)			6,44		0		
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			4.397.766.800		4.056.128.438	224,22	92,23	
	Jumlah Tenaga Kerja Yang memperoleh Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Jumlah Kesepakatan Dalam	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	64		223		348,44		
		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	7		7		100		
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			4.387.705.100		4.046.178.438	348,44	92,22	
	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	64		223		348,44		
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja			10.061.700		9.950.000	100	98,89	
	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	7		7		100		
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			6.457.900		6.330.000	1000	98,02	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	10		100		1000		
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			6.457.900		6.330.000	1000	98,02	
	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	10		100		1000		
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			8.905.100		6.899.600	5,71	77,48	
	Terlaksananya Pelaksanaan Konsultasi Produktifitas Pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	35		2		5,71		
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil			8.905.100		6.899.600	5,71	77,48	
	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	35		2		5,71		
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**			**138.436.374**		31.608.094	**194,76**	**22,83**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja (%)	99,35		0		0		
		Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (%)			3,59		0		
		Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Luar Negeri (%)			0,54		0		
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			115.965.074		24.171.410	66,67	20,84	
	Jumlah Tenaga Kerja yang diTempatkan	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	75		100		133,33		
		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	40		0		0		
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja			24.924.200		24.171.410	133,33	96,98	
	Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	75		100		133,33		
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja			91.040.874		-	0	0	
	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	40		0		0		
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			12.246.600		6.346.684	383,33	51,82	
	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Oleh Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	1		2		200		
		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	50		475		950		
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	50		0		0		
2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online			8.110.000		3.393.920	200	41,85	
	Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	1		2		200		
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			2.586.600		1.442.764	950	55,78	
	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	50		475		950		
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja			1.550.000		1.510.000	0	97,42	
	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	50		0		0		
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			10.224.700		1.090.000	40	10,66	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Jumlah CPMI yang terlayani	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	25		20		80		
		Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	20		0		0		
2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran			2.740.700		750.000	80	27,37	
	Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	25		20		80		
2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan			7.484.000		340.000	0	4,54	
	Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	20		0		0		
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**			**36.755.100**		36.666.600	**87,78**	**99,76**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Meningkatnya pekerja	Persentase pemberi kerja yang menerapkan perlindungan hak pekerja dan dialog sosial di dalam negeri dan luar negeri (%)			3,99		0		
		Persentase Penanganan Kasus Hubungan Industrial (%)	100		0		0		
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			5.404.500		5.342.100	140	98,85	
	Jumlah Data dan Informasi sarana HI	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	5		7		140		
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			5.404.500		5.342.100	140	98,85	
	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	5		7		140		
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			31.350.600		31.324.500	61,67	99,92	
	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	10		5		50		
		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	30		22		73,33		
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			13.130.900		13.110.500	50	99,84	
	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	10		5		50		
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			18.219.700		18.214.000	73,33	99,97	
	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	30		22		73,33		
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**3.875.020.542**		3.941.056.784	**458,48**	**101,7**	
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.595.803.922**		3.702.603.146	**671,43**	**102,97**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100		93,35		93,35		
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			93,35		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			46.300.000		46.292.000	100	99,98	
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8		8		100		
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			46.300.000		46.292.000	100	99,98	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8		8		100		
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.103.166.810		2.878.302.969	492,86	92,75	
	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14		12		85,71		
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.009.510.210		2.784.654.969	85,71	92,53	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14		12		85,71		
	Jumlah Pengelola Keuangan yang dibayarkan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		9		900		
2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			93.656.600		93.648.000	900	99,99	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		9		900		
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			198.175.200		163.539.350	900	82,52	
	Terpenuhinya Makanan dan Minuman	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		12		1200		
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			123.050.000		88.750.000	1200	72,13	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		12		1200		
	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0		12		0		
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			14.074.300		13.818.716	0	98,18	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0		12		0		
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan Perangkat Daerah (Musrenbang Kec dan Rakor) untuk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		12		1200		
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			49.360.000		49.286.100	1200	99,85	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		12		1200		
	Tersedianya Kebutuhan Pelayanan Administrasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		3		300		
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			11.690.900		11.684.534	300	99,95	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		3		300		
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			83.702.812		81.820.748	1200	97,75	
	Terlayani Jasa Telepon, Listrik dan Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		12		1200		
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			42.587.230		40.705.166	1200	95,58	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		12		1200		
	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		12		1200		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			41.115.582		41.115.582	1200	100	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		12		1200		
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			164.459.100		532.648.079	400	323,88	
	Jumlah Pengemudi Mobil Dinas yang dibayarkan honornya selama 12 Bulan dan Jumlah Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	40		0		0		
		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		12		1200		
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			63.559.100		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	40		0		0		
2.08.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			100.900.000		98.555.897	1200	97,68	
	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		12		1200		
	Terpeliharanya gedung kantor yang baik dan aman untuk kelancaran tugas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		12		0		
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		434.092.182	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		12		0		
	Terpeliharanya sarana kerja untuk kelancaran pelayanan administrasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		0		0		
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		0		0		
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**			**25.074.900**		13.158.204	**50**	**52,48**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)			67,48		0		
		Indeks Pembangunan Gender (Indeks)	100		90,79		90,79		
		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%)			1,2		0		
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			25.074.900		13.158.204	50	52,48	
	Jumlah ASN Perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas kepemimpinan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan (Lembaga)	10		0		0		
		Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)	40		40		100		
2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			7.398.600		-	0	0	
	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Organisasi Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan (Lembaga)	10		0		0		
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			17.676.300		13.158.204	100	74,44	
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)	40		40		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**			**196.585.220**		190.469.647	**406,67**	**96,89**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)			100		0		
		Persentase perlindungan perempuan (%)	100		100		100		
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			8.487.000		8.378.175	0	98,72	
	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat advokasi dan informasi tentang perlindungan perempuan kewenangan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)	15		0		0		
		Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	0		15		0		
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			8.487.000		-	0	0	
	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)	15		0		0		
2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota			-		8.378.175	0	0	
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	0		15		0		
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			30.307.400		29.924.450	213,33	98,74	
	Jumlah Lembaga Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan (Orang)	30		8		26,67		
		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Layanan)	3		12		400		
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			14.062.400		14.062.400	26,67	100	
	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan (Orang)	30		8		26,67		
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			16.245.000		15.862.050	400	97,64	
	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Layanan)	3		12		400		
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			157.790.820		152.167.022	1200	96,44	
	Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan dukungan layanan bagi perempuan korban kekerasan	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1		12		1200		
2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			157.790.820		152.167.022	1200	96,44	
	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		12		1200		
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**			**20.741.000**		18.221.387	**57,14**	**87,85**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, serta Perlindungan	Persentase peningkatan kualitas keluarga (%)	100		100		100		
		Persentase Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (%)			25		0		
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			20.741.000		18.221.387	57,14	87,85	
	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan	21		12		57,14		
2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			20.741.000		18.221.387	57,14	87,85	
	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)	21		12		57,14		
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**			**16.664.200**		16.604.400	**0**	**99,64**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Skor Kabupaten Layak Anak (Skor)			25		0		
		Kabupaten Layak Anak (%)	100		100		100		
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			16.664.200		16.604.400	0	99,64	
	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi	20		0		0		
		Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non	0		12		0		
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			16.664.200		-	0	0	
	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha (Organisasi)	20		0		0		
2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			-		16.604.400	0	0	
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0		12		0		
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**			**20.151.300**		-	**0**	**0**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan	Persentase perlindungan khusus terhadap anak (%)	100		100		100		
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)					0		
		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)			100		0		
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			20.151.300		-	0	0	
	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu (Kegiatan)	10		0		0		
2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA			20.151.300		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksanaya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang terpadu	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu (Kegiatan)	10		0		0		
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**			**2.456.571.943**		1.965.007.139	**148,63**	**79,99**	
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.074.386.785**		1.965.007.139	**285,83**	**94,73**	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan responsif dalam	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			100		0		
		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	100		100		100		
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14.040.000		14.004.000	100	99,74	
	Jumlah Perencana, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13		13		100		
2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			14.040.000		14.004.000	100	99,74	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	13		13		100		
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.845.463.773		1.658.696.971	57,89	89,88	
	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	19		3		15,79		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.770.445.773		1.583.836.971	15,79	89,46	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	19		3		15,79		
2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			75.018.000		74.860.000	100	99,79	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			78.074.200		256.357.828	825	328,35	
	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		30		3000		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12		100		
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12.604.200		60.110.621	3000	476,91	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		30		3000		
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			4.000.000		3.985.000	100	99,63	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100		
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			4.000.000		3.998.000	100	99,95	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			57.470.000		188.264.207	100	327,59	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			19.354.600		19.313.000	100	99,79	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		4		100		
2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			19.354.600		19.313.000	100	99,79	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		4		100		
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			54.512.812		16.635.340	50	30,52	
	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		0		
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			29.360.624		16.635.340	100	56,66	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			25.152.188		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		0		
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			62.941.400		-	0	0	
	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9		0		0		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2		0		0		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			50.664.400		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9		0		0		
2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.000.000		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2		0		0		
2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			11.277.000		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**			**163.156.700**		-	**0**	**0**	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (%)	100		0		0		
		Jumlah Penyaluran Cadangan Pangan pada Daerah Rentan Rawan Pangan (Ton)			0		0		
		Jumlah Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Angka)			100		0		
		Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang (Angka)			1		0		
		skor pola pangan harapan (Skor)			0		0		
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			110.636.700		-	0	0	
	Tersedianya dan tersalurnya pangan pokok dan pangan lainya	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	4		0		0		
		Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	3		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	2		0		0		
		Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	1		0		0		
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota			8.550.000		-	0	0	
	Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	4		0		0		
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota			26.997.600		-	0	0	
	Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	3		0		0		
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis			60.017.300		-	0	0	
	Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	2		0		0		
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)			15.071.800		-	0	0	
	Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	1		0		0		
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			5.020.000		-	0	0	
	Tersedianya cadangan pangan pemerintah kabupaten / kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	16.6		0		0		
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			5.020.000		-	0	0	
	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	16.6		0		0		
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			47.500.000		-	0	0	
	Terpromosinya target konsumsi pangan sesuai angka kecukupan gizi	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1		0		0		
		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	3		0		0		
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	1		0		0		
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun			7.520.000		-	0	0	
	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1		0		0		
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			39.980.000		-	0	0	
	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	3		0		0		
2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun			-		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	1		0		0		
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**			**83.016.200**		-	**0**	**0**	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan (%)			0		0		
		Persentase penanganan kerawanan pangan (%)	100		0		0		
		Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang di Mutahirkan (Angka)			1		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			36.175.000		-	0	0	
	Tersedianya peta ketahanan dan kerawanan pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)	1		0		0		
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			36.175.000		-	0	0	
	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)	1		0		0		
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			46.841.200		-	0	0	
	Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	12		0		0		
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota			46.841.200		-	0	0	
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	12		0		0		
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**			**136.012.258**		-	**0**	**0**	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan (%)					0		
		Persentase pengawasan keamanan pangan (%)	100		33,33		33,33		
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			136.012.258		-	0	0	
	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		
		Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	1		0		0		
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			72.977.700		-	0	0	
	Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			63.034.558		-	0	0	
	Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	1		0		0		
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**			**588.124.208**		80.390.152	**150**	**13,67**	
2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**			**271.177.200**		-	**0**	**0**	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan (%)	100		0		0		
		Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)			0		0		
		Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)			100		0		
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			271.177.200		-	0	0	
	Terselesainya Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2		0		0		
2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			271.177.200		-	0	0	
	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**			**316.947.008**		80.390.152	**300**	**25,36**	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (%)	100		100		100		
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			316.947.008		80.390.152	300	25,36	
	Terselesainya Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1		3		300		
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			316.947.008		80.390.152	300	25,36	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		3		300		
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			**8.179.514.106**		7.596.717.565	**172,15**	**92,87**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.172.428.862**		2.873.803.494	**266,59**	**90,59**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya Kinerja Administrasi Penunjang Perangkat Daerah	Persetase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup (%)	100		99,6		99,6		
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			100		0		
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			16.565.100		16.532.570	100	99,8	
	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disediakan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10		10		100		
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			16.565.100		16.532.570	100	99,8	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10		10		100		
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.728.883.742		2.440.825.083	732,86	89,44	
	Tersedianya administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35		478		1365,71		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.624.925.742		2.336.935.083	1365,71	89,03	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35		478		1365,71		
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			103.958.000		103.890.000	100	99,93	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			56.283.200		55.939.662	100	99,39	
	Tersedianya dokumen administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	23		23		100		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6		6		100		
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			11.001.300		10.939.750	100	99,44	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	23		23		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			8.531.900		8.294.776	100	97,22	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			36.750.000		36.705.136	100	99,88	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6		6		100		
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			128.912.600		128.656.810	100	99,8	
	Terselesaikannya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diselesaikan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	38		38		100		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		4		100		
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			96.392.200		96.253.400	100	99,86	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	38		38		100		
2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			32.520.400		32.403.410	100	99,64	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		4		100		
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			136.051.520		130.415.723	466,67	95,86	
	Tersedianya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		100		833,33		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			44.790.028		39.160.631	833,33	87,43	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		100		833,33		
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			91.261.492		91.255.092	100	99,99	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			105.732.700		101.433.646	100	95,93	
	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	22		22		100		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	9		9		100		
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			103.182.700		98.883.646	100	95,83	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	22		22		100		
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.550.000		2.550.000	100	100	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	9		9		100		
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**			**24.826.200**		24.759.323	**100**	**99,73**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (%)	100		0		0		
		Data Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)			72		0		
		Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti (%)			100		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			24.826.200		24.759.323	100	99,73	
	Persentase Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	12		12		100		
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota			24.826.200		24.759.323	100	99,73	
	Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	12		12		100		
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**			**201.811.988**		191.950.760	**109,17**	**95,11**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (%)	100		0		0		
		Indeks Kualitas Udara (Indeks)			84,97		0		
		Indeks Kualitas Air (Indeks)			77,5		0		
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			163.028.088		153.168.969	116,67	93,95	
	Persentase Pemantauan Kualitas Air, Udara, Tanah dan Laut yang Dilakukan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	12		14		116,67		
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota			163.028.088		153.168.969	116,67	93,95	
	Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	12		14		116,67		
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			38.783.900		38.781.791	101,67	99,99	
	Jumlah Pengawasan Terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	60		61		101,67		
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat			38.783.900		38.781.791	101,67	99,99	
	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	60		61		101,67		
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**			**677.844.856**		588.562.864	**33,34**	**86,83**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (%)	100		100		100		
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) (Indeks)			78,13		0		
		Persentase RTH (Persentase)			9,31		0		
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			677.844.856		588.562.864	33,34	86,83	
	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	29.4744		29,48		100,02		
		Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	4		0		0		
		Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	3		0		0		
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			603.287.456		588.562.864	100,02	97,56	
	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	29.4744		29,48		100,02		
2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya			74.557.400		-	0	0	
	Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	4		0		0		
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan			-		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	3		0		0		
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**			**18.471.900**		18.430.316	**100**	**99,77**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)			100		0		
		Persentase Pengendalian B3 dan Limbah B3 (%)	100		0		0		
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			18.471.900		18.430.316	100	99,77	
	Terkelolanya Limbah B3	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan,	4		4		100		
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan			18.471.900		18.430.316	100	99,77	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	4		4		100		
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**			**18.827.900**		18.272.606	**156,36**	**97,05**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan	Jumlah Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Melanggar Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diiterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota (Usaha/Kegiatan)			100		0		
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (%)	100		100		100		
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)			18,84		0		
		Rasio Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi Terhadap Usaha yang Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Berada di Daerah (Orang)			0		0		
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			18.827.900		18.272.606	156,36	97,05	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	55		86		156,36		
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			18.827.900		18.272.606	156,36	97,05	
	Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	55		86		156,36		
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			**122.732.400**		121.073.378	**65,91**	**98,65**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)	100		90,91		90,91		
		Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)			50		0		
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			122.732.400		121.073.378	65,91	98,65	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	11		9		81,82		
		Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	12		6		50		
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup			83.742.900		82.178.779	81,82	98,13	
	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	11		9		81,82		
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup			38.989.500		38.894.599	50	99,76	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	12		6		50		
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**			**32.233.800**		31.579.401	**214**	**97,97**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa atau Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)			100		0		
		Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (%)	100		0		0		
		Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di			22		0		
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			32.233.800		31.579.401	214	97,97	
	Terselesaikannya Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)	25		22		88		
		Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Perkara)	15		51		340		
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota			26.386.800		25.979.331	88	98,46	
	Penanganan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)	25		22		88		
2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota			5.847.000		5.600.070	340	95,78	
	Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Perkara)	15		51		340		
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**			**3.910.336.200**		3.728.285.423	**71,48**	**95,34**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Total Volume Sampah yang Dapat Ditangani (%)			0		0		
		Persentase Volume Sampah yang Tertangani (%)	100		65,15		65,15		
		Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)			0		0		
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)			0		0		
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			3.910.336.200		3.728.285.423	71,48	95,34	
	Volume sampah tertangani	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	8		4		50		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2		2		100		
		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat	15350.4		9.892,19		64,44		
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			15.468.500		15.300.430	50	98,91	
	Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	8		4		50		
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			104.905.900		103.697.044	100	98,85	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2		2		100		
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			3.789.961.800		3.609.287.949	64,44	95,23	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	15350.4		9.892,19		64,44		
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			**5.290.642.900**		4.957.485.442	**92,28**	**93,7**	
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.364.499.246**		4.069.552.632	**103,57**	**93,24**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			99,9		0		
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			21.120.000		21.060.000	100	99,72	
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22		22		100		
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			21.120.000		21.060.000	100	99,72	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	22		22		100		
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.544.086.757		3.284.370.052	100	92,67	
	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14		14		100		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.436.142.757		3.176.454.052	100	92,44	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14		14		100		
2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			107.944.000		107.916.000	100	99,97	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.020.000		-	0	0	
	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1		0		0		
2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			5.020.000		-	0	0	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1		0		0		
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			106.006.600		105.810.700	100	99,82	
	Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	691		691		100		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	438		438		100		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	25637		25.637		100		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	15		15		100		
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			29.545.400		29.510.700	100	99,88	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	691		691		100		
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			24.930.000		24.920.000	100	99,96	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	438		438		100		
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			6.831.200		6.831.200	100	100	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	25637		25.637		100		
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			44.700.000		44.548.800	100	99,66	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	15		15		100		
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			411.197.389		387.918.398	150	94,34	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8		20		250		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			17.859.000		16.425.800	250	91,97	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8		20		250		
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			98.258.715		96.977.912	100	98,7	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			295.079.674		274.514.686	100	93,03	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			277.068.500		270.393.482	100	97,59	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8		8		100		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15		15		100		
		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		1		100		
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			29.964.100		29.074.482	100	97,03	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8		8		100		
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			13.550.000		13.550.000	100	100	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15		15		100		
2.12.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			233.554.400		227.769.000	100	97,52	
	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		1		100		
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**			**178.176.000**		178.995.798	**82,86**	**100,46**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)			45,11		0		
		Persentase peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen administrasi penduduk (%)	100		0		0		
		Jumlah Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan KIA dengan Mitra (Angka)			2		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
		Persentase peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen administrasi kependudukan (%)	100		0		0		
		Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)			3,24		0		
		Cakupan Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (Angka)			98,81		0		
		Perekaman KTP elektronik (%)			98,13		0		
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			166.727.200		166.627.798	100	99,94	
	Tersedianya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	1		1		100		
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	1		1		100		
		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	4		4		100		
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			4.552.600		4.502.600	100	98,9	
	Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	1		1		100		
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk			118.429.400		118.379.998	100	99,96	
	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	1		1		100		
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			43.745.200		43.745.200	100	100	
	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	4		4		100		
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk			5.244.000		6.184.000	14,29	117,93	
	Tertatanya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	7		1		14,29		
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan			5.244.000		6.184.000	14,29	117,93	
	Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	7		1		14,29		
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			6.204.800		6.184.000	100	99,66	
	Terselenggaranya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1		1		100		
2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk			6.204.800		6.184.000	100	99,66	
	Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1		1		100		
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**			**164.255.300**		155.530.200	**100**	**94,69**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah (Persentase)			52,16		0		
		Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)			100		0		
		Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)			100		0		
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)			100		0		
		Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun (%)			92,9		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Persentase kepemilikan dokumen Catatan Sipil bagi masyarakat (%)		100		0		0		
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)				100		0		
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			131.722.100		123.177.000	100	93,51	
	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	6		6		100		
		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	6		6		100		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil (Dokumen)	1150		1.150		100		
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			8.714.100		8.707.000	100	99,92	
	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	6		6		100		
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			117.998.000		109.598.000	100	92,88	
	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	6		6		100		
2.12.03.2.01.0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil			5.010.000		4.872.000	100	97,25	
	Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil (Dokumen)	1150		1.150		100		
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			32.533.200		32.353.200	100	99,45	
	Terselenggaranya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang	2		2		100		
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan	2		2		100		
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan)	2		2		100		
		Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	56		56		100		
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	6		6		100		
2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam			2.715.000		2.715.000	100	100	
	Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam (Laporan)	2		2		100		
2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			2.740.000		2.630.000	100	95,99	
	Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	2		2		100		
2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil			3.780.000		3.770.000	100	99,74	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan)	2		2		100		
2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil			19.128.200		19.108.200	100	99,9	
	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	56		56		100		
2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil			4.170.000		4.130.000	100	99,04	
	Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	6		6		100		
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**			**571.729.854**		541.442.312	**87,5**	**94,7**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Stakeholder (%)	100		0		0		
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama (%)			11		0		
		Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)			100		0		
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			509.502.954		492.855.132	100	96,73	
	Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	12		12		100		
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	6		6		100		
		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah (Laporan)	1		1		100		
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			471.119.254		460.464.152	100	97,74	
	Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	12		12		100		
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			24.252.100		24.219.380	100	99,87	
	Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	6		6		100		
2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah			14.131.600		8.171.600	100	57,83	
	Terlaksananya Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah (Laporan)	1		1		100		
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			29.312.900		29.262.900	100	99,83	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi	2		2		100		
		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	6		6		100		
		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)	1		1		100		
2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			8.740.600		8.740.600	100	100	
	Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2		2		100		
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			15.709.400		15.659.400	100	99,68	
	Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	6		6		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan			4.862.900		4.862.900	100	100	
	Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)	1		1		100		
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			32.914.000		19.324.280	50	58,71	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	25		25		100		
		Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	6		0		0		
2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			19.334.000		19.324.280	100	99,95	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	25		25		100		
2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan			13.580.000		-	0	0	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	6		0		0		
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**			**11.982.500**		11.964.500	**25**	**99,85**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Jumlah data informasi kependudukan yang valid dan akurat yang disediakan (dokumen)	4		0		0		
		Jumlah data profil kependudukan yang disusun (Dokumen)			3		0		
		Persentase Data Informasi Kependudukan yang Valid dan Akurat (%)	100		0		0		
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan			11.982.500		11.964.500	25	99,85	
	Tersedianya Profil Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2		1		50		
		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	1		0		0		
2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota			2.416.700		2.416.700	50	100	
	Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2		1		50		
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain			9.565.800		9.547.800	0	99,81	
	Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	1		0		0		
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**3.401.992.670**		9.265.904.552	**175,28**	**272,37**	
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.662.708.954**		8.564.533.293	**217,94**	**321,65**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan responsif dalam	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	100		89,1		89,1		
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			89,1		0		
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			54.449.476		54.394.000	100	99,9	
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8		8		100		
2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			54.449.476		54.394.000	100	99,9	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8		8		100		
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.352.355.940		8.262.369.347	131,82	351,24	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22		36		163,64		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.257.045.940		8.167.062.347	163,64	361,85	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22		36		163,64		
2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			95.310.000		95.307.000	100	100	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			95.800.700		95.735.480	291,67	99,93	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		0		0		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		49		1225		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6		2		33,33		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		100		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6		6		100		
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			-		-	0	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		0		0		
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			17.430.900		17.426.600	1225	99,98	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		49		1225		
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			15.390.000		15.388.000	33,33	99,99	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6		2		33,33		
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			13.499.800		13.499.800	100	100	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		100		
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			49.480.000		49.421.080	100	99,88	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6		6		100		
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			13.030.100		12.876.000	40	98,82	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		2		40		
2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			13.030.100		12.876.000	40	98,82	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		2		40		
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			76.747.388		70.518.582	375	91,88	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		25		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		10		1000		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			23.757.806		17.529.000	25	73,78	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		25		
2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.300.000		7.300.000	1000	100	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		10		1000		
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			45.689.582		45.689.582	100	100	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			70.325.350		68.639.884	125	97,6	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		5		100		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		3		300		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		6		100		
2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			63.875.150		62.616.884	100	98,03	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		5		100		
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.050.200		1.023.000	300	97,41	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		3		300		
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			400.000		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		
2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.000.000		5.000.000	100	100	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		6		100		
2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**			**47.570.000**		47.492.000	**0**	**99,84**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Desa yang difasilitasi terkait penataan desa (%)			99,84		0		
		Persentase Capaian Penataan Desa (%)	99,85		99,84		99,99		
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa			47.570.000		47.492.000	0	99,84	
	Meningkatnya penataan desa yang terselenggara	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	10		0		0		
2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa			47.570.000		47.492.000	0	99,84	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	10		0		0		
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**			**497.203.026**		461.395.946	**103,94**	**92,8**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Desa Tertinggal (Desa)			0		0		
		Jumlah Desa Sangat Tertinggal (Desa)			0		0		
		Persentase Aparatur Desa dan BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)			0		0		
		Persentase Capaian Administrasi Pemerintahan Desa yang Dilaksanakan (%)	99,25		99,98		100,74		
		Jumlah Desa Tertinggal Yang Memenuhi Kriteria Desa Berkembang Per Tahun Berdasarkan Indeks Desa Membangun Per Tahun (Angka)			26		0		
		Jumlah Desa Mandiri (Desa)			0		0		
		Persentase Desa yang memenuhi tertib administrasi (%)			0		0		
		Jumlah Desa Maju (Desa)			0		0		
		Jumlah Desa Berkembang Yang Memenuhi Kriteria Desa Mandiri Per Tahun Berdasarkan Indeks Desa Membangun Per Tahun (Angka)			29		0		
		Jumlah Desa Berkembang (Desa)			0		0		
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			497.203.026		461.395.946	103,94	92,8	
	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang terbina dan terawasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	918		181		19,72		
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	2		2		100		
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	181		362		200		
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	181		362		200		
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	132		0		0		
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			30.649.965		30.614.800	19,72	99,89	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	918		181		19,72		
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa			211.791.798		176.231.454	100	83,21	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	2		2		100		
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			108.241.488		108.117.788	200	99,89	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	181		362		200		
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			146.519.775		146.431.904	200	99,94	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	181		362		200		
2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			-		-	0	0	
	Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	132		0		0		
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**			**194.510.690**		192.483.313	**100**	**98,96**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Di Desa Yang Terfasilitasi Dalam Peningkatan Kapasitas Dan Diberdayakan (Angka)			33		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah Peningkatan Desa Yang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adatnya Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif Dan Pemberdayaan (Angka)			33		0		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Pemberdayaan yang terfasilitasi (%)	97,00		33		34,02		
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berdaya (%)			60		0		
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			194.510.690		192.483.313	100	98,96	
	Meningkatnya lembaga kemasyarakatan, lembaga adat yang diberdayakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	30		30		100		
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	23		23		100		
2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa			32.673.200		32.565.100	100	99,67	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	30		30		100		
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			161.837.490		159.918.213	100	98,81	
	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	23		23		100		
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**5.833.623.362**		2.612.044.384	**16,25**	**44,78**	
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**			**96.000.000**		-	**0**	**0**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Angka)			24		0		
		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun (%)	100		2,19		2,19		
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			96.000.000		-	0	0	
	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	1		0		0		
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga			96.000.000		-	0	0	
	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	1		0		0		
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**			**3.304.503.662**		391.556.540	**21,67**	**11,85**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptove Prevalance Rate/mCPR) (%)	100		39,29		39,29		
		Persentase Kebutuhan ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)			39,45		0		
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			1.029.500.000		-	0	0	
	Adanya Komitmen dan Dukungan Stakeholder dan Mitra Kerja tentang Program KKBPK	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders	21		0		0		
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			100.800.000		-	0	0	
	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	21		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Cakupan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan	1		0		0		
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal			928.700.000		-	0	0	
	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	1		0		0		
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			863.478.862		-	0	0	
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam program KKBPK	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	640		0		0		
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			863.478.862		-	0	0	
	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	640		0		0		
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			1.411.524.800		391.556.540	43,33	27,74	
	Tercapainya pelayanan KB yang bermutu di fasilitas kesehatan (Faskes)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1		0		0		
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			66.155.200		-	0	0	
	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1		0		0		
	Menurunnya angka kelahiran	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	3811		3.811		100		
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			923.239.600		674.057	100	0,07	
	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	3811		3.811		100		
	Tercapainya pelayanan KB yang bermutu	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	10		3		30		
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			422.130.000		390.882.483	30	92,6	
	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	10		3		30		
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**			**2.433.119.700**		2.220.487.844	**0**	**91,26**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)			100		0		
		Persentase peningkatan kualitas keluarga (KS) (%)	100		100		100		
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			2.433.119.700		2.220.487.844	0	91,26	
	Meningkatnya pemahaman orang tua tentang pola asuh yang baik dan benar pada balita	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan	1		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	0		21		0		
2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			2.433.119.700		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Laporan)	1		0		0		
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))			-		2.220.487.844	0	0	
	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	0		21		0		
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			**8.296.939.632**		7.159.163.838	**123,11**	**86,29**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.286.222.204**		3.796.311.219	**154,81**	**88,57**	DINAS PERHUBUNGAN
	Meningkatnya Kinerja Administrasi Penunjang Perangkat Daerah	Persentase jumlah Penyelenggara lalu lintas angkutan jalan yang dilaksanakan (Angka)			96,94		0		
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			0		0		
		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Perhubungan (%)	100		0		0		
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.981.100		24.102.000	108,33	92,77	
	Persentase perencanaan kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		100		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6		7		116,67		
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			12.781.100		10.926.000	100	85,49	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		100		
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			13.200.000		13.176.000	116,67	99,82	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6		7		116,67		
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.314.657.444		2.958.312.394	750	89,25	
	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	40		560		1400		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.232.757.444		2.876.412.394	1400	88,98	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	40		560		1400		
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			81.900.000		81.900.000	100	100	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			27.665.000		12.488.261	100	45,14	
	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1		1		100		
2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			27.665.000		12.488.261	100	45,14	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1		1		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			130.189.500		96.562.040	74	74,17	
	Persentase Laporan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10		7		70		
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.996.600		4.955.000	100	165,35	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			41.354.500		9.411.500	100	22,76	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			9.235.000		5.595.000	100	60,58	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			11.438.400		11.438.400	0	100	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0		
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			65.165.000		65.162.140	70	100	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10		7		70		
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			35.734.200		35.734.200	50	100	
	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	26		26		100		
2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		-	0	0	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			35.734.200		35.734.200	100	100	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	26		26		100		
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			432.810.360		407.267.013	100	94,1	
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	40		40		100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			39.000.000		38.472.000	100	98,65	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	40		40		100		
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			75.321.286		54.939.946	100	72,94	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			318.489.074		313.855.067	100	98,55	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			319.184.600		261.845.311	66,67	82,04	
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13		13		100		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2		2		100		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		0		0		
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			318.184.600		260.745.311	100	81,95	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13		13		100		
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.000.000		1.100.000	100	110	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2		2		100		
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		0		0		
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			**3.914.329.846**		3.267.009.728	**78,35**	**83,46**	DINAS PERHUBUNGAN
	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Persentase Jumlah Penyelenggaran lalulintas angkutan jalan yang dilaksanakan (%)	100		96,94		96,94		
		Penetapan Tarif Angkutan Antar Kota dalam Kabupaten Serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan Kelas Ekonomi (%)			0		0		
		Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota (%)			73,97		0		
		Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (%)			100		0		
		Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)			56,45		0		
		Persentase Jumlah Penyelenggara Lalulintas Angkutan Jalan yang Dilaksanakan (%)	100		0		0		
		Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C (%)			50		0		
		Terlaksananya Pelayanan Uji Berkala (%)			48,28		0		
		Konektivitas Darat (Persentase)			0,96		0		
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			-		-	0	0	
	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			-		-	0	0	
	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			3.221.452.598		2.741.696.402	76,87	85,11	
	Persentase Perlengkapan jalan yang disedikan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	40		35		87,5		
		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	1389		920		66,23		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			2.081.489.400		1.804.952.993	87,5	86,71	
	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	40		35		87,5		
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			1.139.963.198		936.743.409	66,23	82,17	
	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	1389		920		66,23		
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			37.607.600		33.368.500	100	88,73	
	Jumlah Terminal Tipe C yang dikelolah	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2		2		100		
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)			37.607.600		33.368.500	100	88,73	
	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2		2		100		
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			443.040.148		300.635.202	4,17	67,86	
	Persentase Penyeleggaraan dan Pembangunan fasilitas parkir	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	24		1		4,17		
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			443.040.148		300.635.202	4,17	67,86	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	24		1		4,17		
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			112.251.400		110.448.624	77,78	98,39	
	Persentase Jumlah kendaraan yang di uji	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	2000		0		0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	9		14		155,56		
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			-		-	0	0	
	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	2000		0		0		
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			112.251.400		110.448.624	155,56	98,39	
	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	9		14		155,56		
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			72.936.800		54.722.000	200	75,03	
	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa Lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	6		12		200		
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			72.936.800		54.722.000	200	75,03	
	Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	6		12		200		
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			12.902.300		12.301.000	70	95,34	
	Persentase Berkurangnya Pelanggaran lalulintas	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	1		0,7		70		
2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			12.902.300		12.301.000	70	95,34	
	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	1		0,7		70		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			14.139.000		13.838.000	100	97,87	
	Persentase ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang/barang antar kota dalam satu	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1		1		100		
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			14.139.000		13.838.000	100	97,87	
	Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1		1		100		
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**			**96.387.582**		95.842.891	**0**	**99,43**	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			96.387.582		-	0	0	
		Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan	1		0		0		
2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			96.387.582		-	0	0	
	Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan terkendalinya dan terawasinya izin persetujuan pengoperasian untuk angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		0		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut (Penyeberangan)	Konektivitas Laut (Pnyeberangan) (Angka)			100		0		
		Persentase Pertumbuhan Penumpang pada Lintas Penyeberangan Kabupaten/Kota (%)	100		0		0		
2.15.03.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota			-		95.842.891	0	0	
	Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan	0		1		0		
2.15.03.2.06.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api			-		95.842.891	0	0	
	Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0		1		0		
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**3.524.377.625**		3.222.361.969	**149,97**	**91,43**	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.319.421.025**		3.030.847.169	**170,55**	**91,31**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo (%)	100		100		100		
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			100		0		
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			23.932.500		23.878.500	50	99,77	
	Terlaksananya penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		0		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6		6		100		
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-		-	0	0	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		0		
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			23.932.500		23.878.500	100	99,77	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6		6		100		
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.663.095.014		2.469.886.392	567,76	92,74	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	28		420		1500		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	8		8		100		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	15		15,49		103,27		
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.575.192.614		2.382.008.792	1500	92,5	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	28		420		1500		
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			24.361.700		24.361.700	100	100	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	8		8		100		
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			63.540.700		63.515.900	103,27	99,96	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	15		15,49		103,27		
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			99.164.500		80.150.180	100	80,83	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8		8		100		
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.962.800		1.961.300	100	99,92	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			58.402.200		40.068.780	100	68,61	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			2.740.000		2.740.000	100	100	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.259.500		3.259.500	100	100	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			32.800.000		32.120.600	100	97,93	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8		8		100		
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-	0	0	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
2.16.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	0	0	
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			477.574.411		402.360.951	98,67	84,25	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4		4		100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3		2,88		96		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3		3		100		
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			288.804.789		213.990.729	100	74,1	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4		4		100		
2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			9.162.400		9.126.700	96	99,61	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3		2,88		96		
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			179.607.222		179.243.522	100	99,8	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3		3		100		
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			55.654.600		54.571.146	100	98,05	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		2		100		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		5		100		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100		
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			31.161.100		30.519.146	100	97,94	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		2		100		
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			17.800.000		17.800.000	100	100	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		5		100		
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			6.693.500		6.252.000	100	93,4	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100		
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**			**125.905.700**		118.110.800	**114,29**	**93,81**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)			78,54		0		
		Cakupan Ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik (Media)	5		5		100		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik (Indeks)			2,06		0		
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			125.905.700		118.110.800	114,29	93,81	
	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan	1		2		200		
		Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	10		10		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	1		1		100		
		Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	1		1		100		
		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	5		5		100		
		Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	1		1		100		
		Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	15		15		100		
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media			53.766.100		53.727.800	200	99,93	
	Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan	1		2		200		
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat			11.846.700		11.846.700	100	100	
	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	10		10		100		
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik			8.400.700		8.400.700	100	100	
	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	1		1		100		
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik			13.438.800		13.438.800	100	100	
	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	1		1		100		
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			17.459.800		17.383.400	100	99,56	
	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	5		5		100		
2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik			14.023.100		6.343.100	100	45,23	
	Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	1		1		100		
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik			6.970.500		6.970.300	100	100	
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	15		15		100		
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**			**79.050.900**		73.404.000	**100**	**92,86**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)			68,63		0		
		Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Aplikasi Berbasis SPBE (%)	40		100		250		
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			79.050.900		73.404.000	100	92,86	
	Terselenggaranya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda (Laporan)	1		1		100		
		Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	13		13		100		
		Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	0		13		0		
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda			19.551.900		16.766.800	100	85,76	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda (Laporan)	1		1		100		
2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah			59.499.000		-	100	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	13		13		100		
2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan			-		56.637.200	0	0	
	Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	0		13		0		
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**795.380.680**		384.547.748	**86,44**	**48,35**	
2.17.02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**			**15.990.100**		12.327.048	**100**	**77,09**	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Persentase Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam (Unit)	75		75		100		
		Meningkatnya Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam (%)	100		40		40		
		Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)			2		0		
		Meningkatkan Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam (Koperasi)	75		75		100		
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			9.697.200		6.506.148	100	67,09	
	Bertambahnya Jumlah Koperasi yang Memperoleh Surat Ijin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam	40		40		100		
2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			9.697.200		6.506.148	100	67,09	
	Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	40		40		100		
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			6.292.900		5.820.900	100	92,5	
	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang/Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	12		12		100		
2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			6.292.900		5.820.900	100	92,5	
	Terfasilitasinya Pemenuhan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	12		12		100		
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**			**33.915.900**		20.605.000	**250**	**60,75**	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)			74		0		
		Jumlah KSP/USP yang sehat (%)	100		100		100		
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			33.915.900		20.605.000	250	60,75	
	Bertambahnya Jumlah Koperasi Sehat	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	40		100		250		
2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan			33.915.900		20.605.000	250	60,75	
	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	40		100		250		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**			-		-	**0**	**0**	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Meningkatnya SDM Perkoperasian (%)	100		100		100		
		Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (%)			26,74		0		
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			-		-	0	0	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	40		0		0		
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			-		-	0	0	
	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	40		0		0		
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**			**202.657.400**		141.157.600	**100**	**69,65**	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Meningkatnya produktivitas koperasi	Jumlah Koperasi yang Meningkat Kualitas Berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset (Unit)			51		0		
		Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)			6,95		0		
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			202.657.400		141.157.600	100	69,65	
	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	194		194		100		
2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi			202.657.400		141.157.600	100	69,65	
	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	194		194		100		
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**			**319.183.300**		166.528.100	**62,15**	**52,17**	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tanggung dan mandiri	Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UKM)	281		281		100		
		Pertumbuhan Wirausaha (%)			6,18		0		
		Jumlah Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha (Unit)			15		0		
		Peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (%)	100		100		100		
		Meningkatnya Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (Jumlah)	281		281		100		
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			319.183.300		166.528.100	62,15	52,17	
	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	50		50		100		
		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	100		100		100		
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	680		281		41,32		
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro			21.624.600		17.065.000	100	78,91	
	Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	50		50		100		
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro			45.838.500		32.500.000	100	70,9	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	100		100		100		
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			215.978.200		104.983.300	41,32	48,61	
	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	680		281		41,32		
	Peningkatan Daya Saing da Pertumbuhan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	8		2		25		
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	45		20		44,44		
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro			15.362.000		11.979.800	25	77,98	
	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	8		2		25		
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan			20.380.000		-	44,44	0	
	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	45		20		44,44		
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**			**223.633.980**		43.930.000	**88,24**	**19,64**	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Meningkatnya daya saing UMKM	Meningkatkan Pengembangan UMKM (%)	32		32		100		
		Terfasilitasinya Usaha Mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran,SDM serta desain dan teknologi (%)	100		100		100		
		Meningkatnya Pengembangan UMKM (Jumlah)	32		32		100		
		Pertumbuhan UMKM yang berdaya saing (Angka)			3		0		
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			223.633.980		43.930.000	88,24	19,64	
	Terfasilitasinya Usaha Mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan,	Jumlah yang Difasilitasi (Orang)	170		130		76,47		
		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	50		50		100		
2.17.08.2.01.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan			161.533.800		20.830.000	76,47	12,9	
	Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Jumlah yang Difasilitasi (Orang)	170		130		76,47		
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi			62.100.180		23.100.000	100	37,2	
	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	50		50		100		
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**3.903.520.942**		3.290.650.871	**110,5**	**84,3**	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.629.888.744**		2.998.251.883	**28,77**	**82,6**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			249.422.310		-	0	0	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		0		0		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	57		0		0		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			39.673.700		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		0		0		
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.600.000		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	57		0		0		
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			194.148.610		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan responsif dalam	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)			0		0		
		Pesentase Peningkatan Kelancaran Tugas dan Fungsi DPMPTSP (%)	100		82,71		82,71		
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			0		0		
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			47.192.792		47.015.400	54,17	99,62	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12		1		8,33		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1		1		100		
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			42.068.500		41.891.500	8,33	99,58	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12		1		8,33		
2.18.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD			5.124.292		5.123.900	100	99,99	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1		1		100		
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.691.482.440		2.338.120.666	17,34	86,87	
	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	31		3		9,68		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		3		25		
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.585.182.440		2.238.176.666	9,68	86,58	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	31		3		9,68		
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			106.300.000		99.944.000	25	94,02	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		3		25		
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.268.000		-	0	0	
	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10		0		0		
2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			2.268.000		-	0	0	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10		0		0		
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			123.666.196		89.522.180	34,72	72,39	
	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		1		8,33		
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.329.800		300.000	100	12,88	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			21.200.200		20.383.380	0	96,15	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			2.703.400		2.703.400	0	100	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			11.843.796		9.520.000	0	80,38	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			6.775.000		6.363.700	100	93,93	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			78.814.000		50.251.700	8,33	63,76	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		1		8,33		
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			302.249.100		330.022.873	12,68	109,19	
	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	71		9		12,68		
2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		32.156.773	0	0	
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0		0		0		
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			302.249.100		297.866.100	12,68	98,55	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	71		9		12,68		
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			213.607.906		193.570.764	62,5	90,62	
	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		25		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			110.778.466		94.401.600	25	85,22	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		25		
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			102.829.440		99.169.164	100	96,44	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**			**28.159.500**		22.502.000	**14,29**	**79,91**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Presentase Peningkatan Investasi (%)			0		0		
		Nilai investasi PMA dan PMDN (Rupiah)			0		0		
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal (Angka)			0		0		
		PERDA mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota (Angka)			0		0		
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal (Laporan)			0		0		
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			28.159.500		22.502.000	14,29	79,91	
	Tersedianya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	35		5		14,29		
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			28.159.500		22.502.000	14,29	79,91	
	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	35		5		14,29		
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**			**29.583.400**		55.578.516	**100**	**187,87**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	persentase peningkatan investor yang berinvestasi (%)			0		0		
		Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal (%)	100		0		0		
		Kegiatan pameran penanaman modal (Kegiatan)			100		0		
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			29.583.400		55.578.516	100	187,87	
	Tersedianya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		5		0		
		Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	1		1		100		
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			-		27.789.258	0	0	
	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		5		0		
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota			29.583.400		27.789.258	100	93,94	
	Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	1		1		100		
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**			**51.698.618**		50.448.200	**833,42**	**97,58**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Konsultasi perizinan penanaman modal (Angka)			0		0		
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota (Data)			99,99		0		
		Penertiban perizinan dan non perizinan penanaman modal (Izin)			0		0		
		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)			0		0		
		Jenis Ijin yang diterbitkan (Ijin)	30		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			51.698.618		50.448.200	833,42	97,58	
	Tersedianya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2250		4		0,18		
		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	6		100		1666,67		
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			30.589.748		30.589.500	0,18	100	
	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2250		4		0,18		
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko			21.108.870		19.858.700	1666,67	94,08	
	Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	6		100		1666,67		
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**			**74.100.000**		74.069.200	**171,43**	**99,96**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Laporan realisasi penanaman modal (Laporan)			0		0		
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN (Kegiatan)			0		0		
		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)			0		0		
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab / Kota (Angka)			0		0		
		Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM (%)	40		0		0		
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			74.100.000		74.069.200	171,43	99,96	
	Tersedianya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta	35		60		171,43		
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal			74.100.000		74.069.200	171,43	99,96	
	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	35		60		171,43		
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**			**90.090.680**		89.801.072	**100**	**99,68**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Penerbitan Izin yang sesuai standar (%)	100		0		0		
		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)			0		0		
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			90.090.680		89.801.072	100	99,68	
	Tersedianya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	3		3		100		
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			90.090.680		89.801.072	100	99,68	
	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	3		3		100		
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			**2.631.791.400**		2.475.825.720	**64,29**	**94,07**	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**			**10.991.800**		2.100.000	**0**	**19,11**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (%)			0		0		
		Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan (%)	100		0		0		
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			10.991.800		2.100.000	0	19,11	
	Meningkatnya Jumlah Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	28		0		0		
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota			10.991.800		2.100.000	0	19,11	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	28		0		0		
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			**2.545.799.600**		2.398.725.720	**70**	**94,22**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olah Raga	Persentase Perolehan Prestasi di bidang Olahraga (%)			75		0		
		Persentase pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan (%)	100		75		75		
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			217.715.900		142.715.000	50	65,55	
	Jumlah dukungan sarana dan Prasarana Pembinaan Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2		1		50		
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota			217.715.900		142.715.000	50	65,55	
	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2		1		50		
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.298.083.700		2.226.010.720	100	96,86	
	Meningkatnya Jumlah Atlit Berprestasi	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	12		12		100		
		Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	48		48		100		
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			1.939.843.900		1.868.130.600	100	96,3	
	Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	12		12		100		
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga			358.239.800		357.880.120	100	99,9	
	Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	48		48		100		
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			30.000.000		30.000.000	50	100	
	Jumlah Olahrawan berprestasi	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	28		28		100		
		Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	48		0		0		
2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga			30.000.000		30.000.000	100	100	
	Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	28		28		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota			-		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	48		0		0		
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**			**75.000.000**		75.000.000	**100**	**100**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (%)	100		100		100		
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			75.000.000		75.000.000	100	100	
	Meningkatnya Kualitas Kepaduan Tingkat Kabupaten	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)	1		1		100		
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah			75.000.000		75.000.000	100	100	
	Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)	1		1		100		
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**			**122.738.000**		133.554.908	**88,57**	**108,81**	
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**			**122.738.000**		133.554.908	**88,57**	**108,81**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral untuk Penyusunan Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan (%)	100		100		100		
		Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)			100		0		
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)			100		0		
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			122.738.000		133.554.908	88,57	108,81	
	Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	42		42		100		
		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan (Persentase)	70		100		142,86		
		Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu (Persentase)	35		0		0		
		Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata (Dokumen)	1		1		100		
		Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik (Dokumen)	1		1		100		
		Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	0		100		0		
		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	0		42		0		
		Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	0		1		0		
2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			24.833.200		-	100	0	
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	42		42		100		
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional			33.887.400		33.081.208	142,86	97,62	
	Meningkatnya Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan (Persentase)	70		100		142,86		
2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral			41.058.700		-	0	0	
	Meningkatnya kualitas data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu (Persentase)	35		0		0		
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia			9.751.000		9.720.800	100	99,69	
	Terwujudnya Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata (Dokumen)	1		1		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar			13.207.700		12.953.200	100	98,07	
	Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik (Dokumen)	1		1		100		
2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral			-		40.021.300	0	0	
	Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	0		100		0		
2.20.02.2.01.0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			-		24.825.200	0	0	
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	0		42		0		
2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar			-		12.953.200	0	0	
	Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	0		1		0		
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**47.803.600**		59.047.508	**50**	**123,52**	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**			**47.803.600**		59.047.508	**50**	**123,52**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Pengamanan Data dan Konten Informasi Pemerintah Daerah yang Tersedia (%)	70		100		142,86		
		Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)			0,29		0		
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			47.803.600		59.047.508	50	123,52	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dokumen)	1		0		0		
		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		1		100		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	1		1		100		
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)	7		0		0		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	0		1		0		
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	0		51		0		
		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma,	0		0		0		
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			5.357.500		-	0	0	
	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dokumen)	1		0		0		
2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			24.167.200		24.151.008	100	99,93	
	Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		1		100		
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			11.556.200		11.426.200	100	98,88	
	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berabasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	1		1		100		
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			6.722.700		-	0	0	
	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)	7		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			-		11.426.200	0	0	
	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	0		1		0		
2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			-		6.708.500	0	0	
	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	0		51		0		
2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			-		5.335.600	0	0	
	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma,	0		0		0		
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**699.838.400**		673.325.899	**63,33**	**96,21**	
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			**651.838.400**		625.325.899	**70**	**95,93**	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat) (Angka)			2		0		
		Persentase karya budaya yang dilestarikan (%)			0		0		
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, penayaan keberagaman) (Angka)			2		0		
		Cakupan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (persen)	70		0		0		
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi) (Angka)			0		0		
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			24.030.000		23.890.000	50	99,42	
	Persentase kebudayaan masyarakat dalam daerah yang dikelola	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	2		2		100		
		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	30		0		0		
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			24.030.000		23.890.000	100	99,42	
	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	2		2		100		
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			-		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	30		0		0		
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			627.808.400		601.435.899	90	95,8	
	Jumlah kekayaan tradisional yang dilestarikan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	4		4		100		
		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	5		4		80		
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			521.298.400		521.179.899	100	99,98	
	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	4		4		100		
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			106.510.000		80.256.000	80	75,35	
	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	5		4		80		
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			**48.000.000**		48.000.000	**50**	**100**	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman (Angka)			0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
		Persentase Cagar Budaya yang Ditetapkan (%)			0		0		
		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman (Angka)			0		0		
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya (Angka)			0		0		
		Pembentukan tim ahli cagar budaya (Angka)			0		0		
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman (Angka)			0		0		
		Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (%)	100		0		0		
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya (Angka)			0		0		
		Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan (Angka)			0		0		
		persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)			0		0		
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			48.000.000		48.000.000	50	100	
	Persentase cagar budaya yang dikelola	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	1		0		0		
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	16		16		100		
2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya			-		-	0	0	
	Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	1		0		0		
2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya			48.000.000		48.000.000	100	100	
	Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	16		16		100		
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**919.993.600**		481.023.976	**409,96**	**52,29**	
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.250.000**		-	**0**	**0**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Persentase Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100		84,75		84,75		
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.250.000		-	0	0	
		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	16		0		0		
2.23.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			3.250.000		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	16		0		0		
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**			**916.743.600**		481.023.976	**450,95**	**52,47**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Pernustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)			58,72		0		
		Persentase Capaian Pembinaan Perpustakaan (%)	100		0		0		
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			400.055.000		277.050.559	620,24	69,25	
	Meningkatnya Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	23		23		100		
		Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	8		0		0		
		Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	4		4		100		
		Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	3		2		66,67		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	4000		0		0		
		Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)	100		4.000		4000		
		Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	4		3		75		
2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			71.592.100		36.640.800	100	51,18	
	Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	23		23		100		
2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota			5.392.200		-	0	0	
	Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	8		0		0		
2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			58.160.000		54.253.328	100	93,28	
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	4		4		100		
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan			103.480.500		29.486.550	66,67	28,49	
	Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	3		2		66,67		
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan			135.930.200		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	4000		0		0		
2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota			-		135.469.881	4000	0	
	Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)	100		4.000		4000		
2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			25.500.000		21.200.000	75	83,14	
	Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	4		3		75		
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			516.688.600		203.973.417	55,95	39,48	
	Meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat/ pemustaka ke perpustakaan daerah	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	9		7		77,78		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	850		118		13,88		
		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	42		32		76,19		
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			23.469.100		3.400.000	77,78	14,49	
	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	9		7		77,78		
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			433.250.000		173.893.259	13,88	40,14	
	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	850		118		13,88		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat			59.969.500		26.680.158	76,19	44,49	
	Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	42		32		76,19		
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			**3.243.930.462**		2.859.970.854	**91,23**	**88,16**	
2.24.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.976.509.762**		2.676.061.113	**90,91**	**89,91**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)					0		
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15.444.000		15.444.000	100	100	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12		12		100		
2.24.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			15.444.000		15.444.000	100	100	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12		12		100		
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.699.278.828		2.448.358.798	100	90,7	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	28		28		100		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.639.878.828		2.389.208.798	100	90,5	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	28		28		100		
2.24.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			59.400.000		59.150.000	100	99,58	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			58.388.800		45.790.660	80	78,42	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		3		100		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		2		100		
2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.680.400		2.680.400	100	100	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			8.487.900		8.487.900	100	100	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		3		100		
2.24.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			-		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			6.805.500		6.805.500	100	100	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			40.415.000		27.816.860	100	68,83	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		2		100		
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			156.162.234		127.740.912	100	81,8	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			84.352.164		62.862.566	100	74,52	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			71.810.070		64.878.346	100	90,35	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			47.235.900		38.726.743	100	81,99	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		5		100		
2.24.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			47.235.900		38.726.743	100	81,99	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		5		100		
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**			**235.602.900**		154.171.940	**93,33**	**65,44**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun			88,89		0		
		Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan,					0		
		Persentase Capaian Pengelolaan Arsip (%)	100		0		0		
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			134.407.200		119.890.326	100	89,2	
	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	30		30		100		
		Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	30		30		100		
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	17		17		100		
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis			32.620.600		31.864.546	100	97,68	
	Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	30		30		100		
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			34.137.600		34.001.780	100	99,6	
	Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	30		30		100		
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			67.649.000		54.024.000	100	79,86	
	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	17		17		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			3.986.500		3.579.820	100	89,8	
	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	2		2		100		
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			3.986.500		3.579.820	100	89,8	
	Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	2		2		100		
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			97.209.200		30.701.794	66,67	31,58	
	Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	3		2		66,67		
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			97.209.200		30.701.794	66,67	31,58	
	Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	3		2		66,67		
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**			**31.817.800**		29.737.801	**88,89**	**93,46**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip (%)	100		83,33		83,33		
		Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)			83,33		0		
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			19.315.400		18.970.680	100	98,22	
	Terlaksananya Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas)	50		50		100		
		Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	50		50		100		
2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun			7.123.700		6.952.080	100	97,59	
	Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas)	50		50		100		
2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			12.191.700		12.018.600	100	98,58	
	Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	50		50		100		
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan			12.502.400		10.767.121	66,67	86,12	
	Terlaksananya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan,	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah	3		2		66,67		
2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			12.502.400		10.767.121	66,67	86,12	
	Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Daftar)	3		2		66,67		
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**14.545.504.879**		13.289.933.721	**17350,02**	**91,37**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.772.487.279**		4.061.942.394	**104,16**	**85,11**	DINAS PERIKANAN
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan responsif dalam	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			84		0		
		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas perikanan (%)	100		84		84		
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			22.394.700		22.118.900	100	98,77	
	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12		12		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			22.394.700		22.118.900	100	98,77	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12		12		100		
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.774.456.378		2.400.594.505	226,72	86,52	
	Tersusunnya dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	29		30		103,45		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		42		350		
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.684.522.378		2.310.756.505	103,45	86,08	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	29		30		103,45		
3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			89.934.000		89.838.000	350	99,89	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		42		350		
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			92.678.800		89.774.000	80,77	96,87	
	Terselenggaranya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		5		100		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		1		50		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	13		12		92,31		
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			16.543.800		15.188.100	100	91,81	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		5		100		
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			9.000.000		9.000.000	50	100	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		1		50		
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			67.135.000		65.585.900	92,31	97,69	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	13		12		92,31		
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.811.839.101		1.538.233.411	100	84,9	
	Tersedianya jasa penunjang perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.035.990.257		832.117.499	100	80,32	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.906.000		1.906.000	100	100	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			773.942.844		704.209.912	100	90,99	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			71.118.300		11.221.578	25	15,78	
	Tersedianya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10		5		50		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15		0		0		
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			67.934.800		11.221.578	50	16,52	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10		5		50		
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.183.500		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15		0		0		
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**			**9.045.939.500**		8.955.320.327	**100**	**99**	DINAS PERIKANAN
	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional (%)			0		0		
		Persentase Peningkatan Pengelolaan Perikanan Tangkap (%)	100		100		100		
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)			100		0		
		Jumlah Rumah Tangga Nelayan yang Melakukan Diversifikasi Usaha (RTP) (Angka)			0		0		
		Total Produksi Perikanan (Angka)			28.998,55		0		
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			9.045.939.500		8.955.320.327	100	99	
	Meningkatnya pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	150		150		100		
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil			9.045.939.500		8.955.320.327	100	99	
	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	150		150		100		
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**			**-**		-	**0**	**0**	DINAS PERIKANAN
	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase pengelolaan perikanan budidaya (%)	100		0		0		
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)			0		0		
		Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan (Pendidikan dan Pelatihan/Penyuluhan dan Pendampingan/ Kemitraan Usaha dan Akses Iptek dan			0		0		
		Jumlah Benih Budidaya Air Tawar dan Air Payau yang diproduksi (Angka)			0		0		
		Jumlah izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam I (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan (Angka)			0		0		
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			-		-	0	0	
	Meningkatnya pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	3		0		0		
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil			-		-	0	0	
	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	3		0		0		
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**			**727.078.100**		272.671.000	**241654,58**	**37,5**	DINAS PERIKANAN
	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Persentase pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (%)	100		0		0		
		Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)			21,95		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			727.078.100		272.671.000	241654,58	37,5	
	Meningkatnya ketersediaan bahan baku pabrik es untuk mendukung penanganan hasil tangkapan nelayan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	12		28.998,55		241654,58		
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			727.078.100		272.671.000	241654,58	37,5	
	Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	12		28.998,55		241654,58		
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			**5.178.285.985**		3.663.855.591	**78,41**	**70,75**	
3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.439.300.983**		3.197.041.233	**84,91**	**92,96**	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan responsif dalam	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			0		0		
		Indeks Profesionalitas ASN (%)	100		0		0		
		Indeks sarana dan prasarana pelayanan publik (%)	100		0		0		
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			21.510.000		21.450.000	100	99,72	
	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6		6		100		
3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			21.510.000		21.450.000	100	99,72	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6		6		100		
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.055.796.558		2.837.178.557	45,45	92,85	
	Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	33		12		36,36		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	10		10		100		
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2		0		0		
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.966.894.858		2.750.438.557	36,36	92,7	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	33		12		36,36		
3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			88.901.700		86.740.000	100	97,57	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	10		10		100		
3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			-		-	0	0	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2		0		0		
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			67.616.900		66.150.686	100	97,83	
	Persentase pelaksanaan administrasi umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		10		100		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		3		100		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		20		100		
3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.283.600		2.280.502	100	99,86	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		10		100		
3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			13.468.300		12.341.400	100	91,63	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		3		100		
3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5.000.000		5.000.000	100	100	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100		
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			7.000.000		6.993.000	100	99,9	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			39.865.000		39.535.784	100	99,17	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		20		100		
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			23.070.000		23.004.150	75	99,71	
	Persentase barang milik daerah yang diadakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3		3		100		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6		3		50		
3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			4.048.500		4.027.150	100	99,47	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3		3		100		
3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			19.021.500		18.977.000	50	99,77	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6		3		50		
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			195.082.125		190.509.323	100	97,66	
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6		6		100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			230.000		129.000	100	56,09	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6		6		100		
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			69.184.879		64.716.677	100	93,54	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			125.667.246		125.663.646	100	100	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			76.225.400		58.748.517	85,71	77,07	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15		15		100		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7		4		57,14		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		2		100		
3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			49.117.100		44.178.117	100	89,94	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15		15		100		
3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.350.000		2.350.000	57,14	100	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7		4		57,14		
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			24.758.300		12.220.400	100	49,36	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		2		100		
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**			**749.874.772**		332.944.978	**83,33**	**44,4**	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah belanja wisatawan (%)			4,1		0		
		Persentase Destinasi Wisata yang Dikembangkan (%)	90		0		0		
		Jumlah entitas pengelolaan destinasi (Angka)			12		0		
		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata (Angka)			0		0		
		Persentase Pertumbuhan Rata-rata Lama Tinggal (%)			1,97		0		
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota (Angka)			194		0		
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (Angka)			6.376		0		
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			-		-	0	0	
	Persentase daya tarik wisata yang dikelola	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	1		0		0		
3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			-		-	0	0	
	Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	1		0		0		
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			724.902.272		308.657.898	100	42,58	
	Persentase destinasi wisata yang dikelola	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		100		
		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	4		4		100		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	1		1		100		
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	4		4		100		
3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			196.189.400		45.886.135	100	23,39	
	Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			28.381.300		27.760.000	100	97,81	
	Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	4		4		100		
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			111.372.900		21.765.700	100	19,54	
	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	1		1		100		
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			388.958.672		213.246.063	100	54,82	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	4		4		100		
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			24.972.500		24.287.080	100	97,26	
	Persentase dokumen hasil penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi (Usaha)	348		348		100		
3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota			24.972.500		24.287.080	100	97,26	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi (Usaha)	348		348		100		
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**			**63.425.400**		63.067.320	**66,67**	**99,44**	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi (Angka)			2		0		
		Indeks Kepuasan Wisatawan (Indeks)			85		0		
		Persentase Pengembangan Jaringan dan Metode Pemasaran Pariwisata (%)	85		0		0		
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri (Angka)			1		0		
		Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)			0		0		
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri (Angka)			76		0		
		Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan (%)			6		0		
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			63.425.400		63.067.320	66,67	99,44	
	Persentase pengembangan jaringan dan metode pemasaran pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	2		2		100		
		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	2		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	5		5		100		
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			51.802.300		51.549.600	100	99,51	
	Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	2		2		100		
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			-		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	2		0		0		
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			11.623.100		11.517.720	100	99,09	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	5		5		100		
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**			**925.684.830**		70.802.060	**52,22**	**7,65**	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Meningkatnya kapasistas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf (%)	80		0		0		
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan (%)			100		0		
		Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)			0		0		
		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat (Angka)			0		0		
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (Angka)			99,4		0		
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			48.392.830		48.119.560	66,3	99,44	
	Jumlah pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	83		0		0		
		Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	90		89		98,89		
		Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	600		600		100		
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			-		-	0	0	
	Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	83		0		0		
3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI			32.096.900		31.963.560	98,89	99,58	
	Berkembangkan Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	90		89		98,89		
3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata			16.295.930		16.156.000	100	99,14	
	Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	600		600		100		
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			877.292.000		22.682.500	10	2,59	
	Persentase pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	250		25		10		
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			877.292.000		22.682.500	10	2,59	
	Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	250		25		10		
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**24.832.161.334**		21.560.292.155	**107,09**	**86,82**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**19.311.726.539**		18.163.581.237	**81,46**	**94,05**	DINAS PERTANIAN
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan responsif dalam	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100		96,68		96,68		
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			96,68		0		
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			68.949.400		61.364.150	100	89	
	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaraan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6		6		100		
3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			68.949.400		61.364.150	100	89	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6		6		100		
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			17.881.889.052		16.877.594.580	52,48	94,38	
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	282		14		4,96		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			17.766.016.052		16.762.410.330	4,96	94,35	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	282		14		4,96		
3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			115.873.000		115.184.250	100	99,41	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			64.096.700		55.878.150	79,17	87,18	
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		3		100		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		1		50		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8		7		87,5		
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.616.700		7.492.650	100	98,37	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		3		100		
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			10.100.000		10.073.600	50	99,74	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		1		50		
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			46.380.000		38.311.900	87,5	82,6	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8		7		87,5		
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			42.673.500		39.097.000	100	91,62	
	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	9		9		100		
		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	7		7		100		
3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			7.681.500		7.650.000	100	99,59	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	9		9		100		
3.27.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			34.992.000		31.447.000	100	89,87	
	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	7		7		100		
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.112.879.387		997.171.757	100	89,6	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			94.106.115		81.064.600	100	86,14	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.018.773.272		916.107.157	100	89,92	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			141.238.500		132.475.600	67,5	93,8	
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	28		28		100		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	40		14		35		
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			136.788.500		129.245.200	100	94,49	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	28		28		100		
3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4.450.000		3.230.400	35	72,59	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	40		14		35		
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**2.887.580.945**		1.912.445.635	**91,67**	**66,23**	DINAS PERTANIAN
	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	persentase peningkatan produksi komoditas peternakan (%)			89,91		0		
		Persentase peningkatan produksi tanaman pangan (%)			90,01		0		
		produktivitas pangan (Ton/Ha)			90,01		0		
		Persentase peningkatan produksi hortikultura (%)			90,01		0		
		Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (%)	100		90,01		90,01		
		Persentase peningkatan produksi perkebunan (%)			90,01		0		
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			989.727.200		906.390.035	100	91,58	
	Meningkatnya penggunaan sarana pertanian yang diawasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	7		7		100		
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	2		2		100		
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			204.559.300		177.335.690	100	86,69	
	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	7		7		100		
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			785.167.900		729.054.345	100	92,85	
	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	2		2		100		
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			1.897.853.745		1.006.055.600	83,33	53,01	
	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	2		2		100		
		Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	3		2		66,67		
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			1.381.532.745		503.027.800	100	36,41	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	2		2		100		
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman			516.321.000		503.027.800	66,67	97,43	
	Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	3		2		66,67		
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			**1.167.460.700**		84.695.900	**100**	**7,25**	DINAS PERTANIAN
	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (Hektar)			100		0		
		Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (%)	100		100		100		
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			1.167.460.700		84.695.900	100	7,25	
	Meningkatnya pengembangan prasarana pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1		1		100		
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			1.167.460.700		84.695.900	100	7,25	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1		1		100		
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**			**440.296.350**		427.474.633	**80,95**	**97,09**	DINAS PERTANIAN
	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)			100		0		
		Persentase Peningkatan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (%)	100		100		100		
		Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)			100		0		
		Penurunan jumlah kasus penyakit hewan (%)			100		0		
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			440.296.350		427.474.633	80,95	97,09	
	Meningkatnya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	21		21		100		
		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	21		13		61,9		
3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan			156.608.900		152.458.200	100	97,35	
	Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	21		21		100		
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			283.687.450		275.016.433	61,9	96,94	
	Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	21		13		61,9		
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			**1.025.096.800**		972.094.750	**250**	**94,83**	DINAS PERTANIAN
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)			96,35		0		
		Persentase Peningkatan Pengetahuan Keterampilan dan Sikap Petani (%)	100		96,35		96,35		
		Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)			96,35		0		
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			1.025.096.800		972.094.750	250	94,83	
	Meningkatnya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	200		600		300		
		Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	2		1		50		
		Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	115		460		400		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			197.937.500		165.473.700	300	83,6	
	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	200		600		300		
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			137.159.300		137.121.050	50	99,97	
	Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	2		1		50		
3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian			690.000.000		669.500.000	400	97,03	
	Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	115		460		400		
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**7.173.881.105**		5.561.157.878	**152,87**	**77,52**	
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**5.424.151.174**		4.526.541.955	**193,33**	**83,45**	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan responsif dalam	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPKUKM (%)	100		100		100		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (%)	100		100		100		
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			100		0		
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			72.646.000		70.463.000	100	97	
	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja DPKUKM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	16		16		100		
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6		6		100		
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			63.028.000		62.505.000	100	99,17	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	16		16		100		
3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			9.618.000		7.958.000	100	82,74	
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6		6		100		
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.949.546.248		3.223.583.685	63,33	81,62	
	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45		12		26,67		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.832.952.448		3.112.349.285	26,67	81,2	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45		12		26,67		
3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			116.593.800		111.234.400	100	95,4	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			97.124.900		96.042.042	375	98,89	
	Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung Kelancara Operasional Tugas dan Fungsi DP2KUKM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		60		100		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		60		100		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		12		1200		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6		6		100		
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			43.163.000		43.026.900	100	99,68	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		60		100		
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			9.495.000		9.495.000	100	100	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		60		100		
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			25.336.900		25.315.742	1200	99,92	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		12		1200		
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			19.130.000		18.204.400	100	95,16	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6		6		100		
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.203.591.626		1.067.089.942	100	88,66	
	Tersedianya Laporan atau Dokumen yang berisi Informasi mengenai Pelaksanaan Kegiatan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			122.869.240		89.247.500	100	72,64	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.080.722.386		977.842.442	100	90,48	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			101.242.400		69.363.286	100	68,51	
	Jumllah Barang Milik Daearah yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25		25		100		
3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			101.242.400		69.363.286	100	68,51	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25		25		100		
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**			**1.598.863.831**		896.690.323	**100**	**56,08**	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Meningkatnya kualitas saran perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)			100		0		
		Meningkatkan Pembangunan Fasilitas Pasar (Unit)	44		44		100		
		Meningkatnya Pembangunan Fasilitas Pasar (%)	100		100		100		
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			1.509.647.331		818.281.823	100	54,2	
	Meningkatnya Pembangunan Fasilitas Pasar	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	2		2		100		
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			1.509.647.331		818.281.823	100	54,2	
	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	2		2		100		
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			89.216.500		78.408.500	100	87,89	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	12		12		100		
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			89.216.500		78.408.500	100	87,89	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	12		12		100		
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**			**85.732.400**		82.065.000	**75**	**95,72**	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)			100		0		
		Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya (Kali)	48		48		100		
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			85.732.400		82.065.000	75	95,72	
	Meningkatnya Ketersedian Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	12		3		25		
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	12		12		100		
		Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	12		12		100		
3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			54.251.200		53.695.000	25	98,97	
	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	12		3		25		
3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			10.293.000		10.120.000	100	98,32	
	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	12		12		100		
3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			21.188.200		18.250.000	100	86,13	
	Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	12		12		100		
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**			**65.133.700**		55.860.600	**100**	**85,76**	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)			100		0		
		Terwujudnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (%)	100		100		100		
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			65.133.700		55.860.600	100	85,76	
	Meningkatnya Kesesuaiaj Alat Ukur, alat Takar, Alat timbang dan alat Perlengkapan terhadap ketentuan yang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	12		12		100		
		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	50		50		100		
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			40.424.100		31.600.600	100	78,17	
	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	12		12		100		
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal			24.709.600		24.260.000	100	98,18	
	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	50		50		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**93.495.000**		17.580.000	**100**	**18,8**	
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**			**93.495.000**		17.580.000	**100**	**18,8**	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (%)			41,32		0		
		Persentase Terselesaikannya Dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya perda (%)			50		0		
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			93.495.000		17.580.000	100	18,8	
	Meningkatnya Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1		1		100		
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			93.495.000		17.580.000	100	18,8	
	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1		1		100		
3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**			**31.152.400**		30.740.800	**6,67**	**98,68**	
3.32.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**			**31.152.400**		30.740.800	**10**	**98,68**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang ditempatkan di Lokasi Transmigrasi (%)					0		
		Persentase pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi (%)	99,36		0		0		
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			31.152.400		30.740.800	10	98,68	
	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari satu	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	5		1		20		
		Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Lokasi)	2		0		0		
3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			31.152.400		30.740.800	20	98,68	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	5		1		20		
3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi			-		-	0	0	
	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Lokasi)	2		0		0		
3.32.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**			-		-	**0**	**0**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan (%)					0		
		Persentase pengembangan kawasan transmigrasi (%)	99,24		0		0		
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian			-		-	0	0	
	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang di Bina	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	20		0		0		
3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman			-		-	0	0	
	Terwujudnya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	20		0		0		
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**30.233.459.131**		24.534.487.148	**858,56**	**81,15**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**21.816.101.231**		18.382.436.297	**683,54**	**84,26**	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			91,23		0		
		Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Yang Terlaksana Sesuai Standar (%)			90,48		0		
		Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi (%)	100		0		0		
		Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Kepala Daerah Yang Efektif dan Akuntabel (%)			100		0		
		Persentase Pemenuhan Layanan Kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (%)			100		0		
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			87.347.400		58.683.433	0	67,18	
	Dokumen rencana strategis dan tahunan, alokasi anggaran yang jelas serta laporan dan analisis kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14		0		0		
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			87.347.400		58.683.433	0	67,18	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	14		0		0		
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.167.423.540		9.867.784.866	19,69	88,36	
	seluruh dokumen, laporan dan catatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	126		36		28,57		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	185		20		10,81		
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			10.660.231.980		497.041.142	28,57	4,66	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	126		36		28,57		
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			507.191.560		9.370.743.724	10,81	1847,57	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	185		20		10,81		
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			93.281.800		36.328.100	795	38,94	
	Seluruh dokumen, data dan sistem pengelolaan yang berkaitan dengan siklus hidup pegawai, mulai dari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6		63		1050		
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5		27		540		
4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			35.901.800		29.578.100	1050	82,39	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6		63		1050		
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			57.380.000		6.750.000	540	11,76	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5		27		540		
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.963.066.905		1.462.819.776	343,52	74,52	
	Seluruh dokumen, sistem dan layanan pendukung yang menunjang kelancaran operasional dan tata kelola	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		44		1466,67		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	133		57		42,86		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	22		52		236,36		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	40		52		130		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60		100		166,67		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	124		23		18,55		
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			236.801.700		218.425.902	1466,67	92,24	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		44		1466,67		
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			192.308.130		145.241.525	42,86	75,53	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	133		57		42,86		
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			187.163.275		136.154.558	236,36	72,75	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	22		52		236,36		
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			82.312.900		64.903.657	130	78,85	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	40		52		130		
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.050.000		1.050.000	166,67	100	
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60		100		166,67		
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.263.430.900		897.044.134	18,55	71	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	124		23		18,55		
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.014.051.600		725.105.131	71,5	71,51	
	Tersedianya barang-barang yang dibutuhkan (baik bergerak maupun tidak bergerak) sesuai spesifikasi.	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4		0		0		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		1		20		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	24		81		337,5		
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		34		0		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	172		0		0		
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-	0	0	
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4		0		0		
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			39.346.300		754.000	20	1,92	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		1		20		
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			93.226.400		75.687.790	337,5	81,19	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	24		81		337,5		
4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	0	0	
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		648.663.341	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		34		0		
4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			881.478.900		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	172		0		0		
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.877.582.959		2.548.774.657	234,13	88,57	
	Tersedianya layanan non-fisik (jasa) yang dibutuhkan oleh perangkat daerah untuk mendukung kelancaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	149		32		21,48		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		32		640		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	66		27		40,91		
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.087.145.030		852.719.990	21,48	78,44	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	149		32		21,48		
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.687.300		3.263.915	640	42,46	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		32		640		
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.782.750.629		1.692.790.752	40,91	94,95	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	66		27		40,91		
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.389.571.827		951.313.024	168,58	68,46	
	Barang milik daerah yang terpelihara dengan baik, berfungsi optimal dan memiliki umur ekonomis yang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	33		34		103,03		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	17		33		194,12		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	59		27		45,76		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		25		500		
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			761.160.060		455.070.571	103,03	59,79	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	33		34		103,03		
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			204.484.967		164.432.053	194,12	80,41	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	17		33		194,12		
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			45.591.500		24.024.000	45,76	52,69	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	59		27		45,76		
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			308.085.300		266.200.900	0	86,4	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			70.250.000		41.585.500	500	59,2	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		25		500		
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			678.235.800		611.345.417	1511,11	90,14	
	Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang akuntabel serta dukungan operasional dan fasilitas kerja yang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2		24		1200		
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	3		100		3333,33		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	4		0		0		
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			577.251.200		514.045.417	1200	89,05	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2		24		1200		
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			93.984.600		93.800.000	3333,33	99,8	
	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	3		100		3333,33		
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			7.000.000		3.500.000	0	50	
	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	4		0		0		
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			2.038.812.200		1.766.459.866	785	86,64	
	Terpenuhinya kebutuhan operasional harian dan kenyamanan lingkungan kerja bagi seluruh jajaran	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	3		22,5		750		
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	5		41		820		
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			1.551.893.700		1.429.167.250	750	92,09	
	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	3		22,5		750		
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			486.918.500		337.292.616	820	69,27	
	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	5		41		820		
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			124.629.800		66.608.289	125	53,44	
	Terselenggaranya setiap kegiatan pimpinan (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) dengan tertib, lancar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	12		19		158,33		
		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	12		11		91,67		
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			64.655.000		42.000.000	158,33	64,96	
	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	12		19		158,33		
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan			59.974.800		24.608.289	91,67	41,03	
	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	12		11		91,67		
	Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Tertata Sesuai Ketentuan (%)			105,56		0		
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi			382.097.400		287.213.738	2532,15	75,17	
	Terlaksananya Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	5		43		860		
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	4		88		2200		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1		73		7300		
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	3		55		1833,33		
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	7		32,72		467,43		
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			153.234.100		118.401.388	860	77,27	
	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	5		43		860		
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			53.118.700		49.125.039	2200	92,48	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	4		88		2200		
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			96.173.800		73.291.850	7300	76,21	
	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1		73		7300		
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			37.362.400		21.638.717	1833,33	57,92	
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	3		55		1833,33		
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			42.208.400		24.756.744	467,43	58,65	
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	7		32,72		467,43		
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**7.112.955.500**		5.192.453.788	**990,15**	**73**	SEKRETARIAT DAERAH
	Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)			152,02		0		
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			816.315.800		718.982.046	415	88,08	
	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	20		60		300		
		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	6		42		700		
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	20		49		245		
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			513.907.900		471.150.816	300	91,68	
	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	20		60		300		
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum			210.144.600		179.575.624	700	85,45	
	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	6		42		700		
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			92.263.300		68.255.606	245	73,98	
	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	20		49		245		
	Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah, kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah serta	Persentase Penyelesaian Urusan Administrasi Pemerintahan (%)			100		0		
		Persentase kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (%)			100		0		
		Persentase Fasilitasi Bantuan Sosial/Hibah/Bantuan Keagamaan Yang Tepat Sasaran (%)			100		0		
		Persentase Kerja Sama Daerah Yang Memberikan Manfaat Bagi Pembangunan (%)			108,33		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			22.427.400		22.360.000	4722	99,7	
	Tersedianya data, dokumen dan sistem informasi yang mendukung perumusan kebijakan, koordinasi antar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	1		47,22		4722		
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			22.427.400		22.360.000	4722	99,7	
	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	1		47,22		4722		
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			6.214.525.400		4.451.111.742	651,39	71,62	
	Peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang dibuktikan dengan tersedianya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	12		23		191,67		
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan	3		50		1666,67		
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan,	24		23		95,83		
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			3.705.649.700		2.963.047.742	191,67	79,96	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	12		23		191,67		
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial			51.949.500		51.594.000	1666,67	99,32	
	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	3		50		1666,67		
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat			2.456.926.200		1.436.470.000	95,83	58,47	
	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	24		23		95,83		
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah			59.686.900		-	0	0	
	Terwujudnya kesepakatan dan implementasi program kolaboratif antara pemerintah daerah dengan pihak lain	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	12		0		0		
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			59.686.900		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	12		0		0		
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**1.304.402.400**		959.597.063	**1295,92**	**73,57**	SEKRETARIAT DAERAH
	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan, pelayanan pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)			20,25		0		
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (%)			42		0		
		Persentase Fasilitasi Kebijakan Perekonomian Daerah (%)			100		0		
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah (%)			20,9		0		
		Persentase Administrasi Pembangunan Daerah Yang Efektif dan Tepat Waktu (%)			100		0		
		Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa Yang Dilaksanakan Melalui Sistem Elektronik (SPSE) (%)			100		0		
		Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama (%)			0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Ditindaklanjuti (%)			100		0		
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			595.242.600		375.317.418	688,89	63,05	
	Terciptanya iklim ekonomi yang kondusif, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah serta pemberdayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	2		8		400		
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	12		32		266,67		
		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	1		14		1400		
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			297.989.600		83.003.642	400	27,85	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	2		8		400		
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			240.410.000		235.635.776	266,67	98,01	
	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	12		32		266,67		
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			56.843.000		56.678.000	1400	99,71	
	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	1		14		1400		
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			212.147.300		114.134.609	744,44	53,8	
	Tersedianya data, dokumen dan sistem informasi yang akuntabel dan transparan terkait seluruh tahapan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	2		22		1100		
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	12		46		383,33		
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	12		90		750		
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan			6.301.800		92.420.000	1100	1466,57	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	2		22		1100		
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			190.060.000		6.210.557	383,33	3,27	
	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	12		46		383,33		
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			15.785.500		15.504.052	750	98,22	
	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	12		90		750		
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			381.500.000		355.432.667	189,22	93,17	
	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa yang berkualitas sesuai spesifikasi, jumlah dan waktu yang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	12		35		291,67		
		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	1		0		0		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	25		69		276		
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			227.790.000		223.392.000	291,67	98,07	
	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	12		35		291,67		
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			12.090.000		-	0	0	
	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	1		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			141.620.000		132.040.667	276	93,24	
	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	25		69		276		
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			115.512.500		114.712.369	3561,11	99,31	
	Data dan laporan yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan, kondisi terkini sumber daya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian,	3		70		2333,33		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan,	2		67		3350		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan	2		100		5000		
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			41.726.100		41.040.159	2333,33	98,36	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	3		70		2333,33		
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			39.018.000		38.984.690	3350	99,91	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	2		67		3350		
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			34.768.400		34.687.520	5000	99,77	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	2		100		5000		
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**			**32.333.249.580**		31.337.789.154	**370,36**	**96,92**	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**26.504.367.252**		25.854.323.998	**402,23**	**97,55**	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100		89,33		89,33		
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			89,33		0		
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			87.174.000		46.140.000	100	52,93	
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12		12		100		
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			87.174.000		46.140.000	100	52,93	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12		12		100		
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.798.655.742		2.386.926.088	443,75	85,29	
	Terlaksananya Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	32		252		787,5		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.656.245.742		2.244.516.088	787,5	84,5	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	32		252		787,5		
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			142.410.000		142.410.000	100	100	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			156.520.000		156.520.000	54,17	100	
	Terlaksananya Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12		12		100		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	12		1		8,33		
4.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			137.965.000		137.965.000	100	100	
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12		12		100		
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			18.555.000		18.555.000	8,33	100	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	12		1		8,33		
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			688.762.100		688.762.100	1016,67	100	
	Terlaksananya Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		12		1200		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		12		1200		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		12		1200		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		12		1200		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		12		1200		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8		8		100		
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			15.000.400		15.000.400	1200	100	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		12		1200		
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			177.429.500		177.429.500	1200	100	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		12		1200		
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			338.310.800		338.310.800	1200	100	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		12		1200		
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			21.041.400		21.041.400	1200	100	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		12		1200		
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200.000		4.200.000	1200	100	
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		12		1200		
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			132.780.000		132.780.000	100	100	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8		8		100		
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			343.665.300		146.385.700	50	42,6	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	71		0		0		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		3		100		
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			197.279.600		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	71		0		0		
4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			146.385.700		146.385.700	100	100	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		3		100		
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			444.930.526		444.930.526	100	100	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			223.712.422		223.712.422	100	100	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			221.218.104		221.218.104	100	100	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			857.586.120		857.586.120	218,52	100	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 Îƒ ouput	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9		5		55,56		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7		35		500		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		3		100		
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			339.663.800		339.663.800	55,56	100	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9		5		55,56		
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			9.700.000		9.700.000	500	100	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7		35		500		
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			508.222.320		508.222.320	100	100	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		3		100		
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			17.391.103.464		17.391.103.464	200	100	
	Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	35		140		400		
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	35		35		100		
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			17.215.103.464		17.215.103.464	400	100	
	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	35		140		400		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			53.500.000		53.500.000	100	100	
	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			122.500.000		122.500.000	100	100	
	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	35		35		100		
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD			3.735.970.000		3.735.970.000	250	100	
	Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	140		140		100		
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	3		12		400		
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			2.442.470.000		2.442.470.000	100	100	
	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	140		140		100		
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD			1.293.500.000		1.293.500.000	400	100	
	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	3		12		400		
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			**5.828.882.328**		5.483.465.156	**288,89**	**94,07**	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang- undangan dan kualitas penganggaran serta	Persentase Rancangan Peraturan Daerah Yang Difasilitasi Penyusunannya oleh Sekretariat DPRD (%)			100		0		
		Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (%)	100		140,9		140,9		
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD Yang Ditindaklanjuti (%)			100		0		
		Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (%)			140,9		0		
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			1.152.407.212		1.100.000.000	100	95,45	
	Tersedianya Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	4		4		100		
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			1.152.407.212		1.100.000.000	100	95,45	
	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	4		4		100		
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			368.005.000		368.005.000	133,33	100	
	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	1		2		200		
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1		1		100		
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	1		1		100		
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS			4.525.000		4.525.000	200	100	
	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	1		2		200		
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD			181.740.000		181.740.000	100	100	
	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1		1		100		
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan			181.740.000		181.740.000	100	100	
	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	1		1		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			1.765.280.116		1.472.640.156	544,44	83,42	
	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	3		1		33,33		
		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	9		36		400		
		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	1		12		1200		
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD			1.497.360.000		1.204.720.040	33,33	80,46	
	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	3		1		33,33		
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			190.920.116		190.920.116	400	100	
	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	9		36		400		
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD			77.000.000		77.000.000	1200	100	
	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	1		12		1200		
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			2.543.190.000		2.542.820.000	233,33	99,99	
	Terlaksananya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	42		70		166,67		
		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	35		105		300		
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah			189.540.000		189.170.000	166,67	99,8	
	Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	42		70		166,67		
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses			2.353.650.000		2.353.650.000	300	100	
	Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	35		105		300		
5.01	**PERENCANAAN**			**7.769.344.614**		7.048.624.951	**100,39**	**90,72**	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.887.645.014**		4.459.924.074	**96,23**	**91,25**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Persentase capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100		100		100		
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			100		0		
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			31.623.900		31.605.600	100	99,94	
	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20		20		100		
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			31.623.900		31.605.600	100	99,94	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20		20		100		
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.611.994.262		3.311.165.427	67,95	91,67	
	Tersedianya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	39		14		35,9		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1100		1.100		100		
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.495.801.262		3.196.796.727	35,9	91,45	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	39		14		35,9		
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			116.193.000		114.368.700	100	98,43	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1100		1.100		100		
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			359.288.600		334.792.170	100	93,18	
	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		12		100		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3		3		100		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	15		15		100		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		12		100		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30		30		100		
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			23.643.900		23.558.508	100	99,64	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100		
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			63.150.000		63.123.700	100	99,96	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		12		100		
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			7.004.700		7.004.700	100	100	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3		3		100		
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			42.791.000		42.090.400	100	98,36	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	15		15		100		
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			60.009.000		60.008.800	100	100	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		12		100		
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			162.690.000		139.006.062	100	85,44	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30		30		100		
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			128.184.900		97.659.900	100	76,19	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	19		19		100		
5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			128.184.900		97.659.900	100	76,19	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	19		19		100		
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			523.150.352		483.076.822	100	92,34	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			212.172.342		179.646.209	100	84,67	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			310.978.010		303.430.613	100	97,57	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			233.403.000		201.624.155	100	86,38	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	21		21		100		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	22		22		100		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		2		100		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		5		100		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	37		37		100		
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			131.325.300		116.223.255	100	88,5	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	21		21		100		
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			19.504.400		15.631.000	100	80,14	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	22		22		100		
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			27.538.000		19.934.900	100	72,39	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		2		100		
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			23.875.300		18.785.000	100	78,68	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		5		100		
5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			31.160.000		31.050.000	100	99,65	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	37		37		100		
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**			**2.075.788.100**		1.842.510.553	**110,42**	**88,76**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)			100		0		
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)			100		0		
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			1.274.452.400		1.179.924.991	133,33	92,58	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1		2		200		
		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2		2		100		
		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	582		582		100		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3		4		133,33		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			12.910.000		12.909.400	200	100	
	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1		2		200		
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			135.515.500		134.871.320	100	99,52	
	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2		2		100		
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			101.334.400		101.193.200	100	99,86	
	Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	582		582		100		
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			1.024.692.500		930.951.071	133,33	90,85	
	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3		4		133,33		
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			57.216.300		34.658.400	100	60,57	
	Tersedianya Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	1		1		100		
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			57.216.300		34.658.400	100	60,57	
	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	1		1		100		
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			379.406.400		314.681.530	75	82,94	
	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	2		1		50		
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5		5		100		
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			166.707.200		141.085.530	50	84,63	
	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	2		1		50		
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			212.699.200		173.596.000	100	81,62	
	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5		5		100		
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			364.713.000		313.245.632	100	85,89	
	Terselenggaranya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	4		4		100		
5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			364.713.000		313.245.632	100	85,89	
	Terlaksananya Penerapana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	4		4		100		
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**			**805.911.500**		746.190.324	**100**	**92,59**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)			100		0		
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)			100		0		
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)			100		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			346.732.400		314.888.822	100	90,82	
	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	14		14		100		
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	9		9		100		
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	16		16		100		
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	9		9		100		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	23		23		100		
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	18		18		100		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	32		32		100		
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	18		18		100		
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			90.238.800		82.383.024	100	91,29	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	14		14		100		
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			3.366.700		931.400	100	27,67	
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	9		9		100		
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			17.907.200		17.716.060	100	98,93	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	16		16		100		
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			13.825.200		9.174.404	100	66,36	
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	9		9		100		
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			180.975.400		169.551.555	100	93,69	
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	23		23		100		
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			10.587.200		9.676.119	100	91,39	
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	18		18		100		
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			7.110.700		6.690.400	100	94,09	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	32		32		100		
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			22.721.200		18.765.860	100	82,59	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	18		18		100		
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			252.521.400		236.036.552	100	93,47	
	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	24		24		100		
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	21		21		100		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	35		35		100		
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	21		21		100		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	9		9		100		
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	6		6		100		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	11		11		100		
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	6		6		100		
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			31.126.400		28.376.580	100	91,17	
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	24		24		100		
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			45.954.900		44.820.224	100	97,53	
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	21		21		100		
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			45.954.800		45.172.300	100	98,3	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	35		35		100		
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			18.589.700		16.969.300	100	91,28	
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	21		21		100		
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			24.719.100		21.945.000	100	88,78	
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	9		9		100		
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			20.768.200		20.629.260	100	99,33	
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	6		6		100		
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			44.483.100		38.262.168	100	86,02	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	11		11		100		
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			20.925.200		19.861.720	100	94,92	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	6		6		100		
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			206.657.700		195.264.950	100	94,49	
	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	18		18		100		
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	15		15		100		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	25		25		100		
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	15		15		100		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	66		66		100		
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	63		63		100		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	105		105		100		
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	63		63		100		
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			63.034.700		55.813.860	100	88,54	
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	18		18		100		
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			17.326.100		16.176.000	100	93,36	
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	15		15		100		
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			26.756.600		26.468.306	100	98,92	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	25		25		100		
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			23.415.800		22.759.380	100	97,2	
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	15		15		100		
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			23.192.500		22.424.380	100	96,69	
	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	66		66		100		
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			16.843.200		16.675.200	100	99	
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	63		63		100		
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			22.399.100		21.610.504	100	96,48	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	105		105		100		
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			13.689.700		13.337.320	100	97,43	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	63		63		100		
5.02	**KEUANGAN**			**335.050.939.772**		69.555.631.183	**123,25**	**20,76**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**85.117.253.456**		57.226.370.770	**35,57**	**67,23**	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			85,14		0		
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			36.659.400		36.162.000	20	98,64	
	Jumlah dokumen Perencanaan Anggaran Daerah yang dihasilkan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10		2		20		
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			36.659.400		36.162.000	20	98,64	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10		2		20		
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			83.788.879.014		56.184.015.108	63,39	67,05	
	Jumlah pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	49		14		28,57		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12		3		25		
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1		1		100		
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			83.303.194.114		55.769.033.909	28,57	66,95	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	49		14		28,57		
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			350.327.900		303.000.000	100	86,49	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			127.964.900		111.653.999	25	87,25	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12		3		25		
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			7.392.100		327.200	100	4,43	
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1		1		100		
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			52.472.800		-	0	0	
	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2		0		0		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50		0		0		
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			40.735.000		-	0	0	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2		0		0		
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			11.737.800		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50		0		0		
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			246.839.400		89.198.438	33,28	36,14	
	Jumlah pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		3		25		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		3		25		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		3		25		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	86		50		58,14		
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.314.600		5.314.600	25	100	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		3		25		
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			63.905.000		63.884.500	25	99,97	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		3		25		
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			19.999.800		19.999.338	25	100	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		3		25		
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			157.620.000		-	58,14	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	86		50		58,14		
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			25.263.600		22.191.000	0	87,84	
	Jumlah sarana dan prasarana penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		0		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		22.191.000	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		0		
5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			25.263.600		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			824.650.342		768.657.469	43,75	93,21	
	Realisasi jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	108		108		100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		25		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		25		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		25		
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			15.173.200		14.980.800	100	98,73	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	108		108		100		
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			133.324.954		95.042.598	25	71,29	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		25		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			31.972.400		31.913.033	25	99,81	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		25		
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			644.179.788		626.721.038	25	97,29	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		25		
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			142.488.900		126.146.755	32,43	88,53	
	Jumlah unit Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	19		9		47,37		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	19		9		47,37		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		7		35		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			96.272.300		88.565.650	47,37	91,99	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	19		9		47,37		
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			10.700.000		7.829.579	47,37	73,17	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	19		9		47,37		
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			16.700.000		15.935.000	35	95,42	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		7		35		
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		13.816.526	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		0		
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			18.816.600		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			**240.219.525.380**		3.637.257.036	**234,08**	**1,51**	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Meningkatnya tata kelola anggaran, tata kelola perbendaharaan, dan tata kelola akuntansi serta pelaporan	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel (%)	100		0		0		
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)			0		0		
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)			0		0		
		Persentase Penurunan SILPA (Persentase)			0		0		
		Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)			95,54		0		
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			1.718.514.400		1.733.717.644	315,4	100,88	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Jumlah dokumen Perencanaan Anggaran Daerah yang dihasilkan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2		2		100		
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2		50		2500		
		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	50		0		0		
		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	50		50		100		
		Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	50		50		100		
		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	50		2		4		
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2		2		100		
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2		2		100		
		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	2		3		150		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	12		0		0		
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			95.370.600		86.774.982	100	90,99	
	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2		2		100		
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			97.770.500		46.851.800	2500	47,92	
	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2		50		2500		
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD			63.490.600		60.873.096	0	95,88	
	Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	50		0		0		
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			62.962.100		45.962.000	100	73	
	Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	50		50		100		
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD			51.687.100		49.905.000	100	96,55	
	Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	50		50		100		
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			55.443.200		502.959.633	4	907,16	
	Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	50		2		4		
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			621.738.300		332.089.600	100	53,41	
	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2		2		100		
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			571.443.700		5.400.000	100	0,94	
	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2		2		100		
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			15.425.800		69.750.000	150	452,16	
	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	2		3		150		
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah			83.182.500		533.151.533	0	640,94	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	12		0		0		
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			408.382.600		1.225.175.949	504,74	300,01	
	Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	950		9.500		1000		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	9500		900		9,47		
		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga	0		18,18		0		
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			128.690.500		343.522.533	1000	266,94	
	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	950		9.500		1000		
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			279.692.100		-	9,47	0	
	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	9500		900		9,47		
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			-		881.653.416	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	0		18,18		0		
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			1.004.094.400		678.363.443	16,67	67,56	
	Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	18		0		0		
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	2		1		50		
		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	1		0		0		
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			309.455.500		373.434.323	0	120,67	
	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	18		0		0		
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			426.971.800		152.464.560	50	35,71	
	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	2		1		50		
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			267.667.100		152.464.560	0	56,96	
	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	1		0		0		
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			237.088.533.980		-	0	0	
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	12		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	12		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	12		0		0		
5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			9.254.225.286		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	12		0		0		
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			226.698.887.330		-	0	0	
	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	12		0		0		
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			1.135.421.364		-	0	0	
	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	12		0		0		
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			**1.080.924.388**		905.925.848	**30,97**	**83,81**	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)			100		0		
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			1.080.924.388		905.925.848	30,97	83,81	
	Jumlah dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	2		1		50		
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2		1		50		
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	3		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	1		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	70		31		44,29		
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	202		106		52,48		
		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	5		1		20		
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga			185.752.900		176.660.000	50	95,1	
	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	2		1		50		
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			102.012.200		94.061.000	50	92,21	
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2		1		50		
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah			194.565.800		162.645.020	0	83,59	
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	3		0		0		
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah			-		-	0	0	
	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	1		0		0		
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah			256.444.800		211.938.840	44,29	82,65	
	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	70		31		44,29		
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			183.250.688		117.179.288	52,48	63,94	
	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	202		106		52,48		
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			158.898.000		143.441.700	20	90,27	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	5		1		20		
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6.662.799.008**		6.247.864.931	**116,67**	**93,77**	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			68.643.600		68.257.391	100	99,44	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	25		25		100		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		4		100		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		3		100		
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			15.650.000		15.624.638	100	99,84	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	25		25		100		
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			30.092.600		29.817.553	100	99,09	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		4		100		
5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			22.901.000		22.815.200	100	99,63	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		3		100		
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%%)	100		100		100		
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			100		0		
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			34.220.100		32.544.000	100	95,1	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12		12		100		
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			34.220.100		32.544.000	100	95,1	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12		12		100		
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.882.744.770		5.536.602.773	100	94,12	
	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	59		59		100		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.747.084.770		5.401.554.773	100	93,99	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	59		59		100		
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			135.660.000		135.048.000	100	99,55	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			120.690.000		120.690.000	400	100	
	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2		8		400		
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			120.690.000		120.690.000	400	100	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2		8		400		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			109.763.800		86.036.002	100	78,38	
	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8		8		100		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	59		59		100		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	33		33		100		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50		50		100		
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			19.203.800		19.202.400	100	99,99	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8		8		100		
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			14.000.000		14.000.000	100	100	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	59		59		100		
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			11.050.000		7.125.000	100	64,48	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	33		33		100		
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			65.510.000		45.708.602	100	69,77	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50		50		100		
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			362.574.038		323.671.078	100	89,27	
	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.175.000		635.900	100	12,29	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		100		
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			83.718.410		69.925.900	100	83,53	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			129.390.800		127.162.307	100	98,28	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			144.289.828		125.946.971	100	87,29	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			84.162.700		80.063.687	100	95,13	
	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18		18		100		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	39		39		100		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		3		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			52.138.500		49.356.687	100	94,66	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18		18		100		
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			7.800.000		6.500.000	100	83,33	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	39		39		100		
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			24.224.200		24.207.000	100	99,93	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		3		100		
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			**1.970.437.540**		1.538.212.598	**163,46**	**78,06**	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan, kualitas pengawasan dan pelaporan serta	Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	10,89		0		0		
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)			100		0		
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)			0		0		
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)			0		0		
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			1.970.437.540		1.538.212.598	163,46	78,06	
	Tersedianya Dokumen kegiatan pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	4		12		300		
		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	4		11		275		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	9		9		100		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	16		16		100		
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	12		12		100		
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	12		12		100		
		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	300		300		100		
		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	12		6		50		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	12		12		100		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	12		12		100		
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	12		12		100		
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	12		12		100		
		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	2		12		600		
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			5.867.200		5.093.042	300	86,81	
	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	4		12		300		
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			113.823.700		79.260.179	275	69,63	
	Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	4		11		275		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			21.333.800		10.501.900	100	49,23	
	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	9		9		100		
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			602.761.640		255.732.700	100	42,43	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	16		16		100		
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			379.846.100		378.832.700	100	99,73	
	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	12		12		100		
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			159.759.500		156.388.835	100	97,89	
	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	12		12		100		
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			92.787.100		79.041.500	100	85,19	
	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	300		300		100		
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			47.584.700		46.994.850	50	98,76	
	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	12		6		50		
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah			389.114.100		386.440.211	100	99,31	
	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	12		12		100		
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			44.585.100		30.510.000	100	68,43	
	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	12		12		100		
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			47.369.700		46.614.178	100	98,41	
	Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	12		12		100		
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			43.468.800		43.271.020	100	99,55	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	12		12		100		
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			22.136.100		19.531.483	600	88,23	
	Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	2		12		600		
5.03	**KEPEGAWAIAN**			**6.471.996.296**		2.930.071.007	**35,28**	**45,27**	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.440.297.596**		2.930.071.007	**49,8**	**85,17**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			99,2		0		
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			33.177.500		29.506.400	73,33	88,93	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		4		80		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6		4		66,67		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			13.221.300		9.993.600	80	75,59	
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		4		80		
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			19.956.200		19.512.800	66,67	97,78	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6		4		66,67		
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.140.446.808		2.900.564.607	350	92,36	
	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14		14		100		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2		12		600		
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.073.816.008		2.834.705.607	100	92,22	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14		14		100		
5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			66.630.800		65.859.000	600	98,84	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2		12		600		
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			33.407.300		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	296		0		0		
5.03.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun			33.407.300		-	0	0	
	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	296		0		0		
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			95.361.000		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		0		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		0		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		0		0		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		0		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7		0		0		
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			998.100		-	0	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			13.887.900		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		0		
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10.500.000		-	0	0	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			8.750.000		-	0	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		0		0		
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			-		-	0	0	
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		0		
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			61.225.000		-	0	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7		0		0		
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			46.015.600		-	0	0	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9		0		0		
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			46.015.600		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9		0		0		
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			42.530.394		-	0	0	
	Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		0		0		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			24.099.500		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		0		0		
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			18.430.894		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			49.358.994		-	0	0	
	Dokumen Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6		0		0		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3		0		0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		0		
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			47.358.994		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6		0		0		
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.000.000		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3		0		0		
5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.000.000		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		0		
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**			**3.031.698.700**		-	**0**	**0**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian, pengembangan kompetensi ASN, tata kelola	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)			4,37		0		
		Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)					0		
		Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)					0		
		Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)					0		
		Persentase Kepegawaian Daerah (%)	100		97,25		97,25		
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			239.572.100		-	0	0	
	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	1		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			220.959.100		-	0	0	
	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	1		0		0		
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			18.613.000		-	0	0	
	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			99.840.600		-	0	0	
	Jumlah Dokumen Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	1		0		0		
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			99.840.600		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	1		0		0		
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN			2.663.136.600		-	0	0	
	Jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	74		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)	1		0		0		
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			335.000.000		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	74		0		0		
5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			2.328.136.600		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)	1		0		0		
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			29.149.400		-	0	0	
	Jumlah pegawai dengan SKP bernilai baik	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	5		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	2		0		0		
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			14.679.700		-	0	0	
	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	5		0		0		
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			14.469.700		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	2		0		0		
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			**360.454.300**		-	**0**	**0**	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**			**360.454.300**		-	**0**	**0**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional, kualitas analisis	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)			43		0		
		Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)					0		
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)					0		
		Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)					0		
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			360.454.300		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen Sertifikasi,Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan	1		0		0		
5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan			360.454.300		-	0	0	
	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun (Dokumen)	1		0		0		
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**1.713.762.800**		1.511.536.344	**46,15**	**88,2**	
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			**1.713.762.800**		1.511.536.344	**46,15**	**88,2**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan	Jumlah Inovasi Urusan Wajib Pelayanan Dasar Yang Dilaporkan (Angka)			3		0		
		Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)			100		0		
		Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)			100		0		
		Jumlah Inovasi Daerah Yang Dilaporkan (Angka)			15		0		
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			201.043.600		176.158.108	50	87,62	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	5		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan)	2		2		100		
		Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	3		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (Laporan)	7		7		100		
5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum			-		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	5		0		0		
5.05.02.2.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi			20.596.400		14.088.400	100	68,4	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan)	2		2		100		
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan			-		-	0	0	
	Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	3		0		0		
5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan			180.447.200		162.069.708	100	89,82	
	Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (Laporan)	7		7		100		
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			273.964.300		232.564.500	50	84,89	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	1		1		100		
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	2		0		0		
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial			273.964.300		232.564.500	100	84,89	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	1		1		100		
5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata			-		-	0	0	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	2		0		0		
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			744.691.100		661.110.122	50	88,78	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	1		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	3		3		100		
5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup			-		-	0	0	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	1		0		0		
5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum			744.691.100		661.110.122	100	88,78	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	3		3		100		
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			494.063.800		441.703.614	40	89,4	
	Terlaksananya Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	1		1		100		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)	1		1		100		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	1		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	1		0		0		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	1		0		0		
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			341.429.200		327.540.094	100	95,93	
	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	1		1		100		
5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi			152.634.600		114.163.520	100	74,8	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)	1		1		100		
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			-		-	0	0	
	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	1		0		0		
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			-		-	0	0	
	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	1		0		0		
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			-		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	1		0		0		
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**			**5.336.310.179**		5.049.578.519	**183,09**	**94,63**	
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.618.751.479**		4.333.531.119	**105,1**	**93,82**	INSPEKTORAT DAERAH
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100		96,92		96,92		
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			100		0		
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			41.759.900		62.369.900	108,33	149,35	
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12		10		83,33		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3		4		133,33		
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			13.730.000		34.340.000	83,33	250,11	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12		10		83,33		
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			28.029.900		28.029.900	133,33	100	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3		4		133,33		
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.835.191.702		3.536.439.375	88,38	92,21	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	44		14		31,82		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12		14		116,67		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		14		116,67		
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.759.806.002		3.461.060.875	31,82	92,05	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	44		14		31,82		
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			6.385.700		6.378.500	116,67	99,89	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12		14		116,67		
6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			69.000.000		69.000.000	116,67	100	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		14		116,67		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			357.795.200		355.196.098	45,99	99,27	
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	44		0		0		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	212		195		91,98		
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			-		-	0	0	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	44		0		0		
6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			357.795.200		355.196.098	91,98	99,27	
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	212		195		91,98		
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			154.065.780		154.054.460	150	99,99	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10000000		1		0		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		9		450		
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.906.800		1.906.000	100	99,96	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			8.686.900		8.682.000	100	99,94	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			750.000		750.000	100	100	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100		
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			4.532.000		4.527.000	0	99,89	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10000000		1		0		
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			138.190.080		138.189.460	450	100	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		9		450		
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			80.516.778		80.229.649	93,28	99,64	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	60		39		65		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	51		62		121,57		
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			15.932.000		15.931.650	65	100	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	60		39		65		
6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			64.584.778		64.297.999	121,57	99,56	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	51		62		121,57		
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			46.847.019		44.254.711	97,22	94,47	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		11		91,67		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			45.419.800		42.828.192	91,67	94,29	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		11		91,67		
6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			640.219		639.619	100	99,91	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			787.000		786.900	100	99,99	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			102.575.100		100.986.926	100	98,45	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15		15		100		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		4		100		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100		
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			90.399.900		88.851.926	100	98,29	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15		15		100		
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.100.000		2.100.000	100	100	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		4		100		
6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			10.075.200		10.035.000	100	99,6	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100		
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**			**508.169.000**		507.187.800	**443,67**	**99,81**	INSPEKTORAT DAERAH
	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (%)	100		96,38		96,38		
		Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)			100		0		
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			429.731.400		428.891.300	504,04	99,8	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	4		103		2575		
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	12		8		66,67		
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	9		9		100		
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	65		65		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	70		55		78,57		
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	50		52		104		
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			67.435.600		66.997.000	2575	99,35	
	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	4		103		2575		
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			24.773.600		24.763.000	66,67	99,96	
	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	12		8		66,67		
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja			11.313.100		11.141.200	100	98,48	
	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	9		9		100		
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan			45.997.600		45.985.000	100	99,97	
	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	65		65		100		
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa			183.001.200		182.797.600	78,57	99,89	
	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	70		55		78,57		
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			97.210.300		97.207.500	104	100	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	50		52		104		
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			78.437.600		78.296.500	81,48	99,82	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	27		22		81,48		
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			78.437.600		78.296.500	81,48	99,82	
	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	27		22		81,48		
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**			**209.389.700**		208.859.600	**50,99**	**99,75**	INSPEKTORAT DAERAH
	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan (%)	100		99,73		99,73		
		Persentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (%)			96,38		0		
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			23.599.700		23.238.600	1,97	98,47	
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	152		3		1,97		
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			23.599.700		23.238.600	1,97	98,47	
	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	152		3		1,97		
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			185.790.000		185.621.000	100	99,91	
	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	232		232		100		
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			185.790.000		185.621.000	100	99,91	
	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	232		232		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
7.01	**KECAMATAN**			**41.637.682.538**		46.150.228.571	**155,96**	**110,84**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.060.932.708**		3.804.328.773	**605,61**	**93,68**	KECAMATAN ALOK
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			100		0		
		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100		100		100		
		Persentase Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan SKPD (persentase)	100		0		0		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.280.000		6.270.000	100	99,84	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10		10		100		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6.280.000		6.270.000	100	99,84	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10		10		100		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.478.795.091		3.245.633.938	747,62	93,3	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	44		616		1400		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	63		60		95,24		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.358.339.691		3.129.988.538	1400	93,2	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	44		616		1400		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			120.455.400		115.645.400	95,24	96,01	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	63		60		95,24		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			117.879.800		116.940.098	80	99,2	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		10		100		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8		8		100		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		5		100		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		5		100		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	36		0		0		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.863.300		3.863.300	100	100	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		10		100		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			58.600.400		57.785.592	100	98,61	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8		8		100		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			39.522.400		39.411.260	100	99,72	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		5		100		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			15.893.700		15.879.946	100	99,91	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		5		100		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			-		-	0	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	36		0		0		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			68.102.100		66.600.373	1986,61	97,79	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		79		7900		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	11		5		45,45		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	100		1		1		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			18.050.200		18.031.493	7900	99,9	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		79		7900		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			39.788.500		38.306.930	45,45	96,28	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	11		5		45,45		
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		10.261.950	1	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	100		1		1		
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			10.263.400		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			328.957.966		311.566.081	46,87	94,71	
	Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	132		60		45,45		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	87		42		48,28		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			77.258.322		59.918.877	45,45	77,56	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	132		60		45,45		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			251.699.644		251.647.204	48,28	99,98	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	87		42		48,28		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			60.917.751		57.318.283	86,67	94,09	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3		0		0		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9		12		133,33		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15		19		126,67		
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			19.194.900		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			37.622.851		53.218.283	133,33	141,45	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9		12		133,33		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4.100.000		4.100.000	126,67	100	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15		19		126,67		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**82.355.000**		82.345.000	**24,32**	**99,99**	KECAMATAN ALOK
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)			100		0		
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100		100		100		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			82.355.000		82.345.000	24,32	99,99	
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	148		36		24,32		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			82.355.000		82.345.000	24,32	99,99	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	148		36		24,32		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**904.581.900**		902.522.943	**61,04**	**99,77**	KECAMATAN ALOK
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			2.330.000		-	0	0	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			2.330.000		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)			100		0		
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100		99,99		99,99		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			9.710.000		9.700.000	100	99,9	
	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	10		10		100		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			9.710.000		9.700.000	100	99,9	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	10		10		100		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			892.541.900		892.822.943	66,55	100,03	
	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	132		36		27,27		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	12		13		108,33		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	37		46		124,32		
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	159		10		6,29		
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			17.538.600		17.538.600	27,27	100	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	132		36		27,27		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			33.268.300		34.643.428	108,33	104,13	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	12		13		108,33		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			829.070.000		827.980.915	124,32	99,87	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	37		46		124,32		
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan			12.665.000		12.660.000	6,29	99,96	
	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	159		10		6,29		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**16.090.000**		-	**0**	**0**	KECAMATAN ALOK
	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)			100		0		
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100		100		100		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			16.090.000		-	0	0	
	Terlaksannya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	2		0		0		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			16.090.000		-	0	0	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	2		0		0		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**7.773.700**		-	**0**	**0**	KECAMATAN ALOK
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100		100		100		
		persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)			100		0		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			7.773.700		-	0	0	
	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	3		0		0		
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			7.773.700		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	3		0		0		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.597.556.951**		11.758.884.474	**406,12**	**326,86**	KECAMATAN ALOK BARAT
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Capaian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan (Persentase)	100		100		100		
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			100		0		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14.978.300		65.409.660	708,33	436,7	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0		7		0		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12		85		708,33		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-		13.697.560	0	0	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0		7		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			14.978.300		51.712.100	708,33	345,25	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12		85		708,33		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.025.278.291		9.999.317.850	2502,5	330,53	
	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	38		1.900		5000		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		3		5		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.879.046.891		9.446.259.050	5000	328,1	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	38		1.900		5000		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			146.231.400		553.058.800	5	378,21	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		3		5		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			95.551.292		314.137.431	0	328,76	
	Tersedainya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		0		0		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	30		0		0		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	19		0		0		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	18		0		0		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	16		0		0		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.868.500		13.697.560	0	354,08	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		0		0		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			54.474.300		184.255.988	0	338,24	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	30		0		0		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			6.460.600		12.921.200	0	200	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	19		0		0		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			13.297.892		48.562.683	0	365,19	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	18		0		0		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			17.450.000		54.700.000	0	313,47	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	16		0		0		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			164.556.100		89.653.000	0	54,48	
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	115		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	16		0		0		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			44.826.500		89.653.000	0	200	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	115		0		0		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			119.729.600		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	16		0		0		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			235.222.168		883.542.664	85,76	375,62	
	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	37		0		0		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	108		180		166,67		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	96		87		90,63		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			684.000		5.728.980	0	837,57	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	37		0		0		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			42.665.452		128.493.025	166,67	301,16	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	108		180		166,67		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			191.872.716		749.320.659	90,63	390,53	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	96		87		90,63		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			61.970.800		406.823.869	233,33	656,48	
	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		0		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9		84		933,33		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	14		0		0		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.226.100		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		0		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			50.944.700		167.364.069	933,33	328,52	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9		84		933,33		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			9.800.000		239.459.800	0	2443,47	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	14		0		0		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**66.920.000**		-	**0**	**0**	KECAMATAN ALOK BARAT
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)			100		0		
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Persentase)	100		100		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			66.920.000		-	0	0	
	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	150		0		0		
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	14		0		0		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			17.150.000		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	150		0		0		
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			49.770.000		-	0	0	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	14		0		0		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**933.442.900**		6.720.000	**6,36**	**0,72**	KECAMATAN ALOK BARAT
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)			100		0		
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Persentase)	100		100		100		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			12.527.600		6.720.000	31,82	53,64	
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	22		7		31,82		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			12.527.600		6.720.000	31,82	53,64	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	22		7		31,82		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			920.915.300		-	0	0	
	Terlaksananya Kegiatan Pemeberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	111		0		0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	46		0		0		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	489		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	198		0		0		
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			27.269.300		-	0	0	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	111		0		0		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			36.744.300		-	0	0	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	46		0		0		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			822.281.700		-	0	0	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	489		0		0		
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan			34.620.000		-	0	0	
	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	198		0		0		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.229.375.645**		3.973.417.611	**48,54**	**93,95**	KECAMATAN ALOK TIMUR
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	[deleted]1 ()					0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	[deleted] ()	[deleted] ()			100		0		
	[deleted] ()	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota [deleted] (%)	100		100		100		
	[deleted] ()	Persentase Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan (%)	100		100		100		
	[deleted] ()	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			0		0		
	[deleted] ()	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (%)	100		100		100		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8.800.500		8.360.000	128,57	94,99	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14		18		128,57		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			8.800.500		8.360.000	128,57	94,99	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	14		18		128,57		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.565.296.884		3.339.704.261	58,7	93,67	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	48		48		100		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	69		12		17,39		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.417.143.856		3.196.701.245	100	93,55	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	48		48		100		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			148.153.028		143.003.016	17,39	96,52	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	69		12		17,39		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			105.124.140		102.057.606	5,93	97,08	
	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8		1		12,5		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		0		0		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	19		1		5,26		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	18		1		5,56		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	63		4		6,35		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.428.800		7.324.000	12,5	98,59	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8		1		12,5		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			42.448.540		42.182.910	0	99,37	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		0		0		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			20.630.000		20.503.000	5,26	99,38	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	19		1		5,26		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			15.246.800		14.967.696	5,56	98,17	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	18		1		5,56		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			19.370.000		17.080.000	6,35	88,18	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	63		4		6,35		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			101.942.600		100.797.364	119,44	98,88	
	Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		1		100		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			2.548.400		2.497.500	100	98	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		1		100		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	18		25		138,89		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			99.394.200		98.299.864	138,89	98,9	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	18		25		138,89		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			319.055.413		306.120.658	12,06	95,95	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	63		3		4,76		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			85.721.219		73.410.170	4,76	85,64	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	63		3		4,76		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	62		12		19,35		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			233.334.194		232.710.488	19,35	99,73	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	62		12		19,35		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			129.156.108		116.377.722	63,13	90,11	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14		14		100		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			102.019.308		89.789.212	100	88,01	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14		14		100		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	33		13		39,39		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			9.750.000		9.499.950	39,39	97,44	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	33		13		39,39		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		2		50		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			17.386.800		17.088.560	50	98,28	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		2		50		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**126.344.700**		99.792.453	**2,99**	**78,98**	KECAMATAN ALOK TIMUR
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100		100		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
		Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)			0		0		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			126.344.700		99.792.453	2,99	78,98	
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	67		4		5,97		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			126.344.700		99.792.453	5,97	78,98	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	67		4		5,97		
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1		0		0		
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			-		-	0	0	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1		0		0		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.226.383.000**		1.217.479.799	**14,15**	**99,27**	KECAMATAN ALOK TIMUR
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan (%)	100		100		100		
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (%)	100		100		100		
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)			0		0		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			18.391.400		18.150.000	0	98,69	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	8		0		0		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			18.391.400		18.150.000	0	98,69	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	8		0		0		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.207.991.600		1.199.329.799	17,69	99,28	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	35		8		22,86		
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			19.915.490		19.653.371	22,86	98,68	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	35		8		22,86		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	31		5		16,13		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			209.048.100		208.461.462	16,13	99,72	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	31		5		16,13		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	44		11		25		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			964.382.840		961.056.966	25	99,66	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	44		11		25		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	59		4		6,78		
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan			14.645.170		10.158.000	6,78	69,36	
	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	59		4		6,78		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**31.945.000**		31.944.811	**18,89**	**100**	KECAMATAN ALOK TIMUR
	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)			0		0		
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100		100		100		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			31.945.000		31.944.811	18,89	100	
	Jumlah Laporan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,	15		1		6,67		
		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	6		1		16,67		
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			6.415.000		6.414.811	6,67	100	
	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	15		1		6,67		
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			5.730.000		5.730.000	16,67	100	
	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	6		1		16,67		
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12		4		33,33		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			19.800.000		19.800.000	33,33	100	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12		4		33,33		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**13.082.000**		13.026.000	**66,67**	**99,57**	KECAMATAN ALOK TIMUR
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)			0		0		
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100		100		100		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			13.082.000		13.026.000	66,67	99,57	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	3		2		66,67		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			13.082.000		13.026.000	66,67	99,57	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	3		2		66,67		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.259.674.126**		1.128.624.176	**54,55**	**89,6**	KECAMATAN BOLA
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			100		0		
		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (%)	100		75,49		75,49		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.000.000		3.780.000	62,5	63	
	Tersedianya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8		5		62,5		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6.000.000		3.780.000	62,5	63	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8		5		62,5		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.151.538.140		1.068.087.585	96,67	92,75	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	tersedianya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15		14		93,33		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.119.980.540		1.037.487.585	93,33	92,63	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15		14		93,33		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			31.557.600		30.600.000	100	96,97	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.167.000		2.625.000	33,33	62,99	
	Terlaksananya administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		0		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	40		0		0		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.086.000		-	0	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		0		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.625.000		2.625.000	100	100	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			456.000		-	0	0	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	40		0		0		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			22.762.000		12.518.580	20	55	
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		1		20		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			22.762.000		12.518.580	20	55	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		1		20		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			27.235.254		20.266.194	44,44	74,41	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24		8		33,33		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	10		0		0		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			8.831.860		2.961.000	33,33	33,53	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24		8		33,33		
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.098.200		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	10		0		0		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			17.305.194		17.305.194	100	100	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			47.971.732		21.346.817	66,67	44,5	
	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		5		100		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		5		100		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			10.241.580		4.259.900	100	41,59	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		5		100		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			35.230.152		17.086.917	100	48,5	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		5		100		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2.500.000		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**115.998.000**		21.617.460	**12,5**	**18,64**	KECAMATAN BOLA
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			43.697.300		-	0	0	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	2		0		0		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			43.697.300		-	0	0	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	2		0		0		
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100		28,57		28,57		
		Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)			100		0		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			72.300.700		21.617.460	25	29,9	
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12		3		25		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			72.300.700		21.617.460	25	29,9	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12		3		25		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**13.710.620**		6.720.000	**140**	**49,01**	KECAMATAN BOLA
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)			100		0		
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100		87,5		87,5		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			13.710.620		6.720.000	140	49,01	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Di tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	5		7		140		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			13.710.620		6.720.000	140	49,01	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	5		7		140		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**20.769.300**		9.500.000	**50**	**45,74**	KECAMATAN BOLA
	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan	Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum (%)	100		50		50		
		Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)			100		0		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			20.769.300		9.500.000	50	45,74	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	12		0		0		
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12		12		100		
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			8.284.300		-	0	0	
	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	12		0		0		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			12.485.000		9.500.000	100	76,09	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12		12		100		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**18.586.800**		-	**0**	**0**	KECAMATAN BOLA
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa (%)	100		0		0		
		persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)			100		0		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			18.586.800		-	0	0	
	Tersedianya Faslitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	8		0		0		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	8		0		0		
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	2		0		0		
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			11.486.800		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	8		0		0		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			7.100.000		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	8		0		0		
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			-		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	2		0		0		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.214.339.435**		1.108.218.095	**178,46**	**91,26**	KECAMATAN DORENG
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100		88,06		88,06		
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)					0		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.000.000		6.000.000	100	100	
	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12		12		100		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6.000.000		6.000.000	100	100	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12		12		100		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.076.664.700		1.019.433.904	900	94,68	
	Tersekenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	13		182		1400		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3		12		400		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.043.078.800		987.105.304	1400	94,63	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	13		182		1400		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			33.585.900		32.328.600	400	96,26	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3		12		400		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			15.680.500		14.986.100	62,5	95,57	
	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		1		50		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			694.400		-	0	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.836.100		4.836.100	100	100	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			9.325.000		9.325.000	100	100	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			825.000		825.000	50	100	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		1		50		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			23.355.400		12.520.000	1	53,61	
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	50		1		2		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		0		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			12.520.000		12.520.000	2	100	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	50		1		2		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10.835.400		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		0		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			23.345.327		22.067.791	87,5	94,53	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Tersedianyanya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		9		75		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.199.033		1.510.000	100	68,67	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			21.146.294		20.557.791	75	97,22	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		9		75		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			69.293.508		33.210.300	57,14	47,93	
	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7		12		171,43		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		0		0		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			66.810.908		33.210.300	171,43	49,71	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7		12		171,43		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.000.000		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		0		0		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.482.600		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**93.611.700**		80.670.000	**100**	**86,18**	KECAMATAN DORENG
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100		100		100		
		Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)					0		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			93.611.700		80.670.000	100	86,18	
	Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12		12		100		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			93.611.700		80.670.000	100	86,18	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12		12		100		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**14.429.120**		12.200.000	**9**	**84,55**	KECAMATAN DORENG
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100		100		100		
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)					0		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			14.429.120		12.200.000	9	84,55	
	Terselenggaranya Koordinasi penberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	100		9		9		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			14.429.120		12.200.000	9	84,55	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	100		9		9		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**9.000.000**		9.000.000	**12**	**100**	KECAMATAN DORENG
	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100		100		100		
		Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)					0		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			9.000.000		9.000.000	12	100	
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	100		12		12		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			9.000.000		9.000.000	12	100	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	100		12		12		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**1.800.000**		-	**0**	**0**	KECAMATAN DORENG
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (%)	100		99,99		99,99		
		persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)					0		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			1.800.000		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi,Rekomendasi dan Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	100		0		0		
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	100		0		0		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			900.000		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	100		0		0		
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			900.000		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	100		0		0		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.275.859.430**		1.137.147.904	**167,36**	**89,13**	KECAMATAN HEWOKLOANG
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Persentase)	100		75,2		75,2		
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			64,85		0		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.553.000		7.540.000	120	99,83	
	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		12		120		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.553.000		7.540.000	120	99,83	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		12		120		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.147.084.026		1.046.338.552	727,86	91,22	
	Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14		187		1335,71		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	10		12		120		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.111.130.326		1.010.388.552	1335,71	90,93	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14		187		1335,71		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			35.953.700		35.950.000	120	99,99	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	10		12		120		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			10.628.500		6.360.500	100	59,84	
	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		100		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		100		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		100		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.224.300		3.910.500	100	74,85	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		100		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			3.150.000		750.000	100	23,81	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		100		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.254.200		1.700.000	100	75,41	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		100		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			12.724.000		-	0	0	
	Tersedianya barang Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		0		0		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7		0		0		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			4.552.000		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		0		0		
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			8.172.000		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7		0		0		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			48.959.910		44.773.288	87,5	91,45	
	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	16		12		75		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			4.624.922		3.456.500	100	74,74	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			44.334.988		41.316.788	75	93,19	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	16		12		75		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			48.909.994		32.135.564	41,67	65,7	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		4		100		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		1		25		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			47.709.994		31.435.564	100	65,89	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		4		100		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.200.000		700.000	25	58,33	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		1		25		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**65.520.000**		65.520.000	**50**	**100**	KECAMATAN HEWOKLOANG
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)			100		0		
		Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Persentase)	100		100		100		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			65.520.000		65.520.000	50	100	
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12		12		100		
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1		0		0		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			65.520.000		65.520.000	100	100	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12		12		100		
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			-		-	0	0	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1		0		0		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**10.268.630**		10.268.630	**100**	**100**	KECAMATAN HEWOKLOANG
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)			100		0		
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Persentase)	100		100		100		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			10.268.630		10.268.630	100	100	
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7		7		100		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			10.268.630		10.268.630	100	100	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7		7		100		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			-		-	**0**	**0**	KECAMATAN HEWOKLOANG
	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)			100		0		
		Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Persentase)	100		0		0		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			-		-	0	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	50		0		0		
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			-		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	50		0		0		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**9.440.000**		9.440.000	**100**	**100**	KECAMATAN HEWOKLOANG
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)			100		0		
		Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persentase)	100		100		100		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			9.440.000		9.440.000	100	100	
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	14		14		100		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			9.440.000		9.440.000	100	100	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	14		14		100		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.743.928.586**		1.582.912.122	**157,63**	**90,77**	KECAMATAN KANGAE
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Persentase peningkatan pelayanan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	100		85,86		85,86		
		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ()					0		
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)					0		
		Persentse Hasil Koordinasi dan penyusunan laporan capaina kinerja dan iktisar realisasi kinerja dan Keuangan SKPD ()					0		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.000.000		6.000.000	100	100	
	Tersedianya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12		12		100		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6.000.000		6.000.000	100	100	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12		12		100		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.296.679.724		1.159.897.093	788,89	89,45	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18		266		1477,78		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.264.879.724		1.128.097.093	1477,78	89,19	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18		266		1477,78		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			31.800.000		31.800.000	100	100	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			11.032.700		14.684.300	59,94	133,1	
	Terlaksananya Adminostrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	17		18		105,88		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	38		9		23,68		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4		4		100		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	40		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9258		5.097		55,06		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		9		75		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.316.600		3.583.500	105,88	272,18	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	17		18		105,88		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.457.700		590.500	23,68	40,51	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	38		9		23,68		
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1.292.000		1.276.700	100	98,82	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4		4		100		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1.000.000		-	0	0	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	40		0		0		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			5.966.400		2.263.600	55,06	37,94	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9258		5.097		55,06		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			-		6.970.000	75	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		9		75		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			29.662.100		29.573.998	75	99,7	
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3		3		100		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		1		50		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			6.032.000		6.031.000	100	99,98	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3		3		100		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			23.630.100		23.542.998	50	99,63	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		1		50		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			42.855.588		34.256.788	100	79,94	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			15.460.994		15.297.694	100	98,94	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		100		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12.315.000		3.938.900	100	31,98	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			15.079.594		15.020.194	100	99,61	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			357.698.474		338.499.943	87,5	94,63	
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		3		150		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		2		100		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3		0		0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100		
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			18.905.194		17.446.802	150	92,29	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		3		150		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			24.360.800		8.729.141	100	35,83	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		2		100		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.450.000		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3		0		0		
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			312.982.480		312.324.000	100	99,79	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**84.022.500**		58.801.000	**50**	**69,98**	KECAMATAN KANGAE
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			21.242.200		-	0	0	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12		0		0		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			21.242.200		-	0	0	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12		0		0		
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik ()			77,68		0		
		Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)					0		
		Preentase Layanan Publik Kecamatan ()					0		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			62.780.300		58.801.000	100	93,66	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintah Di tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12		12		100		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			62.780.300		58.801.000	100	93,66	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12		12		100		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**16.966.200**		1.067.000	**66,67**	**6,29**	KECAMATAN KANGAE
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ()			100		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)					0		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			16.966.200		1.067.000	66,67	6,29	
	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	9		6		66,67		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			16.966.200		1.067.000	66,67	6,29	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	9		6		66,67		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**7.311.400**		1.977.000	**33,33**	**27,04**	KECAMATAN KANGAE
	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)					0		
		Persentase Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum ()			33,34		0		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			7.311.400		1.977.000	33,33	27,04	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	12		3		25		
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12		5		41,67		
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			4.250.000		910.000	25	21,41	
	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	12		3		25		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			3.061.400		1.067.000	41,67	34,85	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12		5		41,67		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**6.360.000**		-	**0**	**0**	KECAMATAN KANGAE
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Presentae Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa ()					0		
		persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)					0		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			6.360.000		-	0	0	
	Tersedianya Rekomendasi dan koordinasi Pengawasan Pemeritah Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	9		0		0		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	9		0		0		
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			2.040.000		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	9		0		0		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			4.320.000		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	9		0		0		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.564.928.238**		2.751.755.139	**43,61**	**175,84**	KECAMATAN KEWAPANTE
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Persentase peningkatan pelayanan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	100		81,84		81,84		
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)					0		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9.700.000		11.110.000	83,33	114,54	
	Terlaksananya Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12		10		83,33		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			9.700.000		11.110.000	83,33	114,54	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12		10		83,33		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.410.153.924		1.311.967.535	92,86	93,04	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14		12		85,71		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.372.264.124		1.274.937.535	85,71	92,91	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14		12		85,71		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			37.889.800		37.030.000	100	97,73	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			16.040.800		14.123.700	6,5	88,05	
	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		0,55		4,58		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		0,98		8,17		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		0,81		6,75		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.000.000		1.097.500	4,58	54,88	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		0,55		4,58		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			9.390.000		9.250.000	8,17	98,51	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		0,98		8,17		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			4.650.800		3.776.200	6,75	81,19	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		0,81		6,75		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			9.616.100		8.388.825	3,63	87,24	
	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12		0,87		7,25		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			-		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		0		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			9.616.100		8.388.825	7,25	87,24	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12		0,87		7,25		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			59.593.014		1.360.058.938	100	2282,25	
	Prosentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			17.419.826		1.319.515.800	100	7574,79	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			11.950.300		11.468.700	100	95,97	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			30.222.888		29.074.438	100	96,2	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			59.824.400		46.106.141	14,58	77,07	
	Jumlah Pendukung Penujang Pelaksanaan Tugas yang disediakan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12		1		8,33		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12		3		25		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12		2		16,67		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12		1		8,33		
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			50.245.200		41.538.600	8,33	82,67	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12		1		8,33		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2.200.000		1.272.541	25	57,84	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12		3		25		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4.500.000		3.145.000	16,67	69,89	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12		2		16,67		
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.879.200		150.000	8,33	5,21	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12		1		8,33		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**129.720.000**		128.300.000	**50**	**98,91**	KECAMATAN KEWAPANTE
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)			50		0		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			129.720.000		128.300.000	50	98,91	
	Meningkatnya pelayanan Administrasi Pelayanan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12		12		100		
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	13		0		0		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			128.400.000		128.300.000	100	99,92	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12		12		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1.320.000		-	0	0	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	13		0		0		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**19.240.000**		17.240.000	**100**	**89,6**	KECAMATAN KEWAPANTE
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)					0		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			19.240.000		17.240.000	100	89,6	
	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1		1		100		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			19.240.000		17.240.000	100	89,6	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1		1		100		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			-		-	**0**	**0**	KECAMATAN KEWAPANTE
	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)					0		
		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100		0		0		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			-		-	0	0	
	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	2		0		0		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			-		-	0	0	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	2		0		0		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**18.300.000**		18.300.000	**41,67**	**100**	KECAMATAN KEWAPANTE
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)					0		
		Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100		100		100		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			18.300.000		18.300.000	41,67	100	
	Fasilitasi PenyusunanPeraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	12		5		41,67		
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			18.300.000		18.300.000	41,67	100	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	12		5		41,67		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.177.219.947**		1.058.320.204	**220,1**	**89,9**	KECAMATAN KOTING
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100		91,82		91,82		
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			91,82		0		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.312.500		4.764.400	90	65,15	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		9		90		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.312.500		4.764.400	90	65,15	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		9		90		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.074.564.630		978.853.461	706,25	91,09	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	16		210		1312,5		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.046.645.430		950.934.261	1312,5	90,86	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	16		210		1312,5		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			27.919.200		27.919.200	100	100	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			24.087.600		20.334.676	8,33	84,42	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		1		8,33		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			19.302.600		15.897.076	8,33	82,36	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		1		8,33		
	Tersedianya Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0		1		0		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			2.955.000		2.995.000	0	101,35	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0		1		0		
	Tersedianya Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0		1		0		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.830.000		1.442.600	0	78,83	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0		1		0		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			28.877.123		20.774.273	50	71,94	
	Tersediannya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0		12		0		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			16.876.594		15.848.594	0	93,91	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0		12		0		
	Tersedianya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		6		50		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12.000.529		4.925.679	50	41,05	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		6		50		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			42.378.094		33.593.394	66,67	79,27	
	Terlaksananya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2		2		100		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			500.000		500.000	100	100	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2		2		100		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2.868.900		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		1		0		
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		1.360.000	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		1		0		
	Tersediannya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		4		100		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			39.009.194		31.733.394	100	81,35	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		4		100		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**46.034.300**		34.605.200	**100**	**75,17**	KECAMATAN KOTING
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan yang Terlaksana (Persentase)	100		83,33		83,33		
		Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)			100		0		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			46.034.300		34.605.200	100	75,17	
	Tersediannya Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12		12		100		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			46.034.300		34.605.200	100	75,17	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12		12		100		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.345.000**		1.345.000	**100**	**100**	KECAMATAN KOTING
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)			100		0		
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Persentase)	100		100		100		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			1.345.000		1.345.000	100	100	
	Terlaksananya Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7		7		100		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			1.345.000		1.345.000	100	100	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7		7		100		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**15.278.800**		15.198.800	**100**	**99,48**	KECAMATAN KOTING
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)			100		0		
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Persentase)	100		100		100		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			15.278.800		15.198.800	100	99,48	
	Tersediannya Dokumen fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	12		12		100		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			15.278.800		15.198.800	100	99,48	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	12		12		100		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.709.627.244**		1.538.389.599	**175**	**89,98**	KECAMATAN LELA

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			29.042.400		-	0	0	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3		0		0		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			29.042.400		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3		0		0		
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100		100		100		
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			100		0		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8.534.500		8.040.000	100	94,21	
	Terselenggaranya perencanaan, pengganggaran dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30		30		100		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			8.534.500		8.040.000	100	94,21	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	30		30		100		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.349.336.350		1.216.286.205	650	90,14	
	Terlaksananya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	19		228		1200		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.319.576.950		1.186.727.405	1200	89,93	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	19		228		1200		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			29.759.400		29.558.800	100	99,33	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			24.042.400		23.728.200	100	98,69	
	Terlaksananya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7		7		100		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6		6		100		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		100		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.256.000		1.250.000	100	99,52	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7		7		100		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.093.200		4.840.000	100	95,03	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			15.589.800		15.535.000	100	99,65	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6		6		100		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.103.400		2.103.200	100	99,99	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		100		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15.422.600		13.504.000	100	87,56	
	Terlaksananya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12.399.300		10.868.000	100	87,65	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.023.300		2.636.000	100	87,19	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			283.248.994		276.831.194	50	97,73	
	Terlaksananya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		3		0		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3		0		0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100		
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		59.182.194	0	0	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		3		0		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			64.998.994		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3		0		0		
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			218.250.000		217.649.000	100	99,72	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**103.169.500**		60.028.000	**49,9**	**58,18**	KECAMATAN LELA
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			38.171.600		-	0	0	
		Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta (Unit)	7		0		0		
7.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta			38.171.600		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum dengan Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta (Unit)	7		0		0		
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)			100		0		
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100		99,89		99,89		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			64.997.900		60.028.000	99,79	92,35	
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	482		481		99,79		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			64.997.900		60.028.000	99,79	92,35	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	482		481		99,79		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**9.463.900**		-	**0**	**0**	KECAMATAN LELA
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100		100		100		
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)			22,22		0		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			9.463.900		-	0	0	
	Terlaksananya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	9		0		0		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			9.463.900		-	0	0	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	9		0		0		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**16.139.800**		15.543.000	**100**	**96,3**	KECAMATAN LELA
	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)			100		0		
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100		100		100		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			16.139.800		15.543.000	100	96,3	
	Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12		12		100		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			16.139.800		15.543.000	100	96,3	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12		12		100		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**12.123.400**		11.874.000	**100**	**97,94**	KECAMATAN LELA
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)			100		0		
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100		100		100		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			12.123.400		11.874.000	100	97,94	
	Terlaksananya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	12		12		100		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			12.123.400		11.874.000	100	97,94	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	12		12		100		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.177.205.374**		1.190.349.887	**89,09**	**101,12**	KECAMATAN MAGEPANDA
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100		77,87		77,87		
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			96,33		0		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.000.000		6.000.000	100	100	
	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12		12		100		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6.000.000		6.000.000	100	100	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12		12		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.065.216.750		1.086.204.192	152,5	101,97	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15		42		280		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		3		25		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.034.016.750		1.043.491.692	280	100,92	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15		42		280		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			31.200.000		42.712.500	25	136,9	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		3		25		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.942.100		11.746.400	80	297,97	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		3		60		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0		0		0		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.090.000		942.000	100	86,42	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.852.100		2.693.900	60	94,45	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		3		60		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			-		1.140.500	0	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0		0		0		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			-		6.970.000	0	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0		0		0		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			11.283.100		9.324.000	50	82,64	
	Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		2		100		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			1.878.000		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		0		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			9.405.100		9.324.000	100	99,14	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		2		100		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.066.030		2.796.034	25	46,09	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		25		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			6.066.030		2.796.034	25	46,09	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		25		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			84.697.394		74.279.261	96,67	87,7	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		2		40		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		2		50		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		2		200		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			77.666.494		67.398.361	40	86,78	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		2		40		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.000.000		850.000	50	85	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		2		50		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			6.030.900		6.030.900	200	100	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		2		200		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**134.516.388**		130.595.488	**37,5**	**97,09**	KECAMATAN MAGEPANDA
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase peningkatan pelayanan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	100		0		0		
		Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)			100		0		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			37.924.400		34.800.000	50	91,76	
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12		6		50		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			37.924.400		34.800.000	50	91,76	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12		6		50		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			96.591.988		95.795.488	25	99,18	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12		3		25		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			96.591.988		95.795.488	25	99,18	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12		3		25		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**10.000.000**		5.150.000	**0**	**51,5**	KECAMATAN MAGEPANDA
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)			100		0		
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100		100		100		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			10.000.000		5.150.000	0	51,5	
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	8		0		0		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			10.000.000		5.150.000	0	51,5	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	8		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**30.235.000**		13.550.000	**25**	**44,82**	KECAMATAN MAGEPANDA
	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)			100		0		
		Persentase peningkatan pelayanan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	100		50		50		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			30.235.000		13.550.000	25	44,82	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	12		0		0		
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12		6		50		
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			9.085.000		-	0	0	
	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	12		0		0		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			21.150.000		13.550.000	50	64,07	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12		6		50		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**16.853.000**		-	**0**	**0**	KECAMATAN MAGEPANDA
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)			100		0		
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100		66,66		66,66		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			16.853.000		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	12		0		0		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	12		0		0		
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			7.478.000		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	12		0		0		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			9.375.000		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	12		0		0		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.131.865.525**		976.622.977	**246,54**	**86,28**	KECAMATAN MAPITARA
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			100		0		
		Persentase peningkatan pelayanan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	100		0		0		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.655.600		7.165.600	91,67	93,6	
	Tersedianya Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12		11		91,67		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			7.655.600		7.165.600	91,67	93,6	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12		11		91,67		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			998.855.837		848.368.689	650	84,93	
	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12		144		1200		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			966.887.837		816.400.689	1200	84,44	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12		144		1200		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			31.968.000		31.968.000	100	100	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			6.039.800		6.039.500	400	100	
	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		5		500		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		4		400		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		6		600		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			387.200		387.200	500	100	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		5		500		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.129.800		2.129.800	400	100	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		4		400		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			3.000.000		3.000.000	600	100	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		6		600		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			522.800		522.500	100	99,94	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			22.681.500		20.200.000	80	89,06	
	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		4		80		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			22.681.500		20.200.000	80	89,06	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		4		80		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15.905.694		14.410.194	41,67	90,6	
	Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		4		33,33		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		6		50		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.200.500		705.000	33,33	32,04	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		4		33,33		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			13.705.194		13.705.194	50	100	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		6		50		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			80.727.094		80.438.994	16,67	99,64	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		8		0		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8		0		0		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2		1		50		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		70.228.994	0	0	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		8		0		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			70.267.094		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8		0		0		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			250.000		10.210.000	50	4084	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2		1		50		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			10.210.000		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**51.353.600**		38.503.600	**100**	**74,98**	KECAMATAN MAPITARA
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100		100		100		
		Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)			100		0		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			51.353.600		38.503.600	100	74,98	
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12		12		100		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			51.353.600		38.503.600	100	74,98	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12		12		100		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**13.835.500**		13.335.500	**100**	**96,39**	KECAMATAN MAPITARA
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan (%)	100		100		100		
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)			100		0		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			13.835.500		13.335.500	100	96,39	
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	4		4		100		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			13.835.500		13.335.500	100	96,39	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	4		4		100		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**3.230.000**		-	**0**	**0**	KECAMATAN MAPITARA
	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)			0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)		100		0		0		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			3.230.000		-	0	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12		0		0		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			3.230.000		-	0	0	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12		0		0		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**5.950.000**		5.800.000	**91,67**	**97,48**	KECAMATAN MAPITARA
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)			91,67		0		
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100		91,67		91,67		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			5.950.000		5.800.000	91,67	97,48	
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	12		11		91,67		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			5.950.000		5.800.000	91,67	97,48	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	12		11		91,67		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.088.606.992**		1.044.153.800	**193,89**	**95,92**	KECAMATAN NELLE
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			100		0		
		Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (%)	100		100,01		100,01		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.058.500		6.380.000	83,33	90,39	
	Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12		10		83,33		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			7.058.500		6.380.000	83,33	90,39	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12		10		83,33		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			935.702.370		829.788.566	750	88,68	
	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	11		154		1400		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			905.102.370		799.188.566	1400	88,3	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	11		154		1400		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			30.600.000		30.600.000	100	100	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			10.823.100		10.789.186	100	99,69	
	Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			879.200		859.500	100	97,76	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			473.900		460.000	100	97,07	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1.320.000		1.320.000	100	100	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			8.150.000		8.149.686	100	100	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			23.273.100		22.045.791	200	94,73	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	50		50		100		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		3		300		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			6.260.000		6.224.991	100	99,44	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	50		50		100		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			17.013.100		15.820.800	300	92,99	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		3		300		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			56.765.928		120.511.441	75	212,3	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		25		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			966.900		959.000	100	99,18	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		100		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			15.430.740		79.301.488	25	513,92	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		25		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			40.368.288		40.250.953	100	99,71	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			54.983.994		54.638.816	100	99,37	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3		3		100		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		4		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			50.264.994		49.924.816	100	99,32	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3		3		100		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.000.000		995.000	100	99,5	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		4		100		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			3.719.000		3.719.000	100	100	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**83.054.600**		81.453.300	**100**	**98,07**	KECAMATAN NELLE
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100		100		100		
		Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)			100		0		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			68.036.600		66.505.300	100	97,75	
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12		12		100		
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12		12		100		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			32.540.000		31.010.000	100	95,3	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12		12		100		
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			35.496.600		35.495.300	100	100	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12		12		100		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			15.018.000		14.948.000	100	99,53	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpakan Kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12		12		100		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			15.018.000		14.948.000	100	99,53	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12		12		100		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**10.514.500**		10.270.000	**0**	**97,67**	KECAMATAN NELLE
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)			100		0		
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100		100		100		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			10.514.500		10.270.000	0	97,67	
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	10		0		0		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			10.514.500		10.270.000	0	97,67	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	10		0		0		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**24.864.500**		24.714.000	**100**	**99,39**	KECAMATAN NELLE

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)			100		0		
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100		100		100		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			24.864.500		24.714.000	100	99,39	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12		12		100		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			24.864.500		24.714.000	100	99,39	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12		12		100		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**12.306.000**		11.645.790	**0**	**94,64**	KECAMATAN NELLE
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100		100		100		
		persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)			100		0		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			12.306.000		11.645.790	0	94,64	
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	5		0		0		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			12.306.000		11.645.790	0	94,64	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	5		0		0		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.604.186.513**		1.425.385.044	**174,23**	**88,85**	KECAMATAN NITA
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka (%)	100		96,9		96,9		
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			0		0		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			42.695.600		37.750.700	100	88,42	
	Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		10		100		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12		12		100		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			24.088.100		22.330.700	100	92,7	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		10		100		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			18.607.500		15.420.000	100	82,87	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12		12		100		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.407.693.399		1.254.907.162	645	89,15	
	Tersedianya Adminastrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20		238		1190		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.371.944.899		1.219.271.162	1190	88,87	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20		238		1190		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			35.748.500		35.636.000	100	99,69	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			17.035.300		17.026.788	100	99,95	
	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		3		100		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			746.600		746.000	100	99,92	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.543.700		5.535.788	100	99,86	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		3		100		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			4.745.000		4.745.000	100	100	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			6.000.000		6.000.000	100	100	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15.161.726		8.960.600	58,33	59,1	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4		3		75		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		3		100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		0		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			520.600		520.000	75	99,88	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4		3		75		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			14.641.126		8.440.600	100	57,65	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		3		100		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			-		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		0		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			121.600.488		106.739.794	100	87,78	
	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		4		100		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			106.567.688		91.706.994	100	86,06	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		4		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			15.032.800		15.032.800	100	100	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**85.605.000**		42.590.000	**100**	**49,75**	KECAMATAN NITA
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)			100		0		
		Presentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100		0		0		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			44.162.000		30.530.000	100	69,13	
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	15		15		100		
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	15		15		100		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			30.980.000		30.530.000	100	98,55	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	15		15		100		
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			13.182.000		-	100	0	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	15		15		100		
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			27.869.000		-	100	0	
	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	2		2		100		
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			27.869.000		-	100	0	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	2		2		100		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			13.574.000		12.060.000	100	88,85	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	3		3		100		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			13.574.000		12.060.000	100	88,85	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	3		3		100		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**9.999.600**		9.999.600	**100**	**100**	KECAMATAN NITA
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100		100		100		
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)			0		0		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			9.999.600		9.999.600	100	100	
	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	3		3		100		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			9.999.600		9.999.600	100	100	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	3		3		100		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**29.260.000**		4.160.000	**76,67**	**14,22**	KECAMATAN NITA

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100		87,78		87,78		
		persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)			0		0		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			29.260.000		4.160.000	76,67	14,22	
	Terlaksananya Fasilitasi Rekomondasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	15		15		100		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	15		15		100		
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	15		4		26,67		
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	15		5		33,33		
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	15		15		100		
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	15		15		100		
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			3.356.000		2.080.000	100	61,98	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	15		15		100		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			8.244.000		2.080.000	100	25,23	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	15		15		100		
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			7.592.000		-	26,67	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	15		4		26,67		
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			3.356.000		-	33,33	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	15		5		33,33		
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			3.356.000		-	100	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	15		15		100		
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			3.356.000		-	100	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	15		15		100		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.259.766.423**		1.184.815.801	**175,61**	**94,05**	KECAMATAN PAGA
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			83,33		0		
		Terselenggaranya Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuoaten/Kota (Laporan)	6		100		1666,67		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15.754.400		15.584.400	200	98,92	
	Terlaksanananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		12		200		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6		12		200		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3.805.000		3.805.000	200	100	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		12		200		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			11.949.400		11.779.400	200	98,58	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6		12		200		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.058.965.785		991.735.764	921,54	93,65	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	13		224		1723,08		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	10		12		120		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.026.766.785		959.536.764	1723,08	93,45	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	13		224		1723,08		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			32.199.000		32.199.000	120	100	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	10		12		120		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			65.131.000		64.996.650	58,33	99,79	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		1		50		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12		100		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			-		-	0	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			22.378.500		22.264.150	50	99,49	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		1		50		
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			-		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			6.000.000		6.000.000	100	100	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			4.732.500		4.732.500	100	100	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			32.020.000		32.000.000	100	99,94	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12		100		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.560.500		-	33,33	0	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3		1		33,33		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			2.560.500		-	33,33	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3		1		33,33		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			42.238.538		39.703.037	27,78	94	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		0		0		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24		12		50		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	36		12		33,33		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			-		-	0	0	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		0		0		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12.528.150		9.992.650	50	79,76	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24		12		50		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			29.710.388		29.710.387	33,33	100	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	36		12		33,33		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			75.116.200		72.795.950	50	96,91	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8		8		100		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		2		0		
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			73.890.600		71.570.350	100	96,86	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8		8		100		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.225.600		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		1.225.600	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		2		0		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**72.919.100**		72.819.100	**100**	**99,86**	KECAMATAN PAGA
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Laporan)	27		100		370,37		
		Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)			100		0		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			63.989.400		63.959.400	100	99,95	
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12		12		100		
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12		12		100		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			55.500.000		55.500.000	100	100	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12		12		100		
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			8.489.400		8.459.400	100	99,65	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12		12		100		
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			8.929.700		8.859.700	100	99,22	
	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	12		12		100		
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			8.929.700		8.859.700	100	99,22	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	12		12		100		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**13.881.400**		13.881.400	**28,57**	**100**	KECAMATAN PAGA
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan (Dokumen)	1		99,99		9999		
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)			100		0		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			13.881.400		13.881.400	28,57	100	
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	14		4		28,57		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			13.881.400		13.881.400	28,57	100	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	14		4		28,57		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			-		-	**0**	**0**	KECAMATAN PAGA
	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)			100		0		
		Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dokumen)	60		100		166,67		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			-		-	0	0	
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12		0		0		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			-		-	0	0	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12		0		0		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**5.015.194**		4.065.100	**34,29**	**81,06**	KECAMATAN PAGA
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Laporan)	18		100		555,56		
		persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)			50		0		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			5.015.194		4.065.100	34,29	81,06	
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	14		4		28,57		
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	10		4		40		
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			3.660.000		3.470.000	28,57	94,81	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	14		4		28,57		
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			1.355.194		595.100	40	43,91	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	10		4		40		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.541.210.570**		1.323.310.714	**182,06**	**85,86**	KECAMATAN PALUE
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			85,33		0		
		Terpenuhnya Layanan Kesekretariatan (%)	100		100		100		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12.210.300		3.728.400	100	30,53	
	Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12		12		100		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12.210.300		3.728.400	100	30,53	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12		12		100		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.244.252.206		1.154.493.020	750	92,79	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17		238		1400		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	24		24		100		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.213.219.006		1.123.893.020	1400	92,64	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17		238		1400		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			31.033.200		30.600.000	100	98,6	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	24		24		100		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			50.019.000		40.139.900	122,86	80,25	
	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		5		100		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7		22		314,29		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.906.000		-	0	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			8.617.400		5.136.500	100	59,61	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		5		100		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			7.650.000		5.355.000	100	70	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.555.600		488.400	100	19,11	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			29.290.000		29.160.000	314,29	99,56	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7		22		314,29		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			31.212.400		29.212.330	66,67	93,59	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3		3		100		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9		3		33,33		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			9.980.000		9.923.510	100	99,43	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3		3		100		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			21.232.400		19.288.820	33,33	90,85	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9		3		33,33		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			87.851.164		87.276.064	100	99,35	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			5.620.000		5.044.900	100	89,77	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			82.231.164		82.231.164	100	100	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			115.665.500		8.461.000	61,11	7,32	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		6		150		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6		0		0		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		1		33,33		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			18.350.900		8.111.000	150	44,2	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		6		150		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.200.000		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6		0		0		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			96.114.600		350.000	33,33	0,36	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		1		33,33		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**49.182.400**		23.414.000	**107**	**47,61**	KECAMATAN PALUE

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)			87,5		0		
		Persentase Penyelenggraaan Pemerintahanan dan Pelayanan Publik (%)	100		87,5		87,5		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			30.130.000		20.534.000	162,5	68,15	
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	4		12		300		
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12		3		25		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			23.830.000		17.384.000	300	72,95	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	4		12		300		
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			6.300.000		3.150.000	25	50	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12		3		25		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			14.662.400		2.880.000	80	19,64	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	5		3		60		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4		4		100		
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			4.290.400		-	60	0	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	5		3		60		
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			10.372.000		2.880.000	100	27,77	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4		4		100		
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			4.390.000		-	50	0	
	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	4		2		50		
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			4.390.000		-	50	0	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	4		2		50		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**9.999.800**		9.550.000	**100**	**95,5**	KECAMATAN PALUE
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahaan (%)	100		100		100		
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)			100		0		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			9.999.800		9.550.000	100	95,5	
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	5		5		100		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			9.999.800		9.550.000	100	95,5	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	5		5		100		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**7.480.000**		-	**0**	**0**	KECAMATAN PALUE

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan	tersedianya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100		100		100		
		Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)			100		0		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			7.480.000		-	0	0	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	8		0		0		
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	6		0		0		
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			5.520.000		-	0	0	
	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	8		0		0		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			1.960.000		-	0	0	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	6		0		0		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**11.140.000**		-	**0**	**0**	KECAMATAN PALUE
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	tersedianya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	100		100		100		
		persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)			100		0		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			11.140.000		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	8		0		0		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	8		0		0		
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			4.080.000		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	8		0		0		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			7.060.000		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	8		0		0		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.446.280.385**		1.337.545.135	**285,28**	**92,48**	KECAMATAN TALIBURA
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			100		0		
		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100		100		100		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11.096.700		10.916.700	120	98,38	
	Tersedianya laporan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10		12		120		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			11.096.700		10.916.700	120	98,38	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10		12		120		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.313.925.563		1.207.670.143	744,44	91,91	
	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18		238		1322,22		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		20		166,67		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.279.245.563		1.172.990.143	1322,22	91,69	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18		238		1322,22		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			34.680.000		34.680.000	166,67	100	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		20		166,67		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			32.303.700		32.180.300	340	99,62	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		5		500		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		2		200		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		12		600		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4		12		300		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.034.800		1.034.800	100	100	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			17.807.700		17.684.400	500	99,31	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		5		500		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5.000.000		5.000.000	200	100	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		2		200		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.848.000		3.847.900	600	100	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		12		600		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			4.613.200		4.613.200	300	100	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4		12		300		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			34.880.900		34.079.498	251,72	97,7	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	29		73		251,72		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			34.880.900		34.079.498	251,72	97,7	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	29		73		251,72		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			26.935.122		26.394.321	77,78	97,99	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		4		33,33		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			117.400		117.400	33,33	100	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		4		33,33		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.346.828		1.821.000	100	77,59	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			24.470.894		24.455.921	100	99,94	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			27.138.400		26.304.173	100	96,93	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6		6		100		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6		6		100		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			25.138.400		24.304.173	100	96,68	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6		6		100		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.000.000		2.000.000	100	100	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6		6		100		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**49.144.500**		59.433.300	**200**	**120,94**	KECAMATAN TALIBURA
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100		100		100		
		Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)			100		0		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			48.001.300		48.001.300	100	100	
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12		12		100		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			48.001.300		48.001.300	100	100	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12		12		100		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			1.143.200		11.432.000	300	1000	
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4		12		300		
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1.143.200		11.432.000	300	1000	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4		12		300		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**12.053.800**		12.053.800	**125**	**100**	KECAMATAN TALIBURA
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Persentase peningkatan pelayanan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	100		100		100		
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)			100		0		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			12.053.800		12.053.800	125	100	
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	20		25		125		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			12.053.800		12.053.800	125	100	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	20		25		125		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**27.440.000**		27.440.000	**100**	**100**	KECAMATAN TALIBURA
	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)			100		0		
		Persentase peningkatan pelayanan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	100		0		0		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			27.440.000		27.440.000	100	100	
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12		12		100		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			27.440.000		27.440.000	100	100	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12		12		100		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**21.090.000**		21.090.000	**100**	**100**	KECAMATAN TALIBURA
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100		100		100		
		persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)			100		0		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			21.090.000		21.090.000	100	100	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	20		20		100		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			21.090.000		21.090.000	100	100	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	20		20		100		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.159.161.458**		1.086.638.053	**66,67**	**93,74**	KECAMATAN TANA WAWO
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100		100,01		100,01		
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			100		0		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12.480.000		12.474.000	0	99,95	
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0		12		0		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12.480.000		12.474.000	0	99,95	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0		12		0		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			900.208.438		855.251.977	0	95,01	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0		196		0		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0		12		0		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			874.016.638		830.051.977	0	94,97	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0		196		0		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			26.191.800		25.200.000	0	96,21	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0		12		0		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			32.397.200		32.337.200	0	99,81	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0		1		0		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0		1		0		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0		1		0		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0		12		0		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			232.200		232.200	0	100	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0		1		0		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			6.000.000		6.000.000	0	100	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0		1		0		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.725.000		3.725.000	0	100	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0		1		0		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			22.440.000		22.380.000	0	99,73	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0		12		0		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			55.315.900		55.069.700	66,67	99,55	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		1		100		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		100		
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			28.345.300		28.345.300	100	100	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		1		100		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			-		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3		0		0		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			26.970.600		26.724.400	100	99,09	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		100		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			76.802.420		60.095.976	0	78,25	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0		12		0		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0		12		0		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0		12		0		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3.594.150		610.000	0	16,97	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0		12		0		
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.682.300		4.665.200	0	99,63	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0		12		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			68.525.970		54.820.776	0	80	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0		12		0		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			81.957.500		71.409.200	0	87,13	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		8		0		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		2		0		
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			73.757.500		65.275.550	0	88,5	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		8		0		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			8.200.000		6.133.650	0	74,8	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		2		0		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**67.759.400**		41.800.000	**0**	**61,69**	KECAMATAN TANA WAWO
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanaan (%)	100		45,84		45,84		
		Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)			100		0		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			59.200.000		41.800.000	0	70,61	
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0		10		0		
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0		1		0		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			41.550.000		37.800.000	0	90,97	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0		10		0		
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			17.650.000		4.000.000	0	22,66	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0		1		0		
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			8.559.400		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	0		0		0		
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			8.559.400		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	0		0		0		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**18.096.400**		17.508.400	**0**	**96,75**	KECAMATAN TANA WAWO
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)			100		0		
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100		100		100		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			18.096.400		17.508.400	0	96,75	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	0		4		0		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			18.096.400		17.508.400	0	96,75	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	0		4		0		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.472.561.025**		1.105.649.975	**114,29**	**75,08**	KECAMATAN WAIBLAMA
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100		99,72		99,72		
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			0		0		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.800.000		7.700.000	100	98,72	
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9		9		100		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			7.800.000		7.700.000	100	98,72	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	9		9		100		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.234.888.720		1.097.949.975	750	88,91	
	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14		210		1500		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		0		0		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.197.440.720		1.097.949.975	1500	91,69	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14		210		1500		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			37.448.000		-	0	0	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		0		0		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			25.489.000		-	0	0	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		0		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		0		0		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.213.800		-	0	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			8.932.700		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		0		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.962.500		-	0	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12.380.000		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		0		0		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			45.737.300		-	0	0	
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	63		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	11		0		0		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			19.597.400		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	63		0		0		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			26.139.900		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	11		0		0		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			37.363.092		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		0		0		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		0		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			6.352.704		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		0		0		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			31.010.388		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		0		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			121.282.913		-	0	0	
	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6		0		0		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3		0		0		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			89.142.713		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6		0		0		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.800.000		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3		0		0		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			30.340.200		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**58.589.400**		-	**0**	**0**	KECAMATAN WAIBLAMA
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100		100		100		
		Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)			0		0		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			51.776.900		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7		0		0		
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1		0		0		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			38.392.800		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7		0		0		
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			13.384.100		-	0	0	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1		0		0		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			6.812.500		-	0	0	
	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12		0		0		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			6.812.500		-	0	0	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12		0		0		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**2.450.000**		-	**0**	**0**	KECAMATAN WAIBLAMA
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100		100		100		
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)			0		0		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			2.450.000		-	0	0	
	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		0		0		
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2.450.000		-	0	0	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		0		0		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**7.398.500**		-	**0**	**0**	KECAMATAN WAIBLAMA
	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)			0		0		
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100		100		100		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			7.398.500		-	0	0	
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	1		0		0		
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1		0		0		
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			-		-	0	0	
	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	1		0		0		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			7.398.500		-	0	0	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1		0		0		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**8.400.000**		-	**0**	**0**	KECAMATAN WAIBLAMA
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasann Pemerintahan Desa (%)	100		100		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
		persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)			0		0		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			8.400.000		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7		0		0		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7		0		0		
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	5		0		0		
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			4.200.000		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7		0		0		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			4.200.000		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7		0		0		
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			-		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	5		0		0		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.193.841.660**		1.049.690.186	**233,21**	**87,93**	KECAMATAN WAIGETE
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupeten/Kota (%)	100		99,32		99,32		
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			100		0		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.440.000		4.790.000	100	64,38	
	Tersedianya Perencanaan,Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9		9		100		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			7.440.000		4.790.000	100	64,38	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	9		9		100		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.037.738.320		928.677.096	650	89,49	
	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14		168		1200		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.003.613.320		894.552.096	1200	89,13	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14		168		1200		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			34.125.000		34.125.000	100	100	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			18.226.400		18.076.902	295,83	99,18	
	Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		8		800		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		5		83,33		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		3		300		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		0		0		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.100.400		2.100.000	800	99,98	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		8		800		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			11.596.000		11.486.760	83,33	99,06	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		5		83,33		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			4.530.000		4.490.142	300	99,12	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		3		300		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			-		-	0	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		0		0		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			27.027.500		23.438.300	3,33	86,72	
	Trsedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Darah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15		1		6,67		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			-		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		0		0		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			27.027.500		23.438.300	6,67	86,72	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15		1		6,67		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			41.270.640		36.164.388	95,83	87,63	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		11		91,67		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			8.350.152		3.244.000	91,67	38,85	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		11		91,67		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			32.920.488		32.920.388	100	100	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			62.138.800		38.543.500	125	62,03	
	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3		3		100		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2		3		150		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			61.088.800		38.118.500	100	62,4	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3		3		100		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.050.000		425.000	150	40,48	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2		3		150		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**72.196.400**		60.506.806	**336,11**	**83,81**	KECAMATAN WAIGETE
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)			100		0		
		Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100		100,01		100,01		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			64.319.200		54.413.078	487,5	84,6	
	Terselengaranya Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12		9		75		
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1		9		900		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			40.374.800		40.343.078	75	99,92	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12		9		75		
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			23.944.400		14.070.000	900	58,76	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1		9		900		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			7.877.200		6.093.728	33,33	77,36	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12		4		33,33		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			7.877.200		6.093.728	33,33	77,36	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12		4		33,33		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			-		-	**0**	**0**	KECAMATAN WAIGETE
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	[deleted] ()					0		
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	100		0		0		
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)			0		0		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			-		-	0	0	
	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		0		0		
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			-		-	0	0	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		0		0		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**12.999.600**		4.136.325	**450**	**31,82**	KECAMATAN WAIGETE
	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan	Persentase peningkatan pelayanan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	100		100		100		
		Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)			100		0		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			12.999.600		4.136.325	450	31,82	
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	1		9		900		
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1		0		0		
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			4.744.800		4.136.325	900	87,18	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	1		9		900		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			8.254.800		-	0	0	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1		0		0		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**12.850.000**		-	**0**	**0**	KECAMATAN WAIGETE
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100		100		100		
		persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)			100		0		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			12.850.000		-	0	0	
	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	11		0		0		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	11		0		0		
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7		0		0		
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			6.340.000		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	11		0		0		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			6.510.000		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	11		0		0		
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			-		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7		0		0		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.356.635.351**		842.410.697	**248,81**	**62,1**	KECAMATAN MEGO
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Tersedianya layanan kesekretariatan (Persentase)	100		100		100		
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			100		0		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8.500.000		8.500.000	100	100	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12		12		100		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			8.500.000		8.500.000	100	100	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12		12		100		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.236.513.878		736.498.487	633,33	59,56	
	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18		210		1166,67		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.209.399.878		711.584.487	1166,67	58,84	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18		210		1166,67		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			27.114.000		24.914.000	100	91,89	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.821.200		5.821.200	100	100	
	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			5.821.200		5.821.200	100	100	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			43.373.151		29.163.888	87,5	67,24	
	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		9		75		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			4.270.363		1.753.500	100	41,06	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			39.102.788		27.410.388	75	70,1	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		9		75		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			62.427.122		62.427.122	100	100	
	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6		6		100		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			62.427.122		62.427.122	100	100	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6		6		100		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**29.621.000**		29.640.000	**100**	**100,06**	KECAMATAN MEGO
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan (Persentase)	100		99,99		99,99		
		Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)			100		0		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			29.621.000		29.640.000	100	100,06	
	Tersedianya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12		12		100		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			29.621.000		29.640.000	100	100,06	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12		12		100		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**9.506.600**		9.506.600	**100**	**100**	KECAMATAN MEGO
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100		100		100		
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)			100		0		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			9.506.600		9.506.600	100	100	
	Tersedianya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	12		12		100		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			9.506.600		9.506.600	100	100	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	12		12		100		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**4.600.600**		-	**100**	**0**	KECAMATAN MEGO
	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)			100		0		
		Jumlah pelaksanaan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan yang terlaksana (Persentase)	100		100		100		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			4.600.600		-	100	0	
	Tersedianya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12		12		100		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			4.600.600		-	100	0	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12		12		100		
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			**4.665.103.272**		4.130.616.137	**94,74**	**88,54**	
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.196.910.668**		2.032.816.132	**100**	**92,53**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)			100		0		
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			21.996.800		21.903.776	100	99,58	
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7		7		100		
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			21.996.800		21.903.776	100	99,58	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7		7		100		
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.024.295.440		1.869.649.383	100	92,36	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14		14		100		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.945.476.440		1.790.831.383	100	92,05	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14		14		100		
8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			78.819.000		78.818.000	100	100	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		100		
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			52.649.800		52.612.857	100	99,93	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3		3		100		
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			16.047.000		16.032.215	100	99,91	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			4.860.000		4.860.000	100	100	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			5.957.800		5.957.742	100	100	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100		
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			25.785.000		25.762.900	100	99,91	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3		3		100		
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			46.266.618		37.337.907	100	80,7	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			15.613.130		13.856.500	100	88,75	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			30.653.488		23.481.407	100	76,6	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100		
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			51.702.010		51.312.209	100	99,25	
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1		1		100		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	9		9		100		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100		
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			35.481.910		35.221.209	100	99,27	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1		1		100		
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4.300.000		4.300.000	100	100	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	9		9		100		
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			11.920.100		11.791.000	100	98,92	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100		
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**			**532.477.450**		522.977.544	**100**	**98,22**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	100		100		100		
		Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)			90		0		
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			532.477.450		522.977.544	100	98,22	
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	0		20		0		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan	50		50		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah Paskibraka (Orang)	70		70		100		
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			43.411.200		43.231.675	0	99,59	
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	0		20		0		
8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara			45.788.200		45.588.191	100	99,56	
	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	50		50		100		
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka			443.278.050		434.157.678	100	97,94	
	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka (Orang)	70		70		100		
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**			**852.996.154**		850.459.342	**100**	**99,7**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)			100		0		
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			852.996.154		850.459.342	100	99,7	
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	12		12		100		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan	36		36		100		
8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			810.914.654		810.914.654	100	100	
	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	12		12		100		
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			42.081.500		39.544.688	100	93,97	
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	36		36		100		
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**			**78.699.100**		78.512.262	**100**	**99,76**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)			97,6		0		
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			78.699.100		78.512.262	100	99,76	
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	50		50		100		
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			78.699.100		78.512.262	100	99,76	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	50		50		100		
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**			**75.501.000**		74.257.824	**0**	**98,35**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan			98,35		0		
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			75.501.000		74.257.824	0	98,35	
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi,	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	5		0		0		
		Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	0		5		0		
8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			75.501.000		-	0	0	
	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	5		0		0		
8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			-		74.257.824	0	0	
	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	0		5		0		
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**			**928.518.900**		571.593.033	**100**	**61,56**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Potensi Konflik Sosial (%)			85		0		
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			928.518.900		571.593.033	100	61,56	
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	86		86		100		
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			928.518.900		571.593.033	100	61,56	
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	86		86		100		
		JUMLAH		**1.345.224.170.982**		**862.679.145.796**			
		Rata-rata capaian kinerja (%)					**338,23**	**64,13**	
		Predikat kinerja					**Sangat tinggi**	**Rendah**	
		Rata-rata capaian kinerja (%)					**119,35**		
		Predikat kinerja					**Sangat tinggi**		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4		5		6=5/4 x 100%		7
			K	Rp	K	Rp	K	%	
Faktor penghambat pencapaian kinerja		:							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya		:							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya		:							

2.6. Permasalahan Daerah

Pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan upaya yang dilakukan secara terencana, terukur, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan daerah, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, identifikasi dan perumusan permasalahan pembangunan menjadi bagian penting dalam penyusunan RKPD.

2.6.1. Isu dan Permasalahan Daerah

Isu dan Permasalahan Pembangunan yang menjadi sasaran pembangunan untuk dilaksanakan di Kabupaten Sikka pada Tahun 2027 adalah :

1. Isu Kualitas Pembangunan Manusia masih rendah, dengan *permasalahan* :
   a. Kualitas Pendidikan masih rendah
   b. Derajat kesehatan Masyarakat masih rendah
   c. Tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah
   d. Masih ada kesenjangan pembangunan antar gender

2. Isu Perekonomian Kabupaten Sikka meningkat dengan baik, namun tingkat kesejahteraan masyarakat masih relatif rendah, dengan *permasalahan*:
   a. Sektor primer (pertanian, perikanan, ketahanan pangan dan kehutanan), yang menjadi penopang PDRB mengalami pertumbuhan yang relatif rendah
   b. Sektor sekunder belum memiliki kemampuan untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor sekunder yang rendah dengan pertumbuhan yang juga relatif rendah
   c. Sektor Tersier memiliki kontribusi dan pertumbuhan yang tinggi namun demikian belum mampu menarik pertumbuhan ekonomi, karena barang yang diperdagangkan produk mentah sehingga belum menghasilkan nilai tambah

3. Isu Kualitas aksesibilitas infrastruktur masih rendah, dengan *permasalahan* Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah Masih Rendah.

4. Isu Masih rendahnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Persampahan, dengan *permasalahan* Kualitas Lingkungan Hidup masih rendah

5. Isu Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sikka masih rendah, dengan *permasalahan*:
   a. Akuntabilitas Kinerja masih perlu ditingkatkan
   b. Akuntabilitas Keuangan masih belum optimal
   c. Efektivitas Pemerintahan masih perlu ditingkatkan
   d. Keamanan dan Ketertiban masih perlu diperbaiki
   e. Kualitas pelayanan publik belum baik

2.6.2. Permasalahan yang dihadapi per Urusan

Permasalahan yang dihadapi per urusan :

1. Pendidikan, permasalahan yang dihadapi adalah :
   - Masih Rendahnya Partisipasi anak usia Sekolah
   - Masih Rendahnya Implementasi Kurikulum Pendidikan Dasar.
   - Masih rendahnya kualitas dan distribusi satuan pendidikan
   - Masih rendahnya Mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.
   - Masih Masyarakat Masih Rendah rendahnya penerapan kurikulum muatan lokal yang mendukung pelestarian budaya dan bahasa daerah.
2. Kesehatan, permasalahan yang dihadapi adalah :
   - Kualitas Kesehatan perorangan Keluarga masih rendah
   - Mutu dan distribusi tenaga kesehatan masih rendah

- Kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman masih rendah
- Kualitas pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan masih rendah

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, permasalahan yang dihadapi adalah :
   - Aksesibilitas transportasi masyarakat yang nyaman dan aman masih rendah
   - Kualitas irigasi yang masih rendah
   - Kualitas sistem drainase perkotaan yang masih rendah
   - Akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum masih rendah
   - Akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah masih rendah
   - Layanan persampahan regional masih rendah
   - Kualitas bangunan gedung yang masih rendah
   - Bangunan dan lingkungan yang tertata masih rendah
   - Kompetensi tenaga kerja konstruksi kualifikasi terampil masih rendah
   - Kualitas penyelenggaraan penataan ruang masih rendah
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, permasalahan yang dihadapi adalah :
   - Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana Masih Rendah
   - Kawasan Permukiman Kumuh Masih Tinggi
   - Masih rendahnya rumah layak huni MBR
   - Penyediaan PSU Permukiman masih rendah
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, permasalahan yang dihadapi adalah :
   - Kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan perkara masih perlu ditingkatkan
   - Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran belum maksimal
6. Sosial, permasalahan yang dihadapi adalah :
   - Pemberdayaan Sosial Yang Masih Rendah
   - Perlindungan dan Jaminan Sosial Masih Rendah
   - Rehabilitasi Sosial Yang Masih Rendah
   - Tingkat Perlindungan Korban Bencana Yang Rendah
7. Tenaga Kerja, permasalahan yang dihadapi adalah :
   - Informasi tenaga kerja masih rendah
   - Belum optimalnya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (BLK)
   - Belum adanya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   - Penempatan tenaga Kerja rendah
   - Pemberi kerja yang melindungi tenaga kerja masih sedikit
   - Perlindungan hak-hak pekerja masih terbatas
8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, permasalahan yang dihadapi adalah:
   - Kesetaraan gender dan Perlindungan Anak masih rendah
   - Kekerasan Perempuan masih tinggi
   - Kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak masih rendah
   - Pemanfaatan data gender dan anak masih rendah
   - Jaminan pemenuhan hak semua anak secara komprehensif rendah
   - Tingkat Pencegahan dan penangangan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan masih rendah
9. Pangan, permasalahan yang dihadapi adalah :
   - Infrastruktur pendukung kemandirian pangan tidak memadai
   - Stabilitas dan pasokan pangan yang tidak stabil
   - Rendahnya Pengelolaan Keseimbangan Cadangan
   - Pola Konsumsi pangan masyarakat memenuhi B2SA belum prinsip

- Data penyusunan peta kerawanan pangan yang perlu di update berkala
- Potensi terjadinya kerawanan pangan dan gizi di Kabupaten Sikka relatif tinggi
- Sarana prasarana, sumber daya aparatur yang berkompeten, dan frekuensi pengawasan keamanan pangan yang rendah
- Rendahnya pembinaan keamanan terhadap pelaku usaha kecil dan mikro

10. Pertanahan, permasalahan yang dihadapi adalah :
    - Kurangnya Penanganan Kasus Sengketa Tanah Garapan Yang dilakukan Melalui Mediasi
    - Belum optimal Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
11. Lingkungan Hidup, permasalahan yang dihadapi adalah :
    - Belum maksimalnya pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten
    - Belum maksimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten
    - Masih kurangnya pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten
    - Belum maksimalnya pengelolaan sampah
    - Belum maksimalnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten
    - Belum optimalnya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten
    - Belum optimalnya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten
    - Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota
    - Masih tingginya pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) kabupaten/kota
    - Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota
12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, permasalahan yang dihadapi adalah :
    - Masih rendahnya kualitas layanan pendaftaran penduduk
    - Rendahnya kualitas layanan pencatatan sipil
    - Belum maksimalnya pengelolaan dan pemanfaatan informasi kependudukan
    - Belum meningkatnya kualitas profil kependudukan
13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, permasalahan yang dihadapi adalah
    - Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses penataan desa
    - Masih rendahnya kapasitas dan kapabilitas pelaku Kerjasama di desa.
    - Belum adanya pelatihan untuk peningkatan kompetensi dan kelembagaan lembaga kemasyarakatan
    - Belum adanya pelatihan peningkatan kualitas dan kompetensi pemerintahan desa
14. Pengendalian Penduduk dan KB, permasalahan yang dihadapi adalah :
    - Pengendalian pertambahan penduduk masih rendah
    - Pemberdayaan peran masyarakat dan serta dalam pembinaan KB masih renadah
    - Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) rendah
15. Perhubungan, permasalahan yang dihadapi adalah :
    - Belum maksimalnya Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota di mana banyak rambu yang tidak sesuai standar dan minimnya fasilitas keselamatan berisiko meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas
    - Belum optimalnya pengelolaan dan pelayanan simpul – simpul angkutan (terminal dan halte/shelter) ditandai dengan masih terbatasnya jumlah fasilitas halte/shelter dan belum maksimalnya pengelolaan terminal.

- Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas kabupaten/kota belum efektif

16. Komunikasi dan Informatika, permasalahan yang dihadapi adalah :
    - Masih rendahnya akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah
    - Masih kurangnya penyediaan SarPras TIK
17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, permasalahan yang dihadapi adalah
    - Masih banyak pengurus dan pengawas yang belum tersertifikasi (Uji kelayakan dan kepatutan)
    - pola pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang belum optimal
    - Masih Banyak Koperasi yang belum melaksanakan RAT
    - Belum adanya perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan perkoperasian
    - Belum adanya perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas koperasi
    - Masih rendahnya pemahaman pengurus dan pengawas Koperasi tentang Tata Kelola Perkoperasian
    - Masih banyak UMKM yang belum terkurasi
    - Kualitas dan kuantitas produk belum terstandarisasi dan terupdate
18. Penanaman Modal, permasalahan yang dihadapi adalah :
    - Pengembangan iklim penanaman modal masih belum maksimal, hal ini tercermin dari tidak terpenuhinya target yang telah ditetapkan
    - Promosi penanaman modal masih dikelola secara tradisional dan parsial, akibatnya jumlah investor masih terbatas
    - Pengendalian pelaksanaan penanaman modal masih kurang
    - Pengelolaan dan data sistem informasi penanaman modal masih dilakukan secara konvensional
    - kerjasama penanaman modal masih kurang
19. Kepemudaan dan Olahraga, permasalahan yang dihadapi adalah Masih rendah peran pemuda dalam Pembangunan dan Masih rendahnya Prestasi di Bidang Olahraga
20. Statistik, permasalahan yang dihadapi Penyelenggaraan Statistik sektoral belum terintegrasi
21. Persandian, permasalahan yang dihadapi Pengelolaan dan pengawasan persandian masih kurang baik
22. Kebudayaan, permasalahan yang dihadapi adalah :
    - Masih kurangnya upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan obyek pemajuan kebudayaan
    - Masih kurangnya upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan obyek kesenian tradisiona
    - Masih kurangnya upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan obyek sejarah
    - Masih kurangnya upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan obyek cagar budaya
    - Masih kurangnya upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan obyek permuseuman
23. Perpustakaan, permasalahan yang dihadapi adalah :
    - Layanan perpustakaan belum sesuai Standar Nasional Perpustakaan
    - Kualitas perpustakaan dan pustakawan masih rendah
    - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota belum optimal
24. Kearsipan, permasalahan yang dihadapi adalah :
    - Pelesatarian Naskah Kuno dan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara belum dilakukan
    - Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masih rendah

- Tata kelola arsip dinamis dan statis masih rendah
- Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota belum optima
- Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota belum optimal
- Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota belum optimal
- Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota belum optimal
- Pengawasan kearsipan di kabupaten/kota belum optimal
- Belum ada mekanisme perlindungan dan penyelamatan asrip
- Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota belum optimal
- Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang belum dilakukan
- Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota belum ada

25. Pariwisata, permasalahan yang dihadapi adalah :

- Daya tarik destinasi pariwisata memiliki potensi yang sangat banyak namun demikian belum semua dapat dikelola sehingga daya tarik wisata yang tersedia menjadi terbatas
- Jangkauan pemasaran pariwisata masih rendah akibat dari kemampuan dalam pemanfaatan media promosi non tradisional yang masih kurang
- Kualitas ekosistem ekonomi kreatif masih rendah. Dari 17 sektor, ekraf, Sikka baru fokus pada sektor Kriya seni pertunjukkan dan kuliner
- Kapasitas SDM pariwisata dan ekosistem kreatif masih rendah (jiwa kewirausahaan masyarakat dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif masih rendah
- Pengembangan kebudayaan masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebudayaan masih belum bersifat penuh
- Pengembangan kesenian tradisional belum dapat dilakukan sepenuhnya, hal ini dapat dilihat dari kemampuan untuk mengembangkan kesenian baru mencapai angka 45%
- Pembinaan sejarah belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini data dilihat dari kemampuan untuk melakukan peninjauan terhadap Sejarah lokal baru 50 % dari jumlah desa.
- Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya belum dapat dilakukan secara baik. WBTB dan Cagar Budaya yang dilestarikan baru mencapai 11,46%; demikian juga dengan budaya tak benda yang dilestarikan masih rendah
- Pengelolaan museum masih terbatas. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan ke museum yang masih rendah
- Kurangnya atraksi, aksesbilitas, amenitas, ancillary services, available package, aktifitas pariwisata, akomodasi di obyek daya tarik wisata.
- Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi/daya tarik wisata
- Rendahnya literasi digital pengelola wisata dan kurang update dan menariknya konten promosi
- Masih adanya ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap ijin usaha pariwisata
- Masih banyaknya pelaku ekraf yang belum tersertifikasi HAKI
- Kurangnya pemahaman tentang peluang usaha dan rendahnya kemampuan produk dan rendahnya kemampuan produksi dan pemasaran produk dari pelaku ekraf
- Masih kurangnya upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan obyek pemajuan kebudayaan
- Masih kurangnya upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan obyek kesenian tradisional
- Masih kurangnya upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan obyek sejarah

- Masih kurangnya upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan obyek cagar budaya
- Masih kurangnya upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan obyek permuseuman

26. Pertanian, permasalahan yang dihadapi :
    - Terjadi fluktuasi produksi tanaman pangan setiap tahun akibat dari keterbatasan sarana produksi pertanian
    - Prasarana pertanian yang berupa PLP2B telah ditetapkan dalam tahun 2020, namun belum diimplementasikan secara konsisten, demikian juga dengan sarana lainnya seperti jalan pertanian maupun jaringan irigasi yang relatif terbatas.
    - Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner sudah dilakukan akan tetapi belum mapu untuk menyelesaikan permasalahan secara optimal
    - Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian masih belum optimal. Setiap tahun terjadi bencana pertanian akibat musim dan manajemen pertanian.
    - Pelayanan untuk izin pembukaan usaha belum ada, akan tetapi pelayanan pendampingan usaha sudah ada
    - Kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian masih terbatas dan kompetensi belum memadai
    - Rendahnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan
    - Rendahnya daya dukung hijauan pakan ternak (HPT)
    - Rendahnya Kualitas dan kuantitas bibit unggul
    - Belum optimalmnya pengelolaan lahan
    - Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pertanian
    - Rendahnya cakupan pelayanan Kesehatan hewan
    - Masih kurang logistic kesehatan hewan
    - Masih kurangnya SDM aparatur kesehatan hewan
    - Masih kurangnya unit usaha peternakan yang memiliki sertifikat NKV
    - Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
    - Rendahnya cakupan pengendalian serangan hama dan penyakit tanaman pangan, hortikultura, dan Perkebunan
    - Rendahnya cakupan penanganan kerusakan tanaman akibat dampak perubahan iklim
    - Belum optimalnya pelayanan pendampingan usaha pertanian
    - Rendahnya kompetensi teknis aparatur penyuluh pertanian
    - Rendahnya kapasitas kelembagaan petani
    - Rendahnya PKS (Pengetahuan Keterampilan dan Sikap) dalam mengadopsi teknologi inovasi pertanian
27. Perikanan, permasalahan yang dihadapi :
    - Produksi perikanan tangkap masih fluktuatif diakibatkan perubahan cuaca, sarpras nelayan tidak mumpuni, manajemen yang belum baik dan adanya pembatasan kewenangan.
    - Produksi perikanan budidaya belum berkembang dengan optimal, karena kemampuan SDM pembudidaya ikan dalam pengembangan perikanan masih rendah, juga adanya regulasi yang membatasi budidaya laut.
    - Pengolahan produk perikanan sudah mulai berkembang namun belum optimal.
    - Rendahnya kapasitas pelaku usaha perikanan tangkap dan masih kurangnya prasarana dan sarana perikanan tangkap.
    - Rendahnya kemampuan pembudidaya ikan dan adanya regulasi yang membatasi budidaya laut.

- keterbatasan sarana dan prasarana teknologi, dan sumber daya manusia, serta kurangnya standardisasi dan manajemen kualitas yang baik.

28. Perdagangan, permasalahan yang dihadapi :
    - Perizinan berusaha sektor Perdagangan sudah berbasis online melalui aplikasi OSS di DPMPTSP sehingga kewenangan Dinas menjadi terbatas untuk melakukan pengawasan usaha perdagangan.
    - Kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien dan terintegrasi belum merata
    - Kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting masih sangat bergantung dari pasokan luar daerah
    - Pelaku usaha yang berorientasi pasar luar kabupaten masih terbatas dengan produk utama adalah produk mentah
    - Tertib niaga dan mutu produk masih rendah
    - Terbatasnya Akses DP2KUKM terhadap Izin Usaha Perdagangan dalam Aplikasi OSS
    - Masih rendahnya kelayakan fasilitas pada sarana perdagangan
    - belum efektifnya tim pengawas dan pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting
    - Rendahnya hilirisasi produk local
    - rendahnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha tentang tertib Ukur dan Pengawasan Alat UTTP (Ukur ,Takar,Timbang dan Perlengkapannya)
29. Perindustrian, permasalahan yang dihadapi :
    - Perencanaan dan Pembangunan industri dijalankan tanpa ada Perda sehingga menghambat pengelolaan bidang Perindustrian
    - Perizinan berusaha sektor Perindustrian sudah berbasis online melalui aplikasi OSS di DPMPTSP sehingga kewenangan Dinas Perindustrian menjadi terbatas untuk melakukan pengawasan usaha perindustrian
    - Informasi industri sudah tersedia tetapi pelaku usaha masih belum mampu menggunakan aplikasi digital
    - Belum adanya rencana pembangunan industri kabupaten
    - Terbatasnya Akses DP2KUKM terhadap Ijin Usaha Industri dalam Aplikasi OSS
    - Rendahnya literasi digital pelaku IKM terhadap aplikasi digital
30. Transmigrasi, permasalahan yang dihadapi :
    - Kualitas dan kuantitas sarpras masih kurang
    - Pengembangan wilayah baru transmigran masih rendah
    - Pelaksanaan transmigrasi belum terlaksana dengan baik
    - Kawasan transmigrasi belum berkembang
    - Pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi masih rendah
31. Perencanaan Pembangunan, permasalahan yang dihadapi :
    - Perencanaan masih belum baik
    - Peran Riset dan Inovasi dalam pembangunan daerah masih rendah
    - Kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan yang diukur dari konsistensi program sudah cukup baik, namun dalam penilaian tersebut belum teridentifikasi pencapaian hasil dari hal-hal yang telah direncanakan
    - Kualitas perencanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah masih rendah
    - Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan belum maksimal
    - Pemanfaatan Inovasi daerah perlu ditingkatkan
32. Keuangan, Permasalahan yang dihadapi :
    - Akuntabilitas Keuangan Pemerintah masih belum baik

- Kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan masih rendah
- Pengelolaan aset belum baik

33. Pengawasan, Permasalahan yang dihadapi :
    - Kualitas pengawasan internal masih buruk
    - Penyelenggaraan pengawasan belum maksimal
    - Pendampingan dan asistensi masih rendah

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun sebagai pedoman dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi lokal, meningkatkan daya saing daerah, memperluas kesempatan kerja, menurunkan tingkat kemiskinan, serta menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika ekonomi nasional dan global. Pembangunan ekonomi daerah dilaksanakan melalui penguatan sektor-sektor unggulan daerah dengan tetap memperhatikan potensi sumber daya lokal, pemerataan pembangunan wilayah, pengembangan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, arah kebijakan ekonomi juga diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas, hilirisasi potensi daerah, penguatan UMKM, dan pengembangan ekonomi kreatif.

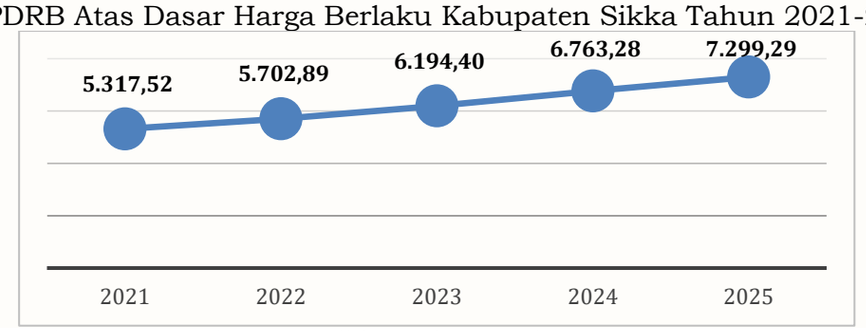
Salah satu indikator utama dalam mengukur pembangunan ekonomi daerah adalah perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor usaha. Indikator-indikator lain yang tidak kalah penting antara lain inflasi, kemiskinan, investasi, nilai tukar, dan lain-lain. Analisis ekonomi daerah dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah. Penjabaran lebih lanjut mengenai indikator-indikator ekonomi daerah sebagai berikut:

3.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan ekonomi masyarakat dalam wilayah domestik suatu daerah. PDRB terdiri dari:

1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
   PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun perhitungan. PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik 3.1.

Grafik 3.1.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

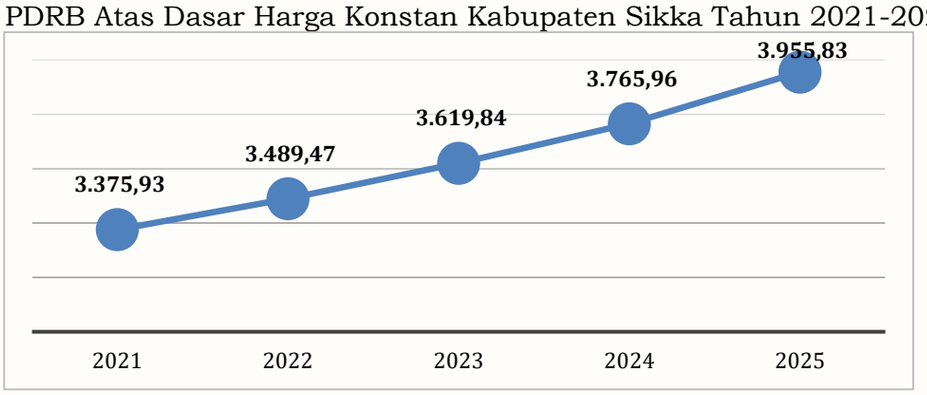


Sumber Data : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 mengalami peningkatan. PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun 2021 sebesar Rp5.317,52,- miliar mengalami kenaikan pada Tahun 2022 menjadi sebesar Rp5.702,89,- miliar pada Tahun 2023 meningkat lagi menjadi Rp6.194,40, miliar pada Tahun 2024 naik menjadi sebesar Rp6.763,28 miliar dan pada Tahun 2025 naik menjadi sebesar Rp7.299,29 miliar.

2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
   PDRB ADHK dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Selanjutnya Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik 3.2.

Grafik 3.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025



Sumber : Data Olahan dari Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

PDRB ADHK Kabupaten Sikka dari Tahun 2021-2025 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2021 PDRB ADHK sebesar Rp3.375,93 miliar mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp3.489,47, miliar naik pada Tahun 2023 menjadi sebesar Rp3.619,84 miliar dan naik pada tahun 2024 sebesar Rp3.765,96 triliun dan naik lagi pada tahun 2025 menjadi sebesar Rp3.955,83 miliar.

3. Pembentukan Sektor dalam PDRB
   Pembentukan Nilai PDRB dari masing-masing Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Nilai Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka (miliar rupiah) Tahun 2021-2025

No	Sektor	Nilai (Rp. Juta)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.203.84	1.254,84	1.307,94	1.353,61	1.415,02
2	Pertambangan dan Penggalian	45,77	46,79	47,78	49,44	48,82
3	Industri Pengolahan	54,78	58,36	62,80	62,65	73,79
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,59	4,67	5,20	5,67	5,84
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,76	3,79	3,85	3,92	3,92
6	Konstruksi	173,11	173,69	188,31	192,86	186,63
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	362,12	388,17	409,49	447,16	493,77
8	Transportasi dan Pergudangan	178,80	186,94	191,30	182,87	213,39
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	20,85	22,16	23,51	24,67	27,16
10	Informasi dan Komunikasi	315,77	331,82	344,86	360,25	365,90
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	113,94	114,83	115,76	119,52	126,29
12	Real Estate	68,83	71,26	73,69	76,50	77,39
13	Jasa Perusahaan	5,61	5,77	6,12	6,46	6,81
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	426,17	427,02	427,44	443,76	457,09
15	Jasa Pendidikan	284,12	283,64	292,50	309,85	326,40
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	72,70	73,96	75,49	78,81	81,09
17	Jasa lainnya	41,19	41,76	43,80	45,36	46,52
	PDRB	**3.375,93**	**3.489,47**	**3.619,84**	**3.765,96**	**3.955,83**

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

Dilihat dari sumber pembentuknya, PDRB Kabupaten Sikka hingga saat ini masih didominasi oleh sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan nilai sekitar Rp1,4 triliun lebih. Hal ini dapat dilihat dari Nilai Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2025, Nilai sektor sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp1.415,02 triliun, disusul sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp493,77 Miliar,- dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp457,09 miliar. Sedangkan nilai sektor yang paling kecil pada sektor Jasa Perusahaan sebesar Rp6.81 miliar, sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar Rp5,84 miliar dan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar Rp3,92 miliar.

Dari Besaran pembentukan Nilai PDRB dari masing-masing Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 secara Persentase dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Persentase Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

No	Sektor	Kontribusi (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	37,43	38,16	38,51	38,53	38,08
2	Pertambangan dan Penggalian	1,12	1,09	1,04	0,99	0,90
3	Industri Pengolahan	1,7	1,71	1,84	1,86	2,04
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,13	0,14	0,13	0,13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07
6	Konstruksi	4,76	4,69	4,85	4,66	4,35
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,36	10,80	11,11	11,42	11,89
8	Transportasi dan Pergudangan	5,06	5,39	5,57	4,97	5,58
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,62	0,62	0,62	0,61	0,62
10	Informasi dan Komunikasi	6,3	6,20	5,96	5,88	5,63
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,92	3,95	3,75	3,61	3,59
12	Real Estate	1,91	2	2,06	2,16	2,14
13	Jasa Perusahaan	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,86	12,08	11,55	11,86	11,61
15	Jasa Pendidikan	10,17	9,66	9,42	9,60	9,72
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,25	2,14	2,20	2,38	2,4
17	Jasa lainnya	1,15	1,12	1,11	1,1	1,08
	PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: *Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026*

Dari Tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa kontribusi PDRB Kabupaten Sikka hingga tahun 2025 masih didominasi dari sektor pertanian sebesar 38,08%, disusul sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencapai 11,89%, dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,61%. Sedangkan kontribusi sektor yang paling kecil pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,07%, sektor Jasa Perusahaan sebesar 0,17% dan sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,13%.

3.Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita dihitung dengan membagi total pendapatan (seperti Produk Domestik Bruto/PDB) dengan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita Kabupaten Sikka dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 mengalami kenaikan.

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan tren peningkatan di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dan secara nasional selama periode 2021 hingga 2025. Namun, jika dibandingkan secara relatif, PDRB per kapita Kabupaten Sikka masih tertinggal cukup signifikan dibandingkan dengan Provinsi NTT maupun rata-rata nasional. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2021-2025 (Juta Rupiah)

Wilayah	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Sikka	16,3	17,3	18,5	19,9	21,14
Provinsi Nusa Tenggara Timur	20,6	21,7	23,1	24,3	24,3
Nasional	62,3	71	75	78,6	78,6

Sumber: Data BPS, 2026

Dari data diatas terlihat pada tahun 2021, PDRB per kapita Kabupaten Sikka tercatat sebesar Rp16,3 juta, sedikit di bawah rata-rata provinsi sebesar Rp20,6 juta, dan jauh di bawah angka nasional sebesar Rp 62,3 juta. Ketimpangan ini berlanjut hingga tahun 2024, meskipun terjadi peningkatan nilai PDRB per kapita di semua level. Pada 2024, Sikka mencatat Rp19,9 juta, sedangkan Provinsi NTT Rp24,3 juta, dan nasional Rp 78,6 juta. Pada 2025, Sikka mencatat Rp21,14 juta, sedangkan Provinsi NTT Rp24,3 juta, dan nasional Rp 78,6 juta.

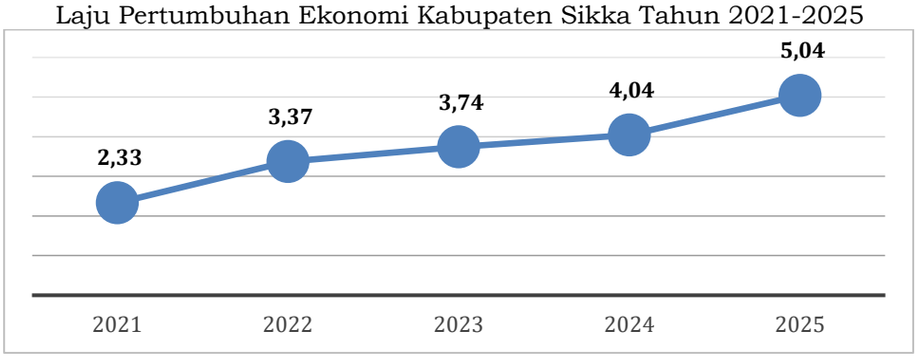
Pertumbuhan tahunan PDRB per kapita Sikka relatif stabil, dengan peningkatan sekitar Rp1 juta per tahun. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aktivitas ekonomi dan distribusi pendapatan di wilayah tersebut, meskipun lajunya masih lebih lambat dibandingkan pertumbuhan pendapatan rata-rata nasional. Gap antara Sikka dan rata-rata nasional yang mencapai hampir Rp 57 juta pada 2025 menunjukkan tantangan besar dalam mempersempit kesenjangan ekonomi antarwilayah

Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti struktur ekonomi yang masih dominan di sektor primer, rendahnya industrialisasi dan hilirisasi, serta terbatasnya akses terhadap pasar dan infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, perlu ada strategi pembangunan ekonomi yang lebih agresif dan inklusif di Sikka untuk mendorong nilai tambah sektor-sektor potensial dan memperkuat daya saing lokal.

4. **Pertumbuhan Ekonomi**

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka selama periode tahun 2021–2025 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kabupaten sikka 2,33 mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 3,37% dan terus meningkat pada tahun 2023 sebesar 3,74%, naik lagi tahun 2024 sebesar 4,04% dan pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan lagi menjadi 5,04% dapat dilihat pada Grafik 3.3.

Grafik 3.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka dilihat dari Pertumbuhan masing-masing sektor PDRB menurut sektor/lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor/Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka (persen) Tahun 2021-2025

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,58	4,24	4,23	3,49	4,54
2.	Pertambangan dan Penggalian	2,16	2,24	2,10	3,47	-1,25
3.	Industri Pengolahan	0,95	6,54	7,60	3,89	13,09
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	6,12	1,73	11,28	9,16	2,95
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,71	0,83	1,73	1,65	0,12
6.	Konstruksi	2,54	0,33	8,42	2,42	-3,23
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,42	7,19	5,49	9,20	10,42
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,11	4,55	2,33	-4,41	16,69
9.	Penyediaan Akomodasi makan dan Minum	3,13	6,28	6,10	4,92	10,13
10.	Informasi dan Komunikasi	4,46	5,08	3,93	4,46	1,47
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,77	0,78	0,81	3,25	5,66
12.	Real Estate	2,95	3,53	3,41	3,81	1,16
13.	Jasa Perusahaan	-10,12	2,87	6,09	5,50	5,39
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,11	0,20	0,10	3,82	3,00
15.	Jasa Pendidikan	-1,61	-0,17	3,13	5,93	5,34
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,57	1,74	2,06	4,40	2,90
17.	Jasa Lainnya	-4,35	1,40	4,87	3,58	2,54
	Total	**2,13**	**3,36**	**3,74**	**4,04**	**5,04**

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

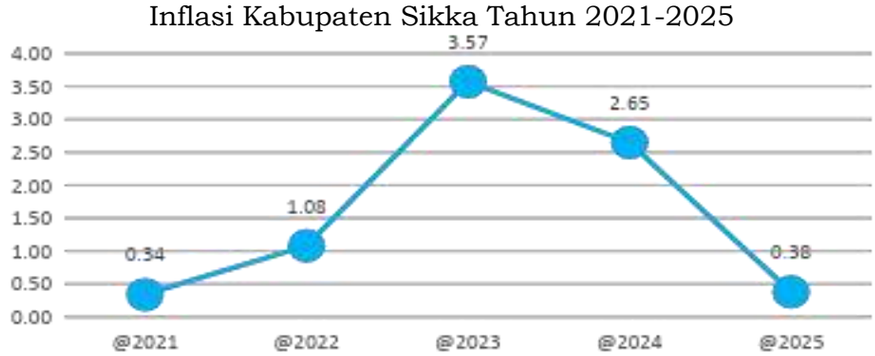
Dari Tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dari masing-masing sektor lapangan usaha kontribusi PDRB Kabupaten Sikka tahun 2025 tertinggi pada sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 16,69 meningkat signifikan dari tahun 2024 sebesar -4,41 . Sektor Jasa Industri Pengolahan sebesar 13,09 meningkat dari Tahun 2024 sebesar 3,89. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,42 meningkat dari tahun 2024 sebesar 9,20, Sektor Jasa Penyediaan Akomodasi makan dan Minum sebesar 10,13 meningkat dari Tahun 2024 sebesar 4,92.

Sedangkan Sektor ekonomi yang mengalami perlambatan terdapat pada sektor Konstruksi sebesar -3,23 menurun dari Tahun 2024 sebesar 2,42, Sektor Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar -1,25 menurun dari Tahun 2024 sebesar 3,47, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,12 pada tahun 2025 menurun dari Tahun 2024 sebesar 1,65.

5. **Inflasi**

Inflasi adalah proses kenaikan harga barang-barang secara umum. Apabila terjadi kenaikan harga barang (inflasi) tanpa dibarengi dengan kenaikan pendapatan masyarakat, maka akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan akibatnya adalah terjadinya kemacetan transaksi yang selanjutnya akan berdampak pada sektor produksi dan perekonomian secara keseluruhan. Inflasi di Kabupaten Sikka selama 5 tahun dapat dilihat pada Grafik 3.4.

Grafik 3.4
Inflasi Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025



Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa inflasi Kabupaten Sikka mengalami fluktuatif. Pada tahun 2021 inflasi sebesar 0,34%, pada tahun 2022 naik menjadi sebesar 1,08%, naik lagi pada tahun 2023 menjadi sebesar 3,57%, turun pada tahun 2024 menjadi sebesar 2,65% dan turun pada tahun 2025 menjadi 0,38%.

Jika dibandingkan dengan Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2025 sebesar 0,47 dan Nasional sebesar 1,57, Maka Inflasi Kabupaten Sikka lebih rendah. Perbandingan Inflasi Kabupaten Sikka dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional dapat dilihat pada Tabel-3.5.

Tabel 3.5
Inflasi Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2021-2025

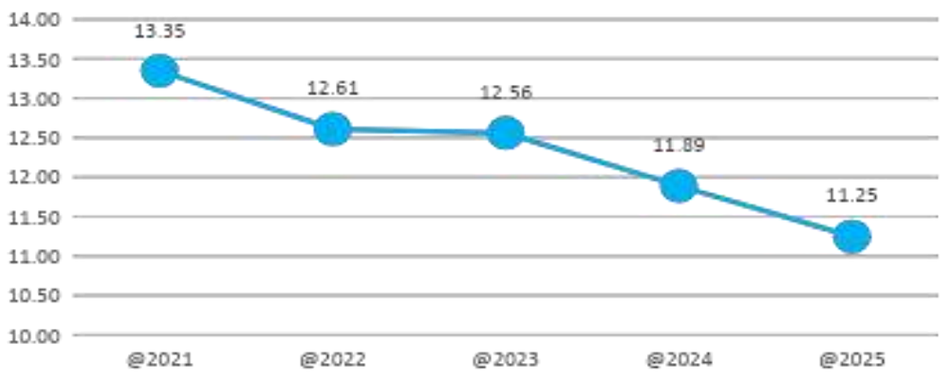
No	Wilayah	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kabupaten Sikka	0,34	1,08	3,57	2,65	0,38
2.	Provinsi NTT	1,67	6,65	2,42	0,47	0,47
3.	Nasional	1,87	5,51	2,61	1,57	1,57

Sumber : NTT dalam Angka, 2026

6. Angka Kemiskinan

Kesuksesan pembangunan dapat diukur dengan angka kemiskinan yang dihitung berdasarkan persentase orang miskin di suatu wilayah. Persentase orang miskin di Kabupaten Sikka lebih rendah dibandingkan dengan tingkat provinsi, namun lebih tinggi dari nasional. Jika dibandingkan dengan penurunan kemiskinan di tingkat provinsi dan nasional, penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sikka mengalami perkembangan yang positif. Hal Ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah dengan basis pertanian cenderung lebih kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi dibandingkan dengan wilayah yang bergantung pada sektor perdagangan maupun industri. Persentase penduduk miskin Kabupaten Sikka selama 5 tahun dapat dilihat pada Grafik 3.5.

Grafik 3.5
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sikka Tahun 2021- 2025

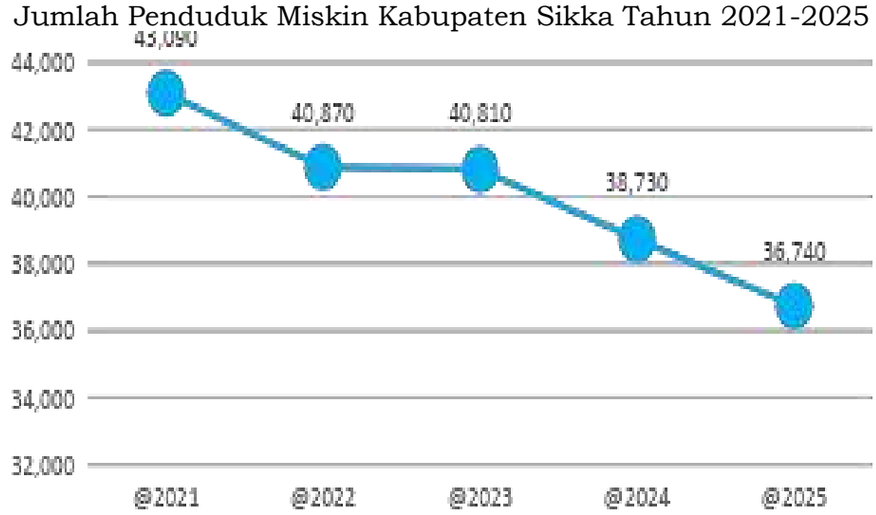


Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

Dari grafik di atas dapat dijelaskan, untuk persentase penduduk miskin di Kabupaten Sikka menunjukkan tren penurunan dalam periode 2021-2025. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 13,35 persen. Ini merupakan puncak persentase kemiskinan dalam periode yang diamati. Namun, setelah tahun 2021, Kabupaten Sikka berhasil menunjukkan tren positif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2022, persentase penduduk miskin menurun signifikan menjadi 12,61 persen, dan berlanjut meskipun sedikit melambat di tahun 2023 menjadi 12,56 persen, dan menurun secara signifikan pada tahun 2024 menjadi sebesar 11,89 persen. Pencapaian paling baik terlihat pada tahun 2025, di mana persentase penduduk miskin Kabupaten Sikka berhasil ditekan hingga mencapai 11,25 persen. Angka ini merupakan yang terendah dalam periode 2021-2025.

Jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Sikka mengalami tren penurunan mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2025 yang dapat dilihat pada Grafik 3.6.

Grafik 3.6
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

Penurunan jumlah penduduk miskin memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Peningkatan PDRB menunjukkan adanya pertumbuhan aktivitas ekonomi yang mencerminkan meningkatnya produksi barang dan jasa, berkembangnya usaha masyarakat, serta meningkatnya perputaran ekonomi daerah. Kondisi tersebut secara tidak langsung mendorong terbukanya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan bertambahnya peluang usaha produktif. Apabila pertumbuhan PDRB mampu didorong secara inklusif dan menyentuh sektor-sektor yang menjadi sumber penghidupan masyarakat, seperti pertanian, perdagangan, perikanan, UMKM, dan jasa, maka dampaknya akan berkontribusi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Dengan meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan menjadi lebih baik sehingga tingkat kemiskinan dapat ditekan.

Garis kemiskinan Kabupaten Sikka pada tahun 2025 sebesar Rp 447.472, hal ini menunjukkan setiap individu di Kabupaten Sikka yang memiliki pengeluaran atau pendapatan rata-rata per kapita per bulan di bawah Rp 447.472 dianggap sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan (GK) adalah ambang batas pendapatan minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, baik pangan maupun non-pangan, dalam periode waktu tertentu (biasanya satu bulan). Seseorang atau rumah tangga dikategorikan miskin jika pendapatannya berada di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskian Kabupaten Sikka selama 5 tahun dapat dilihat pada Grafik 3.7.

Grafik 3.7
Garis Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025



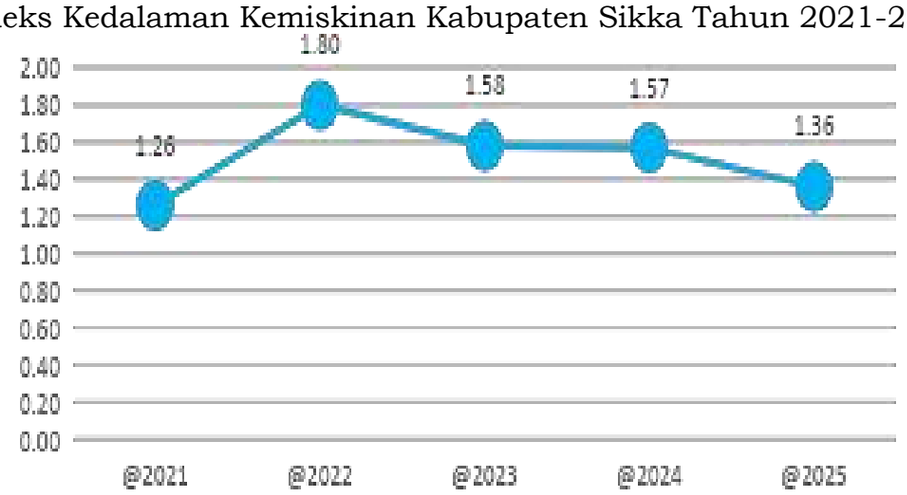
Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka 2026

Dengan demikian, jika dibuat perbandingan antara daya beli masyarakat dari rata-rata pengeluaran perkapita masyarakat Sikka yang terus meningkat dan mencapai Rp 923.314,70 pada tahun 2025 dengan garis kemiskinan Kabupaten Sikka sebesar Rp 447.472, maka seharusnya Angka kemiskinan di Kabupaten Sikka sudah mampu diatasi dengan cukup baik. Namun, angka garis kemiskinan di Kabupaten Sikka yang tiap tahun terus-menerus meningkat membuat daya beli masyarakat miskin menjadi lebih rendah yang berakibatkan ketidakberdayaan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketidakharmonisan antara Jumlah pendapatan perkapita dengan garis kemiskinan secara langsung akan mengakibatkan bertambahnya jumlah orang miskin di Kabupaten Sikka dengan demikian Pemerintah Kabupaten Sikka harus merancang strategi yang ideal dalam mengentaskan kemiskinan di daerahnya.

Kekurangan kedua berkaitan dengan keterlibatan dalam proses pengambilan kebijakan, di mana kebanyakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak melibatkan partisipasi dari golongan miskin yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Keterbatasan partisipasi dari pihak yang terkena dampak kebijakan menyebabkan ketidakcocokan antara kebutuhan yang sebenarnya dan kebijakan yang diterapkan. Akibatnya, kebijakan tersebut seringkali gagal mencapai tujuan yang diharapkan, meskipun telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pelaksanaannya. Dengan demikian, penyesuaian antara kebutuhan dan pemberian akan menjadi solutif yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan berdasarkan keterlibatan dari objek kebijakan.

Ketiga adalah *vulnerability* atau kerentanan terhadap kemiskinan. Dalam konteks ini, kerentanan terhadap kemiskinan terkait dengan kelompok masyarakat yang berada di atas garis kemiskinan tetapi sangat rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan karena perubahan yang terjadi, dikenal sebagai kelompok *near poor*. Namun demikian data mengenai kelompok *near poor* ini tidak tersedia, untuk itu kerentanan didekati melalui dua mekanisme, yakni Angka kedalaman kemiskinan dan Angka keparahan kemiskinan. Semakin dalam Angka kemiskinan dan keparahan kemiskinan maka akan semakin banyak orang yang berada pada jalur kerentanan. Persoalan kemiskinan bukan hanya tentang jumlah dan persentase penduduk miskin, oleh karena itu perlu diperhatikan juga indeks kedalaman (*Poverty gap index*) dan indeks keparahan (*poverty severity index*). Dengan demikian, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan atas kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sikka selama 5 tahun dapat dilihat pada Grafik 3.8.

Grafik 3.8
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka 2026

Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*) dan Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*) memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi kemiskinan di suatu wilayah. Indeks kedalaman kemiskinan mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Sikka menunjukkan fluktuasi namun dengan tren penurunan secara keseluruhan. Indeks kedalaman kemiskinan tercatat mengalami tren penurunan mulai tahun 2022. Penurunan nilai indeks ini mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin mendekati garis kemiskinan (kondisi membaik).

Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan mengukur distribusi pengeluaran diantara penduduk miskin yang mencerminkan seberapa parah ketimpangan di antara penduduk miskin itu sendiri. Semakin tinggi kedalaman kemiskinan yang dimiliki, akan semakin lebar pula kesenjangan kemiskinan yang menyebabkan banyak orang yang masuk pada kategori rentan. Indeks keparahan kemiskinan dari tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,21, ini mengindikasikan bahwa pada tahun tersebut, distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin lebih merata, atau dengan kata lain, kesenjangan di antara mereka yang miskin menjadi lebih kecil. Namun pada tahun 2022, nilai indeks melonjak tajam menjadi 0,40 yang menunjukkan peningkatan ketimpangan di antara penduduk miskin atau adanya kelompok yang semakin jauh di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2023 terjadi penurunan signifikan kembali menjadi 0,29 dan pada tahun 2024, indeks sedikit meningkat menjadi 0,31 dan pada tahun 2025 meningkat lagi menjadi 0,34. Indeks keparahan kemiskinan di wilayah Kabupaten Sikka yang dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.9
Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

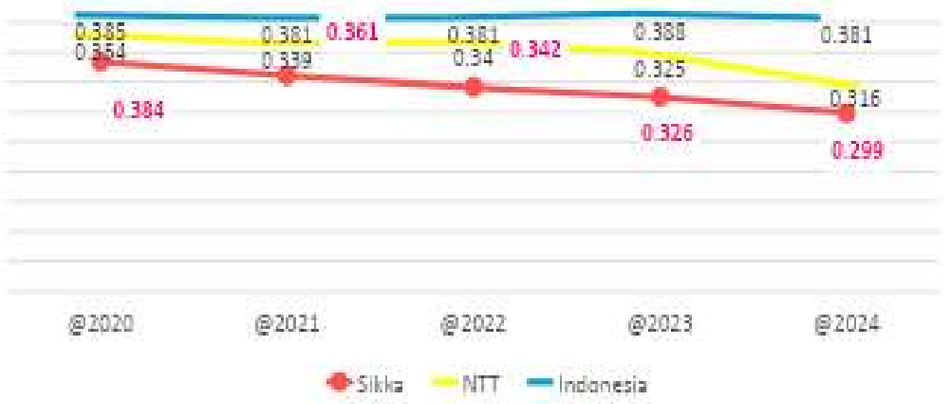


Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka 2025

7. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu wilayah. Rasio Gini erat berkaitan dengan corak dan karakter ekonomi yang mewarnai suatu daerah. Rasio Gini menghasilkan angka antara 0 dan 1, dimana nilai 0 mengindikasikan adanya kesetaraan sempurna, sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan ekstrem. Pada tahun 2020, koefisien Gini Kabupaten Sikka tercatat sebesar 0,384, yang hampir setara dengan rata-rata nasional sebesar 0,385. Namun, hingga tahun 2024, angka ketimpangan di Sikka terus menurun secara konsisten hingga mencapai 0,299, yang berarti bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Sikka kini lebih rendah daripada rata-rata provinsi (0,316) maupun nasional (0,381). Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.1
Indeks Gini Kabupaten Sikka, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, 2025

Pemerataan pendapatan di Kabupaten Sikka Semakin membaik dan lebih baik dari angka nasional maupun provinsi. Penurunan koefisien Gini di Sikka mengindikasikan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan, atau dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi mulai lebih merata di antara kelompok masyarakat. Hal ini bisa disebabkan oleh peningkatan akses terhadap sumber penghidupan, pemerataan bantuan sosial atau subsidi, atau peningkatan produktivitas ekonomi di sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja dalam skala luas seperti pertanian, perdagangan kecil, dan jasa informal.

Sebaliknya, angka nasional relatif stabil di sekitar 0,38 selama lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa secara umum ketimpangan pendapatan belum menunjukkan perubahan berarti di tingkat nasional. Namun demikian, meskipun ketimpangan menurun, angka 0,299 di Kabupaten Sikka belum berarti bahwa distribusi pendapatan sudah ideal. Angka ini masih mengindikasikan adanya kesenjangan, meskipun tidak ekstrim. Untuk itu, penguatan ekonomi lokal yang inklusif tetap diperlukan, khususnya melalui pengembangan UMKM, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan kerja, serta perluasan lapangan kerja yang berkualitas.

Arah kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sikka Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Arah Kebijakan Nasional,
Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Sikka Tahun 2027

RKP Nasional	RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur	RKPD Kabupaten Sikka
TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2027		
Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, investasi dan Industri	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Penguatan Kapasitas dan Sistem Lintas Sektor yang Efektif dan Berkelanjutan ”Pemantapan sistem pembangunan manusia lintas sektor, memperkuat sektor ekonomi berkelanjutan, integrasi pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup dengan teknologi, serta penguatan kolaborasi tata kelola pemerintahan”
TARGET SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027		
Pertumbuhan Ekonomi (%)		
5,9-7,5	4,78 – 5,65	5,06
GNI Per Capita(US$)		
5.900-5.990		
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)		
39,57		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
76,84		80,66
Tingkat Kemiskinan (%)		
6,0-6,5	16,50-17,00	10,76
Rasio Gini		
0,362-0,367	0,295-0,301	0,323
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
4,30-4,87	2,30-2,89	2,47
Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia		
0,58	0,500	73,73

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Sikka dapat dilihat dari pengelolaan pendapatan, Pengelolaan Belanja dan pengelolaan Pembiayaan. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

3.2.1.Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan dalam perpajakan terkait dengan prinsip keadilan horizontal dan vertikal. Keadilan horizontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip keadilan vertikal dilandasi pada konsep bahwa masyarakat dengan kondisi yang berbeda, diperlakukan secara berbeda pula. Implikasinya adalah masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi atau memiliki kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Sikka, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan intensitas dan efektivitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam struktur APBD Kabupaten Sikka.

Untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah, pemerintah daerah perlu

mengedepankan sumber-sumber pembiayaan yang potensinya besar untuk menjadi fokus program dan kegiatan. Dilihat dari struktur APBD Kabupaten Sikka, penerimaan yang bersumber dari Pajak Daerah, yaitu Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, PBB-P2 dan BPHTB merupakan sumber pendapatan primadona bagi Kabupaten Sikka. Sedangkan Pajak Reklame masih harus ditingkatkan lagi upaya pencapaiannya sesuai potensi yang terukur yang dapat dicapai. Mengingat dampak pajak yang signifikan, pemerintah daerah perlu memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan pajak daerah, tentu saja dengan tidak mengabaikan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.

Pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan besaran alokasinya karena tergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan sesuai kriteria dan persyaratan kementerian/lembaga dalam rangka mendukung capaian RPJMN yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak pusat dan provinsi diupayakan melalui upaya meningkatkan aktivitas ekonomi yang berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal DBH. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

Sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Sikka berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Jenis Pendapatan Daerah yang menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah dalam menggali berbagai potensi sumber-sumber penerimaan dan upaya untuk mendapatkannya adalah PAD. Sedangkan jenis Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sangat bergantung pada kebijakan alokasi anggaran dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Pendapatan Transfer, terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Komponen pembentuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan (DBH, DAU dan DAK), Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Dana Desa dan Dana Insentif Daerah (DID). Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari DBH dan Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari Pendapatan Hibah, Pendapatan Darurat dan Lain-lain Pendapatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah dijabarkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

a. Pajak Daerah
   Jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah tingkat kabupaten, meliputi : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-PP), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
b. Retribusi Daerah
   Retribusi Pemerintah Kabupaten Sikka terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 12 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Daerah Nomor 13 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
   Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan berasal dari dividen laba BUMD yakni PT. Bank NTT dan Perumda Mawarani. Sedangkan Perumda Air Minum Wair Puan belum memberikan kontribusi terhadap PAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diantaranya: Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Bank, Tuntutan Ganti rugi, Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan, Pendapatan BLUD, dll.

Besaran Realisasi Pendapatan Asli daerah dari Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025 **
	PENDAPATAN					
A	**Pendapatan Asli Daerah**	**90.816.311.412,52**	**96.656.644.905,07**	**105.677.799.709,09**	**107.057.941.308,05**	**133.336.896.257,86**
	Pajak daerah	19.494.028.872,90	21.604.888.101,00	24.139.671.880,00	28.361.626.407,00	36.263.013.044,00
	Retribusi daerah	7.837.377.672,00	8.304.664.482,00	8.173.630.623,00	7.871.935.158,00	82.877.588.261,47
	Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	2.694.036.222,00	1.707.467.340,00	3.479.066.260,00	1.698.073.291,00	2.635.916.846,00
	Lain-lain PAD yang sah	60.790.868.645,62	65.039.624.982,07	69.885.430.946,09	69.126.306.452,05	11.560.378.106,38

Sumber : Data Olahan dari BPKAD Kabupaten Sikka, Tahun 2026

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka dari Tahun 2021-2025 mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 sebesar Rp90.816.311.412,52 meningkat menjadi Rp96.656.644.905,07 pada tahun 2022 dan naik lagi pada Tahun 2023 menjadi sebesar Rp105.677.799.709,09. Pada Tahun 2024 PAD naik menjadi Rp107.057.941.308,05 dan meningkat lagi pada tahun 2025 menjadi Rp133.336.896.257,86.

3.2.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Dana Transfer meliputi Transfer Pusat; Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum berupa Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum dan Dana Transfer Khusus berupa DAK Fisik dan DAK Non Fisik), Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa serta Transfer Antar Daerah; Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Transfer ke Daerah terdiri dari :

a. Dana Bagi Hasil
   Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam.
b. Dana Alokasi Umum
   Dana Alokasi Umum merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi.
   Besarnya Dana Alokasi Umum yang ditransfer ke daerah ditentukan oleh Alokasi Dasar (AD) dan Celah Fiskal (CF). Yang menentukan alokasi dasar adalah gaji ASN di daerah. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. Kapasitas Fiskal dipengaruhi oleh jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan PDRB per kapita, serta besarnya belanja daerah. Kapasitas Fiskal adalah penjumlahan PAD, DBH Pajak, dan DBH SDA
c. Dana Alokasi Khusus
   Dana Alokasi Khusus merupakan dana berasal dari anggaran (APBN) dan dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang khusus.

DAK berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat khusus untuk membiayai pelaksanaan program prioritas nasional di daerah. Penggunaan dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini lebih efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

d. Dana Desa
   Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
e. Dana Insentif Daerah
   Dana Insentif Daerah yang disingkat DID adalah Dana Penyesuaian dalam APBN yang digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan pelayanan dasar yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu.

Besaran Realisasi Pendapatan Transfer dari Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Dana Perimbangan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

Kode	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025*
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**860.935.612.981**	**793.668.619.861**	**1.066.948.485.575**	**1.067.065.850.070**	**1.099.325.802.704**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	830.211.032.981	762.805.369.810	1.032.717.423.000	1.027.157.386.210	1.075.652.507.387
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.724.580.000	30.863.250.051	34.231.062.575	39.908.463.860	23.673.295.317

Sumber : Data Olahan dari BPKAD Kabupaten Sikka, Tahun 2026

Dari Tabel 3.8, dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Transfer Kabupaten Sikka dari Tahun 2021-2025 mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2021 Pendapatan Transfer sebesar Rp860.935.612.981,- dan menurun pada Tahun 2022 sebesar Rp793.668.619.861. Pada tahun 2023 pendapatan Transfer naik menjadi Rp1.066.948.485.575 naik lagi pada Tahun 2024 menjadi Rp1.067.065.850.070 dan pada Tahun 2025 menjadi Rp.1.099.325.802.704

3.2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, DBH Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Dana Desa dan DID. Besaran Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2021-2025

Kode	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**22.180.150.993**	**42.275.991.207**	**34.035.136.275**	**14.508.282.076**	**14.829.591.970,90**
	Pendapatan Hibah				200.000.000	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	22.180.150.993	42.275.991.207	34.035.136.275	14.308.282.076	14.829.591.970,90
	Pendapatan Hibah Dana BOS	30,724,580,000	30.253.250.051	-		
	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas	-	12.022.741.156	14.502.954.838	-	-

	Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)					

Sumber : Data Olahan dari BPKAD Kabupaten Sikka, Tahun 2026

Dari Tabel 3.9, dapat dijelaskan bahwa Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2021-2025 mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2021 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp22.180.150.993 meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp42.275.991.207. Pada tahun 2023 menurun menjadi sebesar Rp34.035.136.275 dan turun lagi pada Tahun 2024 menurun sebesar Rp14.508.282.076 dan pada Tahun 2025 meningkat lagi menjadi sebesar Rp14.829.591.970,90.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah pada Tahun 2027, Kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan antara lain :

1) Sinergi dalam implementasi opsen PKB
2) Tata kelola dan profitabilitas BUMD serta optimaliasi pemanfaatan BMD
3) Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungut pajak dan retribusi;
4) Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien;
5) Pemetaan dan pemutakhiran basis data potensi pajak dan retribusi melalui peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah dengan memperbaharui secara berkala data subyek-subyek pajak daerah dan retribusi daerah;
6) Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar pajak dan retribusi daerah;
7) Optimalisasi pemanfaatan aset-aset daerah yang potensial melalui kerjasama dengan pihak swasta;
8) Digitalisasi dan penerapan sistem cashless melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
9) Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke bank/lembaga keuangan;
10) Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar perangkat daerah pengelolaan pendapatan daerah;
11) Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
12) Meningkatkan partisipasi dan peran Pihak Ketiga untuk penyediaan biaya pembangunan daerah;
13) Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
    a) meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
    b) meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui: peningkatan kapasitas sistem online pembayaran pajak, *one-stop service*, samsat keliling, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
    c) meningkatkan informasi dan komunikasi perpajakan daerah;
    d) meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
    e) membentuk sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment (e-payment)* dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face* dengan *fiscus*; dan
    f) Penegakan Perda tentang Pajak Daerah melalui pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah.
14) Meningkatkan dan mengefektifkan sosialisasi kenaikan tarif sesuai Perda dan Perbub kepada masyarakat secara luas;
15) Pendelegasian tugas kepada Camat selaku Koordinator Pungutan PBB P2.
16) Pemberian Keringanan atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2022 dan Keputusan Gubernur NTT Nomor 453/KEP/HK/2024;

Mengacu pada kebijakan dan strategi upaya peningkatkan pendapatan daerah Tahun 2027, maka Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2027 dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Sikka Tahun 2027

Kode	URAIAN	2026	Rancangan 2027
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.240.085.000.000,00**	**1.157.261.406.595,36**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**124.134.620.314,00**	**123.497.768.608,36**
4.1.01	Pajak Daerah	41.507.644.427,47	37.841.036.604,77
4.1.02	Retribusi Daerah	68.919.328.645,53	69.456.076.762,59
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.635.916.846,00	2.635.916.846,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	11.071.730.395,00	13.564.738.395,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.099.383.767.086,00**	**1.017.197.025.387**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.062.607.604.000,00	981.115.124.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	36.776.163.086,00	36.081.901.387
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**16.566.612.600,00**	**16.566.612.600,00**
	Pendapatan Hibah	113.400.000	113.400.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.453.212.600	16.453.212.600

Sumber : Data Olahan Bapperida, 2026

Dari Tabel 3.10, dapat dijelaskan bahwa Target Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2027 ditargetkan sebesar Rp 1.152.261.406.595,36 yang terdiri dari :
- PAD Tahun 2027 ditargetkan sebesar Rp 123.497.768.608,36
- Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp 1.017.197.025.387,- menurun dari Tahun 2026 sebesar Rp1.099.383.767.086,- penurunan ini tidak memperhitungkan penerimaan dari DAK Fisik tahun 2026.
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp16.566.612.600,-

3.2.2.Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran tertentu dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Belanja Daerah digunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan unsur penunjang urusan pemerintahan.

Struktur Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari:

1. Belanja Operasi, Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari:
   a. Belanja Pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Belanja Pegawai dipergunakan untuk :
      1) Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada pembayaran Gaji Pegawai Negeri meliputi PNS;
      2) Belanja Gaji Dokter Pegawai Tidak Tetap;

3) Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Pembayaran Gaji Pejabat Negara;
4) Belanja Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai;
5) Belanja Uang Tunggu dan Pensiun Pegawai Negeri dan Pejabat Negara
6) Belanja Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri;
7) Belanja Uang Lembur PNS;
8) Belanja Pegawai Honorer yang diangkat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi unit organisasi pemerintah;
9) Pembayaran Tunjangan Sosial bagi Pegawai Negeri melalui unit organisasi/Lembaga/Badan tertentu;
10) Pembayaran uang vakasi;
11) Pembayaran tunjangan khusus merupakan pembayaran kompensasi kepada Pegawai Negeri yang besarannya ditetapkan oleh Presiden/Menteri Keuangan;
12) Pembayaran untuk Uang Duka Wafat/Tewas yang besarannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dikecualikan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang.

b. Belanja Barang dan Jasa
Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Belanja Barang dipergunakan untuk :
1) Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Jenis pengeluaran terdiri dari :
   a) Belanja keperluan perkantoran;
   b) Belanja pengadaan bahan makanan;
   c) Belanja penambah daya tahan tubuh;
   d) Belanja bahan;
   e) Belanja pengiriman surat dinas;
   f) Honor yang terkait dengan operasional Satker;
   g) Belanja langganan daya dan jasa (ditafsirkan sebagai listrik, telepon, dan air) termasuk atas rumah dinas yang tidak berpenghuni;
   h) Belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan (ditafsirkan sebagai gedung operasional sehari-hari berikut halaman gedung operasional);
   i) Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin (ditafsirkan sebagai pemeliharaan aset yang terkait dengan pelaksanaan operasional Satker sehari-hari) tidak termasuk biaya pemeliharaan yang dikapitalisasi;
   j) Belanja sewa gedung operasional sehari-hari satuan kerja; dan
   k) Belanja barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

2) Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal. Jenis pengeluaran terdiri dari :
   a) Honor yang terkait dengan output kegiatan;
   b) Belanja operasional terkait dengan penyelenggaraan administrasi kegiatan di luar kantor, antara lain biaya paket rapat/pertemuan, ATK, uang saku, uang transportasi lokal, biaya sewa peralatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan berkenaan;
   c) Belanja jasa konsultan;
   d) Belanja sewa yang dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja;

e) Belanja jasa profesi;
f) Belanja biaya pemeliharaan non kapitalisasi yang dikaitkan dengan target kinerja;
g) Belanja jasa;
h) Belanja perjalanan;
i) Belanja barang penunjang kegiatan dekonsentrasi;
j) Belanja barang penunjang kegiatan tugas pembantuan;
k) Belanja barang fisik lain tugas pembantuan; dan
l) Belanja barang non operasional lainnya terkait dengan penetapan target kinerja tahun yang direncanakan.

3) Belanja barang Badan Layanan Umum (BLU) merupakan pengeluaran anggaran belanja operasional BLU termasuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BLU.
4) Belanja barang untuk masyarakat atau entitas lain merupakan pengeluaran anggaran belanja negara untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau entitas lain yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria kegiatan bantuan sosial.

c. Belanja Bunga
Pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang, utang dalam negeri yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang. Pembayaran bunga utang meliputi antara lain :
1) Pembayaran kewajiban pemerintah atas bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN), bunga Obligasi Negara, Imbalan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Bunga Pinjaman Program, Bunga Pinjaman Proyek, dan bunga Utang Luar Negeri melalui penjadwalan kembali pinjaman;
2) Pembayaran kewajiban pemerintah atas diskon SPN dan diskon Obligasi Negara;
3) Pembayaran *Loss on Bond Redemption.* Digunakan untuk mencatat beban yang timbul dari selisih *clean price* yang dibayar pemerintah pada saat pembelian kembali SUN *(buyback)* dengan *carrying value* SUN. *Carrying Value* SUN adalah nilai nominal SUN setelah dikurangi atau ditambah *unamortized discount* atau premium.
4) Pembayaran diskon SBSN; dan
5) Denda merupakan pembayaran imbalan bunga atas kelalaian pemerintah membayar kembali pengembalian kelebihan pajak (*restitusi*), pengembalian kelebihan bea dan cukai serta imbalan bunga atas pinjaman perbankan dan bunga dalam negeri jangka pendek lainnya.

d. Belanja Subsidi
Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi diberikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Belanja subsidi terdiri dari:
1) Energi
Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu, *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) konsumsi rumah tangga dan usaha mikro serta tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.
2) Non Energi
Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan barang publik yang bersifat non energi sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.

e. Belanja Hibah, merupakan belanja Pemerintah Pusat dalam bentuk transfer uang/barang kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, BUMN/D, dan Pemerintah Daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak

mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa termasuk dalam belanja hibah adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah.

3) Belanja Bantuan Sosial, dialokasikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Belanja Bantuan Sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan Sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
Kriteria Belanja Bantuan Sosial adalah:
a) Tujuan penggunaan
Penggunaan belanja bantuan sosial ditujukan antara lain :
(1) Belanja Rehabilitasi Sosial
Pengeluaran anggaran yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
(2) Belanja Pemberdayaan Sosial
Pengeluaran anggaran yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
(3) Belanja Perlindungan Sosial
Pengeluaran anggaran dalam rangka pembiayaan semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
(4) Belanja Penanggulangan Bencana
Pengeluaran anggaran dalam rangka pembiayaan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
(5) Belanja Jaminan Sosial
Pengeluaran anggaran dalam rangka pembiayaan kegiatan yang masuk kategori di dalam skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
(6) Belanja Penanggulangan Kemiskinan
Pengeluaran anggaran yang terkait langsung dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian namun tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
(7) Pemberi bantuan
Penggunaan belanja bantuan sosial hanya jika pemberi bantuan adalah Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
(8) Persyaratan penerima bantuan

Penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

(9) Masa berlaku pemberian bantuan
Belanja bantuan sosial hanya dapat dilakukan apabila kriteria penerima bantuan sosial masih melekat pada penerima bantuan sosial berkenaan.

4) Belanja Modal
Pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.
Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga aset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan. Termasuk biaya operasional panitia pengadaan barang/jasa yang terkait dengan pengadaan aset berkenaan.
Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang/aset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/aset :

a) Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya aset dan/atau bertambahnya masa manfaat/umur ekonomis asset berkenaan.
b) Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume aset.
c) Memenuhi nilai minimum kapitalisasi dengan rincian sebagai berikut:
   (1) Untuk pengadaan peralatan dan mesin, batas minimal harga pasar per unit barang adalah sebesar Rp300.000,-
   (2) Untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung dan bangunan per paket pekerjaan adalah sebesar Rp10.000.000,-
d) Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan/ dipasarkan kepada masyarakat atau entitas lain di luar pemerintah.

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari :

a) Belanja Modal Tanah
Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli *(leasehold)*, pengadaan/pembelian barang-barang kesenian *(art pieces)*, barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

f) Belanja Modal Aset Lainnya
Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

5) Belanja Tak Terduga
Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

2. Belanja Transfer
   a. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
   b. Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota, pemerintah daerah lainnya dan Partai Politik. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

Gambaran Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 sesuai struktur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan Proporsi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dapat dilihat pada Tabel 3.11:

Tabel 3.11
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025*
5	**BELANJA DAERAH**	**1.112.256.100.954**	**1.221.146.017.900**	**1.304.979.359.282**	**1.240.857.073.649**	**1.177.010.968.989,01**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**757.035.729.662**	**821.503.735.347**	**905.771.996.978**	**923.260.524.221**	**917.524.292.019**
5.1.1	Belanja Pegawai	459.111.201.374	466.312.239.092	489.434.963.409	529.306.343.731	610.886.709.555
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	291.974.368.131	332.274.528.654	353.980.691.578	313.647.400.470	266.899.171.836

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025*
5.1.3	Belanja Bunga	-	10.154.661.544	12.543.068.834	10.953.635.417	8.746.704.644
5.1.5	Belanja Hibah	4.380.475.157	8.546.106.057	45.731.905.157	68.975.816.603	29.320.599.984
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.569.685.000	4.216.200.000	4.081.368.000	377.328.000	1.671.106.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**126.329.007.698**	**192.587.248.790**	**197.056.430.017**	**88.982.650.209**	**63.921.667.436**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.732.618.030	3.085.098.903	760.000.000	578.792.830	46.961.508.
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.367.133.269	43.082.003.350	79.090.849.239	23.915.983.847	31.689.942.495
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.212.047.561	45.944.541.953	54.049.879.588	35.481.463.339	22.147.008.637
5.2.4	Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi	56.837.248.837,75	99.963.899.584	62.229.746.190	25.136.631.037	5.974.536.454
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	179.960.000	511.705.000	925.955.000	3.751.779.156	4.063.218.342.
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya				118.000.000	
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**13.754.138.057**	**3.544.191.397**	**3.507.645.287**	**1.034.783.053**	**136.900.296**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	13.754.138.057	3.544.191.397	3.507.645.287	1.034.783.053	136.900.296
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**215.137.225.537**	**203.510.842.366**	**198.643.287.000**	**227.579.116.166**	**195.428.109.237,5**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	2.544.000.000	1.735.232.000	3.327.000.000	2.218.616.000	2.074.881.000
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	212.593.225.537	201.775.610.366	195.316.287.000	225.360.500.166	193.353.228.237,52

Sumber: BPKAD Kabupaten Sikka, 2026

Dari Tabel 3.11, dapat dijelaskan bahwa Belanja Daerah Kabupaten Sikka pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2021 Belanja Daerah sebesar Rp1.112.256.100.954,- naik pada Tahun 2022 menjadi sebesar Rp1.221.146.017.900. Pada Tahun 2023 Belanja Daerah naik menjadi sebesar Rp1.304.979.359.282 dan turun lagi pada Tahun 2024 menjadi sebesar Rp1.240.857.073.649. Pada Tahun 2025 belanja daerah turun menjadi sebesar Rp.1.177.010.968.989,01

Kebijakan Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Kebijakan belanja daerah Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
   Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas
   Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan dibidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan

secara berkelanjutan melalui pola penganggaran berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan.

3. Tolok ukur dan target kinerja
   Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas dan fungsi.
4. Optimalisasi program/kegiatan
   Belanja program/kegiatan diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja program/kegaiatan disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi program/kegaiatan untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Transparansi dan Akuntabel
   Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.
6. Peningkatan Kualitas Belanja Daerah
   a. Pemenuhan belanja mandatory sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
   b. Menggeser belanja yang bersifat rutin menuju belanja produktif dan berdampak langsung pada masyarakat
   c. Memperkuat pengawalan realisasi APBD agar tidak menumpuk di akhir tahun serta penggunaan SIPD
7. Inovasi Pendanaan pembangunan melalui Sinergi pendanaan antara APBN, APBD dan sumber non-APBN/APBD sesuai amanat UU HKPD

Mengacu pada Kebijakan belanja daerah diatas, maka perhitungan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2027 dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12
Proyeksi Belanja Kabupaten Sikka Tahun 2027

Kode	URAIAN	2026	Rancangan 2027
5	**BELANJA DAERAH**	**1.289.463.743.000,00**	**1.152.216.766.415,97**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.029.801.878.808,44**	**972.411.419.200,77**
5.1.1	Belanja Pegawai	683.584.965.150,35	675.702.858.565,47
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	296.427.342.855,09	255.960.214.373,30
5.1.3	Belanja Bunga	7.176.001.445,00	5.097.777.600
5.1.5	Belanja Hibah	37.923.569.358,00	30.240.063.662
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.690.000.000,00	5.410.505.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**44.943.387.882,81**	**40.867.720.907,20**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	775.000.000,00	1.054.000.000
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.842.266.228,00	11.599.598.598
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.667.452.466,81	17.822.320.656
5.2.4	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	9.270.652.860,00	6.961.324.525
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.388.016.328,00	3.430.477.128
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya		
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.024.758.978,75**	**1.024.758.978**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.024.758.978,75	1.024.758.978
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**213.693.717.330,00**	**137.912.867.330**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	4.950.000.000,00	4.950.000.000,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	208.743.717.330,00	132.962.867.330,00

Sumber : Data Olahan Bapperida, 2026

Dari Tabel 3.12, dapat dijelaskan bahwa Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sikka pada Tahun 2027 sebesar Rp1.152.216.766.415,97 menurun dari tahun Rp1.289.463.743.000,00,- Dari target Pendapatan dan belanja yang direncanakan terdapat selisih lebih pendapatan atau surplus sebesar Rp**5.044.640.179,39.** Surplus dimaksud untuk membiayai pengeluaran pembiayaan.

3.2.3.Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh dalam hal terjadi defisit anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil investasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan terdiri dari penerimaan dan pengeluaran yang dirinci sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan
   Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.
   Penerimaan pembiayaan Daerah Kabupaten Sikka selama kurun waktu tahun 2021-2022 sebagian besar bersumber dari Penerimaan Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya. Sedangkan Tahun 2023 dan 2024 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya.
2. Pengeluaran Pembiayaan
   Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo dan Pemberian Pinjaman Daerah.
   Selama kurun waktu Tahun 2021-2024, pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif, penyertaan modal BUMD dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan tujuan untuk meningkatkan deviden, memperkuat kelembagaan dan pengembangan usaha dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dari Pinjaman Daerah.

Tabel 3.13
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Sikka
Tahun 2021-2025

Uraian	Realisasi Penerimaan Pembiayaan				
	2021	2022	2023	2024	2025
PEMBIAYAAN DAERAH	86.780.665.014,42	225.113.347.620	89.176.019.867,67	66.865.040.397	14.349.170.981,66
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	93.305.736.418,47	236.613.347.620	98.252.239.758,12	104.414.699.451	43.749.590.645,66

Uraian	Realisasi Penerimaan Pembiayaan				
	2021	2022	2023	2024	2025
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	39.242.033.168,47	97.193.095.249	98.252.239.758,12	104.414.699.451	43.749.590.645,66
Penerimaan Pinjaman Daerah	54.063.703.250,00	139.420.252.371	-	-	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	**6.525.071.404,05**	**11.500.000.000**	**9.076.219.890,45**	**37.549.659.054**	**29.400.419.664**
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.125.000.000,00	11.500.000.000	-		
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	400.071.404,05	-	9.076.219.890,45	37.549.659.054	29.400.419.664

Sumber : BPKAD Kabupaten Sikka, 2026

Dari Tabel 3.13, dapat dijelaskan bahwa Pembiayaan Daerah Kabupaten Sikka dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2021 pembiayaan daerah sebesar Rp86.780.665.014,42, naik pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp.225.113.347.620. Pada tahun 2023 menurun menjadi Rp89.176.019.867,67 dan menurun lagi pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp.66.865.040,397 dan pada tahun 2025 menurun menjadi sebesar Rp14.349.170.981,66

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow priority program*) dan kebutuhan.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Kelompok Prioritas I dan II mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas III. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut :

1) **Prioritas I**, untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat;
2) **Prioritas II,** untuk membiayai belanja pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan menjadi prioritas Pembangunan tahun 2025-2029 dan pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
3) **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Untuk pembiayaan daerah tahun 2027 terdapat selisih lebih pendapatan atau surplus sebesar Rp24.502.887.000. Surplus dimaksud untuk membiayai pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan dimaksud untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2027 dapat dilihat pada Tabel 3.14 :

Tabel 3.14
Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Sikka Tahun 2027

Kode	URAIAN	2026	Rancangan 2027
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**49.378.743.000,00**	**5.044.640.179**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**78.779.162.664,00**	**24.355.779.485**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya	78.779.162.664,00	24.355.779.485

Kode	URAIAN	2026	Rancangan 2027
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**29.400.419.664,00**	**29.400.419.664,00**
6.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	29.400.419.664,00	29.400.419.664,00

Sumber : Data Olahan Bapperida, 2026

Dari Tabel 3.14, dapat dijelaskan bahwa target Pembiayaan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2027 sebesar Rp5.044.640.179 menurun dari Tahun 2026 sebesar Rp49.378.743.000,-. Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar Rp24.355.779.485,- menurun dari Tahun 2026 sebesar Rp78.779.162.664,00 yang ditargetkan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan ditargetkan sebesar Rp29.400.419.664 yang digunakan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada PT. SMI.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Visi

Visi dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029:

"Terwujudnya Masyarakat Sikka yang Produktif, Kreatif, Unggul dan Mandiri Menuju Maumere Baru"

- *Produktif,* dapat dipahami sebagai kemampuan menghasilkan atau menciptakan hasil yang bernilai atau berguna. Dalam konteks ekonomi, produktif juga dapat merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan barang atau jasa dalam jumlah yang efisien. Dalam teori ekonomi, produktivitas dapat diukur dengan membandingkan keluaran yang dihasilkan dengan faktor-faktor produksi yang digunakan. Dalam hal pembangunan daerah, produktif dimaknai dengan pengoptimalan sumber daya untuk menghasilkan nilai tambah di berbagai sektor, termasuk kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka. Pemerintah berupaya dan bekerja keras memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki daerah untuk mengisi ruang produksi pendukung kegiatan ekonomi.
- *Kreatif,* secara umum merujuk pada kemampuan seseorang untuk menghasilkan ide atau solusi yang baru dan original. Kreativitas sering dikaitkan dengan proses berpikir divergen dan imajinatif yang menghasilkan sesuatu yang unik. Menurut teori psikologi, kreativitas dapat diperkuat melalui latihan, pembelajaran, dan lingkungan yang mendukung. Dalam konteks pembangunan daerah Kabupaten Sikka, visi Kreatif dimaknai dengan Meningkatkan kemampuan berinovasi dan mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan, dan menciptakan ruang yang mampu mendorong, menampung dan menyalurkan daya cipta dan daya kreasi.
- *Unggul,* berarti memiliki kualitas atau keunggulan yang menjadikan sesuatu lebih baik atau lebih superior dibandingkan yang lain. Konsep keunggulan ini juga sering diasosiasikan dengan kompetisi di pasar atau industri, di mana produk atau layanan yang unggul akan lebih diminati oleh konsumen. Dalam teori manajemen, konsep keunggulan kompetitif menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan sebuah perusahaan. Dalam visi Kabupaten Sikka, unggul ditujukan untuk memiliki keunggulan berbasis potensi daerah baik itu SDA maupun SDM, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah yang berkelanjutan.
- *Mandiri,* mengacu pada kemampuan seseorang untuk bertindak, bekerja, atau hidup tanpa ketergantungan pada pihak lain. Konsep mandiri juga dapat merujuk pada otonomi, kemandirian, dan kebebasan seseorang dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dalam teori psikologi perkembangan, kemampuan mandiri merupakan tujuan penting dalam setiap tahap perkembangan individu. Makna Mandiri dalam Visi Kabupaten Sikka mengarah pada kemampuan kebutuhan pokok masyarakat dan pemenuhan layanan dasar yang berorientasi pada kesejahteraan berbasis sumber daya lokal.
- *Menuju Maumere Baru,* merupakan frasa yang menggambarkan arah transformasi dan semangat pembaruan yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka. Maumere Baru tidak hanya merujuk pada perubahan fisik wilayah ibukota, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma pembangunan yang berfokus pada kemajuan ekonomi, modernisasi infrastruktur, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik. Konsep ini juga mengandung cita-cita kolektif untuk menghadirkan wajah baru Kabupaten Sikka yang lebih bersih, tertata, dan berdaya saing, dengan Maumere sebagai pusat pertumbuhan wilayah. Maumere Baru diharapkan menjadi simbol dari kemajuan peradaban lokal, di mana nilai-nilai budaya tetap lestari namun mampu beradaptasi dengan dinamika zaman melalui pendekatan inovatif dan kolaboratif. Dengan demikian, "Menuju Maumere

Baru" adalah panggilan untuk melakukan transformasi menyeluruh yang menyeimbangkan antara pembangunan manusia, keberlanjutan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.

4.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum terkait upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029. Misi Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029:

1. **Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Inovatif, dan Berkarakter Sosial**
   Misi ini menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Kualitas SDM tidak hanya diukur dari tingkat pendidikan formal, tetapi juga dari kemampuan berinovasi, berpikir kritis, memiliki kepekaan sosial, dan nilai-nilai karakter seperti integritas, gotong royong, dan etos kerja. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan mutu layanan pendidikan dari PAUD hingga menengah, peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan vokasi, peningkatan akses layanan kesehatan, serta pembinaan nilai-nilai sosial dan budaya melalui pendidikan karakter, literasi, dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan. SDM yang unggul dan berkarakter akan mampu menjadi penggerak transformasi ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.

2. **Mewujudkan Perekonomian yang Stabil, Mandiri, dan Berdaya Saing**
   Misi ini bertujuan untuk membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh, inklusif, dan berbasis potensi lokal. Stabilitas ekonomi dicapai melalui penguatan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM. Kemandirian ekonomi diarahkan pada pengurangan ketergantungan terhadap pasar luar dan peningkatan kemampuan produksi lokal untuk memenuhi kebutuhan daerah. Sementara itu, daya saing ditingkatkan melalui inovasi, digitalisasi ekonomi, hilirisasi komoditas, dan penguatan ekosistem kewirausahaan masyarakat. Misi ini juga mencakup peningkatan investasi daerah, akses ke pasar nasional/internasional, dan penciptaan lapangan kerja produktif yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

3. **Mewujudkan Infrastruktur Antar Wilayah yang Berkeadilan dan Berkelanjutan**
   Misi ini menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah secara merata untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah kecamatan dan desa. Fokusnya meliputi pengembangan jalan, jembatan, air bersih, listrik, sanitasi, serta infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang menjangkau seluruh masyarakat. Aspek keberlanjutan diintegrasikan melalui infrastruktur ramah lingkungan dan tahan bencana, serta mempertimbangkan aspek tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam secara bijak. Misi ini mendukung mobilitas ekonomi, pelayanan publik, serta memperkuat keterhubungan wilayah pesisir, pedalaman, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal.

4. **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Resilien, Berkeadilan, dan Berkelanjutan**
   Misi ini merespons tantangan perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan tekanan terhadap sumber daya alam. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat pengelolaan lingkungan melalui perlindungan kawasan lindung, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, pengendalian pencemaran air dan udara, serta pengelolaan sampah terpadu. Edukasi dan pelibatan masyarakat dalam pelestarian lingkungan akan diperluas melalui gerakan sadar lingkungan, sekolah hijau, dan komunitas hijau. Misi ini juga selaras dengan arah pembangunan rendah karbon, ketahanan bencana, dan penguatan ekonomi berbasis ekosistem seperti ekowisata dan pertanian ramah lingkungan.

5. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel, Efisien, Bebas KKN, dan Kolaboratif**

   Misi ini menekankan pentingnya reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan melayani. Pemerintah Kabupaten Sikka akan membangun sistem pelayanan publik yang cepat, berbasis digital, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Penguatan sistem pengawasan internal, manajemen kinerja, dan pelaporan yang akuntabel menjadi prioritas untuk mencegah praktik KKN. Efisiensi anggaran dan proses birokrasi didorong melalui simplifikasi regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Di samping itu, kolaborasi dengan sektor swasta, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan diperluas untuk mendorong partisipasi dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan Kabupaten Sikka secara keseluruhan. Berdasarkan visi, misi dan permasalahan daerah yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Penjelasan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 berdasarkan misi, dijelaskan sebagai berikut:

Misi 1 Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Inovatif, dan Berkarakter Sosial

Tujuan 1.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Berdaya Saing

Tujuan ini mencerminkan tekad Pemerintah Kabupaten Sikka untuk menyiapkan manusia sebagai aktor utama pembangunan yang tidak hanya memiliki kemampuan intelektual dan keterampilan teknis, tetapi juga fisik yang sehat, mental yang kuat, serta nilai-nilai sosial dan budaya yang kokoh. Kualitas SDM yang dimaksud bukan hanya dalam konteks akademik semata, melainkan juga menyangkut kapasitas adaptasi terhadap perubahan, etos kerja produktif, serta daya saing di tingkat lokal, nasional, dan global. Ini menjadi pondasi utama untuk mendorong transformasi sosial dan ekonomi daerah. Untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing, ditetapkan empat sasaran strategis yang akan menjadi fokus intervensi selama periode RPJMD 2025-2029:

Sasaran 1.1.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Adaptif Berbasis Kearifan Lokal

Sasaran ini menitikberatkan pada penguatan sistem pendidikan yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat, termasuk anak-anak dari kelompok rentan, disabilitas, dan wilayah terpencil. Pendidikan yang inklusif menjamin hak belajar bagi semua, sedangkan pendidikan adaptif merespon dinamika zaman, seperti digitalisasi dan tuntutan kompetensi abad 21. Integrasi kearifan lokal ke dalam kurikulum dan proses belajar juga penting untuk memperkuat identitas dan karakter budaya masyarakat Kabupaten Sikka.

Sasaran 1.1.2 Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Masyarakat untuk Hidup Sehat secara Mandiri Dan Berkelanjutan

Sasaran ini bertujuan memperkuat sistem layanan kesehatan primer dan rujukan, baik dari sisi infrastruktur, SDM kesehatan, maupun ketersediaan layanan dasar yang mudah diakses. Fokus juga diberikan pada promosi dan pencegahan penyakit, serta penguatan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko kesehatan (seperti stunting, penyakit menular, dan penyakit tidak menular). Kemandirian dan keberlanjutan menjadi prinsip utama, agar masyarakat tidak selalu bergantung pada intervensi eksternal untuk hidup sehat.

Sasaran 1.1.3 Meningkatnya Kehidupan Layak Masyarakat yang Bermartabat

Sasaran ini menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti perumahan, air bersih, sanitasi, serta perlindungan sosial. Kehidupan layak mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan tujuan agar masyarakat Sikka dapat menjalani hidup yang sejahtera dan bermartabat. Ini termasuk penurunan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan penguatan daya beli masyarakat.

Sasaran 1.1.4 Terwujudnya Pembangunan Berkeadilan Gender yang Inklusif dan Berkelanjutan

Sasaran ini menekankan pentingnya kesetaraan hak dan kesempatan bagi seluruh kelompok, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, dalam seluruh aspek pembangunan. Sasaran ini mendorong pengarusutamaan gender (PUG) dalam kebijakan dan program daerah, memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal (no one left behind), serta memperkuat daya tahan sosial dan ekonomi melalui pembangunan yang ramah lingkungan dan menjamin keberlanjutan antar generasi.

Misi 2 Mewujudkan Perekonomian yang Stabil, Mandiri, dan Berdaya Saing

Tujuan 2.1 Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Sikka

Tujuan "Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Sikka" adalah salah satu inti dari upaya pembangunan daerah untuk periode 2025-2029, secara spesifik merupakan penjabaran operasional dari Misi 2 RPJMD Kabupaten Sikka yaitu "Mewujudkan perekonomian yang stabil, mandiri dan berdaya saing". Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Sikka adalah tujuan strategis yang akan diterjemahkan ke dalam program-program dan kegiatan konkret dalam RPJMD 2025-2029. Program-program ini akan berfokus pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan, pengembangan UMKM, serta pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi, semuanya demi menciptakan masyarakat Sikka yang sejahtera dan mandiri secara ekonomi, serta memiliki daya saing yang kuat.

Kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah indikator utama keberhasilan pembangunan. Apabila masyarakat sejahtera, maka berbagai aspek kehidupan lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, akan turut membaik. Tujuan ini juga menjadi landasan untuk menciptakan stabilitas ekonomi di Kabupaten Sikka, karena masyarakat yang memiliki daya beli dan pendapatan yang cukup akan berkontribusi pada perputaran ekonomi yang sehat.

Untuk mencapai tujuan Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat kabupaten Sikka, ditetapkan empat sasaran strategis yang akan menjadi fokus intervensi selama periode RPJMD 2025-2029:

Sasaran 2.1.1 Tumbuh Kembangnya Sektor Pertanian sebagai Tulang Punggung Ekonomi Lokal Kabupaten Sikka

Sasaran pertama yang ingin diciptakan adalah tumbuh kembangnya Tumbuh Kembangnya Sektor Pertanian Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Lokal Kabupaten Sikka. Untuk memastikan sasaran ini tercapai dan dapat terukur, keberhasilannya akan dipantau melalui Indikator Pertumbuhan sektor primer (pangan, horti, peternakan, Perkebunan, perikanan. Sasaran ini ditetapkan untuk menjawab permasalahan Sektor primer (pertanian, perikanan, ketahanan pangan dan kehutanan) yang menjadi penopang PDRB tidak tumbuh dan berkembang. Laju pertumbuhannya tidak meningkat signifikan. Sasaran ini adalah bagian krusial dari upaya pembangunan ekonomi Kabupaten Sikka, dan secara spesifik menargetkan sektor pertanian sebagai motor penggerak utama kesejahteraan masyarakat. Ini bukan hanya tentang meningkatkan produksi, melainkan menjadikan pertanian sebagai fondasi ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan bagi Kabupaten Sikka. Sebagian besar masyarakat Sikka masih bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber penghasilan utama. Mengembangkan sektor ini secara langsung akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sebagian besar penduduk.

Sasaran 2.1.2 Berkembangnya Industri Pengolahan Produk Pertanian sebagai Motor Penggerak Ekonomi Lokal

Sasaran ini merupakan langkah strategis lanjutan dari Sasaran 2.1 yang fokus pada sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi. Jika Sasaran 2.1 menekankan pada produksi bahan mentah, maka Sasaran 2.2 ini berorientasi pada nilai tambah dan diversifikasi ekonomi melalui industri pengolahan produk pertanian. Ini bertujuan untuk menciptakan ekonomi lokal yang lebih kuat, tangguh, dan tidak hanya bergantung pada penjualan komoditas mentah. Bahan mentah pertanian seringkali memiliki harga jual yang rendah. Dengan diolah menjadi produk jadi atau setengah jadi (misalnya, kopi bubuk dari biji kopi, keripik dari ubi, atau ikan asap dari ikan segar), nilai jual produk akan meningkat secara signifikan. Ini berarti pendapatan petani dan pelaku usaha akan lebih besar. Selain itu ketergantungan pada penjualan bahan mentah membuat petani rentan terhadap fluktuasi harga pasar. Industri pengolahan dapat menyerap kelebihan produksi saat panen raya dan mengubahnya menjadi produk yang lebih tahan lama, sehingga membantu menstabilkan harga dan memberikan kepastian pasar bagi petani.

Keberhasilan Sasaran 2.2 akan diukur melalui dua indikator utama. Indikator pertama adalah Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan, indikator ini akan mengukur seberapa pesat peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sikka. Indikator yang kedua adalah Pertumbuhan PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto), PMTB mencerminkan investasi yang dilakukan dalam bentuk aset tetap (misalnya, pembangunan pabrik, pembelian mesin produksi, atau perluasan fasilitas pengolahan).

Sasaran 2.1.3 Terwujudnya Ekonomi Lokal yang Kokoh melalui Dukungan Perdagangan dan Pariwisata

Sasaran ini melengkapi upaya pembangunan ekonomi Kabupaten Sikka dengan fokus pada sektor tersier, yaitu perdagangan dan pariwisata. Jika sasaran sebelumnya berfokus pada produksi (pertanian) dan pengolahan (industri), sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut dapat didistribusikan, dijual, dan dinikmati, sekaligus menarik pengunjung yang akan membawa dampak ekonomi langsung. Tujuan utamanya adalah menciptakan ekonomi lokal yang kokoh, beragam, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi pasar dan daya tarik wisata daerah.

Sasaran ini penting karena beberapa alasan. Alasan pertama karena sektor perdagangan adalah jembatan vital antara produsen (petani dan industri pengolahan) dan konsumen. Dengan berkembangnya perdagangan, produk-produk lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun di luar Kabupaten Sikka, sehingga meningkatkan penjualan dan pendapatan. Alasan kedua adalah karena baik sektor perdagangan maupun pariwisata adalah padat karya. Perdagangan membutuhkan pedagang, distributor, dan staf toko. Pariwisata memerlukan pemandu wisata, staf hotel dan restoran, pengelola objek wisata, pengemudi, dan banyak lagi. Ini akan menciptakan banyak peluang kerja bagi masyarakat lokal. Alasan ketiga adalah pertumbuhan sektor perdagangan dan pariwisata akan menarik investor untuk menanamkan modalnya di sektor-sektor terkait, seperti pembangunan hotel, restoran, pusat perbelanjaan, atau fasilitas pendukung pariwisata lainnya. Alasan keempat adalah Pariwisata menjadi sarana yang efektif untuk mempromosikan keindahan alam, kekayaan budaya, dan produk-produk khas Kabupaten Sikka kepada wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Keberhasilan Sasaran 2.3 akan diukur melalui dua indikator utama yaitu pertumbuhan sektor akomodasi makan minum dan pertumbuhan sektor perdagangan.

Misi 3 Mewujudkan Infrastruktur Antarwilayah yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Tujuan 3.1 Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, Tangguh, dan Mandiri

Tujuan Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, Tangguh, dan Mandiri mencerminkan arah kebijakan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya menekankan aspek fisik semata, tetapi juga keberlanjutan lingkungan, ketangguhan terhadap risiko, dan kemandirian daerah dalam penyediaan layanan dasar. Infrastruktur berkelanjutan berarti dirancang ramah lingkungan, efisien energi, dan mendukung kelestarian sumber daya alam melalui prinsip pembangunan hijau. Infrastruktur tangguh diwujudkan melalui desain adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim, serta sistem manajemen risiko yang terintegrasi sejak tahap perencanaan. Sementara itu, aspek mandiri mengarah pada kemampuan daerah dalam merencanakan, membiayai, mengelola, dan memelihara infrastruktur secara berkelanjutan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan kolaborasi multipihak. Tujuan ini penting untuk menjamin pelayanan publik yang merata dan inklusif antar kawasan, mengurangi ketimpangan spasial, dan memperkuat resiliensi daerah terhadap tekanan sosial dan ekologis. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur menjadi fondasi strategis bagi pertumbuhan wilayah yang adil dan berdaya saing.

Untuk mencapai tujuan Mewujudkan Infrastruktur Antar Wilayah yang Berkeadilan dan Berkelanjutan, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi fokus intervensi selama periode RPJMD 2025-2029:

Sasaran 3.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Keterjangkauan Aksesibilitas Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan

Sasaran ini merupakan landasan strategis dalam pencapaian infrastruktur daerah yang mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah. Sasaran ini menitikberatkan pada penyediaan infrastruktur dasar yang memenuhi standar teknis mutu, mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil, dan dirancang untuk tahan terhadap risiko bencana serta perubahan iklim. Cakupan aksesibilitas mencakup konektivitas antarwilayah melalui pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan, jembatan, transportasi publik, serta sistem penyediaan air bersih, sanitasi, dan energi yang efisien. Selain itu, prinsip keberlanjutan mengharuskan infrastruktur tidak hanya dibangun untuk kebutuhan jangka pendek, tetapi juga dapat berfungsi secara optimal dalam jangka panjang melalui integrasi dengan tata ruang, konservasi lingkungan, dan penggunaan teknologi tepat guna. Dengan demikian, sasaran ini berperan penting dalam menciptakan infrastruktur yang inklusif, adaptif, dan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan dan berdaya saing.

Misi 4 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Resilien, Berkeadilan, dan Berkelanjutan.

Tujuan 4.1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Ekosistem yang Berkelanjutan

Tujuan ini diarahkan untuk memastikan terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan berdaya dukung bagi kehidupan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Strategi pencapaiannya meliputi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati, peningkatan kualitas udara, air, dan tutupan lahan, serta adaptasi terhadap perubahan iklim dan risiko bencana. Di samping itu, pendekatan pembangunan berkeadilan turut ditekankan melalui partisipasi masyarakat, peningkatan akses kelompok rentan terhadap layanan lingkungan, serta penguatan tata kelola lingkungan yang transparan dan berbasis data. Peningkatan kapasitas kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi lingkungan juga menjadi pilar penting untuk mendukung terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang lestari dan inklusif di tingkat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi fokus intervensi selama periode RPJMD 2025-2029:

Sasaran 4.1.1 Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan, dan Pengelolaan Persampahan

Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas lingkungan fisik, biologis, dan sosial terus membaik guna mendukung kehidupan masyarakat dan

keberlanjutan sumber daya alam. Fokus intervensi diarahkan pada peningkatan pengelolaan kualitas air, udara, dan tanah; penguatan kapasitas sistem pengelolaan limbah dan persampahan; pengendalian pencemaran; serta rehabilitasi dan konservasi ekosistem strategis, seperti kawasan pesisir, hutan lindung, dan daerah aliran sungai. Sasaran ini juga mencakup peningkatan resiliensi ekosistem terhadap tekanan perubahan iklim, termasuk pencegahan dan mitigasi risiko bencana ekologis. Dengan pendekatan berbasis data dan kolaboratif, sasaran ini mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga fungsi ekologis dan memperkuat daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Misi 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel, Efisien, Bebas KKN, dan Kolaboratif

Tujuan 5.1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel dan Efisien serta Bebas KKN

Tujuan ini mengarahkan Kabupaten Sikka pada tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta penyelenggaraan yang efisien dan bebas dari KKN. Reformasi birokrasi sebagai landasan akan membantu dalam menghilangkan hambatan dalam pelayanan publik, meningkatkan Kualitas pengambilan keputusan dan mempromosikan keterbukaan dan partisipasi publik. Untuk membangun landasan tersebut, maka dibutuhkan pemerintahan yang responsif, akuntabel dan efisien serta bebas dari KKN. Pemerintahan yang akuntabel baik dari sisi kinerja dan perencanaan akan dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih sistematis dan transparan, serta tertib pada penegakan hukum dan regulasi. Selanjutnya pemerintahan yang efisien hadir dari penyederhanaan birokrasi, penguatan koordinasi dan juga peningkatan Kualitas SDM aparatur. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan bagian dari penyelenggaraan tata kelola yang baik, menekankan pada penguatan masyarakat terkait ideologi Pancasila, kerukunan sosial dan juga pendidikan politik. Tata kelola, sebagai perwujudan fungsinya juga turut andil dalam menciptakan Kualitas layanan publik yang lebih baik, berkualitas, cepat dan mudah diakses sesuai kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, dengan berbasis pada pemanfaatan teknologi digital.

Untuk mencapai tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang responsif, akuntabel dan efisien serta bebas KKN., ditetapkan 5 sasaran strategis yang akan menjadi fokus intervensi selama periode RPJMD 2025-2029:

Sasaran 5.1.1 Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel

Berfokus pada upaya perwujudan akuntabilitas kinerja yang akuntabel. Sasaran ini berfokus pada peningkatan perencanaan pembangunan daerah serta peningkatan Kualitas dalam pengawasan pembangunan daerah. Program-program pada sasaran ini nantinya akan berfokus pada perencanaan yang lebih baik, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Termasuk juga peningkatan Kualitas perencanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah. Pada aspek pengawasan maka akan menyasar pada penyelenggaraan pengawasan serta perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa perencanaan yang disusun sudah berkualitas dan harmonis, serta memastikan bahwa pengawasan berjalan dengan baik. Sasaran ini akan diukur dengan Nilai Sakip Daerah

Sasaran 5.1.2 Akuntabilitas Keuangan yang Semakin Baik Diikuti dengan Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah

Dalam menciptakan tata kelola yang akuntabel, diperlukan akuntabilitas keuangan yang baik. Akuntabilitas keuangan yang baik akan diutamakan pada ketepatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pentingnya ketepatan ini guna memastikan bahwa anggaran yang dimiliki digunakan dengan bijak, dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas, serta transparansi untuk memastikan bahwa pengelolaan tidak disalahgunakan. Selain itu penting untuk Kabupaten Sikka dapat meningkatkan kemandirian fiskal melalui peningkatan produktivitas aset daerah, serta pertumbuhan PAD. Kemandirian keuangan akan menciptakan

keleluasaan dan ruang bagi Kabupaten Sikka untuk dapat tumbuh sesuai dengan arah kebijakan dan visi yang sudah ditentukan dalam perencanaan. Sehingga dapat terwujud tata kelola yang baik dan dapat mendorong pembangunan daerah. Sasaran ini akan diukur menggunakan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sasaran 5.1.3 Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif dan Transparan

Sistem pemerintahan yang efektif tidak hanya akan berdampak positif pada tata kelola, namun sistem pemerintahan secara keseluruhan. Sistem pemerintahan yang terintegrasi dengan data yang trasnparan akan mendorong dalam pengambilan kebijakan yang lebih terbuka, dengan semakin terbukanya informasi ini maka diharapkan dapat mendorong kerjasama antar sektor. Selanjutnya sasaran ini juga sebagai upaya dalam menargetkan peningkatan integritas aparatur melalui transparansi. Selanjutnya, Penggunaan teknologi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa tata kelola berjalan dengan efektif, terutama di era dimana jaringan teknologi sudah sangat meluas di Kabupaten Sikka. Penggunaan teknologi diharapkan dapat memberikan efektifitas tidak hanya bagi pelayanan namun juga kinerja pemerintah dan sehingga didapatkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Indeks Profesionalitas ASN, Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Kebijakan Publik, dan Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD.

Sasaran 5.1.4 Meningkatnya Keamanan dan Kerukunan Masyarakat

Keamanan dan kerukunan masyarakat merupakan bagian integral yang tidak dapat dielakan dalam pelaksanaan fungsi tata kelola pemerintahan. Perwujudan masyarakat yang mandiri akan menjadi fondasi utama dalam stabilitas pemerintahan yang berkeadilan. Keamanan menjamin masyarakat untuk dapat menjalani kehidupannya tanpa adanya gangguan, kerukunan masyarakat mencegah konflik sosial terjadi serta membangun kepercayaan sosial. Hal-hal ini kemudian turut berkontribusi dalam membentuk lingkungan dan kehidupan yang harmonis, serta meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Sehingga dengan menyasar pada sasaran ini, dapat dijalankan kebijakan yang efektif, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mendorong kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Sasaran ini diukur menggunakan Indeks Kriminalitas (tindak kejahatan per 100.000 penduduk) (angka kriminalitas) dan Indeks Ketentraman dan Ketertiban.

Sasaran 5.1.5 Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan jalan menuju penguatan legitimasi pemerintahan, serta meningkatkan efektivitas serta kesejahteraan yang inklusif. Dengan penguatan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, maka dapat terbentuk kepercayaan masyarakat, yang kemudian akan berdampak pada efektivitas kebijakan yang lebih baik. Responsif terhadap kebutuhan masyarakat, berarti paham bahwa pelayanan dibuat untuk mengutamakan kebutuhan masyarakat, tidak semata karena kepentingan kaum elit. Sehingga selain terbentuk kepercayaan masyarakat, peningkatan efektivitas kebijakan, dapat terbentuk juga kebijakan berbasis bukti (*evidence based*) atas kebutuhan masyarakat, serta mewujudkan fondasi pemerintahan yang mempunyai akuntabilitas tidak hanya kepada pejabat, tapi juga kepada masyarakat. Sasaran ini diukur menggunakan Indeks Pelayanan Publik.

Agar arah pembangunan berjalan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, setiap tujuan dan sasaran pembangunan dilengkapi dengan target keberhasilan yang jelas serta indikator kinerja yang terukur, layaknya kompas dan peta yang memandu perjalanan transformasi daerah.

Target keberhasilan ini menjadi tolok ukur konkret untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan pemerintah telah memberikan manfaat nyata. Lebih dari sekadar angka, indikator ini mencerminkan perubahan positif dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan kualitas

infrastruktur, keberlanjutan lingkungan hidup, dan terjaminnya layanan publik yang prima. Setiap tujuan pembangunan jangka menengah diurai menjadi sasaran-sasaran yang lebih spesifik. Untuk masing-masing sasaran, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur untuk memantau kemajuan secara sistematis. Dengan indikator dan target yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant*, dan *Time-bound*), masyarakat dapat ikut serta dalam memantau, mengevaluasi, dan mengawasi jalannya pembangunan, yang pada gilirannya akan mendorong partisipasi aktif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Indikator Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Sikka Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Indikator Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Sikka Tahun 2027

RKP Nasional	RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur	RKPD Kabupaten Sikka
TARGET SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027		
Pertumbuhan Ekonomi (%)		
5,9-7,5	4,78 – 5,65	5,06
GNI Per Capita(US$)		
5.900-5.990		
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)		
39,57		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
76,84		80,66
Tingkat Kemiskinan (%)		
6,0-6,5	16,50-17,00	10,76
Rasio Gini		
0,362-0,367	0,295-0,301	0,323
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
4,30-4,87	2,30-2,89	2,47
Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia		
0,58	0,500	73,73

Untuk mendukung Indikator Sasaran maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sikka Tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian 2025	Target 2026	Target 2027
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,37	72,24	73,37
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks		B	B
3.	Pendapatan Per Kapita	Rp	21.000.000	20.172.000	21.022.000
4.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,04	4,11	4,28
5.	Rasio Gini	Indeks	0,234	0,2355	0,2349
6.	Indeks Kriminalitas (tindak kejahatan per 100.000 penduduk) (angka kriminalitas)	Indeks	80	86	82
7.	Pertumbuhan sektor pertanian	%	4,54	3,30	3,35
8.	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai		B	B
9.	Pertumbuhan sektor akomodasi makan minum	%	5,21	5,40	5,50
10.	Pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	3,95	4,20	4,40
11.	Angka Kemiskinan	Angka	11,89	11,13	10,76
12.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Angka	74,64	74,72	74,96
13.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	2,49	2,70	2,80
14.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai55		WTP	WTP

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian 2025	Target 2026	Target 2027
15.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,13	2,60	2,70
16.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,39	10,38	10,98
17.	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	68,41	72	76
18.	Pengeluaran Per Kapita	Rp Juta/Orang/ Bulan	9,219	9,694	9,924
19.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	16,17	17,04	17,61
20.	Pertumbuhan sektor perdagangan	%	9,2	9,60	9,80
21.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	61,80	78,25	78,75
22.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,26*	0,25	0,24
23.	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	-1,78	1,80	2,00
24.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	68,75	80,35	82,35
25.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	180,09	140,31	139,81
26.	Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID)	Indeks	56,79*	57,57	57,96
27.	Indeks Kebijakan Publik	Indeks	2,63	3,25	3,70
28.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	80,66	73,92	73,93
29.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	89,87	90,04	90,10
30.	Indeks Inovasi Daerah	Angka	49,35	38,73	40,73
31.	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	74,12	50	60

4.4. Strategi dan Arah Kebijakan

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas dan fokus pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

4.4.1 Strategi

Adapun rincian strategi masing-masing Misi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dijelaskan sebagai berikut:

Misi 1 Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Inovatif, dan Berkarakter Sosial

Strategi pada Misi 1 dijelaskan secara spesifik pada masing-masing sasaran, secara terstruktur strategi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Strategi Pembangunan Misi 1

Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan
Misi 1. Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Inovatif, dan Berkarakter Sosial		
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing	Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Adaptif berbasis Kearifan Lokal	1. Transformasi pendidikan dengan integrasi Digital dan Inovasi Pembelajaran terkini 2. Pemerataan Akses dan Inklusi Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Dasar 3. Peningkatan Kualitas, Kompetensi, dan kesejahteraan Tenaga Pendidik 4. Penguatan Pendidikan Nonformal dan Pembelajaran Alternatif 5. Pendidikan Karakter dan Perlindungan Anak di Satuan Pendidikan 6. Pemerataan dan Peningkatan Infrastruktur sarana Pendidikan, dan distribusi tenaga pendidikan 7. Kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga dan antar komunitas satuan pendidikan untuk menjaga ekosistem pendidikan 8. Integrasi kearifan lokal dan pelestarian bahasa dan

Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan
		budaya daerah dalam sistem pendidikan 9. membangun Ketahanan pendidikan dalam situasi bencana, ekonomi, dan konflik
	Meningkatnya ketahanan sistem kesehatan masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri dan berkelanjutan	1. Transformasi Layanan Kesehatan Berbasis Teknologi dan Inovasi 2. Penguatan Kompetensi dan Pemerataan SDM Kesehatan 3. Peningkatan Aksesibilitas dan Infrastruktur Kesehatan 4. Penanganan Mortalitas, Stunting, dan Masalah Gizi Masyarakat bersama lintas sektor 5. Promosi Kesehatan dan Edukasi Masyarakat berbasis komunitas 6. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit tidak menular berbasis surveilans 7. membangun sistem layanan kesehatan Jiwa dan Perlindungan Sosial 8. penguatan sistem pengawasan keamanan pangan, obat-obatan, dan produk konsumsi untuk perlindungan konsumen yang kolaboratif 9. Sinkronisasi Kebijakan dan Tata Kelola kesehatan Lintas Level
	Meningkatnya Kehidupan Layak masyarakat yang bermartabat	1. penguatan Perlindungan dan jaminan Sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta Penanggulangan Kemiskinan yang terintegrasi 2. Penguatan SDM dan sistem pelatihan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. 3. Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal dan UMKM berbasis desa/kelurahan, SDA, dan kewirausahaan komunitas. 4. Penguatan Ketahanan Sosial dan Budaya dari ancaman sosial-budaya 5. Penguatan sistem Perlindungan Migran dan Tenaga Kerja Rentan 6. penguatan kapasitas keluarga dengan Literasi Digital dan Keuangan 7. Penguatan Perlindungan Keluarga dan Anak 8. Membangun sistem penempatan tenaga kerja pemuda yang responsif terhadap kebutuhan wilayah dan perkembangan pasar kerja. 9. Meningkatkan akses perlindungan sosial dan kesetaraan pemuda rentan terhadap layanan dasar dan ketenagakerjaan. 10. Meningkatkan kesempatan kerja lokal, menekan migrasi kerja informal, dan menciptakan skema kerja layak bagi pemuda.
	Terwujudnya pembangunan Berkeadilan Gender yang Inklusif dan Berkelanjutan	1. Penguatan Tata Kelola Responsif Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG) 2. Penguatan Sistem Data dan Perencanaan Responsif Gender 3. Penguatan Sistem Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan 4. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Akses ke Lapangan Kerja Produktif 5. Peningkatan Akses layanan dasar yang responsif gender untuk peningkatan kualitas hidup. 6. Afirmasi ekonomi, sosial, politik, birokrasi, dan penguatan peran strategis perempuan dalam pengambilan keputusan. 7. Reformasi Sosial dan Edukasi Anti-Patriarki

Misi 2 Mewujudkan Perekonomian yang Stabil, Mandiri, dan Berdaya Saing

Strategi pada Misi 2 dijelaskan secara spesifik pada masing-masing sasaran, secara terstruktur strategi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Strategi Pembangunan Misi 2

Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan
Misi 2. Mewujudkan Perekonomian yang Stabil, Mandiri, dan Berdaya Saing		
Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Sikka	Tumbuh Kembangnya Sektor Pertanian Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Lokal Kabupaten Sikka	1. Mendorong pengembangan sentra produksi berbasis potensi lokal dan mendorong diversifikasi komoditas unggulan sektor kelautan, perikanan, dan pertanian untuk memperkuat daya saing ekonomi lokal. 2. Pembangunan Infrastruktur dan Sistem Distribusi terintegrasi yang terintegrasi antar wilayah guna mendukung kelancaran rantai pasok sektor primer. 3. Peningkatan Kapasitas SDM, Regenerasi, dan Kelembagaan Petani–Nelayan 4. Memperkuat akses pembiayaan, kemitraan, serta pemasaran berbasis teknologi. 5. Penguatan sistem ketahanan pangan melalui diversifikasi produksi pangan lokal, pengembangan pangan berbasis sumber daya perairan, serta penguatan kelembagaan petani dan nelayan. 6. Membangun pendekatan adaptif berbasis ekosistem serta sistem mitigasi risiko untuk menghadapi dampak perubahan iklim dan bencana dalam pengelolaan sektor kelautan, perikanan, dan pertanian 7. Integrasi Pertanian, Perikanan, dan Pariwisata berbasis potensi lokal untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan. 8. Mendorong adopsi inovasi teknologi dan pengembangan *smart farming* dan *smart fisheries* guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta daya saing sektor primer secara berkelanjutan.
	Berkembangnya industri pengolahan produk pertanian sebagai motor penggerak ekonomi lokal	1. Mendorong pengembangan hilirisasi sektor kelautan dan perikanan serta peningkatan nilai tambah melalui penguatan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. 2. Mempercepat transformasi digital pada industri kecil, menengah, dan UMKM, termasuk sistem pemasaran dan promosi produk perikanan dan kelautan secara terpadu. 3. Penguatan UMKM, Koperasi, dan Ekosistem Industri Rakyat sebagai pendorong utama industrialisasi berbasis rakyat. 4. Akselerasi Investasi dan Pembiayaan Industri untuk mempercepat pertumbuhan industri berbasis sumber daya kelautan dan perikanan. 5. Memperluas jangkauan pasar melalui penguatan identitas produk, sertifikasi mutu, dan pengembangan saluran ekspor. 6. Penguatan SDM Industri dan Kewirausahaan Yang kompeten dan berdaya saing tinggi 7. Membangun infrastruktur fisik dan fasilitas pendukung logistik fasilitas logistik terpadu guna mendukung efisiensi produksi, distribusi, dan konektivitas antar wilayah. 8. Memperkuat ketahanan dan keberlanjutan industri lokal melalui penerapan prinsip industri tangguh, rendah emisi, dan ramah lingkungan berbasis sumber daya laut.

Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan
	Terwujudnya Ekonomi Lokal Yang Kokoh Melalui Dukungan Perdagangan Dan Pariwisata.	1. Transformasi digital dan pembangunan infrastruktur pendukung sektor tersier yang terintegrasi dan adaptif. 2. Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif berbasis Budaya, komunitas, dan kemitraan 3. Transformasi pariwisata tangguh, berkelanjutan, dan inklusif, serta berorientasi pada pasar wisata tematik. 4. Revitalisasi Perdagangan Serta Pelaku Usaha Lokal 5. Penguatan Promosi, Branding, dan Positioning Daerah 6. Mendorong ekosistem kelembagaan yang adaptif dan terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan sektor tersier. 7. Membangun sistem Adaptasi dan Mitigasi Risiko Ekonomi terhadap Geopolitik dan Krisis Eksternal

Misi 3 Mewujudkan Infrastruktur Antarwilayah yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Strategi pada Misi 3 dijelaskan secara spesifik pada masing-masing sasaran, secara terstruktur strategi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Strategi Pembangunan Misi 3

Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan
Misi 3. Mewujudkan Infrastruktur Antar Wilayah yang Berkeadilan dan Berkelanjutan		
Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, Tangguh, dan Mandiri	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan aksesibilitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	1. Penguatan infrastruktur jalan, transportasi, dan konektivitas wilayah yang terintegrasi untuk pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi lokal. 2. Penataan permukiman dan pengurangan kawasan kumuh inklusif berbasis kolaborasi dan tata ruang 3. Penguatan sistem penyediaan infrastruktur dasar yang adaptif, efisien dan berkelanjutan 4. Ketahanan infrastruktur terhadap risiko bencana dan perubahan iklim 5. Modernisasi tata kelola infrastruktur berbasis teknologi, data, dan digitalisasi infrastruktur 6. Penguatan penataan ruang dan Percepatan Legalisasi Dokumen Perencanaan Infrastruktur serta sinkronisasi lintas sektor 7. Memperkuat kapasitas dan koordinasi kelembagaan untuk pembangunan infrastruktur dan perumahan 8. Penguatan kolaborasi dan kemandirian infrastruktur 9. Peningkatan Infrastruktur Informasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Misi 4 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Risilien, Berkeadilan, dan Berkelanjutan

Strategi pada Misi 4 dijelaskan secara spesifik pada masing-masing sasaran, secara terstruktur strategi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6
Strategi Pembangunan Misi 4

Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan
Misi 4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Resilien, Berkeadilan, dan Berkelanjutan		
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Ekosistem yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan, dan Pengelolaan Persampahan	1. Penguatan sistem pengelolaan sampah dan air limbah berbasis regulasi, teknologi, dan kolaborasi komunitas 2. Penguatan peran komunitas dan CSR dalam menjaga pengelolaan lingkungan dan mendorong perubahan perilaku 3. Pengendalian Pertambangan dan Pengelolaan Konservasi DAS Berbasis Data dan Komunitas 4. Digitalisasi dan pemantauan lingkungan berbasis data dan peralatan modern 5. Pengembangan RTH dan Ekowisata berbasis komunitas, data dan teknologi untuk Rehabilitasi Lahan dan Pengendalian Ruang 6. Penguatan perlindungan kawasan lindung dan rawan melalui pemantauan, penghijauan, dan pemberdayaan 7. Penguatan perangkat hukum dan penegakan aturan untuk perlindungan lingkungan 8. Pengendalian dampak urbanisasi dan integrasi lingkungan dalam perencanaan ruang 9. Tata kelola adaptif terhadap perubahan iklim dan risiko lingkungan

Misi 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel, Efisien, Bebas KKN, dan Kolaboratif

Strategi pada Misi 5 disusun berdasarkan tujuan daerah, secara terstruktur strategi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7
Strategi Pembangunan Misi 5

Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan
Misi 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel, Efisien, Bebas KKN, dan Kolaboratif		
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang responsif, akuntabel dan efisien serta bebas KKN	Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan yang akuntabel	1. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital 2. Penguatan kolaborasi antar stakeholder dalam memperkuat tata organisasi, serta dan mitigasi keamanan dan kebencanaan. 3. Optimalisasi pemanfaatan potensi daerah untuk peningkatan PAD 4. Penyelarasan dan penegakkan regulasi pusat dan daerah 5. Peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan dan pelatihan 6. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas
	Akuntabilitas Keuangan yang semakin baik diikuti dengan meningkatkan kemandirian fiskal daerah	
	Terwujudnya sistim pemerintahan yang efektif dan transparan	
	Meningkatnya keamanan dan kerukunan Masyarakat	
	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat	

4.4.2 Arah Kebijakan Pembangunan

4.4.2.1. Arah Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional tahun 2027 mengacu pada Tema "**Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, investasi dan Industri**, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.8
Uraian Arah Kebijakan Nasional

No	Uraian	Indikator
1.	Produktvitas	
	Kualitas SDM, Tenaga Kerja Produktif, Inovasi	1. Makan Bergizi Gratis 2. Rumah Sakit Berkualtias dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 3. Penuntasan TB 4. Revitalisasi Sarana Prasarna Sekolah/Madrasah 5. Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi, Sekolah Unggul 6. Digitalisasi Pendidikan 7. Pendidikan Tinggi dan Vokasional
	Stimulus untuk Produktivitas dan Daya Beli Masyarakat	1. Kartu Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Nasional 2. 3 Juta Rumah 3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 4. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
	Digitalisasi dan Efisiensi Tata Kelola	1. Pusat Data Nasional 2. Satu Data Sosial Ekonomi (DTSEN) 3. Layanan Digital Optimal dan Terintegrasi di Sektor Strategis 4. Pemerintahan Digital yang Merata
	Regulasi dan Kelembagaan	1. Penegakan Hukum (Pemberantasan Judol) 2. Integritas Tata Kelola Pemerintah
2.	Investasi	
	Efisiensi dan Efektivitas Investasi	1. Investasi Hijau Berkelanjutan 2. Kemudahan Perizinan
	Infrastrtuktur dan Konektivitas Ekonoi	1. Transportasi Publik dan Konektivitas logistik 2. Infrastruktur Dasar (Elektrifitasi Desa dan Gentengisasi) 3. Pembangunan Daerah Tertingal
	Inovasi Pembiayaan Pembangunan	1. Optimalisasi Danantara 2. Pembiayaan Pembangunan Berbasis Konvensional dan Syariah
	Investasi Berorientasi Industri dan Ekspor	1. Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus 2. Destinasi Pariwisata Prioritas
3.	Industri	
	Industri Nasional	1. Pengelolaan Sampah 2. Pengembangan Industri Otomotif Nasional 3. Industri Semi Konduktor dan Kedirgantaraan 4. Industri Strategis Nasional
	Hilirisasi SDA Strategis	1. Hilirisasi Kelautan dan Perikanan 2. Hilirasasi Minerba dan Migas 3. Hilirisasi Perkebunan (Hilirasasi Kelapa Sawit)
	Swasembada Pangan, Energi dan Air	1. Swasembada Pangan (Kawasan Sentra Pangan) 2. Swasembada Energi (B20, E50, PLTA, PLTS) 3. Swasembada Air *(Giant Sea Wall)*

4.4.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Tahun 2027 mengacu pada tema "**Peningkatan Pelayanan Dasar dan Sumber Daya Manusia Berkualitas**", yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengembangan sentra industri dan produksi berbasis komoditas unggulan, melalui
   a. Pengembangan kawasan perkebunan (kakao, kopi, jambu mete, kelapa)
   b. Hilirisasi industri strategis (mangan sulfat, rumput laut, garam)
   c. Koperasi desa/kelurahan Merah Putih.
2. Penguatan swasembada pangan, energi dan air, melalui :
   a. Kampung nelayan merah putih
   b. Kapal ikan modern
   c. Modeling dan replikasi tambak udang terintegrasi
   d. Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional
   e. Pengembangan kawasan pangan terintegrasi
   f. Peningkatan jaringan irigasi, jaringan irigasi air tanah dan air baku, SPAM dan sanitasi
   g. Pembangunan PLTS, PLTA Skala Besar, dan pengembangan biotenal
3. Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembangunan kota terpadu
   a. Infrastrtukru konektivitas yang tersedia di Provinsi NTT mencakup bandara, pelabuhan dan jalan (arteri, kolektor, lokal, lingkungan)
   b. Optimalisasi infrastruktur diperlukan untuk menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk hilirasasi dan operasional industri termasuk hilirisasi dan operasional industri komoditas unggulan wilayah terutama yang berbasis perikanan dan kelautan
4. Pengembangan aksesbilitas dan konektivitas mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antar pulau melalui pembangunan jalan strategis, peningkatan akses menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan akses pelabuhan, jaringan pelayaran, bandara, serta listrik perdesaan dan akses internet cepat
5. Peningkatan infrastruktur pendukung swasembada pangan, energi dan air melalui pengembangan jaringan irigasi, jaringan air tanah dan air baku, SPAM, sanitasi serta pembangkit listrik berupa PLTA skala besar terintegrasi dan PLTS.
6. Penguatan Mitigasi Bencana Hidrometerologi Berbasis Wilayah Kepulauan: Pengembangan sistem peringatan dini banjirdan longsor yang adaptif terhadap kondisi pulau kecil, termasuk integrasi data cuaca, hidrologi, dan kerentanan wilayah.
7. Pengelolaan Terpadu sumber daya air dan pengendalian banjir-kekeringan : pembangunan infrastruktur konservasi air seperti embung, sumur resapan, dan sistem irigasi mirko untuk mengatasi risiko banjir saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau.
8. Rehabilitasi lahan kritis dan penguatan stabilitas lereng, reboisasi, serta teknik konservasi tanah di wilayah rawan longsor (Ngada, Nagekeo, dan Flores bagian tengah) guna mengurangi degradasi lahan dan risiko bencana.
9. Peningkatan konektivitas dan logistik kebencanaan antar pulau : penguatan sistem distribusi logistik dan aksesibilitas wilayah terpencil Untuk mempercepat respons darurat.
10. Adaptasi perubahan iklim dan perlindungan ekosistem : penguatan ketahanan ekosistem pesisir dan daratan melalui rehabilitasi mangrove perlindungan daerah tangkapan air dan praktik pembangunan rendah risiko.
11. Akselerasi penurunan indeks risiko bencana (IRB) : pendampingan intensif bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan indikator ketahanan daerah guna menurunkan IRB 4%-8% selama 5 tahun.
12. NTT memiliki risiko bencana tinggi yang didominasi banjir dan longsir akibat kondisi kepulauan, topografi terjal dan variabilitas iklim. Wilayah seperti Ngada dan Nagekeo menjadi prioritas karena kerentanan tinggi dan keterbatasan infrastruktur. Penguatan ketahanan difokuskan pada pengelolaan air, rehabilitasi lahan serta peningkatan kapasitas masyarakat secara terpadu.
13. Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4.9
Uraian Arah Kebijakan Provinsi NTT

No	Uraian	Indikator
1.	POTENSI EKONOMI WILAYAH	
	1. Rumput Laut	a. Produksi (2024) : 1,47 Juta Ton b. Peringkat 2 Nasional (10,6% Produksi Nasional) c. Didukung 3 industri pengolahan ATC/ATS d. SRC, mampu menembus pasar global (US, UK, Tiongkok, dll
	2. Garam	a. Produksi 2024 : 15.642 ton b. Peringkat 6 Nasional c. Didukung berbagai industri pengolahan dan memiliki kualitas yang sangat baik sebagai garam industri (NaCL 96 – 98,23%) d. Lokasi kawasan sentra industri garam nasional (K-SIGN) untuk swasembada garam
	3. Pariwisata	a. Terdapat DPP Labuan Bajo sebagai destinasi premium dan destinasi lainnya seperti Alor dan Sumba, dalam koridor pengembangan pariwisata Bali-Nusa Tenggara b. Telah disusun Rencana Induk (dalam proses pengesahan) dan peta tematik Pariwisata Sepanjang Pulau Flores (dibawah koordinasi BPOLBF)
2.	PENINGKATAN INVESTASI MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	
	Pembangunan Kawasan Perbatasan di Prov. NTT	Lokasi Prioriotas : 1. Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) Atambua, Kefamenanu, dan Kalabahi 2. Kecamatan Perbatasan Prioritas
	Pertumbuhan Ekonomi 3 PPKP di NTT	a. Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di TN Mutis Timau b. Penyuluhan Kelautan dan Perikanan c. Peningkatan Terminal Barang Internasional
	Pemenuhan Layanan dasar kecamatan perbatasan prioritas (Agrowisata Kopi Flores Bajawa, Ngada) (Nilai IPKP 30,59/Konsolidasi)	a. Penguatan sarpas pendidikan dan kesehatan b. Peningkatan akses utilitas layanan dasar permukiman
3.	KAWASAN TRANSMIGRASI (KT) PRIORITAS NTT	
	Kawasan Transmigrasi	a. KT Kobalima Timur, Kab. Malak b. KT Ponu, Kab TTU c. KT Tasifeto-Mandeu, Kab. Belu
	Fokus Pembangunan Kawasan Transmigrasi	a. Pembangunan Infrastruktur Permukiman dan Aksesbilitas Logistik b. Pengembangan Ekonomi Kawasan Transmigrasi c. Redistribusi Aset (Tanah) Transmigrasi d. Penataan Persebaran Penduduk dan Penyediaan Tenaga Terampil
4.	Fokus Pembangunan Desa berdasarkan Dimensi Indeks Desa	
	Layanan Dasar	a. Layanan Pendidikan b. Layanan kesehatan
	Lingkungan	a. Penguatan sistem pengelolaan sampah b. Penguatan migrasi bencana
	Sosial	a. Ruang terbuka publik : taman b. Keamanan lingkungan
	Aksesbilitas	a. Konektivitas b. Kemudahan akses
	Ekonomi	a. Diversifikasi ekonomi b. Penguatan kelembagaan ekonomi
	Tata Kelola Pemerintah Desa	Layanan administrasi desa Pendataan dan produktivitas aset desa
5.	DIMENSI INDEKS DESA	
		1. Sangat Tertinggal 3,28% 2. Tertinggal 19,89%

No	Uraian	Indikator
		3. Berkembang 56,04% 4. Maju 17,60% 5. Mandiri 3,19%
6.	PROGRAM KERJA PRIORITAS NASIONAL	Makan Bergizi Gratis 3.407 Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih 4 Kampung Nelayan
7.	MITIGASI RISIKO BENCANA DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM	IRB 2024 : 220,30 (Tinggi) Daerah berisiko paling tinggi adalah Kabupaten Ngada dan Nagekeo Didominasi oleh bencana hidrometerologi : Banjir dan Longsor
8.	Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN)	1. Perumusan Kebijakan 2. Perencanaan dan Penetapan 3. Evaluasi dan pengendalian
9.	Keterpaduan dengan Tujuan dan Agenda Pembangunan	1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi 2. Menurunkan Kemiskinan 3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
10.	FOKUS PRESIDEN	1. Swasembada pangan 2. Swasembada air 3. Swasembada Energi 4. Hilirisasi Komoditas dan Industri
11.	PSN DI NTT	1. Pengembangan Budidaya Udang Terintegrasi 2. Bendungan Mbay 3. Bendungan Napun Gete 4. Bendungan Temef 5. Bendungan Manikin 6. Destinasi Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo 7. Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) 8. Konstruksi Tangki Penyimpangan LPG di Kupang Diperlukan : 1. Sinergi perencanaan pusat-daerah dalam dokumen perencanaan 2. Dukungan pelaksanaan sesuai kewenangan 3. Turut serta dalam monitoring dan pengendalian pelaksanaan di daerah

4.4.2.3. Arah Kebijakan Kabupaten Sikka

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun2027 : Penguatan Kapasitas dan Sistem Lintas Sektor yang Efektif dan Berkelanjutan dan upaya yang Dilakukan adalah:

1. Kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga dan antar komunitas satuan pendidikan untuk menjaga ekosistem pendidikan
2. Integrasi kearifan lokal dan pelestarian bahasa dan budaya daerah dalam sistem pendidikan
3. Memperluas jangkauan pasar melalui penguatan identitas produk, sertifikasi mutu, dan pengembangan saluran ekspor.
4. Ketahanan dan Keberlanjutan Industri Lokal Melalui pendekatan tangguh dan ramah lingkungan.
5. Penguatan sistem penyediaan infrastruktur dasar yang adaptif, efisien dan berkelanjutan
6. Modernisasi tata kelola infrastruktur berbasis teknologi, data, dan digitalisasi infrastruktur
7. Penguatan kolaborasi antar stakeholder dalam memperkuat tata organisasi, serta dan mitigasi keamanan dan kebencanaan.

Uraian arah kebijakan setiap misi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.10
Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2027

Misi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Inovatif, dan Berkarakter Sosial	Memantapkan tata kelola dan infrastruktur layanan SDM yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Memperluas cakupan dan memperkuat kualitas pelayanan dasar bagi seluruh masyarakat secara merata. Fokus utama adalah pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial, baik fisik maupun digital. Tata kelola pelayanan diperkuat melalui sistem manajemen yang transparan, partisipatif, dan berbasis teknologi informasi. Program ini juga mendorong pemerataan sumber daya manusia (tenaga pendidik, tenaga medis, penyuluh sosial) ke wilayah-wilayah terpencil agar tidak terjadi kesenjangan pelayanan antarwilayah. Pada tahap ini, fokus diarahkan pada pemantapan kualitas dan perluasan jangkauan layanan dasar yang merata dan inklusif melalui penguatan tata kelola serta pengembangan infrastruktur pendukung. Dalam sektor pendidikan, kebijakan difokuskan pada penguatan kapasitas guru, inovasi layanan pembelajaran, serta penataan sarana dan ekosistem pendidikan yang berbasis kearifan lokal dan ketangguhan sosial, guna memperkuat daya adaptasi sistem pendidikan terhadap perubahan sosial dan budaya. Di sektor kesehatan, penekanan diberikan pada penguatan layanan yang merata dan berkualitas melalui peningkatan kapasitas SDM kesehatan, pengembangan infrastruktur layanan dasar, serta edukasi komunitas sebagai ujung tombak peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah rentan dan sulit dijangkau. Sementara itu, dalam bidang perlindungan sosial, arah kebijakan menitikberatkan pada integrasi program perlindungan sosial, pemberdayaan kelompok rentan, dan pelibatan tenaga kerja lokal yang responsif wilayah. Nilai-nilai budaya lokal juga diperkuat sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas hidup yang layak dan berkelanjutan. Adapun dari sisi kesetaraan gender, kebijakan diarahkan untuk memantapkan tata kelola dan pemberdayaan responsif gender, guna mendorong kesetaraan dalam akses, partisipasi, dan kualitas hidup antara perempuan dan laki-laki di seluruh sektor pembangunan. Dengan pendekatan ini, Tahap II berfungsi sebagai penguatan kapasitas sistem dan kelembagaan dalam memberikan layanan SDM yang menjangkau lebih luas, lebih adil, dan lebih responsif terhadap kebutuhan lintas wilayah dan kelompok masyarakat
Mewujudkan Perekonomian yang Stabil, Mandiri, dan Berdaya Saing	Memperkuat kapasitas dan kapabilitas sektor primer untuk pertumbuhan	Menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan efisiensi produksi sektor primer melalui penguatan teknologi tepat guna, penyuluhan terpadu, perluasan akses pasar, dan integrasi rantai nilai. Daya saing komoditas lokal ditingkatkan dengan mendorong inovasi dan

Misi	Arah Kebijakan	
	ekonomi biru yang berkelanjutan	akses pembiayaan produktif yang inklusif. Kebijakan ini juga memperkuat kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat dalam rangka menjaga keberlanjutan lingkungan dan ekonomi lokal
Mewujudkan Infrastruktur Antarwilayah yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	Mengkonsolidasikan sistem infrastruktur wilayah yang tangguh dan berdaya saing melalui integrasi layanan dasar, penguatan kelembagaan, dan tata kelola ruang yang adaptif terhadap investasi dan perubahan iklim	arah kebijakan difokuskan pada upaya mengkonsolidasikan sistem infrastruktur wilayah yang tangguh dan berdaya saing melalui integrasi layanan dasar, penguatan kelembagaan, serta tata kelola ruang yang adaptif terhadap investasi dan perubahan iklim. Arah ini mendasari pencapaian sasaran Misi 3 dengan menekankan pentingnya penguatan infrastruktur jalan, transportasi, dan konektivitas wilayah yang terintegrasi sebagai pengungkit utama pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi lokal. Selain itu, konsolidasi sistem infrastruktur juga diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas permukiman melalui penataan ruang yang inklusif dan kolaboratif, serta pengurangan kawasan kumuh secara terencana. Di sisi lain, sistem penyediaan air dan sanitasi diperkuat agar lebih efisien, berkelanjutan, dan tanggap terhadap tantangan perubahan iklim. Tata kelola infrastruktur mulai dimodernisasi melalui pemanfaatan teknologi, digitalisasi data infrastruktur, dan penguatan sistem informasi partisipatif. Penataan ruang dan percepatan legalisasi infrastruktur ditata secara sistematis agar mendukung iklim investasi dan pembangunan jangka panjang yang memiliki kepastian hukum. Dalam konteks kelembagaan, strategi ini mendorong kolaborasi lintas sektor, meningkatkan mitigasi alih fungsi lahan, dan memperkuat kapasitas kelembagaan daerah untuk mengelola infrastruktur secara mandiri dan responsif terhadap tantangan pembangunan ke depan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Resilien, Berkeadilan, dan Berkelanjutan	Mengintegrasikan sistem pengelolaan lingkungan yang efektif dan responsif melalui inovasi teknologi, penguatan kelembagaan, serta kolaborasi multipihak dalam pencegahan dan pengendalian degradasi lingkungan	menitikberatkan pada penguatan sistem kelembagaan dan instrumen pengelolaan lingkungan, baik di level kebijakan maupun operasional. Inovasi mulai diperkenalkan melalui penggunaan teknologi tepat guna, sistem informasi lingkungan, dan penguatan perangkat pemantauan kualitas lingkungan. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan—pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi—diperluas untuk mendorong pencegahan serta mitigasi terhadap degradasi lingkungan, seperti kerusakan lahan, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel, Efisien, Bebas KKN dan Kolaboratif	Penguatan fondasi tata kelola pemerintah melalui kolaborasi *stakeholder*, optimalisasi potensi daerah dan peningkatan	Penguatan ini dilakukan dalam rangka menciptakan tata kelola yang kuat dan tidak rentan terhadap tantangan maupun ancaman yang dapat mengganggu berjalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Optimalisasi pemanfaatan potensi daerah terus dilakukan dalam rangka meningkatkan PAD, untuk memperkuat anggaran ditengah pengetatan anggaran dari

Misi	Arah Kebijakan	
	pengawasan dan akuntabilitas	pusat. Penguatan ini dilakukan dengan memperkuat tata kelola organisasi baik dari segi manajemen dan pengelolaan keuangan, serta melalui kolaborasi antar stakeholder untuk memperkuat tata organisasi. Kolaborasi ini juga dilakukan dalam rangka melakukan mitigasi keamanan dan kebencanaan, sehingga sehingga Kabupaten Sikka menjadi daerah yang mempunyai ketahanan (*resilience*) yang tinggi terhadap ancaman kejahatan maupun bencana

4.5. Program Prioritas

4.5.1. Program Prioritas Nasional

Delapan Program Hasil Terbaik Cepat *(Quick Wins)* Nasional yang harus didukung Daerah, meliputi :

1. Makan Bergizi Sehat di sekolah dan bantuan gizi balita/ibu hamil.
2. Kartu Kesejahteraan dan kartu usaha untuk hapus kemiskinan absolut
3. Kesehatan Gratis dan RS lengkap di Kabupaten (tuntaskan TBC)
4. Kenaikan gaji ASN (Guru, Dosen, Nakes, TNI/POLRI)
5. Lumbung Pangan (Desa, daerah dan nasional)
6. Infrastruktur Desa dan Rumah Murah (untuk MBR dan milenial)
7. Sekolah Unggul Terintegrasi di setiap Kabupaten
8. Badan Penerimaan Negara (Target rasio penerimaan 23% PDB)

4.5.2. Program Prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program Prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2027 dengan tema : "**Mengakselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri"** dengan strategi :

1. Ekonomi berkelanjutan, dengan strategi :
   a. Sektor unggulan : pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan
   b. Ekowisata, geowisata, geopark dan wisata budaya komunitas
2. Pemberdayaan komunitas, dengan strategi :
   a. Ekonomi kreatif untuk milenial dan perempuan
   b. Ekosistem UMKM berbasis potensi desa
   c. Optimalisasi kapasitas BUMDES
3. Infrastruktur berkelanjutan, dengan strategi :
   a. Infrastruktur hijau dan biru (Green and Blue infrastructure)
   b. Pemenuhan jalan, air bersih, listrik dan rumah layak huni.
   c. Konektivitas transportasi publik dan perluasan infrastruktur digital
4. Layanan kesehatan, dengan strategi :
   a. Pendekatan kolaborasi pentahelix.
   b. 100% masyarakat sebagai peserta aktif BPJD
   c. Pemerataan distribusi dan peningkatan kualitas SDM Kesehatan
5. Mutu pendidikan, dengan strategi :
   a. Sekolah vokasi unggulan berbasis potensi daerah
   b. Insentif pendidikan bagi siswa kurang mampu dan pendidik di daerah perifer.
   c. Peningkatan layanan pendidikan menengah dan khusus
6. Birokrasi dan HAM, dengan strategi :
   a. Birokrasi transparan, proaktif, dan melayani.,
   b. Kesejahteraan ASN sebagai penggerak ekonomi
   c. Perlindungan hak-hak masyarakat (khususnya kelompok rentan)
7. Kolaborasi (Ayo Bangun NTT) , dengan strategi :
   a. Dispora dan Keluarga Besar (melibatkan dan mengoptimalkan kontribusi diasporan NTT untuk membangun daerah)
   b. Sinergi Pemkab/Pemkot (Mengkoordinasikan dan menyelaraskan seluruh program pemerintahdaerah level kota/kabupaten.
   c. Kemitraan CSO/NGO (membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah untuk pembangunan di Provinsi NTT)

Pelaksanaan program nyata di lapangan dilaksanakan melalui :

1. Dari ladang dan laut ke pasar : Efisien, modern dan aman ; Meliputi rehabilitasi cool strorage, program OVOP, peningkatan produktivitas dan optimaliasi BUMDes
2. Milenial dan Perempuan : Motor Kreativitas Lokal
3. Wisata NTT : Penggerak Ekonomi Lokal
4. Kesejahteraan Bersama : Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan masyarakat
5. Posyandu Tangguh : Masyarakat sehat dan bebas stunting
6. Sekolah Vokasi Unggulan : Berbasis potensi wilayah utnuk menciptakan lulusan siap kerja
7. Infrastruktur Dasar : Pemerataan jalan, air, listrik dan rumah layak huni untuk mewujudkan kesejahteraan
8. Tata Kelola Pemerintahan : Pendapatan daerah naik, pelayanan publik maksimal, dan kesejahteraan ASN terjamin
9. Membangun NTT Digital : Akses merata dan komunikasi terhubung di seluruh pelosok daerah

4.5.3. Program Prioritas Kabupaten Sikka

Program Prioritas Daerah tahun 2027 mengacu pada Enam Tekad Maumere Baru yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sikka 2025-2029 dijelaskan sebagai berikut:

1. **Sikka Cerdas Merata**

   Sikka Cerdas Merata merupakan tekad pembangunan yang berfokus pada penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan inklusif bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sikka. Pemerintah daerah menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan manusia, dengan memastikan bahwa tidak ada satupun warga—terutama dari kelompok miskin dan rentan—yang tertinggal dalam memperoleh hak atas pendidikan yang layak. Tekad ini sejalan langsung dengan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang menetapkan program prioritas “Jaminan Satu Sarjana bagi Setiap Keluarga Miskin Ekstrem” sebagai strategi afirmatif untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini memberikan jaminan akses pendidikan tinggi minimal satu orang per rumah tangga miskin ekstrem, sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam peningkatan kapasitas SDM keluarga miskin. Selain itu, komitmen untuk meningkatkan kuota bantuan beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga miskin juga menjadi bagian integral dari upaya pemerataan akses pendidikan. Pemerintah tidak hanya mendorong pemerataan secara geografis, tetapi juga memastikan bahwa anak-anak dari keluarga tidak mampu yang memiliki potensi akademik mendapat dukungan penuh untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Melalui integrasi antara tekad *Sikka Cerdas Merata* dan program kerja unggulan kepala daerah, pembangunan sektor pendidikan diarahkan untuk mencetak generasi muda Kabupaten Sikka yang unggul, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional, dengan tetap menjaga asas keadilan sosial dan keberpihakan pada kelompok paling rentan.

2. **Sikka Sehat Bersama**

   Sikka Sehat Bersama merupakan tekad pembangunan di bidang kesehatan yang menekankan pelayanan yang gratis, inklusif, dan merata bagi seluruh masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan kelompok rentan. Tekad ini diwujudkan melalui penguatan infrastruktur layanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, penambahan tenaga medis termasuk dokter spesialis, penanganan stunting secara terintegrasi, serta promosi perilaku hidup bersih dan sehat. Dukungan sistem rujukan digital juga menjadi bagian penting untuk menjamin efektivitas dan efisiensi layanan. Tekad ini secara langsung berkaitan dengan Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Warga Kabupaten Sikka berbasis e-KTP, yang memastikan bahwa setiap warga yang memiliki e-KTP Sikka dapat memperoleh layanan Kesehatan. Program ini terintegrasi dengan sistem

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga setiap warga, Kabupaten Sikka dapat dilayani. Melalui skema ini, pemerintah daerah mengambil peran aktif dalam melindungi dan memperluas cakupan kepesertaan JKN melalui Penerimaan Bantuan Biaya Iuran (PBI) bagi Kepala Keluarga Miskin dan tidak mampu maupun Non PBI (PPU, PBPU, dan Bukan Pekerja). Cakupan pelayanan kepesertaan PBI dilakukan dengani penguatan pendataan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga setiap KK miskin terdaftar dan tercover dalam program dimaksud. Pendekatan ini memungkinkan pelayanan yang cepat, adil, dan tepat sasaran, serta mengurangi beban administratif bagi warga saat mengakses fasilitas kesehatan. Dengan demikian, Sikka Sehat Bersama menjadi bagian dari transformasi sistem kesehatan daerah yang mendukung *universal health coverage* dan menjamin hak kesehatan sebagai hak dasar seluruh warga Kabupaten Sikka. Penguatan Sikka Sehat Bersama ini diimplementasikan melalui Pelayanan Kesehatan Primer yang meliputi pemenuhan kebutuhan Kesehatan berdasarkan siklus hidup individu, keluarga dan masyarakat. Ada 3 (tiga) hal yang menjadi fokus Integrasi Layanan Primer. Pertama adalah penerapan siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan kesehatan. Kedua, mendekatkan Pelayanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun termasuk untuk memperkuat promosi dan pencegahan yaitu melalui deteksi dan screening penyakit. Dan ketiga, memperkuat pemantauan wilayah melalui digitalisasi dan pemantauan melalui dashboard situasi kesehatan perdesaan. Penguatan struktur ini melalui penguatan Puskesmas, Pustu, dan Posyandu, serta penguatan jejaring dengan kesehatan sekolah dan kesehatan kerja.

3. **Sikka Tangguh Lokal**

   Sikka Tangguh Lokal merupakan tekad pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan lokal, seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata. Tekad ini sejalan dengan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang menetapkan, Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan berbasis teknologi berupa bantuan sarana produksi, sarana dan prasarana pertanian dan perikanan, peningkatan produktivitas perikanan tangkap sebagai program kerja prioritas dalam mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan kecil, Membangun pusat kreatif digital untuk mendukung pengembangan pariwisata melalui seni budaya, UMKM dan Konten Kreator Milenial yang dilaksanakan melalui program Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan menjadikan terumbu karang, wisata budaya dan wisata Rohani sebagai branding untuk dijual, yang dilaksanakan melalui program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Sektor pertanian di Kabupaten Sikka memiliki peran strategis sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Sebagai sektor yang menjadi sumber penghidupan utama sebagian besar masyarakat, pertanian diharapkan dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan. Pertumbuhan sektor ini akan berkontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta memperkuat daya saing ekonomi daerah. Oleh karena itu, penguatan sektor pertanian menjadi sasaran utama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sikka secara menyeluruh. Dengan potensi lahan yang luas dan keragaman komoditas unggulan, pengembangan pertanian menjadi langkah strategis dalam membangun ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi daerah. Selain itu di sektor perikanan, Program ini dijalankan dalam kerangka ekonomi biru (*blue economy*), yakni pendekatan pembangunan ekonomi kelautan yang menyeimbangkan aspek produktivitas, keberlanjutan, dan pelestarian ekosistem laut. Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Sikka berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas nelayan melalui penyediaan alat tangkap ramah lingkungan sehingga membangun penguatan akses nelayan terhadap teknologi perikanan. Selain itu, strategi pengembangan rantai nilai perikanan dari hulu ke hilir juga menjadi fokus agar hasil tangkapan laut dapat memberikan nilai

tambah yang lebih besar bagi ekonomi lokal. Dengan demikian, Sikka Tangguh Lokal tidak hanya mencerminkan upaya memperkuat ekonomi daerah berbasis potensi lokal, tetapi juga menjadi pijakan dalam membangun sistem ekonomi kelautan yang adil, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh masyarakat pesisir. Ada juga sektor UMKM dan ekonomi kreatif (pengembangan *Creative Hub*) dan juga menjadikan Sikka sebagai destinasi ekowisata unggulan yang berfokus pada pengembangan destinasi wisata bawah laut terumbu karang.

4. **Sikka Layak Huni**
   Sikka Layak Huni merupakan tekad pembangunan yang menekankan terciptanya lingkungan yang layak, aman, tertata, dan nyaman untuk dihuni oleh seluruh masyarakat. Tekad ini mencakup pemenuhan standar infrastruktur dasar permukiman, seperti ketersediaan rumah layak huni, akses jalan yang memadai, air bersih, listrik, sanitasi sehat, serta konektivitas wilayah yang menunjang kehidupan modern. Sebagai wujud nyata dari komitmen ini, Pemerintah Kabupaten Sikka menjadikan program kerja kepala daerah khusus untuk bantuan pembangunan rumah layak huni bagi keluarga miskin ekstrem sebagai bagian utama dari agenda kerja prioritas. Program ini bertujuan untuk menghapus ketimpangan tempat tinggal, mengangkat martabat hidup masyarakat miskin, serta memastikan bahwa setiap warga memiliki tempat tinggal yang aman, sehat, dan memenuhi syarat kelayakan dasar. Program ini dikembangkan menjadi sebuah "Gerakan Sikka Layak Huni", yaitu gerakan kolaboratif lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, desa, swasta, komunitas, dan masyarakat itu sendiri dalam membangun rumah-rumah layak bagi keluarga miskin ekstrem. Gerakan ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga membangun kesadaran sosial, solidaritas, dan partisipasi kolektif untuk mewujudkan keadilan tempat tinggal bagi semua. Melalui gerakan ini, Sikka Layak Huni tidak hanya menjadi tekad simbolik, tetapi dijalankan sebagai gerakan nyata, terstruktur, dan berkelanjutan, sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

5. **Sikka Lestari Hijau**
   Sikka Lestari Hijau sebagai salah satu tekad pembangunan daerah menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sikka terhadap pelestarian lingkungan hidup melalui rehabilitasi kawasan kritis, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta integrasi mitigasi perubahan iklim dalam setiap kebijakan pembangunan. Tekad ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi dijabarkan secara konkret melalui program-program kerja strategis kepala daerah, salah satunya adalah perbaikan manajemen dan pemenuhan fasilitas pengelolaan sampah di Kota Maumere. Upaya ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola lingkungan perkotaan yang lebih baik, dengan membangun sistem pengelolaan sampah yang modern, efisien, dan ramah lingkungan. Pemerintah akan memperkuat infrastruktur dan sarana prasarana persampahan, seperti tempat pengolahan sampah terpadu, armada angkut, serta fasilitas pemilahan dan daur ulang, yang kesemuanya didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Dengan keterlibatan aktif warga dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, program ini menjadi manifestasi dari pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan tujuan Sikka Lestari Hijau, sekaligus menjawab tantangan perubahan iklim dan urbanisasi secara terencana dan responsif.

6. **Sikka Layanan Bersih**
   Sikka Layanan Bersih merupakan salah satu tekad pembangunan yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, bebas dari praktik korupsi serta mendorong budaya kolaboratif dalam penyelenggaraan layanan publik. Tekad ini diwujudkan melalui reformasi birokrasi yang mendalam dan transformasi digital sebagai instrumen utama untuk menciptakan pelayanan yang lebih akuntabel dan efektif. Peneguhan komitmen ini sejalan dengan program kerja kepala daerah yang mengusung transformasi pelayanan publik menjadi lebih transparan, efisien, profesional, produktif, dan melayani.

Melalui digitalisasi layanan publik, Pemerintah Kabupaten Sikka akan membangun sistem pelayanan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat, sekaligus memangkas proses birokrasi yang lambat dan rawan penyimpangan. Di sisi lain, investasi dalam infrastruktur digital dan penguatan kapasitas aparatur menjadi prasyarat penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang modern dan berdaya saing. Digitalisasi juga akan memperkuat mekanisme pengawasan dan keterlibatan masyarakat, sehingga publik dapat turut mengawal kualitas dan integritas pelayanan secara langsung. Dengan demikian, Sikka Layanan Bersih bukan hanya slogan administratif, tetapi menjadi arah perubahan nyata menuju pemerintahan yang terpercaya dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Secara operasional program prioritas tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengendalian Perizinan Pendidikan
3. Pengembangan Kurikulum
4. Pembinaan Perpustakaan
5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6. Pengelolaan Pendidikan
7. Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
8. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
9. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
10. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
11. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
12. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
13. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
14. Pengendalian Penduduk
15. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
16. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
17. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
18. Hubungan Industrial
19. Pemberdayaan Sosial
20. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
21. Penempatan Tenaga Kerja
22. Perlindungan dan Jaminan Sosial
23. Penanganan Bencana
24. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
25. Rehabilitasi Sosial
26. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
27. Perencanaan Tenaga Kerja
28. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
29. Peningkatan Kualitas Keluarga
30. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
31. Perlindungan Khusus Anak
32. Perlindungan Perempuan
33. Pemenuhan Hak Anak (PHA)
34. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
35. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
36. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
37. Peningkatan Kerja Sama Desa
38. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
39. Penyuluhan Pertanian
40. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
41. Perizinan Usaha Pertanian
42. Administrasi Pemerintahan Desa
43. Penataan Desa
44. Penanganan Kerawanan Pangan
45. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
46. Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

47. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
48. Pengelolaan Perikanan Budidaya
49. Pengelolaan Perikanan Tangkap
50. Pengembangan UMKM
51. Promosi Penanaman Modal
52. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
53. Pengembangan Iklim Penanaman Modal
54. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
55. Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
56. Pengendalian Izin Usaha Industri
57. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
58. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
59. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
60. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
61. Pelayanan Penanaman Modal
62. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
63. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
64. Pembinaan Sejarah
65. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
66. Pemasaran Pariwisata
67. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
68. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
69. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
70. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
71. Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
72. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
73. Pengembangan Ekspor
74. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
75. Pengembangan Kebudayaan
76. Pengembangan Kesenian Tradisional
77. Pengelolaan Permuseuman
78. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
79. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
80. Penyelenggaraan Jalan
81. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
82. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
83. Penataan Bangunan dan Lingkungannya
84. Pengembangan Jasa Konstruksi
85. Penataan Bangunan Gedung
86. Kawasan Permukiman
87. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
88. Pengelolaan Pelayaran
89. Penyelenggaraan Penataan Ruang
90. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
91. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
92. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
93. Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
94. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
95. Pengembangan Perumahan
96. Perencanaan Lingkungan Hidup
97. Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
98. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
99. Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
100. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
101. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
102. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
103. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
104. Pengelolaan Persampahan
105. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
106. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
107. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
108. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
109. Penyelenggaraan Pengawasan
110. Pengelolaan Keuangan Daerah
111. Pengelolaan Barang Milik Daerah
112. Pengelolaan Pendapatan Daerah
113. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
114. Penelitian dan Pengembangan Daerah
115. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
116. Perekonomian dan Pembangunan
117. Kepegawaian Daerah
118. Pengelolaan Aplikasi Informatika
119. Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
120. Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
121. Pengembangan Sumber Daya Manusia
122. Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
123. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
124. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
125. Pengelolaan Arsip
126. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
127. Penyelenggaraan Statistik Sektoral
128. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
129. Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
130. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
131. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
132. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
133. Penanggulangan Bencana
134. Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
135. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
136. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
137. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
138. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
139. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
140. Pencatatan Sipil
141. Pendaftaran Penduduk
142. Pembangunan Kawasan Transmigrasi
143. Pengelolaan Profil Kependudukan
144. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
145. Pengembangan Kawasan Transmigrasi
146. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan secara lengkap dalam lampiran matrik rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah Kota Salatiga. Tahapan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan analisis dan metodologi perumusan sasaran pembangunan daerah. Rencana kerja disusun untuk menjabarkan sasaran pembangunan daerah dan dalam rangka pencapaian indikator sasaran serta dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2027 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan dari pemerintah Kabupaten Sikka sebagai jawaban atas permasalahan pembangunan daerah yang berkembang saat ini. Program dan kegiatan dalam rencana kerja ditetapkan dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, isu strategis, korelasi terhadap Standar Pelayanan Minimal, Suistainable Development Goal's (SDG's), pengentasan kemiskinan dan stunting serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam Musrenbang.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dalam rangka mencapai target RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2027 memuat program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana urusan daerah yang meliputi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, serta urusan pendukung urusan pemerintahan.

Program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pelaksanaannya didukung dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang merupakan unsur pendukung dan unsur penunjang urusan pemerintahan.

5.1. Rencana Kerja

Implementasi program, kegiatan, dan sub kegiatan memperhatikan urgensi dan kapasitas kemampuan keuangan daerah, sehingga penjabaran program dibedakan menjadi dua prioritas, yaitu :

1. Prioritas I, merupakan program prioritas pembangunan daerah tahun 2027 sesuai dengan pentahapan perencanaan tahun kedua RPJMD 2025-2029, program Intervensi yang bersifat kebijakan, isu global, isu Nasional, isu Provinsi, Prioritas pembangunan, isu strategis, SDGs dan SPM;
2. Prioritas II, merupakan prioritas program yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang berhubungan dengan permasalahan pelayanan tugas fungsi sesuai urusan, bidang urusannya, atau sebagai unsur pendukung atau unsur penunjang pelaksanaan pemerintahan.

5.1.1. Rencana Kerja Prioritas Pertama

5.1.1.1. Rencana Kerja Dukungan untuk Prioritas Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka yang mendukung untuk Pelaksanaan Prioritas Nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.

Dukungan Program Dan Kegiatan Untuk Prioritas Nasional

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta Mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		**40.272.407.875,00**
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	**3.236.930.104,00**
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	299.998.872,00
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000,00
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	199.999.200,00
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	49.999.672,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.936.931.232,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.597.058.476,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.198.900,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.898.800,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.530.556,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.244.500,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	**16.369.402.321,00**
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	245.000.000,00
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	245.000.000,00
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	100.000.000,00
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	200.000.000,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.000.000.000,00

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	600.000.000,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	474.923.100,00
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	474.923.100,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	162.187.800,00
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	58.533.100,00
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	82.600.200,00
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	21.054.500,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	200.000.000,00
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.648.388.996,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59.300.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.641.870.620,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	171.089.700,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	449.388.500,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.930.076,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	157.810.100,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	6.504.071.925,00
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	6.504.071.925,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	234.830.500,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	130.216.300,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	62.688.000,00
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	41.926.200,00
	DINAS PERHUBUNGAN	**6.699.648.681,00**
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	109.599.884,00
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	109.599.884,00

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.580.924.505,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.259.751.576,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.844.200,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.999.500,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.298.629,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.030.600,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.009.124.292,00
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	8.345.700,00
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	63.037.900,00
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	336.495.420,00
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	137.414.388,00
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.096.600,00
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.442.088.784,00
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	8.645.500,00
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	**10.942.891.858,00**
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	200.000.000,00
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	200.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	845.195.000,00
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	826.964.100,00
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	18.230.900,00
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	250.000.000,00
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	250.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.850.544.558,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.665.683.482,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.633.900,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.042.800,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.298.500,00

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.497.576,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.388.300,00
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	1.199.999.900,00
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.199.999.900,00
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	37.347.800,00
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	37.347.800,00
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	5.559.804.600,00
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	5.559.804.600,00
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	**3.023.534.911,00**
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	48.921.700,00
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	28.921.700,00
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	27.821.500,00
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	6.227.800,00
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	15.000.000,00
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	6.593.700,00
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	36.401.800,00
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.401.800,00
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	69.973.950,00
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	12.547.200,00
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	8.220.550,00
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	49.206.200,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	40.000.000,00
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	40.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.745.415.961,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.551.519.746,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.841.300,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.905.393,00
	Penataan Organisasi	24.270.000,00

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.270.900,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.608.722,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.999.900,00
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	55.000.000,00
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	55.000.000,00
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		**36.076.411.064,00**
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	**342.547.700,00**
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	342.547.700,00
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	342.547.700,00
	DINAS PERIKANAN	**6.951.496.156,00**
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	99.953.600,00
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	99.953.600,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	199.999.900,00
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	199.999.900,00
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	699.991.038,00
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	699.991.038,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.951.551.618,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.198.281.506,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	111.479.600,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.170.100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.550.251.612,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.368.800,00
	DINAS KETAHANAN PANGAN	**2.400.204.768,00**
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	27.640.000,00
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	12.785.000,00
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	14.855.000,00
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	54.537.888,00

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	54.537.888,00
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	171.801.300,00
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	48.125.800,00
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	23.675.500,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.146.225.580,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.982.246.498,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	55.348.200,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.433.400,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.877.482,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.320.000,00
	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	**8.992.122.366,00**
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	9.865.500,00
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.865.500,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	155.904.500,00
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	155.904.500,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	62.801.000,00
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	62.801.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	19.999.900,00
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	19.999.900,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	101.039.700,00
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	101.039.700,00
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	15.000.000,00

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000,00
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	34.386.300,00
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	34.386.300,00
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	560.579.700,00
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	470.579.700,00
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	90.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.639.286.566,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.560.998.470,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.400.400,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.293.200,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	707.594.496,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.000.000,00
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	199.999.900,00
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	199.999.900,00
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	30.867.600,00
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	15.417.900,00
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	15.449.700,00
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	81.020.900,00
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	81.020.900,00
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	81.370.800,00
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	81.370.800,00
	DINAS PERTANIAN	**17.390.040.074,00**
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	199.951.100,00
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	199.951.100,00
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.332.548.900,00

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	1.332.548.900,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.084.539.808,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.443.908.218,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	246.999.100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	408.334.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	404.314.900,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	443.223.990,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	137.759.600,00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	911.499.400,00
	Pengembangan Prasarana Pertanian	911.499.400,00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.514.002.266,00
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.939.954.166,00
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	239.988.600,00
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	806.231.700,00
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	527.827.800,00
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	347.498.600,00
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	347.498.600,00
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.		**11.026.331.155,00**
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	**3.982.636.796,00**
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	102.392.900,00
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	102.392.900,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	63.973.950,00
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	63.973.950,00
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	181.900.400,00
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	63.009.500,00
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	118.890.900,00

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.634.369.546,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.370.506.370,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	94.068.900,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.944.500,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.814.500,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.035.276,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	**3.163.461.752,00**
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	99.969.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	99.969.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	48.271.350,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	48.271.350,00
	PROGRAM PENATAAN DESA	10.000.000,00
	Penyelenggaraan Penataan Desa	10.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.005.221.402,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.846.574.756,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.515.700,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.409.440,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.298.500,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.488.106,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.934.900,00
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	**3.304.930.807,00**
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	50.448.140,00
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	50.448.140,00
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	36.650.708,00
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.650.708,00

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	20.550.400,00
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20.550.400,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	40.276.696,00
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	40.276.696,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.150.004.863,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.906.777.106,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.477.704,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.135.536,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.614.217,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.300,00
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	7.000.000,00
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.000.000,00
	DINAS SOSIAL	**575.301.800,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	26.057.600,00
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	26.057.600,00
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	49.545.800,00
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	49.545.800,00
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	24.808.900,00
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	24.808.900,00
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	14.567.300,00
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	14.567.300,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	161.580.300,00
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	12.915.700,00
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	148.664.600,00
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	298.741.900,00
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	298.741.900,00
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).		**14.933.426.453,00**

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	**4.400.376.844,00**
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	634.003.100,00
	Mutasi dan Promosi ASN	93.568.000,00
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	119.999.600,00
	Pengembangan Kompetensi ASN	383.499.400,00
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	36.936.100,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	240.416.500,00
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	240.416.500,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.525.957.244,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.990.200,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.316.036.144,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.396.900,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.589.800,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.900.300,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.043.900,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	**1.301.445.304,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	88.796.000,00
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	88.796.000,00
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	371.734.850,00
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	371.734.850,00
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	840.914.454,00
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	840.914.454,00
	KECAMATAN ALOK	**4.060.733.232,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.227.200,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.227.200,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.955.100,00

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.955.100,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.030.605.932,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.937.498.684,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.669.700,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.187.152,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.344.700,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.365.696,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.540.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.945.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	14.945.000,00
	KECAMATAN MAGEPANDA	**1.341.995.714,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8.050.000,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8.050.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.041.100,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.041.100,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.276.290.714,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.211.245.614,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.629.700,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.065.200,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.350.200,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40.588.900,00
	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.811.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	24.777.900,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.025.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.025.000,00
	KECAMATAN PALUE	**1.683.822.266,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.000.100,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.000.100,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.960.000,00

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.960.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.581.884.766,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.477.713.360,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.552.900,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.086.500,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.191.106,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.340.900,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	58.197.400,00
	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	48.177.400,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	10.020.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.780.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	17.780.000,00
	KELURAHAN BERU	**388.142.480,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	308.697.600,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	308.697.600,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	52.222.880,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.856.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.030.600,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.036.880,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.299.400,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	27.222.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	27.222.000,00
	KELURAHAN KABOR	**406.969.935,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	298.236.800,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	298.236.800,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	85.123.135,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.200.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.465.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.315.200,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.142.935,00

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	23.610.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	23.610.000,00
	KELURAHAN KOTA UNENG	**116.456.896,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40.211.600,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	40.211.600,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	70.294.396,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.000.100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.394.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.782.400,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.117.896,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.950.900,00
	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.950.900,00
	KELURAHAN MADAWAT	**406.203.400,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	308.382.000,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	308.382.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	68.980.600,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.246.600,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.946.600,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.787.400,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28.840.800,00
	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.840.800,00
	KELURAHAN NANGALIMANG	**397.425.306,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	275.403.216,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	275.403.216,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	83.400.090,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.895.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.353.100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.766.234,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.952.200,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.433.556,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	38.622.000,00

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	38.622.000,00
	KELURAHAN WOLOMARANG	**429.855.076,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	313.691.500,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	310.306.500,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3.385.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	116.163.576,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.300.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.375.400,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.551.400,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.936.776,00
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		**707.356.802.563,75**
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	**82.600.000,00**
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	13.599.000,00
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	13.599.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	69.001.000,00
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.851.600,00
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.149.400,00
	DINAS KESEHATAN	**138.689.013.541,10**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	729.240.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	515.240.000,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	214.000.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	41.862.875.884,10
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.011.183.800,00

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.768.192.084,10
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	83.500.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.353.871.200,00
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.249.543.100,00
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	2.104.328.100,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	92.198.777.857,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.720.600,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	91.413.901.146,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	168.102.800,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	367.773.900,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.114.311,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.165.100,00
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	544.248.600,00
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	136.397.700,00
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	311.196.900,00
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	96.654.000,00
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	**409.269.378.833,47**
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	150.000.000,00
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	150.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	75.198.031.277,00
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	5.191.658.465,00
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.302.388.200,00
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	43.949.185.712,00
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	24.754.798.900,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	13.821.990.200,00

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	12.150.000.000,00
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	42.000.000,00
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.629.990.200,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	175.000.000,00
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	75.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	75.000.000,00
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	75.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	68.324.400,00
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	68.324.400,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	35.189.800,00
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10.200.000,00
	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	24.989.800,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	319.745.843.156,47
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.190.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	319.024.183.615,47
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	209.420.100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	296.788.765,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.770.776,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.489.900,00
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	**6.779.674.664,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.886.800.000,00
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.886.800.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	772.755.000,00
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	120.000.000,00
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	270.000.000,00

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	382.755.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	8.416.300,00
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	8.416.300,00
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	100.946.300,00
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	21.427.200,00
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.159.100,00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	69.360.000,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	96.000.000,00
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	96.000.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.461.501.364,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.296.671.050,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.704.400,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.335.700,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.990.214,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.800.000,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	15.864.400,00
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	15.864.400,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	437.391.300,00
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	102.000.000,00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80.061.500,00
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	255.329.800,00
	PUSKESMAS BERU	**1.425.351.135,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	35.763.000,00

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.313.000,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.450.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.389.588.135,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	196.997.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.192.591.135,00
	PUSKESMAS BOGANATAR	**1.001.007.300,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	43.900.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.150.000,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.750.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	957.107.300,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	28.370.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	928.737.300,00
	PUSKESMAS BOLA	**1.233.743.800,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	46.090.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.240.000,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43.850.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.187.653.800,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	130.302.600,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.057.351.200,00
	PUSKESMAS FEONDARI	**882.660.648,20**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	30.144.000,00

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.700.000,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.444.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	852.516.648,20
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	17.725.200,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	834.791.448,20
	PUSKESMAS HABIBOLA	**1.125.213.256,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	54.240.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.120.000,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.120.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.070.973.256,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	128.778.300,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	942.194.956,00
	PUSKESMAS HEWOKLOANG	**1.015.291.400,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	43.601.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.261.000,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.340.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	971.690.400,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	70.374.360,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	901.316.040,00
	PUSKESMAS KEWAPANTE	**1.177.851.800,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	51.440.000,00

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	51.440.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.126.411.800,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	210.587.600,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	915.824.200,00
	PUSKESMAS KOPETA	**1.321.474.594,98**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	85.960.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.800.000,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.160.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.235.514.594,98
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	170.233.100,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.065.281.494,98
	PUSKESMAS KOTING	**888.664.300,00**
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	888.664.300,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	34.011.200,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	854.653.100,00
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
	PUSKESMAS LEKEBAI	**1.038.655.900,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	23.415.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.925.000,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.490.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.015.240.900,00

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	92.968.300,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	922.272.600,00
	PUSKESMAS MAGEPANDA	**194.658.300,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	58.360.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.080.000,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.280.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	136.298.300,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	136.298.300,00
	PUSKESMAS MAPITARA	**1.043.974.140,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	38.505.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.825.000,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.680.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.005.469.140,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	58.633.200,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	946.835.940,00
	PUSKESMAS NANGA	**1.199.588.340,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	61.506.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.056.000,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.450.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.138.082.340,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	116.752.600,00

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.021.329.740,00
	PUSKESMAS NELLE	**1.096.552.590,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	58.650.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.520.000,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.130.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.037.902.590,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	81.765.800,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	956.136.790,00
	PUSKESMAS NITA	**1.661.930.312,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	72.460.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	51.085.000,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.375.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.589.470.312,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	237.109.900,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.352.360.412,00
	PUSKESMAS PAGA	**1.337.171.965,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	92.090.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.330.000,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.760.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.245.081.965,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	168.329.200,00

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.076.752.765,00
	PUSKESMAS PALUE	**1.046.766.200,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	41.252.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.960.000,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.292.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.005.514.200,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	70.276.200,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	935.238.000,00
	PUSKESMAS TANARAWA	**1.191.408.466,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	30.586.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.740.000,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.846.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.160.822.466,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	60.892.200,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.099.930.266,00
	PUSKESMAS TELUK	**1.208.757.292,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	42.160.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.840.000,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.320.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.166.597.292,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	123.221.200,00

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.043.376.092,00
	PUSKESMAS TUANGGEO	**1.014.536.900,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	65.952.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.270.000,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.682.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	948.584.900,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	43.991.200,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	904.593.700,00
	PUSKESMAS WAIGETE	**1.494.792.436,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	42.095.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.100.000,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.995.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.452.697.436,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	178.923.700,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.273.773.736,00
	PUSKESMAS WAIPARE	**1.322.344.450,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	52.868.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.228.000,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.640.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.269.476.450,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	234.652.500,00

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.034.823.950,00
	PUSKESMAS WATUBAING	**1.362.423.784,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	68.203.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.303.000,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.900.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.294.220.784,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	120.666.100,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.173.554.684,00
	PUSKESMAS WOLOFEO	**1.098.166.852,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	74.665.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.240.000,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.425.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.023.501.852,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	58.715.700,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	964.786.152,00
	PUSKESMAS WOLOMARANG	**1.211.275.404,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	50.060.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.040.000,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.020.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.161.215.404,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	164.773.500,00

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	996.441.904,00
	RSUD dr. T. C. HILLERS MAUMERE	**123.941.873.960,00**
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	65.000.000.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	58.941.873.960,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	58.430.327.160,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	511.546.800,00
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		**490.165.200,00**
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	**62.855.700,00**
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	62.855.700,00
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	62.855.700,00
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	**427.309.500,00**
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	96.000.000,00
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	96.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	331.309.500,00
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	314.324.900,00
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.984.600,00
Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		**300.443.218.712,22**
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	**2.403.392.789,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.403.392.789,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.295.548.672,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.519.400,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.821.500,00

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.013.917,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.489.300,00
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	**9.676.892.690,00**
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.076.434.700,00
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.076.434.700,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.600.457.990,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.040.838.914,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	144.287.400,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.026.100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	306.535.476,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.770.100,00
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	**42.627.135.122,00**
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	882.336.900,00
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	882.336.900,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.653.563.300,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	729.542.600,00
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	304.745.300,00
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.619.275.400,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.091.234.922,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.069.800,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.062.129.782,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	144.556.298,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.083.080,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	66.656.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	629.560.962,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.179.000,00
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	**144.035.403.908,00**
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	144.035.403.908,00
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	144.035.403.908,00
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	**8.108.223.341,00**
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	620.463.800,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	203.082.500,00

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	234.039.100,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	183.342.200,00
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	593.289.600,00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	22.477.900,00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	89.899.600,00
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	480.912.100,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.059.425.441,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.420.181.936,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	192.765.950,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.826.200,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.281.355,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.370.000,00
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.835.044.500,00
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	26.470.200,00
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	205.370.000,00
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	405.344.000,00
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.197.860.300,00
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	**275.765.481,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	146.025.151,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.591.478,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.917.465,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.670.412,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.150.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.695.796,00
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	129.740.330,00
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	129.740.330,00
	BAGIAN HUKUM	**250.954.900,00**
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	250.954.900,00
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	250.954.900,00
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**6.311.031.552,40**
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.181.095.250,00
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	6.181.095.250,00

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	129.936.302,40
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.368.200,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.882.060,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.372.542,40
	Penataan Organisasi	15.453.500,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.860.000,00
	BAGIAN ORGANISASI	**348.233.700,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	348.233.700,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.414.800,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.806.800,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.166.000,00
	Penataan Organisasi	226.016.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.260.100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.570.000,00
	BAGIAN PEMERINTAHAN	**343.876.000,00**
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	210.304.600,00
	Administrasi Tata Pemerintahan	164.223.900,00
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	46.080.700,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	133.571.400,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.200.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.480.300,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.921.100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.860.000,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.110.000,00
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	**616.275.500,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	336.139.500,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.233.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.731.800,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.717.100,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.668.800,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.788.800,00
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	280.136.000,00
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	280.136.000,00
	BAGIAN PEREKONOMIAN	**271.078.600,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	87.748.600,00

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.970.500,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.232.600,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.685.500,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.860.000,00
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	183.330.000,00
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	183.330.000,00
	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	**17.485.424.566,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.485.424.566,00
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	576.456.180,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.712.117.986,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.623.800,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.523.200,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.159.500,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.399.800,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.144.100,00
	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	**786.759.250,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	786.759.250,00
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	15.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.141.400,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	585.992.200,00
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	87.648.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.061.400,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.916.250,00
	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	**166.609.400,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	93.473.800,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.997.500,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.747.400,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.592.300,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.136.600,00
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	73.135.600,00
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	73.135.600,00
	BAGIAN UMUM	**5.380.354.280,20**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.380.354.280,20
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.856.300,00
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	69.514.700,00

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	79.045.800,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	174.867.500,00
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.343.934.800,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	860.840.516,20
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	262.505.300,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.565.789.364,00
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	**3.313.486.714,00**
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	99.173.400,00
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	64.844.800,00
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	11.110.000,00
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	23.218.600,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.174.314.814,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.967.406.186,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.462.500,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.477.400,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.464.500,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.974.428,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.529.800,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	39.998.500,00
	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	7.982.000,00
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	15.999.300,00
	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	16.017.200,00
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	**5.463.422.986,00**
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	161.944.800,00
	Pelayanan Pencatatan Sipil	133.363.900,00
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	28.580.900,00
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	95.536.588,00
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	77.331.788,00
	Penataan Pendaftaran Penduduk	12.000.000,00
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	6.204.800,00
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	316.424.700,00
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	9.701.300,00

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	289.920.600,00
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	16.802.800,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	6.165.900,00
	Penyusunan Profil Kependudukan	6.165.900,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.883.350.998,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.633.507.386,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.701.400,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.222.800,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.438.212,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.481.200,00
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	**4.375.045.170,00**
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	17.500.400,00
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.500.400,00
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	12.694.600,00
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.694.600,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.267.399.670,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.488.995.406,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.969.400,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.909.300,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.670.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	706.855.564,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	77.450.500,00
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	77.450.500,00
	DINAS SOSIAL	**4.027.591.384,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.027.591.384,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.846.272.894,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	55.957.200,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.488.600,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.374.290,00

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.498.400,00
	INSPEKTORAT DAERAH	**5.662.735.932,82**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.289.743.432,82
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	267.463.554,82
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.823.201.540,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.512.700,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.546.040,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.841.498,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.178.100,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	271.280.900,00
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	31.847.200,00
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	239.433.700,00
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	101.711.600,00
	Pendampingan dan Asistensi	89.071.900,00
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	12.639.700,00
	KECAMATAN ALOK BARAT	**3.827.139.693,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.796.000,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.796.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.777.893.693,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.715.315.193,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.488.800,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.500.100,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.827.400,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.762.200,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	38.450.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	38.450.000,00
	KECAMATAN ALOK TIMUR	**4.218.267.934,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.991.200,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14.991.200,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.816.000,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.816.000,00

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.156.655.734,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.070.984.626,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.918.700,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.047.300,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.777.908,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.927.200,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28.785.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.785.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.020.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.020.000,00
	KECAMATAN BOLA	**1.458.763.428,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.043.200,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.043.200,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.510.000,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.510.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.389.607.728,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.327.695.228,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.817.900,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.409.300,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.794.000,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.891.300,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	54.100.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	54.100.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.502.500,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.502.500,00
	KECAMATAN HEWOKLOANG	**1.330.031.980,80**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.361.600,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.361.600,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.150.000,00

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.150.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.246.000.380,80
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.152.170.128,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.471.100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.836.300,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.772.852,80
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.750.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	65.520.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	65.520.000,00
	KECAMATAN KANGAE	**1.576.221.786,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.668.200,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.668.200,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.510.000,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.510.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.494.401.086,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.439.461.686,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.246.900,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.165.700,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.635.500,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.891.300,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	68.140.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	68.140.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.502.500,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.502.500,00
	KECAMATAN MAPITARA	**1.213.380.584,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.618.000,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.618.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.946.400,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.946.400,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.165.342.184,00

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.079.476.684,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.827.500,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.794.400,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.243.600,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.274.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.274.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13.200.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	13.200.000,00
	KECAMATAN MEGO	**1.470.422.702,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.453.488.040,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.401.397.640,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.422.900,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.400.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.267.500,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.934.662,00
	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.934.662,00
	KECAMATAN NITA	**1.743.870.655,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8.134.400,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8.134.400,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.238.300,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.238.300,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.653.620.655,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.521.274.740,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.802.400,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.248.300,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.050.515,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.244.700,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	66.877.300,00

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	18.829.800,00
	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.147.500,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12.900.000,00
	KECAMATAN TALIBURA	**1.607.718.375,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.718.800,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.718.800,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	21.140.000,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21.140.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.516.293.375,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.457.394.746,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.973.300,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.522.400,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.907.929,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.495.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	57.566.200,00
	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	57.566.200,00
	KECAMATAN WAIBLAMA	**1.480.422.996,00**
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.945.200,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.945.200,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.556.800,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	17.556.800,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.650.000,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.650.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.423.955.996,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.316.053.492,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.934.500,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.866.800,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.851.204,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.250.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.350.000,00

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.350.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.965.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.965.000,00
	KELURAHAN KOTA BARU	**403.494.160,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	303.850.000,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	303.850.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	83.337.160,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.286.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.909.100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.935.600,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.206.460,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.307.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.307.000,00
	KELURAHAN NANGAMETING	**359.626.171,00**
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.870.000,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.870.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	283.322.460,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	283.322.460,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	64.398.811,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.844.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.846.500,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.774.800,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.933.511,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.034.900,00
	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.034.900,00
	KELURAHAN WAIOTI	**390.908.320,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	305.328.900,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	305.328.900,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	85.579.420,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.228.500,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.666.500,00

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.621.300,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.063.120,00
	KELURAHAN WURING	**405.279.433,00**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	300.000.000,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	300.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	94.562.233,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.244.600,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.741.800,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.156.800,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.358.400,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.060.633,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.717.200,00
	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.717.200,00
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	**7.086.463.934,00**
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	107.787.000,00
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	107.787.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	269.448.000,00
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	269.448.000,00
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.709.228.934,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.311.794.294,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.713.200,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196.973.900,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.827.540,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.920.000,00
	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	**9.941.513.294,00**

PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	2.676.508.492,00
	Fasilitasi Tugas DPRD	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	177.600.000,00
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	720.235.000,00
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.001.493.492,00
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	777.180.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.265.004.802,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.555.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.732.820.804,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	429.267.100,00
	Layanan Administrasi DPRD	2.009.285.000,00
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	122.500.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	434.793.400,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	469.541.698,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.241.800,00

5.1.1.2. Rencana Kerja Dukungan untuk penanganan SPM

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka yang mendukung untuk Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.
Program dan Kegiatan Penanganan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2027

JENIS DAN LAYANAN SPM	PERANGKAT DAERAH / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
SPM Bidang Kesehatan		**26.891.431.460,00**
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**1.185.266.000,00**
	DINAS KESEHATAN	515.240.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**515.240.000,00**
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	515.240.000,00
	PUSKESMAS BERU	16.313.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**16.313.000,00**
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	16.313.000,00

JENIS DAN LAYANAN SPM	PERANGKAT DAERAH / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	PUSKESMAS BOGANATAR	34.150.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**34.150.000,00**
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	34.150.000,00
	PUSKESMAS BOLA	2.240.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**2.240.000,00**
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2.240.000,00
	PUSKESMAS FEONDARI	14.700.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**14.700.000,00**
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	14.700.000,00
	PUSKESMAS HABIBOLA	15.120.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**15.120.000,00**
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	15.120.000,00
	PUSKESMAS HEWOKLOANG	16.261.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**16.261.000,00**
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	16.261.000,00
	PUSKESMAS KOPETA	70.800.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**70.800.000,00**
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	70.800.000,00
	PUSKESMAS KOTING	4.900.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**4.900.000,00**
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4.900.000,00
	PUSKESMAS LEKEBAI	15.925.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**15.925.000,00**
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	15.925.000,00
	PUSKESMAS MAGEPANDA	38.080.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**38.080.000,00**
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	38.080.000,00

JENIS DAN LAYANAN SPM	PERANGKAT DAERAH / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	PUSKESMAS MAPITARA	18.825.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**18.825.000,00**
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	18.825.000,00
	PUSKESMAS NANGA	27.056.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**27.056.000,00**
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	27.056.000,00
	PUSKESMAS NELLE	12.520.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**12.520.000,00**
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.520.000,00
	PUSKESMAS NITA	51.085.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**51.085.000,00**
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	51.085.000,00
	PUSKESMAS PAGA	57.330.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**57.330.000,00**
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	57.330.000,00
	PUSKESMAS PALUE	27.960.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**27.960.000,00**
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	27.960.000,00
	PUSKESMAS TANARAWA	12.740.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**12.740.000,00**
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.740.000,00
	PUSKESMAS TELUK	21.840.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**21.840.000,00**
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	21.840.000,00
	PUSKESMAS TUANGGEO	27.270.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**27.270.000,00**
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	27.270.000,00

JENIS DAN LAYANAN SPM	PERANGKAT DAERAH / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	PUSKESMAS WAIGETE	23.100.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**23.100.000,00**
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	23.100.000,00
	PUSKESMAS WAIPARE	21.228.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**21.228.000,00**
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	21.228.000,00
	PUSKESMAS WATUBAING	48.303.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**48.303.000,00**
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	48.303.000,00
	PUSKESMAS WOLOFEO	48.240.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**48.240.000,00**
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	48.240.000,00
	PUSKESMAS WOLOMARANG	44.040.000,00
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**44.040.000,00**
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	44.040.000,00
Pelayanan Kesehatan Balita		**0,00**
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		**619.461.600,00**
	DINAS KESEHATAN	619.461.600,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**619.461.600,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	619.461.600,00
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		**249.424.600,00**
	DINAS KESEHATAN	249.424.600,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**249.424.600,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	249.424.600,00
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		**1.283.718.500,00**
	DINAS KESEHATAN	134.048.500,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**134.048.500,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	134.048.500,00
	PUSKESMAS BERU	13.440.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**13.440.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	13.440.000,00

JENIS DAN LAYANAN SPM	PERANGKAT DAERAH / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	PUSKESMAS BOGANATAR	69.720.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**69.720.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	69.720.000,00
	PUSKESMAS BOLA	35.700.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**35.700.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	35.700.000,00
	PUSKESMAS FEONDARI	37.500.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**37.500.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	37.500.000,00
	PUSKESMAS HABIBOLA	18.200.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**18.200.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	18.200.000,00
	PUSKESMAS HEWOKLOANG	12.390.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**12.390.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12.390.000,00
	PUSKESMAS KEWAPANTE	43.200.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**43.200.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	43.200.000,00
	PUSKESMAS KOPETA	26.720.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**26.720.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	26.720.000,00
	PUSKESMAS KOTING	31.360.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**31.360.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	31.360.000,00
	PUSKESMAS LEKEBAI	55.720.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**55.720.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	55.720.000,00
	PUSKESMAS MAGEPANDA	47.600.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**47.600.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	47.600.000,00
	PUSKESMAS MAPITARA	58.800.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**58.800.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	58.800.000,00
	PUSKESMAS NANGA	76.380.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**76.380.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	76.380.000,00
	PUSKESMAS NELLE	20.000.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**20.000.000,00**

JENIS DAN LAYANAN SPM	PERANGKAT DAERAH / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	20.000.000,00
	PUSKESMAS NITA	139.500.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**139.500.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	139.500.000,00
	PUSKESMAS PAGA	38.640.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**38.640.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	38.640.000,00
	PUSKESMAS PALUE	60.680.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**60.680.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	60.680.000,00
	PUSKESMAS TANARAWA	69.540.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**69.540.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	69.540.000,00
	PUSKESMAS TELUK	20.000.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**20.000.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	20.000.000,00
	PUSKESMAS TUANGGEO	70.560.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**70.560.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	70.560.000,00
	PUSKESMAS WAIGETE	24.640.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**24.640.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	24.640.000,00
	PUSKESMAS WAIPARE	19.520.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**19.520.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	19.520.000,00
	PUSKESMAS WATUBAING	60.180.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**60.180.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	60.180.000,00
	PUSKESMAS WOLOFEO	63.000.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**63.000.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	63.000.000,00
	PUSKESMAS WOLOMARANG	36.680.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**36.680.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	36.680.000,00
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		**468.972.400,00**
	DINAS KESEHATAN	6.610.400,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**6.610.400,00**

JENIS DAN LAYANAN SPM	PERANGKAT DAERAH / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.610.400,00
	PUSKESMAS BERU	12.600.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**12.600.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.600.000,00
	PUSKESMAS BOGANATAR	13.440.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**13.440.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	13.440.000,00
	PUSKESMAS BOLA	12.600.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**12.600.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.600.000,00
	PUSKESMAS FEONDARI	2.800.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**2.800.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.800.000,00
	PUSKESMAS HABIBOLA	12.600.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**12.600.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.600.000,00
	PUSKESMAS HEWOKLOANG	40.800.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**40.800.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	40.800.000,00
	PUSKESMAS KEWAPANTE	22.680.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**22.680.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	22.680.000,00
	PUSKESMAS KOPETA	8.400.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**8.400.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.400.000,00
	PUSKESMAS KOTING	26.040.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**26.040.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	26.040.000,00
	PUSKESMAS LEKEBAI	11.100.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**11.100.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	11.100.000,00
	PUSKESMAS MAGEPANDA	19.600.000,00

JENIS DAN LAYANAN SPM	PERANGKAT DAERAH / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**19.600.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	19.600.000,00
	PUSKESMAS MAPITARA	4.640.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**4.640.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.640.000,00
	PUSKESMAS NANGA	3.780.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**3.780.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.780.000,00
	PUSKESMAS NELLE	21.000.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**21.000.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	21.000.000,00
	PUSKESMAS NITA	21.400.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**21.400.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	21.400.000,00
	PUSKESMAS PAGA	17.920.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**17.920.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	17.920.000,00
	PUSKESMAS PALUE	20.202.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**20.202.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	20.202.000,00
	PUSKESMAS TANARAWA	39.580.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**39.580.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	39.580.000,00
	PUSKESMAS TELUK	58.320.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**58.320.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	58.320.000,00
	PUSKESMAS TUANGGEO	14.560.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**14.560.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	14.560.000,00
	PUSKESMAS WAIGETE	25.920.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**25.920.000,00**

JENIS DAN LAYANAN SPM	PERANGKAT DAERAH / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	25.920.000,00
	PUSKESMAS WAIPARE	6.160.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**6.160.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.160.000,00
	PUSKESMAS WATUBAING	26.700.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**26.700.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	26.700.000,00
	PUSKESMAS WOLOFEO	12.240.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**12.240.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.240.000,00
	PUSKESMAS WOLOMARANG	7.280.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**7.280.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.280.000,00
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)		**3.400.000,00**
	DINAS KESEHATAN	3.400.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**3.400.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.400.000,00
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis		**1.610.546.000,00**
	DINAS KESEHATAN	1.210.495.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**1.210.495.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.210.495.000,00
	PUSKESMAS BERU	19.390.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**19.390.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19.390.000,00
	PUSKESMAS BOGANATAR	15.140.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**15.140.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.140.000,00
	PUSKESMAS BOLA	15.680.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**15.680.000,00**

JENIS DAN LAYANAN SPM	PERANGKAT DAERAH / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.680.000,00
	PUSKESMAS FEONDARI	16.500.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**16.500.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.500.000,00
	PUSKESMAS HABIBOLA	14.000.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**14.000.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.000.000,00
	PUSKESMAS HEWOKLOANG	10.543.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**10.543.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.543.000,00
	PUSKESMAS KEWAPANTE	12.950.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**12.950.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.950.000,00
	PUSKESMAS KOPETA	14.000.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**14.000.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.000.000,00
	PUSKESMAS KOTING	11.060.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**11.060.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.060.000,00
	PUSKESMAS LEKEBAI	9.810.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**9.810.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.810.000,00
	PUSKESMAS MAGEPANDA	14.280.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**14.280.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.280.000,00
	PUSKESMAS MAPITARA	9.860.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**9.860.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.860.000,00
	PUSKESMAS NANGA	12.320.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**12.320.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.320.000,00
	PUSKESMAS NELLE	16.480.000,00

JENIS DAN LAYANAN SPM	PERANGKAT DAERAH / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**16.480.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.480.000,00
	PUSKESMAS NITA	18.600.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**18.600.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	18.600.000,00
	PUSKESMAS PAGA	18.760.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**18.760.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	18.760.000,00
	PUSKESMAS PALUE	9.880.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**9.880.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.880.000,00
	PUSKESMAS TANARAWA	13.760.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**13.760.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.760.000,00
	PUSKESMAS TELUK	19.740.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**19.740.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19.740.000,00
	PUSKESMAS TUANGGEO	21.074.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**21.074.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	21.074.000,00
	PUSKESMAS WAIGETE	45.554.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**45.554.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	45.554.000,00
	PUSKESMAS WAIPARE	14.490.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**14.490.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.490.000,00
	PUSKESMAS WATUBAING	5.620.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**5.620.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.620.000,00
	PUSKESMAS WOLOFEO	24.320.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**24.320.000,00**

JENIS DAN LAYANAN SPM	PERANGKAT DAERAH / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	24.320.000,00
	PUSKESMAS WOLOMARANG	16.240.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**16.240.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.240.000,00
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		**639.175.000,00**
	PUSKESMAS BERU	101.920.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**101.920.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	101.920.000,00
	PUSKESMAS BOGANATAR	33.040.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**33.040.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	33.040.000,00
	PUSKESMAS BOLA	14.700.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**14.700.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.700.000,00
	PUSKESMAS FEONDARI	14.000.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**14.000.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.000.000,00
	PUSKESMAS HABIBOLA	46.320.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**46.320.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	46.320.000,00
	PUSKESMAS HEWOKLOANG	13.300.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**13.300.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.300.000,00
	PUSKESMAS KEWAPANTE	35.925.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**35.925.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	35.925.000,00
	PUSKESMAS KOPETA	40.320.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**40.320.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	40.320.000,00
	PUSKESMAS KOTING	7.280.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**7.280.000,00**

JENIS DAN LAYANAN SPM	PERANGKAT DAERAH / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	7.280.000,00
	PUSKESMAS LEKEBAI	16.660.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**16.660.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	16.660.000,00
	PUSKESMAS MAGEPANDA	33.040.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**33.040.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	33.040.000,00
	PUSKESMAS MAPITARA	13.160.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**13.160.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.160.000,00
	PUSKESMAS NANGA	23.940.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**23.940.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	23.940.000,00
	PUSKESMAS NELLE	34.160.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**34.160.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	34.160.000,00
	PUSKESMAS NITA	2.520.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**2.520.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.520.000,00
	PUSKESMAS PAGA	16.030.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**16.030.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	16.030.000,00
	PUSKESMAS PALUE	19.040.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**19.040.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.040.000,00
	PUSKESMAS TANARAWA	21.380.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**21.380.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21.380.000,00
	PUSKESMAS TELUK	7.280.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**7.280.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	7.280.000,00
	PUSKESMAS TUANGGEO	7.000.000,00

JENIS DAN LAYANAN SPM	PERANGKAT DAERAH / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**7.000.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	7.000.000,00
	PUSKESMAS WAIGETE	43.540.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**43.540.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	43.540.000,00
	PUSKESMAS WAIPARE	18.950.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**18.950.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.950.000,00
	PUSKESMAS WATUBAING	29.680.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**29.680.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	29.680.000,00
	PUSKESMAS WOLOFEO	5.180.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**5.180.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5.180.000,00
	PUSKESMAS WOLOMARANG	40.810.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**40.810.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	40.810.000,00
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		**14.312.600,00**
	DINAS KESEHATAN	14.312.600,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**14.312.600,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	14.312.600,00
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**1.249.543.100,00**
	DINAS KESEHATAN	1.249.543.100,00
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**1.249.543.100,00**
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.249.543.100,00
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		**300.662.400,00**
	DINAS KESEHATAN	300.662.400,00

JENIS DAN LAYANAN SPM	PERANGKAT DAERAH / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**300.662.400,00**
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	300.662.400,00
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		**6.564.545.760,00**
	DINAS KESEHATAN	3.578.984.100,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**3.578.984.100,00**
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	31.160.000,00
	Pembangunan Puskesmas	34.177.000,00
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	236.264.200,00
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.088.550.200,00
	Pengembangan Puskesmas	174.230.200,00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	14.602.500,00
	PUSKESMAS BERU	196.997.000,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**196.997.000,00**
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	19.580.000,00
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	132.450.300,00
	Pengembangan Puskesmas	44.966.700,00
	PUSKESMAS BOGANATAR	28.370.000,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**28.370.000,00**
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	13.836.100,00
	Pengembangan Puskesmas	14.533.900,00
	PUSKESMAS BOLA	130.302.600,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**130.302.600,00**
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	30.036.300,00
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	61.369.400,00
	Pengembangan Puskesmas	38.896.900,00
	PUSKESMAS FEONDARI	17.725.200,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**17.725.200,00**

JENIS DAN LAYANAN SPM	PERANGKAT DAERAH / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.440.600,00
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	12.423.600,00
	Pengembangan Puskesmas	2.861.000,00
	PUSKESMAS HABIBOLA	128.778.300,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**128.778.300,00**
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.015.000,00
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	71.504.200,00
	Pengembangan Puskesmas	51.259.100,00
	PUSKESMAS HEWOKLOANG	70.374.360,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**70.374.360,00**
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.321.000,00
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	35.814.950,00
	Pengembangan Puskesmas	32.238.410,00
	PUSKESMAS KEWAPANTE	210.587.600,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**210.587.600,00**
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	11.016.600,00
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	106.670.100,00
	Pengembangan Puskesmas	92.900.900,00
	PUSKESMAS KOPETA	170.233.100,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**170.233.100,00**
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	21.539.500,00
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	91.963.600,00
	Pengembangan Puskesmas	56.730.000,00
	PUSKESMAS KOTING	67.413.900,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**67.413.900,00**
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	11.042.900,00
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	34.011.200,00
	Pengembangan Puskesmas	22.359.800,00
	PUSKESMAS LEKEBAI	92.968.300,00

JENIS DAN LAYANAN SPM	PERANGKAT DAERAH / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**92.968.300,00**
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.353.500,00
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	56.662.600,00
	Pengembangan Puskesmas	28.952.200,00
	PUSKESMAS MAGEPANDA	136.298.300,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**136.298.300,00**
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	19.634.000,00
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	86.809.200,00
	Pengembangan Puskesmas	29.855.100,00
	PUSKESMAS MAPITARA	58.633.200,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**58.633.200,00**
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12.097.500,00
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	21.760.400,00
	Pengembangan Puskesmas	9.069.500,00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	15.705.800,00
	PUSKESMAS NANGA	116.752.600,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**116.752.600,00**
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.707.600,00
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	81.839.300,00
	Pengembangan Puskesmas	26.205.700,00
	PUSKESMAS NELLE	81.765.800,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**81.765.800,00**
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10.314.100,00
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	42.831.400,00
	Pengembangan Puskesmas	28.620.300,00
	PUSKESMAS NITA	253.919.900,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**253.919.900,00**
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	16.810.000,00
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	209.295.900,00

JENIS DAN LAYANAN SPM	PERANGKAT DAERAH / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	Pengembangan Puskesmas	27.814.000,00
	PUSKESMAS PAGA	168.329.200,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**168.329.200,00**
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.873.000,00
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	120.500.000,00
	Pengembangan Puskesmas	35.817.600,00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	9.138.600,00
	PUSKESMAS PALUE	70.276.200,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**70.276.200,00**
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	11.305.300,00
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	30.246.400,00
	Pengembangan Puskesmas	28.724.500,00
	PUSKESMAS TANARAWA	60.892.200,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**60.892.200,00**
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	15.720.400,00
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	31.802.400,00
	Pengembangan Puskesmas	13.369.400,00
	PUSKESMAS TELUK	123.221.200,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**123.221.200,00**
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.185.400,00
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	67.966.000,00
	Pengembangan Puskesmas	52.069.800,00
	PUSKESMAS TUANGGEO	43.991.200,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**43.991.200,00**
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	11.533.500,00
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	29.425.000,00
	Pengembangan Puskesmas	3.032.700,00
	PUSKESMAS WAIGETE	178.923.700,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**178.923.700,00**
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	24.246.200,00

JENIS DAN LAYANAN SPM	PERANGKAT DAERAH / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	131.991.100,00
	Pengembangan Puskesmas	22.686.400,00
	PUSKESMAS WAIPARE	234.652.500,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**234.652.500,00**
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	30.736.000,00
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	142.426.500,00
	Pengembangan Puskesmas	61.490.000,00
	PUSKESMAS WATUBAING	120.666.100,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**120.666.100,00**
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14.648.000,00
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	67.634.400,00
	Pengembangan Puskesmas	38.383.700,00
	PUSKESMAS WOLOFEO	58.715.700,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**58.715.700,00**
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.002.400,00
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	24.992.100,00
	Pengembangan Puskesmas	22.629.600,00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	8.091.600,00
	PUSKESMAS WOLOMARANG	164.773.500,00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**164.773.500,00**
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	59.084.500,00
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	81.658.500,00
	Pengembangan Puskesmas	24.030.500,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**10.598.075.400,00**
	DINAS KESEHATAN	13.440.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**13.440.000,00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	13.440.000,00
	PUSKESMAS BERU	429.307.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**429.307.000,00**
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	43.400.000,00

JENIS DAN LAYANAN SPM	PERANGKAT DAERAH / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	384.787.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	1.120.000,00
	PUSKESMAS BOGANATAR	382.150.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**382.150.000,00**
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	51.800.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	325.650.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	4.700.000,00
	PUSKESMAS BOLA	483.300.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**483.300.000,00**
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	13.720.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	463.000.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	6.580.000,00
	PUSKESMAS FEONDARI	392.639.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**392.639.000,00**
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	43.570.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	337.869.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	11.200.000,00
	PUSKESMAS HABIBOLA	381.670.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**381.670.000,00**
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	14.700.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	350.170.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	16.800.000,00
	PUSKESMAS HEWOKLOANG	375.309.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**375.309.000,00**
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	29.240.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	328.389.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	17.680.000,00
	PUSKESMAS KEWAPANTE	383.614.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**383.614.000,00**
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	21.146.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	357.148.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	5.320.000,00
	PUSKESMAS KOPETA	443.820.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**443.820.000,00**
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	45.500.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	392.160.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	6.160.000,00

JENIS DAN LAYANAN SPM	PERANGKAT DAERAH / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	PUSKESMAS KOTING	375.879.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**375.879.000,00**
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	36.750.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	323.449.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	15.680.000,00
	PUSKESMAS LEKEBAI	409.399.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**409.399.000,00**
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	59.190.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	346.249.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	3.960.000,00
	PUSKESMAS MAGEPANDA	462.377.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**462.377.000,00**
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	58.730.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	398.047.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	5.600.000,00
	PUSKESMAS MAPITARA	390.978.700,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**390.978.700,00**
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	33.690.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	353.388.700,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	3.900.000,00
	PUSKESMAS NANGA	420.897.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**420.897.000,00**
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	30.870.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	384.707.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	5.320.000,00
	PUSKESMAS NELLE	367.228.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**367.228.000,00**
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	40.600.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	319.068.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	7.560.000,00
	PUSKESMAS NITA	515.293.800,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**515.293.800,00**
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	64.080.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	448.813.800,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	2.400.000,00
	PUSKESMAS PAGA	486.396.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**486.396.000,00**

JENIS DAN LAYANAN SPM	PERANGKAT DAERAH / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	34.300.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	449.296.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	2.800.000,00
	PUSKESMAS PALUE	388.380.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**388.380.000,00**
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	34.260.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	344.160.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	9.960.000,00
	PUSKESMAS TANARAWA	438.366.900,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**438.366.900,00**
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	64.540.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	369.633.400,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	4.193.500,00
	PUSKESMAS TELUK	463.289.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**463.289.000,00**
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	55.460.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	349.749.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	58.080.000,00
	PUSKESMAS TUANGGEO	384.822.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**384.822.000,00**
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	22.480.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	355.542.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	6.800.000,00
	PUSKESMAS WAIGETE	469.527.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**469.527.000,00**
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	49.440.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	412.647.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	7.440.000,00
	PUSKESMAS WAIPARE	421.569.500,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**421.569.500,00**
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	25.620.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	393.429.500,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	2.520.000,00
	PUSKESMAS WATUBAING	469.534.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**469.534.000,00**
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	72.040.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	386.414.000,00

JENIS DAN LAYANAN SPM	PERANGKAT DAERAH / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	11.080.000,00
	PUSKESMAS WOLOFEO	443.518.500,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**443.518.500,00**
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	54.880.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	381.758.500,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	6.880.000,00
	PUSKESMAS WOLOMARANG	405.371.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**405.371.000,00**
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	47.460.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	355.391.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	2.520.000,00
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia		**452.680.000,00**
	DINAS KESEHATAN	452.680.000,00
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**452.680.000,00**
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	452.680.000,00
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		**1.651.648.100,00**
	DINAS KESEHATAN	1.651.648.100,00
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**1.651.648.100,00**
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.651.648.100,00
SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum		**353.154.200,00**
Pelayanan informasi rawan bencana		**50.000.000,00**
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	50.000.000,00
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**50.000.000,00**
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	50.000.000,00
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		**199.999.200,00**
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	199.999.200,00
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**199.999.200,00**
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	49.999.700,00
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	149.999.500,00

JENIS DAN LAYANAN SPM	PERANGKAT DAERAH / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		**103.155.000,00**
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	103.155.000,00
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**103.155.000,00**
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	103.155.000,00
SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		**800.000.000,00**
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		**200.000.000,00**
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	200.000.000,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**200.000.000,00**
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	200.000.000,00
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		**600.000.000,00**
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	600.000.000,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**600.000.000,00**
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	600.000.000,00
SPM Bidang Pendidikan		**15.774.790.573,00**
Angka Partisipasi Sekolah		**7.922.877.020,00**
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.922.877.020,00
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**297.468.600,00**
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	45.468.600,00
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	252.000.000,00
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**452.388.200,00**
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	44.435.000,00
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	108.000.000,00
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	147.068.500,00
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	152.884.700,00
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**4.186.661.520,00**
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	121.360.800,00
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	746.282.000,00
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	550.534.000,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.920.493.600,00

JENIS DAN LAYANAN SPM	PERANGKAT DAERAH / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	847.991.120,00
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**2.986.358.700,00**
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	69.576.700,00
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	933.888.000,00
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.512.000.000,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	470.894.000,00
Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas		**75.000.000,00**
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	75.000.000,00
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**50.000.000,00**
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	50.000.000,00
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**25.000.000,00**
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	25.000.000,00
Kekhususan PAUD		**396.768.865,00**
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	396.768.865,00
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**396.768.865,00**
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0,00
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	73.823.000,00
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	55.563.400,00
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	94.750.465,00
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	140.000.000,00
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	32.632.000,00
Literasi dan Numerasi		**7.380.144.688,00**
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.380.144.688,00
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**150.000.000,00**
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	75.000.000,00
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	75.000.000,00
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**4.636.661.092,00**
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	112.499.700,00
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	75.000.000,00
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	9.688.800,00
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	112.500.100,00
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	268.374.400,00
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	125.000.100,00

JENIS DAN LAYANAN SPM	PERANGKAT DAERAH / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3.763.598.192,00
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	119.999.800,00
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	50.000.000,00
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**2.593.483.596,00**
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	84.000.000,00
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	30.000.000,00
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	0,00
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	0,00
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	7.975.000,00
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	84.000.000,00
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	120.440.500,00
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	81.669.000,00
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.065.399.096,00
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	120.000.000,00
SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		**845.195.000,00**
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota		**845.195.000,00**
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	845.195.000,00
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**826.964.100,00**
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	328.555.200,00
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	498.408.900,00
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**18.230.900,00**
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	10.052.500,00
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	8.178.400,00
SPM Bidang Sosial		**298.741.900,00**
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		**298.741.900,00**
	DINAS SOSIAL	298.741.900,00
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**298.741.900,00**
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	94.798.500,00

JENIS DAN LAYANAN SPM	PERANGKAT DAERAH / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	16.833.800,00
	Pemberian Layanan Kedaruratan	35.551.400,00
	Pemberian Layanan Rujukan	17.765.000,00
	Penyediaan Alat Bantu	35.855.100,00
	Penyediaan Permakanan	97.938.100,00
Jumlah		**44.963.313.133,00**

5.1.2. Rencana Kerja Prioritas Kedua

5.1.2.1. Rencana Kerja Prioritas Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Prioritas Pembangunan Daerah merupakan prioritas program yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang berhubungan dengan permasalahan pelayanan tugas fungsi sesuai urusan, bidang urusannya, atau sebagai unsur pendukung atau unsur penunjang pelaksanaan pemerintahan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah dimaksud merupakan gabungan program berasal dari Rencana Kerja, Usulan Pokok-Pokok Pikiran dan Hasil Musrenbang Tahun 2026. Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.3.
Rekapitulasi Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2027

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
1	SMP NEGERI 1 TALIBURA	6.810.000,00
2	SMP NEGERI 2 TALIBURA	6.810.000,00
3	SMP NEGERI 1 KEWAPANTE	6.810.000,00
4	SMP NEGERI 1 PAGA	6.810.000,00
5	SMP NEGERI 2 PAGA	6.810.000,00
6	SMP NEGERI 1 MEGO	6.810.000,00
7	SMP NEGERI 1 LELA	6.810.000,00
8	SMP NEGERI 1 BOLA	6.810.000,00
9	SMP NEGERI 2 BOLA	6.810.000,00
10	SMP NEGERI 2 MEGO	6.810.000,00
11	SMP NEGERI 3 PAGA	6.810.000,00
12	SMP NEGERI 1 WAIGETE	4.310.000,00
13	SMP NEGERI 1 PALUE	6.810.000,00
14	SMP NEGERI KEWAPANTE	6.810.000,00
15	SMP NEGERI ALOK TIMUR	6.810.000,00
16	SMP NEGERI 2 WAIGETE	6.810.000,00
17	SMP NEGERI RERoroja	6.810.000,00
18	SMP NEGERI MAPITARA	6.810.000,00
19	SMP NEGERI NUBA ARAT	6.810.000,00
20	SMP NEGERI PRUDA	6.810.000,00
21	SMP NEGERI ALOK	6.810.000,00
22	SMP NEGERI PIGANG	6.810.000,00
23	SMP NEGERI HEBAR	6.810.000,00
24	SMP NEGERI HAMAR	6.810.000,00
25	SMP NEGERI WERANG	6.810.000,00
26	SMP NEGERI 43 WOLOMOTONG	6.810.000,00
27	SMP NEGERI 44 ST. PETRUS KLOANGPOPOT	6.810.000,00
28	SMP NEGERI 3 WAIGETE	6.810.000,00
29	SMP NEGERI TANAH MERAH	6.810.000,00
30	SMP NEGERI HENGA	6.810.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
31	SMP NEGERI PEMANA	6.810.000,00
32	SMP NEGERI SATAP PAGA	6.810.000,00
33	SMP NEGERI SATAP BLORO	6.810.000,00
34	SMP NEGERI SATAP WARA	6.810.000,00
35	SMP NEGERI SATAP SUKUN	6.810.000,00
36	SMP NEGERI SATAP MORO	6.810.000,00
37	SMP NEGERI 46 NANGAHALE	6.810.000,00
38	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	409.269.378.833,47
39	SMP NEGERI 1 MAUMERE	6.810.000,00
40	SMP NEGERI 2 MAUMERE	6.810.000,00
41	SMP NEGERI 3 MAUMERE	6.810.000,00
42	SMP NEGERI 4 MAUMERE	29.310.000,00
43	SMP NEGERI 1 NITA	6.810.000,00
44	SMP NEGERI 2 NITA	6.810.000,00
45	SMP NEGERI KOLISIA	6.810.000,00
46	SMP NEGERI 45 WATU PAJUNG	6.810.000,00
47	SMP NEGERI SATAP WOLOMAPA	6.810.000,00
48	SMP NEGERI 47 OJANG	6.810.000,00
49	SMP NEGERI 48 SA ATE GAIKIU	21.031.300,00
50	PUSKESMAS BOGANATAR	1.001.007.300,00
51	PUSKESMAS WATUBAING	1.362.423.784,00
52	PUSKESMAS WAIGETE	1.494.792.436,00
53	PUSKESMAS TANARAWA	1.191.408.466,00
54	PUSKESMAS HEWOKLOANG	1.015.291.400,00
55	PUSKESMAS BERU	1.425.351.135,00
56	PUSKESMAS KOPETA	1.321.474.594,98
57	PUSKESMAS WOLOMARANG	1.211.275.404,00
58	PUSKESMAS MAGEPANDA	1.233.027.466,00
59	PUSKESMAS NELLE	1.096.552.590,00
60	PUSKESMAS KOTING	948.651.500,00
61	PUSKESMAS NITA	1.678.740.312,00
62	PUSKESMAS NANGA	1.199.588.340,00
63	PUSKESMAS PAGA	1.337.171.965,00
64	PUSKESMAS LEKEBAI	1.038.655.900,00
65	PUSKESMAS WOLOFEO	1.098.166.852,00
66	PUSKESMAS FEONDARI	882.660.648,20
67	PUSKESMAS BOLA	1.233.743.800,00
68	PUSKESMAS HABIBOLA	1.125.213.256,00
69	PUSKESMAS MAPITARA	1.043.974.140,00
70	PUSKESMAS TELUK	1.208.757.292,00
71	PUSKESMAS PALUE	1.046.766.200,00
72	PUSKESMAS TUANGGEO	1.014.536.900,00
73	PUSKESMAS WAIPARE	1.322.344.450,00
74	PUSKESMAS KEWAPANTE	1.177.851.800,00
75	DINAS KESEHATAN	138.782.941.341,10
76	PUSKESMAS KOJAGETE	250.000.000,00
77	PUSKESMAS WUALADU	252.463.700,00
78	RSUD dr. T. C. HILLERS MAUMERE	123.941.873.960,00
79	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16.369.402.321,00
80	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	10.942.891.858,00

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
81	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	7.086.463.934,00
82	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.236.930.104,00
83	DINAS SOSIAL	4.602.893.184,00
84	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.023.534.911,00
85	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.779.674.664,00
86	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.400.204.768,00
87	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9.828.134.660,00
88	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.463.422.986,00
89	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.163.461.752,00
90	DINAS PERHUBUNGAN	6.699.648.681,00
91	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.518.145.670,00
92	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	8.992.122.366,00
93	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.304.930.807,00
94	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	3.414.003.514,00
95	DINAS PERIKANAN	6.951.496.156,00
96	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	4.409.946.296,00
97	DINAS PERTANIAN	17.390.040.074,00
98	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	786.759.250,00
99	BAGIAN PEMERINTAHAN	343.876.000,00
100	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	275.765.481,00
101	BAGIAN PEREKONOMIAN	271.078.600,00
102	BAGIAN HUKUM	325.174.000,00
103	BAGIAN ORGANISASI	348.233.700,00
104	BAGIAN UMUM	5.380.354.280,20
105	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	166.609.400,00
106	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	616.275.500,00
107	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.311.031.552,40
108	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	17.485.424.566,00
109	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	27.153.887.894,00
110	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	8.108.223.341,00
111	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	42.627.135.122,00
112	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	144.035.403.908,00
113	BADAN PENDAPATAN DAERAH	9.676.892.690,00
114	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	4.400.376.844,00
115	INSPEKTORAT DAERAH	5.662.735.932,82
116	KELURAHAN MADAWAT	406.203.400,00
117	KELURAHAN KABOR	406.969.935,00
118	KELURAHAN NANGALIMANG	397.425.306,00
119	KELURAHAN KOTA UNENG	417.806.896,00
120	KELURAHAN WURING	405.279.433,00
121	KELURAHAN BERU	388.142.480,00
122	KELURAHAN KOTA BARU	403.494.160,00
123	KECAMATAN ALOK	4.156.853.232,00
124	KECAMATAN ALOK BARAT	3.827.139.693,00
125	KELURAHAN HEWULI	345.598.800,00
126	KELURAHAN WAILITI	360.275.786,00

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
127	KELURAHAN WOLOMARANG	429.855.076,00
128	KECAMATAN ALOK TIMUR	4.237.903.034,00
129	KELURAHAN WAIOTI	390.908.320,00
130	KELURAHAN NANGAMETING	359.626.171,00
131	KELURAHAN WAIROTANG	382.565.400,00
132	KECAMATAN BOLA	1.458.763.428,00
133	KECAMATAN DORENG	1.368.514.916,00
134	KECAMATAN HEWOKLOANG	1.330.031.980,80
135	KECAMATAN KANGAE	1.576.221.786,00
136	KECAMATAN KEWAPANTE	1.697.626.528,00
137	KECAMATAN KOTING	1.273.016.578,00
138	KECAMATAN LELA	1.494.202.830,00
139	KECAMATAN MAGEPANDA	1.341.995.714,00
140	KECAMATAN MAPITARA	1.213.380.584,00
141	KECAMATAN NELLE	1.214.411.466,00
142	KECAMATAN NITA	1.747.183.455,00
143	KECAMATAN PAGA	1.198.439.750,00
144	KECAMATAN PALUE	1.683.822.266,00
145	KECAMATAN TALIBURA	1.607.718.375,00
146	KECAMATAN TANA WAWO	1.132.924.585,00
147	KECAMATAN WAIBLAMA	1.480.422.996,00
148	KECAMATAN WAIGETE	1.367.674.828,00
149	KECAMATAN MEGO	1.484.351.902,00
150	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.110.241.493,00
	TOTAL	1.152.216.766.415,97

TABEL 5.4.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SIKKA TAHUN 2027

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	SMP NEGERI 1 TALIBURA			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI 2 TALIBURA			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI 1 KEWAPANTE			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI 1 PAGA			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI 2 PAGA			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI 1 MEGO			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI 1 LELA			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI 1 BOLA			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI 2 BOLA			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI 2 MEGO			**6.810.000,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI 3 PAGA			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI 1 WAIGETE			**4.310.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**4.310.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**4.310.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.310.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	0,00
	SMP NEGERI 1 PALUE			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI KEWAPANTE			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI ALOK TIMUR			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI 2 WAIGETE			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	SMP NEGERI RERONOJA			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI MAPITARA			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI NUBA ARAT			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI PRUDA			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI ALOK			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI PIGANG			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI HEBAR			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI HAMAR			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI WERANG			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI 43 WOLOMOTONG			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI 44 ST. PETRUS KLOANGPOPOT			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI 3 WAIGETE			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI TANAH MERAH			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI HENGA			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI PEMANA			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI SATAP PAGA			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI SATAP BLORO			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI SATAP WARA			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI SATAP SUKUN			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI SATAP MORO			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI 46 NANGAHALE			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			**409.269.378.833,47**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**395.197.388.633,47**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**395.197.388.633,47**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	319.745.843.156,47
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			62.489.900,00
	Jumlah Dokumen Perencanaan, dan Pelaporan Kinerja			62.489.900,00
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	0,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	35.000.000,00
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	2.500.000,00
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	2.499.900,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	12.322.000,00
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	10.168.000,00
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			35.000.000,00
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	35.000.000,00
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2.499.900,00
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.499.900,00
1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2.500.000,00
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			0,00
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12.322.000,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	12.322.000,00
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.168.000,00
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	10.168.000,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			319.024.183.615,47
	Persentase Realisasi Anggaran dan pelaporann keuang tepat waktu			319.024.183.615,47

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	119.952.000,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	318.904.231.615,47
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			318.904.231.615,47
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32808 Orang/bulan	318.904.231.615,47
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			119.952.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	119.952.000,00
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			49.190.000,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Kepegawaian sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			49.190.000,00
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	36.690.000,00
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	0,00
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	12.500.000,00
1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			36.690.000,00
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	36.690.000,00
1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			12.500.000,00
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	420 Orang	12.500.000,00
1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			0,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	0,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	14.996.000,00
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	0,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	24.007.100,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	33.564.000,00
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			24.007.100,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	24.007.100,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			52.353.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	52.353.000,00
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			33.564.000,00
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	33.564.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			14.996.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	14.996.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			32.000.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	32.000.000,00
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			0,00
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0,00
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			0,00
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			52.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	52.500.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			103.770.776,00
	Terpenuhinya Jasa Penunjang SKPD sesuai kebutuhan dan Tepat Waktu			103.770.776,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	32.632.400,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	71.138.376,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	0,00
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0,00
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			32.632.400,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	32.632.400,00
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			71.138.376,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	71.138.376,00
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			296.788.765,00
	Persenterasi Barang Milik Daerah terpelihara dalam 1 Tahun			296.788.765,00
		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	0,00
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	200.000.000,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	65.788.765,00
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	0,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	6.000.000,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	25.000.000,00
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			65.788.765,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	65.788.765,00
1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0,00
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			6.000.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	6.000.000,00
1.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			0,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0,00
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			200.000.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000,00
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			25.000.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	25.000.000,00
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**75.198.031.277,00**
		2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APMus)	96.20 %	75.064.031.277,00
		3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APMus)	90.91 %	75.064.031.277,00
		4.Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	10.27 %	75.064.031.277,00
		999.Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99.66 %	75.064.031.277,00
		999.Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	98.85 %	75.064.031.277,00
		999.Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/Mts	98.30 %	75.064.031.277,00
		999.Angka Partisipasi Kasar (APK SD/MI)	101.40 %	75.064.031.277,00
		999.Angka Partisipasi Kasar (APK SMP/MTs)	91.18 %	75.064.031.277,00
		999.Angka Partisipasi Murni (APM SD/MI)	88.43 %	75.064.031.277,00
		999.Angka Partisipasi Murni (APM SMP/Mts)	77.06 %	75.064.031.277,00
		999.Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	1.00 %	75.064.031.277,00
		999.Angka Putus Sekolah Dasar (APS) SD	0.45 %	75.064.031.277,00
		999.Iklim Inklusivitas SD	63.08 Nilai	75.064.031.277,00
		999.Iklim Inklusivitas SMP	57.00 Nilai	75.064.031.277,00
		999.Iklim Keamanan SD	73.03 Nilai	75.064.031.277,00
		999.Iklim Keamanan SMP	68.39 Nilai	75.064.031.277,00
		999.Iklim Kebhinekaan SD	73.24 Angka	75.064.031.277,00
		999.Iklim Kebhinekaan SMP	76.14 Nilai	75.064.031.277,00
		999.Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	92.35 Persentase	75.064.031.277,00
		999.Persentase Angka Melek Aksara penduduk umur >15 tahun	99.03 %	75.064.031.277,00
		999.Persentase Kelulusan SD/MI	100 %	75.064.031.277,00
		999.Persentase Kelulusan SMP/MTs	100 %	75.064.031.277,00
		999.Persentase Satuan PAUD yang menyelenggarakan PAUD HI	45.00 %	75.064.031.277,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		999.Persentase SD Terakreditasi	98.13 %	75.064.031.277,00
		999.Persentase SMP/MTs terakreditasi	93.36 %	75.064.031.277,00
		999.Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	71.65 %	75.064.031.277,00
		999.Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi minimal B	68.83 %	75.064.031.277,00
		999.Proporsi PTK Bersertifikat	40.45 %	75.064.031.277,00
		999.Proporsi PTK PAUD Bersertifikat	32.43 %	75.064.031.277,00
		999.Proporsi PTK SMP Bersertifikat Pendidik	33.30 %	75.064.031.277,00
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			43.949.185.712,00
	Persentase Capaian Layanan Dasar pada Jenjang SD			43.949.185.712,00
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-	0,00
		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	121.360.800,00
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	50.000.000,00
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	50.000.000,00
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-	75.000.000,00
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	125.000.100,00
		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	-	998.038.300,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	112.500.100,00
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-	268.374.400,00
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-	3.763.598.192,00
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-	0,00
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-	0,00
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	0,00
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	112.499.700,00
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	0,00
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	245.408.000,00
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	0,00
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-	746.282.000,00
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	1.920.493.600,00
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	0,00
		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	-	0,00
		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	-	0,00
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-	550.534.000,00
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	847.991.120,00
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-	119.999.800,00
		Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	-	0,00
		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	33.813.276.800,00
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	9.688.800,00
		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	19.140.000,00
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			245.408.000,00
	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	245.408.000,00
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			0,00
	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0,00
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			0,00
	Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0,00
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			550.534.000,00
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	7 Unit	550.534.000,00
1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			0,00
	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	0,00
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			0,00
	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0,00
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			0,00
	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0,00
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			0,00
	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0,00
1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			0,00
	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0,00
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah			998.038.300,00
	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	33 Paket	998.038.300,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			0,00
	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0 Paket	0,00
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			9.688.800,00
	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	48 Peserta Didik	9.688.800,00
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			3.763.598.192,00
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	417 Orang	3.763.598.192,00
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			268.374.400,00
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	268.374.400,00
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			0,00
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	0 Satuan Pendidikan	0,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			33.813.276.800,00
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	338 Satuan Pendidikan	33.813.276.800,00
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			19.140.000,00
	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	338 Orang	19.140.000,00
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			112.500.100,00
	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	150 Orang	112.500.100,00
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			125.000.100,00
	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	3 Konten Digital	125.000.100,00
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			0,00
	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0 Orang	0,00
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			121.360.800,00
	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	121.360.800,00
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			50.000.000,00
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	50.000.000,00
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			75.000.000,00
	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	150 Komunitas	75.000.000,00
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			50.000.000,00
	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	50.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			0,00
	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0 Buku	0,00
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru			746.282.000,00
	Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	746.282.000,00
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			847.991.120,00
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17 Unit	847.991.120,00
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			112.499.700,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	180 Orang	112.499.700,00
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			119.999.800,00
	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	338 Satuan Pendidikan	119.999.800,00
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			1.920.493.600,00
	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	103 Ruang	1.920.493.600,00
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			0,00
	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket	0,00
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			24.754.798.900,00
	Persentase Capaian Layanan Dasar pada Jenjang SMP			24.754.798.900,00
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-	0,00
		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	69.576.700,00
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	25.000.000,00
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	0,00
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-	30.000.000,00
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	81.669.000,00
		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	0,00
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	-	0,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	84.000.000,00
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-	120.440.500,00
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	2.065.399.096,00
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-	0,00
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	0,00
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	84.000.000,00
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-	120.000.000,00
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	0,00
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	0,00
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	0,00
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-	933.888.000,00
		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	470.894.000,00
		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-	0,00
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	0,00
		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	-	0,00
		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	0,00
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-	0,00
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	0,00
		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	-	1.512.000.000,00
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	-	0,00
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	19.143.956.604,00
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	7.975.000,00
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	6.000.000,00
1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			1.512.000.000,00
	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1.512.000.000,00
1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			0,00
	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang	0,00
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			0,00
	Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0,00
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium			0,00
	Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0 Ruang	0,00
1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			0,00
	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	0,00
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	0,00
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			470.894.000,00
	Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	470.894.000,00
1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			0,00
	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0,00
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			0,00
	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0,00
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium			0,00
	Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0,00
1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			0,00
	Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0,00
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			0,00
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0,00
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah			0,00
	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0 Paket	0,00
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			0,00
	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0 Paket	0,00
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			7.975.000,00
	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	28 Peserta Didik	7.975.000,00
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			2.065.399.096,00
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	237 Orang	2.065.399.096,00
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			120.440.500,00
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	120.440.500,00
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			0,00
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	0 Satuan Pendidikan	0,00
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			19.143.956.604,00
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	93 Satuan Pendidikan	19.143.956.604,00
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			6.000.000,00
	Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	90 Orang	6.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			84.000.000,00
	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	90 Orang	84.000.000,00
1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			81.669.000,00
	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	3 Konten Digital	81.669.000,00
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			0,00
	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0 Orang	0,00
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			69.576.700,00
	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	69.576.700,00
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			0,00
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 Dokumen	0,00
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			30.000.000,00
	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	8 Komunitas	30.000.000,00
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			25.000.000,00
	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	25.000.000,00
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			120.000.000,00
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	16750 Satuan Pendidikan	120.000.000,00
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru			933.888.000,00
	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	933.888.000,00
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			84.000.000,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	90 Orang	84.000.000,00
1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			0,00
	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0 Buku	0,00
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			0,00
	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0,00
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			0,00
	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket	0,00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			5.191.658.465,00
	Persentase Capaian Layanan Dasar pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini			5.191.658.465,00
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	-	94.750.465,00
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	45.468.600,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	0,00
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	32.632.000,00
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-	0,00
		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	-	0,00
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-	55.563.400,00
		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	-	4.422.148.000,00
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-	140.000.000,00
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	-	252.000.000,00
		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	-	0,00
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-	0,00
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	0,00
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	-	34.773.000,00
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	73.823.000,00
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	-	0,00
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	0,00
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	-	40.500.000,00
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			0,00
	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	0 Unit	0,00
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD			0,00
	Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	0 Paket	0,00
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD			0,00
	Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	0 Paket	0,00
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			252.000.000,00
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	40 Orang	252.000.000,00
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			140.000.000,00
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	90 Orang	140.000.000,00
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			55.563.400,00
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	270 Satuan Pendidikan	55.563.400,00
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD			4.422.148.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	313 Satuan Pendidikan	4.422.148.000,00
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD			40.500.000,00
	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	270 Orang	40.500.000,00
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			73.823.000,00
	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	310 Orang	73.823.000,00
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			45.468.600,00
	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	45.468.600,00
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			32.632.000,00
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	32.632.000,00
1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			0,00
	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	0,00
1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			0,00
	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	0,00
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			0,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 Orang	0,00
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			0,00
	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket	0,00
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			0,00
	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0,00
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD			94.750.465,00
	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket	94.750.465,00
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			34.773.000,00
	Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	270 Satuan Pendidikan	34.773.000,00
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.302.388.200,00
	Persentase Capaian Layanan Dasar pada Jenjang Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			1.302.388.200,00
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	44.435.000,00
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	152.884.700,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	108.000.000,00
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	-	0,00
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	0,00
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-	147.068.500,00
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-	0,00
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	-	850.000.000,00
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			108.000.000,00
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	15 Orang	108.000.000,00
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan			0,00
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0,00
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			850.000.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	5 Satuan Pendidikan	850.000.000,00
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			44.435.000,00
	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	44.435.000,00
1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			152.884.700,00
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	6 Dokumen	152.884.700,00
1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			0,00
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0,00
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			147.068.500,00
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	10 Peserta Didik	147.068.500,00
1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal			0,00
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	0 unit	0,00
1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan			0,00
	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	0 Paket	0,00
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**			**68.324.400,00**
		1.Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum mulok bahasa dan sastra daerah	33.19 %	68.324.400,00
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			68.324.400,00
	Jumlah satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum Tenun Ikat, Bahasa dan Budaya Daerah			68.324.400,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	-	0,00
		Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	-	68.324.400,00
1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar			0,00
	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	0 Buku	0,00
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			68.324.400,00
	Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	40 Orang	68.324.400,00
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**			**150.000.000,00**
		999.Indeks Distribusi Guru Sekolah Dasar (SD)	0.91 Indeks	75.000.000,00
		999.Indeks Distribusi Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0.88 Indeks	75.000.000,00
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			150.000.000,00
	Meningkatnya Indeks Distribusi Guru			150.000.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	75.000.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	75.000.000,00
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			75.000.000,00
	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Dokumen	75.000.000,00
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			75.000.000,00
	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Laporan	75.000.000,00
1.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**			**35.189.800,00**
		999.Persentase satuan pendidikan yang memenuhi kelayakan operasional	100 %	35.189.800,00
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			24.989.800,00
	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan masyarakat memiliki kelayakan Ijin Operasional			24.989.800,00
		Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	8.944.300,00
		Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	16.045.500,00
1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			16.045.500,00
	Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	16.045.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			8.944.300,00
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	8.944.300,00
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			10.200.000,00
	Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang diselenggarakan Masyarakat memiliki kelayakan Ijin Operasional			10.200.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	5.000.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	5.200.000,00
1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			5.200.000,00
	Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	5.200.000,00
1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			5.000.000,00
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	5.000.000,00
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**14.071.990.200,00**
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			**14.071.990.200,00**
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**			**175.000.000,00**
		999.Rasio Wirausaha Pemuda	1.84 %	100.000.000,00
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			75.000.000,00
	Meningkatnya Jumlah Pemuda Pelopor			75.000.000,00
		Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	75.000.000,00
2.19.02.2.01.0020	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota			75.000.000,00
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan peningkatan kapasitas Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	65 Orang	75.000.000,00
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000,00
	Jumlah Pemuda memperoleh Peningkatan Kapasitas Pemuda			100.000.000,00
		Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-	25.000.000,00
2.19.02.2.02.0005	Penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota			25.000.000,00
	Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	25 Organisasi	25.000.000,00
2.19.02.2.02.0006	Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota			75.000.000,00
	Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	10 Organisasi	75.000.000,00
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			**13.821.990.200,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		1.Persentase Perolehan Prestasi di bidang Olahraga	79.16 %	13.821.990.200,00
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			12.150.000.000,00
	Jumlah dukungan sarana dan Prasarana Pembinaan Olahraga			12.150.000.000,00
		Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-	12.150.000.000,00
2.19.03.2.01.0009	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota			12.150.000.000,00
	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	0 Unit	12.150.000.000,00
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.629.990.200,00
	Meningkatnya Jumlah Atlit Berprestasi			1.629.990.200,00
		Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terselenggara, termasuk olahraga disabilitas	-	1.194.990.200,00
		Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-	435.000.000,00
2.19.03.2.02.0007	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga			435.000.000,00
	Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, temasuk olahraga disabilitas	Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	48 Orang	435.000.000,00
2.19.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota			1.194.990.200,00
	Terlaksananya Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terselenggara, termasuk olahraga disabilitas	13 Kegiatan	1.194.990.200,00
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			42.000.000,00
	Jumlah Olahrawan berprestasi			42.000.000,00
		Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-	42.000.000,00
2.19.03.2.03.0012	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga			42.000.000,00
	Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	30 Orang	42.000.000,00
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**			**75.000.000,00**
		1.Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100 %	75.000.000,00
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			75.000.000,00
	Meningkatnya Kualitas Kepaduan Tingkat Kabupaten			75.000.000,00
		Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	-	75.000.000,00
2.19.04.2.01.0010	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah			75.000.000,00
	Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	75.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	SMP NEGERI 1 MAUMERE			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI 2 MAUMERE			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI 3 MAUMERE			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI 4 MAUMERE			**29.310.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**29.310.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**29.310.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	29.310.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			25.000.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	25.000.000,00
	SMP NEGERI 1 NITA			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI 2 NITA			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI KOLISIA			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI 45 WATU PAJUNG			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI SATAP WOLOMAPA			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI 47 OJANG			**6.810.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.810.000,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.810.000,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.810.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.310.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.310.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.500.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.500.000,00
	SMP NEGERI 48 SA ATE GAIKIU			**21.031.300,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**21.031.300,00**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**21.031.300,00**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**320.106.944.456,47**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	21.031.300,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.521.400,00
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu			570.521.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	202.411.300,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	96.190.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.353.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.620.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.620.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12.411.300,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	12.411.300,00
	PUSKESMAS BOGANATAR			**1.001.007.300,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.001.007.300,00**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**1.001.007.300,00**
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**70.878.145.815,28**
		10.Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	957.107.300,00
		11.Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	957.107.300,00
		12.Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	957.107.300,00
		13.Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	957.107.300,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		14.Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	957.107.300,00
		15.Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	100 %	957.107.300,00
		16.Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	957.107.300,00
		17.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif	100 %	957.107.300,00
		18.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut	100 %	957.107.300,00
		19.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100 %	957.107.300,00
		1.Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	957.107.300,00
		20.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	100 %	957.107.300,00
		21.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100 %	957.107.300,00
		22.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tubercolosis	100 %	957.107.300,00
		23.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	100 %	957.107.300,00
		2.Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 Orang	957.107.300,00
		3.Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	957.107.300,00
		4.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	957.107.300,00
		5.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	957.107.300,00
		6.Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	957.107.300,00
		7.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	957.107.300,00
		8.Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	957.107.300,00
		999.Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	957.107.300,00
		999.Positifity rate Malaria	4.9 %	957.107.300,00
		9.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 (%)	957.107.300,00
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 %	957.107.300,00
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 %	957.107.300,00
		Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	957.107.300,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	28.370.000,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	928.737.300,00
		Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	957.107.300,00
		Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	957.107.300,00
		Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	957.107.300,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	928.737.300,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	28.370.000,00
		Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	957.107.300,00
		Positifity rate Malaria	4.9 %	957.107.300,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	957.107.300,00
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	957.107.300,00
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	957.107.300,00
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	957.107.300,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
	Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	591.507.500,00
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	4.876.434.850,00
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	983.727.910,00
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	-	32.936.000,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas			14.533.900,00
	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	14.533.900,00
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			0,00
	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	0,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			0,00
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	0,00
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			13.836.100,00
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	13.836.100,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	639.175.000,00
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	619.461.600,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1.047.466.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	9.324.355.900,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1.439.260.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	2.019.194.900,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	704.008.000,00
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	8.908.097.671,18

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	249.424.600,00
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1.283.718.500,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	2.167.418.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	311.498.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1.610.546.000,00
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	226.253.500,00
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	518.284.600,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	468.972.400,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			69.720.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	125 Orang	69.720.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			33.040.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	914 Orang	33.040.000,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			13.440.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	32 Orang	13.440.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			15.140.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	89 Orang	15.140.000,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			325.650.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	325.650.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.040.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	5.040.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			43.163.200,00
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8 Dokumen	43.163.200,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			264.999.600,00
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	20 Dokumen	264.999.600,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			11.400.000,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	561 Orang	11.400.000,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			429.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 Dokumen	429.000,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			51.800.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	10 Dokumen	51.800.000,00
1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa			4.700.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	65 Orang	4.700.000,00
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			90.215.500,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	13 Laporan	90.215.500,00
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	13 Laporan	0,00
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**2.019.789.500,00**
		1.Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	21 %	43.900.000,00
		Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	19 %	43.900.000,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
	Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1.185.266.000,00
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			34.150.000,00
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	34.150.000,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
	Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	834.523.500,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			9.750.000,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	9.750.000,00
	PUSKESMAS WATUBAING			**1.362.423.784,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.362.423.784,00**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**1.362.423.784,00**
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**70.878.145.815,28**
		10.Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.294.220.784,00
		11.Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	1.294.220.784,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		12.Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	1.294.220.784,00
		13.Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	1.294.220.784,00
		14.Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	1.294.220.784,00
		15.Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	100 %	1.294.220.784,00
		16.Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	1.294.220.784,00
		17.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif	100 %	1.294.220.784,00
		18.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut	100 %	1.294.220.784,00
		19.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100 %	1.294.220.784,00
		1.Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.294.220.784,00
		20.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	100 %	1.294.220.784,00
		21.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100 %	1.294.220.784,00
		22.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tubercolosis	100 %	1.294.220.784,00
		23.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	100 %	1.294.220.784,00
		2.Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 Orang	1.294.220.784,00
		3.Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.294.220.784,00
		4.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.294.220.784,00
		5.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.294.220.784,00
		6.Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.294.220.784,00
		7.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.294.220.784,00
		8.Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.294.220.784,00
		999.Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.294.220.784,00
		999.Positifity rate Malaria	4.9 %	1.294.220.784,00
		9.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 (%)	1.294.220.784,00
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 %	1.294.220.784,00
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 %	1.294.220.784,00
		Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.294.220.784,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	120.666.100,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	1.173.554.684,00
		Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.294.220.784,00
		Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.294.220.784,00
		Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.294.220.784,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	1.173.554.684,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	120.666.100,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.294.220.784,00
		Positifity rate Malaria	4.9 %	1.294.220.784,00
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.294.220.784,00
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.294.220.784,00
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.294.220.784,00
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.294.220.784,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
	Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	591.507.500,00
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	4.876.434.850,00
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	983.727.910,00
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	-	32.936.000,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas			38.383.700,00
	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	38.383.700,00
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			0,00
	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	0 Unit	0,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			14.648.000,00
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	8 Unit	14.648.000,00
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			67.634.400,00
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	67.634.400,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	639.175.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1.047.466.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	9.324.355.900,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1.439.260.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	2.019.194.900,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	704.008.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	8.908.097.671,18
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1.283.718.500,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	2.167.418.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1.610.546.000,00
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	226.253.500,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	468.972.400,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			60.180.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	355 Orang	60.180.000,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			29.680.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3504 Orang	29.680.000,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			26.700.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	58 Orang	26.700.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			5.620.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	324 Orang	5.620.000,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			386.414.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	386.414.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.100.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	5.100.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			57.666.400,00
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9 Dokumen	57.666.400,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			432.053.784,00
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	432.053.784,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.001.000,00
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.001.000,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			72.040.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen	72.040.000,00
1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa			11.080.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50 Orang	11.080.000,00
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			86.019.500,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	12 Laporan	86.019.500,00
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**2.019.789.500,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		1.Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	21 %	68.203.000,00
		Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	19 %	68.203.000,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
	Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1.185.266.000,00
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			48.303.000,00
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	48.303.000,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
	Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	834.523.500,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			19.900.000,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	19.900.000,00
	PUSKESMAS WAIGETE			**1.494.792.436,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.494.792.436,00**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**1.494.792.436,00**
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**70.878.145.815,28**
		10.Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.452.697.436,00
		11.Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	1.452.697.436,00
		12.Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	1.452.697.436,00
		13.Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	1.452.697.436,00
		14.Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	1.452.697.436,00
		15.Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	100 %	1.452.697.436,00
		16.Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	1.452.697.436,00
		17.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif	100 %	1.452.697.436,00
		18.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut	100 %	1.452.697.436,00
		19.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100 %	1.452.697.436,00
		1.Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.452.697.436,00
		20.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	100 %	1.452.697.436,00
		21.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100 %	1.452.697.436,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		22.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tubercolosis	100 %	1.452.697.436,00
		23.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	100 %	1.452.697.436,00
		2.Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 Orang	1.452.697.436,00
		3.Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.452.697.436,00
		4.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.452.697.436,00
		5.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.452.697.436,00
		6.Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.452.697.436,00
		7.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.452.697.436,00
		8.Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.452.697.436,00
		999.Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.452.697.436,00
		999.Positifity rate Malaria	4.9 %	1.452.697.436,00
		9.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 (%)	1.452.697.436,00
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 %	1.452.697.436,00
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 %	0,00
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 %	1.452.697.436,00
		Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.452.697.436,00
		Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	0,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	178.923.700,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	1.273.773.736,00
		Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.452.697.436,00
		Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.452.697.436,00
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	0,00
		Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.452.697.436,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	1.273.773.736,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	178.923.700,00
		Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.452.697.436,00
		Positifity rate Malaria	4.9 %	1.452.697.436,00
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.452.697.436,00
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.452.697.436,00
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.452.697.436,00
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	0,00
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.452.697.436,00
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
	Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	591.507.500,00
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	4.876.434.850,00
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	983.727.910,00
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	-	32.936.000,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas			22.686.400,00
	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	7 Unit	22.686.400,00
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			0,00
	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	0 Unit	0,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			24.246.200,00
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1055 Unit	24.246.200,00
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			131.991.100,00
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	131.991.100,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	639.175.000,00
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	619.461.600,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1.047.466.000,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	38.500.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	-	5.580.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	9.324.355.900,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1.439.260.000,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	322.000.200,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	2.019.194.900,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	704.008.000,00
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	8.908.097.671,18
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	249.424.600,00
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1.283.718.500,00
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	0,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	2.167.418.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	311.498.000,00
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	316.061.300,00
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	6.870.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	3.400.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1.610.546.000,00
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	226.253.500,00
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	518.284.600,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	468.972.400,00
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-	0,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			24.640.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	494 Orang	24.640.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			43.540.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4443 Orang	43.540.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			0,00
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			25.920.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	61 Orang	25.920.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			45.554.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	321 Orang	45.554.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			412.647.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	412.647.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			24.840.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	24.840.000,00
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			58.110.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9 Dokumen	58.110.000,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			531.572.736,00
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	30 Dokumen	531.572.736,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			0,00
	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			868.000,00
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	868.000,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	0 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			49.440.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen	49.440.000,00
1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	0 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa			7.440.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	107 Orang	7.440.000,00
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			49.202.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	10 Laporan	49.202.000,00
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	0 Laporan	0,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			83.500.000,00
	Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			83.500.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	83.500.000,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0,00
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**2.019.789.500,00**
		1.Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	21 %	42.095.000,00
		Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	19 %	42.095.000,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
	Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1.185.266.000,00
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			23.100.000,00
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Dokumen	23.100.000,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	834.523.500,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			18.995.000,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen	18.995.000,00
	PUSKESMAS TANARAWA			**1.191.408.466,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.191.408.466,00**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**1.191.408.466,00**
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**70.878.145.815,28**
		10.Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.160.822.466,00
		11.Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	1.160.822.466,00
		12.Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	1.160.822.466,00
		13.Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	1.160.822.466,00
		14.Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	1.160.822.466,00
		15.Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	100 %	1.160.822.466,00
		16.Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	1.160.822.466,00
		17.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif	100 %	1.160.822.466,00
		18.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut	100 %	1.160.822.466,00
		19.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100 %	1.160.822.466,00
		1.Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.160.822.466,00
		20.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	100 %	1.160.822.466,00
		21.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100 %	1.160.822.466,00
		22.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tubercolosis	100 %	1.160.822.466,00
		23.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	100 %	1.160.822.466,00
		2.Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 Orang	1.160.822.466,00
		3.Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.160.822.466,00
		4.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.160.822.466,00
		5.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.160.822.466,00
		6.Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.160.822.466,00
		7.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.160.822.466,00
		8.Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.160.822.466,00
		999.Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.160.822.466,00
		999.Positifity rate Malaria	4.9 %	1.160.822.466,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		9.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 (%)	1.160.822.466,00
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 %	1.160.822.466,00
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 %	1.160.822.466,00
		Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.160.822.466,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	60.892.200,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	1.099.930.266,00
		Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.160.822.466,00
		Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.160.822.466,00
		Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.160.822.466,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	1.099.930.266,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	60.892.200,00
		Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.160.822.466,00
		Positifity rate Malaria	4.9 %	1.160.822.466,00
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.160.822.466,00
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.160.822.466,00
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.160.822.466,00
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.160.822.466,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
	Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	591.507.500,00
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	4.876.434.850,00
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	983.727.910,00
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	-	32.936.000,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas			13.369.400,00
	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit	13.369.400,00
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			0,00
	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit	0,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			15.720.400,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	8 Unit	15.720.400,00
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			31.802.400,00
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket	31.802.400,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	639.175.000,00
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	619.461.600,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1.047.466.000,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	38.500.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	9.324.355.900,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1.439.260.000,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	322.000.200,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	2.019.194.900,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	704.008.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	-	11.150.000,00
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	8.908.097.671,18
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	249.424.600,00
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1.283.718.500,00
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	0,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	2.167.418.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	311.498.000,00
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	316.061.300,00
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	6.870.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	3.400.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1.610.546.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	226.253.500,00
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	518.284.600,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	468.972.400,00
		Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-	0,00
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	14.312.600,00
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	0,00
		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	809.880.000,00
		Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-	0,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			69.540.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	152 Orang	69.540.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	152 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	172 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	769 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			21.380.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1762 Orang	21.380.000,00
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			0,00
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5437 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	582 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2170 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	65 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			39.580.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	47 Orang	39.580.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			13.760.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	135 Orang	13.760.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	199 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			369.633.400,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	369.633.400,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			6.060.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	6.060.000,00
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			52.200.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9 Dokumen	52.200.000,00
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	0 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			367.425.366,00
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	367.425.366,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			0,00
	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			0,00
	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			637.000,00
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	172 Dokumen	637.000,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	0 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			64.540.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	9 Dokumen	64.540.000,00
1.02.02.2.02.0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			0,00
	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	0,00
1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	0 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa			4.193.500,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	173 Orang	4.193.500,00
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			90.981.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	12 Laporan	90.981.000,00
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	0 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0059	Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Napza di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah			0,00
	Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	0 Orang	0,00
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**2.019.789.500,00**
		1.Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	21 %	30.586.000,00
		Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	19 %	30.586.000,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
	Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1.185.266.000,00
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			12.740.000,00
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	12.740.000,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	834.523.500,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			17.846.000,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	17.846.000,00
	PUSKESMAS HEWOKLOANG			**1.015.291.400,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.015.291.400,00**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**1.015.291.400,00**
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**70.878.145.815,28**
		10.Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	971.690.400,00
		11.Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	971.690.400,00
		12.Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	971.690.400,00
		13.Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	971.690.400,00
		14.Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	971.690.400,00
		15.Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	100 %	971.690.400,00
		16.Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	971.690.400,00
		17.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif	100 %	971.690.400,00
		18.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut	100 %	971.690.400,00
		19.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100 %	971.690.400,00
		1.Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	971.690.400,00
		20.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	100 %	971.690.400,00
		21.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100 %	971.690.400,00
		22.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tubercolosis	100 %	971.690.400,00
		23.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	100 %	971.690.400,00
		2.Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 Orang	971.690.400,00
		3.Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	971.690.400,00
		4.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	971.690.400,00
		5.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	971.690.400,00
		6.Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	971.690.400,00
		7.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	971.690.400,00
		8.Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	971.690.400,00
		999.Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	971.690.400,00
		999.Positifity rate Malaria	4.9 %	971.690.400,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		9.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 (%)	971.690.400,00
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 %	971.690.400,00
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 %	0,00
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 %	971.690.400,00
		Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	971.690.400,00
		Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	0,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	70.374.360,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	901.316.040,00
		Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	971.690.400,00
		Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	971.690.400,00
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	0,00
		Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	971.690.400,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	901.316.040,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	70.374.360,00
		Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	971.690.400,00
		Positifity rate Malaria	4.9 %	971.690.400,00
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	971.690.400,00
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	971.690.400,00
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	971.690.400,00
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	0,00
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	971.690.400,00
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	0,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
	Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	591.507.500,00
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	4.876.434.850,00
		Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	-	0,00
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	983.727.910,00
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	-	32.936.000,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas			32.238.410,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	10 Unit	32.238.410,00
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			0,00
	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	0,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			2.321.000,00
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	39 Unit	2.321.000,00
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi			0,00
	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	0 Unit	0,00
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			35.814.950,00
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	35.814.950,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	639.175.000,00
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	619.461.600,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1.047.466.000,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	38.500.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	9.324.355.900,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1.439.260.000,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	2.019.194.900,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	704.008.000,00
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	8.908.097.671,18
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	249.424.600,00
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1.283.718.500,00
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	0,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	2.167.418.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	311.498.000,00
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	316.061.300,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	6.870.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	3.400.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1.610.546.000,00
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	226.253.500,00
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	518.284.600,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	468.972.400,00
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	14.312.600,00
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-	0,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			12.390.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	170 Orang	12.390.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	146 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	133 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	621 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			13.300.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1846 Orang	13.300.000,00
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			0,00
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6011 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	659 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2580 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	77 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			40.800.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	63 Orang	40.800.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			10.543.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	89 Orang	10.543.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	185 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			328.389.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	328.389.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.320.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen	5.320.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			25.020.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7 Dokumen	25.020.000,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			302.180.040,00
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	33 Dokumen	302.180.040,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			0,00
	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.504.000,00
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.504.000,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	0 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			29.240.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	7 Dokumen	29.240.000,00
1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja			0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	0 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa			17.680.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	35 Orang	17.680.000,00
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			114.950.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	17 Laporan	114.950.000,00
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	0 Laporan	0,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			83.500.000,00
	Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			83.500.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	83.500.000,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0,00
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**2.019.789.500,00**
		1.Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	21 %	43.601.000,00
		Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	19 %	43.601.000,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
	Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1.185.266.000,00
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			16.261.000,00
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	5 Dokumen	16.261.000,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
	Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	834.523.500,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			27.340.000,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	27.340.000,00
	PUSKESMAS BERU			**1.425.351.135,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.425.351.135,00**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**1.425.351.135,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**70.878.145.815,28**
		10.Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.389.588.135,00
		11.Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	1.389.588.135,00
		12.Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	1.389.588.135,00
		13.Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	1.389.588.135,00
		14.Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	1.389.588.135,00
		15.Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	100 %	1.389.588.135,00
		16.Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	1.389.588.135,00
		17.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif	100 %	1.389.588.135,00
		18.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut	100 %	1.389.588.135,00
		19.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100 %	1.389.588.135,00
		1.Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.389.588.135,00
		20.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	100 %	1.389.588.135,00
		21.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100 %	1.389.588.135,00
		22.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tubercolosis	100 %	1.389.588.135,00
		23.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	100 %	1.389.588.135,00
		2.Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 Orang	1.389.588.135,00
		3.Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.389.588.135,00
		4.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.389.588.135,00
		5.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.389.588.135,00
		6.Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.389.588.135,00
		7.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.389.588.135,00
		8.Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.389.588.135,00
		999.Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.389.588.135,00
		999.Positifity rate Malaria	4.9 %	1.389.588.135,00
		9.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 (%)	1.389.588.135,00
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 %	1.389.588.135,00
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 %	1.389.588.135,00
		Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.389.588.135,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	196.997.000,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	1.192.591.135,00
		Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.389.588.135,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.389.588.135,00
		Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.389.588.135,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	1.192.591.135,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	196.997.000,00
		Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.389.588.135,00
		Positifity rate Malaria	4.9 %	1.389.588.135,00
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.389.588.135,00
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.389.588.135,00
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.389.588.135,00
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.389.588.135,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
	Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	591.507.500,00
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	4.876.434.850,00
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	983.727.910,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas			44.966.700,00
	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	16 Unit	44.966.700,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			19.580.000,00
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	121 Unit	19.580.000,00
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			132.450.300,00
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	132.450.300,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	639.175.000,00
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	619.461.600,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1.047.466.000,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	38.500.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	9.324.355.900,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1.439.260.000,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	2.019.194.900,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	704.008.000,00
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1.072.691.671,00
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	8.908.097.671,18
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	249.424.600,00
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1.283.718.500,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	2.167.418.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	311.498.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	3.400.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1.610.546.000,00
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	226.253.500,00
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	518.284.600,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	468.972.400,00
		Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-	0,00
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	14.312.600,00
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-	0,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			13.440.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	470 Orang	13.440.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	460 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	453 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2065 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			101.920.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7095 Orang	101.920.000,00
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			0,00
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19094 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1932 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7678 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	231 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			12.600.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	87 Orang	12.600.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			19.390.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	462 Orang	19.390.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	653 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			384.787.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	384.787.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			16.660.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	16.660.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			54.248.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9 Dokumen	54.248.000,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			446.998.135,00
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	446.998.135,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			0,00
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.188.000,00
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.188.000,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			43.400.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	9 Dokumen	43.400.000,00
1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	1 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa			1.120.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	153 Orang	1.120.000,00
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			96.840.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	20 Laporan	96.840.000,00
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	20 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0059	Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Napza di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah			0,00
	Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	7095 Orang	0,00
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**2.019.789.500,00**
		1.Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	21 %	35.763.000,00
		Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	19 %	35.763.000,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
	Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1.185.266.000,00
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			16.313.000,00
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen	16.313.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
	Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	834.523.500,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			19.450.000,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen	19.450.000,00
	PUSKESMAS KOPETA			**1.321.474.594,98**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.321.474.594,98**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**1.321.474.594,98**
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**70.878.145.815,28**
		10.Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.235.514.594,98
		11.Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	1.235.514.594,98
		12.Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	1.235.514.594,98
		13.Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	1.235.514.594,98
		14.Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	1.235.514.594,98
		15.Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	100 %	1.235.514.594,98
		16.Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	1.235.514.594,98
		17.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif	100 %	1.235.514.594,98
		18.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut	100 %	1.235.514.594,98
		19.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100 %	1.235.514.594,98
		1.Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.235.514.594,98
		20.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	100 %	1.235.514.594,98
		21.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100 %	1.235.514.594,98
		22.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tubercolosis	100 %	1.235.514.594,98
		23.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	100 %	1.235.514.594,98
		2.Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 Orang	1.235.514.594,98
		3.Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.235.514.594,98
		4.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.235.514.594,98
		5.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.235.514.594,98
		6.Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.235.514.594,98
		7.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.235.514.594,98
		8.Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.235.514.594,98

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		999.Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.235.514.594,98
		999.Positifity rate Malaria	4.9 %	1.235.514.594,98
		9.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 (%)	1.235.514.594,98
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 %	1.235.514.594,98
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 %	0,00
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 %	1.235.514.594,98
		Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.235.514.594,98
		Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	0,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	170.233.100,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	1.065.281.494,98
		Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.235.514.594,98
		Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.235.514.594,98
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	0,00
		Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.235.514.594,98
		Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	1.065.281.494,98
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	170.233.100,00
		Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.235.514.594,98
		Positifity rate Malaria	4.9 %	1.235.514.594,98
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.235.514.594,98
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.235.514.594,98
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.235.514.594,98
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	0,00
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.235.514.594,98
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	0,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
	Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	131.537.300,00
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	591.507.500,00
		Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	-	300.662.400,00
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	4.876.434.850,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	983.727.910,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas			56.730.000,00
	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	11 Unit	56.730.000,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			21.539.500,00
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	32 Unit	21.539.500,00
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			0,00
	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	0,00
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			91.963.600,00
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	91.963.600,00
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			0,00
	Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	4 Paket	0,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	639.175.000,00
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	619.461.600,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1.047.466.000,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	38.500.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	9.324.355.900,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1.439.260.000,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	2.019.194.900,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	704.008.000,00
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1.072.691.671,00
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	8.908.097.671,18
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	249.424.600,00
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1.283.718.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	2.167.418.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	311.498.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	3.400.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1.610.546.000,00
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	226.253.500,00
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	518.284.600,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	468.972.400,00
		Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-	0,00
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	14.312.600,00
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-	0,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			26.720.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	497 Orang	26.720.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	438 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	414 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1868 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			40.320.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4691 Orang	40.320.000,00
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			0,00
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18368 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1839 Orang	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4874 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	146 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			8.400.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	8.400.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			14.000.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	390 Orang	14.000.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	589 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			392.160.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Dokumen	392.160.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			12.040.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen	12.040.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			64.420.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen	64.420.000,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			388.346.494,98
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	388.346.494,98
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			0,00
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			715.000,00
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	715.000,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			45.500.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	8 Dokumen	45.500.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	1 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa			6.160.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	5000 Orang	6.160.000,00
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			66.500.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	19 Laporan	66.500.000,00
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	19 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0059	Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Napza di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah			0,00
	Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	4691 Orang	0,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			83.500.000,00
	Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			83.500.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	83.500.000,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0,00
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**2.019.789.500,00**
		1.Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	21 %	85.960.000,00
		Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	19 %	85.960.000,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
	Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1.185.266.000,00
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			70.800.000,00
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	70.800.000,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
	Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	834.523.500,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			15.160.000,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	15.160.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	PUSKESMAS WOLOMARANG			**1.211.275.404,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.211.275.404,00**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**1.211.275.404,00**
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**70.878.145.815,28**
		10.Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.161.215.404,00
		11.Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	1.161.215.404,00
		12.Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	1.161.215.404,00
		13.Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	1.161.215.404,00
		14.Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	1.161.215.404,00
		15.Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	100 %	1.161.215.404,00
		16.Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	1.161.215.404,00
		17.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif	100 %	1.161.215.404,00
		18.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut	100 %	1.161.215.404,00
		19.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100 %	1.161.215.404,00
		1.Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.161.215.404,00
		20.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	100 %	1.161.215.404,00
		21.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100 %	1.161.215.404,00
		22.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tubercolosis	100 %	1.161.215.404,00
		23.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	100 %	1.161.215.404,00
		2.Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 Orang	1.161.215.404,00
		3.Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.161.215.404,00
		4.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.161.215.404,00
		5.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.161.215.404,00
		6.Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.161.215.404,00
		7.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.161.215.404,00
		8.Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.161.215.404,00
		999.Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.161.215.404,00
		999.Positifity rate Malaria	4.9 %	1.161.215.404,00
		9.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 (%)	1.161.215.404,00
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 %	1.161.215.404,00
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 %	1.161.215.404,00
		Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.161.215.404,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	164.773.500,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	996.441.904,00
		Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.161.215.404,00
		Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.161.215.404,00
		Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.161.215.404,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	996.441.904,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	164.773.500,00
		Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.161.215.404,00
		Positifity rate Malaria	4.9 %	1.161.215.404,00
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.161.215.404,00
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.161.215.404,00
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.161.215.404,00
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.161.215.404,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
	Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	591.507.500,00
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	4.876.434.850,00
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	983.727.910,00
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	-	32.936.000,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas			24.030.500,00
	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	7 Unit	24.030.500,00
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			0,00
	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	0,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			59.084.500,00
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	17 Unit	59.084.500,00
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			81.658.500,00
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	81.658.500,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	639.175.000,00
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	619.461.600,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1.047.466.000,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	38.500.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	-	5.580.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	9.324.355.900,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1.439.260.000,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	2.019.194.900,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	704.008.000,00
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	8.908.097.671,18
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	249.424.600,00
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1.283.718.500,00
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	0,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	2.167.418.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	311.498.000,00
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	316.061.300,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	3.400.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1.610.546.000,00
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	226.253.500,00
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	518.284.600,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	468.972.400,00
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	14.312.600,00
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			36.680.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	475 Orang	36.680.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			40.810.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4569 Orang	40.810.000,00
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			0,00
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			7.280.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	34 Orang	7.280.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			16.240.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	361 Orang	16.240.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			355.391.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	355.391.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15.960.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	15.960.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			42.140.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6 Dokumen	42.140.000,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			332.775.904,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	332.775.904,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			0,00
	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.682.000,00
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	6 Dokumen	1.682.000,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			38.500.000,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	38.500.000,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			47.460.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	8 Dokumen	47.460.000,00
1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa			2.520.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50 Orang	2.520.000,00
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			59.003.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	11 Laporan	59.003.000,00
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	11 Laporan	0,00
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**2.019.789.500,00**
		1.Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	21 %	50.060.000,00
		Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	19 %	50.060.000,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
	Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1.185.266.000,00
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			44.040.000,00
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Dokumen	44.040.000,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	834.523.500,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			6.020.000,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	6.020.000,00
	PUSKESMAS MAGEPANDA			**1.233.027.466,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.233.027.466,00**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**1.233.027.466,00**
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**70.878.145.815,28**
		10.Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.174.667.466,00
		11.Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	1.174.667.466,00
		12.Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	1.174.667.466,00
		13.Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	1.174.667.466,00
		14.Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	1.174.667.466,00
		15.Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	100 %	1.174.667.466,00
		16.Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	1.174.667.466,00
		17.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif	100 %	1.174.667.466,00
		18.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut	100 %	1.174.667.466,00
		19.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100 %	1.174.667.466,00
		1.Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.174.667.466,00
		20.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	100 %	1.174.667.466,00
		21.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100 %	1.174.667.466,00
		22.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tubercolosis	100 %	1.174.667.466,00
		23.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	100 %	1.174.667.466,00
		2.Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 Orang	1.174.667.466,00
		3.Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.174.667.466,00
		4.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.174.667.466,00
		5.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.174.667.466,00
		6.Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.174.667.466,00
		7.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.174.667.466,00
		8.Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.174.667.466,00
		999.Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.174.667.466,00
		999.Positifity rate Malaria	4.9 %	1.174.667.466,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		9.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 (%)	1.174.667.466,00
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 %	1.174.667.466,00
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 %	1.174.667.466,00
		Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.174.667.466,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	136.298.300,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	1.038.369.166,00
		Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.174.667.466,00
		Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.174.667.466,00
		Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.174.667.466,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	1.038.369.166,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	136.298.300,00
		Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.174.667.466,00
		Positifity rate Malaria	4.9 %	1.174.667.466,00
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.174.667.466,00
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.174.667.466,00
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.174.667.466,00
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.174.667.466,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
	Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	591.507.500,00
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	4.876.434.850,00
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	983.727.910,00
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	-	32.936.000,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas			29.855.100,00
	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	18 Unit	29.855.100,00
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			0,00
	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	0,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			19.634.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	28 Unit	19.634.000,00
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			86.809.200,00
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	86.809.200,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	639.175.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1.047.466.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	9.324.355.900,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1.439.260.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	2.019.194.900,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	704.008.000,00
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	8.908.097.671,18
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1.283.718.500,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	2.167.418.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	311.498.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1.610.546.000,00
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	226.253.500,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	468.972.400,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			47.600.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	209 Orang	47.600.000,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			33.040.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2551 Orang	33.040.000,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			19.600.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	18 Orang	19.600.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			14.280.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	194 Orang	14.280.000,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			398.047.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8 Dokumen	398.047.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			18.900.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	18.900.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			49.840.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6 Dokumen	49.840.000,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			314.168.166,00
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	7 Dokumen	314.168.166,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.069.000,00
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.069.000,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			58.730.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	6 Dokumen	58.730.000,00
1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa			5.600.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	6 Orang	5.600.000,00
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			77.495.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	19 Laporan	77.495.000,00
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	18 Laporan	0,00
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**2.019.789.500,00**
		1.Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	21 %	58.360.000,00
		Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	19 %	58.360.000,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
	Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1.185.266.000,00
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			38.080.000,00
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	38.080.000,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
	Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	834.523.500,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			20.280.000,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	20.280.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	PUSKESMAS NELLE			**1.096.552.590,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.096.552.590,00**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**1.096.552.590,00**
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**70.878.145.815,28**
		10.Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.037.902.590,00
		11.Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	1.037.902.590,00
		12.Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	1.037.902.590,00
		13.Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	1.037.902.590,00
		14.Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	1.037.902.590,00
		15.Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	100 %	1.037.902.590,00
		16.Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	1.037.902.590,00
		17.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif	100 %	1.037.902.590,00
		18.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut	100 %	1.037.902.590,00
		19.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100 %	1.037.902.590,00
		1.Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.037.902.590,00
		20.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	100 %	1.037.902.590,00
		21.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100 %	1.037.902.590,00
		22.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tubercolosis	100 %	1.037.902.590,00
		23.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	100 %	1.037.902.590,00
		2.Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 Orang	1.037.902.590,00
		3.Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.037.902.590,00
		4.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.037.902.590,00
		5.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.037.902.590,00
		6.Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.037.902.590,00
		7.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.037.902.590,00
		8.Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.037.902.590,00
		999.Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.037.902.590,00
		999.Positifity rate Malaria	4.9 %	1.037.902.590,00
		9.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 (%)	1.037.902.590,00
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 %	1.037.902.590,00
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 %	0,00
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 %	1.037.902.590,00
		Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.037.902.590,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	0,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	81.765.800,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	956.136.790,00
		Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.037.902.590,00
		Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.037.902.590,00
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	0,00
		Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.037.902.590,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	956.136.790,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	81.765.800,00
		Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.037.902.590,00
		Positifity rate Malaria	4.9 %	1.037.902.590,00
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.037.902.590,00
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.037.902.590,00
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.037.902.590,00
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	0,00
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.037.902.590,00
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	0,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
	Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	131.537.300,00
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	591.507.500,00
		Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	-	300.662.400,00
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	4.876.434.850,00
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	983.727.910,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas			28.620.300,00
	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit	28.620.300,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			10.314.100,00
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	10.314.100,00
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	0,00
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			42.831.400,00
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	51 Paket	42.831.400,00
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			0,00
	Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	0,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	639.175.000,00
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	619.461.600,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1.047.466.000,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	38.500.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	9.324.355.900,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1.439.260.000,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	2.019.194.900,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	704.008.000,00
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	8.908.097.671,18
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	249.424.600,00
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1.283.718.500,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	2.167.418.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	311.498.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	3.400.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1.610.546.000,00
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	226.253.500,00
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	518.284.600,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	468.972.400,00
		Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-	0,00
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	14.312.600,00
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-	0,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			20.000.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	81 Orang	20.000.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	78 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	78 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	417 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			34.160.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1305 Orang	34.160.000,00
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			0,00
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3994 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	432 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1761 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	53 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			21.000.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	49 Orang	21.000.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			16.480.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	66 Orang	16.480.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	93 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			319.068.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	319.068.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			14.000.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	14.000.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			66.830.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8 Dokumen	66.830.000,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			316.769.790,00
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	316.769.790,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			566.000,00
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	566.000,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			40.600.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	8 Dokumen	40.600.000,00
1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	1 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa			7.560.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2 Orang	7.560.000,00
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			99.103.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	21 Laporan	99.103.000,00
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	1 Laporan	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.02.2.02.0059	Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Napza di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah			0,00
	Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	1305 Orang	0,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			83.500.000,00
	Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			83.500.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	83.500.000,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0,00
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**2.019.789.500,00**
		1.Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	21 %	58.650.000,00
		Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	19 %	58.650.000,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
	Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1.185.266.000,00
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			12.520.000,00
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen	12.520.000,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
	Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	834.523.500,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			46.130.000,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	46.130.000,00
	PUSKESMAS KOTING			**948.651.500,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**948.651.500,00**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**948.651.500,00**
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**70.878.145.815,28**
		10.Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	922.067.000,00
		11.Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	922.067.000,00
		12.Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	922.067.000,00
		13.Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	922.067.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		14.Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	922.067.000,00
		15.Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	100 %	922.067.000,00
		16.Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	922.067.000,00
		17.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif	100 %	922.067.000,00
		18.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut	100 %	922.067.000,00
		19.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100 %	922.067.000,00
		1.Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	922.067.000,00
		20.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	100 %	922.067.000,00
		21.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100 %	922.067.000,00
		22.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tubercolosis	100 %	922.067.000,00
		23.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	100 %	922.067.000,00
		2.Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 Orang	922.067.000,00
		3.Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	922.067.000,00
		4.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	922.067.000,00
		5.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	922.067.000,00
		6.Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	922.067.000,00
		7.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	922.067.000,00
		8.Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	922.067.000,00
		999.Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	922.067.000,00
		999.Positifity rate Malaria	4.9 %	922.067.000,00
		9.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 (%)	922.067.000,00
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 %	922.067.000,00
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 %	0,00
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 %	922.067.000,00
		Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	922.067.000,00
		Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	0,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	67.413.900,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	854.653.100,00
		Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	922.067.000,00
		Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	922.067.000,00
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	0,00
		Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	922.067.000,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	854.653.100,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	67.413.900,00
		Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	922.067.000,00
		Positifity rate Malaria	4.9 %	922.067.000,00
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	922.067.000,00
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	922.067.000,00
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	922.067.000,00
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	0,00
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	922.067.000,00
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	0,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
	Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	591.507.500,00
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	-	31.160.000,00
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	4.876.434.850,00
		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	-	34.177.000,00
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	983.727.910,00
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	-	32.936.000,00
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas			0,00
	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	0 Unit	0,00
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			0,00
	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	0 Unit	0,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas			22.359.800,00
	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit	22.359.800,00
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			0,00
	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	0,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			11.042.900,00
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	7 Unit	11.042.900,00
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			34.011.200,00
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	34.011.200,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	639.175.000,00
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	619.461.600,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1.047.466.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	-	5.580.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	9.324.355.900,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1.439.260.000,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	322.000.200,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	2.019.194.900,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	704.008.000,00
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	8.908.097.671,18
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	249.424.600,00
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1.283.718.500,00
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	0,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	2.167.418.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	311.498.000,00
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	316.061.300,00
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	6.870.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	3.400.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1.610.546.000,00
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	226.253.500,00
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	518.284.600,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	468.972.400,00
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	14.312.600,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	809.880.000,00
		Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-	0,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			31.360.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	94 Orang	31.360.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	83 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	76 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	422 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			7.280.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	795 Orang	7.280.000,00
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			0,00
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4110 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	449 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1856 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	56 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			26.040.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	37 Orang	26.040.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			11.060.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	78 Orang	11.060.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	107 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			323.449.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	323.449.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			2.940.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	2.940.000,00
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			20.860.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11 Dokumen	20.860.000,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			281.257.100,00
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	281.257.100,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			0,00
	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			155.000,00
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	155.000,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			36.750.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	11 Dokumen	36.750.000,00
1.02.02.2.02.0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			0,00
	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	0,00
1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	1 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa			15.680.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	37 Orang	15.680.000,00
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			97.822.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	34 Laporan	97.822.000,00
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	1 Laporan	0,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			83.500.000,00
	Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			83.500.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	83.500.000,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0,00
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**2.019.789.500,00**
		1.Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	21 %	26.584.500,00
		Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	19 %	26.584.500,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
	Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1.185.266.000,00
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			4.900.000,00
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Dokumen	4.900.000,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
	Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	834.523.500,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			21.684.500,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	21.684.500,00
	PUSKESMAS NITA			**1.678.740.312,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.678.740.312,00**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**1.678.740.312,00**
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**70.878.145.815,28**
		10.Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.606.280.312,00
		11.Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	1.606.280.312,00
		12.Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	1.606.280.312,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		13.Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	1.606.280.312,00
		14.Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	1.606.280.312,00
		15.Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	100 %	1.606.280.312,00
		16.Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	1.606.280.312,00
		17.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif	100 %	1.606.280.312,00
		18.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut	100 %	1.606.280.312,00
		19.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100 %	1.606.280.312,00
		1.Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.606.280.312,00
		20.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	100 %	1.606.280.312,00
		21.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100 %	1.606.280.312,00
		22.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tubercolosis	100 %	1.606.280.312,00
		23.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	100 %	1.606.280.312,00
		2.Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 Orang	1.606.280.312,00
		3.Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.606.280.312,00
		4.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.606.280.312,00
		5.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.606.280.312,00
		6.Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.606.280.312,00
		7.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.606.280.312,00
		8.Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.606.280.312,00
		999.Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.606.280.312,00
		999.Positifity rate Malaria	4.9 %	1.606.280.312,00
		9.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 (%)	1.606.280.312,00
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 %	1.606.280.312,00
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 %	1.606.280.312,00
		Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.606.280.312,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	253.919.900,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	1.352.360.412,00
		Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.606.280.312,00
		Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.606.280.312,00
		Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.606.280.312,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	1.352.360.412,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	253.919.900,00
		Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.606.280.312,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Positifity rate Malaria	4.9 %	1.606.280.312,00
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.606.280.312,00
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.606.280.312,00
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.606.280.312,00
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.606.280.312,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
	Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	591.507.500,00
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	4.876.434.850,00
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	983.727.910,00
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	-	32.936.000,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas			27.814.000,00
	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	27 Unit	27.814.000,00
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			0,00
	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	0 Unit	0,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			16.810.000,00
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	8 Unit	16.810.000,00
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			209.295.900,00
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	209.295.900,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	639.175.000,00
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1.047.466.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	9.324.355.900,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1.439.260.000,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	2.019.194.900,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	704.008.000,00
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	8.908.097.671,18
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	249.424.600,00
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1.283.718.500,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	2.167.418.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	311.498.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1.610.546.000,00
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	226.253.500,00
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	518.284.600,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	468.972.400,00
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	14.312.600,00
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			139.500.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	288 Orang	139.500.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			2.520.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4060 Orang	2.520.000,00
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			0,00
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			21.400.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	87 Orang	21.400.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			18.600.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	217 Orang	18.600.000,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			448.813.800,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	448.813.800,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			14.100.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	14.100.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			34.304.800,00
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6 Dokumen	34.304.800,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			469.707.812,00
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	42 Dokumen	469.707.812,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.412.000,00
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 Dokumen	1.412.000,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			64.080.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	7 Dokumen	64.080.000,00
1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa			2.400.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	110 Orang	2.400.000,00
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			135.522.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	16 Laporan	135.522.000,00
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	0 Laporan	0,00
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**2.019.789.500,00**
		1.Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	21 %	72.460.000,00
		Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	19 %	72.460.000,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1.185.266.000,00
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			51.085.000,00
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	6 Dokumen	51.085.000,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
	Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	834.523.500,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			21.375.000,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen	21.375.000,00
	PUSKESMAS NANGA			**1.199.588.340,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.199.588.340,00**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**1.199.588.340,00**
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**70.878.145.815,28**
		10.Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.138.082.340,00
		11.Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	1.138.082.340,00
		12.Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	1.138.082.340,00
		13.Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	1.138.082.340,00
		14.Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	1.138.082.340,00
		15.Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	100 %	1.138.082.340,00
		16.Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	1.138.082.340,00
		17.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif	100 %	1.138.082.340,00
		18.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut	100 %	1.138.082.340,00
		19.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100 %	1.138.082.340,00
		1.Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.138.082.340,00
		20.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	100 %	1.138.082.340,00
		21.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100 %	1.138.082.340,00
		22.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tubercolosis	100 %	1.138.082.340,00
		23.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	100 %	1.138.082.340,00
		2.Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 Orang	1.138.082.340,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		3.Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.138.082.340,00
		4.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.138.082.340,00
		5.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.138.082.340,00
		6.Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.138.082.340,00
		7.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.138.082.340,00
		8.Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.138.082.340,00
		999.Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.138.082.340,00
		999.Positifity rate Malaria	4.9 %	1.138.082.340,00
		9.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 (%)	1.138.082.340,00
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 %	1.138.082.340,00
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 %	0,00
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 %	1.138.082.340,00
		Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.138.082.340,00
		Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	0,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	116.752.600,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	1.021.329.740,00
		Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.138.082.340,00
		Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.138.082.340,00
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	0,00
		Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.138.082.340,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	1.021.329.740,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	116.752.600,00
		Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.138.082.340,00
		Positifity rate Malaria	4.9 %	1.138.082.340,00
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.138.082.340,00
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.138.082.340,00
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.138.082.340,00
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	0,00
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.138.082.340,00
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	0,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
	Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	591.507.500,00
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	4.876.434.850,00
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	983.727.910,00
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	-	32.936.000,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas			26.205.700,00
	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	26.205.700,00
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			0,00
	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	0 Unit	0,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			8.707.600,00
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	21 Unit	8.707.600,00
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			81.839.300,00
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	81.839.300,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	639.175.000,00
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	619.461.600,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1.047.466.000,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	38.500.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	-	5.580.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	9.324.355.900,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1.439.260.000,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	322.000.200,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	2.019.194.900,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	704.008.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	-	11.150.000,00
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	8.908.097.671,18
		Jumlah FKTP yang melaksanakan pengelolaan kesehatan primer	-	0,00
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	249.424.600,00
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1.283.718.500,00
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	0,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	2.167.418.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	311.498.000,00
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	316.061.300,00
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	6.870.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	3.400.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1.610.546.000,00
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	226.253.500,00
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	518.284.600,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	468.972.400,00
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	14.312.600,00
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	0,00
		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	809.880.000,00
		Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-	0,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			76.380.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	143 Orang	76.380.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			23.940.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	811 Orang	23.940.000,00
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			0,00
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			3.780.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	55 Orang	3.780.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			12.320.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	88 Orang	12.320.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	0 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			384.707.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Dokumen	384.707.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			16.730.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen	16.730.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			51.030.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	51.030.000,00
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	0 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			305.891.740,00
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	305.891.740,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			0,00
	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			0,00
	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			732.000,00
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	8 Dokumen	732.000,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	0 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			30.870.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	30.870.000,00
1.02.02.2.02.0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			0,00
	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	0,00
1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	0 Laporan	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa			5.320.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	60 Orang	5.320.000,00
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			109.629.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	12 Laporan	109.629.000,00
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	0 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0058	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Primer			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Kesehatan Primer di FKTP	Jumlah FKTP yang melaksanakan pengelolaan kesehatan primer	0 Unit	0,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			83.500.000,00
	Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			83.500.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	83.500.000,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0,00
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**2.019.789.500,00**
		1.Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	21 %	61.506.000,00
		Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	19 %	61.506.000,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
	Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1.185.266.000,00
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			27.056.000,00
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	5 Dokumen	27.056.000,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
	Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	834.523.500,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			34.450.000,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	34.450.000,00
	PUSKESMAS PAGA			**1.337.171.965,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.337.171.965,00**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**1.337.171.965,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**70.878.145.815,28**
		10.Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.245.081.965,00
		11.Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	1.245.081.965,00
		12.Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	1.245.081.965,00
		13.Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	1.245.081.965,00
		14.Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	1.245.081.965,00
		15.Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	100 %	1.245.081.965,00
		16.Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	1.245.081.965,00
		17.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif	100 %	1.245.081.965,00
		18.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut	100 %	1.245.081.965,00
		19.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100 %	1.245.081.965,00
		1.Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.245.081.965,00
		20.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	100 %	1.245.081.965,00
		21.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100 %	1.245.081.965,00
		22.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tubercolosis	100 %	1.245.081.965,00
		23.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	100 %	1.245.081.965,00
		2.Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 Orang	1.245.081.965,00
		3.Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.245.081.965,00
		4.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.245.081.965,00
		5.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.245.081.965,00
		6.Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.245.081.965,00
		7.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.245.081.965,00
		8.Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.245.081.965,00
		999.Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.245.081.965,00
		999.Positifity rate Malaria	4.9 %	1.245.081.965,00
		9.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 (%)	1.245.081.965,00
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 %	1.245.081.965,00
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 %	1.245.081.965,00
		Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.245.081.965,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	168.329.200,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	1.076.752.765,00
		Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.245.081.965,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.245.081.965,00
		Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.245.081.965,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	1.076.752.765,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	168.329.200,00
		Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.245.081.965,00
		Positifity rate Malaria	4.9 %	1.245.081.965,00
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.245.081.965,00
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.245.081.965,00
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.245.081.965,00
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.245.081.965,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
	Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	591.507.500,00
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	4.876.434.850,00
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	983.727.910,00
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	-	32.936.000,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas			35.817.600,00
	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	8 Unit	35.817.600,00
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			9.138.600,00
	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	10 Unit	9.138.600,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			2.873.000,00
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	2.873.000,00
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			120.500.000,00
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	120.500.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	639.175.000,00
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	619.461.600,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1.047.466.000,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	38.500.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	9.324.355.900,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1.439.260.000,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	2.019.194.900,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	704.008.000,00
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	8.908.097.671,18
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	249.424.600,00
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1.283.718.500,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	2.167.418.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	311.498.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	3.400.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1.610.546.000,00
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	226.253.500,00
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	518.284.600,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	468.972.400,00
		Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-	0,00
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	14.312.600,00
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-	0,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			38.640.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	214 Orang	38.640.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	214 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	206 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1086 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			16.030.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3554 Orang	16.030.000,00
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			0,00
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10401 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2080 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	926 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	138 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			17.920.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	38 Orang	17.920.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			18.760.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	172 Orang	18.760.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	293 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			449.296.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	449.296.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			3.780.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	3.780.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			59.080.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7 Dokumen	59.080.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			342.090.765,00
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	342.090.765,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			567.000,00
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 Dokumen	567.000,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			34.300.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	9 Dokumen	34.300.000,00
1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	1 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa			2.800.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	38 Orang	2.800.000,00
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			93.489.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	17 Laporan	93.489.000,00
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	1 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0059	Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Napza di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah			0,00
	Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	3554 Orang	0,00
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**2.019.789.500,00**
		1.Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	21 %	92.090.000,00
		Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	19 %	92.090.000,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
	Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1.185.266.000,00
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			57.330.000,00
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Dokumen	57.330.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
	Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	834.523.500,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			34.760.000,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5 Dokumen	34.760.000,00
	PUSKESMAS LEKEBAI			**1.038.655.900,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.038.655.900,00**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**1.038.655.900,00**
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**70.878.145.815,28**
		10.Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.015.240.900,00
		11.Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	1.015.240.900,00
		12.Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	1.015.240.900,00
		13.Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	1.015.240.900,00
		14.Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	1.015.240.900,00
		15.Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	100 %	1.015.240.900,00
		16.Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	1.015.240.900,00
		17.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif	100 %	1.015.240.900,00
		18.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut	100 %	1.015.240.900,00
		19.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100 %	1.015.240.900,00
		1.Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.015.240.900,00
		20.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	100 %	1.015.240.900,00
		21.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100 %	1.015.240.900,00
		22.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tubercolosis	100 %	1.015.240.900,00
		23.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	100 %	1.015.240.900,00
		2.Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 Orang	1.015.240.900,00
		3.Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.015.240.900,00
		4.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.015.240.900,00
		5.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.015.240.900,00
		6.Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.015.240.900,00
		7.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.015.240.900,00
		8.Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.015.240.900,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		999.Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.015.240.900,00
		999.Positifity rate Malaria	4.9 %	1.015.240.900,00
		9.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 (%)	1.015.240.900,00
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 %	1.015.240.900,00
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 %	1.015.240.900,00
		Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.015.240.900,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	92.968.300,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	922.272.600,00
		Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.015.240.900,00
		Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.015.240.900,00
		Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.015.240.900,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	922.272.600,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	92.968.300,00
		Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.015.240.900,00
		Positifity rate Malaria	4.9 %	1.015.240.900,00
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.015.240.900,00
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.015.240.900,00
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.015.240.900,00
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.015.240.900,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
	Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	591.507.500,00
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	4.876.434.850,00
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	983.727.910,00
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	-	32.936.000,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas			28.952.200,00
	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit	28.952.200,00
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			0,00
	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	0 Unit	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			7.353.500,00
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	51 Unit	7.353.500,00
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			56.662.600,00
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	56.662.600,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	639.175.000,00
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	619.461.600,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1.047.466.000,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	38.500.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	9.324.355.900,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1.439.260.000,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	2.019.194.900,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	704.008.000,00
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	8.908.097.671,18
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	249.424.600,00
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1.283.718.500,00
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	0,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	2.167.418.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	311.498.000,00
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	316.061.300,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	3.400.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1.610.546.000,00
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	226.253.500,00
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	518.284.600,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	468.972.400,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	14.312.600,00
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			55.720.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	85 Orang	55.720.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			16.660.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1597 Orang	16.660.000,00
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			0,00
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			11.100.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	29 Orang	11.100.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			9.810.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	46 Orang	9.810.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			346.249.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8 Dokumen	346.249.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.480.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	1.480.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			23.994.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7 Dokumen	23.994.000,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			294.404.600,00
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	25 Dokumen	294.404.600,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			0,00
	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			574.000,00
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	574.000,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	0 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			59.190.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen	59.190.000,00
1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa			3.960.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	29 Orang	3.960.000,00
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			99.131.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	12 Laporan	99.131.000,00
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	0 Laporan	0,00
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**2.019.789.500,00**
		1.Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	21 %	23.415.000,00
		Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	19 %	23.415.000,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
	Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1.185.266.000,00
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			15.925.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	5 Dokumen	15.925.000,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
	Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	834.523.500,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			7.490.000,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen	7.490.000,00
	PUSKESMAS WOLOFEO			**1.098.166.852,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.098.166.852,00**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**1.098.166.852,00**
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**70.878.145.815,28**
		10.Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.023.501.852,00
		11.Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	1.023.501.852,00
		12.Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	1.023.501.852,00
		13.Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	1.023.501.852,00
		14.Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	1.023.501.852,00
		15.Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	100 %	1.023.501.852,00
		16.Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	1.023.501.852,00
		17.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif	100 %	1.023.501.852,00
		18.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut	100 %	1.023.501.852,00
		19.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100 %	1.023.501.852,00
		1.Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.023.501.852,00
		20.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	100 %	1.023.501.852,00
		21.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100 %	1.023.501.852,00
		22.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tubercolosis	100 %	1.023.501.852,00
		23.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	100 %	1.023.501.852,00
		2.Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 Orang	1.023.501.852,00
		3.Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.023.501.852,00
		4.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.023.501.852,00
		5.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.023.501.852,00
		6.Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.023.501.852,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		7.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.023.501.852,00
		8.Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.023.501.852,00
		999.Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.023.501.852,00
		999.Positifity rate Malaria	4.9 %	1.023.501.852,00
		9.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 (%)	1.023.501.852,00
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 %	1.023.501.852,00
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 %	1.023.501.852,00
		Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.023.501.852,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	58.715.700,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	964.786.152,00
		Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.023.501.852,00
		Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.023.501.852,00
		Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.023.501.852,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	964.786.152,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	58.715.700,00
		Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.023.501.852,00
		Positifity rate Malaria	4.9 %	1.023.501.852,00
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.023.501.852,00
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.023.501.852,00
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.023.501.852,00
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.023.501.852,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
	Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	591.507.500,00
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	4.876.434.850,00
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	983.727.910,00
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	-	32.936.000,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas			22.629.600,00
	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	22.629.600,00
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			8.091.600,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	8.091.600,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			3.002.400,00
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	21 Unit	3.002.400,00
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			24.992.100,00
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	24.992.100,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	639.175.000,00
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	619.461.600,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1.047.466.000,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	38.500.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	-	5.580.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	9.324.355.900,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1.439.260.000,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	322.000.200,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	2.019.194.900,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	704.008.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	-	11.150.000,00
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	8.908.097.671,18
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	249.424.600,00
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1.283.718.500,00
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	0,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	2.167.418.000,00
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	316.061.300,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	6.870.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	3.400.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1.610.546.000,00
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	226.253.500,00
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	518.284.600,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	468.972.400,00
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	14.312.600,00
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	0,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			63.000.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	160 Orang	63.000.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			5.180.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1950 Orang	5.180.000,00
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			0,00
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			12.240.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	6 Orang	12.240.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			24.320.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	72 Orang	24.320.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	0 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			381.758.500,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Dokumen	381.758.500,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			10.880.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	10.880.000,00
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			35.920.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6 Dokumen	35.920.000,00
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	0 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			309.201.152,00
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	309.201.152,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			0,00
	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			885.000,00
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen	885.000,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	0 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			54.880.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	7 Dokumen	54.880.000,00
1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa			6.880.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	120 Orang	6.880.000,00
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			59.641.500,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	12 Laporan	59.641.500,00
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**2.019.789.500,00**
		1.Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	21 %	74.665.000,00
		Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	19 %	74.665.000,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
	Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1.185.266.000,00
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			48.240.000,00
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	48.240.000,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
	Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	834.523.500,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			26.425.000,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen	26.425.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	PUSKESMAS FEONDARI			**882.660.648,20**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**882.660.648,20**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**882.660.648,20**
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**70.878.145.815,28**
		10.Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	852.516.648,20
		11.Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	852.516.648,20
		12.Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	852.516.648,20
		13.Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	852.516.648,20
		14.Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	852.516.648,20
		15.Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	100 %	852.516.648,20
		16.Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	852.516.648,20
		17.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif	100 %	852.516.648,20
		18.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut	100 %	852.516.648,20
		19.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100 %	852.516.648,20
		1.Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	852.516.648,20
		20.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	100 %	852.516.648,20
		21.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100 %	852.516.648,20
		22.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tubercolosis	100 %	852.516.648,20
		23.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	100 %	852.516.648,20
		2.Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 Orang	852.516.648,20
		3.Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	852.516.648,20
		4.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	852.516.648,20
		5.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	852.516.648,20
		6.Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	852.516.648,20
		7.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	852.516.648,20
		8.Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	852.516.648,20
		999.Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	852.516.648,20
		999.Positifity rate Malaria	4.9 %	852.516.648,20
		9.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 (%)	852.516.648,20
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 %	852.516.648,20
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 %	852.516.648,20
		Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	852.516.648,20

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	17.725.200,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	834.791.448,20
		Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	852.516.648,20
		Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	852.516.648,20
		Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	852.516.648,20
		Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	834.791.448,20
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	17.725.200,00
		Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	852.516.648,20
		Positifity rate Malaria	4.9 %	852.516.648,20
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	852.516.648,20
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	852.516.648,20
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	852.516.648,20
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	852.516.648,20
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
	Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	591.507.500,00
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	4.876.434.850,00
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	983.727.910,00
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	-	32.936.000,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas			2.861.000,00
	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	2.861.000,00
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			0,00
	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	0,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			2.440.600,00
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	7 Unit	2.440.600,00
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			12.423.600,00
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	12.423.600,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	639.175.000,00
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	619.461.600,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1.047.466.000,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	38.500.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	-	5.580.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	9.324.355.900,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1.439.260.000,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	322.000.200,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	2.019.194.900,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	704.008.000,00
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	8.908.097.671,18
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	249.424.600,00
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1.283.718.500,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	2.167.418.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	311.498.000,00
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	316.061.300,00
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	6.870.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	3.400.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1.610.546.000,00
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	226.253.500,00
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	518.284.600,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	468.972.400,00
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	14.312.600,00
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	0,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			37.500.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	88 Orang	37.500.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	84 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	80 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	684 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			14.000.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1028 Orang	14.000.000,00
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			0,00
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3007 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	319 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1202 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			2.800.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	13 Orang	2.800.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			16.500.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	53 Orang	16.500.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	95 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			337.869.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	337.869.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			10.500.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	10.500.000,00
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			43.920.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	43.920.000,00
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			254.495.448,20
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	254.495.448,20
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	53 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			597.000,00
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	597.000,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			43.570.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	43.570.000,00
1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa			11.200.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50 Orang	11.200.000,00
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			61.840.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	12 Laporan	61.840.000,00
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	12 Laporan	0,00
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**2.019.789.500,00**
		1.Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	21 %	30.144.000,00
		Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	19 %	30.144.000,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
	Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1.185.266.000,00
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			14.700.000,00
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	14.700.000,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
	Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	834.523.500,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			15.444.000,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	15.444.000,00
	PUSKESMAS BOLA			**1.233.743.800,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.233.743.800,00**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**1.233.743.800,00**
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**70.878.145.815,28**
		10.Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.187.653.800,00
		11.Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	1.187.653.800,00
		12.Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	1.187.653.800,00
		13.Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	1.187.653.800,00
		14.Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	1.187.653.800,00
		15.Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	100 %	1.187.653.800,00
		16.Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	1.187.653.800,00
		17.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif	100 %	1.187.653.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		18.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut	100 %	1.187.653.800,00
		19.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100 %	1.187.653.800,00
		1.Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.187.653.800,00
		20.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	100 %	1.187.653.800,00
		21.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100 %	1.187.653.800,00
		22.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tubercolosis	100 %	1.187.653.800,00
		23.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	100 %	1.187.653.800,00
		2.Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 Orang	1.187.653.800,00
		3.Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.187.653.800,00
		4.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.187.653.800,00
		5.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.187.653.800,00
		6.Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.187.653.800,00
		7.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.187.653.800,00
		8.Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.187.653.800,00
		999.Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.187.653.800,00
		999.Positifity rate Malaria	4.9 %	1.187.653.800,00
		9.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 (%)	1.187.653.800,00
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 %	1.187.653.800,00
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 %	1.187.653.800,00
		Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.187.653.800,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	130.302.600,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	1.057.351.200,00
		Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.187.653.800,00
		Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.187.653.800,00
		Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.187.653.800,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	1.057.351.200,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	130.302.600,00
		Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.187.653.800,00
		Positifity rate Malaria	4.9 %	1.187.653.800,00
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.187.653.800,00
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.187.653.800,00
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.187.653.800,00
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.187.653.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
	Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	591.507.500,00
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	4.876.434.850,00
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	983.727.910,00
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	-	32.936.000,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas			38.896.900,00
	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	38.896.900,00
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			0,00
	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	0,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			30.036.300,00
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	30.036.300,00
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			61.369.400,00
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	61.369.400,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	639.175.000,00
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	619.461.600,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1.047.466.000,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	38.500.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	-	5.580.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	9.324.355.900,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1.439.260.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	322.000.200,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	2.019.194.900,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	704.008.000,00
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	8.908.097.671,18
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	249.424.600,00
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1.283.718.500,00
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	0,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	2.167.418.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	311.498.000,00
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	316.061.300,00
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	6.870.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	3.400.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1.610.546.000,00
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	226.253.500,00
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	518.284.600,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	468.972.400,00
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	14.312.600,00
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	0,00
		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	809.880.000,00
		Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-	0,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			35.700.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	118 Orang	35.700.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	124 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	467 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			14.700.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1894 Orang	14.700.000,00
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			0,00
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4577 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	760 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3094 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	93 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			12.600.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	51 Orang	12.600.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			15.680.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	65 Orang	15.680.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	145 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			463.000.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Dokumen	463.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			8.400.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	8.400.000,00
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			88.690.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	88.690.000,00
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	43 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			297.490.200,00
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	297.490.200,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			0,00
	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			0,00
	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	145 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			420.000,00
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	420.000,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	470 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			13.720.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	13.720.000,00
1.02.02.2.02.0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			0,00
	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	1 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa			6.580.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	51 Orang	6.580.000,00
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			100.371.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	1 Laporan	100.371.000,00
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	1 Laporan	0,00
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**2.019.789.500,00**
		1.Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	21 %	46.090.000,00
		Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	19 %	46.090.000,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
	Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1.185.266.000,00
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			2.240.000,00
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	2.240.000,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
	Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	834.523.500,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			43.850.000,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen	43.850.000,00
	PUSKESMAS HABIBOLA			**1.125.213.256,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.125.213.256,00**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**1.125.213.256,00**
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**70.878.145.815,28**
		10.Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.058.373.256,00
		11.Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	1.058.373.256,00
		12.Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	1.058.373.256,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		13.Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	1.058.373.256,00
		14.Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	1.058.373.256,00
		15.Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	100 %	1.058.373.256,00
		16.Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	1.058.373.256,00
		17.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif	100 %	1.058.373.256,00
		18.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut	100 %	1.058.373.256,00
		19.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100 %	1.058.373.256,00
		1.Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.058.373.256,00
		20.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	100 %	1.058.373.256,00
		21.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100 %	1.058.373.256,00
		22.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tubercolosis	100 %	1.058.373.256,00
		23.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	100 %	1.058.373.256,00
		2.Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 Orang	1.058.373.256,00
		3.Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.058.373.256,00
		4.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.058.373.256,00
		5.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.058.373.256,00
		6.Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.058.373.256,00
		7.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.058.373.256,00
		8.Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.058.373.256,00
		999.Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.058.373.256,00
		999.Positifity rate Malaria	4.9 %	1.058.373.256,00
		9.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 (%)	1.058.373.256,00
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 %	1.058.373.256,00
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 %	1.058.373.256,00
		Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.058.373.256,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	128.778.300,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	929.594.956,00
		Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.058.373.256,00
		Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.058.373.256,00
		Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.058.373.256,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	929.594.956,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	128.778.300,00
		Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.058.373.256,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Positifity rate Malaria	4.9 %	1.058.373.256,00
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.058.373.256,00
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.058.373.256,00
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.058.373.256,00
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.058.373.256,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
	Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	591.507.500,00
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	4.876.434.850,00
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	983.727.910,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas			51.259.100,00
	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	51.259.100,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			6.015.000,00
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	11 Unit	6.015.000,00
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			71.504.200,00
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	71.504.200,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	639.175.000,00
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	619.461.600,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1.047.466.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	-	5.580.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	9.324.355.900,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1.439.260.000,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	322.000.200,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	2.019.194.900,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	704.008.000,00
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	8.908.097.671,18
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	249.424.600,00
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1.283.718.500,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	2.167.418.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	311.498.000,00
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	316.061.300,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	3.400.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1.610.546.000,00
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	226.253.500,00
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	518.284.600,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	468.972.400,00
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	14.312.600,00
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	0,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			18.200.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	117 Orang	18.200.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	116 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	115 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	444 Orang	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			46.320.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1167 Orang	46.320.000,00
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			0,00
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3929 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	424 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1626 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	49 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			12.600.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	23 Orang	12.600.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			14.000.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	61 Orang	14.000.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	125 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			350.170.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	350.170.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			12.600.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	12.600.000,00
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			40.750.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	40.750.000,00
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			302.606.956,00
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	302.606.956,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	50 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.028.000,00
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.028.000,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			14.700.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	14.700.000,00
1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa			16.800.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	16.800.000,00
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	1 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			112.420.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	1 Laporan	112.420.000,00
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**2.019.789.500,00**
		1.Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	21 %	54.240.000,00
		Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	19 %	54.240.000,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
	Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1.185.266.000,00
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			15.120.000,00
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	15.120.000,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	834.523.500,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			39.120.000,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	39.120.000,00
	PUSKESMAS MAPITARA			**1.043.974.140,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.043.974.140,00**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**1.043.974.140,00**
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**70.878.145.815,28**
		10.Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.005.469.140,00
		11.Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	1.005.469.140,00
		12.Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	1.005.469.140,00
		13.Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	1.005.469.140,00
		14.Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	1.005.469.140,00
		15.Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	100 %	1.005.469.140,00
		16.Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	1.005.469.140,00
		17.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif	100 %	1.005.469.140,00
		18.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut	100 %	1.005.469.140,00
		19.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100 %	1.005.469.140,00
		1.Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.005.469.140,00
		20.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	100 %	1.005.469.140,00
		21.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100 %	1.005.469.140,00
		22.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tubercolosis	100 %	1.005.469.140,00
		23.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	100 %	1.005.469.140,00
		2.Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 Orang	1.005.469.140,00
		3.Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.005.469.140,00
		4.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.005.469.140,00
		5.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.005.469.140,00
		6.Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.005.469.140,00
		7.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.005.469.140,00
		8.Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.005.469.140,00
		999.Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.005.469.140,00
		999.Positifity rate Malaria	4.9 %	1.005.469.140,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		9.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 (%)	1.005.469.140,00
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 %	1.005.469.140,00
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 %	1.005.469.140,00
		Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.005.469.140,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	58.633.200,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	946.835.940,00
		Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.005.469.140,00
		Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.005.469.140,00
		Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.005.469.140,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	946.835.940,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	58.633.200,00
		Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.005.469.140,00
		Positifity rate Malaria	4.9 %	1.005.469.140,00
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.005.469.140,00
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.005.469.140,00
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.005.469.140,00
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.005.469.140,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
	Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	591.507.500,00
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	4.876.434.850,00
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	983.727.910,00
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	-	32.936.000,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas			9.069.500,00
	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	9.069.500,00
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			15.705.800,00
	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	15.705.800,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			12.097.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	31 Unit	12.097.500,00
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			21.760.400,00
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	21.760.400,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	639.175.000,00
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	619.461.600,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1.047.466.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	-	5.580.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	9.324.355.900,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1.439.260.000,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	322.000.200,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	2.019.194.900,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	704.008.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	-	11.150.000,00
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	8.908.097.671,18
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	249.424.600,00
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1.283.718.500,00
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	0,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	2.167.418.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	311.498.000,00
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	316.061.300,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	6.870.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	3.400.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1.610.546.000,00
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	226.253.500,00
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	518.284.600,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	468.972.400,00
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	14.312.600,00
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	0,00
		Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-	0,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			58.800.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	119 Orang	58.800.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	111 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	98 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	467 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			13.160.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1170 Orang	13.160.000,00
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			0,00
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4577 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	470 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1840 Orang	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	56 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			4.640.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	11 Orang	4.640.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			9.860.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	66 Orang	9.860.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	131 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	0 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			353.388.700,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	353.388.700,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			6.460.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	6.460.000,00
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			24.492.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	24.492.000,00
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			318.374.240,00
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	318.374.240,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			0,00
	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	4577 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			373.000,00
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	373.000,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			33.690.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	33.690.000,00
1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	1 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa			3.900.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	3.900.000,00
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	1 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			119.698.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	1 Laporan	119.698.000,00
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**2.019.789.500,00**
		1.Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	21 %	38.505.000,00
		Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	19 %	38.505.000,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
	Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1.185.266.000,00
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			18.825.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	18.825.000,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
	Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	834.523.500,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			19.680.000,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	19.680.000,00
	PUSKESMAS TELUK			**1.208.757.292,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.208.757.292,00**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**1.208.757.292,00**
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**70.878.145.815,28**
		10.Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.166.597.292,00
		11.Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	1.166.597.292,00
		12.Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	1.166.597.292,00
		13.Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	1.166.597.292,00
		14.Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	1.166.597.292,00
		15.Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	100 %	1.166.597.292,00
		16.Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	1.166.597.292,00
		17.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif	100 %	1.166.597.292,00
		18.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut	100 %	1.166.597.292,00
		19.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100 %	1.166.597.292,00
		1.Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.166.597.292,00
		20.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	100 %	1.166.597.292,00
		21.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100 %	1.166.597.292,00
		22.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tubercolosis	100 %	1.166.597.292,00
		23.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	100 %	1.166.597.292,00
		2.Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 Orang	1.166.597.292,00
		3.Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.166.597.292,00
		4.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.166.597.292,00
		5.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.166.597.292,00
		6.Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.166.597.292,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		7.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.166.597.292,00
		8.Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.166.597.292,00
		999.Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.166.597.292,00
		999.Positifity rate Malaria	4.9 %	1.166.597.292,00
		9.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 (%)	1.166.597.292,00
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 %	1.166.597.292,00
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 %	1.166.597.292,00
		Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.166.597.292,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	123.221.200,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	1.043.376.092,00
		Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.166.597.292,00
		Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.166.597.292,00
		Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.166.597.292,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	1.043.376.092,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	123.221.200,00
		Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.166.597.292,00
		Positifity rate Malaria	4.9 %	1.166.597.292,00
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.166.597.292,00
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.166.597.292,00
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.166.597.292,00
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.166.597.292,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
	Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	591.507.500,00
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	4.876.434.850,00
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	983.727.910,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas			52.069.800,00
	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	36 Unit	52.069.800,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			3.185.400,00
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	8 Unit	3.185.400,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			67.966.000,00
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	67.966.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	639.175.000,00
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	619.461.600,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1.047.466.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	9.324.355.900,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1.439.260.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	2.019.194.900,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	704.008.000,00
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	8.908.097.671,18
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	249.424.600,00
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1.283.718.500,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	2.167.418.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	311.498.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	3.400.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1.610.546.000,00
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	226.253.500,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	468.972.400,00
		Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-	0,00
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	14.312.600,00
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-	0,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			20.000.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	187 Orang	20.000.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	184 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	181 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	976 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			7.280.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2156 Orang	7.280.000,00
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			0,00
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7152 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	733 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2780 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	83 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			58.320.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	36 Orang	58.320.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			19.740.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	128 Orang	19.740.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	204 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			349.749.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	349.749.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			4.060.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen	4.060.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			55.479.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4 Dokumen	55.479.000,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			340.898.092,00
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	340.898.092,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.430.000,00
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.430.000,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			55.460.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	9 Dokumen	55.460.000,00
1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	1 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa			58.080.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	40 Orang	58.080.000,00
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			72.880.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	10 Laporan	72.880.000,00
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	1 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0059	Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Napza di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah			0,00
	Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	2156 Orang	0,00
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**2.019.789.500,00**
		1.Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	21 %	42.160.000,00
		Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	19 %	42.160.000,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
	Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1.185.266.000,00
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			21.840.000,00
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	21.840.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
	Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	834.523.500,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			20.320.000,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	20.320.000,00
	PUSKESMAS PALUE			**1.046.766.200,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.046.766.200,00**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**1.046.766.200,00**
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**70.878.145.815,28**
		10.Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.005.514.200,00
		11.Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	1.005.514.200,00
		12.Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	1.005.514.200,00
		13.Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	1.005.514.200,00
		14.Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	1.005.514.200,00
		15.Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	100 %	1.005.514.200,00
		16.Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	1.005.514.200,00
		17.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif	100 %	1.005.514.200,00
		18.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut	100 %	1.005.514.200,00
		19.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100 %	1.005.514.200,00
		1.Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.005.514.200,00
		20.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	100 %	1.005.514.200,00
		21.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100 %	1.005.514.200,00
		22.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tubercolosis	100 %	1.005.514.200,00
		23.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	100 %	1.005.514.200,00
		2.Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 Orang	1.005.514.200,00
		3.Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.005.514.200,00
		4.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.005.514.200,00
		5.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.005.514.200,00
		6.Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.005.514.200,00
		7.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.005.514.200,00
		8.Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.005.514.200,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		999.Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.005.514.200,00
		999.Positifity rate Malaria	4.9 %	1.005.514.200,00
		9.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 (%)	1.005.514.200,00
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 %	1.005.514.200,00
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 %	1.005.514.200,00
		Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.005.514.200,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	70.276.200,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	935.238.000,00
		Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.005.514.200,00
		Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.005.514.200,00
		Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.005.514.200,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	935.238.000,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	70.276.200,00
		Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.005.514.200,00
		Positifity rate Malaria	4.9 %	1.005.514.200,00
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.005.514.200,00
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.005.514.200,00
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.005.514.200,00
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.005.514.200,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
	Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	591.507.500,00
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	4.876.434.850,00
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	983.727.910,00
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	-	32.936.000,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas			28.724.500,00
	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	8 Unit	28.724.500,00
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			0,00
	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			11.305.300,00
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	18 Unit	11.305.300,00
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			30.246.400,00
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	30.246.400,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	639.175.000,00
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	619.461.600,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1.047.466.000,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	38.500.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	-	5.580.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	9.324.355.900,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1.439.260.000,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	2.019.194.900,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	704.008.000,00
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	8.908.097.671,18
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	249.424.600,00
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1.283.718.500,00
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	0,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	2.167.418.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	311.498.000,00
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	316.061.300,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	3.400.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1.610.546.000,00
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	226.253.500,00
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	518.284.600,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	468.972.400,00
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	14.312.600,00
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			60.680.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	52 Orang	60.680.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			19.040.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	815 Orang	19.040.000,00
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			0,00
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			20.202.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	6 Orang	20.202.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			9.880.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	72 Orang	9.880.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			344.160.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7 Dokumen	344.160.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			26.600.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	26.600.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			20.262.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8 Dokumen	20.262.000,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			286.370.000,00
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	11 Dokumen	286.370.000,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			0,00
	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			420.000,00
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 Dokumen	420.000,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	0 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			34.260.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	9 Dokumen	34.260.000,00
1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa			9.960.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	6 Orang	9.960.000,00
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			103.404.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	33 Laporan	103.404.000,00
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	12 Laporan	0,00
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**2.019.789.500,00**
		1.Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	21 %	41.252.000,00
		Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	19 %	41.252.000,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1.185.266.000,00
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			27.960.000,00
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	5 Dokumen	27.960.000,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
	Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	834.523.500,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			13.292.000,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	13.292.000,00
	PUSKESMAS TUANGGEO			**1.014.536.900,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.014.536.900,00**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**1.014.536.900,00**
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**70.878.145.815,28**
		10.Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	948.584.900,00
		11.Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	948.584.900,00
		12.Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	948.584.900,00
		13.Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	948.584.900,00
		14.Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	948.584.900,00
		15.Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	100 %	948.584.900,00
		16.Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	948.584.900,00
		17.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif	100 %	948.584.900,00
		18.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut	100 %	948.584.900,00
		19.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100 %	948.584.900,00
		1.Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	948.584.900,00
		20.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	100 %	948.584.900,00
		21.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100 %	948.584.900,00
		22.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tubercolosis	100 %	948.584.900,00
		23.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	100 %	948.584.900,00
		2.Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 Orang	948.584.900,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		3.Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	948.584.900,00
		4.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	948.584.900,00
		5.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	948.584.900,00
		6.Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	948.584.900,00
		7.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	948.584.900,00
		8.Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	948.584.900,00
		999.Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	948.584.900,00
		999.Positifity rate Malaria	4.9 %	948.584.900,00
		9.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 (%)	948.584.900,00
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 %	948.584.900,00
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 %	0,00
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 %	948.584.900,00
		Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	948.584.900,00
		Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	0,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	43.991.200,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	904.593.700,00
		Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	948.584.900,00
		Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	948.584.900,00
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	0,00
		Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	948.584.900,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	904.593.700,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	43.991.200,00
		Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	948.584.900,00
		Positifity rate Malaria	4.9 %	948.584.900,00
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	948.584.900,00
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	948.584.900,00
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	948.584.900,00
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	0,00
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	948.584.900,00
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	0,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
	Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	131.537.300,00
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	591.507.500,00
		Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	-	300.662.400,00
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	-	31.160.000,00
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	-	0,00
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	4.876.434.850,00
		Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	-	0,00
		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	-	34.177.000,00
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	983.727.910,00
		Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	14.602.500,00
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	-	32.936.000,00
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas			0,00
	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	0,00
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			0,00
	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	0,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas			3.032.700,00
	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	3.032.700,00
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			0,00
	Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	0,00
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			0,00
	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	0,00
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			0,00
	Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	0,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			11.533.500,00
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	13 Unit	11.533.500,00
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi			0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	1 Unit	0,00
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			0,00
	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	0,00
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			29.425.000,00
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	29.425.000,00
1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			0,00
	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1 Keluarga	0,00
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			0,00
	Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	0,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	639.175.000,00
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	619.461.600,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	29.543.452.413,10
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1.047.466.000,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	38.500.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	-	5.580.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	9.324.355.900,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1.439.260.000,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	322.000.200,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	2.019.194.900,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	704.008.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	-	11.150.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1.072.691.671,00
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	8.908.097.671,18
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	-	0,00
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	249.424.600,00
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1.283.718.500,00
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	0,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	2.167.418.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	311.498.000,00
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	316.061.300,00
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	6.870.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	3.400.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1.610.546.000,00
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	226.253.500,00
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	518.284.600,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	468.972.400,00
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	14.312.600,00
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	-	11.160.000,00
		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	809.880.000,00
		Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	-	0,00
		Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-	0,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			70.560.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	58 Orang	70.560.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	53 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	46 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	316 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			7.000.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	644 Orang	7.000.000,00
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			0,00
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2955 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	336 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1324 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			14.560.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	13 Orang	14.560.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			21.074.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	56 Orang	21.074.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	66 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			355.542.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	9 Dokumen	355.542.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			9.800.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen	9.800.000,00
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			53.112.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11 Dokumen	53.112.000,00
1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			272.445.700,00
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	272.445.700,00
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			0,00
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			0,00
	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	0,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			0,00
	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			0,00
	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			0,00
	Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	0,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok			0,00
	Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	1 Tatanan	0,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			22.480.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	9 Dokumen	22.480.000,00
1.02.02.2.02.0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			0,00
	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	0,00
1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	1 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa			6.800.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	25 Orang	6.800.000,00
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			71.220.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	12 Laporan	71.220.000,00
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	1 Laporan	0,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			83.500.000,00
	Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			83.500.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	83.500.000,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			93.927.800,00
	Meningkatnya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			93.927.800,00
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	-	93.927.800,00
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			0,00
	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	0,00
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**2.019.789.500,00**
		1.Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	21 %	65.952.000,00
		Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	19 %	65.952.000,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
	Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1.185.266.000,00
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			27.270.000,00
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	27.270.000,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
	Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	834.523.500,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			38.682.000,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	38.682.000,00
	PUSKESMAS WAIPARE			**1.322.344.450,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.322.344.450,00**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**1.322.344.450,00**
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**70.878.145.815,28**
		10.Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.269.476.450,00
		11.Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	1.269.476.450,00
		12.Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	1.269.476.450,00
		13.Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	1.269.476.450,00
		14.Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	1.269.476.450,00
		15.Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	100 %	1.269.476.450,00
		16.Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	1.269.476.450,00
		17.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif	100 %	1.269.476.450,00
		18.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut	100 %	1.269.476.450,00
		19.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100 %	1.269.476.450,00
		1.Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.269.476.450,00
		20.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	100 %	1.269.476.450,00
		21.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100 %	1.269.476.450,00
		22.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tubercolosis	100 %	1.269.476.450,00
		23.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	100 %	1.269.476.450,00
		2.Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 Orang	1.269.476.450,00
		3.Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.269.476.450,00
		4.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.269.476.450,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		5.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.269.476.450,00
		6.Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.269.476.450,00
		7.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.269.476.450,00
		8.Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.269.476.450,00
		999.Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.269.476.450,00
		999.Positifity rate Malaria	4.9 %	1.269.476.450,00
		9.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 (%)	1.269.476.450,00
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 %	1.269.476.450,00
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 %	1.269.476.450,00
		Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.269.476.450,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	234.652.500,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	1.034.823.950,00
		Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.269.476.450,00
		Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.269.476.450,00
		Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.269.476.450,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	1.034.823.950,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	234.652.500,00
		Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.269.476.450,00
		Positifity rate Malaria	4.9 %	1.269.476.450,00
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.269.476.450,00
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.269.476.450,00
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.269.476.450,00
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.269.476.450,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
	Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	591.507.500,00
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	4.876.434.850,00
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	983.727.910,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas			61.490.000,00
	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	61.490.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			30.736.000,00
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	39 Unit	30.736.000,00
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			142.426.500,00
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	142.426.500,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	639.175.000,00
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	619.461.600,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	29.543.452.413,10
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1.047.466.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	-	5.580.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	9.324.355.900,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1.439.260.000,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	322.000.200,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	2.019.194.900,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	704.008.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	-	11.150.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	-	0,00
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1.072.691.671,00
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	8.908.097.671,18
		Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-	0,00
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	249.424.600,00
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1.283.718.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	0,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	2.167.418.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	311.498.000,00
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	316.061.300,00
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	6.870.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	3.400.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1.610.546.000,00
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	226.253.500,00
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	518.284.600,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	468.972.400,00
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	14.312.600,00
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	0,00
		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	-	11.160.000,00
		Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	-	0,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			19.520.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	260 Orang	19.520.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	258 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	253 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1174 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			18.950.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3204 Orang	18.950.000,00
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			0,00
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11804 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1275 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5056 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	151 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			6.160.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	41 Orang	6.160.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			14.490.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	255 Orang	14.490.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	328 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			393.429.500,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	393.429.500,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			12.740.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	12.740.000,00
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			71.859.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	71.859.500,00
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3204 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			0,00
	Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan			0,00
	Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	1 Unit	0,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			389.674.950,00
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	389.674.950,00
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			0,00
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			0,00
	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			0,00
	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			0,00
	Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	0,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	255 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	328 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok			0,00
	Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	40 Tatanan	0,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			480.000,00
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	480.000,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			25.620.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	25.620.000,00
1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa			2.520.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	2.520.000,00
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	1 Laporan	0,00
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			79.380.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	1 Laporan	79.380.000,00
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**2.019.789.500,00**
		1.Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	21 %	52.868.000,00
		Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	19 %	52.868.000,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
	Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1.185.266.000,00
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			21.228.000,00
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	21.228.000,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
	Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	834.523.500,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			31.640.000,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	31.640.000,00
	PUSKESMAS KEWAPANTE			**1.177.851.800,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.177.851.800,00**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**1.177.851.800,00**
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**70.878.145.815,28**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		10.Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.126.411.800,00
		11.Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	1.126.411.800,00
		12.Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	1.126.411.800,00
		13.Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	1.126.411.800,00
		14.Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	1.126.411.800,00
		15.Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	100 %	1.126.411.800,00
		16.Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	1.126.411.800,00
		17.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif	100 %	1.126.411.800,00
		18.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut	100 %	1.126.411.800,00
		19.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100 %	1.126.411.800,00
		1.Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.126.411.800,00
		20.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	100 %	1.126.411.800,00
		21.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100 %	1.126.411.800,00
		22.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tubercolosis	100 %	1.126.411.800,00
		23.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	100 %	1.126.411.800,00
		2.Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 Orang	1.126.411.800,00
		3.Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.126.411.800,00
		4.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.126.411.800,00
		5.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.126.411.800,00
		6.Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.126.411.800,00
		7.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.126.411.800,00
		8.Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.126.411.800,00
		999.Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.126.411.800,00
		999.Positifity rate Malaria	4.9 %	1.126.411.800,00
		9.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 (%)	1.126.411.800,00
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 %	1.126.411.800,00
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 %	1.126.411.800,00
		Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	1.126.411.800,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	210.587.600,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	915.824.200,00
		Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	1.126.411.800,00
		Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	1.126.411.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	1.126.411.800,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	915.824.200,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	210.587.600,00
		Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	1.126.411.800,00
		Positifity rate Malaria	4.9 %	1.126.411.800,00
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	1.126.411.800,00
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	1.126.411.800,00
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	1.126.411.800,00
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	1.126.411.800,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
	Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	591.507.500,00
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	4.876.434.850,00
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	983.727.910,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas			92.900.900,00
	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	69 Unit	92.900.900,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			11.016.600,00
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	47 Unit	11.016.600,00
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			106.670.100,00
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	106.670.100,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	639.175.000,00
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	619.461.600,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1.047.466.000,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	38.500.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	9.324.355.900,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1.439.260.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	2.019.194.900,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	704.008.000,00
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	8.908.097.671,18
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	249.424.600,00
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1.283.718.500,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	2.167.418.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	311.498.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	3.400.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1.610.546.000,00
		Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	226.253.500,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	468.972.400,00
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	14.312.600,00
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			43.200.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	245 Orang	43.200.000,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	239 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	226 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			0,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1151 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			35.925.000,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2630 Orang	35.925.000,00
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			0,00
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	600 Orang	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	150 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			22.680.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	90 Orang	22.680.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			12.950.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	230 Orang	12.950.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50 Orang	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			357.148.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	357.148.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			8.540.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	8.540.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			33.034.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11 Dokumen	33.034.000,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			243.435.200,00
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	243.435.200,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			286.000,00
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 Dokumen	286.000,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			0,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			21.146.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	7 Dokumen	21.146.000,00
1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa			5.320.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	700 Orang	5.320.000,00
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			132.160.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	8 Laporan	132.160.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	0 Laporan	0,00
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**2.019.789.500,00**
		1.Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	21 %	51.440.000,00
		Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	19 %	51.440.000,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
	Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1.185.266.000,00
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			0,00
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	8 Dokumen	0,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
	Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	834.523.500,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			51.440.000,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	51.440.000,00
	DINAS KESEHATAN			**138.782.941.341,10**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**138.782.941.341,10**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**138.782.941.341,10**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**92.198.777.857,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	92.198.777.857,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.1 Angka	92.198.777.857,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	92.198.777.857,00
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			91.165.100,00
	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			91.165.100,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	31.707.100,00
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	59.458.000,00
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			31.707.100,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	31.707.100,00
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			59.458.000,00
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	59.458.000,00
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			91.413.901.146,00
	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			91.413.901.146,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	552.750.000,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	90.861.151.146,00
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			90.861.151.146,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1750 Orang/bulan	90.861.151.146,00
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			552.750.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	552.750.000,00
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			29.720.600,00
	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			29.720.600,00
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	10.795.800,00
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	18.924.800,00
1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			18.924.800,00
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	18.924.800,00
1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			10.795.800,00
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	10.795.800,00
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			168.102.800,00
	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah			168.102.800,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	117.973.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	25.000.000,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	4.474.900,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	20.654.900,00
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.474.900,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.474.900,00
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.654.900,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.654.900,00
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			25.000.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	25.000.000,00
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			117.973.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	117.973.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			128.114.311,00
	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			128.114.311,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	122.764.311,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	5.350.000,00
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			122.764.311,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	122.764.311,00
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.350.000,00
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	5.350.000,00
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			367.773.900,00
	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			367.773.900,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	367.773.900,00
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			367.773.900,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit	367.773.900,00
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**70.878.145.815,28**
		10.Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	41.956.803.684,10
		11.Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	41.956.803.684,10
		12.Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	41.956.803.684,10
		13.Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	41.956.803.684,10
		14.Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	41.956.803.684,10
		15.Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	100 %	41.956.803.684,10
		16.Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	41.956.803.684,10
		17.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif	100 %	41.956.803.684,10
		18.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut	100 %	41.956.803.684,10
		19.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100 %	41.956.803.684,10
		1.Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	41.956.803.684,10
		20.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	100 %	41.956.803.684,10
		21.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100 %	41.956.803.684,10
		22.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tubercolosis	100 %	41.956.803.684,10
		23.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	100 %	41.956.803.684,10
		2.Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 Orang	41.956.803.684,10

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		3.Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	41.956.803.684,10
		4.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	41.956.803.684,10
		5.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	41.956.803.684,10
		6.Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	41.956.803.684,10
		7.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	41.956.803.684,10
		8.Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	41.956.803.684,10
		999.Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	41.956.803.684,10
		999.Positifity rate Malaria	4.9 %	41.956.803.684,10
		9.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 (%)	41.956.803.684,10
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 %	41.779.375.884,10
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 %	83.500.000,00
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 %	41.862.875.884,10
		Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	41.779.375.884,10
		Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	83.500.000,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	4.094.683.800,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	37.768.192.084,10
		Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	41.862.875.884,10
		Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	41.862.875.884,10
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	83.500.000,00
		Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	41.862.875.884,10
		Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	37.768.192.084,10
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	4.011.183.800,00
		Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	41.862.875.884,10
		Positifity rate Malaria	4.9 %	41.862.875.884,10
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	41.862.875.884,10
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	41.862.875.884,10
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	41.779.375.884,10
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	83.500.000,00
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	41.779.375.884,10
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	83.500.000,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00
	Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.996.745.460,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	131.537.300,00
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	591.507.500,00
		Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	-	300.662.400,00
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	-	31.160.000,00
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	4.876.434.850,00
		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	-	34.177.000,00
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	983.727.910,00
		Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	14.602.500,00
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas			34.177.000,00
	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2 Unit	34.177.000,00
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			31.160.000,00
	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	10 Unit	31.160.000,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas			174.230.200,00
	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	25 Unit	174.230.200,00
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			14.602.500,00
	Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	5 Unit	14.602.500,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			236.264.200,00
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	100 Unit	236.264.200,00
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			131.537.300,00
	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	150 Unit	131.537.300,00
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			3.088.550.200,00
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	3.088.550.200,00
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			300.662.400,00
	Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	200 Paket	300.662.400,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	619.461.600,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	29.543.452.413,10
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	-	5.580.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	9.324.355.900,00
		Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	-	11.779.700,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1.439.260.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	322.000.200,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	2.019.194.900,00
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	704.008.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	-	11.150.000,00
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1.072.691.671,00
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	8.908.097.671,18
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	249.424.600,00
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1.283.718.500,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	2.167.418.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	311.498.000,00
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	316.061.300,00
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	6.870.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	3.400.000,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1.610.546.000,00
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	518.284.600,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	468.972.400,00
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	14.312.600,00
		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	-	11.160.000,00
		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	809.880.000,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			134.048.500,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4350 Orang	134.048.500,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			249.424.600,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4290 Orang	249.424.600,00
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			619.461.600,00
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3963 Orang	619.461.600,00
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			14.312.600,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10220 Orang	14.312.600,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			6.610.400,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1094 Orang	6.610.400,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			1.210.495.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5446 Orang	1.210.495.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.400.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6466 Orang	3.400.000,00
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			5.580.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	5.580.000,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			13.440.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	13.440.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.165.730.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	1.165.730.000,00
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			322.000.200,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	322.000.200,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			848.770.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	848.770.000,00
1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			11.150.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	12 Dokumen	11.150.000,00
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			29.543.452.413,10
	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	26 Dokumen	29.543.452.413,10
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			0,00
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	0,00
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1.072.691.671,00
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	1.072.691.671,00
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			11.160.000,00
	Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	11.160.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			6.870.000,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	560 Orang	6.870.000,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			316.061.300,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	658 Orang	316.061.300,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			506.884.600,00
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	84 Orang	506.884.600,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			684.990.000,00
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	10 Dokumen	684.990.000,00
1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji			11.779.700,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	5 Dokumen	11.779.700,00
1.02.02.2.02.0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			809.880.000,00
	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	5 Paket	809.880.000,00
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			199.999.500,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	12 Laporan	199.999.500,00
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	12 Laporan	0,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			83.500.000,00
	Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			83.500.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	83.500.000,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			83.500.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	83.500.000,00
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			93.927.800,00
	Meningkatnya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			93.927.800,00
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	-	93.927.800,00
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			93.927.800,00
	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	27 Unit	93.927.800,00
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**3.353.871.200,00**
		2.Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar	30 Persentase	3.353.871.200,00
		3.Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	100 Persentase	3.353.871.200,00
		999.Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terhadap Populasi	5.4 Rasio	3.353.871.200,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar	30 %	3.353.871.200,00
		Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	100 %	3.353.871.200,00
		Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terhadap Populasi	5.4 Rasio	3.353.871.200,00
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			2.104.328.100,00
	Meningkatnya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			2.104.328.100,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	452.680.000,00
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-	1.651.648.100,00
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			452.680.000,00
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4 Dokumen	452.680.000,00
1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			1.651.648.100,00
	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	675 Orang	1.651.648.100,00
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.249.543.100,00
	Meningkatnya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.249.543.100,00
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	-	1.249.543.100,00
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.249.543.100,00
	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	200 Orang	1.249.543.100,00
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			**544.248.600,00**
		1.Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	75 %	544.248.600,00
		2.Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	100 %	544.248.600,00
		Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	100 %	544.248.600,00
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	75 %	544.248.600,00
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			136.397.700,00
	Meningkatnya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			136.397.700,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	136.397.700,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			136.397.700,00
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	47 Dokumen	136.397.700,00
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			96.654.000,00
	Meningkatnya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			96.654.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	96.654.000,00
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			96.654.000,00
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	30 Dokumen	96.654.000,00
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			311.196.900,00
	Meningkatnya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			311.196.900,00
		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	-	311.196.900,00
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			311.196.900,00
	Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	145 Unit	311.196.900,00
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**2.019.789.500,00**
		1.Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	21 %	729.240.000,00
		Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	19 %	729.240.000,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
	Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.185.266.000,00
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1.185.266.000,00
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			515.240.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	515.240.000,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
	Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			834.523.500,00
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	834.523.500,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			214.000.000,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	214.000.000,00
	PUSKESMAS KOJAGETE			**250.000.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**250.000.000,00**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**250.000.000,00**
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**70.878.145.815,28**
		10.Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	250.000.000,00
		11.Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	250.000.000,00
		12.Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	250.000.000,00
		13.Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	250.000.000,00
		14.Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	250.000.000,00
		15.Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	100 %	250.000.000,00
		16.Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	250.000.000,00
		17.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif	100 %	250.000.000,00
		18.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut	100 %	250.000.000,00
		19.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100 %	250.000.000,00
		1.Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	250.000.000,00
		20.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	100 %	250.000.000,00
		21.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100 %	250.000.000,00
		22.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tubercolosis	100 %	250.000.000,00
		23.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	100 %	250.000.000,00
		2.Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 Orang	250.000.000,00
		3.Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	250.000.000,00
		4.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	250.000.000,00
		5.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	250.000.000,00
		6.Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	250.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		7.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	250.000.000,00
		8.Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	250.000.000,00
		999.Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	250.000.000,00
		999.Positifity rate Malaria	4.9 %	250.000.000,00
		9.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 (%)	250.000.000,00
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 %	250.000.000,00
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 %	250.000.000,00
		Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	250.000.000,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	250.000.000,00
		Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	250.000.000,00
		Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	250.000.000,00
		Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	250.000.000,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	250.000.000,00
		Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	250.000.000,00
		Positifity rate Malaria	4.9 %	250.000.000,00
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	250.000.000,00
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	250.000.000,00
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	250.000.000,00
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	250.000.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	8.908.097.671,18
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			250.000.000,00
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	250.000.000,00
	PUSKESMAS WUALADU			**252.463.700,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**252.463.700,00**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**252.463.700,00**
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**70.878.145.815,28**
		10.Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	252.463.700,00
		11.Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	252.463.700,00
		12.Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	252.463.700,00
		13.Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	252.463.700,00
		14.Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	252.463.700,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		15.Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	100 %	252.463.700,00
		16.Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	252.463.700,00
		17.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif	100 %	252.463.700,00
		18.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut	100 %	252.463.700,00
		19.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100 %	252.463.700,00
		1.Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	252.463.700,00
		20.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	100 %	252.463.700,00
		21.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100 %	252.463.700,00
		22.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tubercolosis	100 %	252.463.700,00
		23.Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	100 %	252.463.700,00
		2.Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 Orang	252.463.700,00
		3.Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	252.463.700,00
		4.Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	252.463.700,00
		5.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	252.463.700,00
		6.Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	252.463.700,00
		7.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	252.463.700,00
		8.Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	252.463.700,00
		999.Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	252.463.700,00
		999.Positifity rate Malaria	4.9 %	252.463.700,00
		9.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 (%)	252.463.700,00
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.97 %	252.463.700,00
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90 %	252.463.700,00
		Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421 Angka	252.463.700,00
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33 Angka	252.463.700,00
		Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65 %	252.463.700,00
		Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	30 %	252.463.700,00
		Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	89 %	252.463.700,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100 %	252.463.700,00
		Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0.9 %	252.463.700,00
		Positifity rate Malaria	4.9 %	252.463.700,00
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.4 %	252.463.700,00
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %	252.463.700,00
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	60 %	252.463.700,00
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	79 %	252.463.700,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.703.972.555,28
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	8.908.097.671,18
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			252.463.700,00
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	252.463.700,00
	RSUD dr. T. C. HILLERS MAUMERE			**123.941.873.960,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**123.941.873.960,00**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**123.941.873.960,00**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**58.941.873.960,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	58.941.873.960,00
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	511.546.800,00
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	6288 Orang/bulan	58.430.327.160,00
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			58.430.327.160,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			58.430.327.160,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	58.430.327.160,00
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			58.430.327.160,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6288 Orang/bulan	58.430.327.160,00
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			511.546.800,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			511.546.800,00
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	511.546.800,00
1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			511.546.800,00
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	511.546.800,00
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**65.000.000.000,00**
		2.Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	65.000.000.000,00
		Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	65.000.000.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			65.000.000.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			65.000.000.000,00
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-	65.000.000.000,00
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			65.000.000.000,00
	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	65.000.000.000,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			**16.369.402.321,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**16.369.402.321,00**
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**16.369.402.321,00**
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6.648.388.996,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.648.388.996,00
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			157.810.100,00
	Terlaksananya Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			157.810.100,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	157.810.100,00
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			157.810.100,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	157.810.100,00
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.641.870.620,00
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah			5.641.870.620,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	130.800.000,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	5.511.070.620,00
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.511.070.620,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan	5.511.070.620,00
1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			130.800.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	130.800.000,00
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			59.300.000,00
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			59.300.000,00
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	59.300.000,00
1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			59.300.000,00
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	59.300.000,00
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			171.089.700,00
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			171.089.700,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	104.730.000,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	13.750.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	8.616.000,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	10.258.600,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	33.735.100,00
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			10.258.600,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.258.600,00
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			33.735.100,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	33.735.100,00
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			13.750.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	13.750.000,00
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			8.616.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.616.000,00
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			104.730.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	104.730.000,00
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			168.930.076,00
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			168.930.076,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	111.728.524,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	57.201.552,00
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			111.728.524,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	111.728.524,00
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			57.201.552,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	57.201.552,00
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			449.388.500,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			449.388.500,00
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	-	117.179.300,00
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	81.542.600,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	81.349.200,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	169.317.400,00
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			81.349.200,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	81.349.200,00
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			117.179.300,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	117.179.300,00
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			169.317.400,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	169.317.400,00
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			81.542.600,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	81.542.600,00
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**			**474.923.100,00**
		999.Persentase Irigasi Kabupaten Kondisi Baik	49.25 %	474.923.100,00
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			474.923.100,00
	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			474.923.100,00
		Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	-	204.493.100,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	270.430.000,00
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			270.430.000,00
	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,1 KM	270.430.000,00
1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa			204.493.100,00
	Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	204.493.100,00
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**			**600.000.000,00**
		999.Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	57.89 %	600.000.000,00
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			600.000.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			600.000.000,00
		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	-	600.000.000,00
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			600.000.000,00
	Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	20 Liter/Detik	600.000.000,00
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**			**200.000.000,00**
		999.Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	54.11 Persentase	200.000.000,00
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			200.000.000,00
	Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			200.000.000,00
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	-	200.000.000,00
1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan			200.000.000,00
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen	200.000.000,00
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			**200.000.000,00**
		999.Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	51.77 %	200.000.000,00
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			200.000.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			200.000.000,00
		Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-	200.000.000,00
1.03.05.2.01.0049	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat			200.000.000,00
	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	100 M^3/Hari	200.000.000,00
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**			**1.000.000.000,00**
		999.Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	69.53 Persentase	1.000.000.000,00
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.000.000.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.000.000.000,00
		Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	-	1.000.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan			1.000.000.000,00
	Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	300 M	1.000.000.000,00
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**			**100.000.000,00**
		999.Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik	99.37 %	100.000.000,00
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			100.000.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			100.000.000,00
		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	-	100.000.000,00
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			100.000.000,00
	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	50 Dokumen	100.000.000,00
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**			**245.000.000,00**
		999.Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	28.75 Persentase	245.000.000,00
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			245.000.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			245.000.000,00
		Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	-	245.000.000,00
1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota			245.000.000,00
	Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	1 Kawasan	245.000.000,00
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			**6.504.071.925,00**
		999.Tingkat Kemantapan Jalan	55.14 Persentase	6.504.071.925,00
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			6.504.071.925,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			6.504.071.925,00
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	-	384.313.500,00
		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	-	124.268.800,00
		Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	-	4.389.545.425,00
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	-	1.192.437.400,00
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	-	413.506.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Panjang jembatan yang dibangun	-	0,00
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			384.313.500,00
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 Dokumen	384.313.500,00
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			124.268.800,00
	Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	200 KM	124.268.800,00
1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan			413.506.800,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1 KM	413.506.800,00
1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan			4.389.545.425,00
	Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	2,5 KM	4.389.545.425,00
1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan			1.192.437.400,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1 KM	1.192.437.400,00
1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan			0,00
	Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	0 Meter	0,00
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**			**162.187.800,00**
		999.Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Teknis/Terampil	28.22 %	162.187.800,00
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			82.600.200,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			82.600.200,00
		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	-	82.600.200,00
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis			82.600.200,00
	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	20 Orang	82.600.200,00
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			21.054.500,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			21.054.500,00
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	-	21.054.500,00
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota			21.054.500,00
	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	21.054.500,00
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			58.533.100,00
	Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha,Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			58.533.100,00
		Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	-	15.318.900,00
		Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	-	43.214.200,00
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota			43.214.200,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	20 Paket Pekerjaan	43.214.200,00
1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi			15.318.900,00
	Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	10 Lembaga	15.318.900,00
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**			**234.830.500,00**
		999.Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW	99.45 %	234.830.500,00
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			41.926.200,00
	Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			41.926.200,00
		Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	-	41.926.200,00
1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang			41.926.200,00
	Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan	41.926.200,00
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			130.216.300,00
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			130.216.300,00
		Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	-	65.934.300,00
		Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	-	64.282.000,00
1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang			64.282.000,00
	Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	40 Layanan	64.282.000,00
1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang			65.934.300,00
	Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	65.934.300,00
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			62.688.000,00
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			62.688.000,00
		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	-	62.688.000,00
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			62.688.000,00
	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	62.688.000,00
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN			**10.942.891.858,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**9.705.544.158,00**
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**9.705.544.158,00**
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.850.544.558,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.850.544.558,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persentase	2.850.544.558,00
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			40.388.300,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			40.388.300,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	40.388.300,00
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			40.388.300,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	40.388.300,00
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.665.683.482,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.665.683.482,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	51.054.000,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	2.614.629.482,00
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.614.629.482,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	2.614.629.482,00
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			51.054.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	51.054.000,00
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			65.633.900,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			65.633.900,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	47.671.000,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	2.480.400,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	7.604.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	7.878.500,00
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.878.500,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.878.500,00
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			2.480.400,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.480.400,00
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			7.604.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.604.000,00
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			47.671.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	47.671.000,00
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			10.298.500,00
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			10.298.500,00
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	10.298.500,00
1.04.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			10.298.500,00
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.298.500,00
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			26.497.576,00
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			26.497.576,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	24.006.076,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	2.491.500,00
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			24.006.076,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	24.006.076,00
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.491.500,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.491.500,00
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			42.042.800,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			42.042.800,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	39.142.800,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	2.900.000,00
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			39.142.800,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	39.142.800,00
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.900.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	2.900.000,00
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			**845.195.000,00**
		1.Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	21 %	845.195.000,00
		4.Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang Ditangani	21 Angka	845.195.000,00
		999.Persentase Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	0.54 %	845.195.000,00
		999.Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	4.74 %	845.195.000,00
		Persentase Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	100 persentase	18.230.900,00
		Persentase Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	100 persentase	826.964.100,00
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			18.230.900,00
	Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			18.230.900,00
		Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	-	8.178.400,00
		Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	-	10.052.500,00
1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani			8.178.400,00
	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	8.178.400,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana			10.052.500,00
	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	10.052.500,00
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			826.964.100,00
	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			826.964.100,00
		Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	-	328.555.200,00
		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	-	498.408.900,00
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			498.408.900,00
	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15 Unit Rumah	498.408.900,00
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			328.555.200,00
	Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	4 Unit Rumah	328.555.200,00
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**			**200.000.000,00**
		1.Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	0.0099 %	200.000.000,00
		3.Jumlah Rumah Keseluruhan	82244 Angka	200.000.000,00
		999.Jumlah Rumah Layak Huni	61448 Unit	200.000.000,00
		999.Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Yang Ditangani	0.0099 Ha	200.000.000,00
		999.Persentase Jumlah KK yang mendiami RLH	74.71 %	200.000.000,00
		999.Persentase Luas Kawasan Kumuh di Bawah 10 HA yang ditangani	36.7 %	200.000.000,00
		Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	100 persentase	200.000.000,00
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			200.000.000,00
	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			200.000.000,00
		Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	-	200.000.000,00
1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh			200.000.000,00
	Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	200.000.000,00
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**			**5.559.804.600,00**
		2.Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh)	18926 Angka	5.559.804.600,00
		3.Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	23.01 %	5.559.804.600,00
		999.Persentase Penurunan RTLH MBR diluar Kawasan Permukiman Kumuh	60 %	5.559.804.600,00
		Persentase Penurunan RTLH MBR diluar Kawasan Permukiman Kumuh	100 persentase	5.559.804.600,00
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			5.559.804.600,00
	Tersedianya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			5.559.804.600,00
		Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	-	5.559.804.600,00
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	-	0,00
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	90 Unit Rumah	0,00
1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru			5.559.804.600,00
	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	75 Unit	5.559.804.600,00
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**			**250.000.000,00**
		999.Jumlah Pelanggan Listrik	72126 Angka	250.000.000,00
		999.Jumlah Sambungan Rumah Air Minum	22217 Angka	250.000.000,00
		999.Persentase Pelanggan Listrik	87.70 %	250.000.000,00
		999.Persentase Permukiman yang Sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	36.7 %	250.000.000,00
		999.Persentase SR Air Minum	27.62 %	250.000.000,00
		Persentase Permukiman yang Sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	36,7 persentase	250.000.000,00
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			250.000.000,00
	Tersedianya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			250.000.000,00
		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	-	250.000.000,00
1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan			250.000.000,00
	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	3 Lokasi	250.000.000,00
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.237.347.700,00**
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**			**1.237.347.700,00**
2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**			**37.347.800,00**
		999.Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	3 %	37.347.800,00
		999.Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi	100 Persentase	37.347.800,00
		Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi	100 persentase	37.347.800,00
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			37.347.800,00
	Terselesainya Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			37.347.800,00
		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	37.347.800,00
2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			37.347.800,00
	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Berita Acara	37.347.800,00
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**			**1.199.999.900,00**
		999.Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100 %	1.199.999.900,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100 persentase	1.199.999.900,00
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1.199.999.900,00
	Terselesainya Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1.199.999.900,00
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	1.199.999.900,00
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1.199.999.900,00
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1.199.999.900,00
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			**7.086.463.934,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**7.086.463.934,00**
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**7.086.463.934,00**
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6.709.228.934,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.709.228.934,00
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.920.000,00
	Terlaksana penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.920.000,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	7.920.000,00
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			7.920.000,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	7.920.000,00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.311.794.294,00
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.311.794.294,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	42.300.000,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	6.269.494.294,00
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.269.494.294,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	6.269.494.294,00
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			42.300.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	42.300.000,00
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0,00
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0,00
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			0,00
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	0,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			34.713.200,00
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			34.713.200,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	20.910.000,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	0,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	5.158.500,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	8.644.700,00
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			8.644.700,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.644.700,00
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			0,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			5.158.500,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.158.500,00
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			20.910.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	20.910.000,00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			157.827.540,00
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			157.827.540,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	20.775.600,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	137.051.940,00
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			20.775.600,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.775.600,00
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			137.051.940,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	137.051.940,00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			196.973.900,00
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			196.973.900,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	196.973.900,00
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			196.973.900,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	196.973.900,00
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**269.448.000,00**
		2.Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	78 %	269.448.000,00
		999.Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	100 Persentase	269.448.000,00
		999.Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	75 %	269.448.000,00
		999.Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	8.62 Persentase	269.448.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			269.448.000,00
	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			269.448.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	-	0,00
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	-	269.448.000,00
		Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	-	0,00
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			0,00
	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	30 Dokumen	0,00
1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat			0,00
	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	50 Orang	0,00
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			269.448.000,00
	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	30 laporan	269.448.000,00
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			0,00
	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			0,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	0,00
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			0,00
	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2 Laporan	0,00
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**			**107.787.000,00**
		1.Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	13 Menit	107.787.000,00
		999.Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	100 Persentase	107.787.000,00
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			107.787.000,00
	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			107.787.000,00
		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	-	0,00
		Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	-	103.155.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	-	4.632.000,00
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			103.155.000,00
	Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	4 Dokumen	103.155.000,00
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran			0,00
	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	22 Orang	0,00
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			4.632.000,00
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1 Unit	4.632.000,00
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			**3.236.930.104,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**3.236.930.104,00**
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**3.236.930.104,00**
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.936.931.232,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.936.931.232,00
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	100 %	179.898.800,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.616.302.976,00
		Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	79.198.900,00
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	61.530.556,00
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19.244.500,00
	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19.244.500,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	19.244.500,00
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			19.244.500,00
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	19.244.500,00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.597.058.476,00
	Terselenggaranya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.597.058.476,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	73.674.000,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	2.523.384.476,00
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.523.384.476,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	2.523.384.476,00
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			73.674.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	73.674.000,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			79.198.900,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah			79.198.900,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	49.897.000,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	9.990.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	8.316.500,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	3.499.300,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	7.496.100,00
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.499.300,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.499.300,00
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.496.100,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.496.100,00
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			9.990.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	9.990.000,00
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			8.316.500,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8.316.500,00
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			49.897.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	49.897.000,00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			61.530.556,00
	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			61.530.556,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	29.125.068,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	32.405.488,00
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			29.125.068,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.125.068,00
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			32.405.488,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	32.405.488,00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			179.898.800,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			179.898.800,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	169.948.000,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	9.950.800,00
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			169.948.000,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	169.948.000,00
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			9.950.800,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	9.950.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**			**299.998.872,00**
		1.Persentase penanganan pra bencana	100 %	299.998.872,00
		2.Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	600 Orang	299.998.872,00
		3.Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	600 Orang	299.998.872,00
		4.Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	600 Orang	299.998.872,00
		999.Persentase Penanganan Pasca Bencana	100 Persentase	299.998.872,00
		999.Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	100 %	299.998.872,00
		Persentase penanganan pra bencana	100 %	299.998.872,00
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			50.000.000,00
	Meningkatnya pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota			50.000.000,00
		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	-	50.000.000,00
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)			50.000.000,00
	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	400 Orang	50.000.000,00
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			199.999.200,00
	Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			199.999.200,00
		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	-	149.999.500,00
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	49.999.700,00
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			149.999.500,00
	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen	149.999.500,00
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			49.999.700,00
	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	49.999.700,00
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			49.999.672,00
	Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			49.999.672,00
		Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	-	49.999.672,00
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			49.999.672,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	49.999.672,00
	DINAS SOSIAL			**4.602.893.184,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**4.602.893.184,00**
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**4.602.893.184,00**
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.027.591.384,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.027.591.384,00
		Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.027.591.384,00
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.498.400,00
	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.498.400,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	4.498.400,00
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4.498.400,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	4.498.400,00
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.846.272.894,00
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.846.272.894,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	57.146.400,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	3.789.126.494,00
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.789.126.494,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	3.789.126.494,00
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			57.146.400,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	57.146.400,00
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			55.957.200,00
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			55.957.200,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	29.505.000,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	6.925.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	4.772.000,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	4.549.600,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	10.205.600,00
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.549.600,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.549.600,00
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			10.205.600,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	10.205.600,00
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			6.925.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.925.000,00
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			4.772.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.772.000,00
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			29.505.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	29.505.000,00
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			56.374.290,00
	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			56.374.290,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	20.374.290,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	36.000.000,00
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			20.374.290,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.374.290,00
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			36.000.000,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.000.000,00
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			64.488.600,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			64.488.600,00
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	47.262.700,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	5.000.000,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	12.225.900,00
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			47.262.700,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	47.262.700,00
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.000.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	5.000.000,00
1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			12.225.900,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	12.225.900,00
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**			**26.057.600,00**
		2.Persentase PSKS Yang Bekerja sama Dalam Penanganan PPKS	85.71 %	26.057.600,00
		999.Persentase lembaga di bidang Kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	80 %	26.057.600,00
		999.Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	80 %	26.057.600,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		999.Persentase TKS/Relawan Sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana	5.9 %	26.057.600,00
		Persentase PSKS yang Bekerja Sama Dalam Penanganan PPKS	85,71 %	26.057.600,00
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			26.057.600,00
	Terselenggaranya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			26.057.600,00
		Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	17.530.600,00
		Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	-	8.527.000,00
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			17.530.600,00
	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Keluarga	17.530.600,00
1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota			8.527.000,00
	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	215 Orang	8.527.000,00
1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**			**24.808.900,00**
		1.Persentase PPKS Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial	3.58 %	24.808.900,00
		2.Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100 %	24.808.900,00
		Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani	100 %	24.808.900,00
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			24.808.900,00
	Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			24.808.900,00
		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	24.808.900,00
1.06.03.2.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			24.808.900,00
	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	24.808.900,00
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			**298.741.900,00**
		2.Persentase PSKS Yang Bekerja sama Dalam Penanganan PPKS	85.71 %	298.741.900,00
		999.Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	1.88 %	298.741.900,00
		999.Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	0.32 %	298.741.900,00
		999.Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	4.49 %	298.741.900,00
		Persentase PPKS yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial	100 %	298.741.900,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			298.741.900,00
	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			298.741.900,00
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	17.765.000,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	35.855.100,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	16.833.800,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	35.551.400,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	97.938.100,00
		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	94.798.500,00
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan			97.938.100,00
	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	115 Orang	97.938.100,00
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu			35.855.100,00
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	47 Orang	35.855.100,00
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			94.798.500,00
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	94.798.500,00
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			16.833.800,00
	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	16.833.800,00
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan			35.551.400,00
	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	35.551.400,00
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan			17.765.000,00
	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	17.765.000,00
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**			**161.580.300,00**
		999.Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	76.62 %	161.580.300,00
		Persentase PPKS Yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 %	161.580.300,00
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			12.915.700,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			12.915.700,00
		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	-	12.915.700,00
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar			12.915.700,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	12.915.700,00
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			148.664.600,00
	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			148.664.600,00
		Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	36.989.700,00
		Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	-	111.674.900,00
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			36.989.700,00
	Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	23.285 Orang	36.989.700,00
1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			111.674.900,00
	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	34.673 Usulan	111.674.900,00
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**			**49.545.800,00**
		999.Persentase korban bencana alam dan sosial dan/atau Non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar	100 %	49.545.800,00
		999.Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	0.60 %	49.545.800,00
		Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan	100 %	49.545.800,00
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			49.545.800,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			49.545.800,00
		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	49.545.800,00
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			49.545.800,00
	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	49.545.800,00
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**			**14.567.300,00**
		999.Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik	100 %	14.567.300,00
		Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Yang Terpelihara	100 %	14.567.300,00
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			14.567.300,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			14.567.300,00
		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	-	14.567.300,00
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			14.567.300,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	14.567.300,00
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			**3.023.534.911,00**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**2.947.133.111,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**2.947.133.111,00**
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.745.415.961,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.745.415.961,00
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			24.999.900,00
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			24.999.900,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	24.999.900,00
2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			24.999.900,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	24.999.900,00
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.551.519.746,00
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			2.551.519.746,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	68.640.000,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	2.482.879.746,00
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.482.879.746,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	2.482.879.746,00
2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			68.640.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	68.640.000,00
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			52.841.300,00
	Jumlah Administrasi umum OPD yang disiapkan			52.841.300,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	31.272.000,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	6.100.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	7.499.800,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	7.969.500,00
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.969.500,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.969.500,00
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			6.100.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.100.000,00
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			7.499.800,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	7.499.800,00
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			31.272.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	31.272.000,00
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			10.270.900,00
	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan			10.270.900,00
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	10.270.900,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10.270.900,00
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.270.900,00
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			50.608.722,00
	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah			50.608.722,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	49.111.722,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1.497.000,00
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			49.111.722,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	49.111.722,00
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.497.000,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.497.000,00
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			30.905.393,00
	Terpeliharanya barang milik daerah			30.905.393,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	26.005.393,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	4.900.000,00
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			26.005.393,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	26.005.393,00
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4.900.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	4.900.000,00
2.07.01.2.13	Penataan Organisasi			24.270.000,00
	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana			24.270.000,00
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	24.270.000,00
2.07.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			24.270.000,00
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12 Dokumen	24.270.000,00
2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**			**55.000.000,00**
		999.Persentase perusahaan yang memiliki RTK	1.49 %	55.000.000,00
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			55.000.000,00
	Ketersediaan Kualitas dan Pendayagunaan yang Optimal Sesuai Dengan Kebutuhan dan Potensi yang ada, serta mendukung Pencapaian Tujuan OPD tersebut			55.000.000,00
		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	-	15.000.000,00
		Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	-	40.000.000,00
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			15.000.000,00
	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	15.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro			40.000.000,00
	Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	30 Orang	40.000.000,00
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**			**27.821.500,00**
		999.Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha	39.76 %	27.821.500,00
		999.Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	28.40 %	27.821.500,00
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			15.000.000,00
	Jumlah Tenaga Kerja Yang memperoleh Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Jumlah Kesepakatan Dalam Rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur Serta Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktifitas			15.000.000,00
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-	15.000.000,00
2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi			15.000.000,00
	Terlaksananya Proses Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	3 Orang	15.000.000,00
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			6.593.700,00
	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			6.593.700,00
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	-	6.593.700,00
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			6.593.700,00
	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	10 Lembaga	6.593.700,00
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			6.227.800,00
	Terlaksananya Pelaksanaan Konsultasi Produktifitas Pada Perusahaan Kecil			6.227.800,00
		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	-	6.227.800,00
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil			6.227.800,00
	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan	6.227.800,00
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**			**69.973.950,00**
		1.Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	0.79 %	69.973.950,00
		2.Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Luar Negeri	0.46 %	69.973.950,00
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			12.547.200,00
	Jumlah Tenaga Kerja yang diTempatkan			12.547.200,00
		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	-	0,00
		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	-	12.547.200,00
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja			12.547.200,00
	Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	60 Orang	12.547.200,00
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja			0,00
	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	0 Orang	0,00
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			49.206.200,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Oleh Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online			49.206.200,00
		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	-	0,00
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	-	49.206.200,00
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			0,00
	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	200 Orang	0,00
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja			49.206.200,00
	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	20 Orang	49.206.200,00
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			8.220.550,00
	Jumlah CPMI yang terlayani			8.220.550,00
		Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA Layanan Terpadu	-	8.220.550,00
2.07.04.2.04.0004	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran			8.220.550,00
	Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA Layanan Terpadu	30 Orang	8.220.550,00
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**			**48.921.700,00**
		999.Persentase pemberi kerja yang menerapkan perlindungan hak pekerja dan dialog sosial di dalam negeri dan luar neger	4.46 %	48.921.700,00
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000,00
	Jumlah Data dan Informasi sarana HI			20.000.000,00
		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	-	20.000.000,00
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			20.000.000,00
	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	20.000.000,00
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			28.921.700,00
	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan			28.921.700,00
		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	-	13.921.900,00
		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	-	14.999.800,00
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			14.999.800,00
	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara	14.999.800,00
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			13.921.900,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	10 Perkara	13.921.900,00
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**76.401.800,00**
3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**			**76.401.800,00**
3.32.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**			**36.401.800,00**
		999.Persentase Transmigran yang ditempatkan di Lokasi Transmigrasi	100 %	36.401.800,00
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			36.401.800,00
	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari satu daerah/kabupaten/kota			36.401.800,00
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	26.401.900,00
		Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	-	9.999.900,00
3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			26.401.900,00
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	26.401.900,00
3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi			9.999.900,00
	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	2 Lokasi	9.999.900,00
3.32.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**			**40.000.000,00**
		999.Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	5.47 %	40.000.000,00
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian			40.000.000,00
	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang di Bina			40.000.000,00
		Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	-	40.000.000,00
3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman			40.000.000,00
	Terwujudnya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	15 Kepala Keluarga	40.000.000,00
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			**6.779.674.664,00**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.779.674.664,00**
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**562.618.300,00**
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**			**100.946.300,00**
		999.Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	4.00 %	100.946.300,00
		999.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	68.24 %	100.946.300,00
		Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	1 Lembaga	10.159.100,00
		Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	1 Lembaga	69.360.000,00
		Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	1 Laporan	21.427.200,00
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			21.427.200,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Jumlah Desa/Kelurahan yang terdesiminasi PUG dan PPRG			21.427.200,00
		Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	-	10.455.800,00
		Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	-	10.971.400,00
	Jumlah OPD yang terdesiminasi PUG dan PPRG			21.427.200,00
		Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	-	10.455.800,00
		Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	-	10.971.400,00
2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			10.455.800,00
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan	10.455.800,00
2.08.02.2.01.0015	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota			10.971.400,00
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	1 Lembaga	10.971.400,00
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			10.159.100,00
	Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendapatkan layanan			10.159.100,00
		Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-	10.159.100,00
	Jumlah Perempuan berpolitik yang terlatih dalam rangka peningkatan kapasitas			10.159.100,00
		Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-	10.159.100,00
2.08.02.2.02.0013	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota			10.159.100,00
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	1 Lembaga	10.159.100,00
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			69.360.000,00
	Jumlah ASN Perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas kepemimpinan			69.360.000,00
		Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-	69.360.000,00
	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang didampingi			69.360.000,00
		Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-	69.360.000,00
2.08.02.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota			69.360.000,00
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 Lembaga	69.360.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**			**437.391.300,00**
		999.Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %	437.391.300,00
		Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan	1 Lembaga	437.391.300,00
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			102.000.000,00
	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat advokasi dan informasi tentang perlindungan perempuan kewenangan kabupaten			102.000.000,00
		Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	-	102.000.000,00
2.08.03.2.01.0009	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota			102.000.000,00
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	1 Kegiatan	102.000.000,00
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			255.329.800,00
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten			255.329.800,00
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-	8.675.000,00
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota	-	246.654.800,00
	Jumlah Lembaga Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten			255.329.800,00
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-	8.675.000,00
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota	-	246.654.800,00
2.08.03.2.02.0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota			8.675.000,00
	Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	30 Orang	8.675.000,00
2.08.03.2.02.0014	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota			246.654.800,00
	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota	30 Orang	246.654.800,00
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			80.061.500,00
	Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan dukungan layanan bagi perempuan korban kekerasan			80.061.500,00
		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-	80.061.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
2.08.03.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota			80.061.500,00
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	1 Lembaga	80.061.500,00
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**			**0,00**
		999.Persentase Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	40.5 %	0,00
		Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak	1 Dokumen	0,00
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0,00
	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			0,00
		proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	-	0,00
2.08.04.2.01.0007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			0,00
	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	1 Dokumen	0,00
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**			**8.416.300,00**
		999.Skor Kabupaten Layak Anak	364.85 Skor	8.416.300,00
		Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	1 Lembaga	8.416.300,00
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			8.416.300,00
	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten			8.416.300,00
		Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	-	8.416.300,00
2.08.06.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota			8.416.300,00
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	4 Lembaga	8.416.300,00
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**			**15.864.400,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		999.Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	71.52 Indeks	15.864.400,00
		999.Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %	15.864.400,00
		Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap ana	1 Dokumen	15.864.400,00
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			15.864.400,00
	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten			15.864.400,00
		Jumlah Kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota	-	15.864.400,00
2.08.07.2.01.0012	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota			15.864.400,00
	Terlaksananya kerjasama para pihak termasuk pemerintah dan lembaga non pemerintah termasuk lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.864.400,00
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**6.217.056.364,00**
2.14.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.461.501.364,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.461.501.364,00
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			20.800.000,00
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			20.800.000,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	20.800.000,00
2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			20.800.000,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	20.800.000,00
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.296.671.050,00
	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan Tunjangan			3.296.671.050,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	78.402.150,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	3.218.268.900,00
	Jumlah Pengelola Keuangan yang dibayarkan			3.296.671.050,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	78.402.150,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	3.218.268.900,00
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.218.268.900,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	3.218.268.900,00
2.14.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			78.402.150,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	78.402.150,00
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			49.704.400,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan Perangkat Daerah (Musrenbang Kec dan Rakor) untuk pemanfaatan alokasi DAU dan DAK			49.704.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	30.635.000,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	8.000.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	5.494.600,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	5.574.800,00
	Terpenuhinya Makanan dan Minuman			49.704.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	30.635.000,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	8.000.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	5.494.600,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	5.574.800,00
	Tersedianya Alat Tulis Kantor			49.704.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	30.635.000,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	8.000.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	5.494.600,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	5.574.800,00
	Tersedianya Kebutuhan Pelayanan Administrasi			49.704.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	30.635.000,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	8.000.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	5.494.600,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	5.574.800,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			49.704.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	30.635.000,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	8.000.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	5.494.600,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	5.574.800,00
2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.574.800,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.574.800,00
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			8.000.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.000.000,00
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			5.494.600,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.494.600,00
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			30.635.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	30.635.000,00
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			49.990.214,00
	Terlayani Jasa Telepon, Listrik dan Air			49.990.214,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	47.441.914,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	2.548.300,00
	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih			49.990.214,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	47.441.914,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	2.548.300,00
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			47.441.914,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	47.441.914,00
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.548.300,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.548.300,00
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			44.335.700,00
	Jumlah Pengemudi Mobil Dinas yang dibayarkan honornya selama 12 Bulan dan Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayarkan pajak kendaraan dan kendaraan dinas yang terpelihara			44.335.700,00
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	43.235.700,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	1.100.000,00
	Terpeliharanya gedung kantor yang baik dan aman untuk kelancaran tugas			44.335.700,00
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	43.235.700,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	1.100.000,00
	Terpeliharanya sarana kerja untuk kelancaran pelayanan administrasi			44.335.700,00
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	43.235.700,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	1.100.000,00
2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			43.235.700,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40 Unit	43.235.700,00
2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.100.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	1.100.000,00
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**			**96.000.000,00**
		999.Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun	21.5 Angka	96.000.000,00
		999.Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	2.16 Angka	96.000.000,00
		Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	1 Dokumen	96.000.000,00
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			96.000.000,00
	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga			96.000.000,00
		Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	-	96.000.000,00
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga			96.000.000,00
	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	96.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**			**772.755.000,00**
		999.Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptove Prevalance Rate/mCPR)	55.33 Angka	772.755.000,00
		999.Persentase Kebutuhan ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	27.22 %	772.755.000,00
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB	1 Organisasi	390.000.000,00
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			120.000.000,00
	Adanya Komitmen dan Dukungan Stakeholder dan Mitra Kerja tentang Program KKBPK			120.000.000,00
		Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	-	120.000.000,00
		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-	0,00
	Cakupan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan KB			120.000.000,00
		Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	-	120.000.000,00
		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-	0,00
	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas			120.000.000,00
		Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	-	120.000.000,00
		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-	0,00
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal			120.000.000,00
	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	120.000.000,00
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			0,00
	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Organisasi	0,00
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			270.000.000,00
	Meningkatnya Pengetahuan Program KKBPK bagi PPKBD/Sub PPKBD			270.000.000,00
		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-	270.000.000,00
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam program KKBPK			270.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-	270.000.000,00
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			270.000.000,00
	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	640 Orang	270.000.000,00
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			382.755.000,00
	Meningkatnya pemahaman tentang KB dan KESPRO			382.755.000,00
		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	33.300.000,00
		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	349.455.000,00
	Menurunnya angka kelahiran			382.755.000,00
		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	33.300.000,00
		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	349.455.000,00
	Tercapainya pelayanan KB yang bermutu			382.755.000,00
	Tercapainya pelayanan KB yang bermutu di fasilitas kesehatan (Faskes)			382.755.000,00
		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	33.300.000,00
		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	349.455.000,00
		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	33.300.000,00
		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	349.455.000,00
	Terkendalinya peserta aktif KB			382.755.000,00
		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	33.300.000,00
		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	349.455.000,00
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			349.455.000,00
	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3811 Orang	349.455.000,00
2.14.03.2.03.0029	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			33.300.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	33.300.000,00
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**			**1.886.800.000,00**
		999.Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	40.5 %	1.886.800.000,00
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Seiahtera (KS)	1 Laporan	1.886.800.000,00
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			1.886.800.000,00
	Meningkatnya pemahaman orang tua tentang pola asuh yang baik dan benar pada balita			1.886.800.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	1.886.800.000,00
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))			1.886.800.000,00
	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1.886.800.000,00
	DINAS KETAHANAN PANGAN			**2.400.204.768,00**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**2.400.204.768,00**
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**			**2.400.204.768,00**
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.146.225.580,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.146.225.580,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.146.225.580,00
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.320.000,00
	Jumlah Perencana, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.320.000,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	4.320.000,00
2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4.320.000,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	4.320.000,00
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.982.246.498,00
	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan			1.982.246.498,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	49.728.000,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	1.932.518.498,00
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.932.518.498,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	1.932.518.498,00
2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			49.728.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	49.728.000,00
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			55.348.200,00
	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan			55.348.200,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	40.117.000,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	5.000.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	2.000.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	8.231.200,00
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			8.231.200,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.231.200,00
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5.000.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.000.000,00
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.000.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			40.117.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	40.117.000,00
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			61.877.482,00
	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan			61.877.482,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	29.358.396,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	32.519.086,00
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			29.358.396,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.358.396,00
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			32.519.086,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	32.519.086,00
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			42.433.400,00
	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			42.433.400,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	42.433.400,00
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			42.433.400,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	42.433.400,00
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**			**171.801.300,00**
		1.Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergisi Seimbang	1 Angka	171.801.300,00
		1.Jumlah Penyaluran Cadangan Pangan pada Daerah Rentan Rawan Pangan	22 Ton	171.801.300,00
		1.Jumlah Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Angka	171.801.300,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		999.skor pola pangan harapan	81.63 Skor	171.801.300,00
		Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergisi Seimbang	1 Angka	171.801.300,00
		Jumlah Penyaluran Cadangan Pangan pada Daerah Rentan Rawan Pangan	22 Ton	171.801.300,00
		Skor pola pangan harapan	81,63 Skor	171.801.300,00
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			23.675.500,00
	Tersedianya dan tersalurnya pangan pokok dan pangan lainya			23.675.500,00
		Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	-	11.273.200,00
		Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	-	7.659.800,00
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	-	4.742.500,00
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota			11.273.200,00
	Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan	11.273.200,00
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis			4.742.500,00
	Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	4.742.500,00
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)			7.659.800,00
	Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	7.659.800,00
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			100.000.000,00
	Tersedianya cadangan pangan pemerintah kabupaten / kota			100.000.000,00
		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	100.000.000,00
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			100.000.000,00
	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	20 Ton	100.000.000,00
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			48.125.800,00
	Terpromosinya target konsumsi pangan sesuai angka kecukupan gizi			48.125.800,00
		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-	48.125.800,00
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			48.125.800,00
	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	48.125.800,00
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**			**27.640.000,00**
		1.Persentase penanganan kerawanan pangan	2.58 %	27.640.000,00
		1.Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang di Mutahirkan	1 Angka	27.640.000,00
		999.Persentase daerah rentan rawan pangan	2.58 %	27.640.000,00
		Persentase daerah rentan rawan pangan	2,58 %	12.785.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Persentase penanganan kerawanan pangan	2,58 %	14.855.000,00
		Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang di Mutahirkan	1 Angka	27.640.000,00
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			14.855.000,00
	Tersedianya peta ketahanan dan kerawanan pangan			14.855.000,00
		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	-	14.855.000,00
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			14.855.000,00
	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	14.855.000,00
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			12.785.000,00
	Tertanganinya kejadian kerawanan pangan			12.785.000,00
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	-	12.785.000,00
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota			12.785.000,00
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	12.785.000,00
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**			**54.537.888,00**
		1.Persentase pengawasan keamanan pangan	33.33 %	54.537.888,00
		999.persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	100 %	54.537.888,00
		Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	100 %	54.537.888,00
		Persentase pengawasan keamanan pangan	33,33 %	54.537.888,00
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			54.537.888,00
	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar			54.537.888,00
		Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	-	13.558.200,00
		Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	-	40.979.688,00
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			13.558.200,00
	Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	13.558.200,00
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			40.979.688,00
	Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	40.979.688,00
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			**9.828.134.660,00**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**9.828.134.660,00**
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			**9.828.134.660,00**
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.461.626.836,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.461.626.836,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.405.258.536,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	56.368.300,00
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.258.800,00
	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disediakan			10.258.800,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	10.258.800,00
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			10.258.800,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10.258.800,00
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.100.924.260,00
	Tersedianya administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah			4.100.924.260,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	85.680.000,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	4.015.244.260,00
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.015.244.260,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	868/14 Orang/bulan	4.015.244.260,00
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			85.680.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	85.680.000,00
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			6.251.600,00
	Tersedianya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah			6.251.600,00
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	6.251.600,00
2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			6.251.600,00
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 Dokumen	6.251.600,00
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			50.116.700,00
	Tersedianya dokumen administrasi umum perangkat daerah			50.116.700,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	37.544.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	5.533.700,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	7.039.000,00
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.039.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	7.039.000,00
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			5.533.700,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.533.700,00
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			37.544.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	37.544.000,00
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			44.006.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terselesaikannya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diselesaikan			44.006.800,00
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	44.006.800,00
2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			44.006.800,00
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	56 Unit	44.006.800,00
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.932.876,00
	Tersedianya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100.932.876,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	41.381.100,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	59.551.776,00
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			41.381.100,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	41.381.100,00
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			59.551.776,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	59.551.776,00
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			149.135.800,00
	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			149.135.800,00
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	50.220.000,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	95.765.800,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	3.150.000,00
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			95.765.800,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	95.765.800,00
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.150.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	3.150.000,00
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			50.220.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.220.000,00
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**			**15.837.400,00**
		1.Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	86.00 %	15.837.400,00
		999.Data Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14 Dokumen	15.837.400,00
		Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	86 %	15.837.400,00
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			15.837.400,00
	Persentase Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang Tersedia			15.837.400,00
		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	-	15.837.400,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota			15.837.400,00
	Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	15 Dokumen	15.837.400,00
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**			**67.374.500,00**
		999.Indeks Kualitas Air	62.50 Indeks	67.374.500,00
		999.Indeks Kualitas Udara	93.75 Indeks	67.374.500,00
		Indeks Kualitas Air	62,50 Indeks	22.791.100,00
		Indeks Kualitas Air	Indeks 62,50	44.583.400,00
		Indeks Kualitas Udara	93,75 Indeks	22.791.100,00
		Indeks Kualitas Udara	Indeks 93,75	44.583.400,00
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			44.583.400,00
	Persentase Pemantauan Kualitas Air, Udara, Tanah dan Laut yang Dilakukan			44.583.400,00
		Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-	44.583.400,00
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota			44.583.400,00
	Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	14 Dokumen	44.583.400,00
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			22.791.100,00
	Jumlah Pengawasan Terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan			22.791.100,00
		Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	-	22.791.100,00
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat			22.791.100,00
	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	70 Laporan	22.791.100,00
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**			**574.640.392,00**
		999.Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)	67.64 Indeks	574.640.392,00
		999.Persentase RTH	9.60 Persentase	574.640.392,00
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)	67,64 Indeks	574.640.392,00
		Persentase RTH	9,60 %	574.640.392,00
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			574.640.392,00
	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Dikelola			574.640.392,00
		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	-	504.641.592,00
		Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	-	69.998.800,00
		Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	-	0,00
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			504.641.592,00
	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	7,5 Ha	504.641.592,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya			0,00
	Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Unit	0,00
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan			69.998.800,00
	Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	69.998.800,00
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**			**10.005.800,00**
		999.Persentase Limbah B3 yang Terkelola	100 Persentase	10.005.800,00
		Persentase Limbah B3 yang Terkelola	100 %	10.005.800,00
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			10.005.800,00
	Terkelolanya Limbah B3			10.005.800,00
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	-	10.005.800,00
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan			10.005.800,00
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	5 Dokumen	10.005.800,00
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**			**14.759.800,00**
		999.Jumlah Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Melanggar Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diiterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota	59 Usaha/Kegiatan	14.759.800,00
		999.Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	70 %	14.759.800,00
		999.Rasio Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi Terhadap Usaha yang Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Berada di Daerah	2 Orang	14.759.800,00
		Jumlah Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Melanggar Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diiterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota	59 Usaha/Kegiatan	14.759.800,00
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	70 %	14.759.800,00
		Rasio Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi Terhadap Usaha yang Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Berada di Daerah	2 Orang	14.759.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			14.759.800,00
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			14.759.800,00
		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	-	14.759.800,00
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			14.759.800,00
	Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	70 Badan Usaha	14.759.800,00
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			**29.542.900,00**
		999.Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	83.33 Persentase	29.542.900,00
		Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	83,33 %	29.542.900,00
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			29.542.900,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			29.542.900,00
		Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	-	20.128.000,00
		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-	9.414.900,00
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup			9.414.900,00
	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	9.414.900,00
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup			20.128.000,00
	Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	120 Orang	20.128.000,00
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			**40.999.200,00**
		999.Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 Persentase	40.999.200,00
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 %	40.999.200,00
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			40.999.200,00
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			40.999.200,00
		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	-	40.999.200,00
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			40.999.200,00
	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	10 Entitas	40.999.200,00
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**			**4.897.700,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		999.Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	25 Pengaduan	4.897.700,00
		999.Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	100 Persentase	4.897.700,00
		Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidu	100 %	4.897.700,00
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			4.897.700,00
	Terselesaikannya Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			4.897.700,00
		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	-	4.897.700,00
2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota			4.897.700,00
	Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	25 Pengaduan	4.897.700,00
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**			**4.608.450.132,00**
		999.Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	70 poin	4.608.450.132,00
		999.Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4.608.450.132,00
		999.Total Volume Sampah yang Dapat Ditangani	10329.49 %	4.608.450.132,00
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	70 Poin	4.608.450.132,00
		Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4.608.450.132,00
		Total Volume Sampah yang Dapat Ditangani	10.329, 49 Ton	4.608.450.132,00
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			4.608.450.132,00
	Volume sampah tertangani			4.608.450.132,00
		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	-	97.866.900,00
		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	-	2.928.108.532,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	-	1.582.474.700,00
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			97.866.900,00
	Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	8 Kelompok	97.866.900,00
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			1.582.474.700,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Unit	1.582.474.700,00
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			2.928.108.532,00
	Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1796,54 Ton	2.928.108.532,00
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			**5.463.422.986,00**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**5.463.422.986,00**
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			**5.463.422.986,00**
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.883.350.998,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.883.350.998,00
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19.481.200,00
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19.481.200,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	19.481.200,00
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			19.481.200,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 Laporan	19.481.200,00
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.633.507.386,00
	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.633.507.386,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	86.857.000,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	4.546.650.386,00
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.546.650.386,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	4.546.650.386,00
2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			86.857.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	86.857.000,00
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			66.701.400,00
	Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			66.701.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	22.340.000,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	4.345.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	4.117.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	35.899.400,00
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			35.899.400,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	345 Paket	35.899.400,00
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			4.345.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	200 Paket	4.345.000,00
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			4.117.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	4.117.000,00
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			22.340.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	22.340.000,00
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			113.438.212,00
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			113.438.212,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	99.187.612,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	2.501.600,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	11.749.000,00
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			11.749.000,00
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan	11.749.000,00
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			99.187.612,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	99.187.612,00
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.501.600,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2.501.600,00
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			50.222.800,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			50.222.800,00
		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	2.512.100,00
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	38.160.700,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	9.550.000,00
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			38.160.700,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	38.160.700,00
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			9.550.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	9.550.000,00
2.12.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			2.512.100,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	2.512.100,00
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**			**95.536.588,00**
		999.Cakupan Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	99.16 Angka	95.536.588,00
		999.Jumlah Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan KIA dengan Mitra	1 Angka	95.536.588,00
		999.Perekaman KTP elektronik	100 %	95.536.588,00
		999.Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	4.5 %	95.536.588,00
		999.Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	40.88 Persentase	95.536.588,00
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			77.331.788,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Tersedianya Pelayanan Pendaftaran Penduduk			77.331.788,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	-	18.318.200,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	-	2.513.200,00
		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	56.500.388,00
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			2.513.200,00
	Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	2.513.200,00
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk			18.318.200,00
	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	18.318.200,00
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			56.500.388,00
	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 Laporan	56.500.388,00
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk			12.000.000,00
	Tertatanya Pendaftaran Penduduk			12.000.000,00
		Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	-	12.000.000,00
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan			12.000.000,00
	Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	7 Dokumen	12.000.000,00
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			6.204.800,00
	Terselenggaranya Pendaftaran Penduduk			6.204.800,00
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	6.204.800,00
2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk			6.204.800,00
	Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	6.204.800,00
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**			**161.944.800,00**
		999.Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 Persentase	161.944.800,00
		999.Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 Persentase	161.944.800,00
		999.Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 Persentase	161.944.800,00
		999.Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 Persentase	161.944.800,00
		999.Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	87.52 %	161.944.800,00
		999.Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah	55.87 Persentase	161.944.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			133.363.900,00
	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil			133.363.900,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	-	5.937.800,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	-	2.430.000,00
		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	-	124.996.100,00
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			5.937.800,00
	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	6 Dokumen	5.937.800,00
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			124.996.100,00
	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	6 Layanan	124.996.100,00
2.12.03.2.01.0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil			2.430.000,00
	Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	1150 Dokumen	2.430.000,00
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			28.580.900,00
	Terselenggaranya Pencatatan Sipil			28.580.900,00
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	-	2.150.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	-	3.960.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	-	3.144.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	-	2.615.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	-	16.711.900,00
2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam			2.615.000,00
	Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	7 Laporan	2.615.000,00
2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota			3.144.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	2 Laporan	3.144.000,00
2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil			3.960.000,00
	Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	2 Laporan	3.960.000,00
2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil			16.711.900,00
	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	36 Laporan	16.711.900,00
2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil			2.150.000,00
	Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	20 Laporan	2.150.000,00
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**			**316.424.700,00**
		999.Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama	1 %	316.424.700,00
		999.Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan	100 Persentase	316.424.700,00
		Jumlah OPD yang dimanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja	1 OPD	289.920.600,00
		Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	100 persen	289.920.600,00
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			289.920.600,00
	Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			289.920.600,00
		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	-	267.698.900,00
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	-	15.500.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	-	6.721.700,00
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			267.698.900,00
	Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	267.698.900,00
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			15.500.000,00
	Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	15.500.000,00
2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah			6.721.700,00
	Terlaksananya Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1 Laporan	6.721.700,00
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			16.802.800,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			16.802.800,00
		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	-	2.749.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	5.553.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	8.500.000,00
2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			5.553.000,00
	Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	5.553.000,00
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			8.500.000,00
	Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	7 Laporan	8.500.000,00
2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan			2.749.800,00
	Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1 Dokumen	2.749.800,00
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			9.701.300,00
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			9.701.300,00
		Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	-	4.950.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	4.751.300,00
2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			4.751.300,00
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	25 Laporan	4.751.300,00
2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan			4.950.000,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	4.950.000,00
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**			**6.165.900,00**
		1.Jumlah data profil kependudukan yang disusun	3 Dokumen	6.165.900,00
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan			6.165.900,00
	Tersedianya Profil Kependudukan			6.165.900,00
		Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	-	2.416.300,00
		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	-	3.749.600,00
2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota			2.416.300,00
	Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2.416.300,00
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain			3.749.600,00
	Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	3.749.600,00
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			**3.163.461.752,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**3.163.461.752,00**
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**3.163.461.752,00**
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.005.221.402,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.50 %	3.005.221.402,00
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			35.934.900,00
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			35.934.900,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	35.934.900,00
2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			35.934.900,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	35.934.900,00
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.846.574.756,00
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.846.574.756,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	92.848.200,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	2.753.726.556,00
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.753.726.556,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	2.753.726.556,00
2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			92.848.200,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	92.848.200,00
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			51.515.700,00
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			51.515.700,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	25.292.000,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	6.460.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	8.513.300,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	986.800,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	10.263.600,00
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			986.800,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	986.800,00
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			10.263.600,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	49 Paket	10.263.600,00
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			6.460.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	6.460.000,00
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			8.513.300,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	8.513.300,00
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			25.292.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	25.292.000,00
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			10.298.500,00
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			10.298.500,00
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	10.298.500,00
2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10.298.500,00
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	10.298.500,00
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20.488.106,00
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20.488.106,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12.277.806,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	3.460.300,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	4.750.000,00
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12.277.806,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12.277.806,00
2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.750.000,00
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	4.750.000,00
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.460.300,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.460.300,00
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			40.409.440,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			40.409.440,00
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	360.000,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	34.999.340,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	1.050.100,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	4.000.000,00
2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			34.999.340,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	34.999.340,00
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.050.100,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	1.050.100,00
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			360.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	360.000,00
2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4.000.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	4.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**			**10.000.000,00**
		999.Persentase Desa yang difasilitasi terkait penataan desa	22.10 %	10.000.000,00
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa			10.000.000,00
	Meningkatnya penataan desa yang terselenggara			10.000.000,00
		Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	-	10.000.000,00
2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa			10.000.000,00
	Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	19 Desa	10.000.000,00
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**			**99.969.000,00**
		2.Jumlah Desa Mandiri	20 Desa	99.969.000,00
		3.Jumlah Desa Maju	75 Desa	99.969.000,00
		4.Jumlah Desa Berkembang	61 Desa	99.969.000,00
		5.Jumlah Desa Tertinggal	25 Desa	99.969.000,00
		6.Jumlah Desa Sangat Tertinggal	0 Desa	99.969.000,00
		999.Jumlah Desa Berkembang Yang Memenuhi Kriteria Desa Mandiri Per Tahun Berdasarkan Indeks Desa Membangun Per Tahun	61 Angka	99.969.000,00
		999.Jumlah Desa Tertinggal Yang Memenuhi Kriteria Desa Berkembang Per Tahun Berdasarkan Indeks Desa Membangun Per Tahun	25 Angka	99.969.000,00
		999.Persentase Aparatur Desa dan BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 %	99.969.000,00
		999.Persentase Desa yang memenuhi tertib administrasi	70 %	99.969.000,00
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			99.969.000,00
	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang terbina dan terawasi			99.969.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	45.383.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	-	45.386.000,00
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	9.200.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	0,00
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			9.200.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	181 Dokumen	9.200.000,00
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			45.386.000,00
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	362 Dokumen	45.386.000,00
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			45.383.000,00
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	362 Dokumen	45.383.000,00
2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			0,00
	Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	132 Laporan	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**			**48.271.350,00**
		999.Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Di Desa Yang Terfasilitasi Dalam Peningkatan Kapasitas Dan Diberdayakan	54 Angka	48.271.350,00
		999.Jumlah Peningkatan Desa Yang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adatnya Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif Dan Pemberdayaan	54 Angka	48.271.350,00
		999.Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berdaya	30 %	48.271.350,00
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			48.271.350,00
	Meningkatnya lembaga kemasyarakatan, lembaga adat yang diberdayakan			48.271.350,00
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	-	7.673.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	-	40.598.350,00
2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa			7.673.000,00
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	30 Dokumen	7.673.000,00
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			40.598.350,00
	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	23 Dokumen	40.598.350,00
	DINAS PERHUBUNGAN			**6.699.648.681,00**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.699.648.681,00**
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			**6.699.648.681,00**
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.580.924.505,00**
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.580.924.505,00
		1.Persentase jumlah Penyelenggara lalu lintas angkutan jalan yang dilaksanakan	100 Angka	4.580.924.505,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.580.924.505,00
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11.030.600,00
	Persentase perencanaan kinerja perangkat daerah			11.030.600,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	11.030.600,00
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			11.030.600,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	11.030.600,00
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.259.751.576,00
	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.259.751.576,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	92.175.600,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	4.167.575.976,00
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.167.575.976,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45/14 Orang/bulan	4.167.575.976,00
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			92.175.600,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	92.175.600,00
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0,00
	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0,00
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	0,00
2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			0,00
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	0,00
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			67.844.200,00
	Persentase Laporan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan			67.844.200,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	47.120.000,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	4.650.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	5.459.800,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	4.420.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	6.194.400,00
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.420.000,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.420.000,00
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.194.400,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.194.400,00
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			4.650.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.650.000,00
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			5.459.800,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.459.800,00
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			47.120.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	47.120.000,00
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			90.298.629,00
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			90.298.629,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	60.298.041,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	29.250.588,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	750.000,00
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			750.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	750.000,00
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			60.298.041,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60.298.041,00
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			29.250.588,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	29.250.588,00
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			151.999.500,00
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			151.999.500,00
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	0,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	151.399.500,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	600.000,00
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			151.399.500,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	151.399.500,00
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			600.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	600.000,00
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			**2.009.124.292,00**
		999.Konektivitas Darat	0.96 Persentase	2.009.124.292,00
		999.Penetapan Tarif Angkutan Antar Kota dalam Kabupaten Serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan Kelas Ekonomi	100 %	2.009.124.292,00
		999.Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	61.78 Persentase	2.009.124.292,00
		999.Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	61.78 %	2.009.124.292,00
		999.Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C	71.48 %	2.009.124.292,00
		999.Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	66.95 %	2.009.124.292,00
		999.Terlaksananya Pelayanan Uji Berkala	45.00 %	2.009.124.292,00
		Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	100 %	1.672.628.872,00
		Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	100 Persen	0,00
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			0,00
	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			0,00
		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	0,00
		Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	-	0,00
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00
2.15.02.2.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota			0,00
	Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			1.442.088.784,00
	Persentase Perlengkapan jalan yang disedikan			1.442.088.784,00
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	400.000.000,00
		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-	1.042.088.784,00
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			400.000.000,00
	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	82 Unit	400.000.000,00
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			1.042.088.784,00
	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1380 Unit	1.042.088.784,00
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			0,00
	Jumlah Terminal Tipe C yang dikelolah			0,00
		Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	-	0,00
2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C			0,00
	Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1 Dokumen	0,00
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			336.495.420,00
	Persentase Penyeleggaraan dan Pembangunan fasilitas parkir			336.495.420,00
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	-	336.495.420,00
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			336.495.420,00
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Laporan	336.495.420,00
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			137.414.388,00
	Persentase Jumlah kendaraan yang di uji			137.414.388,00
		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	0,00
		Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	-	0,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	-	137.414.388,00
		Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	0,00
2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			0,00
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang	0,00
2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor			0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	1500 Unit	0,00
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			0,00
	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1500 Dokumen	0,00
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			137.414.388,00
	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	137.414.388,00
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			63.037.900,00
	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa Lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota			63.037.900,00
		Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	26.290.000,00
		Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	-	29.465.300,00
		Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	-	7.282.600,00
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			26.290.000,00
	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan	26.290.000,00
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			7.282.600,00
	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	1 Dokumen	7.282.600,00
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			29.465.300,00
	Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 Laporan	29.465.300,00
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			8.645.500,00
	Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)			8.645.500,00
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	-	8.645.500,00
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin			8.645.500,00
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	6 Laporan	8.645.500,00
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			8.345.700,00
	Persentase Berkurangnya Pelanggaran lalulintas			8.345.700,00
		Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	-	8.345.700,00
2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			8.345.700,00
	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	8.345.700,00
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			13.096.600,00
	Persentase ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang/barang antar kota dalam satu kabupaten/kota			13.096.600,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	13.096.600,00
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			13.096.600,00
	Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	13.096.600,00
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**			**109.599.884,00**
		999.Konektivitas Laut (Pnyeberangan)	0.86 Angka	109.599.884,00
		Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	100 %	109.599.884,00
2.15.03.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota			109.599.884,00
	Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota			109.599.884,00
		Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	109.599.884,00
2.15.03.2.06.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota			109.599.884,00
	Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	109.599.884,00
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			**4.518.145.670,00**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**4.518.145.670,00**
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**4.420.167.970,00**
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.315.229.370,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.315.229.370,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.315.229.370,00
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15.738.500,00
	Terlaksananya penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15.738.500,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	15.738.500,00
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0,00
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0,00
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			15.738.500,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	15.738.500,00
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.488.995.406,00
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.488.995.406,00
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	8.704.400,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	58.690.600,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	3.421.600.406,00
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.421.600.406,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	574 Orang/bulan	3.421.600.406,00
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			8.704.400,00
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	8.704.400,00
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			58.690.600,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dokumen	58.690.600,00
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0,00
	Terlaksananya administrasi kepegawaian yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kominfo			0,00
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	0,00
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	0,00
2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			0,00
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0,00
2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			0,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0,00
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			34.060.600,00
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			34.060.600,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	17.975.000,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	2.800.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	2.161.000,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1.969.400,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	9.155.200,00
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.969.400,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.969.400,00
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			9.155.200,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.155.200,00
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			2.800.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.800.000,00
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.161.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.161.000,00
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			17.975.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	17.975.000,00
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			9.670.000,00
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah			9.670.000,00
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	9.670.000,00
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0,00
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	0,00
2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0,00
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			9.670.000,00
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	9.670.000,00
2.16.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0,00
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			706.855.564,00
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			706.855.564,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	674.221.176,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	28.014.888,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	4.619.500,00
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			674.221.176,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	674.221.176,00
2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.619.500,00
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	4.619.500,00
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			28.014.888,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	28.014.888,00
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			59.909.300,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			59.909.300,00
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	9.994.200,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	31.865.100,00
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	0,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	18.050.000,00
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			31.865.100,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	31.865.100,00
2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			0,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0,00
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			18.050.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	18.050.000,00
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			9.994.200,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9.994.200,00
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**			**58.838.400,00**
		2.Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	84.25 %	58.838.400,00
		999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	3.35 Indeks	58.838.400,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	3,35 Indeks	58.838.400,00
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	84,25 %	58.838.400,00
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			58.838.400,00
	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah			58.838.400,00
		Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	-	12.694.600,00
		Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	-	0,00
		Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-	18.294.600,00
		Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-	21.499.600,00
		Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-	0,00
		Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	-	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-	6.349.600,00
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media			12.694.600,00
	Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	12.694.600,00
2.16.02.2.01.0025	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik			6.349.600,00
	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat dan terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	100 %	6.349.600,00
2.16.02.2.01.0026	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik			18.294.600,00
	Terlaksananya Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	185.984 Orang	18.294.600,00
2.16.02.2.01.0027	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik			0,00
	Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	0 Dokumen	0,00
2.16.02.2.01.0029	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik			0,00
	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	0 Rekomendasi	0,00
2.16.02.2.01.0030	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik			0,00
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	0 Orang	0,00
2.16.02.2.01.0031	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat			21.499.600,00
	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	20 Komunitas	21.499.600,00
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**			**46.100.200,00**
		1.Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	82.00 %	46.100.200,00
		Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	82 %	0,00
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	82 %	46.100.200,00
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			0,00
	Terselenggaranya Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			0,00
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	-	0,00
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	0 Dokumen	0,00
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			46.100.200,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terselenggaranya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			46.100.200,00
		Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-	17.500.400,00
		Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-	21.249.600,00
		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	7.350.200,00
2.16.03.2.02.0041	Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK			17.500.400,00
	Terlaksananya koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	17.500.400,00
2.16.03.2.02.0042	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi			21.249.600,00
	Terlaksananya pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	2 Layanan	21.249.600,00
2.16.03.2.02.0043	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			7.350.200,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	30 Titik	7.350.200,00
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**			**77.450.500,00**
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**			**77.450.500,00**
		1.Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	77.450.500,00
		2.Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 %	77.450.500,00
		Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	77.450.500,00
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			77.450.500,00
	Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			77.450.500,00
		Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	-	0,00
		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	-	21.500.000,00
		Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	-	25.693.200,00
		Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	-	21.507.300,00
		Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	-	8.750.000,00
		Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	-	0,00
2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia			8.750.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100 %	8.750.000,00
2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral			25.693.200,00
	Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	60 %	25.693.200,00
2.20.02.2.01.0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			21.500.000,00
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	51 Orang	21.500.000,00
2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar			0,00
	Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100 %	0,00
2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral			0,00
	Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	0 Laporan	0,00
2.20.02.2.01.0023	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional			21.507.300,00
	Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	100 %	21.507.300,00
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**20.527.200,00**
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**			**20.527.200,00**
		999.Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	0.37 Angka	20.527.200,00
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			20.527.200,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah			20.527.200,00
		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	-	0,00
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-	20.527.200,00
		Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	-	0,00
2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan			0,00
	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan	0,00
2.21.02.2.01.0009	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			0,00
	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	1 Dokumen	0,00
2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			20.527.200,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	20.527.200,00
	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			**8.992.122.366,00**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**8.003.283.566,00**
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**8.003.283.566,00**
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**7.639.286.566,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.639.286.566,00
		Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang perdagangan	undefined undefined	1.037.288.096,00
		Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang perdagangan	100 %	6.601.998.470,00
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			41.000.000,00
	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja DPKUKM			41.000.000,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	15.000.000,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	26.000.000,00
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			15.000.000,00
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	15.000.000,00
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			26.000.000,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	26.000.000,00
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.560.998.470,00
	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			6.560.998.470,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	118.318.800,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	6.442.679.670,00
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.442.679.670,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	6.442.679.670,00
2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			118.318.800,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	118.318.800,00
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			137.400.400,00
	Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung Kelancara Operasional Tugas dan Fungsi DP2KUKM			137.400.400,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	5.000.000,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	69.984.000,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	18.125.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	14.291.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	29.999.900,00
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			29.999.900,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	29.999.900,00
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			18.125.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	18.125.000,00
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			14.291.500,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.291.500,00
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			69.984.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	69.984.000,00
2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			5.000.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	5.000.000,00
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			707.594.496,00
	Tersedianya Laporan atau Dokumen yang berisi Informasi mengenai Pelaksanaan Kegiatan Jasa Penunjang			707.594.496,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	120.010.800,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	587.583.696,00
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			120.010.800,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	120.010.800,00
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			587.583.696,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	587.583.696,00
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			192.293.200,00
	Jumllah Barang Milik Daearah yang dipelihara			192.293.200,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	171.993.800,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	20.299.400,00
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			171.993.800,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	171.993.800,00
2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			20.299.400,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	20.299.400,00
2.17.02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**			**9.865.500,00**
		999.Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	6 %	9.865.500,00
		Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	100 %	9.865.500,00
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			9.865.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Bertambahnya Jumlah Koperasi yang Memperoleh Surat Ijin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam			9.865.500,00
		Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	9.865.500,00
2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			9.865.500,00
	Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	254 Unit Usaha	9.865.500,00
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**			**34.386.300,00**
		999.Persentase Koperasi Aktif	83.96 %	34.386.300,00
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			34.386.300,00
	Bertambahnya Jumlah Koperasi Sehat			34.386.300,00
		Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	-	34.386.300,00
2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan			34.386.300,00
	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	83 Unit Usaha	34.386.300,00
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**			**155.904.500,00**
		999.Jumlah Koperasi yang Meningkat Kualitas Berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset	264 Unit	155.904.500,00
		999.Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	9.63 %	155.904.500,00
		Meningkatnya produktivitas koperasi	100 %	155.904.500,00
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			155.904.500,00
	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)			155.904.500,00
		Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	-	155.904.500,00
2.17.06.2.01.0008	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			155.904.500,00
	Fasilitasi Pelaporan status kelembagaan dan/atau perkembangan usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	194 Unit Usaha	155.904.500,00
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**			**62.801.000,00**
		999.Jumlah Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	35 Unit	62.801.000,00
		999.Pertumbuhan Wirausaha	12 %	62.801.000,00
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tanggung dan mandiri	100 %	62.801.000,00
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			62.801.000,00
	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri			62.801.000,00
		Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	-	19.999.600,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-	24.999.900,00
		Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-	17.801.500,00
	Peningkatan Daya Saing da Pertumbuhan Usaha Mikro			62.801.000,00
		Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	-	19.999.600,00
		Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-	24.999.900,00
		Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-	17.801.500,00
2.17.07.2.01.0016	Perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM			19.999.600,00
	Terfasilitasinya perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	45 Lembaga	19.999.600,00
2.17.07.2.01.0018	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha			24.999.900,00
	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	40 Orang	24.999.900,00
2.17.07.2.01.0022	Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM			17.801.500,00
	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	12 Unit Usaha	17.801.500,00
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**			**101.039.700,00**
		999.Pertumbuhan UMKM yang berdaya saing	3.50 Angka	101.039.700,00
		Meningkatnya daya saing UMKM	100 %	101.039.700,00
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			101.039.700,00
	Terfasilitasinya Usaha Mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran,SDM serta desain dan teknologi			101.039.700,00
		Jumlah Kebijakan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	-	16.040.300,00
		Jumlah UMKM yang mendapatkan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik	-	49.999.800,00
		Jumlah Unit Usaha UMKM yang memperoleh pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi	-	34.999.600,00
2.17.08.2.01.0010	Penyusunan Kebijakan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan			16.040.300,00
	Tersusunnya Kebijakan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah Kebijakan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	40 Dokumen	16.040.300,00
2.17.08.2.01.0019	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM			34.999.600,00
	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada unit usaha UMKM	Jumlah Unit Usaha UMKM yang memperoleh pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi	35 Unit Usaha	34.999.600,00
2.17.08.2.01.0021	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM			49.999.800,00
	Tersedianya Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik	120 Unit Usaha	49.999.800,00
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**988.838.800,00**
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**753.839.000,00**
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**			**30.867.600,00**
		999.Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	100 %	30.867.600,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	100 %	15.417.900,00
		Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	100 %	15.449.700,00
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			15.417.900,00
	Jumlah Rekomendasi yang di Fasilitasi			15.417.900,00
		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	15.417.900,00
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			15.417.900,00
	Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	15.417.900,00
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang			15.449.700,00
	Rekomendasi yang di Fasilitasi			15.449.700,00
		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	-	15.449.700,00
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang			15.449.700,00
	Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	15.449.700,00
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**			**560.579.700,00**
		999.Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	100 %	560.579.700,00
		Meningkatnya kualitas saran perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	100 %	470.579.700,00
		Meningkatnya kualitas saran perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	100 %	90.000.000,00
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			470.579.700,00
	Meningkatnya Pembangunan Fasilitas Pasar			470.579.700,00
		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	-	470.579.700,00
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			470.579.700,00
	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	470.579.700,00
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			90.000.000,00
	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			90.000.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-	90.000.000,00
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			90.000.000,00
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	90.000.000,00
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**			**81.020.900,00**
		999.Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	100 Persentase	81.020.900,00
		Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100 %	81.020.900,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			81.020.900,00
	Meningkatnya Ketersedian Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting			81.020.900,00
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-	56.611.200,00
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-	9.974.600,00
		Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-	14.435.100,00
3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			56.611.200,00
	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	56.611.200,00
3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			9.974.600,00
	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	9.974.600,00
3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			14.435.100,00
	Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	14.435.100,00
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**			**81.370.800,00**
		999.Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100 %	40.685.400,00
		Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	100 %	40.685.400,00
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			81.370.800,00
	Meningkatnya Kesesuaiaj Alat Ukur, alat Takar, Alat timbang dan alat Perlengkapan terhadap ketentuan yang Berlaku			81.370.800,00
		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	-	40.685.400,00
		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	-	40.685.400,00
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			40.685.400,00
	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	770 Unit	40.685.400,00
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal			40.685.400,00
	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1020 Orang	40.685.400,00
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**234.999.800,00**
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**			**199.999.900,00**
		999.Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	43.57 %	199.999.900,00
		999.Persentase Terselesaikannya Dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya perda	100 %	199.999.900,00
		Meningkatnya realisasi pembangunan industri	100 %	199.999.900,00
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			199.999.900,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Meningkatnya Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Daerah			199.999.900,00
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	-	199.999.900,00
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			199.999.900,00
	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	199.999.900,00
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**			**15.000.000,00**
		999.Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	85 %	15.000.000,00
		999.Persentase Jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang Diterbitkan	0.10 %	15.000.000,00
		999.Persentase Jumlah Izin yang Diterbitkan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI menengah yang Diterbitkan	15 %	15.000.000,00
		999.Persentase Jumlah Penetapan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	0 %	15.000.000,00
		Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	100 %	15.000.000,00
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			15.000.000,00
	IKM Kab.Sikka yang Terfasilitasi IUI (Ijin Usaha Industri)			15.000.000,00
		-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-	15.000.000,00
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota			15.000.000,00
	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	15.000.000,00
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**			**19.999.900,00**
		999.Tersedianya informasi industri Secara Lengkap, Akuran dan Terkini	100 %	19.999.900,00
		Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	100 %	19.999.900,00
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			19.999.900,00
	Terlaksananya Informasi Industri Untuk IUI,IPUI,IUIKI dan IPKI			19.999.900,00
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	9.999.900,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	-	10.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			9.999.900,00
	Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	9.999.900,00
3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas			10.000.000,00
	Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	10.000.000,00
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			**3.304.930.807,00**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**3.304.930.807,00**
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**3.304.930.807,00**
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.150.004.863,00**
		1.Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	3.125.869.327,00
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.125.869.327,00
		-	-	24.135.536,00
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			16.000.300,00
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			16.000.300,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	-	0,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	16.000.300,00
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			16.000.300,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	16.000.300,00
2.18.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD			0,00
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	0,00
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.906.777.106,00
	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.906.777.106,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	72.000.000,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	2.834.777.106,00
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.834.777.106,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33/12 Orang/bulan	2.834.777.106,00
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			72.000.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	72.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			24.477.704,00
	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			24.477.704,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	8.056.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	3.663.304,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	0,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	12.758.400,00
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			0,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12.758.400,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.758.400,00
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.663.304,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	3.663.304,00
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			8.056.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	8.056.000,00
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			178.614.217,00
	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			178.614.217,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	119.066.977,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	59.547.240,00
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			119.066.977,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	119.066.977,00
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			59.547.240,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	59.547.240,00
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			24.135.536,00
	-			24.135.536,00
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	0,00
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	21.485.536,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	2.650.000,00
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			21.485.536,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	21.485.536,00
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.650.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	2.650.000,00
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**			**20.550.400,00**
		2.Presentase Peningkatan Investasi	6 %	20.550.400,00
		3.PERDA mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1 Angka	20.550.400,00
		4.Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	1 Laporan	20.550.400,00
		4.Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	0 Angka	20.550.400,00
		999.Nilai investasi PMA dan PMDN	200000000000 Rupiah	20.550.400,00
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			20.550.400,00
	Tersedianya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			20.550.400,00
		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	20.550.400,00
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			20.550.400,00
	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	20.550.400,00
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**			**7.000.000,00**
		3.Kegiatan pameran penanaman modal	1 Kegiatan	7.000.000,00
		999.persentase peningkatan investor yang berinvestasi	30.05 %	7.000.000,00
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			7.000.000,00
	Tersedianya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			7.000.000,00
		Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	-	7.000.000,00
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota			7.000.000,00
	Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	7.000.000,00
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**			**50.448.140,00**
		4.Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota	4 Data	50.448.140,00
		5.Konsultasi perizinan penanaman modal	75 Angka	50.448.140,00
		999.Penertiban perizinan dan non perizinan penanaman modal	2722 Izin	50.448.140,00
		999.Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100 Persentase	50.448.140,00
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			50.448.140,00
	Tersedianya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			50.448.140,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	25.000.100,00
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	25.448.040,00
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			25.448.040,00
	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3000 Pelaku Usaha	25.448.040,00
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko			25.000.100,00
	Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	7 Pelaku Usaha	25.000.100,00
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**			**40.276.696,00**
		4.Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab / Kota	90 Angka	40.276.696,00
		4.Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	90 Kegiatan	40.276.696,00
		5.Laporan realisasi penanaman modal	1 Laporan	40.276.696,00
		999.Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100 Persentase	40.276.696,00
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			40.276.696,00
	Tersedianya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			40.276.696,00
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-	25.276.696,00
		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-	15.000.000,00
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal			25.276.696,00
	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	45 Kegiatan Usaha	25.276.696,00
2.18.05.2.01.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya			15.000.000,00
	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	35 Kegiatan Usaha	15.000.000,00
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**			**36.650.708,00**
		999.Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100 Persentase	36.650.708,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			36.650.708,00
	Tersedianya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			36.650.708,00
		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	-	36.650.708,00
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			36.650.708,00
	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	36.650.708,00
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			**3.414.003.514,00**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**3.414.003.514,00**
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**100.516.800,00**
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**			**86.917.800,00**
		1.Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	70.21 Nilai	86.917.800,00
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	70,21 Nilai	38.851.600,00
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	70,21 Nilai	48.066.200,00
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			48.066.200,00
	Meningkatnya Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan			48.066.200,00
		Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	-	24.793.600,00
		Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	-	17.916.800,00
		Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	-	5.355.800,00
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			17.916.800,00
	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	24 Perpustakaan	17.916.800,00
2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota			5.355.800,00
	Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	7 Perpustakaan	5.355.800,00
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan			24.793.600,00
	Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	3 Dokumen	24.793.600,00
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			38.851.600,00
	Meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat/ pemustaka ke perpustakaan daerah			38.851.600,00
		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	-	38.851.600,00
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat			38.851.600,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	37 Lokus	38.851.600,00
2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**			**13.599.000,00**
		999.Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	12 %	13.599.000,00
		Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang di miliki	100 %	13.599.000,00
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			13.599.000,00
	Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			13.599.000,00
		Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	-	13.599.000,00
2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan			13.599.000,00
	Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	10 Eksemplar	13.599.000,00
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			**3.313.486.714,00**
2.24.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.174.314.814,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.174.314.814,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.174.314.814,00
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15.529.800,00
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15.529.800,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	15.529.800,00
2.24.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			15.529.800,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	15.529.800,00
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.967.406.186,00
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.967.406.186,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	59.400.000,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	2.908.006.186,00
2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.908.006.186,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.908.006.186,00
2.24.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			59.400.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	59.400.000,00
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			65.462.500,00
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			65.462.500,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	40.380.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	6.805.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	2.676.300,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	8.442.900,00
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	7.158.300,00
2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.676.300,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.676.300,00
2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			8.442.900,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8.442.900,00
2.24.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			7.158.300,00
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.158.300,00
2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			6.805.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.805.000,00
2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			40.380.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	40.380.000,00
2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			27.464.500,00
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah			27.464.500,00
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	27.464.500,00
2.24.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			27.464.500,00
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	27.464.500,00
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			56.974.428,00
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			56.974.428,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	56.974.428,00
2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			56.974.428,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	56.974.428,00
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			41.477.400,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			41.477.400,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	38.227.400,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	3.250.000,00
2.24.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			38.227.400,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	38.227.400,00
2.24.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.250.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	3.250.000,00
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**			**99.173.400,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		1.Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	100 %	99.173.400,00
		999.Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	99.173.400,00
		Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	11.110.000,00
		Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	23.218.600,00
		Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang SAH, dan Pertanggungjawaban Nasional (Pasal 40, dan Pasal 59 UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan)	100 %	64.844.800,00
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			64.844.800,00
	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Tingkat Kabupaten/Kota			64.844.800,00
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	-	12.212.000,00
		Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	-	7.720.800,00
		Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	-	11.076.000,00
		Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	-	13.912.500,00
		Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	-	19.923.500,00
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis			7.720.800,00
	Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	30 Berkas	7.720.800,00
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			11.076.000,00
	Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	100 Berkas	11.076.000,00
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			12.212.000,00
	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Laporan	12.212.000,00
2.24.02.2.01.0005	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota			19.923.500,00
	Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota	Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	12 Lembaga	19.923.500,00
2.24.02.2.01.0010	Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota			13.912.500,00
	Terlaksananya Implementasi Pengelolaan Arsip Dinamis pada ORMAS, ORPOL, OPD/SKPD, BUMD	Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	12 Instansi	13.912.500,00
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			11.110.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis Tingkat Kabupaten/Kota			11.110.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	-	11.110.000,00
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			11.110.000,00
	Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	8 Arsip	11.110.000,00
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			23.218.600,00
	Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			23.218.600,00
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	-	12.132.200,00
		Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	-	11.086.400,00
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN			11.086.400,00
	Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	30 Pengguna	11.086.400,00
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			12.132.200,00
	Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	12.132.200,00
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**			**39.998.500,00**
		999.Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	100 Persentase	39.998.500,00
		Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	100 %	23.981.300,00
		Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	100 %	16.017.200,00
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			15.999.300,00
	Terlaksananya Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			15.999.300,00
		Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	7.999.600,00
		Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	-	7.999.700,00
2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun			7.999.700,00
	Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	30 Berkas	7.999.700,00
2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			7.999.600,00
	Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	30 Arsip	7.999.600,00
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan			16.017.200,00
	Terlaksananya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan			16.017.200,00
		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	-	8.017.200,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	8.000.000,00
2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			8.000.000,00
	Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Daftar	8.000.000,00
2.24.03.2.03.0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan			8.017.200,00
	Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	10 Arsip	8.017.200,00
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota			7.982.000,00
	Terlaksananya Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota			7.982.000,00
		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	-	7.982.000,00
2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			7.982.000,00
	Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	30 Arsip	7.982.000,00
	DINAS PERIKANAN			**6.951.496.156,00**
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**6.951.496.156,00**
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**6.951.496.156,00**
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**5.951.551.618,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.951.551.618,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.753.270.112,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.198.281.506,00
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19.368.800,00
	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah			19.368.800,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	19.368.800,00
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			19.368.800,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	19.368.800,00
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.198.281.506,00
	Tersusunnya dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.198.281.506,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	107.236.000,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	4.091.045.506,00
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.091.045.506,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan	4.091.045.506,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			107.236.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	107.236.000,00
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			111.479.600,00
	Terselenggaranya kegiatan administrasi umum perangkat daerah			111.479.600,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	74.918.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	15.855.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	20.706.600,00
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.706.600,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	20.706.600,00
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			15.855.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.855.000,00
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			74.918.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	74.918.000,00
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.550.251.612,00
	Tersedianya jasa penunjang perangkat daerah			1.550.251.612,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1.374.777.872,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	171.662.040,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	3.811.700,00
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.374.777.872,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.374.777.872,00
3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.811.700,00
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.811.700,00
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			171.662.040,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	171.662.040,00
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			72.170.100,00
	Tersedianya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah			72.170.100,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	65.193.900,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	6.976.200,00
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			65.193.900,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	65.193.900,00
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			6.976.200,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	6.976.200,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**			**199.999.900,00**
		2.Total Produksi Perikanan	35271.40 Angka	199.999.900,00
		3.Jumlah Rumah Tangga Nelayan yang Melakukan Diversifikasi Usaha (RTP)	168 Angka	199.999.900,00
		4.Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional	0 %	199.999.900,00
		999.Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	35270.71 Ton	199.999.900,00
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	35.270,71 ton	199.999.900,00
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			199.999.900,00
	Meningkatnya pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten / Kota			199.999.900,00
		Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	-	199.999.900,00
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil			199.999.900,00
	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	199.999.900,00
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**			**99.953.600,00**
		2.Jumlah izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam I (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1 Angka	99.953.600,00
		3.Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan (Pendidikan dan Pelatihan/Penyuluhan dan Pendampingan/ Kemitraan Usaha dan Akses Iptek dan Informasi/ dan Penguatan Kelembagaan)	69 Angka	99.953.600,00
		4.Jumlah Benih Budidaya Air Tawar dan Air Payau yang diproduksi	0 Angka	99.953.600,00
		999.Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	0.69 Ton	99.953.600,00
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	0,69 ton	99.953.600,00
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			99.953.600,00
	Meningkatnya pemberdayaan pembudidaya ikan kecil			99.953.600,00
		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	-	99.953.600,00
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil			99.953.600,00
	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2 Kelompok	99.953.600,00
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**			**699.991.038,00**
		999.Angka Konsumsi Ikan	96.12 Kg/KAP/TH	699.991.038,00
		Angka Konsumsi Ikan	96,12 kg/kapita/tahun	699.991.038,00
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			699.991.038,00
	Meningkatnya ketersediaan bahan baku pabrik es untuk mendukung penanganan hasil tangkapan nelayan			699.991.038,00
		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	699.991.038,00
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			699.991.038,00
	Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16000 Ton	699.991.038,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			**4.409.946.296,00**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**427.309.500,00**
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**427.309.500,00**
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			**331.309.500,00**
		2.Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	3 Angka	331.309.500,00
		3.Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, penayaan keberagaman)	2 Angka	331.309.500,00
		4.Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	3 Angka	331.309.500,00
		999.Persentase karya budaya yang dilestarikan	50 %	331.309.500,00
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	3 Objek	331.309.500,00
		Persentase karya budaya yang dilestarikan	50 %	16.984.600,00
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			16.984.600,00
	Persentase kebudayaan masyarakat dalam daerah yang dikelola			16.984.600,00
		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	-	16.984.600,00
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			16.984.600,00
	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	60 Orang	16.984.600,00
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			314.324.900,00
	Jumlah kekayaan tradisional yang dilestarikan			314.324.900,00
		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	-	314.324.900,00
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			314.324.900,00
	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	314.324.900,00
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			**96.000.000,00**
		10.Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0 Angka	96.000.000,00
		2.Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan	23 Angka	96.000.000,00
		5.Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1 Angka	96.000.000,00
		6.Pembentukan tim ahli cagar budaya	0 Angka	96.000.000,00
		7.Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	0 Angka	96.000.000,00
		8.Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	1 Angka	96.000.000,00
		999.persentase cagar budaya yang dilestarikan	17.46 %	96.000.000,00
		999.Persentase Cagar Budaya yang Ditetapkan	10.34 %	96.000.000,00
		9.Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	0 Angka	96.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan	16 Cagar Budaya	96.000.000,00
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			96.000.000,00
	Persentase cagar budaya yang dikelola			96.000.000,00
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	-	96.000.000,00
2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya			96.000.000,00
	Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	16 Objek	96.000.000,00
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**3.982.636.796,00**
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			**3.982.636.796,00**
3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.634.369.546,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.634.369.546,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.634.369.546,00
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15.000.000,00
	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi			15.000.000,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	15.000.000,00
3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			15.000.000,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	15.000.000,00
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.370.506.370,00
	Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan			3.370.506.370,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	74.395.200,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	3.296.111.170,00
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.296.111.170,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	3.296.111.170,00
3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			74.395.200,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen	74.395.200,00
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			94.068.900,00
	Persentase pelaksanaan administrasi umum			94.068.900,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	68.216.000,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	9.750.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	7.499.500,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1.662.600,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	6.940.800,00
3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.662.600,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.662.600,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.940.800,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6.940.800,00
3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			9.750.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	9.750.000,00
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			7.499.500,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.499.500,00
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			68.216.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	68.216.000,00
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.814.500,00
	Persentase barang milik daerah yang diadakan			5.814.500,00
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	5.814.500,00
3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.814.500,00
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5.814.500,00
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			116.035.276,00
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			116.035.276,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	59.767.100,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	56.095.676,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	172.500,00
3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			172.500,00
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	172.500,00
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			59.767.100,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	59.767.100,00
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			56.095.676,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	56.095.676,00
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			32.944.500,00
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			32.944.500,00
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	4.989.500,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	26.155.000,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	1.800.000,00
3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			26.155.000,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	26.155.000,00
3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.800.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	1.800.000,00
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			4.989.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.989.500,00
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**			**181.900.400,00**
		4.Jumlah entitas pengelolaan destinasi	18 Angka	181.900.400,00
		5.Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	55 Angka	181.900.400,00
		6.Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	160 Angka	181.900.400,00
		7.Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	4800 Angka	181.900.400,00
		999.Persentase pertumbuhan jumlah belanja wisatawan	17.4 %	181.900.400,00
		999.Persentase Pertumbuhan Rata-rata Lama Tinggal	3.09 %	181.900.400,00
		Jumlah entitas pengelolaan destinasi	18 Unit	118.890.900,00
		Jumlah entitas pengelolaan destinasi (Angka)	18 Unit	63.009.500,00
		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	55 Unit	118.890.900,00
		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata (Angka)	55 Unit	63.009.500,00
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	160 Usaha	118.890.900,00
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota (Angka)	160 Usaha	63.009.500,00
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	4800 Orang	118.890.900,00
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (Angka)	4800 Orang	63.009.500,00
		Persentase pertumbuhan jumlah belanja wisatawan	17,46 %	118.890.900,00
		Persentase pertumbuhan jumlah belanja wisatawan	17,4 %	63.009.500,00
		Persentase Pertumbuhan Rata-rata Lama Tinggal	3,09 %	181.900.400,00
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			63.009.500,00
	Persentase daya tarik wisata yang dikelola			63.009.500,00
		Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	10.043.700,00
		Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	-	52.965.800,00
3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			52.965.800,00
	Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3 Lokasi	52.965.800,00
3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			10.043.700,00
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	4 Laporan	10.043.700,00
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			118.890.900,00
	Persentase destinasi wisata yang dikelola			118.890.900,00
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	10.967.200,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	107.923.700,00
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			107.923.700,00
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Laporan	107.923.700,00
3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			10.967.200,00
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Laporan	10.967.200,00
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**			**102.392.900,00**
		2.Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	1 Angka	102.392.900,00
		3.Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	1 Angka	102.392.900,00
		4.Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	8 Angka	102.392.900,00
		999.Indeks Kepuasan Wisatawan	80 Indeks	102.392.900,00
		999.Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	10 Persentase	102.392.900,00
		999.Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	6.00 %	102.392.900,00
		Indeks Kepuasan Wisatawan	80 poin	102.392.900,00
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	1 industri	102.392.900,00
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	1 Promosi	102.392.900,00
		Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	10 %	102.392.900,00
		Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	6 %	102.392.900,00
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			102.392.900,00
	Persentase pengembangan jaringan dan metode pemasaran pariwisata			102.392.900,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	-	29.166.200,00
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	-	34.986.900,00
		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	-	38.239.800,00
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			29.166.200,00
	Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	29.166.200,00
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			38.239.800,00
	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	38.239.800,00
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			34.986.900,00
	Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	34.986.900,00
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**			**63.973.950,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		2.Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	15 Angka	63.973.950,00
		3.Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	35 %	63.973.950,00
		4.Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	45 Angka	63.973.950,00
		999.Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	100 Persentase	63.973.950,00
		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	45 Lokasi	63.973.950,00
		Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	100 %	63.973.950,00
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	35 %	63.973.950,00
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	15 %	63.973.950,00
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			63.973.950,00
	Jumlah pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			63.973.950,00
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	-	36.982.700,00
		Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	-	26.991.250,00
3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif			36.982.700,00
	Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2 Laporan	36.982.700,00
3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata			26.991.250,00
	Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	120 Orang	26.991.250,00
	DINAS PERTANIAN			**17.390.040.074,00**
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**17.390.040.074,00**
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**17.390.040.074,00**
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**11.084.539.808,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	11.084.539.808,00
		Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	11.084.539.808,00
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			137.759.600,00
	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaraan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			137.759.600,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	137.759.600,00
3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			137.759.600,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	137.759.600,00
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.443.908.218,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.443.908.218,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	130.634.500,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	9.313.273.718,00
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.313.273.718,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	136 Orang/bulan	9.313.273.718,00
3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			130.634.500,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	130.634.500,00
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			246.999.100,00
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			246.999.100,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	220.180.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	17.202.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	9.617.100,00
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			9.617.100,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	9.617.100,00
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			17.202.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	17.202.000,00
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			220.180.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	220.180.000,00
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			404.314.900,00
	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			404.314.900,00
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	136.397.700,00
		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	267.917.200,00
3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			136.397.700,00
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	136.397.700,00
3.27.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			267.917.200,00
	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	267.917.200,00
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			443.223.990,00
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			443.223.990,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	96.482.886,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	346.741.104,00
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			96.482.886,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	96.482.886,00
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			346.741.104,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	346.741.104,00
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			408.334.000,00
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara			408.334.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	401.734.000,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	6.600.000,00
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			401.734.000,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	401.734.000,00
3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			6.600.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	6.600.000,00
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**3.514.002.266,00**
		999.Persentase peningkatan produksi hortikultura	0.5 %	3.514.002.266,00
		999.persentase peningkatan produksi komoditas peternakan	0.2 %	3.514.002.266,00
		999.Persentase peningkatan produksi perkebunan	0.2 %	3.514.002.266,00
		999.Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	0.1 %	3.514.002.266,00
		999.produktivitas pangan	3.85 Ton/Ha	3.514.002.266,00
		Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	undefined undefined	806.231.700,00
		Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100 %	2.707.770.566,00
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			1.939.954.166,00
	Meningkatnya penggunaan sarana pertanian yang diawasi			1.939.954.166,00
		Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	-	249.999.666,00
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-	967.924.600,00
		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	-	722.029.900,00
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			722.029.900,00
	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4 Laporan	722.029.900,00
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			967.924.600,00
	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3 Laporan	967.924.600,00
3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih			249.999.666,00
	Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	20 Ton	249.999.666,00
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			239.988.600,00
	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			239.988.600,00
		Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	-	239.988.600,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman			239.988.600,00
	Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	239.988.600,00
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			806.231.700,00
	Meningkatnya mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota			806.231.700,00
		Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	-	806.231.700,00
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil			806.231.700,00
	Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	4 Laporan	806.231.700,00
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			527.827.800,00
	Meningkatnya penyediaan benih/bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota			527.827.800,00
		Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	-	527.827.800,00
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			527.827.800,00
	Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	430 Ekor	527.827.800,00
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			**911.499.400,00**
		999.Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	1906.5 Hektar	911.499.400,00
		Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %	911.499.400,00
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			911.499.400,00
	Meningkatnya pengembangan prasarana pertanian			911.499.400,00
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	-	911.499.400,00
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			911.499.400,00
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	8 Laporan	911.499.400,00
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**			**1.332.548.900,00**
		3.Penurunan jumlah kasus penyakit hewan	1 %	1.332.548.900,00
		999.Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	1 Persentase	1.332.548.900,00
		999.Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	1 Dokumen	1.332.548.900,00
		Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100 %	1.332.548.900,00
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			1.332.548.900,00
	Meningkatnya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.332.548.900,00
		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	-	349.986.400,00
		Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	-	982.562.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan			982.562.500,00
	Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	21 Wilayah	982.562.500,00
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			349.986.400,00
	Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	21 Laporan	349.986.400,00
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**			**199.951.100,00**
		999.Persentase Penanganan Bencana Pertanian	50 Persentase	199.951.100,00
		999.Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	50 Persentase	199.951.100,00
		Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100 %	199.951.100,00
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			199.951.100,00
	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			199.951.100,00
		Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	-	199.951.100,00
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			199.951.100,00
	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	30 Ha	199.951.100,00
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			**347.498.600,00**
		999.Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	14.64 Persentase	347.498.600,00
		999.Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	10.52 Persentase	347.498.600,00
		Persentase Peningkatan Penyuluhan Pertanian	100 %	347.498.600,00
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			347.498.600,00
	Meningkatnya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			347.498.600,00
		Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	-	347.498.600,00
3.27.07.2.01.0013	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa			347.498.600,00
	Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kelemagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	2 Unit	347.498.600,00
	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN			**786.759.250,00**
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**786.759.250,00**
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**786.759.250,00**
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**25.001.885.649,60**
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	786.759.250,00
		999.Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Yang Terlaksana Sesuai Standar	100 %	786.759.250,00
		999.Persentase Pemenuhan Layanan Kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	786.759.250,00
		999.Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Kepala Daerah Yang Efektif dan Akuntabel	100 %	786.759.250,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			17.022.086.064,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	seluruh dokumen, laporan dan catatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan, belanja dan aset perangkat daerah, memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran.			17.022.086.064,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	420.044.078,00
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			29.141.400,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13 Dokumen	29.141.400,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.120.298.125,00
	Seluruh dokumen, sistem dan layanan pendukung yang menunjang kelancaran operasional dan tata kelola kantor termasuk pengelolaan surat menyurat, kearsipan, aset inventaris serta fasilitas dan prasarana kantor.			1.120.298.125,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	744.380.400,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	138.726.600,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	40.911.100,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	116.033.825,00
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			9.592.600,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.592.600,00
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			91.810.600,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	91.810.600,00
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.805.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.805.000,00
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			481.784.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	481.784.000,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.991.736.610,00
	Tersedianya layanan non-fisik (jasa) yang dibutuhkan oleh perangkat daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.			2.991.736.610,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1.253.977.510,00
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			10.916.250,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.916.250,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.125.887.570,60
	Barang milik daerah yang terpelihara dengan baik, berfungsi optimal dan memiliki umur ekonomis yang lebih panjang sehingga mendukung kelancaran dan efisiensi operasional Sekretariat Daerah.			1.125.887.570,60
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	498.969.012,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	18.918.200,00
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			55.311.400,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	55.311.400,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.750.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2.750.000,00
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			660.970.880,00
	Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang akuntabel serta dukungan operasional dan fasilitas kerja yang memadai bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.			660.970.880,00
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	15.000.000,00
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			15.000.000,00
	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3 Orang	15.000.000,00
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			87.648.000,00
	Terselenggaranya setiap kegiatan pimpinan (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) dengan tertib, lancar dan sesuai etika keprotokolan serta terjalinnya komunikasi yang efektif antara pimpinan dengan berbagai pihak.			87.648.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-	60.500.000,00
		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-	27.148.000,00
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			60.500.000,00
	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	60.500.000,00
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan			27.148.000,00
	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	27.148.000,00
	BAGIAN PEMERINTAHAN			**343.876.000,00**
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**343.876.000,00**
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**343.876.000,00**
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**25.001.885.649,60**
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	133.571.400,00
		999.Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Yang Terlaksana Sesuai Standar	100 %	133.571.400,00
		999.Persentase Pemenuhan Layanan Kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	133.571.400,00
		999.Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Kepala Daerah Yang Efektif dan Akuntabel	100 %	133.571.400,00
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			73.254.100,00
	Dokumen rencana strategis dan tahunan, alokasi anggaran yang jelas serta laporan dan analisis kinerja yang digunakan untuk akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan.			73.254.100,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	73.254.100,00
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			42.110.000,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	42.110.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			17.022.086.064,00
	seluruh dokumen, laporan dan catatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan, belanja dan aset perangkat daerah, memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran.			17.022.086.064,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	420.044.078,00
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			19.200.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	19.200.000,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.120.298.125,00
	Seluruh dokumen, sistem dan layanan pendukung yang menunjang kelancaran operasional dan tata kelola kantor termasuk pengelolaan surat menyurat, kearsipan, aset inventaris serta fasilitas dan prasarana kantor.			1.120.298.125,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	744.380.400,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	40.911.100,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	116.033.825,00
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			26.624.200,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	26.624.200,00
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			8.151.100,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.151.100,00
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			14.705.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	14.705.000,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.991.736.610,00
	Tersedianya layanan non-fisik (jasa) yang dibutuhkan oleh perangkat daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.			2.991.736.610,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1.253.977.510,00
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			7.860.000,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7.860.000,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.125.887.570,60
	Barang milik daerah yang terpelihara dengan baik, berfungsi optimal dan memiliki umur ekonomis yang lebih panjang sehingga mendukung kelancaran dan efisiensi operasional Sekretariat Daerah.			1.125.887.570,60
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	498.969.012,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	18.918.200,00
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			14.921.100,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	14.921.100,00
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**6.642.354.750,00**
		1.Persentase kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	210.304.600,00
		999.Persentase Fasilitasi Bantuan Sosial/Hibah/Bantuan Keagamaan Yang Tepat Sasaran	100 %	210.304.600,00
		999.Persentase Kerja Sama Daerah Yang Memberikan Manfaat Bagi Pembangunan	100 %	210.304.600,00
		999.Persentase Penyelesaian Urusan Administrasi Pemerintahan	100 %	210.304.600,00
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			164.223.900,00
	Tersedianya data, dokumen dan sistem informasi yang mendukung perumusan kebijakan, koordinasi antar instansi, fasilitasi pemilihan umum serta pengelolaan batas wilayah sehingga menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.			164.223.900,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	-	164.223.900,00
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			164.223.900,00
	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	164.223.900,00
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah			46.080.700,00
	Terwujudnya kesepakatan dan implementasi program kolaboratif antara pemerintah daerah dengan pihak lain (daerah lain, pusat, swasta atau internasional) yang dibuktikan dengan dokumen Nota Kesepahaman (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS), laporan pelaksanaan program bersama serta peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.			46.080.700,00
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	-	46.080.700,00
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			46.080.700,00
	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	46.080.700,00
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			**275.765.481,00**
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**275.765.481,00**
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**275.765.481,00**
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**25.001.885.649,60**
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	146.025.151,00
		999.Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Yang Terlaksana Sesuai Standar	100 %	146.025.151,00
		999.Persentase Pemenuhan Layanan Kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	146.025.151,00
		999.Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Kepala Daerah Yang Efektif dan Akuntabel	100 %	146.025.151,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			17.022.086.064,00
	seluruh dokumen, laporan dan catatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan, belanja dan aset perangkat daerah, memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran.			17.022.086.064,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	420.044.078,00
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			22.591.478,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	22.591.478,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.120.298.125,00
	Seluruh dokumen, sistem dan layanan pendukung yang menunjang kelancaran operasional dan tata kelola kantor termasuk pengelolaan surat menyurat, kearsipan, aset inventaris serta fasilitas dan prasarana kantor.			1.120.298.125,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	744.380.400,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	138.726.600,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	40.911.100,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	116.033.825,00
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.842.765,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	6.842.765,00
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1.237.400,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.237.400,00
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.157.600,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2.157.600,00
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			25.679.700,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	25.679.700,00
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			310.743.700,00
	Tersedianya barang-barang yang dibutuhkan (baik bergerak maupun tidak bergerak) sesuai spesifikasi, jumlah dan waktu yang ditetapkan serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang semuanya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.			310.743.700,00
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	33.361.200,00
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.150.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	2.150.000,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.991.736.610,00
	Tersedianya layanan non-fisik (jasa) yang dibutuhkan oleh perangkat daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.			2.991.736.610,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1.253.977.510,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1.725.622.500,00
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			44.880.000,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	44.880.000,00
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			4.815.796,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.815.796,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.125.887.570,60
	Barang milik daerah yang terpelihara dengan baik, berfungsi optimal dan memiliki umur ekonomis yang lebih panjang sehingga mendukung kelancaran dan efisiensi operasional Sekretariat Daerah.			1.125.887.570,60

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	498.969.012,00
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			35.670.412,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	35.670.412,00
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**666.341.930,00**
		2.Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	0 %	129.740.330,00
		3.Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	83.80 %	129.740.330,00
		4.Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	43.15 %	129.740.330,00
		5.Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	100 %	129.740.330,00
		999.Persentase Administrasi Pembangunan Daerah Yang Efektif dan Tepat Waktu	100 %	129.740.330,00
		999.Persentase Fasilitasi Kebijakan Perekonomian Daerah	100 %	129.740.330,00
		999.Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa Yang Dilaksanakan Melalui Sistem Elektronik (SPSE)	100 %	129.740.330,00
		999.Persentase Rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Ditindaklanjuti	100 %	129.740.330,00
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			129.740.330,00
	Tersedianya data, dokumen dan sistem informasi yang akuntabel dan transparan terkait seluruh tahapan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan yang terkoordinasi, laporan kemajuan proyek, data realisasi fisik dan keuangan serta hasil evaluasi pembangunan yang menjadi dasar pengambilan kebijakan selanjutnya.			129.740.330,00
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	-	4.127.545,00
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-	12.562.785,00
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-	113.050.000,00
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan			4.127.545,00
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	4.127.545,00
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			113.050.000,00
	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	113.050.000,00
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			12.562.785,00
	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	12.562.785,00
	BAGIAN PEREKONOMIAN			**271.078.600,00**
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**271.078.600,00**
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**271.078.600,00**
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**25.001.885.649,60**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	87.748.600,00
		999.Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Yang Terlaksana Sesuai Standar	100 %	87.748.600,00
		999.Persentase Pemenuhan Layanan Kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	87.748.600,00
		999.Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Kepala Daerah Yang Efektif dan Akuntabel	100 %	87.748.600,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			17.022.086.064,00
	seluruh dokumen, laporan dan catatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan, belanja dan aset perangkat daerah, memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran.			17.022.086.064,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	420.044.078,00
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			25.970.500,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	25.970.500,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.120.298.125,00
	Seluruh dokumen, sistem dan layanan pendukung yang menunjang kelancaran operasional dan tata kelola kantor termasuk pengelolaan surat menyurat, kearsipan, aset inventaris serta fasilitas dan prasarana kantor.			1.120.298.125,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	744.380.400,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	40.911.100,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	116.033.825,00
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.634.600,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.634.600,00
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.176.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.176.000,00
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			18.422.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	18.422.000,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.991.736.610,00
	Tersedianya layanan non-fisik (jasa) yang dibutuhkan oleh perangkat daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.			2.991.736.610,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1.253.977.510,00
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			7.860.000,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7.860.000,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.125.887.570,60
	Barang milik daerah yang terpelihara dengan baik, berfungsi optimal dan memiliki umur ekonomis yang lebih panjang sehingga mendukung kelancaran dan efisiensi operasional Sekretariat Daerah.			1.125.887.570,60
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	122.409.942,40

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	18.918.200,00
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			25.785.500,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	25.785.500,00
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.900.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	1.900.000,00
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**666.341.930,00**
		2.Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	0 %	183.330.000,00
		3.Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	83.80 %	183.330.000,00
		4.Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	43.15 %	183.330.000,00
		5.Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	100 %	183.330.000,00
		999.Persentase Administrasi Pembangunan Daerah Yang Efektif dan Tepat Waktu	100 %	183.330.000,00
		999.Persentase Fasilitasi Kebijakan Perekonomian Daerah	100 %	183.330.000,00
		999.Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa Yang Dilaksanakan Melalui Sistem Elektronik (SPSE)	100 %	183.330.000,00
		999.Persentase Rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Ditindaklanjuti	100 %	183.330.000,00
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			183.330.000,00
	Terciptanya iklim ekonomi yang kondusif, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah serta pemberdayaan sektor-sektor ekonomi strategis yang dibuktikan dengan data peningkatan investasi, laporan pengembangan UMKM, peningkatan produksi sektor unggulan serta penyerapan tenaga kerja.			183.330.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-	14.190.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	-	40.545.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-	128.595.000,00
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			14.190.000,00
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	14.190.000,00
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			128.595.000,00
	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan	128.595.000,00
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			40.545.000,00
	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	40.545.000,00
	BAGIAN HUKUM			**325.174.000,00**
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**325.174.000,00**
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**325.174.000,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**25.001.885.649,60**
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	74.219.100,00
		999.Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Yang Terlaksana Sesuai Standar	100 %	74.219.100,00
		999.Persentase Pemenuhan Layanan Kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	74.219.100,00
		999.Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Kepala Daerah Yang Efektif dan Akuntabel	100 %	74.219.100,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			17.022.086.064,00
	seluruh dokumen, laporan dan catatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan, belanja dan aset perangkat daerah, memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran.			17.022.086.064,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	420.044.078,00
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			21.005.400,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 % Dokumen	21.005.400,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.120.298.125,00
	Seluruh dokumen, sistem dan layanan pendukung yang menunjang kelancaran operasional dan tata kelola kantor termasuk pengelolaan surat menyurat, kearsipan, aset inventaris serta fasilitas dan prasarana kantor.			1.120.298.125,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	744.380.400,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	116.033.825,00
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.824.200,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan Paket	6.824.200,00
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			15.192.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan Laporan	15.192.000,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.991.736.610,00
	Tersedianya layanan non-fisik (jasa) yang dibutuhkan oleh perangkat daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.			2.991.736.610,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1.253.977.510,00
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			7.860.000,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan Laporan	7.860.000,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.125.887.570,60
	Barang milik daerah yang terpelihara dengan baik, berfungsi optimal dan memiliki umur ekonomis yang lebih panjang sehingga mendukung kelancaran dan efisiensi operasional Sekretariat Daerah.			1.125.887.570,60
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	122.409.942,40
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	18.918.200,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			20.437.500,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Laporan Unit	20.437.500,00
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.900.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Laporan Unit	2.900.000,00
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**6.642.354.750,00**
		999.Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	100 Persentase	250.954.900,00
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			250.954.900,00
	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			250.954.900,00
		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	-	52.390.500,00
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	-	140.087.100,00
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	-	58.477.300,00
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			140.087.100,00
	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	10 Dokumen Dokumen	140.087.100,00
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum			52.390.500,00
	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4 Kasus	52.390.500,00
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum danPengelolaan Informasi Hukum			58.477.300,00
	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	100 % Dokumen	58.477.300,00
	BAGIAN ORGANISASI			**348.233.700,00**
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**348.233.700,00**
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**348.233.700,00**
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**25.001.885.649,60**
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	122.217.700,00
		999.Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Yang Terlaksana Sesuai Standar	100 %	122.217.700,00
		999.Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Tertata Sesuai Ketentuan	100 %	226.016.000,00
		999.Persentase Pemenuhan Layanan Kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	122.217.700,00
		999.Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Kepala Daerah Yang Efektif dan Akuntabel	100 %	122.217.700,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			17.022.086.064,00
	seluruh dokumen, laporan dan catatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan, belanja dan aset perangkat daerah, memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran.			17.022.086.064,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	420.044.078,00
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			31.414.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	31.414.800,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.120.298.125,00
	Seluruh dokumen, sistem dan layanan pendukung yang menunjang kelancaran operasional dan tata kelola kantor termasuk pengelolaan surat menyurat, kearsipan, aset inventaris serta fasilitas dan prasarana kantor.			1.120.298.125,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	744.380.400,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	40.911.100,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	116.033.825,00
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.887.300,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	3.887.300,00
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.972.500,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.972.500,00
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			27.947.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	27.947.000,00
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			310.743.700,00
	Tersedianya barang-barang yang dibutuhkan (baik bergerak maupun tidak bergerak) sesuai spesifikasi, jumlah dan waktu yang ditetapkan serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang semuanya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.			310.743.700,00
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	33.361.200,00
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.260.100,00
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	2.260.100,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.991.736.610,00
	Tersedianya layanan non-fisik (jasa) yang dibutuhkan oleh perangkat daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.			2.991.736.610,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1.253.977.510,00
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			35.570.000,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	35.570.000,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.125.887.570,60
	Barang milik daerah yang terpelihara dengan baik, berfungsi optimal dan memiliki umur ekonomis yang lebih panjang sehingga mendukung kelancaran dan efisiensi operasional Sekretariat Daerah.			1.125.887.570,60
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	498.969.012,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	18.918.200,00
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			15.616.000,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	15.616.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.550.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	2.550.000,00
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi			241.469.500,00
	Terlaksananya Penataan Organisasi			241.469.500,00
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-	34.204.800,00
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	42.841.400,00
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	94.289.200,00
		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-	38.572.400,00
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	31.561.700,00
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			94.289.200,00
	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	94.289.200,00
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			16.108.200,00
	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	16.108.200,00
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			38.572.400,00
	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	38.572.400,00
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			42.841.400,00
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	42.841.400,00
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			34.204.800,00
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	34.204.800,00
	BAGIAN UMUM			**5.380.354.280,20**
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**5.380.354.280,20**
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**5.380.354.280,20**
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**25.001.885.649,60**
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.380.354.280,20
		999.Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Yang Terlaksana Sesuai Standar	100 %	5.380.354.280,20
		999.Persentase Pemenuhan Layanan Kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	5.380.354.280,20
		999.Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Kepala Daerah Yang Efektif dan Akuntabel	100 %	5.380.354.280,20
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			17.022.086.064,00
	seluruh dokumen, laporan dan catatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan, belanja dan aset perangkat daerah, memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran.			17.022.086.064,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	420.044.078,00
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			79.045.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	79.045.800,00
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			23.856.300,00
	Seluruh dokumen, data dan sistem pengelolaan yang berkaitan dengan siklus hidup pegawai, mulai dari perencanaan kebutuhan, rekrutmen, penempatan, pengembangan, penggajian hingga pensiun, demi memastikan ketersediaan dan kinerja sumber daya manusia yang optimal.			23.856.300,00
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	23.856.300,00
4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			23.856.300,00
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	23.856.300,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.120.298.125,00
	Seluruh dokumen, sistem dan layanan pendukung yang menunjang kelancaran operasional dan tata kelola kantor termasuk pengelolaan surat menyurat, kearsipan, aset inventaris serta fasilitas dan prasarana kantor.			1.120.298.125,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	744.380.400,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	138.726.600,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	40.911.100,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	80.246.200,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	116.033.825,00
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			80.246.200,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	80.246.200,00
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			32.141.700,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	32.141.700,00
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			38.803.600,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	38.803.600,00
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			5.308.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.308.000,00
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			18.368.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	18.368.000,00
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			310.743.700,00
	Tersedianya barang-barang yang dibutuhkan (baik bergerak maupun tidak bergerak) sesuai spesifikasi, jumlah dan waktu yang ditetapkan serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang semuanya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.			310.743.700,00
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	262.505.300,00
4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			262.505.300,00
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	172 Unit	262.505.300,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.991.736.610,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Tersedianya layanan non-fisik (jasa) yang dibutuhkan oleh perangkat daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.			2.991.736.610,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1.253.977.510,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1.725.622.500,00
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			867.356.260,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	867.356.260,00
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.698.433.104,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	1.698.433.104,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.125.887.570,60
	Barang milik daerah yang terpelihara dengan baik, berfungsi optimal dan memiliki umur ekonomis yang lebih panjang sehingga mendukung kelancaran dan efisiensi operasional Sekretariat Daerah.			1.125.887.570,60
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	460.240.416,20
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	498.969.012,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	25.350.000,00
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			375.250.100,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	375.250.100,00
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			460.240.416,20
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	460.240.416,20
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			25.350.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	25.350.000,00
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			660.970.880,00
	Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang akuntabel serta dukungan operasional dan fasilitas kerja yang memadai bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.			660.970.880,00
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-	69.514.700,00
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			69.514.700,00
	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket	69.514.700,00
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			1.343.934.800,00
	Terpenuhinya kebutuhan operasional harian dan kenyamanan lingkungan kerja bagi seluruh jajaran Sekretariat Daerah.			1.343.934.800,00
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	-	1.084.189.100,00
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	-	259.745.700,00
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			1.084.189.100,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket	1.084.189.100,00
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			259.745.700,00
	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	7 Paket	259.745.700,00
	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM			**166.609.400,00**
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**166.609.400,00**
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**166.609.400,00**
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**25.001.885.649,60**
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	93.473.800,00
		999.Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Yang Terlaksana Sesuai Standar	100 %	93.473.800,00
		999.Persentase Pemenuhan Layanan Kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	93.473.800,00
		999.Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Kepala Daerah Yang Efektif dan Akuntabel	100 %	93.473.800,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			17.022.086.064,00
	seluruh dokumen, laporan dan catatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan, belanja dan aset perangkat daerah, memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran.			17.022.086.064,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	420.044.078,00
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			20.997.500,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen Dokumen	20.997.500,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.120.298.125,00
	Seluruh dokumen, sistem dan layanan pendukung yang menunjang kelancaran operasional dan tata kelola kantor termasuk pengelolaan surat menyurat, kearsipan, aset inventaris serta fasilitas dan prasarana kantor.			1.120.298.125,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	744.380.400,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	40.911.100,00
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			6.578.200,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Kegiatan Paket	6.578.200,00
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			51.169.200,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	51.169.200,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.991.736.610,00
	Tersedianya layanan non-fisik (jasa) yang dibutuhkan oleh perangkat daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.			2.991.736.610,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	12.136.600,00
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12.136.600,00
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Kegiatan Laporan	12.136.600,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.125.887.570,60
	Barang milik daerah yang terpelihara dengan baik, berfungsi optimal dan memiliki umur ekonomis yang lebih panjang sehingga mendukung kelancaran dan efisiensi operasional Sekretariat Daerah.			1.125.887.570,60
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	122.409.942,40
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	18.918.200,00
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.774.100,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Kegiatan Unit	1.774.100,00
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			818.200,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Kegiatan Unit	818.200,00
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**666.341.930,00**
		2.Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	0 %	73.135.600,00
		3.Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	83.80 %	73.135.600,00
		4.Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	43.15 %	73.135.600,00
		5.Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	100 %	73.135.600,00
		999.Persentase Administrasi Pembangunan Daerah Yang Efektif dan Tepat Waktu	100 %	73.135.600,00
		999.Persentase Fasilitasi Kebijakan Perekonomian Daerah	100 %	73.135.600,00
		999.Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa Yang Dilaksanakan Melalui Sistem Elektronik (SPSE)	100 %	73.135.600,00
		999.Persentase Rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Ditindaklanjuti	100 %	73.135.600,00
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			73.135.600,00
	Data dan laporan yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan, kondisi terkini sumber daya alam serta dampak dari kebijakan tersebut.			73.135.600,00
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	-	24.657.700,00
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	-	24.159.900,00
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	-	24.318.000,00
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			24.318.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Kegiatan Dokumen	24.318.000,00
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			24.159.900,00
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Kegiatan Dokumen	24.159.900,00
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			24.657.700,00
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	kegiiatan Dokumen	24.657.700,00
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			**616.275.500,00**
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**616.275.500,00**
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**616.275.500,00**
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**25.001.885.649,60**
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	336.139.500,00
		999.Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Yang Terlaksana Sesuai Standar	100 %	336.139.500,00
		999.Persentase Pemenuhan Layanan Kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	336.139.500,00
		999.Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Kepala Daerah Yang Efektif dan Akuntabel	100 %	336.139.500,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			17.022.086.064,00
	seluruh dokumen, laporan dan catatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan, belanja dan aset perangkat daerah, memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran.			17.022.086.064,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	420.044.078,00
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			25.233.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	25.233.000,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.120.298.125,00
	Seluruh dokumen, sistem dan layanan pendukung yang menunjang kelancaran operasional dan tata kelola kantor termasuk pengelolaan surat menyurat, kearsipan, aset inventaris serta fasilitas dan prasarana kantor.			1.120.298.125,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	744.380.400,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	40.911.100,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	116.033.825,00
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			15.279.800,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	15.279.800,00
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.692.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.692.000,00
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			26.760.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	26.760.000,00
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			310.743.700,00
	Tersedianya barang-barang yang dibutuhkan (baik bergerak maupun tidak bergerak) sesuai spesifikasi, jumlah dan waktu yang ditetapkan serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang semuanya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.			310.743.700,00
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	14.877.200,00
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	33.361.200,00
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			14.877.200,00
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	14.877.200,00
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.791.600,00
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	15.791.600,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.991.736.610,00
	Tersedianya layanan non-fisik (jasa) yang dibutuhkan oleh perangkat daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.			2.991.736.610,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1.253.977.510,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1.725.622.500,00
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			207.188.800,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	207.188.800,00
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.600.000,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.600.000,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.125.887.570,60
	Barang milik daerah yang terpelihara dengan baik, berfungsi optimal dan memiliki umur ekonomis yang lebih panjang sehingga mendukung kelancaran dan efisiensi operasional Sekretariat Daerah.			1.125.887.570,60
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	122.409.942,40
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	18.918.200,00
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			22.417.100,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	22.417.100,00
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.300.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	1.300.000,00
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**666.341.930,00**
		2.Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	0 %	280.136.000,00
		3.Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	83.80 %	280.136.000,00
		4.Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	43.15 %	280.136.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		5.Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	100 %	280.136.000,00
		999.Persentase Administrasi Pembangunan Daerah Yang Efektif dan Tepat Waktu	100 %	280.136.000,00
		999.Persentase Fasilitasi Kebijakan Perekonomian Daerah	100 %	280.136.000,00
		999.Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa Yang Dilaksanakan Melalui Sistem Elektronik (SPSE)	100 %	280.136.000,00
		999.Persentase Rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Ditindaklanjuti	100 %	280.136.000,00
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			280.136.000,00
	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa yang berkualitas sesuai spesifikasi, jumlah dan waktu yang ditetapkan dengan harga yang wajar serta melalui proses yang transparan, akuntabel dan efisien.			280.136.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	14.870.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	196.200.000,00
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	69.066.000,00
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			196.200.000,00
	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	196.200.000,00
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			14.870.000,00
	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	14.870.000,00
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			69.066.000,00
	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Orang	69.066.000,00
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			**6.311.031.552,40**
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**6.311.031.552,40**
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**6.311.031.552,40**
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**25.001.885.649,60**
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	114.482.802,40
		999.Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Yang Terlaksana Sesuai Standar	100 %	114.482.802,40
		999.Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Tertata Sesuai Ketentuan	100 %	15.453.500,00
		999.Persentase Pemenuhan Layanan Kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	114.482.802,40
		999.Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Kepala Daerah Yang Efektif dan Akuntabel	100 %	114.482.802,40
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			17.022.086.064,00
	seluruh dokumen, laporan dan catatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan, belanja dan aset perangkat daerah, memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran.			17.022.086.064,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	420.044.078,00
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			35.368.200,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	35.368.200,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.120.298.125,00
	Seluruh dokumen, sistem dan layanan pendukung yang menunjang kelancaran operasional dan tata kelola kantor termasuk pengelolaan surat menyurat, kearsipan, aset inventaris serta fasilitas dan prasarana kantor.			1.120.298.125,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	744.380.400,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	40.911.100,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	116.033.825,00
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.745.860,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.745.860,00
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.548.700,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.548.700,00
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			22.587.500,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	22.587.500,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.991.736.610,00
	Tersedianya layanan non-fisik (jasa) yang dibutuhkan oleh perangkat daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.			2.991.736.610,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1.253.977.510,00
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			7.860.000,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	7.860.000,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.125.887.570,60
	Barang milik daerah yang terpelihara dengan baik, berfungsi optimal dan memiliki umur ekonomis yang lebih panjang sehingga mendukung kelancaran dan efisiensi operasional Sekretariat Daerah.			1.125.887.570,60
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	122.409.942,40
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	498.969.012,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	18.918.200,00
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			2.200.000,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	2.200.000,00
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			40.222.542,40
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	40.222.542,40

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.950.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	1.950.000,00
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi			241.469.500,00
	Terlaksananya Penataan Organisasi			241.469.500,00
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	31.561.700,00
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			15.453.500,00
	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	0 Laporan	15.453.500,00
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**6.642.354.750,00**
		1.Persentase kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	6.181.095.250,00
		999.Persentase Fasilitasi Bantuan Sosial/Hibah/Bantuan Keagamaan Yang Tepat Sasaran	100 %	6.181.095.250,00
		999.Persentase Kerja Sama Daerah Yang Memberikan Manfaat Bagi Pembangunan	100 %	6.181.095.250,00
		999.Persentase Penyelesaian Urusan Administrasi Pemerintahan	100 %	6.181.095.250,00
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			6.181.095.250,00
	Peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang dibuktikan dengan tersedianya layanan dan program kesejahteraan sosial, data penerima manfaat, laporan capaian program serta berkurangnya angka kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial lainnya.			6.181.095.250,00
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-	680.348.800,00
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	-	5.500.746.450,00
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	-	0,00
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			680.348.800,00
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	0 Dokumen	680.348.800,00
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial			0,00
	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	0,00
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat			5.500.746.450,00
	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	25 Dokumen	5.500.746.450,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN			**17.485.424.566,00**
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**17.485.424.566,00**
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**17.485.424.566,00**
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**25.001.885.649,60**
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	17.485.424.566,00
		999.Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Yang Terlaksana Sesuai Standar	100 %	17.485.424.566,00
		999.Persentase Pemenuhan Layanan Kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	17.485.424.566,00
		999.Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Kepala Daerah Yang Efektif dan Akuntabel	100 %	17.485.424.566,00
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			73.254.100,00
	Dokumen rencana strategis dan tahunan, alokasi anggaran yang jelas serta laporan dan analisis kinerja yang digunakan untuk akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan.			73.254.100,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	73.254.100,00
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			31.144.100,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	31.144.100,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			17.022.086.064,00
	seluruh dokumen, laporan dan catatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan, belanja dan aset perangkat daerah, memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran.			17.022.086.064,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	420.044.078,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	16.602.041.986,00
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.602.041.986,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126 Orang/bulan	16.602.041.986,00
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			110.076.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28 Dokumen	110.076.000,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.120.298.125,00
	Seluruh dokumen, sistem dan layanan pendukung yang menunjang kelancaran operasional dan tata kelola kantor termasuk pengelolaan surat menyurat, kearsipan, aset inventaris serta fasilitas dan prasarana kantor.			1.120.298.125,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	744.380.400,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	138.726.600,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	40.911.100,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	116.033.825,00
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.460.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	6.460.800,00
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			6.875.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.875.000,00
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			5.522.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.522.000,00
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			41.766.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan	41.766.000,00
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			310.743.700,00
	Tersedianya barang-barang yang dibutuhkan (baik bergerak maupun tidak bergerak) sesuai spesifikasi, jumlah dan waktu yang ditetapkan serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang semuanya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.			310.743.700,00
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	33.361.200,00
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			13.159.500,00
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	13.159.500,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.991.736.610,00
	Tersedianya layanan non-fisik (jasa) yang dibutuhkan oleh perangkat daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.			2.991.736.610,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1.253.977.510,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1.725.622.500,00
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			56.626.200,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	56.626.200,00
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			18.773.600,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.773.600,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.125.887.570,60
	Barang milik daerah yang terpelihara dengan baik, berfungsi optimal dan memiliki umur ekonomis yang lebih panjang sehingga mendukung kelancaran dan efisiensi operasional Sekretariat Daerah.			1.125.887.570,60
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	122.409.942,40
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	18.918.200,00
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			11.773.200,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	11.773.200,00
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4.750.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	4.750.000,00
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			660.970.880,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang akuntabel serta dukungan operasional dan fasilitas kerja yang memadai bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.			660.970.880,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	576.456.180,00
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			576.456.180,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	576.456.180,00
	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			**27.153.887.894,00**
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**27.153.887.894,00**
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**			**27.153.887.894,00**
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**24.477.379.402,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	24.477.379.402,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persentase	48.241.800,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persentase	20.696.316.798,00
		undefined	undefined undefined	3.732.820.804,00
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			48.241.800,00
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			48.241.800,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	48.241.800,00
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			48.241.800,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	48.241.800,00
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.732.820.804,00
	Terlaksananya Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.732.820.804,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	97.140.000,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	3.635.680.804,00
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.635.680.804,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	3.635.680.804,00
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			97.140.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	97.140.000,00
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			18.555.000,00
	Terlaksananya Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			18.555.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	0,00
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	0,00
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	18.555.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	0,00
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			0,00
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00
4.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			0,00
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	0,00
4.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			0,00
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	348 Dokumen	0,00
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			18.555.000,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	18.555.000,00
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			429.267.100,00
	Terlaksananya Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah			429.267.100,00
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	0,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	0,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	258.635.000,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	120.184.000,00
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	0,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	9.113.500,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	7.503.600,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	33.831.000,00
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.503.600,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.503.600,00
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			33.831.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	33.831.000,00
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			120.184.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	120.184.000,00
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			9.113.500,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.113.500,00
4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			0,00
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0,00
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			258.635.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	258.635.000,00
4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			0,00
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0,00
4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0,00
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0,00
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0,00
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	0,00
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	0,00
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	0,00
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0,00
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0,00
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0,00
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	0,00
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			0,00
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0,00
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00
4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0,00
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00
4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0,00
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			469.541.698,00
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			469.541.698,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	316.700.146,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	152.841.552,00
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			316.700.146,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	316.700.146,00
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			152.841.552,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	152.841.552,00
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			434.793.400,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 Σ ouput			434.793.400,00
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	0,00
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	345.220.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	20.750.000,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	68.822.900,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	0,00
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			345.220.500,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	345.220.500,00
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			20.750.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	20.750.000,00
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	0,00
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			68.822.900,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	68.822.900,00
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	0,00
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			17.334.874.600,00
	Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			17.334.874.600,00
		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	-	17.212.374.600,00
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	-	122.500.000,00
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	-	0,00
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			17.212.374.600,00
	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 Orang/Bulan	17.212.374.600,00
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			0,00
	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket	0,00
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			122.500.000,00
	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang	122.500.000,00
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD			2.009.285.000,00
	Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD			2.009.285.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	-	0,00
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	-	731.290.000,00
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	-	1.277.995.000,00
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD			0,00
	Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	9 Laporan	0,00
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			731.290.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	104 Laporan	731.290.000,00
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD			1.277.995.000,00
	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	36 Paket	1.277.995.000,00
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			**2.676.508.492,00**
		4.Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	2.676.508.492,00
		999.Persentase Rancangan Peraturan Daerah Yang Difasilitasi Penyusunannya oleh Sekretariat DPRD	100 %	2.676.508.492,00
		999.Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD Yang Ditindaklanjuti	100 %	2.676.508.492,00
		Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	undefined undefined	0,00
		Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persentase	1.899.328.492,00
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			720.235.000,00
	Tersedianya Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			720.235.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	-	720.235.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	-	0,00
		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	-	0,00
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan ProgramPembentukan Peraturan Daerah			0,00
	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 Dokumen	0,00
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			720.235.000,00
	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6 Dokumen	720.235.000,00
4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD			0,00
	Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	0,00
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			177.600.000,00
	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran			177.600.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	-	177.600.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	-	0,00
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS			0,00
	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	0,00
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD			177.600.000,00
	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	177.600.000,00
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan			0,00
	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	0,00
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00
	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00
		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	-	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah			0,00
	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	0,00
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			1.001.493.492,00
	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD			1.001.493.492,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	-	720.780.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	-	0,00
		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	-	0,00
		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	-	280.713.492,00
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD			0,00
	Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	0,00
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD			720.780.000,00
	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Dokumen	720.780.000,00
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			280.713.492,00
	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	280.713.492,00
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD			0,00
	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	0,00
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			777.180.000,00
	Terlaksananya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			777.180.000,00
		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	-	777.180.000,00
		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	-	0,00
		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	-	0,00
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah			0,00
	Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	70 Laporan	0,00
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			0,00
	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	35 Dokumen	0,00
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses			777.180.000,00
	Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	70 Dokumen	777.180.000,00
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			0,00
	-			0,00
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	-	0,00
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD			0,00
	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	0,00
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			0,00
	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD			0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	-	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	-	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	-	0,00
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			0,00
	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 Dokumen	0,00
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			0,00
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	0,00
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			0,00
	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	6 Dokumen	0,00
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH			**8.108.223.341,00**
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**8.108.223.341,00**
5.01	**PERENCANAAN**			**7.514.933.741,00**
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**5.059.425.441,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.059.425.441,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	375.107.555,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100 Persen	4.684.317.886,00
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			71.370.000,00
	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			71.370.000,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	71.370.000,00
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			71.370.000,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	71.370.000,00
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.420.181.936,00
	Tersedianya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.420.181.936,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	118.380.600,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	4.301.801.336,00
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.301.801.336,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	784 Orang/bulan	4.301.801.336,00
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			118.380.600,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1100 Dokumen	118.380.600,00
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			192.765.950,00
	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			192.765.950,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	125.371.000,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	17.903.600,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	22.519.200,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	7.253.850,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	19.718.300,00
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.253.850,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	7.253.850,00
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			19.718.300,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	19.718.300,00
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			17.903.600,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	17.903.600,00
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			22.519.200,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	22.519.200,00
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			125.371.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	125.371.000,00
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			249.281.355,00
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			249.281.355,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	216.652.367,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	32.628.988,00
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			216.652.367,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	216.652.367,00
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			32.628.988,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	32.628.988,00
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			125.826.200,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			125.826.200,00
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	13.234.400,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	92.951.700,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	8.984.600,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	4.155.500,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	6.500.000,00
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			92.951.700,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	92.951.700,00
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			8.984.600,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8.984.600,00
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			13.234.400,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	13.234.400,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4.155.500,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	4.155.500,00
5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			6.500.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	6.500.000,00
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**			**1.835.044.500,00**
		999.Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100 Persentase	1.835.044.500,00
		999.Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100 Persentase	1.835.044.500,00
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD dan RKPD	100 Persen	1.835.044.500,00
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			1.197.860.300,00
	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan			1.197.860.300,00
		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	-	12.243.500,00
		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	-	115.534.800,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	-	922.361.800,00
		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	-	147.720.200,00
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			12.243.500,00
	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	12.243.500,00
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			115.534.800,00
	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	115.534.800,00
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			147.720.200,00
	Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	900 Usulan	147.720.200,00
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			922.361.800,00
	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	922.361.800,00
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			26.470.200,00
	Tersedianya Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			26.470.200,00
		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	-	26.470.200,00
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			26.470.200,00
	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	26.470.200,00
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			405.344.000,00
	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			405.344.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	-	180.570.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	-	224.774.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			224.774.000,00
	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	224.774.000,00
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			180.570.000,00
	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	180.570.000,00
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			205.370.000,00
	Terselenggaranya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			205.370.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	205.370.000,00
5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			205.370.000,00
	Terlaksananya Penerapana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2 Dokumen	205.370.000,00
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**			**620.463.800,00**
		999.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persentase	620.463.800,00
		999.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persentase	620.463.800,00
		999.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100 Persentase	620.463.800,00
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen	203.082.500,00
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	234.039.100,00
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100 Persen	183.342.200,00
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			234.039.100,00
	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			234.039.100,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-	12.727.400,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	31.712.200,00
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	14.920.500,00
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-	19.380.600,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	1.073.200,00
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	-	119.008.900,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	-	16.529.000,00
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-	18.687.300,00
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			31.712.200,00
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen	31.712.200,00
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			19.380.600,00
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	19.380.600,00
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			18.687.300,00
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5 Laporan	18.687.300,00
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			16.529.000,00
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 Laporan	16.529.000,00
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			12.727.400,00
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	12.727.400,00
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			14.920.500,00
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	14.920.500,00
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			1.073.200,00
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	1.073.200,00
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			119.008.900,00
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	119.008.900,00
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			183.342.200,00
	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			183.342.200,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-	12.613.100,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-	42.122.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-	13.081.100,00
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-	17.364.800,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-	27.125.500,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-	19.988.300,00
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	-	29.893.600,00
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	-	21.153.800,00
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			12.613.100,00
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	12.613.100,00
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			13.081.100,00
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	13.081.100,00
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			27.125.500,00
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	27.125.500,00
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			29.893.600,00
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	29.893.600,00
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			42.122.000,00
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	42.122.000,00
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			17.364.800,00
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	17.364.800,00
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			19.988.300,00
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	7 Laporan	19.988.300,00
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			21.153.800,00
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	21.153.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			203.082.500,00
	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			203.082.500,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-	71.162.600,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-	21.248.800,00
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-	7.985.500,00
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-	7.648.200,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-	24.331.400,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-	12.600.100,00
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	-	39.109.800,00
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	-	18.996.100,00
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			71.162.600,00
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	71.162.600,00
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			7.985.500,00
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	7.985.500,00
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			24.331.400,00
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	24.331.400,00
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			39.109.800,00
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	39.109.800,00
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			21.248.800,00
	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	21.248.800,00
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			7.648.200,00
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	7.648.200,00
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			12.600.100,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	12.600.100,00
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			18.996.100,00
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	3 Laporan	18.996.100,00
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**593.289.600,00**
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			**593.289.600,00**
		999.Jumlah Inovasi Daerah Yang Dilaporkan	14 Angka	593.289.600,00
		999.Jumlah Inovasi Urusan Wajib Pelayanan Dasar Yang Dilaporkan	6 Angka	593.289.600,00
		999.Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	100 Persentase	593.289.600,00
		999.Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	100 Persentase	593.289.600,00
		Jumlah Inovasi Daerah Yang Dilaporkan dan Jumlah Inovasi Urusan Wajib Pelayanan Dasar Yang Dilaporkan	14 dan 6 Inovasi	480.912.100,00
		Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	100 Persen	89.899.600,00
		Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	100 Persen	22.477.900,00
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			89.899.600,00
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			89.899.600,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	-	78.762.600,00
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	-	11.137.000,00
5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi			11.137.000,00
	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	11.137.000,00
5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan			78.762.600,00
	Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	78.762.600,00
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			22.477.900,00
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			22.477.900,00
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	-	22.477.900,00
5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum			22.477.900,00
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	22.477.900,00
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			480.912.100,00
	Terlaksananya Inovasi dan Teknologi			480.912.100,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	-	334.177.200,00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	-	98.382.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	-	48.352.900,00
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			334.177.200,00
	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	334.177.200,00
5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi			98.382.000,00
	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	2 Laporan	98.382.000,00
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			48.352.900,00
	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	48.352.900,00
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			**42.627.135.122,00**
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**42.627.135.122,00**
5.02	**KEUANGAN**			**42.627.135.122,00**
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**39.091.234.922,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	39.091.234.922,00
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30.179.000,00
	Jumlah dokumen Perencanaan Anggaran Daerah yang dihasilkan			30.179.000,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	30.179.000,00
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			30.179.000,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 Laporan	30.179.000,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			38.062.129.782,00
	Jumlah pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah			38.062.129.782,00
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	5.987.800,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	341.057.500,00
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	104.662.700,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	37.610.421.782,00
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			37.610.421.782,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	37.610.421.782,00
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			341.057.500,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	341.057.500,00
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			104.662.700,00
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	104.662.700,00
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			5.987.800,00
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.987.800,00
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			48.069.800,00
	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			48.069.800,00
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	48.069.800,00
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			48.069.800,00
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	48.069.800,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			144.556.298,00
	Jumlah pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah			144.556.298,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	42.960.000,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	75.000.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	8.029.400,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	18.566.898,00
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			18.566.898,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	18.566.898,00
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			75.000.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	75.000.000,00
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			8.029.400,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	8.029.400,00
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			42.960.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86 Laporan	42.960.000,00
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			66.656.000,00
	Jumlah sarana dan prasarana penunjang urusan Pemerintah Daerah			66.656.000,00
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	66.656.000,00
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			66.656.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	66.656.000,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			629.560.962,00
	Realisasi jasa penunjang urusan pemerintah daerah			629.560.962,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	217.078.848,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	378.287.300,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	19.214.446,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	14.980.368,00
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			14.980.368,00
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	108 Laporan	14.980.368,00
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			217.078.848,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	217.078.848,00
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			19.214.446,00
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19.214.446,00
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			378.287.300,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	378.287.300,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			110.083.080,00
	Jumlah unit Barang Milik Daerah yang dipelihara			110.083.080,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	10.700.000,00
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	60.498.080,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	15.000.000,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	23.885.000,00
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			60.498.080,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	60.498.080,00
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			10.700.000,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	10.700.000,00
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.000.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	15.000.000,00
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			23.885.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	23.885.000,00
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			**2.653.563.300,00**
		999.Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	100 Persentase	2.653.563.300,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		999.Persentase laporan keuangan tepat waktu	100 Persentase	2.653.563.300,00
		999.Persentase Penurunan SILPA	100 Persentase	2.653.563.300,00
		999.Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	100 Persentase	2.653.563.300,00
		Meningkatnya Tata Kelola Anggaran, Tata Kelola Perbendaharaan, dan Tata Kelola Akuntansi serta Pelaporan	100 %	1.034.287.900,00
		Persentase Tata Kelola Anggaran, Tata Kelola Perbendaharaan, dan Tata Kelola Akuntansi serta Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	1.619.275.400,00
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			1.619.275.400,00
	Jumlah dokumen Perencanaan Anggaran Daerah yang dihasilkan			1.619.275.400,00
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	-	73.835.000,00
		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	-	52.982.500,00
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	-	55.352.000,00
		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	-	0,00
		Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	-	63.596.000,00
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-	597.619.600,00
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	-	590.578.400,00
		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	-	67.322.800,00
		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	-	59.212.200,00
		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	-	58.776.900,00
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			52.982.500,00
	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	52.982.500,00
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			55.352.000,00
	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	55.352.000,00
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD			58.776.900,00
	Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	50 Dokumen	58.776.900,00
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			59.212.200,00
	Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	50 Dokumen	59.212.200,00
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD			63.596.000,00
	Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	50 Dokumen	63.596.000,00
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			67.322.800,00
	Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	50 Dokumen	67.322.800,00
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			597.619.600,00
	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	597.619.600,00
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			590.578.400,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	590.578.400,00
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			0,00
	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	0,00
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah			73.835.000,00
	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 Dokumen	73.835.000,00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			304.745.300,00
	Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah			304.745.300,00
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	-	110.150.700,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	-	131.038.900,00
		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	63.555.700,00
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			110.150.700,00
	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	950 Dokumen	110.150.700,00
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			131.038.900,00
	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	9500 Dokumen	131.038.900,00
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			63.555.700,00
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	900 Laporan	63.555.700,00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			729.542.600,00
	Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah			729.542.600,00
		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	-	89.098.300,00
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	-	367.491.200,00
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-	272.953.100,00
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			272.953.100,00
	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	272.953.100,00
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			367.491.200,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3 Laporan	367.491.200,00
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			89.098.300,00
	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	89.098.300,00
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			**882.336.900,00**
		999.Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	100 Persentase	882.336.900,00
		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	100 %	882.336.900,00
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			882.336.900,00
	Jumlah dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel			882.336.900,00
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-	78.126.500,00
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	-	249.728.700,00
		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-	102.294.000,00
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	-	221.376.000,00
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	89.360.100,00
		Jumlah Standar Harga yang Disusun	-	141.451.600,00
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga			141.451.600,00
	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	141.451.600,00
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			89.360.100,00
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	89.360.100,00
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah			221.376.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	5 Laporan	221.376.000,00
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah			249.728.700,00
	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	70 Laporan	249.728.700,00
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			78.126.500,00
	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	202 Dokumen	78.126.500,00
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			102.294.000,00
	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	102.294.000,00
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)			**144.035.403.908,00**
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**144.035.403.908,00**
5.02	**KEUANGAN**			**144.035.403.908,00**
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			**144.035.403.908,00**
		Persentase Tata Kelola Anggaran, Tata Kelola Perbendaharaan, dan Tata Kelola Akuntansi serta Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	144.035.403.908,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			144.035.403.908,00
	-			144.035.403.908,00
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	-	5.097.777.600,00
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-	137.912.867.330,00
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-	1.024.758.978,00
5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			5.097.777.600,00
	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12 Laporan	5.097.777.600,00
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			137.912.867.330,00
	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	137.912.867.330,00
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			1.024.758.978,00
	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	1.024.758.978,00
	BADAN PENDAPATAN DAERAH			**9.676.892.690,00**
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**9.676.892.690,00**
5.02	**KEUANGAN**			**9.676.892.690,00**
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**7.600.457.990,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.600.457.990,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.600.457.990,00
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			22.770.100,00
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			22.770.100,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	22.770.100,00
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			22.770.100,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	22.770.100,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.040.838.914,00
	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.040.838.914,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	126.060.000,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	6.914.778.914,00
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.914.778.914,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	6.914.778.914,00
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			126.060.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	126.060.000,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			144.287.400,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			144.287.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	106.775.000,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	20.735.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	10.994.600,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	5.782.800,00
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.782.800,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	5.782.800,00
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			20.735.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	63 Paket	20.735.000,00
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			10.994.600,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	33 Paket	10.994.600,00
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			106.775.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74 Laporan	106.775.000,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			306.535.476,00
	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			306.535.476,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	95.621.500,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	87.851.176,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	117.887.800,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	5.175.000,00
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.175.000,00
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan	5.175.000,00
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			95.621.500,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	95.621.500,00
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			117.887.800,00
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Laporan	117.887.800,00
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			87.851.176,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	87.851.176,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			86.026.100,00
	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			86.026.100,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	60.765.600,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	11.800.000,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	13.460.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			60.765.600,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	60.765.600,00
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			11.800.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	11.800.000,00
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			13.460.500,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	13.460.500,00
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			**2.076.434.700,00**
		999.Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	1.38 Persentase	2.076.434.700,00
		999.Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100 Persentase	2.076.434.700,00
		999.Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	1.36 Persentase	2.076.434.700,00
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,38 %	2.076.434.700,00
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100 %	2.076.434.700,00
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	1,36 %	2.076.434.700,00
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			2.076.434.700,00
	Tersedianya Dokumen kegiatan pengelolaan Pendapatan Daerah			2.076.434.700,00
		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	-	42.232.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	-	39.965.800,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	-	421.360.900,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	-	96.628.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	-	51.501.000,00
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	-	15.395.600,00
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	33.030.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-	342.912.400,00
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	-	200.592.600,00
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	24.395.000,00
		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-	266.784.400,00
		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	-	70.810.900,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	-	470.826.100,00
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			15.395.600,00
	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Dokumen	15.395.600,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			39.965.800,00
	Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	39.965.800,00
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			24.395.000,00
	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	9 Laporan	24.395.000,00
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			470.826.100,00
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5740 Unit	470.826.100,00
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			342.912.400,00
	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	342.912.400,00
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			200.592.600,00
	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	200.592.600,00
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			70.810.900,00
	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	300 Obyek Pajak	70.810.900,00
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			42.232.000,00
	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	42.232.000,00
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah			421.360.900,00
	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	11 Dokumen	421.360.900,00
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			51.501.000,00
	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	30 Dokumen	51.501.000,00
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			96.628.000,00
	Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	50 Dokumen	96.628.000,00
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			33.030.000,00
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	33.030.000,00
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			266.784.400,00
	Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 Laporan	266.784.400,00
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			**4.400.376.844,00**
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**4.400.376.844,00**
5.03	**KEPEGAWAIAN**			**4.159.960.344,00**
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.525.957.244,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.525.957.244,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	209.921.100,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	undefined undefined	3.316.036.144,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.000.000,00
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.000.000,00
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	10.000.000,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	0,00
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			10.000.000,00
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	10.000.000,00
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	0,00
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.316.036.144,00
	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.316.036.144,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	61.539.000,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	3.254.497.144,00
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.254.497.144,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	3.254.497.144,00
5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			61.539.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	61.539.000,00
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			19.990.200,00
	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			19.990.200,00
		Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	-	19.990.200,00
5.03.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun			19.990.200,00
	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	260 Orang	19.990.200,00
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			85.396.900,00
	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah			85.396.900,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	49.722.000,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	9.980.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	9.699.600,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	997.200,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	14.998.100,00
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			997.200,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	997.200,00
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			14.998.100,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	14.998.100,00
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			9.980.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	9.980.000,00
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			9.699.600,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.699.600,00
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			49.722.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	49.722.000,00
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			24.900.300,00
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			24.900.300,00
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	24.900.300,00
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			24.900.300,00
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	24.900.300,00
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			30.043.900,00
	Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			30.043.900,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	25.099.500,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	4.944.400,00
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			25.099.500,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.099.500,00
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			4.944.400,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.944.400,00
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			39.589.800,00
	Dokumen Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			39.589.800,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	37.739.800,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	850.000,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1.000.000,00
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			37.739.800,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	37.739.800,00
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			850.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	850.000,00
5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.000.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.000.000,00
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**			**634.003.100,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		5.Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	6.82 %	634.003.100,00
		999.Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	79 Persentase	634.003.100,00
		999.Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	83 Persentase	634.003.100,00
		999.Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	76.74 Persentase	634.003.100,00
		Persentase ASN yng ditingkatkan Kompetensinya,Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik,Persentase ASN yang ditingkatkan dimensi kualifikasinya	undefined undefined	383.499.400,00
		Persentase ASN yng ditingkatkan Kompetensinya,Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik,Persentase ASN yang ditingkatkan dimensi kualifikasinya	100 %	250.503.700,00
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			119.999.600,00
	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			119.999.600,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	19.999.600,00
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	-	100.000.000,00
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			100.000.000,00
	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	100.000.000,00
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			19.999.600,00
	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	19.999.600,00
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			93.568.000,00
	Jumlah Dokumen Mutasi dan Promosi ASN			93.568.000,00
		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	-	93.568.000,00
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			93.568.000,00
	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1500 Dokumen	93.568.000,00
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN			383.499.400,00
	Jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya			383.499.400,00
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	-	227.499.700,00
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	-	155.999.700,00
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			227.499.700,00
	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	17 Orang	227.499.700,00
5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			155.999.700,00
	Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2 Dokumen	155.999.700,00
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			36.936.100,00
	Jumlah pegawai dengan SKP bernilai baik			36.936.100,00
		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	-	16.938.200,00
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	-	19.997.900,00
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			16.938.200,00
	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	50 Orang	16.938.200,00
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			19.997.900,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2 Laporan	19.997.900,00
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			**240.416.500,00**
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**			**240.416.500,00**
		2.Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	24.45 %	240.416.500,00
		3.Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	29.67 %	240.416.500,00
		999.Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	76.91 Persentase	240.416.500,00
		999.Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis	33.73 Persentase	240.416.500,00
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan,Rasio pegawai Fungsional(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan dan Persentase ASN yang memiliki sertifikat komptensi	100 %	240.416.500,00
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			240.416.500,00
	Tersedianya Dokumen Sertifikasi,Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			240.416.500,00
		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	-	240.416.500,00
5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional			240.416.500,00
	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen	240.416.500,00
	INSPEKTORAT DAERAH			**5.662.735.932,82**
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**			**5.662.735.932,82**
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**			**5.662.735.932,82**
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**5.289.743.432,82**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.289.743.432,82
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.289.743.432,82
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			18.178.100,00
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			18.178.100,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	18.178.100,00
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			18.178.100,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	18.178.100,00
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.823.201.540,00
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.823.201.540,00
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	3.413.800,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	63.600.000,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	4.756.187.740,00
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.756.187.740,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64/14 Orang/bulan	4.756.187.740,00
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			3.413.800,00
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	3.413.800,00
6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			63.600.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	63.600.000,00
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			267.463.554,82
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			267.463.554,82
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	137.146.000,00
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	130.317.554,82
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			130.317.554,82
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	130.317.554,82
6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			137.146.000,00
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	122 Orang	137.146.000,00
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			57.512.700,00
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			57.512.700,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	51.585.000,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	660.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1.000.000,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1.035.100,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	3.232.600,00
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.035.100,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.035.100,00
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.232.600,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3.232.600,00
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			660.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	660.000,00
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.000.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			51.585.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	51.585.000,00
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			38.841.498,00
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			38.841.498,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	37.908.098,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	334.000,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	599.400,00
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			37.908.098,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	37.908.098,00
6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			599.400,00
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	599.400,00
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			334.000,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	334.000,00
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			84.546.040,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			84.546.040,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	65.608.300,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	4.500.000,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	14.437.740,00
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			65.608.300,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	65.608.300,00
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4.500.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	4.500.000,00
6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			14.437.740,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	14.437.740,00
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**			**271.280.900,00**
		999.Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 Persentase	271.280.900,00
		Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	271.280.900,00
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			239.433.700,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal			239.433.700,00
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-	47.975.200,00
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	-	82.257.800,00
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-	13.321.300,00
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	-	58.694.500,00
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	-	30.312.500,00
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	-	6.872.400,00
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			58.694.500,00
	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	126 Laporan	58.694.500,00
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			13.321.300,00
	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	13.321.300,00
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja			6.872.400,00
	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 Laporan	6.872.400,00
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan			30.312.500,00
	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	36 Laporan	30.312.500,00
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa			82.257.800,00
	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	14 Laporan	82.257.800,00
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			47.975.200,00
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	33 Dokumen	47.975.200,00
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			31.847.200,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			31.847.200,00
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-	31.847.200,00
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			31.847.200,00
	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6 Laporan	31.847.200,00
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**			**101.711.600,00**
		999.Persentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	100 %	101.711.600,00
		Persentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	100 %	101.711.600,00
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			12.639.700,00
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			12.639.700,00
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	-	12.639.700,00
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			12.639.700,00
	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5 Rekomendasi	12.639.700,00
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			89.071.900,00
	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi			89.071.900,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-	89.071.900,00
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			89.071.900,00
	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	140 perangkat daerah	89.071.900,00
	KELURAHAN MADAWAT			**406.203.400,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**406.203.400,00**
7.01	**KECAMATAN**			**406.203.400,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.324.621.753,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	68.980.600,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	68.980.600,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.024.593.784,00
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.024.593.784,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	123.016.500,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			21.000.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan Dokumen	21.000.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100.128.400,00
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			100.128.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	5.390.000,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	30.560.900,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	16.452.100,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	5.690.500,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	42.034.900,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.174.900,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 bulan Paket	3.174.900,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.577.100,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan Paket	7.577.100,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			7.001.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan Paket	7.001.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			5.103.600,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan Paket	5.103.600,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			5.390.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan Laporan	5.390.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			102.847.483,00
	Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah			102.847.483,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	73.245.395,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			10.787.400,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan Laporan	10.787.400,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			60.215.186,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			60.215.186,00
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	4.039.600,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	48.925.586,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	7.250.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			7.146.600,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bulan Unit	7.146.600,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.800.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 bulan Unit	1.800.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**193.143.700,00**
		999.Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	28.840.800,00
		Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	28.840.800,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan			193.143.700,00
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			193.143.700,00
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	193.143.700,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			28.840.800,00
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 bulan Laporan	28.840.800,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.230.810.816,00**
		999.Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	308.382.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.223.583.616,00
	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.223.583.616,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	28.506.000,00
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	1.083.180.800,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	111.896.816,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			10.574.800,00
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 bulan Lembaga Kemasyarakatan	10.574.800,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			16.387.200,00
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 bulan Unit	16.387.200,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			281.420.000,00
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 bulan Pokmas / Ormas	281.420.000,00
	KELURAHAN KABOR			**406.969.935,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**406.969.935,00**
7.01	**KECAMATAN**			**406.969.935,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.324.621.753,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	85.123.135,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	85.123.135,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.024.593.784,00
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.024.593.784,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	123.016.500,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			19.200.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	19.200.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100.128.400,00
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			100.128.400,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	30.560.900,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	16.452.100,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	5.690.500,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	42.034.900,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.013.600,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.013.600,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.030.900,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.030.900,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			6.500.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.500.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.920.500,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.920.500,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			102.847.483,00
	Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah			102.847.483,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	73.245.395,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	29.602.088,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			13.732.547,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13.732.547,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			27.410.388,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	27.410.388,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			60.215.186,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			60.215.186,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	48.925.586,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	7.250.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			6.165.200,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	6.165.200,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.150.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	2.150.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**193.143.700,00**
		999.Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	23.610.000,00
		Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	23.610.000,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan			193.143.700,00
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			193.143.700,00
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	193.143.700,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			23.610.000,00
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	23.610.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.230.810.816,00**
		999.Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	298.236.800,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.223.583.616,00
	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.223.583.616,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	28.506.000,00
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	1.083.180.800,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	111.896.816,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			5.490.600,00
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	5.490.600,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			22.316.200,00
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit	22.316.200,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			270.430.000,00
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	270.430.000,00
	KELURAHAN NANGALIMANG			**397.425.306,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**397.425.306,00**
7.01	**KECAMATAN**			**397.425.306,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.324.621.753,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	83.400.090,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	83.400.090,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.024.593.784,00
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.024.593.784,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	123.016.500,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			20.895.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	20.895.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100.128.400,00
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			100.128.400,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	30.560.900,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	16.452.100,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	42.034.900,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			17.789.200,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	17.789.200,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			4.199.900,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.199.900,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.364.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.364.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			30.296.900,00
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah			30.296.900,00
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	17.250.700,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			6.952.200,00
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	6.952.200,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			102.847.483,00
	Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah			102.847.483,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	73.245.395,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			15.433.556,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.433.556,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			60.215.186,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			60.215.186,00
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	4.039.600,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	48.925.586,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	7.250.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			10.426.634,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	10.426.634,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.300.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2.300.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			4.039.600,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.039.600,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**193.143.700,00**
		999.Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	38.622.000,00
		Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	38.622.000,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan			193.143.700,00
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			193.143.700,00
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	193.143.700,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			38.622.000,00
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	38.622.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.230.810.816,00**
		999.Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	275.403.216,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.223.583.616,00
	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.223.583.616,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	28.506.000,00
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	1.083.180.800,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	111.896.816,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			10.018.000,00
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10.018.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			35.404.416,00
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	136 Unit	35.404.416,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			229.980.800,00
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	229.980.800,00
	KELURAHAN KOTA UNENG			**417.806.896,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**404.024.496,00**
7.01	**KECAMATAN**			**404.024.496,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.324.621.753,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	56.511.996,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	56.511.996,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.024.593.784,00
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.024.593.784,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	123.016.500,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			26.000.100,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	26.000.100,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100.128.400,00
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			100.128.400,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	30.560.900,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	16.452.100,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	5.690.500,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	42.034.900,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			491.000,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	491.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.430.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.430.000,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			3.900.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.900.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.573.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.573.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			30.296.900,00
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah			30.296.900,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0,00
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0,00
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			102.847.483,00
	Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah			102.847.483,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	73.245.395,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	29.602.088,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			17.117.896,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	17.117.896,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			0,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**193.143.700,00**
		999.Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	5.950.900,00
		Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	5.950.900,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan			193.143.700,00
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			193.143.700,00
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	193.143.700,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			5.950.900,00
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	5.950.900,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.230.810.816,00**
		999.Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	341.561.600,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.223.583.616,00
	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.223.583.616,00
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	-	0,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	28.506.000,00
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	1.083.180.800,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	111.896.816,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			2.422.600,00
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	2.422.600,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			37.789.000,00
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	94 Unit	37.789.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			301.350.000,00
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	301.350.000,00
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan			0,00
	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	0 Laporan	0,00
X				**13.782.400,00**
X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**			**13.782.400,00**
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**13.782.400,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	13.782.400,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	13.782.400,00
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			13.782.400,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			13.782.400,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	10.782.400,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	3.000.000,00
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			10.782.400,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	10.782.400,00
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.000.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	3.000.000,00
	KELURAHAN WURING			**405.279.433,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**405.279.433,00**
7.01	**KECAMATAN**			**405.279.433,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.062.309.588,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	94.562.233,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	94.562.233,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.796.719.793,00
	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.796.719.793,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	115.844.600,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			20.244.600,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	20.244.600,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			57.166.400,00
	Tersedainya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran			57.166.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	9.380.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	9.722.700,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	2.360.100,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	32.953.600,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			570.900,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	570.900,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.926.200,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.926.200,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.064.700,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.064.700,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			4.180.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	4.180.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			12.358.400,00
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.358.400,00
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	12.358.400,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.358.400,00
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	12.358.400,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			126.994.655,00
	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			126.994.655,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	47.584.326,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	79.410.329,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			10.471.080,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.471.080,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			24.589.553,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	24.589.553,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			59.308.140,00
	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			59.308.140,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	40.899.640,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	6.350.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			13.606.800,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	13.606.800,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.550.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	1.550.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**49.167.200,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		999.Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	10.717.200,00
		Persentase Capaian layanan publik Kecamatan	100 %	10.717.200,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan			49.167.200,00
	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			49.167.200,00
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	10.717.200,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			10.717.200,00
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	10.717.200,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.256.672.000,00**
		999.Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	300.000.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.231.773.000,00
	Terlaksananya Kegiatan Pemeberdayaan Kelurahan			1.231.773.000,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	12.646.000,00
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	1.088.471.500,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	85.409.100,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			5.559.500,00
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	5.559.500,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.232.100,00
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	2.232.100,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			292.208.400,00
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	292.208.400,00
	KELURAHAN BERU			**388.142.480,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**388.142.480,00**
7.01	**KECAMATAN**			**388.142.480,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.529.882.805,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	52.222.880,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	11.299.400,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	40.923.480,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.186.558.426,00
	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.186.558.426,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	151.573.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			20.856.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	20.856.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			98.550.500,00
	Tersediannya Administrasi Umum Perangkat Daerah			98.550.500,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	21.317.700,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	21.032.800,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	14.296.400,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	6.113.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	35.790.600,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			419.600,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	419.600,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.210.200,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.210.200,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1.650.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.650.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.000.800,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.000.800,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			3.750.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.750.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			108.348.399,00
	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			108.348.399,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	82.686.279,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			11.299.400,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11.299.400,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			117.450.980,00
	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			117.450.980,00
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	26.832.600,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	61.933.980,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			3.394.480,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	3.394.480,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.642.400,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.642.400,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**95.637.300,00**
		999.Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	27.222.000,00
		Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	27.222.000,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan			95.637.300,00
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			95.637.300,00
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	95.637.300,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			27.222.000,00
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	27.222.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.512.413.460,00**
		999.Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	308.697.600,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.497.422.260,00
	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.497.422.260,00
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	-	29.762.800,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	31.045.100,00
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	1.063.861.060,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	372.753.300,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			6.371.600,00
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	6.371.600,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			67.203.900,00
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	67.203.900,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			225.322.100,00
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	225.322.100,00
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan			9.800.000,00
	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	9.800.000,00
	KELURAHAN KOTA BARU			**403.494.160,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**403.494.160,00**
7.01	**KECAMATAN**			**403.494.160,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.529.882.805,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	83.337.160,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	13.206.460,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	70.130.700,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.186.558.426,00
	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.186.558.426,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	151.573.800,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			27.286.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	27.286.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			98.550.500,00
	Tersediannya Administrasi Umum Perangkat Daerah			98.550.500,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	21.317.700,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	21.032.800,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	14.296.400,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	6.113.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	35.790.600,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.405.600,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.405.600,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			8.232.500,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.232.500,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			2.400.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.400.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.171.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.171.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			10.700.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10.700.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			108.348.399,00
	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			108.348.399,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	82.686.279,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			13.206.460,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13.206.460,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			117.450.980,00
	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			117.450.980,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	61.933.980,00
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	15.784.400,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	12.900.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			8.616.300,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	8.616.300,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			6.219.300,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	6.219.300,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.100.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	2.100.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**95.637.300,00**
		999.Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	16.307.000,00
		Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	16.307.000,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan			95.637.300,00
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			95.637.300,00
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	95.637.300,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			16.307.000,00
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	16.307.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.512.413.460,00**
		999.Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	303.850.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.497.422.260,00
	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.497.422.260,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	31.045.100,00
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	1.063.861.060,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	372.753.300,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			3.850.000,00
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	3.850.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			67.650.000,00
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	67.650.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			232.350.000,00
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	232.350.000,00
	KECAMATAN ALOK			**4.156.853.232,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**4.156.853.232,00**
7.01	**KECAMATAN**			**4.156.853.232,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.324.621.753,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.030.605.932,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.540.000,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.024.065.932,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.540.000,00
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.540.000,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	6.540.000,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6.540.000,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	6.540.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.024.593.784,00
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.024.593.784,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	123.016.500,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	3.901.577.284,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.901.577.284,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	3.901.577.284,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			35.921.400,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dokumen	35.921.400,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100.128.400,00
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			100.128.400,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	30.560.900,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	16.452.100,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	5.690.500,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	42.034.900,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.011.000,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.011.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.207.700,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.207.700,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			8.960.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.960.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.491.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.491.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			30.296.900,00
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah			30.296.900,00
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	13.046.200,00
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	17.250.700,00
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0,00
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			13.046.200,00
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	13.046.200,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10.298.500,00
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.298.500,00
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0,00
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0,00
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			102.847.483,00
	Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah			102.847.483,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	73.245.395,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	29.602.088,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			16.173.996,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	16.173.996,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.191.700,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.191.700,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			60.215.186,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			60.215.186,00
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	4.039.600,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	48.925.586,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	7.250.000,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	0,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			25.187.152,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	25.187.152,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.000.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	1.000.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**193.143.700,00**
		999.Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	96.120.000,00
		Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	96.120.000,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan			193.143.700,00
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			193.143.700,00
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	193.143.700,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			96.120.000,00
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	96.120.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.230.810.816,00**
		999.Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	7.227.200,00
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	7.227.200,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			7.227.200,00
	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa			7.227.200,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	7.227.200,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			7.227.200,00
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	7.227.200,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**14.945.000,00**
		999.Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	14.945.000,00
		Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	14.945.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			14.945.000,00
	Terlaksannya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			14.945.000,00
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	14.945.000,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			14.945.000,00
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	14.945.000,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**7.955.100,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		999.persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	100 %	7.955.100,00
		Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	100 %	7.955.100,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			7.955.100,00
	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			7.955.100,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	7.955.100,00
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa			7.955.100,00
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3 Dokumen	7.955.100,00
	KECAMATAN ALOK BARAT			**3.827.139.693,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**3.827.139.693,00**
7.01	**KECAMATAN**			**3.827.139.693,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.062.309.588,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.777.893.693,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.777.893.693,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9.762.200,00
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun			9.762.200,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	9.762.200,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			9.762.200,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	9.762.200,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.796.719.793,00
	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.796.719.793,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	115.844.600,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	3.680.875.193,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.680.875.193,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	3.680.875.193,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			34.440.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	34.440.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			57.166.400,00
	Tersedainya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran			57.166.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	9.380.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	9.722.700,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	2.360.100,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	32.953.600,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			505.300,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	505.300,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.283.500,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.283.500,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.500.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.500.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			4.200.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	4.200.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			12.358.400,00
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.358.400,00
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	12.358.400,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			126.994.655,00
	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			126.994.655,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	47.584.326,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			11.827.400,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	11.827.400,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			59.308.140,00
	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			59.308.140,00
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	3.507.100,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	40.899.640,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	6.350.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			23.943.000,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	23.943.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.050.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	1.050.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			3.507.100,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.507.100,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**49.167.200,00**
		999.Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	38.450.000,00
		Persentase Capaian layanan publik Kecamatan	100 %	38.450.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan			49.167.200,00
	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			49.167.200,00
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	38.450.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			38.450.000,00
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	38.450.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.256.672.000,00**
		999.Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	10.796.000,00
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	10.796.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			24.899.000,00
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			24.899.000,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	24.899.000,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			10.796.000,00
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	40 Lembaga Kemasyarakatan	10.796.000,00
	KELURAHAN HEWULI			**345.598.800,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**345.598.800,00**
7.01	**KECAMATAN**			**345.598.800,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.062.309.588,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	37.157.100,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	37.157.100,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.796.719.793,00
	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.796.719.793,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	115.844.600,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			20.568.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	20.568.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			57.166.400,00
	Tersedainya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran			57.166.400,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	9.722.700,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	2.360.100,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	32.953.600,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			522.800,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	522.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.040.800,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.040.800,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.684.500,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.684.500,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			126.994.655,00
	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			126.994.655,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	47.584.326,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			8.500.200,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.500.200,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			59.308.140,00
	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			59.308.140,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	40.899.640,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	6.350.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2.090.800,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	2.090.800,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			750.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	750.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.256.672.000,00**
		999.Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	308.441.700,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.231.773.000,00
	Terlaksananya Kegiatan Pemeberdayaan Kelurahan			1.231.773.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	-	45.246.400,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	12.646.000,00
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	1.088.471.500,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	85.409.100,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			7.086.500,00
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	7.086.500,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			40.131.400,00
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	40.131.400,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			239.947.400,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13 Pokmas / Ormas	239.947.400,00
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan			21.276.400,00
	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	21.276.400,00
	KELURAHAN WAILITI			**360.275.786,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**360.275.786,00**
7.01	**KECAMATAN**			**360.275.786,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.062.309.588,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	36.532.986,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	36.532.986,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.796.719.793,00
	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.796.719.793,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	115.844.600,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			16.292.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan Dokumen	16.292.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			57.166.400,00
	Tersedainya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran			57.166.400,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	9.722.700,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	32.953.600,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			9.439.800,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan Paket	9.439.800,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.872.500,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan Paket	1.872.500,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			126.994.655,00
	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			126.994.655,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	47.584.326,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			5.669.646,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.669.646,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			59.308.140,00
	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			59.308.140,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	40.899.640,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	6.350.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.259.040,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	1.259.040,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.000.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.000.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.256.672.000,00**
		999.Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	323.742.800,00
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	10.718.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			24.899.000,00
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			24.899.000,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	24.899.000,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			10.718.000,00
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 Lembaga Kemasyarakatan	10.718.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.231.773.000,00
	Terlaksananya Kegiatan Pemeberdayaan Kelurahan			1.231.773.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	-	45.246.400,00
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	1.088.471.500,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	85.409.100,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			43.045.600,00
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	43.045.600,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			258.079.200,00
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	258.079.200,00
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan			11.900.000,00
	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	11.900.000,00
	KELURAHAN WOLOMARANG			**429.855.076,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**429.855.076,00**
7.01	**KECAMATAN**			**429.855.076,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.062.309.588,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	115.163.576,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	115.163.576,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.796.719.793,00
	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.796.719.793,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	115.844.600,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			24.300.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	24.300.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			57.166.400,00
	Tersedainya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran			57.166.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	9.380.000,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	2.750.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	9.722.700,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	2.360.100,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	32.953.600,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			761.100,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	761.100,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			9.263.300,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	9.263.300,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			2.750.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.750.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.601.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.601.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.000.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	1.000.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			126.994.655,00
	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			126.994.655,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	47.584.326,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	79.410.329,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			11.116.000,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11.116.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			54.820.776,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	54.820.776,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			59.308.140,00
	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			59.308.140,00
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	8.551.400,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	6.350.000,00
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			8.551.400,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	8.551.400,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.000.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	1.000.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.256.672.000,00**
		999.Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	313.691.500,00
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	3.385.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			24.899.000,00
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			24.899.000,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	24.899.000,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			3.385.000,00
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	3.385.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.231.773.000,00
	Terlaksananya Kegiatan Pemeberdayaan Kelurahan			1.231.773.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	-	45.246.400,00
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	1.088.471.500,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			298.236.500,00
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13 Pokmas / Ormas	298.236.500,00
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan			12.070.000,00
	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	133 Laporan	12.070.000,00
	KECAMATAN ALOK TIMUR			**4.237.903.034,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**4.237.903.034,00**
7.01	**KECAMATAN**			**4.237.903.034,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.529.882.805,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.176.290.834,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.156.512.926,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	19.777.908,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.927.200,00
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluassi Kinerja Perangkat Daerah			6.927.200,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	6.927.200,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6.927.200,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	6.927.200,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.186.558.426,00
	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.186.558.426,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	151.573.800,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	4.034.984.626,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.034.984.626,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	4.034.984.626,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			36.000.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13 Dokumen	36.000.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			98.550.500,00
	Tersediannya Administrasi Umum Perangkat Daerah			98.550.500,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	21.317.700,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	21.032.800,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	14.296.400,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	6.113.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	35.790.600,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			416.600,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	416.600,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			9.025.700,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	9.025.700,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			4.990.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.990.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.500.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.500.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.702.800,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.702.800,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			12.047.300,00
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			12.047.300,00
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	2.288.800,00
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	9.758.500,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			2.288.800,00
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	2.288.800,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			9.758.500,00
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	9.758.500,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			108.348.399,00
	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			108.348.399,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	82.686.279,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			19.777.908,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19.777.908,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			117.450.980,00
	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			117.450.980,00
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	26.832.600,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	61.933.980,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	12.900.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			34.024.100,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	34.024.100,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.700.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	2.700.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			10.194.600,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.194.600,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**95.637.300,00**
		999.Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	28.785.000,00
		Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	28.785.000,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan			95.637.300,00
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			95.637.300,00
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	95.637.300,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			28.785.000,00
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	28.785.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.512.413.460,00**
		999.Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	14.991.200,00
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	14.991.200,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			14.991.200,00
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			14.991.200,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	14.991.200,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			14.991.200,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	14.991.200,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**11.020.000,00**
		999.Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	11.020.000,00
		Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	11.020.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			11.020.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			11.020.000,00
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	11.020.000,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			11.020.000,00
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	11.020.000,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**6.816.000,00**
		999.persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	100 %	6.816.000,00
		Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	100 %	6.816.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			6.816.000,00
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			6.816.000,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	6.816.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			6.816.000,00
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	6.816.000,00
	KELURAHAN WAIOTI			**390.908.320,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**390.908.320,00**
7.01	**KECAMATAN**			**390.908.320,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.529.882.805,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	85.579.420,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	49.516.300,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	36.063.120,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.186.558.426,00
	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.186.558.426,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	151.573.800,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			21.228.500,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	21.228.500,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			98.550.500,00
	Tersediannya Administrasi Umum Perangkat Daerah			98.550.500,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	21.317.700,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	21.032.800,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	14.296.400,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	6.113.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	35.790.600,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			709.500,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	709.500,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.237.200,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.237.200,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			6.050.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.050.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.504.900,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.504.900,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			5.164.900,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.164.900,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			108.348.399,00
	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			108.348.399,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	82.686.279,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	25.662.120,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			10.401.000,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.401.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			25.662.120,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25.662.120,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			117.450.980,00
	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			117.450.980,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	61.933.980,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	12.900.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			7.771.300,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	7.771.300,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4.850.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	4.850.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.512.413.460,00**
		999.Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	305.328.900,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.497.422.260,00
	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.497.422.260,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	-	29.762.800,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	31.045.100,00
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	1.063.861.060,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	372.753.300,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			4.571.600,00
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	4.571.600,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			62.825.000,00
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	62.825.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			226.132.300,00
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	226.132.300,00
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan			11.800.000,00
	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	11.800.000,00
	KELURAHAN NANGAMETING			**359.626.171,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**359.626.171,00**
7.01	**KECAMATAN**			**359.626.171,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.529.882.805,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	64.398.811,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	17.933.511,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	46.465.300,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.186.558.426,00
	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.186.558.426,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	151.573.800,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			23.844.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	23.844.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			98.550.500,00
	Tersediannya Administrasi Umum Perangkat Daerah			98.550.500,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	21.032.800,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	14.296.400,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	6.113.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	35.790.600,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.999.900,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.999.900,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.650.400,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5.650.400,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			692.800,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	692.800,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.503.400,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.503.400,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			108.348.399,00
	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			108.348.399,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	82.686.279,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			17.933.511,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	17.933.511,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			117.450.980,00
	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			117.450.980,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	61.933.980,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	12.900.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			10.524.800,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	10.524.800,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.250.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	2.250.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**95.637.300,00**
		999.Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	5.034.900,00
		Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	5.034.900,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan			95.637.300,00
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			95.637.300,00
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	95.637.300,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			5.034.900,00
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	5.034.900,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.512.413.460,00**
		999.Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	283.322.460,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.497.422.260,00
	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.497.422.260,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	-	29.762.800,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	31.045.100,00
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	1.063.861.060,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	372.753.300,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			7.288.000,00
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	7.288.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			50.601.800,00
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	50.601.800,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			223.706.660,00
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	223.706.660,00
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan			1.726.000,00
	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	1.726.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**6.870.000,00**
		999.Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum	100 %	6.870.000,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			6.870.000,00
	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			6.870.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	6.870.000,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			6.870.000,00
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	6.870.000,00
	KELURAHAN WAIROTANG			**382.565.400,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**382.565.400,00**
7.01	**KECAMATAN**			**382.565.400,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.529.882.805,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	68.053.700,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	57.985.700,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	10.068.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.186.558.426,00
	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.186.558.426,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	151.573.800,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			22.359.300,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	22.359.300,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			98.550.500,00
	Tersediannya Administrasi Umum Perangkat Daerah			98.550.500,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	21.032.800,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	14.296.400,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	6.113.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	35.790.600,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.161.800,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.161.800,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.434.600,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4.434.600,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5.250.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.250.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.616.300,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.616.300,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			108.348.399,00
	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			108.348.399,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	82.686.279,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			10.068.000,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.068.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			117.450.980,00
	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			117.450.980,00
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	26.832.600,00
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	15.784.400,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	12.900.000,00
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			7.168.100,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	7.168.100,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.000.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	1.000.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			14.995.600,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	14.995.600,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**95.637.300,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		999.Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	18.288.400,00
		Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	18.288.400,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan			95.637.300,00
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			95.637.300,00
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	95.637.300,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			18.288.400,00
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18 Laporan	18.288.400,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.512.413.460,00**
		999.Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	296.223.300,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.497.422.260,00
	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.497.422.260,00
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	-	29.762.800,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	31.045.100,00
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	1.063.861.060,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	372.753.300,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			8.963.900,00
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8.963.900,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			124.472.600,00
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	124.472.600,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			156.350.000,00
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	156.350.000,00
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan			6.436.800,00
	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	6.436.800,00
	KECAMATAN BOLA			**1.458.763.428,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**1.458.763.428,00**
7.01	**KECAMATAN**			**1.458.763.428,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.389.607.728,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.389.607.728,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	undefined undefined	43.227.200,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.346.380.528,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9.891.300,00
	Tersedianya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9.891.300,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	9.891.300,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			9.891.300,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	9.891.300,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.327.695.228,00
	tersedianya administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.327.695.228,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	31.200.000,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	1.296.495.228,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.296.495.228,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19/14 Orang/bulan	1.296.495.228,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			31.200.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	31.200.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			11.817.900,00
	Terlaksananya administrasi Perangkat Daerah			11.817.900,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	6.985.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	3.808.000,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1.024.900,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.024.900,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.024.900,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			6.985.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.985.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.808.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.808.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.794.000,00
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			8.794.000,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	6.260.500,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	2.533.500,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.533.500,00
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.533.500,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			6.260.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.260.500,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			31.409.300,00
	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			31.409.300,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	30.459.300,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	950.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			30.459.300,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	30.459.300,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			950.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	950.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**54.100.000,00**
		999.Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	54.100.000,00
		Persentase Layanan Publik Kecamatan (PATEN)	undefined undefined	54.100.000,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan			54.100.000,00
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan			54.100.000,00
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	4.720.000,00
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	49.380.000,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			49.380.000,00
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	49.380.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			4.720.000,00
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	4.720.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**12.043.200,00**
		999.Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	12.043.200,00
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa dan Keluarahan	100 %	12.043.200,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			12.043.200,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Di tingkat Kecamatan			12.043.200,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	12.043.200,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			12.043.200,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	12.043.200,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**1.502.500,00**
		999.Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	1.502.500,00
		Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	1.502.500,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			1.502.500,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			1.502.500,00
		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	1.502.500,00
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			1.502.500,00
	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	1.502.500,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**1.510.000,00**
		999.persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	100 %	1.510.000,00
		Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan	100 %	1.510.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			1.510.000,00
	Tersedianya Faslitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			1.510.000,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	860.000,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	650.000,00
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa			650.000,00
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Dokumen	650.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			860.000,00
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	860.000,00
	KECAMATAN DORENG			**1.368.514.916,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**1.365.514.916,00**
7.01	**KECAMATAN**			**1.365.514.916,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.268.324.516,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.268.324.516,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.560.700,00
	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah			6.560.700,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	6.560.700,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6.560.700,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	6.560.700,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.187.236.816,00
	Tersekenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.187.236.816,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	33.268.800,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	1.153.968.016,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.153.968.016,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	1.153.968.016,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			33.268.800,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	33.268.800,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			18.021.000,00
	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah			18.021.000,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	12.805.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	315.500,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	421.100,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	4.479.400,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			421.100,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	421.100,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.479.400,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.479.400,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			12.805.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	12.805.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			315.500,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	315.500,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			56.506.000,00
	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Urusan Pemerintah Daerah			56.506.000,00
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	7.423.300,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	48.482.700,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	600.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			48.482.700,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	48.482.700,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			600.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	600.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			7.423.300,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.423.300,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**50.640.400,00**
		999.Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	50.640.400,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan			50.640.400,00
	Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			50.640.400,00
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	50.640.400,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			50.640.400,00
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	50.640.400,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**12.828.800,00**
		999.Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	12.828.800,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			12.828.800,00
	Terselenggaranya Koordinasi penberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan			12.828.800,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	12.828.800,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			12.828.800,00
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Lembaga Kemasyarakatan	12.828.800,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**16.080.400,00**
		999.Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	16.080.400,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			16.080.400,00
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum			16.080.400,00
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	16.080.400,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			16.080.400,00
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	16.080.400,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**17.640.800,00**
		999.persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	100 %	8.820.400,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			17.640.800,00
	Terlaksananya Fasilitasi,Rekomendasi dan Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa			17.640.800,00
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	8.820.400,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	8.820.400,00
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa			8.820.400,00
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Dokumen	8.820.400,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			8.820.400,00
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	12 Dokumen	8.820.400,00
X				**3.000.000,00**
X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**			**3.000.000,00**
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.000.000,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.000.000,00
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.000.000,00
	Tersedianyanya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.000.000,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	3.000.000,00
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3.000.000,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.000.000,00
	KECAMATAN HEWOKLOANG			**1.330.031.980,80**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**1.330.031.980,80**
7.01	**KECAMATAN**			**1.330.031.980,80**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.246.000.380,80**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.246.000.380,80
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.238.250.380,80
		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	7.750.000,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.750.000,00
	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.750.000,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	7.750.000,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			7.750.000,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	7.750.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.152.170.128,00
	Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.152.170.128,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	35.856.000,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	1.116.314.128,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.116.314.128,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	1.116.314.128,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			35.856.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	35.856.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			11.471.100,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			11.471.100,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	3.000.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	2.729.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	5.742.100,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.742.100,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.742.100,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.000.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.729.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.729.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			43.772.852,80
	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			43.772.852,80
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	3.130.054,80
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	40.642.798,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3.130.054,80
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.130.054,80
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			40.642.798,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	40.642.798,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			30.836.300,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			30.836.300,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	29.036.300,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	1.800.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			29.036.300,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	29.036.300,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.800.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	1.800.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**65.520.000,00**
		999.Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	65.520.000,00
		Persentase Capaian Layanan Publik Kecamatan (PATEN)	100 persen	65.520.000,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan			65.520.000,00
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			65.520.000,00
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	65.520.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			65.520.000,00
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	65.520.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**10.361.600,00**
		999.Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	10.361.600,00
		Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa dan Kelurahan	100 persen	10.361.600,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			10.361.600,00
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			10.361.600,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	10.361.600,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			10.361.600,00
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	10.361.600,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**8.150.000,00**
		999.persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	100 %	8.150.000,00
		Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan	100 persen	8.150.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			8.150.000,00
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			8.150.000,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	8.150.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			8.150.000,00
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14 Dokumen	8.150.000,00
	KECAMATAN KANGAE			**1.576.221.786,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**1.565.171.286,00**
7.01	**KECAMATAN**			**1.565.171.286,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.483.350.586,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.483.350.586,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	undefined undefined	2.585.000,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.480.765.586,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9.891.300,00
	Tersedianya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9.891.300,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	9.891.300,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			9.891.300,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	9.891.300,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.439.461.686,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan			1.439.461.686,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	31.800.000,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	1.407.661.686,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.407.661.686,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23/14 Orang/bulan	1.407.661.686,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			31.800.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	31.800.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			11.246.900,00
	Terlaksananya Adminostrasi Umum Perangkat Daerah			11.246.900,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	6.985.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	3.128.500,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1.133.400,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.133.400,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.133.400,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			6.985.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.985.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.128.500,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.128.500,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.585.000,00
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.585.000,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	2.585.000,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.585.000,00
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.585.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20.165.700,00
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			20.165.700,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	18.865.700,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	1.300.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			18.865.700,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	18.865.700,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.300.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	1.300.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**68.140.000,00**
		999.Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	68.140.000,00
		Persentase Layanan Publik Kecamatan (PATEN)	100 %	68.140.000,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan			68.140.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintah Di tingkat Kecamatan			68.140.000,00
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	4.720.000,00
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	63.420.000,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			63.420.000,00
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	63.420.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			4.720.000,00
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	4.720.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**10.668.200,00**
		999.Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	10.668.200,00
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa dan Keluarahan	100 %	10.668.200,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			10.668.200,00
	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa			10.668.200,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	10.668.200,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			10.668.200,00
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Lembaga Kemasyarakatan	10.668.200,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**1.502.500,00**
		999.Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	1.502.500,00
		Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	1.502.500,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			1.502.500,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			1.502.500,00
		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	1.502.500,00
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			1.502.500,00
	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	1.502.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**1.510.000,00**
		999.persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	100 %	1.510.000,00
		Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan	100 %	1.510.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			1.510.000,00
	Tersedianya Rekomendasi dan koordinasi Pengawasan Pemeritah Desa			1.510.000,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	860.000,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	650.000,00
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa			650.000,00
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9 Dokumen	650.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			860.000,00
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Dokumen	860.000,00
X				**11.050.500,00**
X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**			**11.050.500,00**
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**11.050.500,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	11.050.500,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	undefined undefined	11.050.500,00
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			11.050.500,00
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			11.050.500,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	11.050.500,00
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			11.050.500,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11.050.500,00
	KECAMATAN KEWAPANTE			**1.697.626.528,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**219.741.388,00**
7.01	**KECAMATAN**			**219.741.388,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**95.406.388,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	95.406.388,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			36.000.000,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD			36.000.000,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	36.000.000,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			36.000.000,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	36.000.000,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			36.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	36.000.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			17.511.000,00
	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			17.511.000,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	7.500.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1.614.500,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1.080.900,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	7.315.600,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.080.900,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.080.900,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.315.600,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.315.600,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			7.500.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	7.500.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.614.500,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.614.500,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			41.895.388,00
	Prosentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			41.895.388,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	13.874.700,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	28.020.688,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			13.874.700,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	13.874.700,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			28.020.688,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	28.020.688,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**116.040.000,00**
		999.Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	116.040.000,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan			116.040.000,00
	Meningkatnya pelayanan Administrasi Pelayanan			116.040.000,00
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	116.040.000,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			116.040.000,00
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	116.040.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**6.795.000,00**
		-	-	6.795.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			6.795.000,00
	-			6.795.000,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	6.795.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			6.795.000,00
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	6.795.000,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**1.500.000,00**
		999.persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	100 %	1.500.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			1.500.000,00
	Fasilitasi PenyusunanPeraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			1.500.000,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	1.500.000,00
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa			1.500.000,00
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3 Dokumen	1.500.000,00
X				**1.477.885.140,00**
X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**			**1.477.885.140,00**
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.477.885.140,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.477.885.140,00
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.080.000,00
	Terlaksananya Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.080.000,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	6.080.000,00
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6.080.000,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	6.080.000,00
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.439.469.740,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD			1.439.469.740,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	1.439.469.740,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.439.469.740,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	1.439.469.740,00
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.439.469.740,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.439.469.740,00
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			32.335.400,00
	Jumlah Pendukung Penujang Pelaksanaan Tugas yang disediakan			32.335.400,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	32.335.400,00
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			32.335.400,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	32.335.400,00
	KECAMATAN KOTING			**1.273.016.578,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**1.273.016.578,00**
7.01	**KECAMATAN**			**1.273.016.578,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.224.008.278,00**
		1.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.224.008.278,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.676.000,00
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.676.000,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	6.676.000,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6.676.000,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	6.676.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.182.118.804,00
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.182.118.804,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	30.319.200,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	1.151.799.604,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.151.799.604,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	1.151.799.604,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			30.319.200,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dokumen	30.319.200,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			8.525.200,00
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			8.525.200,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	2.475.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	2.039.900,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	4.010.300,00
	Tersedianya Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor			8.525.200,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	2.475.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	2.039.900,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	4.010.300,00
	Tersedianya Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan			8.525.200,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	2.475.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	2.039.900,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	4.010.300,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.010.300,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.010.300,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			2.475.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.475.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.039.900,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.039.900,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			13.161.174,00
	Tersediannya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			13.161.174,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12.494.474,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	666.700,00
	Tersedianya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			13.161.174,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12.494.474,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	666.700,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12.494.474,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.494.474,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			666.700,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	666.700,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			13.527.100,00
	Terlaksananya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			13.527.100,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	11.977.100,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	1.550.000,00
	Terlaksananya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			13.527.100,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	11.977.100,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	1.550.000,00
	Tersediannya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			13.527.100,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	11.977.100,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	1.550.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			11.977.100,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	11.977.100,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.550.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	1.550.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**36.362.100,00**
		-	-	36.362.100,00
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			36.362.100,00
	-			36.362.100,00
		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-	36.362.100,00
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			36.362.100,00
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	36.362.100,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**8.506.200,00**
		1.Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	8.506.200,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			8.506.200,00
	Terlaksananya Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			8.506.200,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	8.506.200,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			8.506.200,00
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	8.506.200,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**4.140.000,00**
		1.persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	100 %	4.140.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			4.140.000,00
	Tersediannya Dokumen fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			4.140.000,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	4.140.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			4.140.000,00
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 Dokumen	4.140.000,00
	KECAMATAN LELA			**1.494.202.830,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**1.494.202.830,00**
7.01	**KECAMATAN**			**1.494.202.830,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.453.966.330,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.453.966.330,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan Kewilayahan	100 %	1.453.966.330,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.337.600,00
	Terselenggaranya perencanaan, pengganggaran dan evaluasi perangkat daerah			6.337.600,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	6.337.600,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6.337.600,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	6.337.600,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.397.923.430,00
	Terlaksananya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan kewilayahan			1.397.923.430,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	29.451.900,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	1.368.471.530,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.368.471.530,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.368.471.530,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			29.451.900,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	29.451.900,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			24.257.500,00
	Terlaksananya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan kewilayahan			24.257.500,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	14.580.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1.784.000,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1.255.600,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	6.637.900,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.255.600,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.255.600,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.637.900,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.637.900,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			14.580.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.580.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.784.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.784.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15.242.600,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan kewilayahan			15.242.600,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	13.744.200,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1.498.400,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			13.744.200,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13.744.200,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.498.400,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.498.400,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			10.205.200,00
	Terlaksananya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan kewilayahan			10.205.200,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	10.205.200,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			10.205.200,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	10.205.200,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**14.074.400,00**
		999.Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	14.074.400,00
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	14.074.400,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan			14.074.400,00
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			14.074.400,00
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	14.074.400,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			14.074.400,00
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	14.074.400,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**9.012.100,00**
		999.Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	9.012.100,00
		Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	9.012.100,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			9.012.100,00
	Terlaksananya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan			9.012.100,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	9.012.100,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			9.012.100,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Lembaga Kemasyarakatan	9.012.100,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**10.050.000,00**
		999.Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	10.050.000,00
		Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah Kecamatan	100 %	10.050.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			10.050.000,00
	Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan			10.050.000,00
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	10.050.000,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			10.050.000,00
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	10.050.000,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**7.100.000,00**
		999.persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	100 %	7.100.000,00
		Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	100 %	7.100.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			7.100.000,00
	Terlaksananya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			7.100.000,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	7.100.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			7.100.000,00
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	7.100.000,00
	KECAMATAN MAGEPANDA			**1.341.995.714,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**1.341.995.714,00**
7.01	**KECAMATAN**			**1.341.995.714,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.276.290.714,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.276.290.714,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.276.290.714,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.000.000,00
	Jumlah Dokumen yang dihasilkan			6.000.000,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	6.000.000,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6.000.000,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	6.000.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.211.245.614,00
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.211.245.614,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	30.600.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	1.180.645.614,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.180.645.614,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	1.180.645.614,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			30.600.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	30.600.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			15.629.700,00
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			15.629.700,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	11.000.000,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1.089.800,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	3.539.900,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.089.800,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.089.800,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.539.900,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.539.900,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			11.000.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.000.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			10.350.200,00
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			10.350.200,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	2.934.000,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	7.416.200,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.934.000,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.934.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			7.416.200,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	7.416.200,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			33.065.200,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			33.065.200,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	32.065.200,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	1.000.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			32.065.200,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	32.065.200,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.000.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**40.588.900,00**
		999.Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	40.588.900,00
		Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	24.777.900,00
		Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100 %	15.811.000,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan			15.811.000,00
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan			15.811.000,00
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	15.811.000,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			15.811.000,00
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	15.811.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			24.777.900,00
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			24.777.900,00
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	24.777.900,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			24.777.900,00
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	24.777.900,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**8.050.000,00**
		999.Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	8.050.000,00
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	8.050.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			8.050.000,00
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			8.050.000,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	8.050.000,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			8.050.000,00
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	8.050.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**4.025.000,00**
		999.Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	4.025.000,00
		Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	4.025.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			4.025.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah			4.025.000,00
		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	4.025.000,00
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			4.025.000,00
	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	4.025.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**13.041.100,00**
		999.persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	100 %	13.041.100,00
		persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	100 %	13.041.100,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			13.041.100,00
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			13.041.100,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	4.441.100,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	8.600.000,00
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa			8.600.000,00
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 Dokumen	8.600.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			4.441.100,00
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	4.441.100,00
	KECAMATAN MAPITARA			**1.213.380.584,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**1.213.380.584,00**
7.01	**KECAMATAN**			**1.213.380.584,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.165.342.184,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.165.342.184,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.165.342.184,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11.243.600,00
	Tersedianya Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah			11.243.600,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	11.243.600,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			11.243.600,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	11.243.600,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.079.476.684,00
	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.079.476.684,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	34.512.000,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	1.044.964.684,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.044.964.684,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1.044.964.684,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			34.512.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	34.512.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			21.827.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			21.827.500,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	13.790.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1.078.000,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	830.800,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	6.128.700,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			830.800,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	830.800,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.128.700,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.128.700,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			13.790.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.790.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.078.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.078.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.000.000,00
	Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah			5.000.000,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	2.000.000,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	3.000.000,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.000.000,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.000.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.000.000,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.000.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			47.794.400,00
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			47.794.400,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	47.794.400,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			47.794.400,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	47.794.400,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**16.274.000,00**
		999.Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	16.274.000,00
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	16.274.000,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan			16.274.000,00
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			16.274.000,00
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	16.274.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			16.274.000,00
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	16.274.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**7.618.000,00**
		999.Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	7.618.000,00
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100% %	7.618.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			7.618.000,00
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			7.618.000,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	7.618.000,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			7.618.000,00
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	7.618.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**13.200.000,00**
		999.Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	13.200.000,00
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	13.200.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			13.200.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			13.200.000,00
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	13.200.000,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			13.200.000,00
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	13.200.000,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**10.946.400,00**
		999.persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	100 %	10.946.400,00
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	10.946.400,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			10.946.400,00
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			10.946.400,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	10.946.400,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			10.946.400,00
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	10.946.400,00
	KECAMATAN NELLE			**1.214.411.466,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**1.214.411.466,00**
7.01	**KECAMATAN**			**1.214.411.466,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.166.806.366,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.166.806.366,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	undefined undefined	34.261.200,00
		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	100 %	62.894.340,00
		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	100 %	1.069.650.826,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.371.800,00
	Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.371.800,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	7.371.800,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			7.371.800,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	7.371.800,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.069.650.826,00
	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.069.650.826,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	33.000.000,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	1.036.650.826,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.036.650.826,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	1.036.650.826,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			33.000.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	33.000.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			22.040.200,00
	Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah			22.040.200,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	6.600.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	2.878.500,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	962.100,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	11.599.600,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			962.100,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	962.100,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			11.599.600,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.599.600,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			6.600.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.600.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.878.500,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.878.500,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			33.482.340,00
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			33.482.340,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	15.430.740,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	18.051.600,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			15.430.740,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.430.740,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			18.051.600,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	18.051.600,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			34.261.200,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			34.261.200,00
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	3.884.900,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	29.676.300,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	700.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			29.676.300,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	29.676.300,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			700.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	700.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			3.884.900,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.884.900,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**13.089.500,00**
		999.Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	13.089.500,00
		Persentase Capaian Layanan Publik Kecamatan	100 %	5.989.300,00
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	7.100.200,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan			7.100.200,00
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			7.100.200,00
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	7.100.200,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			7.100.200,00
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	7.100.200,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			5.989.300,00
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpakan Kepada Camat			5.989.300,00
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	5.989.300,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			5.989.300,00
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	5.989.300,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**9.915.600,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		999.Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	9.915.600,00
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa dan Kelurahan	100 %	9.915.600,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			9.915.600,00
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			9.915.600,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	9.915.600,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			9.915.600,00
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	9.915.600,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**21.600.000,00**
		999.Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	21.600.000,00
		Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	21.600.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			21.600.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			21.600.000,00
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	21.600.000,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			21.600.000,00
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	21.600.000,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**3.000.000,00**
		999.persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	100 %	3.000.000,00
		Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan	100 %	3.000.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			3.000.000,00
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa			3.000.000,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	3.000.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			3.000.000,00
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen	3.000.000,00
	KECAMATAN NITA			**1.747.183.455,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**1.747.183.455,00**
7.01	**KECAMATAN**			**1.747.183.455,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.654.620.155,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.654.620.155,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.654.620.155,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12.244.700,00
	Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12.244.700,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	12.244.700,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12.244.700,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12.244.700,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.521.274.740,00
	Tersedianya Adminastrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.521.274.740,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	36.109.300,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	1.485.165.440,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.485.165.440,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	1.485.165.440,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			36.109.300,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	36.109.300,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			10.801.900,00
	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			10.801.900,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	1.490.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	3.536.700,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1.211.800,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	3.563.900,00
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	999.500,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.211.800,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.211.800,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.563.900,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.563.900,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			999.500,00
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	999.500,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1.490.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.490.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.536.700,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.536.700,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			42.050.515,00
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			42.050.515,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	14.640.127,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	27.410.388,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			14.640.127,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14.640.127,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			27.410.388,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	27.410.388,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			68.248.300,00
	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			68.248.300,00
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	7.512.100,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	59.736.200,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	1.000.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			59.736.200,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	59.736.200,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.000.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	1.000.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			7.512.100,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.512.100,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**66.877.300,00**
		999.Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	66.877.300,00
		Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	66.877.300,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan			35.147.500,00
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			35.147.500,00
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	6.292.000,00
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	28.855.500,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			28.855.500,00
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	28.855.500,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			6.292.000,00
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	6.292.000,00
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			18.829.800,00
	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			18.829.800,00
		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-	18.829.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			18.829.800,00
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	18.829.800,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			12.900.000,00
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat			12.900.000,00
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	12.900.000,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12.900.000,00
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	12.900.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**8.134.400,00**
		999.Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	8.134.400,00
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	8.134.400,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			8.134.400,00
	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa			8.134.400,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	8.134.400,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			8.134.400,00
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakatan	8.134.400,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**17.551.600,00**
		999.persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	100 %	13.742.200,00
		persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	100 %	13.742.200,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			17.551.600,00
	Terlaksananya Fasilitasi Rekomondasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			17.551.600,00
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-	2.313.300,00
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	3.809.400,00
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	3.809.400,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	3.810.000,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	3.809.500,00
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa			3.809.500,00
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	15 Dokumen	3.809.500,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			3.810.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Dokumen	3.810.000,00
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			2.313.300,00
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	15 Dokumen	2.313.300,00
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			3.809.400,00
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15 Dokumen	3.809.400,00
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			3.809.400,00
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	15 Dokumen	3.809.400,00
	KECAMATAN PAGA			**1.198.439.750,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**1.198.439.750,00**
7.01	**KECAMATAN**			**1.198.439.750,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.081.901.750,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.081.901.750,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.877.000,00
	Terlaksanananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.877.000,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1.461.500,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	6.415.500,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.461.500,00
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	1.461.500,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6.415.500,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	6.415.500,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			930.253.400,00
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			930.253.400,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	31.800.000,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	898.453.400,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			898.453.400,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	898.453.400,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			31.800.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	31.800.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			37.970.400,00
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			37.970.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12.840.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	13.200.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	5.040.000,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	0,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	6.889.900,00
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	0,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			0,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.889.900,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.889.900,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0,00
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			13.200.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	13.200.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			5.040.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.040.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12.840.500,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12.840.500,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0,00
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0,00
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	0,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.528.150,00
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.528.150,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12.528.150,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12.528.150,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.528.150,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			93.272.800,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			93.272.800,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	92.102.500,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	0,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1.170.300,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			92.102.500,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	92.102.500,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	0,00
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.170.300,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.170.300,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**77.426.500,00**
		999.Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	77.426.500,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan			63.071.000,00
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			63.071.000,00
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	7.495.500,00
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	55.575.500,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			55.575.500,00
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14 Laporan	55.575.500,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			7.495.500,00
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	7.495.500,00
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			14.355.500,00
	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			14.355.500,00
		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-	14.355.500,00
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			14.355.500,00
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	14 Dokumen	14.355.500,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**20.135.000,00**
		999.Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	20.135.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			20.135.000,00
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			20.135.000,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	20.135.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			20.135.000,00
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14 Lembaga Kemasyarakatan	20.135.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**8.380.500,00**
		999.Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	8.380.500,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			8.380.500,00
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			8.380.500,00
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	8.380.500,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			8.380.500,00
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	14 Dokumen	8.380.500,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**10.596.000,00**
		999.persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	100 %	10.596.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			10.596.000,00
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			10.596.000,00
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	7.763.000,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	2.833.000,00
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa			2.833.000,00
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10 Dokumen	2.833.000,00
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			7.763.000,00
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10 Dokumen	7.763.000,00
	KECAMATAN PALUE			**1.683.822.266,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**1.683.822.266,00**
7.01	**KECAMATAN**			**1.683.822.266,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.581.884.766,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.581.884.766,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.581.884.766,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.340.900,00
	Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.340.900,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	13.340.900,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			13.340.900,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	13.340.900,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.477.713.360,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.477.713.360,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	31.033.200,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	1.446.680.160,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.446.680.160,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	1.446.680.160,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			31.033.200,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	31.033.200,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			16.552.900,00
	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			16.552.900,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	7.150.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1.785.800,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1.679.800,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	5.937.300,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.679.800,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.679.800,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.937.300,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5.937.300,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			7.150.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.150.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.785.800,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.785.800,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			58.191.106,00
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			58.191.106,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	3.370.330,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	54.820.776,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3.370.330,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.370.330,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			54.820.776,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	54.820.776,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			16.086.500,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			16.086.500,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	14.669.100,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	1.417.400,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			14.669.100,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	14.669.100,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.417.400,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	1.417.400,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**58.197.400,00**
		999.Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	58.197.400,00
		Persentase Capaian Layanan Publik Kecamatan (Paten)	undefined undefined	10.020.000,00
		Persentase Capaian Layanan Publik Kecamatan (Paten)	100 %	58.197.400,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan			48.177.400,00
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			48.177.400,00
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	4.200.000,00
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	43.977.400,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			43.977.400,00
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8 Laporan	43.977.400,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			4.200.000,00
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4.200.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			10.020.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			10.020.000,00
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	10.020.000,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			10.020.000,00
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	10.020.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**10.000.100,00**
		999.Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	10.000.100,00
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	10.000.100,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			10.000.100,00
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			10.000.100,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	10.000.100,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			10.000.100,00
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.100,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**17.780.000,00**
		999.Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	17.780.000,00
		Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	17.780.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			17.780.000,00
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			17.780.000,00
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	13.100.000,00
		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	4.680.000,00
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			4.680.000,00
	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8 Laporan	4.680.000,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			13.100.000,00
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 Dokumen	13.100.000,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**15.960.000,00**
		999.persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	100 %	15.960.000,00
		Persentase kegiatan pembinaan dan pengawsan yang dilakukan	100 %	15.960.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			15.960.000,00
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			15.960.000,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	8.160.000,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	7.800.000,00
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa			7.800.000,00
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Dokumen	7.800.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			8.160.000,00
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	8.160.000,00
	KECAMATAN TALIBURA			**1.607.718.375,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**1.607.718.375,00**
7.01	**KECAMATAN**			**1.607.718.375,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.516.293.375,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.516.293.375,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.507.385.446,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20 %	8.907.929,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9.495.000,00
	Tersedianya laporan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan			9.495.000,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	9.495.000,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			9.495.000,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	9.495.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.457.394.746,00
	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.457.394.746,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	35.222.000,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	1.422.172.746,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.422.172.746,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	1.422.172.746,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			35.222.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen	35.222.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			16.973.300,00
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			16.973.300,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	0,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	6.250.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	2.628.500,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	715.300,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	7.379.500,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			715.300,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	715.300,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.379.500,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.379.500,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			6.250.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	6.250.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.628.500,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.628.500,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.907.929,00
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.907.929,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	6.825.929,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	2.082.000,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			6.825.929,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	6.825.929,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.082.000,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.082.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			23.522.400,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			23.522.400,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	21.272.400,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	2.250.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			21.272.400,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	21.272.400,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.250.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	2.250.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**57.566.200,00**
		1.Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	57.566.200,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100 %	57.566.200,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan			57.566.200,00
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			57.566.200,00
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	57.566.200,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			57.566.200,00
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	57.566.200,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**12.718.800,00**
		999.Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	12.718.800,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			12.718.800,00
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			12.718.800,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	12.718.800,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			12.718.800,00
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 Lembaga Kemasyarakatan	12.718.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**21.140.000,00**
		1.persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	100 %	21.140.000,00
		persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)	100 %	21.140.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			21.140.000,00
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			21.140.000,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	21.140.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			21.140.000,00
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20 Dokumen	21.140.000,00
	KECAMATAN TANA WAWO			**1.132.924.585,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**1.132.924.585,00**
7.01	**KECAMATAN**			**1.132.924.585,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.029.266.985,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.029.266.985,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11.227.000,00
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11.227.000,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1.461.500,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	9.765.500,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.461.500,00
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	1.461.500,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			9.765.500,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	9.765.500,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			862.199.035,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			862.199.035,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	31.800.000,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	830.399.035,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			830.399.035,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12/14 Orang/bulan	830.399.035,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			31.800.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	31.800.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			61.922.200,00
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			61.922.200,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	32.225.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	18.150.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	5.907.500,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	5.639.200,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.639.200,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.639.200,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			18.150.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	18.150.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			5.907.500,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.907.500,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			32.225.500,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	32.225.500,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9.338.550,00
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9.338.550,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	8.928.150,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	410.400,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			410.400,00
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	410.400,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			8.928.150,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.928.150,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			84.580.200,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			84.580.200,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	83.771.200,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	809.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			83.771.200,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	83.771.200,00
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			809.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	809.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**61.852.400,00**
		999.Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	61.852.400,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan			52.976.900,00
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			52.976.900,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	17.750.500,00
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	35.226.400,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			35.226.400,00
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	35.226.400,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			17.750.500,00
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Dokumen	17.750.500,00
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			8.875.500,00
	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			8.875.500,00
		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-	8.875.500,00
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			8.875.500,00
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	10 Dokumen	8.875.500,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**16.772.900,00**
		999.Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	16.772.900,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			16.772.900,00
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			16.772.900,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	16.772.900,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			16.772.900,00
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	16.772.900,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**10.011.000,00**
		-	-	10.011.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			10.011.000,00
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			10.011.000,00
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	10.011.000,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			10.011.000,00
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10 Dokumen	10.011.000,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**15.021.300,00**
		-	-	15.021.300,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			15.021.300,00
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			15.021.300,00
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	15.021.300,00
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			15.021.300,00
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10 Dokumen	15.021.300,00
	KECAMATAN WAIBLAMA			**1.480.422.996,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**1.480.422.996,00**
7.01	**KECAMATAN**			**1.480.422.996,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.423.955.996,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.423.955.996,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.423.955.996,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.250.000,00
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.250.000,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	7.250.000,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			7.250.000,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	7.250.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.316.053.492,00
	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.316.053.492,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	34.050.000,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	1.282.003.492,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.282.003.492,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	1.282.003.492,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			34.050.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	34.050.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			15.934.500,00
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			15.934.500,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	0,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	4.400.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	2.003.500,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	962.200,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	8.568.800,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			962.200,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	962.200,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			8.568.800,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	8.568.800,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			4.400.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.400.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.003.500,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.003.500,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.851.204,00
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			12.851.204,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	6.365.904,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	6.485.300,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			6.365.904,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.365.904,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			6.485.300,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.485.300,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			71.866.800,00
	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			71.866.800,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	69.568.200,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	600.000,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1.698.600,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			69.568.200,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	69.568.200,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			600.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	600.000,00
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.698.600,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.698.600,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**17.350.000,00**
		999.Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	17.350.000,00
		Persentase Capaian Layanan Publik Kecamatan (PATEN)	100 %	17.350.000,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan			17.350.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			17.350.000,00
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	0,00
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	17.350.000,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			17.350.000,00
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	17.350.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			0,00
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			0,00
	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			0,00
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	0,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			0,00
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	0,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**17.556.800,00**
		999.Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	17.556.800,00
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa dan Kelurahan	100 %	17.556.800,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			17.556.800,00
	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			17.556.800,00
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	0,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	17.556.800,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			17.556.800,00
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	17.556.800,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			0,00
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**1.945.200,00**
		999.Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum	100 %	1.945.200,00
		Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum	100 %	1.945.200,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			1.945.200,00
	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			1.945.200,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	0,00
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	1.945.200,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			0,00
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			1.945.200,00
	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1.945.200,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**5.965.000,00**
		999.Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	5.965.000,00
		Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	5.965.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			5.965.000,00
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai penugasan Kepala Daerah			5.965.000,00
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	5.965.000,00
		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	0,00
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			0,00
	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	0,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			5.965.000,00
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	5.965.000,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**13.650.000,00**
		999.persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	100 %	13.650.000,00
		Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan	100 %	13.650.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			13.650.000,00
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			13.650.000,00
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	0,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	7.550.000,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	6.100.000,00
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa			6.100.000,00
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7 Dokumen	6.100.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			7.550.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 Dokumen	7.550.000,00
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			0,00
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5 Dokumen	0,00
	KECAMATAN WAIGETE			**1.367.674.828,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**1.367.674.828,00**
7.01	**KECAMATAN**			**1.367.674.828,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.279.707.228,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.279.707.228,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8.630.000,00
	Tersedianya Perencanaan,Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8.630.000,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	8.630.000,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			8.630.000,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan Laporan	8.630.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.188.967.764,00
	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.188.967.764,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	33.227.300,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	1.155.740.464,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.155.740.464,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun Orang/bulan	1.155.740.464,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			33.227.300,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	33.227.300,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			13.334.000,00
	Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			13.334.000,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	0,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1.418.500,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1.673.000,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	10.242.500,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.673.000,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.673.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			10.242.500,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	10.242.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.418.500,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.418.500,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0,00
	Trsedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Darah			0,00
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	0,00
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	0,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			0,00
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.409.368,00
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.409.368,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	5.659.368,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	6.750.000,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			5.659.368,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun Laporan	5.659.368,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			6.750.000,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Kali Kegiatan Laporan	6.750.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			56.366.096,00
	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			56.366.096,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	53.207.196,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	2.700.000,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	458.900,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			53.207.196,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Bulan Unit	53.207.196,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.700.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Tahun Unit	2.700.000,00
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			458.900,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket Unit	458.900,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**66.883.400,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		999.Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	66.883.400,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan			61.108.400,00
	Terselengaranya Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tigkat Kecamatan			61.108.400,00
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	23.186.800,00
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	37.921.600,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			37.921.600,00
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan Laporan	37.921.600,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			23.186.800,00
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen Dokumen	23.186.800,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			5.775.000,00
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat			5.775.000,00
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	5.775.000,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			5.775.000,00
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan Laporan	5.775.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**0,00**
		999.Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			0,00
	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa			0,00
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	0,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			0,00
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**6.425.000,00**
		999.Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100 %	6.425.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			6.425.000,00
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai penugasan Kepala Daerah			6.425.000,00
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	6.425.000,00
		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	0,00
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			0,00
	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0 Laporan	0,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			6.425.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Tahun Dokumen	6.425.000,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**14.659.200,00**
		999.persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	100 %	14.659.200,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			14.659.200,00
	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			14.659.200,00
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	0,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	7.139.200,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	7.520.000,00
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa			7.520.000,00
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Laporan Dokumen	7.520.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			7.139.200,00
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Tahun Dokumen	7.139.200,00
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			0,00
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	0,00
	KECAMATAN MEGO			**1.484.351.902,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**1.480.351.902,00**
7.01	**KECAMATAN**			**1.480.351.902,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.451.238.040,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.451.238.040,00
		Persentase Belanja Komponen Listrik dan Perlengkapan lainnya	100 %	16.422.900,00
		Persentase Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan	100 %	1.401.397.640,00
		Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	5.267.500,00
		Persentase Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan urusan Pemerintahan Lainnya	100 %	28.150.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.401.397.640,00
	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.401.397.640,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	39.693.500,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	1.361.704.140,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.361.704.140,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	1.361.704.140,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			39.693.500,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	39.693.500,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			16.422.900,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			16.422.900,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	4.250.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	3.683.400,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1.027.600,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	7.461.900,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.027.600,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.027.600,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.461.900,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.461.900,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			4.250.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.250.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.683.400,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3.683.400,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.267.500,00
	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.267.500,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	5.267.500,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			5.267.500,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.267.500,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			28.150.000,00
	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			28.150.000,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	26.400.000,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	1.750.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			26.400.000,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	26.400.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.750.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	1.750.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**16.934.662,00**
		999.Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100 %	16.934.662,00
		Persentase Capaian Layanan Publik Kecamatan (PATEN) %	100% %	16.934.662,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan			16.934.662,00
	Tersedianya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			16.934.662,00
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	16.934.662,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			16.934.662,00
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	16.934.662,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**12.179.200,00**
		999.Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100 %	12.179.200,00
		Persentase Partisispasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa dan Kelurahan	100 %	12.179.200,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			12.179.200,00
	Tersedianya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			12.179.200,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	12.179.200,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			12.179.200,00
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 Lembaga Kemasyarakatan	12.179.200,00
X				**4.000.000,00**
X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**			**4.000.000,00**
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.000.000,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.000.000,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.000.000,00
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.000.000,00
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.000.000,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	4.000.000,00
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4.000.000,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	4.000.000,00
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			**4.110.241.493,00**
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**			**4.110.241.493,00**
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			**4.110.241.493,00**
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.403.392.789,00**
		999.Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.403.392.789,00
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	19.489.300,00
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19.489.300,00
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19.489.300,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	19.489.300,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			19.489.300,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	19.489.300,00
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.295.548.672,00
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.295.548.672,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	70.761.000,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	2.224.787.672,00
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.224.787.672,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.224.787.672,00
8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			70.761.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	70.761.000,00
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			29.519.400,00
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			29.519.400,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	15.000.000,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	3.915.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	2.600.000,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1.333.200,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	6.671.200,00
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.333.200,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.333.200,00
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.671.200,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.671.200,00
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			3.915.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.915.000,00
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.600.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.600.000,00
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			15.000.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	15.000.000,00
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			16.013.917,00
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			16.013.917,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	14.319.317,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1.694.600,00
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			14.319.317,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14.319.317,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.694.600,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.694.600,00
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			42.821.500,00
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			42.821.500,00
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	6.839.700,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	32.481.800,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	3.500.000,00
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			32.481.800,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	32.481.800,00
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.500.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	3.500.000,00
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			6.839.700,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.839.700,00
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**			**371.734.850,00**
		999.Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	85.25 Persentase	371.734.850,00
		Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	85,25 %	371.734.850,00
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			371.734.850,00
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			371.734.850,00
		Jumlah Paskibraka	-	371.734.850,00
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka			371.734.850,00
	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	50 Orang	371.734.850,00
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**			**840.914.454,00**
		999.Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	87.00 Persentase	840.914.454,00
		Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	87 %	840.914.454,00
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			840.914.454,00
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			840.914.454,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	-	810.914.654,00
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	29.999.800,00
8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			810.914.654,00
	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	810.914.654,00
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			29.999.800,00
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	36 Orang	29.999.800,00
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**			**88.796.000,00**
		999.Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	97.65 Persentase	88.796.000,00
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	97,65 %	88.796.000,00
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			88.796.000,00
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			88.796.000,00
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	88.796.000,00
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			88.796.000,00
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	88.796.000,00
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**			**62.855.700,00**
		999.Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	95.75 Persentase	62.855.700,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
		Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	95,75 %	62.855.700,00
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			62.855.700,00
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			62.855.700,00
		Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	-	62.855.700,00
8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			62.855.700,00
	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	62.855.700,00
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**			**342.547.700,00**
		999.Persentase Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Potensi Konflik Sosial	85.75 %	342.547.700,00
		Persentase Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Potensi Konflik Sosial	85,75 %	342.547.700,00
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			342.547.700,00
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			342.547.700,00
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	342.547.700,00
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			342.547.700,00
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	86 Orang	342.547.700,00
J U M L A H				**1.152.216.766.415,97**

Secara detail dapat dilihat pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Tabel 5.5.
Usulan Pokok-Pokok Pikiran Dprd Kabupaten Sikka Untuk Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2027

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	YOSEPH KARMIANTO ERI, S.Fil.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Hibah Bantuan Kepada Panitia Pelaksana (SLTP Virgo Fidelis Maumere) Melaksanakan Turnamen FUTSAL antar Pelajar SD	Kelurahan Nangameting Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota
2	Lukas Lero	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Akses transportasi masyarakat menuju area lingkungan di desa egon buluk sangat terbatas karena belum tersedia jalan yang layak di ruas lingkungan ragawair - watulirik	Desa Egon Buluk, Kecamatan Waigete, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	km	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
3	YOSEPH KARMIANTO ERI, S.Fil.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Belum Memiliki Lahan Pembangunan Listrik di Desa Lidi, Kecamatan Palue	Desa Lidi Kecamatan Paule, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4	Lukas Lero	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kondisi tempat ibadah Geraja Stasi St. Fransiskus Asisi Waigete di desa Egon dalam kondisi rusak berat	Desa Egon Kecamatan Waigete, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
5	Lukas Lero	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kapasitas tampung rumah ibadah Masjid Baihtul di desa Nangatobong sangat terbatas	Desa Nangatobong, Kecamatan Waigete, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
6	Lukas Lero	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Masih terdapat 30 rumah warga di Desa Egon Buluk, Nangatobong, Mahekelan yang belum memiliki penerangan listrik	Desa Egon Buluk, Nangatobong, Mahekelan, Kecamatan Waigete, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	30	unit	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
7	Lukas Lero	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Pengolahan lahan pertanian oleh kelompok tani Karya Tani dan Lero Ha'ë di desa egon buluk masih menggunakan peralatan tradisional	Desa Egon Buluk, Kecamatan Waigete, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka Tahun 2027	Sesuai prioritas pembangunan tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
8	Yohanes Yos De Peskim	Peningkatan system penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan	Sistem Jaringan air minum yang ada saat ini belum mampu menjangkau seluruh masyarakat dan sering mengalami gangguan distribusi	Kecamatan Doreng Desa Watumerak, Kab. Sikka	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	km	-	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
9	Lukas Lero	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Pengembangan varietas bibit ternak sapi bagi kelompok tani Uruledu dan Hila Watuwolor di Desa Werang dan Ilinmedo	Desa Werang dan Ilinmedo, Kecamatan Waiblama, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	12	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
10	YOSEPH KARMIANTO ERI, S.Fil.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Hibah Bantuan kepada Organisasi Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Maumere St. Thomas Morus	Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
11	Yohanes Yos De Peskim	Peningkatan system penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan	Sistem Jaringan air minum yang ada saat ini belum mampu menjangkau seluruh masyarakat dan sering mengalami gangguan distribusi	Kecamatan Doreng Desa Wolonterang, Kab. Sikka	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	km	-	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
12	Lukas Lero	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Peralatan tangkap ikan masih sangat terbatas oleh kelompok nelayan Wairmitak dan Rihe Dogon di desa Mahekelan sehingga membutuhkan perahu Fiberglass ukuran 5.5, mesin dan peralatan tangkap	Desa Mahekelan, Kecamatan Waigete, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan usulan program prioritas pembangunan pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
13	STEFANUS SUMANDI, S.Fil.	Pembangunan Jalan	Belum adanya akses jalan rabat di kampung bendungan pada ruas jalan waigete-blidit	Desa Egon-Egobn buluk, Kecamatan Mapitara, Kab. Sikka	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	km	-	Pembangunan Jalan
14	Lukas Lero	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pengolahan hasil produksi pasca panen jagung oleh kelompok tani Karya Tani Desa Egon Buluk masih menggunakan alat tradisional sehingga membutuhkan peralatan pemipil jagung	Desa Egon Buluk, Kecamatan Waigete, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
15	Yohanes Yos De Peskim	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Gereja Paroki St.Petrus Kloangpopot sedang dalam Pembangunan	Kecamatan Doreng Desa Kloangpopot, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
16	YOSEPH KARMIANTO ERI, S.Fil.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Hibah Bantuan Kepada Organisasi Gerakan Pemuda ANSOR Kabupaten Sikka	Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
17	Yohanes Yos De Peskim	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kapela stasi Waidahi paroki habibola sedang dalam proses pembangunan	Kecamatan Doreng Desa Wogalirit, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
18	Lukas Lero	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Proses pengolahan hasil produksi pasca panen padi pada kelompok tani Karya Tani Desa Egon Buluk dan Kelompok Tani Leroha'é dan Watu Mita Desa Wairterang masih menggunakan cara tradisional sehinga dibutuhkan bantuan alat perontok jagung	Desa Wairterang dan Egon Buluk, Kecamatan Waigete, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
19	STEFANUS SUMANDI, S.Fil.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Minimnya pengetahuan terkait budidaya hortikultura serta peralatan kultivator sebagai penunjang produksi pertanian	Desa Watuomok, Kecamatan Talibura, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	kelompok	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
20	YOSEPH KARMIANTO ERI, S.Fil.	Pembangunan Jalan	Rehabilitasi Pekerjaan Turab Pengaman Uwa	Desa Maluriwu Kecamatan Palue, Kab. Sikka	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pembangunan Jalan
21	Yohanes Yos De Peskim	Peningkatan system penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan	Sistem Jaringan air minum yang ada saat ini belum mampu menjangkau seluruh masyarakat dan sering mengalami gangguan distribusi	Kecamatan Doreng Desa Nenbura, Kab. Sikka	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	km	-	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
22	YOSEPH KARMIANTO ERI, S.Fil.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Hibah Bantuan Kepada Kongregasi Susteran Rubia Passionis	Kelurahan Madawat Kecamatan Alok, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
23	YOSEPH KARMIANTO ERI, S.Fil.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelatihan Komputer; Artificial Intelligence, Desain Grafis dan Microsoft Office	Karunia Bunda Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	-	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	100	Orang	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
24	Yohanes Yos De Peskim	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Keterbatasan Ekonomi keluarga menyebabkan sebagian peserta didik kesulitan memenuhi biaya pendidikan	Kecamatan Doreng, Mapitara, Bola, Waigete, Talibura, Waiblama, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
25	ALEXANDER AGATO HASULIE	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kondisi listrik PLN diwilayah Kecamatan Mapitara belum sepenuhnya stabil, sehingga sangat menghambat pekerjaan pertukangan dan pengelasan di Dusun Welinwatut dan Lere	Kecamatan Mapitara, Desa Egon Gahar, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	null	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
26	Yohanes Yos De Peskim	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Mesjid Baitusshadiq Nangahale Saat Ini Belum memiliki bangunan yang layak	Kecamatan Talibura Desa Nangahale, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	null	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27	YOSEPH KARMIANTO ERI, S.Fil.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelatihan dan Pengadaan Komputer Grafis, Server Data dan Peralatan Internet of Things) dan Artificial Intelligence	Karunia Bunda Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	null	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
28	Lukas Lero	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Minimnya kapasitas keterampilan Kelompok Meubeler Sudan Sogor terhadap kegiatan pertukangan Meubeler dan kurangnya sarana kerja skap kayu dalam menunjang kegiatan kerja	Desa Egon Buluk, Kecamatan Waigete, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	null	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
29	YOSEPH KARMIANTO ERI, S.Fil.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelatihan dan Bantuan Peralatan Musik Keyboard Kepada Kelompok Course Aura Musik	Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	null	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
30	STEFANUS SUMANDI, S.Fil.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Belum adanya pembangunan rabat jalan natakoli-gunit	Desa Natakoli Kecamatan Mapitara, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	500	m	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
31	ALEXANDER AGATO HASULIE	Pembangunan Jalan	Jalan Kabupaten Waigete - Galit Pada Titik Buwer Dusun Kloangbolat Desa Egon Gaha Dalam Kondisi Rusak Berat	Kecamatan Mapitara, Desa Egon Gahar, Kab. Sikka	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	200	Meter	-	Pembangunan Jalan
32	Yohanes Yos De Peskim	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Nelayan Masih Menggunakan mesin ketinting yang sudah tua dan sering mengalami Kerusakan	Kecamatan Doreng Desa Waihawa, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kab sikka tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	10	unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
33	YOSEPH KARMIANTO ERI, S.Fil.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Bantuan Mixer Ecohome Stand Mixer Heavy Duty 10 Liter dan Polytron Chest Freezer 200 Liter PCF 218 dan Oven Bakery Gas Getra 1 Deck RFL-11 SS	RT; 12 RW: 003 Kelurahan Nangameting Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	null	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
34	Lukas Lero	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Sarana Pengolahan produksi moke (Periuk Tanah) oleh kelompok tani masih sangat terbatas	Desa Egon dan Egon Buluk, Kecamatan Waigete, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	null	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	50	unit	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
35	YOSEPH KARMIANTO ERI, S.Fil.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelatihan dan Pengadaan Perangkat Salon Perempuan	Desa Boganatar Kecamatan Talibura, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	-	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
36	Yohanes Yos De Peskim	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Sebagian Masyarakat hingga saat ini masih belum memiliki akses listrik secara mandiri melalui meteran resmi	Kecamatan Doreng Desa Watumerak, Desa Wolonterang dan Desa Kloangpopot, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	20	Unit	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
37	STEFANUS SUMANDI, S.Fil.	Peningkatan system penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan	belum adanya pemasangan piapa dan meteran air di rumah warga untuk mempermudah akses air bersi bagi warga watuhidit	Desa Egon Buluk kecamatan Mapitara, Kab. Sikka	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
38	Yohanes Yos De Peskim	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Nelayan masih menggunakan Mesin Ketinting yang sudah tua dan sering mengalami kerusakan	Kecamatan Doreng Desa Waihawa dan Desa Nenbura, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kab. Sikka tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
39	ALEXANDER AGATO HASULIE	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jalan lingkungan ruas Welinwatut - Wairterang Belum Dibuka, sehingga menghambat mobilitas masyarakat untuk mendistribusikan hasil pertaniannya	Kecamatan Mapitara, Desa Egon Gahar, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	Km	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
40	Yohanes Yos De Peskim	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Kelompok musik Kampung Bura Bekor belum memiliki Sound System yang memadai untuk menunjang latihan dan penampilan dalam berbagai Kegiatan seni dan budaya	Kecamatan Bola Desa Bura Bekor, Kab. Sikka	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai dengan prioritas pembangunan TA 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
41	STEFANUS SUMANDI, S.Fil.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Hibah untuk pembangunan gereja stasi natakoli	Desa Natakoli, Kecamatan Mapitara, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
42	Yohanes Yos De Peskim	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Kelompok musik kampung Waabahar belum memiliki Sound System yang memadai untuk menunjang latihan dan penampilan dalam berbagai Kegiatan seni dan budaya	Kecamatan Doreng Desa Waihawa, Kab. Sikka	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Sesuai dengan program prioritas penbangunan kab. Sikka tahun 2027	Sesuai dengan prioritas pembangunan TA 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
43	HERLINDIS DONATHA DA RATO, S.SIT.	Pembangunan Jalan	Jalan pada ruas Simpang Koting - simpang Puho di dusun Puho Desa Iligai kondisi terputus akibat longsor	Desa Iligai, Kecamatan Lela, Kab. Sikka	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	25	km	-	Pembangunan Jalan
44	HERLINDIS DONATHA DA RATO, S.SIT.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Tim olah raga bola kaki dan volly di Kecamatan Lela dan Koting mengalami kendala anggaran dalam mengikuti setiap turnamen tingkat kabupaten	Desa Lela dan Koting B, Kecamatan Lela dan Koting, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	Tim	-	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota
45	STEFANUS SUMANDI, S.Fil.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	belum adanya benih kelapa genja	Desa Natakoli Kecamatan Mapitara, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kab sikka tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
46	HERLINDIS DONATHA DA RATO, S.SIT.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kondisi ruang perpustakaan SDK Sikka dalam keadaan rusak berat	Desa Sikka, Kecamatan Lela, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
47	ALEXANDER AGATO HASULIE	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Produktifitas usaha tani tanaman pangan dan hortikultura di Desa Egon Gahar khususnya tanaman bawang oleh poktan dan pok pemuda tani masih kurang	Kec. Mapitara, Desa Egon Gahar, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kab. Sikka tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	paket	-	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
48	HERLINDIS DONATHA DA RATO, S.SIT.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kondisi Taman Doa SDK Gehak belum memadai	Desa Sikka, Kecamatan Lela, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
49	HERLINDIS DONATHA DA RATO, S.SIT.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kondisi kapela Dihit belum memiliki dinding sehingga umat masih menggunakan dinding seng sebagai alternatif	Desa Korowuwu, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
50	HYGINUS CLAUDIUS DAGA	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Mesjid Nurul Huda yang saat ini belum memiliki bangunan yang layak dan memadai	Kecamatan Alok Barat Kelurahan Wolomarang, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
51	HERLINDIS DONATHA DA RATO, S.SIT.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Belum tersedianya buku kurikulum deep learning tingkat sekolah dasar di kecamatan lela, koting dan kangae	Kecamatan Lela, koting, Kange, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	20	Paket	-	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
52	HYGINUS CLAUDIUS DAGA	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kapela Ngolo sedang dalam Proses Pembangunan	Kecamatan Alok Desa Gunung Sari, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
53	ALEXANDER AGATO HASULIE	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Perlengkapan altar sebagai prasarana pendukung jalannya liturgi ekaristi di Kapela Stasi Daranatar di Desa Hoder masih minim	Kec. Waigete, Desa Hoder, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
54	STEFANUS SUMANDI, S.Fil.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Fasilitas nelayan yang masih sangat minim dari kapal motor viber 1 GT hingga alat tangkap	Desa Hoder Kecamatan Waigete, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kab sikka tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
55	HYGINUS CLAUDIUS DAGA	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Sebagian Masyarakat masih menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni	Kecamatan Alok Barat Kelurahan Wailiti, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	6	rumah	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
56	HYGINUS CLAUDIUS DAGA	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Sebagian Masyarakat masih menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni	Alok Timur Desa Kojadoi, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	rumah	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
57	ALEXANDER AGATO HASULIE	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Kegiatan olahraga di SDI Habiratin Dusun Habiratin belum dilakukan secara maksimal karena ketiadaan prasarana lapangan olahraga Futsal	Kec. Talibura, Desa Talibura, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
58	HERLINDIS DONATHA DA RATO, S.SIT.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Masih minimnya keterampilan dan keahlian tukang pada 2 Kelompok Usaha Bersama Tukang Desa Sikka dan Desa Baopaat	Desa Sikka dan Hepang, Kecamatan Lela, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	-	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	Kelompok	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
59	DARIUS EVENSIUS, S.Sos.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Bantuan rumah tidak layak huni di kecamatan nelle sebanyak 5 rumah, kecamatan koting 3 rumah dan kecamatan kangae 4 rumah, dengan estimasi Rp.35.000.000,00/rumah	Desa Watuliwung,Nelle Barat,Nelle Lorang, Nelle Urung, Nelle Wutung, Koting A, Koting B, Paubekor, Kokowahor, Habi Kecamatan Kangae, Nelle, Koting, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	12	unit	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
60	FABIANUS TOA	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Belum memadainya sarana prasarana yang dapat mendorong produktivitas kelompok nelayan. Pengadaan Mesin Jiandong 35 PK	Desa Koja Gete Kecamatan Alok Timur , Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan programSesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	PAKET	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
61	ALEXANDER AGATO HASULIE	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Masyarakat tani di Desa Egon dan Desa Nangatobong belum memiliki peralatan suling moke	Kec. Waigete Desa Egon dan Desa Nangatobong, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	sesuai prioritas pembangunan tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	paket	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
62	DARIUS EVENSIUS, S.Sos.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kurangnya pengadaan turnamen sebagai upaya pembinaan bakat di bidang bola voly	Nelle Kecamatan Nelle, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota
63	Antonius Tanjung	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Belum memadainya kondisi jalan sehingga perlu Peningkatan Jalan Lingkungan dari Persimpangan Ledalero ke Wajungaur di Dusun Gere untuk meningkatkan infrastruktur, memperlancar mobilitas, dan mendukung ekonomi masyarakat	Kecamatan Koting - Desa Koting A, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	200	Meter	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
64	FABIANUS TOA	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pengadaan Mesin Press Batako untuk kelompok masyarakat pekerja batako.	Desa Takaplager Kecamatan Nita , Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	-	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	UNIT	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
65	DARIUS EVENSIUS, S.Sos.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Masih banyaknya keluarga tidak mampu yang kesulitan membayar baya pendidikan anak	Desa Nelle Barat, Nelle Lorang, Nelle urung, Nelle Wutung, Koting A, Koting B, Paubekor, Watuliwung, Kokowahor, Habi, Langir, Blatatain Kecamatan Nelle,Kangae,Koting, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
66	Antonius Tanjung	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kondisi jalan yang rusak dan dan berlubang berdampak pada keselamatan pengguna jalan serta menghambat aktivitas ekonomi dan sosial sehingga perlu Peningkatan Ruas Jalan Pertigaan Woloara - Koting	Kecamatan Koting - Desa Gehak, Kab. Sikka	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	115	Meter	-	Pemeliharaan Berkala Jalan
67	DARIUS EVENSIUS, S.Sos.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Tidak adanya alat penunjang produksi batako bagi kelompok muda di kecamatan nelle	Desa Nelle Kecamatan Nelle, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	-	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
68	YOSEP DON BOSCO	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembebasan Lahan untuk SMA Negeri Hewokloang	Desa Kajuwair Kecamatan Hewokloang, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
69	HERLINDIS DONATHA DA RATO, S.SIT.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terdapat rumah tidak layak huni 10 unit di kecamatan lela dan koting	5 Desa Kecamatan Lela dan Koting, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	10	unit	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
70	Yohanes Vinsensius Roma,SP	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Belum terselesaikannya pembangunan Rumah doa Gua Maria Paroki St. Mikhael Nita karena kekurangan dana	Kec. Nita, Desa Nita, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
71	HYGINUS CLAUDIUS DAGA	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ketersedian lahan perkuburan Islam saat ini sangat terbatas dan tidak lagi mencukupi sehingga menimbulkan kesulitan dalam pemakaman	Kecamatan Magepanda Desa Waturia, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
72	YOSEP DON BOSCO	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	Pembangunan Pagar SMPK Renha Rosario Kewapante	Desa Namangkewa Kecamatan Kewapante, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
73	DARIUS EVENSIUS, S.Sos.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Belum adanya fasilitas pembinaan bakat dan minat di bidang olahraga volly di SD INPRES Kode	Desa Nelle Wutung Kecamatan Nelle, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
74	Yohanes Vinsensius Roma,SP	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Belum terselesaikannya pembangunan Kapela Munegajut Paroki Bloro, karena kekurangan dana	Kec. Nita, Desa Riit, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
75	FABIANUS TOA	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Bantuan stimulan pembangunan rumah tidak layak huni kategori rusak ringan	Kelurahan Nangalimang (4) Kelurahan madwat (4) Alok , Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	8	UNIT	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
76	YOSEP DON BOSCO	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Pembangunan Turap Pengaman SDN Hewokloang	Desa Hewokloang Kecamatan Hewokloang, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
77	Antonius Tanjung	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Warga belum memiliki tampungan air yang memadai mengakibatkan keterbatasan ketersediaan air bersih sehingga kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi secara optimal sehingga diperlukan Profil Tank 1100 Liter untuk Dusun Ribang dan Dusun Wololora	Kecamatan Koting Desa Ribang dan Kecamatan Lela Desa Baopaat, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	14	Unit	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
78	HERLINDIS DONATHA DA RATO, S.SIT.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Aktivitas kelompok masyarakat dalam kegiatan spiritual paduan suara mengalami kekurangan peralatan musikKeyboard	Desa Kolidetung dan Desa Lela - Kecamatan Lela , Kelurahan Nangalimang - Kecamatan Alok, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	3	unit	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
79	YOSEP DON BOSCO	Pembangunan Jalan	Peningkatan Jalan (HOTMIX) Simpang Wegok-Sibubotang	Desa Kajuwair Kecamatan Hewokloang, Kab. Sikka	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	5000	M2	-	Pembangunan Jalan
80	YOSEP DON BOSCO	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Pengadaan Mesin Pencacah Multifungsi Kapasitas 100-200 KG dan Mesin Pelet Multifungsi	Desa Watukobu Kecamatan Kewapante, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
81	DARIUS EVENSIUS, S.Sos.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	tidak adanya lampu jalan di desa Nelle wutung, Nelle lorang, Nelle Barat	Desa Nelle Wutung, Nelle Lorang, Nelle Barat Kecamatan Nelle, Kab. Sikka	DINAS PERHUBUNGAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	8	unit	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
82	HERLINDIS DONATHA DA RATO, S.SIT.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pengembangan kegiatan usaha industri kue kering / roti bagi kelompok masyarakat di Kecamatan Lela dan Alok Timur	Lela dan Nangameting, Kecamatan Lela dan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan prioritas pembangunan tahun anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	2	Paket	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
83	HYGINUS CLAUDIUS DAGA	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Masyarakat Kekurangan bak Penampungan air	Kecamatan Alok Timur Desa Kojagete dan Desa pemana, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	14	Buah	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
84	FABIANUS TOA	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Bantuan stimulan pembangunan rumah tidak layak huni kategori rusak ringan	Kelurahan Wariotang, Kelurahan nangameting, Desa lepolima, Kelurahan beru Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	6	UNIT	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
85	DARIUS EVENSIUS, S.Sos.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelatihan dan pengadaan peralatan bengkel mobil dan motor	Desa Nelle Wutung, Nelle Lorang Kecamatan Nelle, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	-	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	2	kelompok	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
86	HERLINDIS DONATHA DA RATO, S.SIT.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kurangnya ketersediaan sarana tangkap ikan Perahu 1 GT bagi kelompok nelayan di desa kojadoi	Desa Kojadoi Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
87	Yohanes Vinsensius Roma,SP	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan serta peralatan kerja untuk pengolahan Pangan Lokal bagi OMK Emaus Paroki Nita	Kec. Nita Desa Nita, Kab. Sikka	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan prioritas pembangunan TA 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
88	HYGINUS CLAUDIUS DAGA	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan pembinaan olahraga taekwondo masih terkendala sarana,peralatan dan pembiayaan	Kecamatan Alok Kelurahan Kota Uneng, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota
89	HERLINDIS DONATHA DA RATO, S.SIT.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Peningkatan kapasitas keterampilan usaha pembuatan abon ikan di kecamatan koting	Desa Koting A, Koting B, Koting C, Koting D dan Waturepa, Kecamatan Koting, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan prioritas pembangunan TA 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	30	orang	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
90	Antonius Tanjung	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Belum memadainya hunian warga di Misir Kelurahan Madawat Kecamatan Alok maka perlu Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (Tidak Layak Huni)	Kecamatan Alok - Kelurahan Madawat, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Unit	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
91	DARIUS EVENSIUS, S.Sos.	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Pengadaan alat musik gong waning untuk sanggar di desa nelle wutung	Desa Nelle Wutung Kecamatan Nelle, Kab. Sikka	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan prioritas pembangunan TA 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	kelompok	-	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
92	PETRUS WODA	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Hibah Bantuan Kepada Gereja Stasi Duli, Paroki Magepanda	Desa Leguwoda Kecamatan Magepanda, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
93	FABIANUS TOA	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Bantuan stimulan pembangunan rumah tidak layak huni kategori rusak berat	Desa Takaplager Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Unit	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
94	Yohanes Vinsensius Roma,SP	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pengetahuan dan ketrampilan kerja melalui sekolah lapangan budidaya padi sawah oleh Kelompok Tani Kula Simo masih minim	Kec. Mego, Desa Korobhera, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa
95	HERLINDIS DONATHA DA RATO, S.SIT.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Sebanyak 30 orang pengemudi kendaraan transportasi umum roda dua ojek belum memahami tata tertib berlalu lintas, belum memiliki legalitas berkendaraan (SIM) dan masih kurangnya kelengkapan keselamatan berkendaraan bermotor di Desa Sikka, Desa Du, Desa Watutedang, desa Lela, Desa Baopaat, dan Desa Hepang	Desa Sikka, Du, watu tedang, Lela, Hepang, Baopaat Kecamatan Lela, Kab. Sikka	DINAS PERHUBUNGAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	30	Paket	-	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
96	Yohanes Vinsensius Roma,SP	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan teknis budidaya Kacang tanah oleh Kelompok Tani Nabi	Kec. Nita, Desa Takaplager, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa
97	HERLINDIS DONATHA DA RATO, S.SIT.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kurangnya sarana pengawet ikan Cool Box bagi 15 orang penjual ikan di desa sikka, Watutedang, Du, Hepang	Desa Sikka, Du, watutedang, Hepang, Kecamatan Lela, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	15	Buah	-	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
98	Yohanes Vinsensius Roma,SP	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Pengetahuan dan ketrampilan teknis melalui sekolah lapangan budidaya ternak kambing oleh kelompok tani " Tani Nita Lauwolo" masih rendah.	Kec. Nita, Desa Nita, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
99	BENEDIKTUS LUKAS RAJA, S.E.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Ketersediaan hand traktor yang masih terbatas sehingga diperlukan dukungan pengadaan alat pertanian	Desa Magepanda, Legu Woda, Done, Kolisia, Kolisia B, Korobehra, Wodamude Kecamatan Magepanda, Mego , Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	10	unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
100	FABIANUS TOA	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan jalan/Rabat jalan lingkungan dari lorong Bougenville menuju RT.004/RW.004	Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur , Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	145	Meter	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
101	Antonius Tanjung	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Ketersediaan alat pertanian masih terbatas sehingga pengolahan lahan dilakukan secara manual, memakan waktu lama, dan kurang efisien, yang berdampak pada rendahnya produktivitas pertanian sehingga perlu Pengadaan Hand Tracktor Untuk Kelompok Gempita Habi guna meningkatkan produktivitas hasil pertanian	Kecamatan Kangae - Desa Habi, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
102	HERLINDIS DONATHA DA RATO, S.SIT.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Sebanyak 8 Mahasiswa di Kelurahan Nangameting, Desa Namangkewa, Desa Koting, Kecamatan Lela, Koting, Kewapante, Alok Timur mengalami Kesulitan dana pendidikan dalam membiayai uang kuliah	Kelurahan Nangameting, Desa Namangkewa, Desa Koting, Kecamatan Lela, Koting, Kewapante, Alok Timur, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	8	Orang	-	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
103	BENEDIKTUS LUKAS RAJA, S.E.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Masih banyak rumah masyarkat yang kurang mampu yang belum memiliki meteran listrik PLN	Desa Magepanda, Legu Woda, Korobhera, Wodamude, Kolisia, Done Kecamatan Magepanda,Mego, Tanawawo, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	42	Unit	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
104	PETRUS WODA	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Paud Londaligo	Desa Leguwoda Kecamatan Magepanda, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
105	BENEDIKTUS LUKAS RAJA, S.E.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bantuan hiba untuk pembangunan gereja stasi duli	Desa Legu Woda Kecamatan Magepanda, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Unit	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
106	FABIANUS TOA	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan jalan/Rabat jalan lingkungan dari Bina Lestari menuju RT.004/RW.005	Kelurahan Beru Kecamtan Alok Timur , Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	150	Meter	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
107	BENEDIKTUS LUKAS RAJA, S.E.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bantuan hiba untuk Pembangunan Gereja paroki Yohanes M.Vianey	Desa Magepanda Kecamatan Magepanda, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Unit	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
108	Yohanes Vinsensius Roma,SP	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Pengetahuan dan ketrampilan melalui sekolah lapangan budidaya Horti Pepaya untuk Kelompok Tani " Padu Wau dan KT Padu Balap" Dusun Tebuk 2 dan Solot belum dilaksanakan	Kec. Nita, Desa Tebuk, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
109	PETRUS WODA	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Pembangunan Pagar Sekolah SDK Woloone	Desa Leguwoda Kecamatan Magepanda, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
110	HYGINUS CLAUDIUS DAGA	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Perahu nelayan banyak mengalami Kebocoran namun belum dapat diperbaiki secara optimal kerena ketrbatasan bahan perbaikan	Kecamatan Alok Barat Kelurahan Wuring dan Kecamatan Magepanda Desa Waturia, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	2	Paket	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
111	BENEDIKTUS LUKAS RAJA, S.E.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Ketersediaan mesin rontok padi yang masih terbatas sehingga diperlukan dukungan pengadaan alat pertanian	Desa Done,Reroroja, Korobera, Bhera Kecamatan Magepanda dan Mego, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	2	Unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
112	PETRUS WODA	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Hibah Bantuan kepada Kapela Stasi Regapuu, Paroki Masabewa	Desa Ragapuu Kecamatan Paga, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
113	Antonius Tanjung	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Keterbatasan, mahalnya harga benang dan pengrajin kesulitan untuk mendapatkan bahan baku mengakibatkan produksi tenun terhambat dan pendapatan pengrajin menurun serta menjaga keberlangsungan warisan budaya tradisional sehingga perlu Pengadaan Bantuan Benang Tensel	Kecamatan Koting - Semua Desa di Kecamatan Koting, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan prioritas pembangunan TA 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	750	Kg	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
114	BENEDIKTUS LUKAS RAJA, S.E.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Luas tanah yang tidak memungkinkan pengembangan pembangunan puskesmas lekebai	Desa Bhera Kecamatan Mego, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahn Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
115	FABIANUS TOA	Peningkatan system penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan	Masih terdapat rumah tangga yang belum memiliki akses langsung terhadap layanan air minum bersih melalui sambungan rumah. Pekerjaan SR air minum bersih	Kelurhan Madawat (3) Keluran Nangalimang (3) Keluruhan Beru (2) Desa Lepo lima (2) Kecamatan Alok Timur , Kab. Sikka	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	10	SR	-	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
116	BENEDIKTUS LUKAS RAJA, S.E.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Belum adanya bantuan ke organisasi pencak silat marga luyu 151 di desa reroroja kecamatan magepanda	Ndete desa Reroroja Kecamatan Magepanda, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
117	PETRUS WODA	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Hibah Bantuan Kepada Asosiasi FUTSAL Kab. Sikka	Kelurahan Madawat Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota
118	Antonius Tanjung	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Belum adanya sarana prasarana pendukung kegiatan rohani sehingga perlu bantuan Kursi dan Sound System untuk Lingkungan Santisima Trinitas GereParoki Wairpelit	Kecamatan Koting - Desa Wairpelit, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
119	PETRUS WODA	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Hibah Bantuan Kepada PSSI ASKAB Sikka	Kelurahan Madawat Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
120	BENEDIKTUS LUKAS RAJA, S.E.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	pengolahan pakan ternak yang masih manual sehingga di butuhkan fasilitas mesin pencacah	Desa Magepanda, Wodamude Kecamatan Magepanda, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	5	Unit	-	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
121	PETRUS WODA	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Perahu 5,5 Lengkap Mesin	Kecamatan Magepanda, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
122	BENEDIKTUS LUKAS RAJA, S.E.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kurangnya pengadaan turnamen sebagai upaya pembinaan bakat di bidang sepak bola	Desa Magepanda Kecamatan Magepanda, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota
123	FABIANUS TOA	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Masih terbatasnya akses dan kapasitas sarana penampungan air bersih bagi sebagian warga terutama di musim kemarau. Pengadaan Profile Tank 1100 L untuk warga	Desa Koja Gete, Keluran Beru, Desa Lepo lima, Kelurahan Nangalimang Alok & Alok Timur , Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahn Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	10	Unit	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
124	Antonius Tanjung	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Belum adanya sarana prasarana pendukung kegiatan rohani sehingga perlu bantuan Kursi dan Sound System untuk Santa Agnes Tomu Lingkungan Tomu Paroki Nelle	Kecamatan Koting - Desa Paubekor, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
125	AGUSTINUS ADEO DATUS, SP	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Hibah Bantuan Kepada Paroki Runut	Desa Runut Kecamatan Waigete, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
126	Antonius Tanjung	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Belum adanya sarana prasarana pendukung kegiatan rohani sehingga perlu bantuan alat musik Keyboard dan Sound System untuk Stasi Puho Paroki Lela dan Lingkungan Santo Stefanus Woloara Paroki Wairpelit	Kecamatan Lela - Desa Iligai, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
127	Antonius Tanjung	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sarana ibadah di gereja masih terbatas dan belum memadai untuk menunjang kegiatan rohani serta kelayakan dan kelancaran pelayanan sehingga perlu Hibah Pembangunan Kapela Stasi Wutik Paroki Koting	Kecamatan Koting - Desa Waturepa, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
128	Antonius Tanjung	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sarana ibadah di gereja masih terbatas dan belum memadai untuk menunjang kegiatan rohani serta kelayakan dan kelancaran pelayanan sehingga perlu Hibah Pembangunan Kapela Stasi Diller Paroki Koting	Kecamatan Koting - Desa Koting C, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
129	Yohanes Vinsensius Roma,SP	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pada Musim hujan, di keliling lokasi Kapela stasi Riit Paroki Bloro, sering terjadi longsor, sehingga butuh pembangunan PAGAR KAPELA Stasi Riit Paroki Bloro	Kecamatan Nita, Desa Riit, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
130	Antonius Tanjung	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sarana ibadah di gereja masih terbatas dan belum memadai untuk menunjang kegiatan rohani serta kelayakan dan kelancaran pelayanan sehingga perlu Hibah Pembangunan Kapela Stasi Dihit Paroki Lela	Kecamatan Lela - Desa Dihit, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
131	FABIANUS TOA	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pengadaan kursi Napolly untuk kelompok Harapan Jaya Lorong Karya Murni RT 004 / RW 004	Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	-	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	250	Unit	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
132	AGUSTINUS ADEO DATUS, SP	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pembangunan Turab Pengaman Desa Likong Gete	Desa Likong Gete Kecamatan Talibura, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
133	CHRISTIAN BHATO GAMA PUTRA, SE	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Ketersedian Kursi di Lingkungan Fransiskus De Sales Paroki St.Thomas Morus Masih sangat terbatas dan banyak yang sudah rusak	Kecamatan Alok Timur Kelurahan Kota Baru, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	250	Buah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
134	CHRISTIAN BHATO GAMA PUTRA, SE	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kapela Kuwuwire Paroki St.Thomas Morus belum memiliki tenda yang memadai untuk menunjang kegiatan keagamaan	Kecamatan Alok Timur Desa Lepolima, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	2	Kotak	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
135	Yuslin Nursivin Dua Botha,S.IP	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Masih terdapat masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni dengan kondisi bangunan tidak memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Keterbatasan kemampuan ekonomi menyebabkan masyarakat tidak mampu melakukan pembangunan rumah secara mandiri, sehingga diperlukan dukungan pemerintah melalui bantuan pembangunan rumah layak huni untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Rt.009, Rw. 008, Desa Gera, Kecamatan Mego, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
136	AGUSTINUS ADEO DATUS, SP	Peningkatan system penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan	Pekerjaan Sumur Bor Desa Kringa	Desa Kringa Kecamatan Talibura, Kab. Sikka	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
137	Yohanes Vinsensius Roma,SP	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengetahuan dan ketrampilan teknis budidaya Ikan air tawar masih kurang, sehingga dibutuhkan pelatihan budidaya ikan air tawar dan bantuan prasarana budidaya	Kec. Nita, Desa Nitakloang, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
138	Yuslin Nursivin Dua Botha,S.IP	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Masih terdapat masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni dengan kondisi bangunan tidak memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Keterbatasan kemampuan ekonomi menyebabkan masyarakat tidak mampu melakukan pembangunan rumah secara mandiri, sehingga diperlukan dukungan pemerintah melalui bantuan pembangunan rumah layak huni untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Desa Wuliwutik, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
139	CHRISTIAN BHATO GAMA PUTRA, SE	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Gereja Stasi Yohanes Paulus II Centrum Paroki St.Thomas Morus sedang dalam Pembangunan	Kecamatan Alok Timur Kelurahan Nangameting, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
140	AGUSTINUS ADEO DATUS, SP	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Hibah Bantuan Kepada Kapela Stasi Natakoli	Desa Natakoli Kecamatan Mapitara, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
141	FABIANUS TOA	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Pengadaan bibit ternak kambing lokal/peranakan untuk kelompok ternak (6 Jantan + 44 betina)	Kelurahan Nangalimang Kelurahan Waioti Alok & Alok Timur , Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	50	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
142	ALFONSUS AMBROSIUS	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Minimnya fasilitas nelayan berupa perahu fiberglass (tanpa mesin) dengan ukuran 4m untuk 3 kelompok nelayan	Desa Wairotang, Wolomarang, Wailiti, Kojadoi, Gunung Sari Kecamatan Alok, Alok Barat,Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	9	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
143	AGUSTINUS ADEO DATUS, SP	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Hibah Bantuan Kepada Kapela Stasi Fransiskus Waigete	Desa Egon Kecamatan Waigete, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
144	Yuslin Nursivin Dua Botha,S.IP	Peningkatan system penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan	Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang menentukan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat namun hingga saat ini warga dusun Rotat belum memiliki sambungan meteran air langsung kerumah masing-masing, sehingga diperlukan dukungan pemerintah melalui bantuan penyediaan sambungan meteran air ke rumah warga dusun Rotat untuk memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat atas air bersih.	Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	130	unit	-	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
145	BAHRUDDIN, S.E.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Belum memadainya kondisi jalan pada Jalan Lingkungan Wuring	Kecamatan Alok Barat - Kelurahan Wolomarang, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	500	Meter	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
146	CHRISTIAN BHATO GAMA PUTRA, SE	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Lingkungan IX St.Rafael Paroki St. Thomas Morus sedang dalam Pekerjaan Pembangunan Gua Maria	Kecamatan Alok Timur Kelurahan Beru, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
147	ALFONSUS AMBROSIUS	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Hibah pembangunan gereja stasi Wolomarang	kelurahan wolomrang kecamatan alok barat, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
148	AGUSTINUS ADEO DATUS, SP	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Bantuan Kapal Motor 2 GT	Desa Lewomada Kecamatan Talibura, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
149	Yuslin Nursivin Dua Botha,S.IP	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Fasilitas Mesjid Babul Khair Ubamoro masih terbatas dan belum memadai untuk mendukung kegiatan ibadah serta pelayanan umat. Sehingga perlu hibah pembangunan guna meningkatkan kelayakan dan fungsi sarana ibadah tersebut	Desa Korobhera, Kecamatan Mego, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Usulan sudah sesuai Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
150	FABIANUS TOA	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pekerjaan instalasi dan SR listrik 900 watt	Kelurahan Nangalimang & Kelurahan Waioti Alok & Alok Timur , Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	3	SR	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
151	AGUSTINUS ADEO DATUS, SP	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Bantuan Alat Tangkap Ikan Pukat 1,5 Inci kepada Kelompok Nelayan Desa Wailamun	Desa Wailamun Kecamatan Talibura, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
152	Yuslin Nursivin Dua Botha,S.IP	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Fasilitas Kapela Dota masih terbatas dan belum memadai untuk mendukung kegiatan ibadah serta pelayanan umat. Sehingga perlu hibah pembangunan guna meningkatkan kelayakan dan fungsi sarana ibadah tersebut	Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Usulan sudah sesuai Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
153	BAHRUDDIN, S.E.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kelompok nelayan belum memiliki sarana prasarana yang memadai sehingga perlu Pengadaan Waring. Alat tangkap untuk meningkatkan Produktivitas Nelayan Bagan	Kecamatan Alok Timur - Desa Koja Besar dan Desa Kojadoi, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	42	Ball	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
154	CHRISTIAN BHATO GAMA PUTRA, SE	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Ketersedian Kursi dan Soundsytem dilingkungan XIX Maria Bunda Hati Kudus Stasi yohanes paulus II Centrum Kelurahan Nangameting Masih terbatas sehingga pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan sering terkendala	Kecamatan Alok Timur Kel. Nangameting, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Usulan sudah sesuai Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
155	AGUSTINUS ADEO DATUS, SP	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Bantuan Alat Tangkap Ikan 2 Inci Kepada Kelompok Nelayan Desa Wailamun	Wailamun Kecamatan Talibura, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
156	Yuslin Nursivin Dua Botha,S.IP	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Sebagian pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna belum memiliki kesempatan kerja tetap dan keterbatasan modal usaha untuk memulai kegiatan ekonomi produktif. Potensi usaha jasa seperti cuci motor dan barbershop memiliki peluang pasar yang baik di lingkungan masyarakat, namun belum dapat dijalankan karena tidak tersedianya peralatan dan perlengkapan usaha. Oleh karena itu, diperlukan dukungan hibah peralatan agar kelompok dapat menjalankan usaha secara mandiri dan berkelanjutan	Desa Lusitada, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	-	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
157	ALFONSUS AMBROSIUS	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Minimnya fasilitas penampung hasil tangkap nelayan berupa coolbox dengan kapasitas 220 liter warna kuning untuk kelompok nelayan di Wolomarang	Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	52	Unit	-	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
158	AGUSTINUS ADEO DATUS, SP	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Hibah Casio Untuk Kelompok Paduan Suara Kapela Stasi Kringa	Desa Kringa Kecamatan Talibura, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Usulan sudah sesuai Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
159	CHRISTIAN BHATO GAMA PUTRA, SE	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Keterbatasan Ekonomi keluarga menyebabkan sebagian peserta didik kesulitan memenuhi biaya pendidikan	Kecamatan Alok, Alok Timur dan Kangae, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Usulan sudah sesuai Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	11	orang	-	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
160	Yuslin Nursivin Dua Botha,S.IP	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan di Dusun Baopunun Desa Nitakloang masih minim dan beberapa titik tidak memiliki PJU, sehingga kondisi jalan kurang aman pada malam hari. Sehingga perlu pembangunan dan pemeliharaan 20 tiang dan lampu PJU untuk meningkatkan penerangan dan keamanan lingkungan	Desa Nitakloang, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERHUBUNGAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
161	BAHRUDDIN, S.E.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kelompok nelayan belum memiliki sarana prasarana yang memadai sehingga perlu Pengadaan Lem Fiber agar masyarakat dan membuat perahu sendiri guna meningkatkan produktivitas penangkapan	Kecamatan Alok, Alok Barat dan Alok Timur - Semua Desa di Kepulauan, Kelurahan Wuring dan Kelurahan Wolomarang, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	7	Paket	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
162	CHRISTIAN BHATO GAMA PUTRA, SE	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kelompok OMK Paroki St. Thomas Morus belum memiliki Keybord untuk menunjang kegiatan Rohani dan pelayanan Liturgi	Kecamatan Alok Timur, Kelurahan Beru, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Usulan sudah sesuai Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
163	Yuslin Nursivin Dua Botha,S.IP	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan desa Nitakloang masih minim dan beberapa titik tidak memiliki PJU, sehingga kondisi jalan kurang aman pada malam hari. Sehingga perlu pembangunan dan pemeliharaan 20 tiang dan lampu PJU untuk meningkatkan penerangan dan keamanan lingkungan	Desa Nitakloang, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERHUBUNGAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
164	CHRISTIAN BHATO GAMA PUTRA, SE	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Ketersedian Kursi di lingkungan IX St. Rafael Masih sangat terbatas dan banyak yang sudah rusak	Kecamatan Alok Timur Kel. Beru, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Usulan sudah sesuai Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	100	Buah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
165	Yuslin Nursivin Dua Botha,S.IP	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan di Dusun Siransina Desa Bloro masih minim dan beberapa titik tidak memiliki PJU, sehingga kondisi jalan kurang aman pada malam hari. Sehingga perlu pembangunan dan pemeliharaan 20 tiang dan lampu PJU untuk meningkatkan penerangan dan keamanan lingkungan	Desa Bloro, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERHUBUNGAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
166	ALFONSUS AMBROSIUS	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Belum adanya drainase yang mengakibatkan banjir waktu musim penghujan di kelurahan wolomarang RT 028, RW 005	Kelurahan Wolomarang RT 028, RW 005 Kecamatan Alok Barat, Kab. Sikka	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	150	m	-	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
167	AGUSTINUS ADEO DATUS, SP	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pekerjaan Rabat	Desa Bola Kecamatan Bola, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
168	Yuslin Nursivin Dua Botha,S.IP	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan Jalan di Dusun Kei Desa Lusitada masih minim dan beberapa titik tidak memiliki PJU, sehingga kondisi jalan kurang aman pada malam hari. Sehingga perlu pembangunan dan pemeliharaan 20 tiang dan lampu PJU untuk meningkatkan penerangan dan keamanan lingkungan	Desa Lusitada, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERHUBUNGAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
169	AGUSTINUS ADEO DATUS, SP	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pengadaan Mesin Potong Aluminium Makita, Alat Paku Tembok, Mesin Gerinda Makita, Bor Tembok Makita, Water Pas Laser Makita, Mesin Potong Tripleks Makita, Kop Kaca Dekson Kaki Tiga; Kepada kelompok kerja BK	Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	-	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
170	Yohanes Vinsensius Roma,SP	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kurangnya pengetahuan dan peralatan usaha bagi kelompok Usaha ekonomi kreatif khususnya pengolahan kuliner bagi kelompok kuliner Nita Lauwolo	Kec. Nita, Desa Nita - Dusun Baoloran, Kab. Sikka	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan prioritas pembangunan TA 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
171	CHRISTIAN BHATO GAMA PUTRA, SE	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Masyarakat Petani Jagung masih mengolah hasil panen secara manual atau menggunakan Giling di luar sehingga memerlukan waktu dan biaya tambahan	Kecamatan Alok Timur Desa Lepolima, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
172	ALFONSUS AMBROSIUS	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	masih terdapat 5 rumah yang butuh perbaikan di wolomarang dan juga wailiti	Kelurahan Wolomarang dan Wailiti Kecamatan Alok Barat, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	5	Unit	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
173	BAHRUDDIN, S.E.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Keterbatasan Modal usaha untuk peningkatan ekonomi bagi masyarakat sehingga perlu Pengadaan Ternak Ayam Petelur	Kecamatan Paga - Desa Masabewa, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
174	Yuslin Nursivin Dua Botha,S.IP	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kelompok Tani saat ini terkendala keterbatasan modal untuk pengadaan ternak babi yang produktif. Akibatnya, usaha peternakan belum dapat berkembang secara optimal dan belum memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan pendapatan anggota kelompok. Oleh karena itu, diperlukan dukungan bantuan ternak sebagai sarana produksi untuk mendorong pengembangan usaha peternakan yang berkelanjutan.	Desa Riit, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	10	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
175	AGUSTINUS ADEO DATUS, SP	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Hibah Bantuan Kepada Garda Muda Maumere dalam Melaksanakan Kegiatan Organisasi; Seminar, Latihan Dasar Kepemimpinan bagi Pelajar SLTA dan Pemuda	Kel. Beru Kecamatan Alok timur, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
176	ALFONSUS AMBROSIUS	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	fasilitas berupa ruang belajar yang masih terbatas pada PAUD Taman Seminari Madre Arcucci	Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat RT 019, RW 004, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Unit	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
177	Yohanes Vinsensius Roma,SP	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jalannya liturgi ekaristi disejumlah 5 Gereja / Kaplela belum didukung dengan prasarana kybor, termasuk perlu dilakukan pelatihan bagi organis	Kec. Nita, Desa Lusitada, Desa Nita, Desa Tebuk Dan Desa Riit, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Usulan sudah sesuai Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
178	BAHRUDDIN, S.E.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kelompok tani belum memiliki sarana prasarana yang memadai sehingga perlu Pengadaan Hand Sprayer untuk penanganan Hama guna meningkatkan produktivitas hasil pertanian	Kecamatan Alok Timur - Desa Koja Besar dan Desa Kojadoi, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	18	Unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
179	AGUSTINUS ADEO DATUS, SP	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Hibah Bantuan Kepada ASKAB PSSI Sikka	Kel. Madawat Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota
180	Yuslin Nursivin Dua Botha,S.IP	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Petani masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pupuk NPK Ponska Plus bagi Kelompok Tani Karya Bersama di desa Wodamude akibat tingginya harga dan keterbatasan daya beli, sehingga pemupukan tidak dilakukan sesuai kebutuhan tanaman dan berdampak pada rendahnya hasil panen. Kondisi ini memerlukan dukungan bantuan pupuk agar produktivitas lahan dapat meningkat dan pendapatan petani lebih stabil.	Desa Wodamude, Kecamatan Magepanda, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	46	Karung	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
181	CHRISTIAN BHATO GAMA PUTRA, SE	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	sebagian perlengkapan penerangan jalan rusak dan juga ada penambahan pemasangan baru	Kecamatan Alok Timur dan Alok Kelurahan Beru, Kota Baru, Madawat dan Desa Lepolima, Kab. Sikka	DINAS PERHUBUNGAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	8	Unit	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
182	BAHRUDDIN, S.E.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Belum memadainya sarana prasarana sekolah sehingga perlu Pengadaan Meja dan Kursi untuk SDIT Rabbani RT 020 RW 008 Kelurahan Waioti	Kecamatan Alok Timur - Kelurahan Waioti, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
183	ALFONSUS AMBROSIUS	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Minimnya fasilitas penunjang nelayan seperti mesin ketinting 5,5 PK pada kelompok nelayan	Kelurahan Wolomarang, Wailiti, Kojadoi, Gunung sari Kecamatan Alok,Alok Timur, Alok Barat, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	14	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
184	Yuslin Nursivin Dua Botha,S.IP	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kelompok tani masih mengalami keterbatasan sarana produksi ternak, khususnya ketersediaan bibit ayam Petelur (YOPer) yang berkualitas akibat keterbatasan modal usaha. Kondisi ini menyebabkan produktivitas dan pengembangan usaha ternak belum optimal, padahal potensi pasar cukup besar untuk meningkatkan pendapatan anggota kelompok. Oleh karena itu, diperlukan dukungan bantuan bibit ayam YOPer guna mendorong peningkatan produksi dan kesejahteraan kelompok tani.	Desa Nitakloang, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	5	Box	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
185	AGUSTINUS ADEO DATUS, SP	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Hibah Bantuan Kepada Klub Bola Volly NAPOLI (Nara Lepolima) dalam Melakukan Pembinaan dan Pengdaan Fasilitas Klub; Bola Volly Jersey Klub dan Pembinaan Klub	Desa Lepolima Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota
186	Yuslin Nursivin Dua Botha,S.IP	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kelompok tani masih mengalami keterbatasan sarana produksi ternak, khususnya ketersediaan bibit ayam Petelur (YOPer) yang berkualitas akibat keterbatasan modal usaha. Kondisi ini menyebabkan produktivitas dan pengembangan usaha ternak belum optimal, padahal potensi pasar cukup besar untuk meningkatkan pendapatan anggota kelompok. Oleh karena itu, diperlukan dukungan bantuan bibit ayam YOPer guna mendorong peningkatan produksi dan kesejahteraan kelompok tani.	Desa Kolisia B, Kecamatan Magepanda, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kab. Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	5	Box	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
187	Yuslin Nursivin Dua Botha,S.IP	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kelompok tani masih mengalami keterbatasan sarana produksi ternak, khususnya ketersediaan bibit ayam Petelur (YOPer) yang berkualitas akibat keterbatasan modal usaha. Kondisi ini menyebabkan produktivitas dan pengembangan usaha ternak belum optimal, padahal potensi pasar cukup besar untuk meningkatkan pendapatan anggota kelompok. Oleh karena itu, diperlukan dukungan bantuan bibit ayam YOPer guna mendorong peningkatan produksi dan kesejahteraan kelompok tani.	Desa Nita, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	5	Box	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
188	CHRISTIAN BHATO GAMA PUTRA, SE	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kondisi jalan lingkungan RT.048 RW.002 Kelurahan Wolomarang yang rusak sehingga menyulitkan aktivitas masyarakat sehari-hari terutama akses kerumah	Kecamatan Alok Barat Kelurahan Wolomarang, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	175	meter	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
189	CHRISTIAN BHATO GAMA PUTRA, SE	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kondisi jalan rabat lorong Dua Toru di RT 017 RW.004 Kelurahan Nangameting lingkungan yang rusak sehingga menyulitkan aktivitas masyarakat sehari-hari terutama akses kerumah	Kecamatan Alok Timur Kelurahan Nangameting, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	150	meter	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
190	Yohanes Vinsensius Roma,SP	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Perlu dilakukannya Pelatihan Pewarnaa untuk ikat tenun dan bantuan pengadaan benang dan pewarna kimia guna meningkatkan Produktifitas usaha	Kec. Nita-Desa tebuk Dusun solot, Desa Nita Dusun Baoloran, Desa Nitakloang Dusun Blatat, Dusun Belat desa Riit, Desa Lusitada Dusun Nataweru, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan prioritas pembangunan TA 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	6	paket	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
191	Yuslin Nursivin Dua Botha,S.IP	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kelompok tani masih mengalami keterbatasan sarana produksi ternak, khususnya ketersediaan bibit ayam Petelur (YOPer) yang berkualitas akibat keterbatasan modal usaha. Kondisi ini menyebabkan produktivitas dan pengembangan usaha ternak belum optimal, padahal potensi pasar cukup besar untuk meningkatkan pendapatan anggota kelompok. Oleh karena itu, diperlukan dukungan bantuan bibit ayam YOPer guna mendorong peningkatan produksi dan kesejahteraan kelompok tani.	Desa Tilang, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	5	Box	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
192	ALFONSUS AMBROSIUS	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Beluma adanya peningkatan jalan lingkungan di RT 017 RW 003 menuju ke RT 016 RW 003 kelurahan wolomarang	Kelurahan Wolomarang RT 017,RW 003 menuju ke RT 016, RW 003 Kecamatan Alok Barat, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	25	m	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
193	Yuslin Nursivin Dua Botha,S.IP	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kelompok Tani saat ini terkendala keterbatasan modal untuk pengadaan ternak kambing yang produktif. Akibatnya, usaha peternakan belum dapat berkembang secara optimal dan belum memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan pendapatan anggota kelompok. Oleh karena itu, diperlukan dukungan bantuan ternak sebagai sarana produksi untuk mendorong pengembangan usaha peternakan yang berkelanjutan.	Desa Wuliwutik, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	44	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
194	CHRISTIAN BHATO GAMA PUTRA, SE	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Perahu nelayan banyak mengalami Kebocoran namun belum dapat diperbaiki secara optimal kerena keterbatasan bahan untuk perbaikan	Alok Timur Kecamatan Kelurahan Waioti, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
195	Yuslin Nursivin Dua Botha,S.IP	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kelompok tani masih mengalami keterbatasan sarana produksi ternak, khususnya ketersediaan bibit ayam Petelur (YOPer) yang berkualitas akibat keterbatasan modal usaha. Kondisi ini menyebabkan produktivitas dan pengembangan usaha ternak belum optimal, padahal potensi pasar cukup besar untuk meningkatkan pendapatan anggota kelompok. Oleh karena itu, diperlukan dukungan bantuan bibit ayam YOPer guna mendorong peningkatan produksi dan kesejahteraan kelompok tani.	Desa Nita, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	10	Paket	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
196	CHRISTIAN BHATO GAMA PUTRA, SE	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Nelayan masih menggunakan mesin perahu yang sudah tua dan sering mengalami kerusakan	Kecamatan Alok Timur Kel.Waioti, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	3	Buah	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
197	ALFONSUS AMBROSIUS	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Belum adanya peningkatan jalan lingkungan di RT 029, RW 008 kelurahan wailiti	Kelurahan Wailiti RT 029,RW 008 Kecamatan Alok Barat, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	50	m	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
198	CHRISTIAN BHATO GAMA PUTRA, SE	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	PAUD Napoli Belum memiliki Laptop	Kecamatan Alok Timur Desa Lepolima, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Buah	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
199	Beatus Wilfridus Djogo	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Masih banyak rumah warga yang belum memadai sehingga perlu Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk pencegahan terhadap timbun dan berkembangnya Pemukiman Kumu di luar kawasan pemukiman	Kecamatan Nita dan Mego - Desa Nangablo, Desa Tilang, Desa Lusitada, Desa Nita Kloang, Desa Dobo dan Desa Dobo Nuapu'u, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	13	Unit	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
200	ALFONSUS AMBROSIUS	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Belum adanya Drumband sebagai upaya pembinaan minat dan bakat peserta didik pada SD INPRES Wailiti	Kelurahan Wailiti Kecamatan Alok Barat, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Set	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
201	Beatus Wilfridus Djogo	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Peningkatan Kualitas Pedagang Ikan sehingga perlu Pengadaan Alat Pendingin Frezer 300 Liter	Kecamatan Nita - Desa Nita dan Desa Nangablo, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	3	Unit	-	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
202	ALFONSUS AMBROSIUS	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kurangnya fasilitas pembinaan rohani berupa kursi plastik untuk lingkungan stasi nagalimang, dan stasi Wolomarang	Kelurahan Nangalimang, Wolomarang Kecamatan Alok,Alok Barat, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Usulan sudah sesuai Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	300	Buah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
203	FRANSISKUS STEPHANUS SAY, S.E.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Rendahnya kualitas jalan lingkungan jalur Wojong - Umauta sehingga menghambat mobilitas warga dan sangat rentan terhadap kecelakaan. Padat Karya diselengarakan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dan peningkatan penghasilan warga. Kegiatan padat karya dalam rangka Peningkatan jalan jalur Wojong - Umauta di lokasi simpang Rohe - Umauta	Desa Umauta Kecamatan Bola, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	-	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	500	Meter	-	Perluasan Kesempatan Kerja
204	CHRISTIAN BHATO GAMA PUTRA, SE	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	ketersedian buku paket siswa disekolah SDI Nara Lepolima dan SD Wailiti masih terbatas sehingga belum seluruh peserta didik memiliki buku pegangan	Kecamatan Alok Timur dan Alok Barat Desa Lepolima dan Kelurahan Wailiti, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	2	Paket	-	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
205	Beatus Wilfridus Djogo	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kelompok nelayan belum memiliki sarana prasarana yang memadai untuk peningkatan produktivitas sehingga perlu Pengadaan Perahu Fiber dan Mesin 5.5 PK untuk Kelompok Watu Rajo, Ana Kalo, Tuke Tonda dan Kelompok Nelayan Seate di Desa Mbengu	Kecamatan Paga - Desa Mbengu, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	4	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
206	Yohanes Vinsensius Roma,SP	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Produktifitas usaha pertanian khususnya kakao jenis Klon MCC 02 Sambung Pucuk Bagi Poktan Paudodo masih minim	Kec. Nita, Desa Nita, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
207	ALFONSUS AMBROSIUS	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kurangnya fasilitas pembinaan rohani berupa kursi untuk lingkungan stasi misir	Kelurahan Madawat Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Usulan sudah sesuai Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	100	Buah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
208	Yuslin Nursivin Dua Botha,S.IP	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Sebagian besar anggota kelompok tani masih melakukan pengolahan lahan secara manual atau menggunakan peralatan yang terbatas, sehingga membutuhkan 1 (satu) unit hand traktor Quick G3000 Zeva yang dilengkapi dengan mesin Kubota RD 85 DI-2S serta roda besi tapak lebar (150 mm) untuk kelompok tani Done Bersatu di desa Done. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan waktu tanam dan berdampak pada rendahnya produktivitas hasil pertanian. Keterbatasan sarana mekanisasi juga menjadi kendala bagi kelompok d	Desa DonE, Kecamatan Magepanda, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
209	FRANSISKUS STEPHANUS SAY, S.E.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (SD)	Belum terpenuhinya kebutuhan buku paket peserta didik SD sesuai kurikulum yang berlaku sehingga belum seleuruh peserta didik memiliki buku pembelajaran yang memadai guna mendukung proses belajar mengajar. Pengadaan buku paket pembelajaran bagi peserta didik di SDK Natawatu, SDK Bola, dan SDI Umauta	Desa Watukrus, Desa Umauta Kecamatan Bola , Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	3	Sekolah	-	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
210	Beatus Wilfridus Djogo	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Peningkatan Prasarana Penunjang untuk Pemasaran Hasil Perikanan sehingga perlu Pengadaan Mobil Thermoking (Mobil Pendingin) Ikan Beku untuk Kelompok Berkat Laut Sejahtera	Kecamatan Alok Barat - Kelurahan Wolomarang, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Unit	-	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
211	CHRISTIAN BHATO GAMA PUTRA, SE	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Sebagian Masyarakat masih menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni	Kecamatan Alok Timur Kelurahan Wairotang, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Unit	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
212	ALFONSUS AMBROSIUS	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Hibah AFKAB	Kota uneng Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota
213	Beatus Wilfridus Djogo	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Belum adanya sarana prasarana pendukung kegiatan rohani sehingga perlu Pengadaan Prasarana Perlengkapan Doa untuk KUB Bunda Pelindung Lingkungan Santo Markus Belat Paroki Santisima Bloro	Kecamatan Nita - Desa Riit, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Usulan sudah sesuai Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
214	Yohanes Vinsensius Roma,SP	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan sepak bola di Kabupaten Sikka, belum maksimal karena minimnya dana pembinaan, sehingga perlu Hibah pembinaan sepakbola bagi PSSI	Kec. Alok, Kelurahan Madawat, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota
215	CHRISTIAN BHATO GAMA PUTRA, SE	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Sebagian Masyarakat masih menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni	Kecamatan Alok Timur Kelurahan Kota Baru, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Unit	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
216	Beatus Wilfridus Djogo	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Belum adanya sarana prasarana pendukung kegiatan rohani sehingga perlu Pengadaan Prasarana Kursi dan Peralatan Doa untuk Lingkungan Santo Agustinus Paroki Santisima Bloro	Kecamatan Nita - Desa Lusitada, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Usulan sudah sesuai Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
217	Beatus Wilfridus Djogo	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Belum adanya sarana prasarana pendukung kegiatan rohani sehingga perlu Pengadaan Prasarana Perlengkapan Doa untuk KUB Perawan Berkuasa Lingkungan Santo Gabriel Paroki Kristus raja Wolonmaget	Kecamatan Nita - Desa Wuliwutik, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Usulan sudah sesuai Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
218	Yuslin Nursivin Dua Botha,S.IP	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Sebagian besar anggota kelompok tani masih melakukan pengolahan lahan secara manual atau menggunakan peralatan yang terbatas, sehinggamesin semprot portable (portable sprayer TIGER TPS 226) 4 tak . Kondisi ini menyebabkan keterlambatan waktu tanam dan berdampak pada rendahnya produktivitas hasil pertanian. Keterbatasan sarana mekanisasi juga menjadi kendala bagi kelompok dalam meningkatkan luas dan intensitas tanam.	Desa Nitakloang, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	20	unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
219	ALFONSUS AMBROSIUS	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Belum adanya peningkatan jalan rabat di RT 004,RW 012 kelurahan madawat	Kelurahan Madawat Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	50	m	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
220	Beatus Wilfridus Djogo	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Belum adanya sarana prasarana pendukung kegiatan rohani sehingga perlu Bantuan untuk KBG Bunda Pengantara Lingkungan Santo Arnoldus Jansen Paroki Wairpelit	Kecamatan Nita - Desa Takaplager, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Usulan sudah sesuai Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
221	FRANSISKUS STEPHANUS SAY, S.E.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Hibah dana untuk Yayasan Garuda Bhakti Flores dalam rangka pembinaan dan pendampingan bagi para lulusan SMA	Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Kegiatan	-	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
222	CHRISTIAN BHATO GAMA PUTRA, SE	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Masyarakat masih mengalami keterbatasaN akses air minum bersih kerena belum tersedianya sambungan Rumah (SR) jaringan air minum yang memadai di RT 14 Desa Lepolima	Kecamatan Alok Timur Desa Lepolima, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	10	Rumah	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
223	Beatus Wilfridus Djogo	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Belum adanya sarana prasarana pendukung kegiatan rohani sehingga perlu Bantuan Prasarana untuk OMK Paroki Tilang	Kecamatan Nita - Desa Tilang, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Usulan sudah sesuai Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
224	Beatus Wilfridus Djogo	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Keterbatasan modal dalam meningkatkan Potensi Orang Muda sehingg perlu Hibah untuk OMK Santo Yohanes Don Bosko Paroki St. Yoseph Wairpelit	Kecamatan Nita - Desa Wairpleit, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
225	FRANSISKUS STEPHANUS SAY, S.E.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Masih terbatasnya akses dan kapasitas sarana penampungan air bersih bagi sebagian warga terutama di musim kemarau. Pengadaan Profile Tank 1100 L untuk warga	Desa Pruda Kecamatan Waiblama, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	10	Unit	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
226	Yohanes Vinsensius Roma,SP	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kelompok Milenial restorasi Asesoris Dusun Tebuk 2 masih mengalami kekurangan peralatan kerja untuk kegiatan ukiran limbah pertanian	Kec. Nita, Desa Tebuk, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	-	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
227	AGUSTINUS ADEO DATUS, SP	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Hibah Bantuan Kepada Yayasan Sanpukat Maumere	Kelurahan Kabor Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
228	FRANSISKUS STEPHANUS SAY, S.E.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Pembangunan kapal fiberglass 1 GT untuk kelompok nelayan anggota Koperasi FLIPPER	Desa Watukrus Kecamatan Bola, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
229	Beatus Wilfridus Djogo	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Pengangkutan hasil panen masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang besar karena belum memadainya sarana pengangkutan sehingga perlu Pengadaan Motor 3 (Tiga) Roda untuk Kelompok Tani Kojalaka	Kecamatan Nita - Desa Tilang, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
230	Beatus Wilfridus Djogo	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Perlu peningkatan ekonomi bagi masyarakat sehingga perlu Pengadaan Ternak Babi Bibit untuk Masyarakat	Kecamatan Nita - Desa Nangablo dan Desa Tilang, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
231	FRANSISKUS STEPHANUS SAY, S.E.	Peningkatan system penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan	Belum terpenuhinya kebutuhan air untuk irigasi sawah warga sehingga hasil produksi tidak maksimal Pekerjaan Sumur Bor untuk irigasi sawah	Desa Henga Kecamatan Talibura, Kab. Sikka	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	2	Titik	-	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
232	Beatus Wilfridus Djogo	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Belum adanya sarana prasarana pendukung kegiatan rohani sehingga perlu Pengadaan Prasarana Kursi dan Peralatan Doa untuk Lingkungan Santo Paulus Detudenu Stasi Nabi Elia Woloara, Paroki Maria Kusuma Karmel Bu Nuaria	Kecamatan Tanawawo - Desa Detubinga, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Usulan sudah sesuai Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
233	Agustinus Feliksius Segon	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Belum ada rabat Sehingga Akses Mobilitas untuk angkutan hasil bumi terkendala	Kecamatan Doreng Desa Wolomotong (Masyawair), Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	100	meter	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
234	Beatus Wilfridus Djogo	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Keterbatasan modal dalam meningkatkan Potensi Karang Taruna sehingga perlu Hibah untuk Karang Taruna Desa Umagera	Kecamatan Kewapante - Desa Umagera, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
235	Beatus Wilfridus Djogo	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Belum adanya sarana prasarana pendukung kegiatan rohani sehingga perlu Pengadaan Prasarana Perlengkapan Doa untuk KUB Bunda Maria Selalu Menolong Lingkungan X Santo Fransiskus Asisi Stasi Yohanes Paulus II Centrum Paroki Thomas Morus	Kecamatan Alok Timur - Kelurahan Nangameting, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Usulan sudah sesuai Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
236	Agustinus Feliksius Segon	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Belum ada rabat Sehingga Akses Mobilitas untuk angkutan hasil bumi terkendala	Kecamatan Doreng Desa Wolomotong Meraduet, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	150	meter	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
237	Agustinus Feliksius Segon	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Belum ada rabat Sehingga Akses Mobilitas untuk angkutan hasil bumi terkendala	Kecamatan Doreng Desa Wolomotong (Klekabihat), Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	100	meter	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
238	Beatus Wilfridus Djogo	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Belum adanya sarana prasarana pendukung kegiatan rohani sehingga perlu Pengadaan Prasarana Keyboard dan Kamera untuk Gereja Paroki Kristus Raja Wolonmaget	Kecamatan Alok Barat - Kelurahan Wolomarang, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Usulan sudah sesuai Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
239	Agustinus Feliksius Segon	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kurangnya Modal Kelompok Untuk Usaha Ayam Petelur	Kecamatan Doreng Desa Wolomotong Dusun Wolomotong, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	100	Boks	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
240	Agustinus Feliksius Segon	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Gereja St. Petrus Kloangpopot sedang dalam Pembangunan	Kecamatan Doreng Desa Wolomotong, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Usulan sudah sesuai Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
241	Agustinus Feliksius Segon	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Masyarakat Kekurangan bak Penampungan air	Kecamatan Waigete Desa Hoder dan Wairblerer, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	23	Buah	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
242	Agustinus Feliksius Segon	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Keterbatasan Modal dan rendahnya Pendapatan Masyarakat serta minimnya kepemilikan bibit ternak kambing jantan dan betina yang berkualitas	Kecamatan Doreng Desa Nenbura, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	27	ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
243	SUFRIYANCE MERISON BOTU, S.S.	Peningkatan system penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan	Belum selesainya pembangunan jaringan air minum beris di kecamatan Nita mengakibatkan masyarakat tidak bisa menikmati air minum bersi Optimalisasi jaringan air bersih IKK Nita	Desa Ladogahar , Desa Nita Kloang, Desa Bloro dan Desa Lusitada Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
244	Agustinus Feliksius Segon	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kondis Jalan Lingkungan yang Rusak dan sulit dilalui sehingga menghambat aktivitas masyarakat	Kecamatan Doreng Desa Nenbura Dusun Hepang, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	150	meter	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
245	Yuslin Nursivin Dua Botha,S.IP	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kelompok tani masih mengalami keterbatasan sarana produksi ternak, khususnya ketersediaan bibit ayam Petelur (YOPer) yang berkualitas akibat keterbatasan modal usaha. Kondisi ini menyebabkan produktivitas dan pengembangan usaha ternak belum optimal, padahal potensi pasar cukup besar untuk meningkatkan pendapatan anggota kelompok. Oleh karena itu, diperlukan dukungan bantuan bibit ayam YOPer guna mendorong peningkatan produksi dan kesejahteraan kelompok tani.	Desa Lusitada, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	5	Box	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
246	Agustinus Feliksius Segon	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Lingkungan Sekolah belum memiliki pagar yang memadai sehingga keamanan dan kenyamanan siswa serta aset sekolah krang terjamin	Kecamatan Bola Desa Wolonwalu, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
247	Nurhayati Bonda,SPd	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Hiibah Bantuan Untuk Pembangunan Kantor Majelis Ulama Indonesia Kab. Sikka	Kel. Kota Uneng Kecamatan Alok, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
248	SUFRIYANCE MERISON BOTU, S.S.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Belum tuntasnya pekerjaan jalan yang menghubungkan Dusun rotat menuju wair pu'an Lanjutan pembukaan jalan baru Rotat-Wair Pu'an	Desa Rotat - Wair Pu'an Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
249	Agustinus Feliksius Segon	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	ketersedian buku paket siswa di SD Klotong dan SDi Gade masih terbatas sehingga belum seluruh peserta didik memiliki buku pegangan	Kecamatan Bola Desa Bura Bekor, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	Paket	-	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
250	Nurhayati Bonda,SPd	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Hibah Bantuan Untuk Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Sikka	Kel. Madawat Kecamatan Alok, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
251	Nurhayati Bonda,SPd	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Hibah Bantuan kepada Taqmir Masjid untuk Lanjutan Pembangunan Masjid Baiturahman	Desa Kojadoi Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
252	SUFRIYANCE MERISON BOTU, S.S.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Belum adanya sertifikasi lahan untuk pembangunan Paud St. Matida sehingga menghambat proses akreditasi sekolah. Pembebasan lahan untuk Pembangunan Paud Santa Mathilda dusun Natawulu	Desa Ladogahar Kecamatan Nita , Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
253	Agustinus Feliksius Segon	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Nelayan masih menggunakan mesin dan alat tangkap yang sederhana dan sudah tidak layak	Kecamatan Waiblama Desa Pruda, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	4	Buah	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
254	Nurhayati Bonda,SPd	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Hibah Bantuan Kepada Taqmir Masjid Untuk Melanutkan Pembangunan Musshola Al-Furqhon Nangahure Lembah	Wuring; Kecamatan Alok Barat, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Usulan sudah sesuai Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
255	Nurhayati Bonda,SPd	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Bantuan Beasiswa Belajar Kepada Mahasiswa	Kecamatan Alok, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	8	Orang	-	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
256	Nurhayati Bonda,SPd	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Hibah Bantuan Kepada Taqmir Masjid Nanghure Bukit Untuk Melanjutkan Pekerjaan Masjid	Kel. Wuring Kecamatan Alok, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
257	SUFRIYANCE MERISON BOTU, S.S.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Belum adanya sertifikasi lahan untuk pembangunan Puskesmas Nirangkliung sehingga menghambat proses pembangunan Puskesmas Nirangkliung. Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Puskesmas Nirangkliung	Desa Nirangkliung Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Palek	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
258	Nurhayati Bonda,SPd	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Hibah Bantuan Untuk Pengadaan Alat Musik Rabana Bagi Organisasi Muslimat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kelurahan Kota Uneng	Kota Uneng Kecamatan Alok, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
259	Nurhayati Bonda,SPd	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Hibah Bantuan Kepada Majelis Ta'lim Untuk Pengadaan Tenda dan Kursi	Kel. Wolomarang Kecamatan Alok Barat, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
260	Nurhayati Bonda,SPd	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Hibah Bantuan Kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sikka Untuk Pengadaan Tenda dan Kursi	Kelurahan Madawat Kecamatan Alok, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
261	Yuslin Nursivin Dua Botha,S.IP	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Fasilitas Kapela St.Mikhael Ubamoro masih terbatas dan belum memadai untuk mendukung kegiatan ibadah serta pelayanan umat. Sehingga perlu hibah pembangunan guna meningkatkan kelayakan dan fungsi sarana ibadah tersebut	Kecamatan Mego, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
262	Nurhayati Bonda,SPd	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Hibah Bantuan Kepada Taqmir Masjid Nurul Huda Bebeng Untuk Melanjutkan Pekerjaan Masjid	Kelurahan Wolomarang Hibah Bantuan Kepada Taqmir Masjid Nurul Huda Bebeng Untuk Melanjutkan Pekerjaan Masjid, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
263	Nurhayati Bonda,SPd	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pekerjaan Pagar Pengaman Tempat Pemakaman Umum Islam Kabureta	Kelurahan Wairotang Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
264	Nurhayati Bonda,SPd	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pekerjaan Rabat Jalan	Kel. Madawat; Perumans Melati 1 Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	100	Meter	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
265	SUFRIYANCE MERISON BOTU, S.S.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Bantuan Rumah Layak Huni kategori Bangun Baru di Rotat RT.003/RW.001	Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
266	Nurhayati Bonda,SPd	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pekerjaan Rabat Jalan	Kel. Kota Uneng: RT; 003 / RW; 002 Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	50	Meter	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
267	Nurhayati Bonda,SPd	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pekerjaan Jalan	Kelurahan Kota Uneng; RT. 003 / RW. 004 Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	75	Meter	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
268	Yuslin Nursivin Dua Botha,S.IP	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kelompok tani masih mengalami keterbatasan sarana produksi ternak, khususnya ketersediaan bibit ayam Petelur (YOPer) yang berkualitas akibat keterbatasan modal usaha. Kondisi ini menyebabkan produktivitas dan pengembangan usaha ternak belum optimal, padahal potensi pasar cukup besar untuk meningkatkan pendapatan anggota kelompok. Oleh karena itu, diperlukan dukungan bantuan bibit ayam YOPer guna mendorong peningkatan produksi dan kesejahteraan kelompok tani.	Desa Nitakloang Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	5	Box	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
269	Nurhayati Bonda,SPd	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	-. Bantuan Rabat Jalan / Wuring Leko	Kel. Wolomarang Kecamatan Alok Barat, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	50	Meter	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
270	Yuslin Nursivin Dua Botha,S.IP	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kelompok tani masih mengalami keterbatasan sarana produksi ternak, khususnya ketersediaan bibit ayam Petelur (YOPer) yang berkualitas akibat keterbatasan modal usaha. Kondisi ini menyebabkan produktivitas dan pengembangan usaha ternak belum optimal, padahal potensi pasar cukup besar untuk meningkatkan pendapatan anggota kelompok. Oleh karena itu, diperlukan dukungan bantuan bibit ayam YOPer guna mendorong peningkatan produksi dan kesejahteraan kelompok tani.	Desa LusitadA, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	5	Box	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
271	Nurhayati Bonda,SPd	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Bantuan Profil Tank 750 Liter Kepada Warga	Kel. Madawat Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	5	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
272	Nurhayati Bonda,SPd	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kojadoi: Dusun II Koja Besar dan Dusun Margajong	Desa Kojadoi: Dusun II Koja Besar dan Dusun Margajong Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
273	YOSEF NONG SONI, S.Pi.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sarana kybor untuk Jalannya liturgi ekaristi belum ada, sehingga perlu Bantuan 4 unit kybor Untuk Lingkungan dalam wilayah Paroki Renya Rosari Kewapante Dan Paroki Bolawolon	Kec. Kewapante Dan Kec. Kangae, Desa Kopong, Desa Geliting, Desa Watumilok dan Desa Kokowahor, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	4	unit	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
274	Nurhayati Bonda,SPd	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Bantuan Profil Tank 750 Liter Kepada Warga	Desa Parumaan Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
275	Nurhayati Bonda,SPd	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Bantuan Profil Tank 750 Liter Kepada Warga	Desa Kojagete Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
276	YOSEF NONG SONI, S.Pi.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Perlu pembangunan Rabat Jalan lingkungan yang ada di Desa Kopong RT.001/RW.001	Kec. Kewapante, Desa Kopong, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	100	meter	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
277	Nurhayati Bonda,SPd	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-. Bantuan Pemasangan Meteran Listrik 900 KFA	Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
278	YOSEF NONG SONI, S.Pi.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan pertandingan beladiri Taekwondo mengalami kendala finansial	Kec. Alok, Kelurahan Madawat, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota
279	Nurhayati Bonda,SPd	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Pemeliharaan Homestay	Desa Kojadoi Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan prioritas pembangunan TA 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
280	Nurhayati Bonda,SPd	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Bantuan Lem Viber Kepada Kelompok Nelayan	Desa Pemana Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	Paket	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
281	YOSEF NONG SONI, S.Pi.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan olah raga sepak bola sdkit mengalami kendala, sehingga perlu Hibah Bagi PSSI Sikka	Kec. Alok, Kel. Madawat, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota
282	Nurhayati Bonda,SPd	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Bantuan Lem Viber Kepada Kelompok Nelayan	Desa Parumaan Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	Paket	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
283	Yuslin Nursivin Dua Botha,S.IP	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Sebagian besar anggota kelompok tani masih melakukan pengolahan lahan secara manual atau menggunakan peralatan yang terbatas, sehingga membutuhkan 1 (satu) unit hand traktor Quick G3000 Zeva yang dilengkapi dengan mesin Kubota RD 85 DI-2S serta roda besi tapak lebar (150 mm) untuk kelompok tani Kema Sama-Watu wa di desa Done. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan waktu tanam dan berdampak pada rendahnya produktivitas hasil pertanian. Keterbatasan sarana mekanisasi juga menjadi kendala bagi kelo	Desa Done, Kecamatan MagepandA, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
284	Nurhayati Bonda,SPd	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Bantuan Lem Viber Kepada Kelompok Nelayan	Desa Kojadoi Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	Paket	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
285	Nurhayati Bonda,SPd	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Bantuan Lem Viber Kepada Kelompok Nelayan	Desa Kojagete Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	Paket	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
286	Nurhayati Bonda,SPd	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Bantuan Coolbox Kepada Kelompok Nelayan	Wuring; Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	Paket	-	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
287	Nurhayati Bonda,SPd	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Bantuan Alat Panah Ikan; Senter, Masker dan Sepatu Selam	Desa Pemana Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
288	YOSEF NONG SONI, S.Pi.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Gelar pertandingan sepak bola antar SMP se Kabupeten Sikka sedkit mengalami kendala	Kecamatan Alok, Kelurahan Madawat, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota
289	Nurhayati Bonda,SPd	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Bantuan Alat Tangkap Jaring Kepada Kelompok Nelayan	Desa Kojagete Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
290	Nurhayati Bonda,SPd	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Bantuan Alat Ikan Jaring Kepada Kelompok Nelayan	Kel. Kota Uneng Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
291	Nurhayati Bonda,SPd	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Bantuan bibit Holtikultura (Tomat, Lombok, Terong dan Sawi) beserta perlengkapannya	Waioti: RT; 025 / RW; 008 Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
292	YOSEF NONG SONI, S.Pi.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Meteran Listrik bagi sebahagian kecil masyarakat berpenghasilan rendah belum ada	Kec. Lela Dan Kec. Kewapante Desa Lela, Desa Wairkoja, Desa Kopong, Desa Geliting dan Desa Namangkewa, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	12	unit	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
293	Nurhayati Bonda,SPd	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Bantuan Alat Semprot Pertanian	Desa Kojagete; Dusun Loang dan Dusun Gusung Karang Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
294	YOSEF NONG SONI, S.Pi.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah ternak sapi yang diusahakan oleh peternak masih terbatas, sehingga perlu Bantuan Ternak Sapi Betina Ras Bali	Kecamatan Kewapante, Kecamatan Kangae, Desa Seusina Dan Desa Kopong, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	13	ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
295	Nurhayati Bonda,SPd	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Bantuan Alat Semprot Pertanian	Desa Pemana Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	Paket	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
296	YOSEF NONG SONI, S.Pi.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Sarana Profil Tank Kapasitas 1.100 L bagi masyarakat yang ada di Dusun Kaduwair Desa Manubura masih kurang	Kec. Nelle, Desa Manubura, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	9	unit	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
297	Nurhayati Bonda,SPd	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Bantuan Alok Semprot Pertanian	Desa Koja Doi: Kelompok Pertanian Kojabesar & Margajong Timur Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	Paket	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
298	YOSEF NONG SONI, S.Pi.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kegiatan usaha kuliner, belum berjalan dengan baik, sehingga perlu Bantuan Gerobak Jualan Kuliner	Kec. Kewapante, Desa Waiara dan Desa Geliting, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan prioritas pembangunan TA 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	5	unit	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
299	YOSEF NONG SONI, S.Pi.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Sejumlah rumah masyarakat yang berpenghasilan rendah di Kecamatan Lela belum layak huni, sehingga perlu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Kec. Lela, Desa Sika, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
300	YOSEF NONG SONI, S.Pi.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Sejumlah rumah masyarakat yang berpenghasilan rendah di Kecamatan Lela belum layak huni, sehingga perlu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	, Kec. Lela, Desa Lela, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	unit	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
301	YOSEF NONG SONI, S.Pi.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Produksi Tenun Ikat yang dikerjakan oleh kelompok tenun masih sangat minim, sehingga perlu bantuan Benang dan Pewarna Bagi Kelompok Tenun Ikat	Kec. Kewapante, Desa Ian Tena Dan Desa Kopong, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan prioritas pembangunan TA 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	paket	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
302	YOSEF NONG SONI, S.Pi.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Lahan untuk Pembangunan PUSTU Prima di Bola Pomat belum dibebaskan	Kec. Kangae, Desa Tanaduen, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
303	YOSEF NONG SONI, S.Pi.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Prasarana untuk bengkel motor masih sangat terbatas, sehingga perlu Pengadaan Peralatan Perbengkelan kendaraan bermotor	Kec. Kewapante, Desa Waiara, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	-	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	paket	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
304	YOSEF NONG SONI, S.Pi.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Gelar pertandingan sepak bola antar SMA/SMK sedkit mengalami kendala.	Kecamatan Alok, Kelurahan Madawat, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota
305	Heriawan	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi dan hasil usaha tangkap ikan belum optimal, sehingga perlu Pengadaan Bahan pembuatan sampan / kapal fiberglass (Resin dll)	Kecamatan Alok, Desa Pemana Dan Desa Gunung Sari, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	paket	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
306	Heriawan	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rumpon Pesisr bagi nelayan di desa - desa kepulauan masih kurang	Kecamatan Alok Dan Alok Timur, Desa Pemana dan Desa Kojadoi, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	paket	-	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
307	Heriawan	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Nelayan di 6 Desa / Kelurahan masih kekurangan cool box ukuran 120 liter	Kec. Alok, Barat, Kec. Alok, Kec. Alok Timur, Desa Pemana, Kelurahan Wolomarang, Kelurahan Wuring, Kelurahan Kota Uneng. , Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	70	unit	-	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
308	Heriawan	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Nelayan di Desa Sikka kekurangan cool box ukuran 120 liter	Kecamatan Lela, Desa Sika (Dusun Sika), Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	unit	-	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
309	Heriawan	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Nelayan di Desa Pemana masih kekurangan sarana cool box untuk pengawetan ikan ukuran 220 liter	Kec. Alok, Desa Pemana, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	10	unit	-	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
310	Heriawan	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Nelayan di Kepulauan belum memiliki mesin ketinting 5,5 PK untuk penangkapan ikan air laut	Kecamatan Alok Dan Alok Timur, Desa Parmaan Dan Desa Semparong, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
311	Heriawan	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Nelayan di Kepulauan belum memiliki alat bantu senter selam XSTAR	Kecamatan Alok, Barat, Alok, Alok Timur, Desa - Desa Kepulauan, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	80	unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
312	Heriawan	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sejumlah Kelompok Nelayan belum memiliki Waring Bagan / Kelong	Kecamatan Alok, Desa Pemana Dan Kel. Kota Uneng, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	paket	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
313	Heriawan	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kegiatan Pengajian oleh umat muslim dan organisasi kemasyarakatan belum berjalan lancar, karena masih terbatasnya Kursi Plastik (Napoli)	Kecamatan Alok Dan Alok Timur, Desa Pemana, Gunung sari, Kelurahan Kota Uneng dan Desa Kojadoi, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	500	buah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
314	Heriawan	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kegiatan Rohani di KBG Perawan Yang Murah Hati Paroki St. Thomas Morus belum berjalan lancar, karena masih minimnya Kursi Plastik (Napoli)	Kec. Alok Timur, Kelurahan Nangameting, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	50	buah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
315	Heriawan	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Penyemprotan Obat-Obatan dan pestisida belum dapat dilakukan secara maksimal	Kec. Alok, Desa Pemana dan Gunung sari, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
316	Piet Christian Da Cunha	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Hibah untuk Panitia Turnament Sepak Bola Tingkat SLTA Samador Cup 2	Kel. Madawat, Kec. Alok, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota
317	Heriawan	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Peralatan Pangkas Rambut sebagai salah satu usaha produktif orang muda belum tersedia.	Kec. Alok, Desa Pemana Dan Gunung Sari, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	-	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	5	paket	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
318	Heriawan	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Akses masyarakat terhadap ketersediaan air minum masih terbatas, sehingga perlu pengadaan Mesin Depot Air Minum (Mesin Isi Ulang Air Galon) di Napunlangir	Kec. Alok Barat, Kelurahan Wolomarang (Napunglangir), Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	-	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
319	Piet Christian Da Cunha	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Hibah untuk Panitia Open Futsal Christian Cup 2	Kel Madawat, Kec Alok, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota
320	Heriawan	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Sejumlah bengkel las masih kekurangan mesin las, sehingga perlu Bantuan Mesin Las 450 wat dan 900 watt	Kec. Alok, Desa Pemana Dan Kelurahan Kota Uneng, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	-	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	15	buah	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
321	Heriawan	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Sarpras bengkel motor belum lengkap, sehingga perlu pengadaan Peralatan kerja di sejumlah Bengkel Motor	Kec. Alok, Desa Pemana, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	-	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	15	buah	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
322	Heriawan	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Masih minimnya pengetahuan dan peralatan kerja bagi Kelompok Usaha Kuliner, sehingga perlu Pelatihan Pengolahan kuliner dan Bantuan Pengadaan Peralatan Masak	Kec. Alok Timur Dan Kec. Alok, Desa Pemana, Desa Kojadoi dan Desa Permaan, Kab. Sikka	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan prioritas pembangunan TA 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	paket	-	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
323	Piet Christian Da Cunha	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rabat Jalan samping Hotel Gardena RT/RW 002/002	Kel Beru, Kec Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	100	Meter	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
324	Heriawan	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kegiatan Keagamaan dan Sosial (Pengajian) yang dijalankan oleh Kerukunan Keluarga Mianto (KKM) belum berjalan baik, sehingga perlu pengadaan sound system (Speaker Behringer dan Mic Warles)	Kec. Alok Kelurahan Kota Uneng, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
325	Piet Christian Da Cunha	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rabat Jalan di Misir RT/RW 001/009	Misir, Kec. Alok, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	100	Meter	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
326	Heriawan	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pedagang tekstil skala kecil di Kelurahan Kota Uneng masih kekurangan terpal merk abadi ukuran 8x6	Kec. Alok, Kelurahan Kota Uneng, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	-	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	60	buah	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
327	Heriawan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kelompok belum memiliki mesin parut kelapa (listrik) untuk memperlancar usaha dagangnya	Kec. Alok, Kec. Alok Timur, Desa Pemana, Gunung Sari, Koja doi, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan prioritas pembangunan TA 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	60	buah	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
328	Piet Christian Da Cunha	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pengadaan Organ Yamaha PSR SX 920 untuk PS The Heaven Voice	Kel. Nangameting, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Unit	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
329	Heriawan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Sarana Profil Tank Kapasitas 750 L bagi masyarakat yang ada di Desa Pemana	Kec. Alok, Kec. Alok Timur, Desa - Desa di Kepulauan, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	25	unit	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
330	Heriawan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Ruas jalan menuju TPU Waturia, belum dibangun	Kec. Magepanda, Desa Waturia , Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	60	meter	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
331	Heriawan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Sarana penerangan / listrik belum dimiliki oleh 5 rumah tangga berpenghasilan rendah, sehingga perlu Sambungan Rumah (SR) Listrik PLN	Kec. Alok, Desa Pemana, Desa Gunung Sari dan Kelurahan Kota Uneng, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	5	rumah	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
332	Piet Christian Da Cunha	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pembuatan Drainase, Madawat Belakang SD 4 samping Toko Laris	Kel Madawat, Kec. Alok, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	100	Meter	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
333	Piet Christian Da Cunha	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Pengadaan Ternak Babi betina (INDUKAN) BB 80 kg	2 Lepolima, 1 Kota Uneng, 1 Madawat, 1 Wolomarang & 1 Wuring, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	6	Kelompok	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
334	Piet Christian Da Cunha	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Pengadaan IB Babi	2 Lepolima, 1 Kota Uneng, 1 Wolomarang & 1 Wuring, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	5	Ekor	-	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
335	Piet Christian Da Cunha	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Hibah Club Sepak Bola Rajawali FC	Kel Beru, Kec Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota
336	Piet Christian Da Cunha	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Hibah Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Gabriel Waioti	Kel Waioti, Kec Alok Timur, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
337	Piet Christian Da Cunha	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pengadaan Peralatan Misa Lengkap untuk Ling. XIX Maria Bunda Hati Kudus Stasi Centrum, Paroki Thomas Morus	Kel Nangameting, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
338	Piet Christian Da Cunha	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Kapela Kuwuwire	Ds Lepolima, Kec Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
339	Piet Christian Da Cunha	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Hibah Pembangunan Lanjutan Rumah Doa Adorasi Wairotang	Kel Wairotang, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
340	Piet Christian Da Cunha	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Hibah untuk Yayasan Bina Sari Maumere	Kel Beru, Kec Alok Timur, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
341	Piet Christian Da Cunha	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Hibah untuk AFKAB Kabupaten Sikka	Kota Baru, Kec Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota
342	Piet Christian Da Cunha	Peningkatan system penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan	Optimaliasasi Jaringan Air Minum RT 23 Wailiti-Samping UPK Flores	Kel Wailiti, Kec Alok Barat, Kab. Sikka	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
343	Piet Christian Da Cunha	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Instalasi dan SR Listrik (900 watt) di wilayah Kota Maumere	Kec Alok Timur, Kec Alok & Kec Alok Barat, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	31	Unit	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
344	Piet Christian Da Cunha	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pengadaan kursi untuk Rumah Doa Adorasi Wairotang	Wairotang, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
345	Piet Christian Da Cunha	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rabat Jalan Susteran Mercideria RT/RW 04/10	Madawat, Kec. Alok, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	100	Meter	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
346	Piet Christian Da Cunha	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Bantuan Cool Box 220 Liter Plastik HDPE merek Taraga untuk Pengawetan Ikan	Kel Kabor, Kec Alok, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
347	Piet Christian Da Cunha	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Bantuan Ayam KUB umur 1-1,5 bulan	Kel Kota Uneng, Kec Alok, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	50	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
348	Piet Christian Da Cunha	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan PJU di Lorong Veteran	Kel Kota Baru, Kec. Alok, Kab. Sikka	DINAS PERHUBUNGAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
349	Piet Christian Da Cunha	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan PJU di Napunlangir	Kel Wolomarang, Kec Alok Barat, Kab. Sikka	DINAS PERHUBUNGAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
350	Piet Christian Da Cunha	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pengembangan Kacang Hijau untuk Kelompok di Watugong Varietas Fima 1 label Ungu	Ds Watugong, Kec Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	Kelompok	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
351	Yunus Noce Fernandez	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Bibit Ikan Lele untuk OMK Wilayah Sant Bernadino Paroki Roh Kudus Nelle	Ds Nelle Lorang, Kec Nelle, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
352	Yunus Noce Fernandez	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pembukaan Jalan Lingkungan	Gehak Lau RT 17, Ds. Koting D, Kec Koting, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	500	Meter	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
353	Yunus Noce Fernandez	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lanjutan Peningkatan Jalan / Rabat Jalan Beton Lebar 3 M, Tebal 12 Cm	Manubura, Mu'u Utur-Bolaboer Rt.19 Dsn Habipiret, Kec Nelle, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	150	Meter	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
354	Yunus Noce Fernandez	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lanjutan Peningkatan Jalan / Rabat Jalan Beton Lebar 2 M, Tebal 12 Cm	Nelle Lorang, Dusun 4 RT 13 Lorong Wolomotong, Kec Nelle, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	100	Meter	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
355	Yunus Noce Fernandez	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan / Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Pertigaan Baluele Ds. Manubura & Dsn. Wuret Ds Nelle Urung, Kab. Sikka	DINAS PERHUBUNGAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	Unit	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
356	Yunus Noce Fernandez	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Bantuan Tenun Ikat bagi Kelompok	Keduwair, Ds Manubura, Kec Nelle, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan prioritas pembangunan TA 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	Kelompok	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
357	Yunus Noce Fernandez	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Bantuan Tenun Ikat bagi Kelompok	Halat, Ds Nelle Barat, Kec Nelle, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan prioritas pembangunan TA 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Kelompok	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
358	Yunus Noce Fernandez	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Bantuan Tenun Ikat bagi Kelompok	Ds Nelle Lorang, Kec Nelle, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan prioritas pembangunan TA 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	Kelompok	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
359	Yunus Noce Fernandez	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Bantuan Tenun Ikat bagi Kelompok	Tomu, Ds Paubekor, Kec Koting, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan prioritas pembangunan TA 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Kelompok	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
360	Yunus Noce Fernandez	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Bantuan Tenun Ikat bagi Kelompok	Wutik, Ds Koting D, Kec Koting, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan prioritas pembangunan TA 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Kelompok	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
361	Yunus Noce Fernandez	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Bantuan Tenun Ikat bagi Kelompok	Ds Ribang, Kec Koting, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan prioritas pembangunan TA 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Kelompok	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
362	Yunus Noce Fernandez	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Bantuan Tenun Ikat bagi Kelompok	DU, Sikka, Kec Lela, Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan prioritas pembangunan TA 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Kelompok	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
363	Yunus Noce Fernandez	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Hibah untuk Kapela Halat	Nelle Barat, Kec Nelle, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
364	Yunus Noce Fernandez	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Hibah untuk Kapela Keduwair	Manubura, Kec Nelle, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
365	Yunus Noce Fernandez	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Hibah untuk Gua Maria Ds. Habi	Ds Habi, Kec Kangae, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
366	Yunus Noce Fernandez	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Bantuan Sarana Produksi Hortikultura Tomat & Buncis (benih, pupuk)	Halat, Nelle Barat dan Baluele, Manubura, Kec Nelle, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	Kelompok	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
367	Yunus Noce Fernandez	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Pengadaan Handtractor Roda 2	Halat, Nelle Barat, Kec. Nelle, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
368	Yunus Noce Fernandez	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Pengadaan Handtractor Roda 2	Gehak Lau, Koting D, Kec Koting, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
369	Yunus Noce Fernandez	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Pengadaan laptop dan printer untuk TK Marselino	Ds Nelle Lorang, Kec Nelle, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pengadaan Perlengkapan PAUD
370	Leonard Winarto,SS.M.HUM	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Hibah untuk Panitia Turnamen Futzal Senior dan Junior "Bintang Muda Cup 2027"	Ds Nita, Kec. Nita, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota
371	Leonard Winarto,SS.M.HUM	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Hibah untuk AFKAB Kabupaten Sikka	Madawat, Kec Alok, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota
372	Leonard Winarto,SS.M.HUM	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bantuan Pengadaan Tenda Jadi untuk Kelompok Keagamaan dan Pemuda	Dsn. Napun Kabor, Ds. Takaplager, Dsn. Nataweru, Ds. Lusitada, Ds. Orin Koting, Ds. Karakabu, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	12	Unit	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
373	Leonard Winarto,SS.M.HUM	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan penerangan jalan umum sepanjang jalan Desa Nita	Ds Nita, Kec Nita, Kab. Sikka	DINAS PERHUBUNGAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	10	Unit	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
374	Leonard Winarto,SS.M.HUM	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Pengadaan Mesin Diesel Kapal 35 PK 1 Unit dan Alat Tangkap Ikan Pukat 1,5 Inchi	Ds. Mbengu, Kec. Paga, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	5	Paket	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
375	Leonard Winarto,SS.M.HUM	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Pengadaan Alat Tangkap Ikan Pukat 1,5 Inchi	Ds. Korobhera, Kec. Mego, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	5	Paket	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
376	Leonard Winarto,SS.M.HUM	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Belanja ternak kambing untuk bantuan kepada masyarakat	Ds. Bloro, Kec Nita, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	30	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
377	Leonard Winarto,SS.M.HUM	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Pengadaan Mesin Diesel/Listrik Pelet Pakan Ayam	Ds. Nitakloang, Kec Nita, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	Unit	-	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
378	Leonard Winarto,SS.M.HUM	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pengadaan Mesin Jahit Dinamo Lengkap	Dsn. Kei, Ds. Lusitada, Kec Nita, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	-	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	4	Unit	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
379	MARTHEN LUTHER ADJI, SE	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Masih kurangnya 6 buah laptop sebagai sarana pra sarana pendukung belajar pada SDI Watu gong dan TK Negeri IX St. Theresa Watuliwung	Desa Watogong, Kecamatan Alok Timur dan Desa Watuliwung Kecamatan Kangae, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	6	unit	-	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
380	Leonard Winarto,SS.M.HUM	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Pengadaan Handtractor Roda 2	Nawuteu, Ds. Kolisia B, Kec Magepanda, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	Unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
381	MARTHEN LUTHER ADJI, SE	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Masih kurangnya fasilitas Drumband untuk pengembangan bakat minat siswa pada PUD Kalvari di Kelurahan Kota Baru	Kelurahan Kota Baru - Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pengadaan Perlengkapan PAUD
382	Leonard Winarto,SS.M.HUM	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Pengadaan Handtractor Roda 2	Ds. Arewawo Tanangalu, Kec Paga, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
383	MARTHEN LUTHER ADJI, SE	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Masih kurangnya fasilitas Drumband untuk pengembangan bakat minat siswa pada TK Negeri IX St. Theressa di Desa Watuliwung	Desa Watuliwung - Kecamatan Kangae, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pengadaan Perlengkapan PAUD
384	Leonard Winarto,SS.M.HUM	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pengadaan 500 anakan Pala	Ds. Koting A, Kec Koting, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Kelompok	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
385	Leonard Winarto,SS.M.HUM	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pengadaan Alat Musik Keyboard untuk Lingkungan St. Arnoldus Nitapleat	Ds. Nita, Kec. Nita, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Unit	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
386	Leonard Winarto,SS.M.HUM	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pengadaan Sound System untuk KBG Cermin Kekudusan	Ds Nita, Kec Nita, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
387	MARTHEN LUTHER ADJI, SE	Pembangunan Jalan	Kondisi erosi pada musim penghujan yang menyebabkan akses transportasi terganggu sehingga dibutuhkan turap pengaman kali di Kelurahan Wolomarang	Kelurahan Wolomarang, RT.014, RW.000 - Kecamatan Alok Barat, Kab. Sikka	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	100	Meter	-	Pembangunan Jalan
388	Leonard Winarto,SS.M.HUM	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pemeliharaan Lampu Jalan 16 Titik	Desa Nita, Kec Nita, Kab. Sikka	DINAS PERHUBUNGAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	16	Unit	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
389	Leonard Winarto,SS.M.HUM	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembebasan Lahan untuk Pustu Nirangkliung	Ds. Nirangkliung, Kec Nita, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
390	MARTHEN LUTHER ADJI, SE	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Terdapat 6 rumah warga belum memiliki meteran listrik di rumah warga	Kelurahan Waioti dan Wairotang - Kecamatan Alok Timur, Keluarahan Kota Uneng - Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	6	unit	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
391	Leonard Winarto,SS.M.HUM	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (SMP)	Pengadaan Drumband untuk SMP Kimang Buleng	Desa Nita Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
392	Leonard Winarto,SS.M.HUM	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pengadaan Buku Perpustakaan Kampus Cristo-Re	Kel Madawat, Kec Alok, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	null	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
393	MARTHEN LUTHER ADJI, SE	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kondisi jalan lingkungan yang belum memadai sepanjang 150 meter di Rt.017, Rw.006 sehingga menghambat mobilitas warga	Desa Lepolima - Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	150	Meter	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
394	Leonard Winarto,SS.M.HUM	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (SMP)	Pengadaan Laptop & Printer untuk SMP Negeri 2 Paga	Ds. Detubinga, Kec Tanawawo, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	Paket	-	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
395	MARTHEN LUTHER ADJI, SE	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Masih terdapat 5 rumah tangga di kelurahan Waioti, Kota Uneng, Wailiti dan Beru yang menempati rumah tidak layak huni dengan kondisi bangunan tidak memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Keterbatasan kemampuan ekonomi menyebabkan masyarakat tidak mampu melakukan pembangunan rumah secara mandiri, sehingga diperlukan dukungan pemerintah melalui bantuan bangun baru rumah layak huni untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Kelurahan Waioti, Beru - Kecamatan Alok Timur dan Kota Uneng - Kecamatan Alok , serta Kelurahan Wailiti - Kecamatan Alok Barat, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	5	unit	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
396	Leonard Winarto,SS.M.HUM	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Kontainer Sampah dan Operasionalnya	Ds Nita, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	Unit	-	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
397	Leonard Winarto,SS.M.HUM	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Bantuan Cool Box 220 Liter Plastik HDPE Merek Tanaga untuk Pengawetan Ikan	Ds. Mbengu, Kecamatan Paga, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	6	Unit	-	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
398	Leonard Winarto,SS.M.HUM	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Belanja ternak babi bibit untuk bantuan kepada kelompok masyarakat	Desa Nita, Kec. Nita, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	11	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
399	MARTHEN LUTHER ADJI, SE	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Aktivitas masyarakat terhambat dalam mengakses jalan lingkungan sepanjang 100 meter di Rt.011, Rw. 04 Kelurahan Nangalimang karena belum ada pembebasan lahan	Rt.011, Rw. 04 Kelurahan Nangalimang - Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	100	Meter	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
400	MARTHEN LUTHER ADJI, SE	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Adanya elompok masyarakat di Kelurahan Kota Uneng yang belum memiliki sarana kursi sebagai penunjang kegiatan bersama	Kelurahan Kota Uneng - Kecamatan Alok, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	50	Buah	-	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
401	MARTHEN LUTHER ADJI, SE	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Seorang mahasiswa S3 mengalami keterbatasan dana pendidikan untuk biaya kuliah	Desa Lepo Lima - Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Orang	-	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
402	MARTHEN LUTHER ADJI, SE	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Seorang Dokter yang sementara menempuh Spesialisasi Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi mengalami keterbatasan dana pendidikan untuk biaya kuliah	Desa Lepo Lima - Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Orang	-	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
403	MARTHEN LUTHER ADJI, SE	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Masih terdapat kekurangan perlengkapan pada beberapa cabang olah raga di berbagai Organisasi cabang olah raga antara lain Tinju, Taekwondo, Tenis Meja, Tenis Lantai, Tarung Drajat, PASI, Forki, IPSI, Perkemi, Futsal, SSB Metro Muda, PSSI	Kelurahan Madawat, Kota Baru, Kota Uneg dan Beru - Kecamatan Alok, Alok Timur dan Alok Barat, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	12	Paket	-	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota
404	HERLINDIS DONATHA DA RATO, S.SIT.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Tim olah raga bola kaki Satria muda di kelurahan madawat mengalami kendala anggaran dalam mengikuti setiap turnamen tingkat kabupaten	Kelurahan Madawat - Kecamatan Alok, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Tim	-	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota
405	Heriawan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jalan Pemukiman di kampung Dambila belum memiliki lampu jalan, sehingga perlu pengadaan PLTS 80 Wp.	Kec. Alok Timur, Desa Parumaan, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	5	unit	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
406	Heriawan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	Prasarana Drumband SMP MTS Nur Muhammad Pemana belum tersedia.	Kec. Alok, Desa Pemana, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Set	-	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
407	Heriawan	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan olah raga sepak bola sdkit mengalami kendala, sehingga perlu Hibah Bagi PSSI Sikka.	Kec. Alok, Kelurahan Madawat, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota
408	Heriawan	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan pertandingan sepakbola futsal dan sepakbola mini di Desa Pemana belum sepenuhnya optimal	Kecamatan Alok, Kelurahan Madawat, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
409	GORGONIUS NAGO BAPA, S.E.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Masih banyak rumah warga yang belum memadai sehingga perlu adanya Bantuan stimulan perumahan swadaya rehap sedang untuk masyarakat	Kewapante (Waiara, Namangkewa),Kecamatan Hewokloang (Rubit,Kajowair) Kecamatan Kangae (Kokowahor, Blatatatin, Mekendetun, Tanaduen , Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	10	Unit	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
410	GORGONIUS NAGO BAPA, S.E.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	belum adanya akses jalan yang memadai di pemukiman warga sehingga perlu adanya Pembangunan ruas jalan lingkungan di ruas jalan Blatat - Wolonbungat	Kecamatan Kangae,Desa Tanaduen, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
411	GORGONIUS NAGO BAPA, S.E.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Belum adanya akses jalan yang memadai dari ili menuju Liantahon	Kecamatan Kangae,Desa Kokowahor, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
412	GORGONIUS NAGO BAPA, S.E.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Belum adanya pagar pengaman di halamansekolah	SDK Bei,Desa Blatatatin ,Kecamatan Kangae, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
413	GORGONIUS NAGO BAPA, S.E.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Masih banyak rumah warga yang belum mempunyai sambungan listrik PLN	semua desa di Kecamatan Kewapante,Kangae,Hewokloang dan koting , Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	22	SR	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
414	GORGONIUS NAGO BAPA, S.E.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Belum adanya sarana dan prasarana kegiatan pertanian sehingga perlu Pengadaan mesin potong rumput untuk kelompok tani	Semua desa di Kecamatan kangae, kewapante dan hewokloang, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	Unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
415	GORGONIUS NAGO BAPA, S.E.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	tenaga kerja yang berprofesi sebagai penjahit belum memiliki sarana prasarana yang memadai sehingga perlu mengadakan pelatihan dan Pengadaan mesin jahit listrik untuk kelompok masyarakat	Kecamatan Kewapante (Namangkewa, Waiara) Kecamatan Hewokloang (Rubit) dan Kecamatan kangae , Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	-	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	5	Unit	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
416	GORGONIUS NAGO BAPA, S.E.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kurang memadainya fasilitas di kapela stasi dan lingkungan sehingga perlu Pengadaan kursi plastik untuk menunjang kegiatan kerohaniaan	Semua desa di Kecamatan Kewapante, Hewokloang dan kangae, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	400	Buah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
417	GORGONIUS NAGO BAPA, S.E.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kondisi listrik PLN diwilayah Kecamatan kangae belum sepenuhnya stabil, sehingga sangat menghambat pekerjaan pertukangan dan pengelasan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kokowahor sehingga perlu mengadakan mesin genset 30 KVA	Kecamatan Kangae desa Kokowahor, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	-	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Unit	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
418	GORGONIUS NAGO BAPA, S.E.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Belum memadainya sarana dan parasaran pendukung peralatan bengkel motor sehingga perlu Pengadaan peralatan dan kunci kunci untuk bengkel motor	Kecamatan Kangae desa Watuliwung, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	-	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
419	GORGONIUS NAGO BAPA, S.E.	Pembangunan Jalan	Kondisi jalan sangat curam seinggan menyulitkan akses kelura masuk kendaraan sehingga perlu dilakukan penimbunan dan turap pengaman jalan masuk menuju kampung kloanggelot	Kecamatan Kangae desa Blatatatin kampung Kloanggelot, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
420	GORGONIUS NAGO BAPA, S.E.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Perlu peningkatan ekonomi bagi masyarakat sehingga perlu Pengadaan Ternak Babi jantan untuk Masyarakat	Kecamatan kewapante desa namangkewa dan waira, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	5	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
421	GORGONIUS NAGO BAPA, S.E.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Perlu peningkatan ekonomi bagi masyarakat sehingga perlu Pengadaan Ternak Babi betina untuk masyarakat	Kecamatan Kewapante desa Namangkewa dan waira, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	5	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
422	GORGONIUS NAGO BAPA, S.E.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Perlu peningkatan ekonomi bagi masyarakat sehingga perlu Pengadaan Ternak kambing jantan untuk Masyarakat	Kecamatan kewapante desa namangkewa dan waira, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	10	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
423	GORGONIUS NAGO BAPA, S.E.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Perlu peningkatan ekonomi bagi masyarakat sehingga perlu Pengadaan Ternak kambing betina untuk Masyarakat	Kecamatan Kewapante desa (Namangkewa,Waiara) Kecamatan Waigete desa Egon buluk , Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	10	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
424	GORGONIUS NAGO BAPA, S.E.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	belum tersediannya AP dalam,AP luar dan lemari buku untuk PAUD sehingga perlu Pengadaan AP dalam,AP luar dan lemari buku untuk PAUD Lourdes di Diller	Kecamatan Koting desa Koting C, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
425	GORGONIUS NAGO BAPA, S.E.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Belum adanya sarana prasarana pendukung kegiatan kelompok tenun sehingga perlu adanya Bantuan pengadaan benang dan obat obatan untuk kelompok	Semua desa di Kecamatan Lela, Kangae, dan Hewokloang , Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan prioritas pembangunan TA 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	10	Kelompok	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
426	GORGONIUS NAGO BAPA, S.E.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Belum tersedianya gerobak jualan UMKM sehingga perlu pengadaan gerobak jualan	Kecamatan Kewapante desa (Namangkewa dan Waiara) dan Kecamatan kangae , Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan prioritas pembangunan TA 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	5	Buah	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
427	GORGONIUS NAGO BAPA, S.E.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	kurangnya dana untuk pembangunan sarana prasarana pendukung kegiatan rohani sehingga perlu adanya hibah pembangunan gereja Habi	Kecamatan kangae desa Habi, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
428	GORGONIUS NAGO BAPA, S.E.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	kurangnya dana untuk pembangunan sarana prasarana pendukung kegiatan rohani sehingga perlu adanya hibah pembangunan kapela nara	Kecamatan Kangae desa Blatatatin, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
429	GORGONIUS NAGO BAPA, S.E.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	kurangnya dana untuk pembangunan sarana prasarana pendukung kegiatan rohani sehingga perlu adanya hibah untuk pembangunan kapela wodon	Kecamatan Kangae Desa Blatatatin Kapela wodon, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
430	GORGONIUS NAGO BAPA, S.E.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	belum adanya bantuan beasiswa untuk masyarakat tidak mampu sehingga perlu adanya hibah bantuan	Semua desa di Kecamatan Kangae, Kewapante dan Hewokloang , Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
431	GORGONIUS NAGO BAPA, S.E.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	Belum adanya pagar pengaman di halaman SMP Cerdas Bangsa	Kecamatan Kewapante desa waira, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
432	ALEXANDER AGATO HASULIE	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Aktifitas kesenian dan musik oleh kelompok musik di Kelurahan Kota Uneng masih terhambat, karena kurangnya pengetahuan, keterampilan dan alat musik kybor	Kec. Alok, Kelurahan Kota Uneng, Kab. Sikka	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	-	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
433	ANTONIUS HENDRIKUS REBU	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Masih banyak rumah warga yang belum memadai sehingga perlu adanya Bantuan stimulan pembangunan rumah tidak layak huni kategori sedang untuk masyarakat	Kecamatan paga desa paga, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Unit	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
434	ANTONIUS HENDRIKUS REBU	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	masih banyak rumah warga yang tidak layak huni kategori sedang sehingga perlu adanya bantuan stimulan pembangunan rumah	Kecamatan Paga desa (Paga, Mbengu, dan Lewolabo) , Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	5	Unit	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
435	ANTONIUS HENDRIKUS REBU	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Masih banyak rumah warga yang belum mempunyai sambungan listrik PLN sehingga perlu adanya Bantuan Pemasangan instalasi dan meteran listik PLN	Kecamatan Paga desa (Paga, Mbengu dan Lewolabo) , Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	30	SR	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
436	ANTONIUS HENDRIKUS REBU	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kelompok nelayan belum memiliki sarana prasarana yang memadai untuk peningkatan produktivitas sehingga perlu adanya Pengadaan Perahu sampan Fiber dayung untuk kelompok nelayan	Kecamata Paga desa (Paga) Kecamatan Mego desa (Korobera) , Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
437	ANTONIUS HENDRIKUS REBU	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kelompok nelayan belum memiliki sarana prasarana yang memadai untuk peningkatan produktivitas sehingga perlu adanya pengadaan Pukat D9 untuk kelompok nelayan	Kecamatan Paga desa Paga, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
438	ANTONIUS HENDRIKUS REBU	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kelompok nelayan belum memiliki sarana prasarana yang memadai untuk peningkatan produktivitas sehingga perlu pengadaan mesin disel 35 PK	Kecamatan Paga desa (Paga dan mbengu) Kecamatan Mego desa (Korobera) , Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	9	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
439	ANTONIUS HENDRIKUS REBU	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kelompok tani belum memiliki sarana prasarana yang memadai untuk peningkatan produktivitas sehingga perlu adanyaPengadaan 1 (Unit) Handtraktor untuk Kelompok Tani	Kecamatan Paga desa Paga Kecamatan Mego desa Korobera , Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
440	ANTONIUS HENDRIKUS REBU	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kelompok tani belum memiliki sarana prasarana yang memadai untuk peningkatan produktivitas sehingga perlu adanya pengadaan mesin rontok	Kecamatan Paga desa Paga Kecamatan Mego desa Korobera, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	5	Unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
441	ANTONIUS HENDRIKUS REBU	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kurangnya dana untuk pembangunan sarana prasarana pendukung kegiatan rohani maka adanya hibah pembangunan gereja paga	Kecamatan Paga desa Paga, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
442	PETRUS WODA	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Hibah Bantuan Kepada Klub Bola Volly NAPOLI (Nara Lepolima) dalam Melakukan Pembinaan dan Pengdaan Fasilitas Klub; Bola Volly Jersey Klub dan Pembinaan Klub	Desa Lepolima Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota
443	MARIA ANGELORUM MAYESTATIS	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Perlu peningkatan ekonomi bagi masyarakat sehingga pengadaan ternak babi bibit	Kecamatan Alok timur kelurahan Waioti, Kota Baru , Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
444	MARIA ANGELORUM MAYESTATIS	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Perlu peningkatan ekonomi bagi masyarakat sehingga perlu Pengadaan Ternak Kambing untuk Masyarakat	Kecamatan Alok Timur desa Kojadoi, Gong bekor , Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
445	MARIA ANGELORUM MAYESTATIS	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kelompok tani belum memiliki sarana prasarana yang memadai untuk peningkatan produktivitas sehingga perlu adanya Pelatihan dan Pengadaan 1 (Unit) Handtraktor untuk Kelompok Tani di lepo Lima	Kecamatan Alok timur desa Lepo Lima , Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
446	MARIA ANGELORUM MAYESTATIS	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Masih banyak rumah warga yang belum memadai sehingga perlu adanya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk pencegahan terhadap timbun dan berkembangnya Pemukiman Kumu di luar kawasan pemukiman	Kecamatan Alok timur kelurahan Nangameting , Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	Unit	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
447	MARIA ANGELORUM MAYESTATIS	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Masih banyak rumah warga yang belum memadai sehingga perlu adanya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk pencegahan terhadap timbun dan berkembangnya Pemukiman Kumu di luar kawasan pemukiman	Kecamatan Alok kelurahan Kabor, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Unit	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
448	MARIA ANGELORUM MAYESTATIS	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Masih banyak rumah warga yang belum mempunyai sambungan listrik PLN sehingga perlu adanya Bantuan Pemasangan instalasi dan meteran listik PLN	Kecamatan alok kelurahan (Kota uneng, Kabor,) Kecamatan Alok timur kelurahan (Waioti, Watugong) , Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	5	SR	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
449	MARIA ANGELORUM MAYESTATIS	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Belum memadainya kondisi jalan lingkungan maka perlunya Pembangunan Rabat Jalan Lingkungan RW 005 Kelurahan Kabor	Kecamatan Alok kelurahan Kabor, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
450	MARIA ANGELORUM MAYESTATIS	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Belum memadainya kondisi jalan lingkungan maka perlunya Pembangunan Rabat Jalan Lingkungan di gang Moan Woda	Kecamatan Alok timur Kelurahan Nangameting , Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
451	MARIA ANGELORUM MAYESTATIS	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sehingga perlu adanya pembebasan lahan untuk PAUD Sinar Watugong	Kecamatan Alok timur Desa Watugong , Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Bidang	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
452	MARIA ANGELORUM MAYESTATIS	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kelompok nelayan belum memiliki sarana prasarana yang memadai untuk peningkatan produktivitas sehingga perlu adanya Pengadaan Perahu Fiber 5,5 m lengkap Mesin untuk kelompok nelayan	Kecamatan Alok kelurahan Wairotang Kecamatan Alok Timur, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
453	MARIA ANGELORUM MAYESTATIS	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kelompok nelayan belum memiliki sarana prasarana yang memadai untuk peningkatan produktivitas sehingga perlu adanya Pengadaan Perahu sampan Fiber dayung untuk kelompok nelayan	Kecamatan Alok Kelurahan Kota uneng Kecamatan Alok Timur Kelurahan wairotang, Kab. Sikka	DINAS PERIKANAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	4	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
454	MARIA ANGELORUM MAYESTATIS	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	belum tersedianya kursi meja guru dan lemari buku untuk SD Nataweru sehingga perlunya Pengadaan kursi meja guru dan lemari buku untuk SD Nataweru	Kecamatan Alok timur kelurahan Watugong, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pengadaan Mebel Sekolah

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
455	MARIA ANGELORUM MAYESTATIS	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	Kondisi bangunan rusak juga beberapa ruang kelas yang lantai dan plafon rusak, serta pembangunan ruang UKS di SD maumere Bertingkat sehingga perlu adanya rehabilitasi Gedung dan pelengkap di SD Maumer(SD Maumere Bertingkat)	Kecamatan Alok kelurahan Madawat, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
456	MARIA ANGELORUM MAYESTATIS	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Belum adanya sarana prasarana pendukung kegiatan kerohanian sehingga perlu adanya Hibah PUSPAS Keuskupan Maumere	Kecamatan Alok kelurahan Kota Uneng, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
457	MARIA ANGELORUM MAYESTATIS	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	belum adanya bantuan beasiswa untuk masyarakat tidak mampu sehingga perlu adanya hibah bantuan	Kecamatan Alok kelurahan Kabor, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
458	MARIA ANGELORUM MAYESTATIS	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Belum adanya Hibah untuk kegiatan kepemudaan dan olahraga sehingga hibah untuk club futsal Belpu Fc	Kecamatan Alok kelurahan Kabor, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota
459	MARIA ANGELORUM MAYESTATIS	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Belum adanya sarana prasarana pendukung kegiatan kelompok tenun sehingga perlu adanya Bantuan pengadaan benang dan obat obatan untuk kelompok	Kecamatan Alok Kelurahan Kota uneng Kecamatan Alok timur Kelurahan Nangameting , Kab. Sikka	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan prioritas pembangunan TA 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	Kelompok	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
460	MARIA ANGELORUM MAYESTATIS	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Belum adanya sarana prasarana pendukung kegiatan ekstrakurikuler sekolah sehingga perlu adanya Hibah Bantuan pengadaan alat musik tradisional Gong waning untuk SMK Yapenrais Maumere	Kecamatan Alok kelurahan Kota Uneng, Kab. Sikka	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan prioritas pembangunan TA 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
461	FRANSISKUS SIKU PARERA	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Masih banyak rumah warga yang belum memadai sehingga perlu adanya Bantuan stimulan perumahan swadaya rehap sedang untuk masyarakat	Semua desa di Kecamatan Talibura, Waigete,Waiblama,Bola, Doreng , Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	28	Unit	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
462	FRANSISKUS SIKU PARERA	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Belum adanya sarana dan prasarana kegiatan pertanian sehingga perlu Pengadaan mesin potong rumput untuk kelompok tani rumput untuk kelompok tani	Kecamatan Doreng desa Watumerak , Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	Buah	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
463	FRANSISKUS STEPHANUS SAY, S.E.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Belum optimalnya pengembangan komoditas kelapa pada kelompok tani akibat keterbatasan bibit kelapa yang berkualitas. Pengadaan bibit kelapa dalam dan kelapa Genjah untuk kelompok tani Bruman Dohor, Kelompok Tani Ledulabang, KWT Geru Hibir	Desa Tuabao, Kecamatan Waiblama, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	Kelompok	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
464	FRANSISKUS SIKU PARERA	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan olahraga Futsal sehingga perlu adanya hibah ke AFKAB Sikka	Kecamatan Alok Kelurahan Kota uneng, Kab. Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota
465	GORGONIUS NAGO BAPA, S.E.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	tidak tersedianya sarana air bersih dari PDAM untuk Puskesmas Waipare kerena meteran air di bongkar sehingga perlu dibantu penyelesaian tunggakan PDAM	Kecamatan Kangae desa Watumilok, Kab. Sikka	DINAS KESEHATAN	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai prioritas pembangunan tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
466	FRANSISKUS SIKU PARERA	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Belum adannya sound sistem,mik wirelles untuk mendukung kegiatan rohani di lingkungan	Lingkungan Wolorita Desa Wolomotong, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Usulan sudah sesuai Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
467	Lukas Lero	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Masih kurangnya varietas tanaman bawang merah bagi kelompok tani bunga mawar di desa egon buluk	Desa Egon Buluk Kecamatan Waigete, Kab. Sikka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	0,25	hektare	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
468	Lukas Lero	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kapasitas penampungan gereja wolong getang belum optimal	Desa Nangatobong - Kecamatan Waigete, Kab. Sikka	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
469	Lukas Lero	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Akses transportasi masyarakat Jalan lingkungan ragawair - wolonggetang menuju pemukiman di desa egon buluk sangat terbatas karena belum tersedia jalan lingkungan	Desa Egon Buluk - Kecamatan Waigete, Kab. Sikka	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai dengan prioritas	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Km	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
470	GORGONIUS NAGO BAPA, S.E.	Penyediaan Alat Bantu	Belum adannya fasilitas penunjang untuk masyarakat penyandang disebelitas sehingga perlu pengadaan kaki palsu agar masyarakar dapat beraktifitas sebagai mana mestinya	Kecamatan kewapante, Desa Umagera, Kab. Sikka	DINAS SOSIAL	Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyediaan Alat Bantu

Tabel 5.6
Usulan Hasil Musrenbangcam Untuk Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2027

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	Malik	Pembangunan Ruang Kelas Baru (SMP)	Kekurangan 2 ruang kelas di SMP Muhammadiyah Loang, kondisi saat ini hanya ada 1 ruang kelas yang permanen dan darurat 1 untuk 3 rombongan belajar (Kelas 7, 8 dan 9)	SMP Muhammadiyah Loang, RT.007/RW.003, Dusun Nele, Kab. Sikka	Alok Timur	Kojagete	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Alok Timur sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Alok Timur	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	Ruang Kelas	-	Pembangunan Ruang Kelas Baru
2	Stefanus Bertin Edo	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Terjadi Longsor dibelakang Sekolah karena terkikis oleh aliran air sungai di SDN Wukak Gahar ,Dusun Wukak Gahar sepanjang 250 meter dan SDN Hepang di Dusun Hepang sepanjang 250 meter	SDN Wukak Gahar RT 010 RW 004 Dusun Wukak Gahar Desa Nenbura dan SDN Hepang RT 006 RW 003 Dusun Hepang Desa Nenbura, Kab. Sikka	Doreng	Nenbura	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	500	Meter	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
3	Maria Goreti Lue	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	Atap SDK Cawalo mengalami kerusakan berat akibat usia dan cuaca ekstrim sehingga proses belajar terganggu dan anak-anak untuk sementara menggunakan ruangan perpustakaan.	Desa Rokirole, Dusun Cawalo, RT/RW 004/002, Kab. Sikka	Palue	Rokirole	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Palue sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Palue	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
4	Paskalia Lisdiani, S.S	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Masih ada sarana prasana MCK yang rusak, di sekolah SDI Kode (3 unit) dan SDK Delang (2 unit)	RT 004/RW 002, Dusun Kode dan RT 013/RW006 Dusun Delang, , Kab. Sikka	Nelle	Nelle Wutung	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nelle sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nelle	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	5	Unit	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
5	Stefanus Bertin Edo	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	Ruangan Kelas sudah rusak berat sebanyak 2 Ruang di SDN Hepang	SDN Hepang RT 006 RW 003 Dusun Hepang Desa Nenbura, Kab. Sikka	Doreng	Nenbura	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	Ruang Kelas	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
6	Maria Goreti Lue	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	Fondasi gedung sekolah SMPN 1 Palue terkikis air sehingga perlu dibuatkan turap penahan gedung dengan panjang 40 meter agar fondasi sekolah tidak ambruk akibat terkikis air.	SMPN 1 Palue RT/RW 005/001 Dusun Cawalo Desa Rokirole, Kab. Sikka	Palue	Rokirole	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Palue sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Palue	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	40	Meter	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
7	Lusia Dince Gego	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Tanpa turap pengaman tanah disekitar gedung mudah longsor,terutama saat musim hujan dan dapat merusak bangunan gedung SDK Bei dan SDK Nara. dengan masing -masing volume 50m.	Rt.003,013/Rw.001,004 Dusun Bei dan Dusun Nara, Kab. Sikka , Kab. Sikka	Kangae	Balatatatin	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalu Musrenbang Kecamatan Kangae sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 tingkat Kecamatan Kangae	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	100	Meter	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
8	Maria Goreti Lue	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	PAUD Hao Kowo belum mempunyai gedung untuk melaksanakan kegiatan belajar.	RT/RW 007/003 Dusun Tudu Desa Rokirole, Kab. Sikka	Palue	Rokirole	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Palue sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Palue	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Unit	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
9	Eugenius Oktaviandi Kamelo Carvallo,S.IP	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah (SD)	Belum tersedianya ruang perpustakaan yang layak,nyaman,dan representatif,sehingga menghambat pengembangan minat baca,kegiatan literasi,dan peningkatan kualitas pendidikan.	SD URULEDU,RT/RW.002/001,DUSUN URUDETUN,DESA ILIN MEDO,KEC.WAIBLAMA,KAB.SIKKA, Kab. Sikka	Waiblama	Ilinmedo	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Waiblama sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Waiblama	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Unit	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
10	SIMON SUA LAGA	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Terdapat jurang dibelakang sekolah yang dapat membahayakan Siswa/Siswi SDK Koting I sehingga perlunya dibangun pagar permanen sepanjang 58 meter.	RT.012/RW/006, Dusun Baolokan, Desa Koting B, Kecamatan Koting, Kab. Sikka	Koting	Koting B	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi Prioritas usulan Hasil Msurenbang RKPD Tahun 2027 Kecamatan Koting.	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	58	Meter	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
11	Stefanus Bertin Edo	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	Kursi dan Meja Siswa Banyak yang Rusak dan Tidak Layak Pakai di 3 Sekolah (SDK Doreng,SDN Hepang,SDN Wukak Gahar) dengan Volume masing masing sekolah 50 unit sehingga total kebutuhan 150 unit	SDK Doreng,SDN Hepang,SDN Wukak Gahar di Desa Nenbura , Kab. Sikka	Doreng	Nenbura	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	150	Unit	-	Pengadaan Mebel Sekolah
12	SIMON SUA LAGA	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Terdapat jurang dibelakang sekolah yang dapat membahayakan Siswa/Siswi SD Inpres Koting sehingga perlu dibangun pagar Permanen sepanjang 84 meter.	RT.012/RW.006, Dusun Baolokan, Desa Koting B, Kecamatan Koting, Kab. Sikka	Koting	Koting B	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	84	Meter	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
13	Lusia Dince Gego	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Tidak adanya pagar pengaman dilingkungan sekolah dapat menyebabkan orang yang tidak berkepentingan keluar masuk dgn bebas. Volume 60m, di SDK Bei	Rt.003/Rw 001,DusunBei,Kab. Sikka , Kab. Sikka	Kangae	Balatatatin	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui Musrenbang Kecamatan Kangae sesuai hasil Kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kangae	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	60	Meter	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
14	Maria Goreti Lue	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Untuk mendukung program Nasional ketahanan pangan maka diusulkan pengadaan bibit Horti berupa sayur-sayuran dan buah-buahan.	Desa Rokirole, Kab. Sikka	Palue	Rokirole	DINAS PERTANIAN	sesuai dengan program prioritaspembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Palue sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Palue	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
15	Stefanus Bertin Edo	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Terjadi Abrasi setiap kali Air Laut Naik yang menyebabkan air laut masuk ke area sekolah SDK Doreng sehingga membutuhkan pembangunan pagar sekolah dengan volume 150 meter	SDK DORENG,RT 003 RW 002 Dusun Doreng Desa Nenbura, Kab. Sikka	Doreng	Nenbura	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	150	Meter	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
16	Yohanes Fernandez	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Belum ada fasilitas Lapangan Futsal untuk SD 130 Tanjung Darat (1 Paket)	RT 05/RW 03 Dusun Blatat , Kab. Sikka	Talibura	Darat Pantai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
17	Yohanes Fernandez	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	Penambahan kursi Plastik untuk SD 130 Tanjung Darat sebanyak 100 buah	RT 05/RW 03 Dusun Blatat, Kab. Sikka	Talibura	Darat Pantai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	100	Buah	-	Pengadaan Mebel Sekolah
18	MARIA VERONIKA SUE,S.I.Kom	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Belum tersedianya Alat Peraga Dalam dan Alat Peraga Luar untuk PAUD St. Maria Desa Takaplager	RT 005/RW 003, Dusun Guru, Kab. Sikka	Nita	Takaplager	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
19	Yohanes Fernandez	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	Penambahan Meja Kursi Guru Untuk SD 130 Tanjung Darat sebanyak 12 Paket	RT 05/RW 03 Dusun Blatat, Kab. Sikka	Talibura	Darat Pantai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	24	Unit	-	Pengadaan Mebel Sekolah
20	Stefanus Bertin Edo	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Belum ada Gedung Paud di Paud Santa Sisilia Wukak Gahar dengan Volume 1 Unit dan Paud Santa Maria Magdalena Hepang dengan Volume 1 Unit	Paud Santa Sisilia Wukak Gahar RT 010 RW 004 Dusun Wukak Gahar dan Paud Santa Maria Magdalena Hepang RT 007 RW 003 Dusun Hepang, Kab. Sikka	Doreng	Nenbura	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	Unit	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
21	Lusia Dince Gego	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Sekolah membutuhkan jaringan internet (Orbit/Wifi) untuk kegiatan Belajar peserta didik. Volume 2 Unit untuk SDK Nara dan SDK Bei.	Rt.003,014/Rw 001,004 Dusun Bei dan Dusun Nara,Kab. Sikka , Kab. Sikka	Kangae	Balatatatin	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui Musrenbang Kecamatan Kangae sesuai hasil Kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kangae	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	Unit	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
22	Paskalia Lisdiani, S.S	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Belum ada Jaringan Internet untuk kegiatan belajar mengajar SDK Delang dan SDI Kode (2 unit)	RT 013/RW 006 Dusun Delang dan RT 003/RW 002 Dusun kode, Kab. Sikka	Nelle	Nelle Wutung	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nelle sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nelle	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	Unit	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
23	Lusia Dince Gego	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Pembangunan Lubang Peresapan Air di SDK Nara karena Masih Terdpat Genangan Air di lingkungan Sekolah. Volume 4m2.	Rt.0013/Rw 004 Dusun Nara, Kab. Sikka, Kab. Sikka	Kangae	Balatatatin	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui Musrenbang Kecamatan Kangae sesuai hasil Kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kangae	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
24	Justina Sado	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	untuk kegiatan pengembangan tanaman pala,Vanili dan anakan kelapa hibrida	Desa Watu Repa, Kab. Sikka	Koting	Watu Repa	DINAS PERTANIAN	sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi Prioritas usulan Hasil Msurenbang RKPD Tahun 2027 Kecamatan Koting.	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
25	Eugenius Oktaviandi Kamelo Carvallo,S.IP	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Ketersediaan tanaman buah-buahan (Rambutan,Durian,Alfokat,Jeruk,Apel,Mangga Harum Manis) di lingkungan masih terbatas.	Kelompok Tani DI Dusun Urudetun,Uruledu, Lelabura, DESA ILIN MEDO,KEC.WAIBLAMA,KAB.SIKKA , Kab. Sikka	Waiblama	Ilinmedo	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Waiblama sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Waiblama	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
26	Antiokus Ante	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	terdapat 1 unit MCK dengan kondisi rusak sedang di SDI Natawulu	RT.009 RW.003 Dusun Natawulu Desa Ladogahar, Kab. Sikka	Nita	Ladogahar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
27	MARIA VERONIKA SUE,S.I.Kom	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah PAUD	PAUD St. Maria Desa Takaplager membutuhkan alat bantu pembelajaran dalam mengenalkan objek dan tema lingkungan secara visual yang berupa gambar atau lukisan di dinding kelas yang bertema edukatif (mural pendidikan)	RT 005/RW 003, Dusun Guru Desa Takaplager, Kab. Sikka	Nita	Takaplager	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
28	Lusia Dince Gego	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Pengadaan Anakan kakao dan pala karena rendahnya produktifitas tanaman kakao dan pala yang telah berumur tua dan tidak produktif. Volume 10.000 pohon di Desa Blata tatin.	Dusun Bei, Dusun Wodon dan Dusun Nara, Kab. Sikka	Kangae	Balatatatin	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui Musrenbang Kecamatan Kangae sesuai hasil Kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kangae	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
29	Natalia Christanty Bella Wangge, S.IP.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Belum Tersedianya gedung PAUD 1 (satu) unit dengan luas 300 m2 di Gere, sehingga kegiatan pendidikan anak usia dini belum memiliki sarana belajar yang layak dan permanen. Kondisi ini menghambat optimalisasi proses pembelajaran serta pengembangan tumbuh kembang anak usia dini di wilayah tersebut.	Gere, RT. 11 / RW. 003, Dusun Gere, Kab. Sikka	Koting	Koting A	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi Prioritas hasil Musrenbang RKPD Tahun 2027 Kecamatan Koting	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
30	Antiokus Ante	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Belum memiliki bak penampung air untuk memenuhi kebutuhan air di SDN Natawulu	RT.007 RW.002 Dusun Rotat, Kab. Sikka	Nita	Ladogahar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
31	MARIA VERONIKA SUE,S.I.Kom	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Belum tersedianya Mesin Pencacah Pupuk Bokasi di Desa Takaplager	RT 005/RW 003, Dusun Guru, Kab. Sikka	Nita	Takaplager	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
32	Ludvina Florida Agu Ester, SE	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	Plafon Ruang Kelas Rusak Berat	RT.001/RW.001/Dusun I, Kab. Sikka	Nelle	Nella Lorang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nelle sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nelle (3 Ruang Kelas)	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
33	Ludvina Florida Agu Ester, SE	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Belum Ada Pagar Sekolah SDK Nelle I (100 m)	RT.001/RW.001/Dusun I, Kab. Sikka	Nelle	Nella Lorang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nelle sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nelle	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	100	meter	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
34	Antiokus Ante	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (SD)	Belum ada gedung perpustakaan di SDI Natawulu	RT.009 RW.003 Dusun Natawulu, Kab. Sikka	Nita	Ladogahar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
35	Yohanes Fernandez	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Pengadaan Bibit mente untuk 9 kelompok (kelompok kasih ibu, kamboja, peduli mandiri, semangat baru, kembang bakau, tuke ler, sehati, suka maju, bekat epan sebayak	Dusun Wairwua, Dusun Blatat, Dusun Napunggelang, Kab. Sikka	Talibura	Darat Pantai	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	9	Kelompok	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
36	Yohanes Fernandez	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Pengadaan Bibit Kelapa Genje untuk 9 kelompok (kelompok kasih ibu, kamboja, peduli mandiri, semangat baru, kembang bakau, tuke ler, sehati, suka maju, bekat epan	Dusun Wairwua, Dusun Blatat, Dusun Napunggelang, Kab. Sikka	Talibura	Darat Pantai	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	null	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	9	Kelompok	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
37	Paulus Alus	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	Masih terdapat ruang kelas SDK Halat yang dalam keadaan rusak ringan (1 ruangan)	RT.002/RW.001, Dusun Halat, Kab. Sikka	Nelle	Nelle Barat	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nelle sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nelle	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	ruang kelas	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
38	Antiokus Ante	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Belum ada pembangunan lanjutan pagar dengan volume 350 meter di SDN Natawulu	RT.007 RW.002 Dusun Rotat, Kab. Sikka	Nita	Ladogahar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	350	meter	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
39	Paulus Yulianus	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	Atap gedung Sekolah Dasar Katolik 124 Nataleba bocor/korosi akibat abu vulkanik gunung Lewotobi sebanyak 8 ruang kelas	RT.014/RW.005, Kab. Sikka	Talibura	Darat Gunung	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	8	ruang kelas	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
40	Yohanes Luis, SE	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	Belum tersedia lemari pada masing-masing kelas di SDI Ratekalo sehingga perlu pengadaan lemari kelas sebanyak 6 unit.	SDI Ratekalo, RT 002 RW 001, Dusun Rategulu, Desa Ratekalo, Kab. Sikka	Mego	Ratekalo	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Mego sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Mego	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	6	unit	-	Pengadaan Mebel Sekolah
41	Petrus Yohanes Fernandez	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Bangunan Paud yang kurang memadai dan minimnya sarana prasarana Paud (volume 3 Paud)	Paud.St.Agnes Dusun Baluele,Rt.005/Rw.002,Paud St.Michael Dusun Habipiret,Rt.011/Rw.005,Paud .St.Sisilia.Dusun Keduwair,Rt.016/Rw.007, Kab. Sikka	Nelle	Manubura	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nelle sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nelle	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	unit	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
42	Thimoteus Deprianus Ferty, S.Pd.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Atap Ruang Kelas Sekolah SDI Weko 4 ruang kelas.	Rt.015/Rw 005 Dusun Baoloka,Desa Langir, Kec. Kangae, Kab. Sikka , Kab. Sikka	Kangae	Langir	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui Musrenbang Kecamatan Kangae sesuai hasil Kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kangae	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	4	ruang kelas	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
43	Petrus Yohanes Fernandez	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Minimnya perlengkapan UKS,buku bacaan untuk perpustakaan sekolah,sarana prasarana lapangan olaraga dan apel bendera,serta papan tulis white board.volume 5 paket	SDI Keduwair - Dusun Habipiret.Rt.014/Rw.006 dan SDK Baluele- Dusun Baluele Rt.002/Rw.001, Kab. Sikka	Nelle	Manubura	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nelle sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nelle	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	5	paket	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
44	Paulus Yulianus	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	Atap gedung Sekolah Dasar Inpres Natarita bocor/korosi akibat abu vulkanik gunung Lewotobi sebanyak 3 ruang kelas	RT.020/RW.007, Kab. Sikka	Talibura	Darat Gunung	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	ruang kelas	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
45	Carisima Erna	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah PAUD	Terdapat ruang bermain pos paud dalam keadaan rusak	RT/RW: 003/002, Tikang, Desa Watutedang, Kecamatan Lela, Kab. Sikka	Lela	Watutedang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
46	Thimoteus Deprianus Ferty, S.Pd.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Pembangunan Pagar Sekolah sehingga keamanan siswa dan tanaman yang ada di sekitar sekolah SDI Weko aman. Volume 200m2	Rt.015/Rw 005 Dusun Baoloka,Desa Langir, Kec. Kangae, Kab. Sikka , Kab. Sikka	Kangae	Langir	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui Musrenbang Kecamatan Kangae sesuai hasil Kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kangae	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	200	M2	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
47	Fransiskus Gonsolfinus	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (SD)	Belum ada Perpustakaan untuk SDI Bidara	RT.016/RW.004, Dusun Sikka, Kab. Sikka	Lela	Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
48	Paulus Alus	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	Masih ada meja dan kursi siswa yang rusak (50 Buah) dan Lemari Arsip (2 Buah) di SDK Halat	RT 002/RW 001, Dusun Halat, Kab. Sikka	Nelle	Nelle Barat	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nelle sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nelle	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	52	unit	-	Pengadaan Mebel Sekolah
49	Carisima Erna	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Tidak adanya fasilitas pendukung untuk mengolah lahan perkebunan dan pertanian seperti: Sensor mini (7 unit), Hand tractor mini (7 unit), Handsprayer (7 unit), Mesin pempotong rumput (7 unit)	RT/RW: 003/002, Tikang, Desa Watutedang, Kab. Sikka	Lela	Watutedang	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
50	THEODORUS SELFIS ONY KLAENONI	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	Masih terdapat ruang kelas SDI umauta dalam keadaan rusak sedang - berat (2 Ruang Kelas)	SDI umauta, RT 008/RW 004, Dusun Umauta, Kab. Sikka	Bola	Umauta	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	ruang kelas	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
51	Thimoteus Deprianus Ferty, S.Pd.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Belum tersedianya Traktor untuk peningkatan kualitas hasil panen Petani. Volume 4 Unit.	Dusun Magedoa,Dusun Sari,Dusun Baoloka, dan Dusun Lurunduna, Kab. Sikka	Kangae	Langir	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui Musrenbang Kecamatan Kangae sesuai hasil Kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kangae	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	4	unit	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
52	OKTAVIANUS MOAN SIGA, SE	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Pembangunan Pagar SDI Arat 110 meter	RT.002 RW.001 Dusun Diller I, Kab. Sikka	Koting	Koting C	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi Prioritas usulan Hasil Msurenbang RKPD Tahun 2027 Kecamatan Koting.	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	110	meter	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
53	Thimoteus Deprianus Ferty, S.Pd.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Dasar	Kondisi rumah penjaga sekolah SDI Weko yang rusak berat . Volume 1 Unit.	Rt.015/Rw 005 Dusun Baoloka,Desa Langir, Kec. Kangae, Kab. Sikka , Kab. Sikka	Kangae	Langir	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui Musrenbang Kecamatan Kangae sesuai hasil Kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kangae	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
54	Floribertus Laka	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Dasar	Belum Ada Rumah Dinas / Tempat Tinggal Oleh Guru-Guru sehingga Guru-Guru harus Pulang -Pergi dari Maumere Ke SDI Henga (1 Paket)	Dusun Henga II, RT/RW : 007/003,Desa Henga , Kab. Sikka	Talibura	Henga	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
55	LUSIA MARICE, S.E	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	masih terdapat ruang kelas yang rusak berat sebanyak 3 ruangan	SD Inpres CIII Wolomarang, Kab. Sikka	Alok Barat	Wolomarang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Alok Barat sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Alok Barat	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	Ruang Kelas	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
56	BENEDIKTUS PATTI BALUN, S.ST	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Belum adanya Ruang/Aula Pertemuan Guru dan Orang Tua di SDK 041 Talibura	SDK 041 Talibura, Dusun Baolin, RT/RW: 009/003, Kab. Sikka	Talibura	Watubaing	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
57	Sahanudin	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Belum tersedianya pagar sekolah SD/MIS ALFATAH sehingga keamaan dan kenyamanan belajar mengajar terganggu oleh kegiatan masyarakat setempat. 200 Meter	Dusun Namandoi, RT/RW : 015/004, Kab. Sikka	Talibura	Nangahale	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	200	meter	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
58	Sahanudin	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	sekolah kekurangan kursi dan meja , dan banyak kursi dan meja sudah rusak dan tidak layak pakai pada MIS ALFATAH, dibutuhkan 100 Unit	Dusun Namandoi, RT/RW : 015/004, Kab. Sikka	Talibura	Nangahale	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	100	unit	-	Pengadaan Mebel Sekolah
59	Fransiskus Gonsolfinus	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	Dibutukan Lemari (2) Buah, Meja Guru (5) Buah, Papan Tulis (5), Buah, dan Kursi Murid (50) Buah SDK Wukur	RT012/RW.003, Dusun Wukur, Kab. Sikka	Lela	Sikka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pengadaan Mebel Sekolah

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
60	Klemensia Walfrida, S.E.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	MCK yang ada di SDK 132 Detung sudah rusak dan tidak layak digunakan	Dusun Enak, RT.004/RW.001, Desa Nelle Urung, Kab. Sikka	Nelle	Nelle Urung	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nelle sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nelle	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
61	Paulus Yulianus	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Belum adanya sarana prasarana pendukung pertanian bagi Kelompok Tani untuk kebutuhan mesin rontok padi (volume 21)	Dusun Nataleba, Wairbura, Natarita, Hurabegor, Kab. Sikka	Talibura	Darat Gunung	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	21	Unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
62	Floribertus Laka	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (SD)	Tidak ada alat perlengkapan Olaraga di Sekolah Dasar Impres Henga . (Matras,Bola Kaki,Bola Volly,) 1 Paket	Dusun Henga II, RT/RW : 007/003 , Kab. Sikka	Talibura	Henga	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
63	Sahanudin	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SMP)	terdapat ruangan kelas mengalami kerusakan berat karena abrasi pantai, angin kencang, dan hujan lebat pada MTS ALFATAH, Volume 3 Unit	Dusun Namandoi, RT/RW : 013/004, Kab. Sikka	Talibura	Nangahale	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	Unit	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
64	Klemensia Walfrida, S.E.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Kebutuhan Sekolah SDK 132 Detung akan air bersih masih kurang sehingga membutuhkan bak penampung air dalam tanah	Dusun Enak, RT.004/RW.001, Desa Nelle Urung, Kab. Sikka	Nelle	Nelle Urung	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nelle sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nelle	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
65	Sahanudin	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	Sekolah kekurangan kursi dan meja, dan banyak kursi meja sudah rusak dan tidak layak pakai pada SMP/MTS ALFATAH, dibutuhkan 100 Unit	Dusun Namandoi, RT/RW : 013/004, Kab. Sikka	Talibura	Nangahale	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	100	unit	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
66	BENEDIKTUS PATTI BALUN, S.ST	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (SD)	Belum adanya Perpustakaan dan Taman Baca SD 041 Talibura	Dusun Baolin, RT/RW:009/001, Kab. Sikka	Talibura	Watubaing	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
67	YOSVENDTUS KONRAD KOTTEN, S.M	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Masih ada warga yang memiliki lahan kosong sehingga dibutuhkan bibit kelapa sebanyak 1.000 pohon di Desa Watuliwung	Dusun Wetakara dan Dusun Watuliwung, Kab. Sikka	Kangae	Watuliwung	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui Musrenbang Kecamatan Kangae sesuai hasil Kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kangae	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1000	anakan	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
68	Floribertus Laka	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	sekolah SDI Henga belum punya pagar sehingga keamanan dan kenyamaan belajar mengajar terganggu oleh kegiatan masyarakat setempat (1 Paket)	Dususn Henga II RT/RW : 007/003 , Kab. Sikka	Talibura	Henga	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
69	Floribertus Laka	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	Sekolah SDI Henga kekurangan Kursi dan meja , dan banyak kursi dan meja sudah rusak dan tidak layak pakai. (1 Paket)	Dusun Henga II, RT/RW : 007/003 , Kab. Sikka	Talibura	Henga	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pengadaan Mebel Sekolah
70	YOSVENDTUS KONRAD KOTTEN, S.M	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	banyak petani yang tidak memiliki benih jagung akibat gagal panen sehingga perlu ada pengadaan benih jagung komposit sebanyak 1 ton	Dusun Wetakara, Dusun Watuliwung, Dusun Wairhubing, Kab. Sikka	Kangae	Watuliwung	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui Musrenbang Kecamatan Kangae sesuai hasil Kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kangae	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	ton	-	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
71	Saverius Nong Pas	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	Belum adanya Ruang Lab .IPA di SMPN Hamar dengan Volume 1 Unit, Lahan yang tersedia 1500 m2	SMPN Hamar RT/RW 009,005 Dusun Kahagoleng Desa Wolon Terang , Kab. Sikka	Doreng	Wolonterang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
72	Thimoteus Deprianus Ferty, S.Pd.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Gagal panen yang dialami masyarakat Desa Langir di tahun kemarin salah satu penyebabnya adalah kurangnya akses masyarakat untuk membeli pupuk di pihak ketiga. Volume yang dibutuhkan masyarakat sebanyak 37.500Kg	Dusun Magedoa,Dusun Sari,Dusun Baoloka, dan Dusun Lurunduna, Kab. Sikka	Kangae	Langir	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui Musrenbang Kecamatan Kangae sesuai hasil Kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kangae	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	37500	Kg	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
73	Paulus Yulianus	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	keterbatasannya persediaan bibit padi dan jagung yang berkualitas bagi 21 Kelompok Tani	Dusun Nataleba, Wairbura, Natarita, Hurabegor, Kab. Sikka	Talibura	Darat Gunung	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	21	Kelompok	-	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
74	BENEDIKTUS PATTI BALUN, S.ST	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Belum adanya Sarana dan Prasarana Pertanian seperti Traktor/Hand Traktor dan alat Panen padi serta alat pendukung pertanian lainya	Desa Watubaing, Kab. Sikka	Talibura	Watubaing	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
75	Saverius Nong Pas	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (SMP)	Masih ada guru yang tinggalnya Jauh sehingga membutukan pembangunan mes Guru dengan Volume 2 Unit	SMPN Hamar RT/RW 009,005 Dusun Kahagoleng di Desa Wolon Terang , Kab. Sikka	Doreng	Wolonterang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	unit	-	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
76	Martinus Mustari Ipir	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SMP)	Rusak berat atap dan lantai 3 ruang kelas MTs Nur Muhammad Pemana	RT.019/RW.008, Dusun Buton, Desa Pemana, Kab. Sikka	Alok	Pemana	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	Ruang Kelas	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
77	Tomas Alva Edison	Pengadaan Mebel Sekolah (SMP)	Belum adanya Meja, Kursi sebanyak 20 buah dan Rak Buku Untuk Perpustakaan 1 Buah di SMPN Moro	RT.005/RW.003, Dusun Baobatung, Kab. Sikka	Kewapante	Iantena	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Kewapante sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kewapante	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	21	unit	-	Pengadaan Mebel Sekolah
78	Wilhelmus Woda	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Masih ada lahan yang kosong untuk tanaman pertanian/perdagangan, maka masyarakat sangat membutuhkan pengadaan bibit pala, kelapa dalam, alvokat dan mangga (harum manis).	Desa Watukrus, Kab. Sikka	Bola	Watukrus	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
79	BENEDIKTUS PATTI BALUN, S.ST	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	Terdapat banyak Peralatan Meubelerair seperti meja, kursi, lemari yang rusak parah dan bahkan kekurangan pada meja dan kursi	SDK 041 Talibura, Dusun Baolin, RT/RW:009/003, Kab. Sikka	Talibura	Watubaing	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pengadaan Mebel Sekolah
80	YOSVENDTUS KONRAD KOTTEN, S.M	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	Kondisi plafon ruang kelas sdk wetakara dalam keadaan rusak sebanyak 6 ruangan	Dusun Wetakara, RT.004/RW.002, Kab. Sikka	Kangae	Watuliwung	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui Musrenbang Kecamatan Kangae sesuai hasil Kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kangae	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	6	ruang kelas	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
81	FERDINANDUS N.PUTU, SKM	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Masih kurang bibit tanaman (pala, cengkeh, vanili, durian) yang dibutuhkan oleh petani	Rt 002, Rw 001 Dusun Niopanda, Kab. Sikka	Tana Wawo	Bu Nuapu'u	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Tanawawo sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Tanawawo	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
82	Martinus Mustari Ipir	Pengadaan Mebel Sekolah (SMP)	Masih terdapat kursi, meja dan lemari di MTs Nur Muhammad Pemana dalam keadaan rusak berat	Dusun Buton, Desa Pemana, Kab. Sikka	Alok	Pemana	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pengadaan Mebel Sekolah
83	Alerius Darius S.IP.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Masih ada lahan yang kosong untuk tanaman pertanian/perdagangan, maka masyarakat sangat membutuhkan pengadaan bibit pala, kelapa dalam, alvokat,dan mangga (harum manis)	Dusun ipir,Dusun krado,Dusun Riiheret, Kab. Sikka	Bola	Ipir	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
84	Tomas Alva Edison	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (SMP)	Belum Adanya Alat Praktek dan Peraga KIT MATEMATIKA, KIT IPA, KIT IPS, dan KIT PJOK masing - masing 1 paket di SPMN Moro	RT.005/RW.003, Dusun Baobatung, Kab. Sikka	Kewapante	Iantena	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Kewapante sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kewapante	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
85	Marianus Desembus	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	masih ada petani yang masih membutuhkan Hand Traktor sebanyak 3 unit	RT,001 RW 001,DUSUN KOJABLO, Kab. Sikka	Talibura	Mamai	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	Unit	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
86	Avelinus Wongga	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah PAUD	Masih terdapat bangunan PAUD Wolomuni yang dalam keadaan rusak	RT.009/RW.003, Dusun Mudemi, Kab. Sikka	Palue	Reruwairere	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Palue sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Palue	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
87	Martinus Mustari Ipir	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Masih terdapat lahan pertanian yang belum bisa diakses dengan kendaraan roda dua dengan panjang jalan 1.380 meter	RT.019/RW.008, Dusun Buton, Desa Pemana, Kab. Sikka	Alok	Pemana	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Ditolak. Alasannya karena tidak ada program pembangunan jalan pertanian	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1380	meter	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
88	Marianus Desembus	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	MASIH BANYAK PETANI YANG MASIH MENGGUNAKAN BIBIT PADI LOKAL, 5 TON	RT 002, RW 001,DUSUN KOJABLO, Kab. Sikka	Talibura	Mamai	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	5	ton	-	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
89	Florida Yosefina Ndena	Pembangunan Ruang Kelas Baru (SMP)	Kurangnya ruang kelas siswa SMP Reroroja dengan jumlah siswa yang memadai sehingga mempengaruhi aktivitas belajar mengajar. dimana SMPN Reroroja membutuhkan penambahan ruang kelas sebanyak 3 Ruangan Kelas di SMPN Reroroja.	Mageloo, RT.005, RW.002, Dusun Mageloo., Kab. Sikka	Magepanda	Reroroja	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui Musrenbang Kecamatan Magepanada sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentigan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Magepanda	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	ruang kelas	-	Pembangunan Ruang Kelas Baru
90	Marianus Desembus	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	TIDAK TERSEDIANYA MESIN PENGGILINGAN PADI (1 UNIT)	RT 001 RW 001 DUSUN KOJABLO, Kab. Sikka	Talibura	Mamai	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
91	Saverius Nong Pas	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Masih membutuhkan tanaman - tanaman perkebunan seperti : Pala, marica, Kakao untuk 12 kelompok tani	Desa Wolonterang (poktan Tuke ler, Daan Dadin, Tiga serangkai, Bunga Nukak, Lahi Dagir, Sudan sogor, Darah matan, Abo kokong, Tunas Baru,Nukak Noeng, Wololela, Heling Hipa), Kab. Sikka	Doreng	Wolonterang	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	12	Kelompok	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
92	KRISTINA AVENTIANA	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	Kursi dalam rombongan belajar SDK Hikong mengalami kerusakan (Volume 120)	RT 001/RW 001, Kab. Sikka	Talibura	Hikong	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	120	unit	-	Pengadaan Mebel Sekolah
93	Yansen Paskalis	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	Sarana dan Prasarana Pendukung di SDK 067 Du Rusak berat dan belum memadai yaitu : Meja Murid : 40 Buah, Kursi Murid : 40 Buah	RT.007/ RW.004, Dusun Ragaregong, Kab. Sikka	Lela	Du	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	80	unit	-	Pengadaan Mebel Sekolah
94	Marianus yoselfus	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	Belum ada pagar pengaman sekitar keliing sekolah sehingga ada hewan ternak berkeliaran di halaman SMP St. Mikael Brai di Dusun Brai, RT.001/RW.001, Desa Watugong, sehingga di butuhkan pagar tembok sekitar 300 m.	RT.001/RW.001, Dusun Brai, Kab. Sikka	Alok Timur	Watugong	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Alok Timur sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Alok Timur	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	300	meter	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
95	KRISTINA AVENTIANA	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	Meja dalam rombongan belajar SDK Hikong mengalami kerusakan (volume 60)	RT 001/RW 001, Kab. Sikka	Talibura	Hikong	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	60	unit	-	Pengadaan Mebel Sekolah
96	Saverius Nong Pas	Pembangunan Ruang Kelas Baru (SMP)	Membutukan tambahan 1 ruang guru/ Kepala Sekolah	SMPN Hamar RT/RW 009,005 Dusun Kahagoleng , Kab. Sikka	Doreng	Wolonterang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Pembangunan Ruang Kelas Baru
97	ZEBEDEUS BEN, S.IP	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD	Tidak Ada RUmah Dinas Guru SD dan SMP	SDN Tanah Merah dan SMPN Tanah Merah, Kab. Sikka	Talibura	Talibura	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
98	Avelinus Wongga	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Dasar	Belum ada Rumah Dinas yang layak untuk Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah di SDI UWA	RT.006/RW.001, Dusun Wololai, Kab. Sikka	Palue	Reruwairere	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Palue sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Palue	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
99	Edeltrudis Nyma Naga, A.Md	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	Masih terdapat ruangan kelas SDI Blawuk yang dalam keadaan rusak (3 Unit)	Rt 005 / Rw 002 Desa Watu Omok, Kab. Sikka	Talibura	Watu Omok	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	unit	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
100	ZEBEDEUS BEN, S.IP	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Banyak Hewan Babi mati karena Penyakit ASF	Desa Talibura, Kab. Sikka	Talibura	Talibura	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
101	ZEBEDEUS BEN, S.IP	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Banyak Hewan terkena Rabies setiap tahun di Desa talibura	Desa Talibura, Kab. Sikka	Talibura	Talibura	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
102	Egenius H. Haryanto, S.Sos	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	Kelebihan rombongan belajar yang mengakibatkan kekurangan 2 unit ruang kelas baru di SDI Wairotang	RT.014/RW.007, Dusun Wairotang, Kab. Sikka	Kewapante	Wairkoja	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Kewapante sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kewapante	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	unit	-	Pembangunan Ruang Kelas Baru
103	Gelfridus Gonde, S.Fil	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Belum adanya Pagar Pengaman yang baik di lingkungan sekolah sehingga keamanan sekitar lingkungan sekolah tidak terjamin,sehingga perlu adanya pembangunan Pagar Pengaman di SDI Magepanda dgn Volume : Panjang 137 M,Lebar : 111,34 M Total Luas : 15.253.6 M2	RT/RW : 016/005 Dusun Magendero Desa Magepanda, Kab. Sikka	Magepanda	Magepanda	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui Musrenbang Kecamatan Magepanada sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentigan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Magepanda	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	15,253	M2	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
104	Saverius Nong Pas	Pengadaan Mebel Sekolah (SMP)	Masih kurang lemari buku sebanyak 6 buah, Meja kursi siswa sebanyak 100 buah dan kursi Meja Guru sebanyak 20 buah.	SMPN Hamar RT/RW 009,005 Dusun Kahagoleng , Kab. Sikka	Doreng	Wolonterang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	126	unit	-	Pengadaan Mebel Sekolah
105	Yansen Paskalis	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	2 Ruang Kelas SDK 067 Du mengalami Rusak Berat (Atap dan Plafon Bocor) sehingga berdampak pada kegiatan Belajar mengajar di Sekolah	RT.007/RW.004 Dusun Ragaregong, Kab. Sikka	Lela	Du	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	ruang kelas	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
106	Edeltrudis Nyma Naga, A.Md	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	Masih kurangnya ruangan belajar siswa di SDN Klatang (3 Unit)	Rt 002 /Rw 001 Desa Watu Omok, Kab. Sikka	Talibura	Watu Omok	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	unit	-	Pembangunan Ruang Kelas Baru
107	Martinus Mustari Ipir	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Bantuan dana pendidikan untuk mahasiswa dari keluaga tidak mampu terdiri dari 20 orang mahasiswa	Dusun Melati, Dusun Mawar, Dusun Buton, Dusun Mole, Kab. Sikka	Alok	Pemana	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	20	Orang	-	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
108	Alfina Empi	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	Masih ada ruangan kelas yang mengalami rusak berat sehingga waktu musim hujan kegiatan KBM tidak berjalan dengan baik.	SDN Wegok, RT/RW 014/006, Dusun Wegok, Kab. Sikka	Hewokloang	Kajowair	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Alok Barat sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Alok Barat	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
109	Yoseph Mardiyanto	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	Tidak tersedianya Lemari Buku di setiap ruangan kelas di sekolah SDN Kei, sehingga buku-buku tidak tertata dengan baik	RT 002, RW 001, Dusun Kei, Desa Lusitada, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	Nita	Lusitada	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	8	unit	-	Pengadaan Mebel Sekolah
110	Maria Nona Kesna	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kurang Tersedianya Pupuk UREA dan NPK sebanyak 1000 Kg untuk 5 Kelompok IDT Desa Paubekor untuk menunjang Kegiatan Pertanian	RT.001/ RW.001, Dusun Ritasisan, Kab. Sikka	Koting	Paubekor	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi Prioritas usulan Hasil Msurenbang RKPD Tahun 2027 Kecamatan Koting.	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1000	kg	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
111	Eduardus Arnol	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Belum tersedianya bantuan bibit pala dan kelapa hibrida yang memadai sementara kondisi tanah dan cuaca sangat mendukung. dengan volume bibit pala 250 pohon dan bibit kelapa hibrida 250 pohon.	Desa Heo Puat, Kab. Sikka	Hewokloang	Heopuat	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Alok Barat sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Alok Barat	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
112	Fransiska Konfrida	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (SD)	Belum Adanya Ruangan Perpustakaan Sekolah di SDN Luah (1 unit)	Luah, RT/RW 019/009 Dusun Luah, Kab. Sikka	Waigete	Hoder	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Usulan prioritas Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2027 Kecamatan Waigete	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
113	Yoseph Mardiyanto	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	tidak tersedianya lemari buku disetiap ruangan kelas di sekolah SDK Nataweru, sehingga buku-buku yang ada tidak tertata dengan baik	RT 012, RW 004, Dusun Nataweru, Desa Lusitada, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	Nita	Lusitada	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pengadaan Mebel Sekolah
114	Edeltrudis Nyma Naga, A.Md	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Belum tersedianya benih padi sedayu bagi 4 kelompok Tani (Kelompok Suka maju, Kelompok Wane Natar, Kelompok Maju Bersama, Kelompok sugo Nian)	Desa Watu Omok, Kab. Sikka	Talibura	Watu Omok	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	4	Kelompok	-	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
115	Florida Yosefina Ndena	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kurang memadainya alat sarana prasana pertanian karena masih banyak kelompok tani yang menggunakan hentrakor petani lain yang disewakan ketika membajak sawah. sehingga para petani kesulitan ketika musim pembajakan sawah oleh kaeran itu para kelompok tani sangat membutuhkan hentarktor dengan jumlah hentraktor sebanyak 4 unit untuk kelompok Tani Ngalu Gau, Kelompok Tani Karya Moa, Kelompok Tani Bimo Daling dan Kelompok Tani Karya Moa.	Dusun Koro dan Dusun Mageloo, Kab. Sikka	Magepanda	Reroroja	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui Musrenbang Kecamatan Magepanada sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentigan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Magepanda	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	4	Unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
116	STEFANUS ARIFIN,ST	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	masih terdapat ruang kelas SD yang dalam keadaan Rusak Berat sebanyak 3 Ruang Kelas	SDN Wolonbue, RT/RW 011/004, Dusun Wairwerut, Kab. Sikka	Kewapante	Waiara	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Kewapante sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kewapante	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	ruang kelas	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
117	Yoseph Mardiyanto	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	masih kurannya persediaan kursi dan meja untuk guru dan murid di SDN Kei, sehingga sangat mempengaruhi kegiatan belajar mengajar di sekolah	RT 002, RW 001, Dusun Kei, Desa Lusitada, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	Nita	Lusitada	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pengadaan Mebel Sekolah
118	Petrus Kanisius Belalo, S.Si	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	terjadi peningkatan kasus kematian ternak warga (babi, Ayam, Anjing dan kambing) akibat penyakit sehingga dibutuhkan vaksin untuk ternak	RT/RW: 002/001 Dusun Kojatada Desa Wuli Wutik, Kab. Sikka	Nita	Wuliwutik	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
119	STEFANUS ARIFIN,ST	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	masih terdapat ruang kelas SD yang dalam keadaan Rusak Berat Sebanyak 11 Ruang Kelas	SDK Waiara, RT/RW 008/003, Dusun Waiara, Kab. Sikka	Kewapante	Waiara	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Kewapante sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kewapante	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	11	ruang kelas	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
120	Stanislaus Pele	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	ruang kelas siswa mengalami kerusakan, pelafon, seng bocor dan tidak ada tembok pembatas antar kelas (2 ruang)	SDK Nitung, Dusun Nitung, Rt/Rw, 001/001 , Kab. Sikka	Palue	Nitunglea	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Palue sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Palue	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah2	2	ruang kelas	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
121	Stanislaus Pele	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	banyak faslitas penunjang pendidikan siswa yang rusak dan tida bisa digunakan lagi seperti, Kursi, Meja, Rak Buku dan Papan Tulis.(Kursi 100 Buah, Meja 50 , Lemari Buku 6, Papan Tulis 6)	SDK Nitung, Dusun Nitung, Rt/Rw, 001/001 , Kab. Sikka	Palue	Nitunglea	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Palue sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Palue	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	162	unit	-	Pengadaan Mebel Sekolah
122	Egenius H. Haryanto, S.Sos	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	Terdapat kerusakan sedang 4 unit ruang kelas di SDN Kloanglagot	RT.004/RW.002, Dusun Kloanglagot, Kab. Sikka	Kewapante	Wairkoja	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Kewapante sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kewapante	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	4	ruang kelas	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
123	Stanislaus Pele	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Bak penampung air bersik rusak dan tida bisa digunakan lagi (1 Bak)	SDK Nitung, Dusun Nitung, Rt/Rw, 001/001 , Kab. Sikka	Palue	Nitunglea	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Palue sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Palue	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
124	Herman Ranu, S.P.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (SMP)	siswa mengalami kesulitan saat pelajaran TIK, dibutuhkan lap top sebanyak 10 unit di SMPK Kimang Buleng	RT.014 RW.003, Dusun Lalat, Kab. Sikka	Nita	Nita	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	10	unit	-	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
125	Laurensius Sesu, S.I.Pust	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	Ruangan belajar 9 (sembilan) unit mengalami kerusakan seng akibat abu vulkanik gunung lewotobi	SDK 030 Wolometang Rt.005/Rw 003 Dusun Wolometang, Desa Tanarawa, Kab. Sikka	Waiblama	Tanarawa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Waiblama sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Waiblama	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	9	ruang kelas	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
126	Stanislaus Pele	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Belum memiliki MCK untuk Guru dan siswa (1 Ruangan)	SDK Awa, Dusun Awa Male , Kab. Sikka	Palue	Nitunglea	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Palue sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Palue	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
127	Herman Ranu, S.P.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	kerusakan sedang/berat 1 unit MCK guru dan siswa di SDK Nita 2	RT.022 RW.006, Dusun Baoloran, Kab. Sikka	Nita	Nita	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
128	Petrus Kanisius Belalo, S.Si	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	masih dibutuhkan bibit pala bagi kelompok tani untuk dapat dikembangbiakan pada lahan kosong warga yang belum ditanami karena ketiadaan bibit pala untuk kelompok tani Panen Merah, Persani dan Sinar Keling (30.000 anakan Pala)	RT/RW: 002/001 Dusun Kojatada, Kab. Sikka	Nita	Wuliwutik	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	30000	anakan	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
129	MARIANUS M.B. KERAF,S.STP,M.A.P	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Belum adanya Pintu Pagar/Gapura sehingga siswa dapat dengan mudah keluar tanpa pengawasan sehingga meningkatkan resiko kecelakaan dan aset-aset sekolah dapat dengan mudah diakses oleh orang yang tidak bertanggungjawab Pembangunan Pintu Pagar/Gapura SDI Dihit 1 Unit	RT 02A Dusun Dihit, Kab. Sikka	Lela	Korowuwu	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
130	Herman Ranu, S.P.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Petani mengalami kekurangan pupuk untuk mendukung peningkatan produktifitas pertanian sebanyak 1 Ton	RT.005 RW.01 Dusun Tour Orin Bao RT.011 RW.03 Dusun Lalat RT.019 RW.05 Dusun Bao Loran, Kab. Sikka	Nita	Nita	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	ton	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
131	Herman Ranu, S.P.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Tidak adanya pagar pengaman sekolah 50 meter di SDK Nita 1	RT.011 RW.003 Dusun Lalat, Kab. Sikka	Nita	Nita	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	50	meter	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
132	Fransiskus Xaverius, S.P.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pengadaan Alat pertanian Mesin Traktor untuk kelompok Tani Lero Bekor dan Organik (2 Unit)	Dusun Waturia RT 001 dan RT 010 Desa Waturia , Kab. Sikka	Magepanda	Waturia	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui Musrenbang Kecamatan Magepanada sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentigan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Magepanda	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	Unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
133	Stanislaus Pele	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Masyarakat banyak membutuhkan bibit pala, cengke dan coklat	Desa Nitung Lea, Kab. Sikka	Palue	Nitunglea	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Palue sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Palue	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
134	Tanaka George F. Edoway, S.STP	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	Masih ada 1 ruang kelas di SDI Iligetang yang belum terpasang plafon dan lantai keramik	SDI Iligetang, RT 005 / RW. 004, Kab. Sikka	Alok Timur	Beru	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Alok Timur sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Alok Timur	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
135	SAVERIUS NONG PAS	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Jariangan untuk akses internet tidak memadai	SDK Kloangpopot, Desa Kloangpopot, Dusun Kloangpopot, RT. 001, Kab. Sikka	Doreng	Kloangpopot	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
136	Yoseph Mardiyanto	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	Turab pengaman gedung SMP Santisima Trinitas Bloro saat ini sudah roboh diakibatkan curah hujan yang tinggi, gedung sekolah tersebut berada di daerah rawan longsor sehingga sangat dibutuhkan turab pengaman	RT 005, RW 002, Dusun Wolonbetan, Desa Lusitada, Kab. Sikka	Nita	Lusitada	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
137	SAVERIUS NONG PAS	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	Jumlah Labtop belum memenuhi kebutuhan siswa sehingga perlu penambahan Pengadaan Labtop	SMPN 44 St. Petrus Kloangpopot, Kab. Sikka	Doreng	Kloangpopot	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	5	unit	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
138	Yohanes Berchmans Gameliel	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	Terdapat Ruang Kelas SDN Wololora Rusak Berat (3 Ruang Kelas)	SDN Wololora, Kab. Sikka	Lela	Baopaat	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	ruang kelas	-	Pembangunan Ruang Kelas Baru
139	Laurensius Sesu, S.I.Pust	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	pengadaan handtraktor 2 unit, untuk mendukung pengolahan tanah pertanian	Kelompok tani (Putra Tani dan Mamai I) Desa Tanarawa, Kab. Sikka	Waiblama	Tanarawa	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Waiblama sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Waiblama	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
140	SAVERIUS NONG PAS	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	Pagar sekolah yg belum layak	SMPN 44 St. Petrus Kloangpopot, Kab. Sikka	Doreng	Kloangpopot	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
141	Yohanes Badi Hurint, S.Tr.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Saat ini terdapat kerusakan pada bangunan WC SDK 024 Woloara yang sudah tidak dapat digunakan lagi sehingga siswa/i maupun guru meminjam untuk menggunakan WC milik warga disekitar sekolah	RT.001/ RT 001.Dusun Woloara, Kab. Sikka	Tana Wawo	Bu Selatan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Tanawawo sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Tanawawo	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
142	SAVERIUS NONG PAS	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Masih terdapat hewan peliharaan penular rabie yang belum mendapatkan vaksin, sehingga perlu pengadaan vaksin untuk HPR	Desa Kloangpopot, Kab. Sikka	Doreng	Kloangpopot	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
143	Laurensius Sesu, S.I.Pust	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (SMP)	Kurang adanya Sarana Pendukung (Komputer) sebanyak 20 unit untuk proses Pembelajaran Peserta Didik	SMPN 2 Talibura Rt.005/Rw 003 Dusun Wolometang, Desa Tanarawa, Kab. Sikka	Waiblama	Tanarawa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Waiblama sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Waiblama	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	20	unit	-	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
144	SAVERIUS NONG PAS	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Perluasan Jariangan Listrik dan Meteran PLN, karena masih banyak rumah tangga belum mengakses jaringan listrik PLN	Desa Kloangpopot, Kab. Sikka	Doreng	Kloangpopot	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
145	Fransiskus Petrus Poeang,SP	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Dasar	Masih ada guru yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah tempat ngajar sehingga perlu pembangunan 2 unit Rumah Dinas	SDN TUABAO, RT 003 RW 002 Dusun Denak, Desa Tuabao, Kab. Sikka	Waiblama	Tua Bao	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Waiblama sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Waiblama	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	unit	-	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
146	SAVERIUS NONG PAS	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Bagian Barat SD belum memiliki turab dan pagar sekolah, dengan kondisi medan yang ekstrim maka perlu adanya pembangunan Turab dan Pagar pengaman sekolah, Volume 150 Meter	SDK Kloangpopot, Desa Kloangpopot, Kab. Sikka	Doreng	Kloangpopot	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	150	meter	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
147	Yoseph Mardiyanto	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	belum adanya pagar pengaman gedung sekolah SMPK Santisima Trinitas Bloro yang lokasinya berada di lokasi ketinggian dan jauh dari pemukiman warga (volume 112 meter)	RT 005, RW 002, Dusun Wolonbetan, Desa Lusitada, Kecamatan Nita, Kab. Sikka	Nita	Lusitada	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	112	meter	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
148	Wahyu E. Sihombing	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Belum ada Pagar Sekolah Dasar Inpres Baokremot (200m)	RT002/RW001, Kab. Sikka	Talibura	Baokremot	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	200	meter	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
149	Wahyu E. Sihombing	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Masih terdapat kasus gigitan HPR di Desa Baokremot	Desa Baokremot, Kab. Sikka	Talibura	Baokremot	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
150	Wahyu E. Sihombing	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Pengadaan Hand Sprayer (tanki semprot manual 8 unit) bagi para Petani	Desa Baokremot, Kab. Sikka	Talibura	Baokremot	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	8	Unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
151	Martinus Mustari Ipir	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Belum tersedianya pagar Pengaman SDN Ngolo	jalan kesehatan, Kab. Sikka	Alok	Gunung Sari	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
152	Emerensiana Kartini	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah (SD)	Lantai gedung perpustakaan SDK Habi rusak sedang 1 ruangan	RT.007/RW.003, Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kab. Sikka	Kangae	Habi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui Musrenbang Kecamatan Kangae sesuai hasil Kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kangae	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
153	Martinus Mustari Ipir	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Dasar	Belum adanya Rumah Dinas / Mes Guru bagi SDN Ngolo dan MTS Nurwahid Gunung Sari	jalan kesehatan, Kab. Sikka	Alok	Gunung Sari	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
154	Emerensiana Kartini	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	Banyak terdapat kursi siswa siswi SDK Habi yang rusak sebanyak 100 buah	RT.007/RW.003, Desa Habi, Kec. Kangae, Kab. Sikka	Kangae	Habi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui Musrenbang Kecamatan Kangae sesuai hasil Kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kangae	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	100	buah	-	Pengadaan Mebel Sekolah
155	Martinus Mustari Ipir	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Masih kurangnya bibit Tanaman Jagung (Jagung Hibrida)	jalan kesehatan, Kab. Sikka	Alok	Gunung Sari	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
156	Dominikus Lukas Killa, S.IP.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	Belum adanya MCK yang memadai untuk siswa/siswi SMPN 1 Alok Timur, sehingga guru dan murid masih pake MCK yang sama. Dibutuhkan 2 unit bangunan MCK	SMPN 1 Alok Timur, RT 001 /RW 001, Dusun Teteng, Kab. Sikka	Alok Timur	Gong Bekor	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Alok Timur sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Alok Timur	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	unit	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
157	Polikarpus Heret, A.Md	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	Guru dan siswa mengalami kesulitan dalam KBM terlebih pada musim hujan akibat atap rusak di SDN Watuwitir sehingga perlu dilakukan rehab berat ruang kelas sebanyak 2 ruang.	SDN Watuwitir, RT 009 / RW 005 Dusun Woloklereng, Kab. Sikka	Hewokloang	Rubit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Hewokloang sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Hewokloang	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	ruang kelas	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
158	Emerensiana Kartini	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Masyarakat kesulitan dalam membeli pupuk, sehingga menyebabkan gagal panen. Pupuk yang dibutuhkan sebanyak 20 ton	Dusun Wair Habi, Habi Gahar dan Dusun Habi Langir, Kab. Sikka	Kangae	Habi	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui Musrenbang Kecamatan Kangae sesuai hasil Kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kangae	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	20	ton	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
159	Alexius Dani, S.Psi	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Lokasi SDI Wolobheto berbatasan dengan daerah aliran sungai yang sering terjadi longsor sehingga perlu dibangun turap pengaman sekolah sepanjang 50 m3	SDI Wolobheto RT. 008/ RW.003 Dusun Woloone, Kab. Sikka	Mego	Ndaimbere	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Mego sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Mego	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	50	M3	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
160	Yohanes Berchmans Gameliel	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Banyak Ternak Kambing yang Mati terkena Virus (Cacar Kambing) sehingga Kelompok Ternak di Desa Baopaat membutuhkan Bantuan Ternak Kambing untuk Kelompok Tanah Dueng, Cinta Kasih dan Kelompok Naga Lalang	Desa Baopaat, Kab. Sikka	Lela	Baopaat	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
161	Yoseph Wilfridus, S.Pt.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (SD)	Kurangnya alat olahraga untuk SDN Blidit (1 Paket)	Blidit, RT.010/RW.004 , Kab. Sikka	Waigete	Egon Buluk	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Waigete sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Waigete	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
162	Yoseph Wilfridus, S.Pt.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (SD)	Belum adanya perpustakaan di SDN Blidit (1 Unit)	Blidit, RT.010/RW.004, Kab. Sikka	Waigete	Egon Buluk	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Waigete sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Waigete	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
163	MARIA VERONIKA SUE,S.I.Kom	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kelompok Tani Ru Reo Desa Ribang masih menggunakan cara manual dalam pengolahan tanah pertanian/perkebunan sehingga memperlambat waktu tanam dan meningkatnya biaya operasional petani sehingga dibutukan 1 unit Handtractor untuk menunjang kegiatan pertanian/perkebunan .	RT.001/RW.001,Dusun Woloara, Kab. Sikka	Koting	Ribang	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi Prioritas usulan Hasil Msurenbang RKPD Tahun 2027 Kecamatan Koting.	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
164	Yoseph Wilfridus, S.Pt.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Tidak adanya pagar pengaman untuk SDN Blidit (1 Paket)	Blidit, RT.010/RW.004, Kab. Sikka	Waigete	Egon Buluk	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Usulan prioritas Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2027 Kecamatan Waigete	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
165	Yoseph Wilfridus, S.Pt.	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	Belum adanya Ruang Olahraga untuk SDN Blidit (1 Unit)	Blidit, RT.010/RW.004, Kab. Sikka	Waigete	Egon Buluk	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Waigete sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Waigete	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Pembangunan Ruang Kelas Baru
166	Marianus Mario Belawa Keraf	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	masih kurangnya alat mesin pertanian (handtraktor kurang lebih 3 unit) di desa Woda Mude	RT 007, RW 004, Dusun Rategulu, Desa Woda Mude, Kab. Sikka	Magepanda	Woda Mude	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui Musrenbang Kecamatan Magepanada sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentigan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Magepanda	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	Unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
167	Jitro Boki, S.Sos	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	Lokasi SMP Pancasila Lekebai berada di bawah daerah tebing yang sering mengalami longsor sehingga perlu dibangun Turap Pengaman Sekolah sepanjang kurang lebih 100 meter	SMP Pancasila Lekebai RT.001/RW.001, Dusun Lekebai, Kab. Sikka	Mego	Bhera	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Mego sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Mego	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	100	meter	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
168	Agustinus Minggu	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	Kebutuhan lemari buku 6 buah untuk 6 kelas di SDN Nitakloang	RT.003 RW.001 Dusun Baoponun, Kab. Sikka	Nita	Nitakloang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	6	buah	-	Pengadaan Mebel Sekolah
169	CICA HASNAWATI	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah (SD)	Ruang Perpustakaan Rusak Berat (Sebagian Dinding terbelah, Lantai semen Rusak, Plafon tidak ada sebanyak 1 Ruang	RT 019 , RW 006 Kecamatan Alok Barat, Kab. Sikka	Alok Barat	Hewuli	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Alok Barat sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Alok Barat	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
170	Agustinus Minggu	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	Kondisi kursi meja rusak sebanyak 50 buah di SDI Nogodue	RT.005 RW.002 Dusun Baopunon, Kab. Sikka	Nita	Nitakloang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	50	buah	-	Pengadaan Mebel Sekolah
171	Agustinus Minggu	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD	Belum ada ruang kepala sekolah 1 unit di SDN Nitakloang	RT.003 RW.001 Dusun Baoponun, Kab. Sikka	Nita	Nitakloang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
172	Heribertus Johnson	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Di SDI Inpres Wairhek Jumlah Murid Banyak Tapi Jumlah Ruang Kelas Untuk Belajar Kurang	RT 011,RW 004,Dusun Tua Watu, Kab. Sikka	Talibura	Likonggete	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pembangunan Ruang Kelas Baru
173	Heribertus Johnson	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	Di SDI Inpres Wairhek Belum Memilki Mebel Sekolah	RT 011,RW 004,Dusun TuaWatu, Kab. Sikka	Talibura	Likonggete	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pengadaan Mebel Sekolah
174	Heribertus Johnson	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (SMP)	Di SDi Inpres Wairhek Belum memilki Rumah Dinas Kepala Sekolah	RT 011,RW 004,Dusun TuaWatu, Kab. Sikka	Talibura	Likonggete	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
175	Polycarpus Mali	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Masih kurangnya bibit Tanaman hortikultura. sehingga dibutuhkan penambahan bibit cabe keriting dan tomat untuk 12 Kelompok	Desa Parabubu, Kab. Sikka	Mego	Parabubu	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Mego sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Mego	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	12	Kelompok	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
176	MARIANUS DESEMBUS	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	Kurangnya fasılıtas pendukung pembelajaran sıswa yaknı kursı dan meja sebanyak masıng-masıng 150 unıt	SMP N 1 Talıbura RT 011,RW 005,Dusun Waırmıtak, Kab. Sikka	Talibura	Nebe	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	150	unit	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
177	MARIANUS DESEMBUS	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (SMP)	Kurangnya fasılıtas pendukung pembelajaran sıswa yaknı laptop 20 unıt	SMP N 1 Talıbura RT 011,RW 005,Dusun Waırmıtak, Kab. Sikka	Talibura	Nebe	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	20	unit	-	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
178	MARIANUS DESEMBUS	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Belum maksımal Hasıl darı tanaman padı sehıngga petanı membutuhkan mesın rontok padı sebanyak 2 unıt	Dusun Waırmıtak dan Dusun Lalankleler, Kab. Sikka	Talibura	Nebe	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	Unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
179	Vinsensius Kustance, ST	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Sering terjadinya gagal Panen Karena Kekurangan Pupuk dan Obat-obatan	Dusun Koli dan Dusun Nangarasong (31 Kelompok), Kab. Sikka	Magepanda	Kolisia	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui Musrenbang Kecamatan Magepanada sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentigan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Magepanda	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	31	Kelompok	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
180	Remigius Yohanes Rana,SE	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Tidak memiliki pagar pengaman (pagar tembok) lingkungan sekolah SDI Faipanda yang memadai para guru dan siswa rentan terhadap ancaman seperti pencurian, banyak warga keluar masuk serta terjadi bencana hujan angin air masuk sampe lingkungan sekolah (400 meter pagar tembok pengaman sekolah SDI Faipanda)	Waturia, RT.005/RW.003, Dusun Faipanda, Desa Renggarasi , Kab. Sikka	Tana Wawo	Renggarasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Tanawawo sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Tanawawo	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
181	Win Eduard Meda	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	Saat ini SDN Aerea masih mengalami kekurangan 3 ruang kelas sehingga para siswa dititipkan pada kelas jauh di Ratebata, Dusun Ledabaga. Untuk itu, perlu pembangunan 3 ruang kelas baru	SDN Aerea, RT.002/RW.002, Dusun Aupase, Kab. Sikka	Mego	Napugera	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Mego sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Mego	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	ruang kelas	-	Pembangunan Ruang Kelas Baru
182	Remigius Yohanes Rana,SE	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Belum ada mes guru dan selama ini guru tinggal jauh serta akses infrastrukur yang kurang memadai (satu unit mes guru SDK Wolofeo)	Detumage, RT.003/RW.002, Dusun Wolofeo, Desa Renggarasi , Kab. Sikka	Tana Wawo	Renggarasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Tanawawo sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Tanawawo	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
183	Anna Grenadha De Mega Pamella	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Kondisi bangunan MCK di SDI Nangameting yang rusak sehingga sangat terganggu saat menggunakannya. Dibutuhkan pembangunan 3 unit MCK	SDI Nangameting, RT. 009 /RW. 003 Kelurahan Wairotang, Kab. Sikka	Alok Timur	Wairotang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Alok Timur sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Alok Timur	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	unit	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
184	Ismail Irianto	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	Terdapat 2 Ruang Kelas SDN Sukun yang mengalami Rusak Parah, Tetapi Anak sekolah tetap menggunakan Untuk Proses Belajar Mengajar di Karenakan Suda tidak ada Rauangan Kelas yang tersedia	Dusun Sukun, RT/RW : 005/003, Desa Samparong, Kecamatan Alok, Kab. Sikka, Kab. Sikka	Alok	Samparong	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	ruang kelas	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
185	Ismail Irianto	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (SD)	masih terdapat Para Siswa/i SDN Sukun yang belum terlalu mengetahui soal ITE	Dusun Sukun, RT/RW : 005/003, Kab. Sikka	Alok	Samparong	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
186	Ismail Irianto	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD	Belum ada Ruang guru untuk Para Guru dan Tata Usaha di SDN Sukun	Dusun Sukun, RT/RW : 005/003, Kab. Sikka	Alok	Samparong	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
187	Ismail Irianto	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (SD)	Belum ada sama sekali Alat Praktik Untuk Siswa/I SDN Sukun	Dusun Sukun, RT/RW ; 005/003, Kab. Sikka	Alok	Samparong	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
188	Daniel Doni Toring	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Dasar	Masi ada Guru SDK Higetegera yang kontrak rumah disekitar sekolah dikarenakan belum adanya Rumah Dinas	Dusun Higetegera, RT 005/RW 002, Kab. Sikka	Kangae	Watumilok	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui Musrenbang Kecamatan Kangae sesuai hasil Kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kangae	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
189	Daniel Doni Toring	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (SMP)	Kuranganya Alat Praktik dan Peraga pada SMP Muhamadiya Waipare	Dusun Waipare B, RT 013/RW 006, Kab. Sikka	Kangae	Watumilok	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui Musrenbang Kecamatan Kangae sesuai hasil Kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kangae	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
190	ARMANDO RICHARDO CHARLOS	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Hasil Produksi Tanaman Kakao Yang Semakin Menurun dan Petani Yang Kesulitan Mendapatkan Pupuk dan Obat-Obatan Pengendali Hama dan Penyakit untuk 3 kelompok yakni Kelompok Megu Mo'ong 1, Kelompok Megu Mo'ong 2 dan Kelompok Hibir Pliti	Kelompok Megu Mo'ong 1 RT 06/RW 03, Kelompok Megu Mo'ong 2 RT 07/RW 03, dan Kelompok Hibir Pliti RT 04/RW 02, Dusun Wairnuka,Desa Pelibaler, Kab. Sikka	Doreng	Pelibaler	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	Kelompok	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
191	Mikael Ardianus Demus Bobi	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah (SD)	Kondisi 1 ruang Perpustakaan di SDK Detuleda mengalami kerusakan pada atap dan plafon sehingga perlu direhab atau diperbaiki	SDK Detuleda RT.002/RW.001 Dusun Nuambalu, Kab. Sikka	Mego	Liakutu	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Mego sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Mego	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
192	Antonius Moa, A.Md	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	Belum ada lemari buku SDK Nitung di 3 ruangan kelas (3 buah lemari buku)	SDK Nitung Kangae,RT.006/RW.003.Dusun Kangae, Kab. Sikka	Kangae	Mekendetung	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui Musrenbang Kecamatan Kangae sesuai hasil Kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kangae	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	unit	-	Pengadaan Mebel Sekolah
193	Antonius Moa, A.Md	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	Kondis belajar meja siswa rusak berat SDI Sapan Jawa (Kursi 50 unit, dan meja 25 Unit)	SDI Sapanjawa,Wolooa,RT.012/Rw.005,Dusun Wololuma, Kab. Sikka	Kangae	Mekendetung	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui Musrenbang Kecamatan Kangae sesuai hasil Kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kangae	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	75	unit	-	Pengadaan Mebel Sekolah
194	Petrus Bruno Bajo	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	Kurang Adanya Meubeler (Lemari Arsip 10 Buah, Meja 92 Buah, Kursi 92 Buah)	SDI Jallo, Dusun Jallo, Wua Detung, RT/RW.003/002, Kab. Sikka	Nita	Tada Lado	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	192	unit	-	Pengadaan Mebel Sekolah
195	Antonius Moa, A.Md	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	Kursi meja belajar siswa kondisi rusak berat SDK Wololuma (20 meja dan 40 kursi)	SDK Wololuma, Tadat Rt.011/RW.006,Dusun Wololuma, Kab. Sikka	Kangae	Mekendetung	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui Musrenbang Kecamatan Kangae sesuai hasil Kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kangae	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	60	buah	-	Pengadaan Mebel Sekolah

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
196	Herman Alisari	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	pagar pengaman smp sudah rusak	SMPN 2 Nita Nirangkliung,Dusun Nirangkliung,RT-005/RW-003, Kab. Sikka	Nita	Nirangkliung	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
197	Maria Marselina Sei, A.Md.	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	3 kelompok tani yaitu kelompok tani Duangara Dusun Kotandelu, kelompok tani Muri Pawe Dusun Kalimati dan kelompok tani Muncul Baru Dusun Wolotumbu selalu kesulitan selalu kesulitan mendapatkan pupuk dan obat - obatan khususnya kakao	dusun kotandelu ,,dusun kalimati ,dusun wolotumbu ,desa kotandelu, Kab. Sikka	Paga	Kotandelu	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Paga sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Paga	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	Kelompok	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
198	Muhammad Ayub	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD	Belum Ada Ruang Guru 1 Unit Ruangan	SDK Watukobu Rt.003/Rw.002 Dusun Nitakloang, Desa Kopong, Kab. Sikka	Kewapante	Kopong	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Kewapante sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kewapante	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
199	Herman Alisari	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	Pembangunan 3 Ruang kelas SDK Nirangkliung	SDK Nirangkliung,Desa Nirangkliung,Dusun Nirangkliung,RT-005/RW-003, Kab. Sikka	Nita	Nirangkliung	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	ruang kelas	-	Pembangunan Ruang Kelas Baru
200	Maria Marselina Sei, A.Md.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	2 ruang SDK 141 Kotandelu perlu diperbaiki karena sudah lama rusak sehinggah sangat mengganggu proses belajar mengajar	dusun kalimati RT003/RW001,Desa kotandelu, Kab. Sikka	Paga	Kotandelu	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Paga sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Paga	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	ruang kelas	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
201	Benediktus Boli	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Bahanyaknya lahan yang tidak terawat dan berpotensi menjadi hutan untuk itu di usulkan pengadaan BIBIT Mente sehinnga lahan yang tidak terawat akan terawat dan akan bermanfaat bagi masyarakat.	Dusun Parumaan C (Dambila), RT/RW :019/009, Kab. Sikka	Alok Timur	Perumaan	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Alok Timur sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Alok Timur	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
202	Herman Alisari	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Pengadaan Anakan Pala 5000 pohon	Desa Nirangkliung Dusun Nirangkliung dan Dusun Kojamota, Kab. Sikka	Nita	Nirangkliung	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	5000	anakan	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
203	Herman Alisari	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan obat Vaksin ASF 1 Paket	Desa Nirangkliung,Dusun Nirangkliung dan Dusun Kojamota, Kab. Sikka	Nita	Nirangkliung	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
204	Petrus Bruno Bajo	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Masyarakat Membutuhkan Bibit Tanaman Pertanian Anakan Palah (Anakan 500 Pohon)	Dusun Riigete, Dusun Jallo, Dusun Wolofeo., Kab. Sikka	Nita	Tada Lado	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	500	anakan	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
205	Antonius Moa, A.Md	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Produktivitas tanaman kakao menurun disebabkan oleh hama dan penyakit penggerek buah kakao (PBK) dan penyakit vaskular streak dieback (FSD) 3 Dusun (15 Ha)	Dusun Nitung,Dusun Kangae,Dusun Wololuma, Kab. Sikka	Kangae	Mekendetung	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui Musrenbang Kecamatan Kangae sesuai hasil Kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kangae	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
206	Petrus Bruno Bajo	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Masyarakat Membutuhkan Bibit Tanaman Pertanian seperti Anakan Kakao (Anakan 500 Pohon)	Dusun Wolofeo, Dusun Jallo, Dusun Riigete, Kab. Sikka	Nita	Tada Lado	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	500	anakan	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
207	Muhammad Ayub	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kelompok Ternak Belum Memilik Alat Pengolah Pakan Ternak (Pencacah Batang Pisang) 13 kelompok	Dusun Nitakloang, Dusun Kopong, Dusun napunggete , Kab. Sikka	Kewapante	Kopong	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Kewapante sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kewapante	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	13	Kelompok	-	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
208	Paulus Johnson Aritos, S.Sos.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Masih banyak siswa/I yang putus sekolah kerena kendala biaya sebanyak 30 Orang pada Desil 1	Desa Tana Duen, Kab. Sikka	Kangae	Tana Duen	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui Musrenbang Kecamatan Kangae sesuai hasil Kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kangae	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	30	Orang	-	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
209	Ignasisus Depa	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Tanah disekitar Gedung ada longsor, Perlu ada Pembanguan Turap 150 Meter. sehingga dapat menahan banguna/Gedung sekolah.	SDK Niobewa, Detuki RT.014/RW.006, Dusun Mbongoroga, Desa Lenandareta, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka., Kab. Sikka	Paga	Lenandareta	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Paga sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Paga	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	150	meter	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
210	Antonius Moa	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	3 Unit ruang kelas di SDI Habibola mengalami kerusakan atap bocor, lantai pecah pecah, sebagain tembok ada yang sudah retak dan kaca jendela ada yang sudah pecah	SDI Habibola RT.005/RW.002 Dusun Habibola Desa Waihawa, Kab. Sikka	Doreng	Waihawa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	unit	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
211	Paulus Johnson Aritos, S.Sos.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Masih terdapat lahan perkebunan Warga yang masih Kosong dan belum dimanfaatkan untuk tujuan penigkatan Ekonomi masyarakat untuk penanaman bibitan Tanaman Kakao,Anakan Kelapa Jenja Entok dan Pala sebanyak 3.000 anakan	Desa Tana Duen, Kab. Sikka	Kangae	Tana Duen	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui Musrenbang Kecamatan Kangae sesuai hasil Kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kangae	Sesuai Dengan Program Prioritas Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3000	anakan	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
212	Paulus Johnson Aritos, S.Sos.	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	masih terdapat sarana dan prasaran meubeler sekolah yang rusak dan tidak layak digunakan sebagai penunjang proses belajar Mengajar untuk di SDN Blatat (Kursi dan Meja 170 Unit)	SDN Blatat,RT.008/RW.003 Dusun Blatat., Kab. Sikka	Kangae	Tana Duen	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui Musrenbang Kecamatan Kangae sesuai hasil Kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kangae	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	170	unit	-	Pengadaan Mebel Sekolah
213	Nikolaus Nong Bale	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	Terdapat 3 ruang kelas di SDK Kewapante dengan kondisi lantai dan plafon rusak sehingga perlu direhab atau diperbaiki	RT.007/RW.004, Dusun Kewapante, Kab. Sikka	Kewapante	Namangkewa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Kewapante sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kewapante	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	ruang kelas	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
214	Marselus Lado	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Keadaan Keamanan sekolah kurang terjamin sehingga perlu adanya pembangunan pagar sekolah dengan ukuran panjang 50 m dan tinggi 1,25 m	SDN Hewokloang, Rt. 04/RW 02 Dusun Hewokloang, Kab. Sikka	Hewokloang	Hewokloang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Hewokloang sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Hewokloang	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	50	meter	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
215	Antonius Moa, A.Md	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Masih banyak siswa/siswi sekolah yang putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan karena orang tua tidak mampu membiayai pendidikan anaknya	Dusun Nitung,Dusun Kangae,Dusun Wololuma, Kab. Sikka	Kangae	Mekendetung	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui Musrenbang Kecamatan Kangae sesuai hasil Kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kangae	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	10	Orang	-	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
216	Nikolaus Nong Bale	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	Terdapat 5 kelas di SDK Kewapante yang meja dan kursi belajar siswanya dalam kondisi rusak sehingga perlu pengadaan meja dan kursi masing-masing 100 unit.	RT.007/RW.004, Dusun Kewapante, Kab. Sikka	Kewapante	Namangkewa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Kewapante sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kewapante	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	100	unit	-	Pengadaan Mebel Sekolah

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
217	Nikolaus Mesi	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	Terdapat 4 ruang kelas di SDK Feondari dalam kondisi rusak pada atap dan plafon bocor serta lantai kelas masih berupa lantai tanah	SDK Feondari, RT. 07 RW.05, Dusun Wolomage, Desa Wolodhesa, Kab. Sikka	Mego	Wolodhesa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Mego sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Mego	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	4	Ruang Kelas	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
218	LAURENSIUS P. VIRMAYANTO LAIT	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Banyak Lahan yang tidur yang berpotensi untuk bibit Pala yang dibutuhkan Kelompok Tani Sebanyak 500 Pohon	Detunglikong,RT 004/RW 002 Kelompok Tunas Harapan, Kab. Sikka	Nita	Kara Kabu	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	500	Anakan	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
219	Cyrilus Nong Siga	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Dasar	Belum adanya ruang UKS	SDK Tebuk - Desa Tebuk, Kab. Sikka	Nita	Tebuk	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
220	Darius Moa	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Di SDN Watupedar belum ada Turap dan Pagar Pengaman, letak sekolahnya dipinggir jalan dan berada diatas ketinggian, sehingga saat musim hujan akses jalannya tidak dilewati anak-anak sekolah karena longsor. Volume Pagar 50 Meter dan Turap 50 Meter.	SDN Watupedar, RT.002/RW.001 Dusun Watupedar, Desa Watumerak, Kab. Sikka	Doreng	Watumerak	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	50	meter	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
221	Antonius Moa	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	Meja kursi rusak berat dan tidak layak di pakai sehingga perlu di adakan yang baru, sebanyak 75 unit meja dan 75 unit kursi	Rt,01/Rw .01 Dusun Dat, Kab. Sikka	Doreng	Waihawa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	150	buah	-	Pengadaan Mebel Sekolah
222	Yohanes Nurak	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	Banyak anak di SDI Hagarahu yang belum memilik kursi meja ,banyak yg rusak dan sering duduk berdampingan di butuhkan Meja dan kursi 100 unit	SDI Hagarahu, RT,04 ,Rw,02, Kab. Sikka	Nita	Mahebora	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	100	unit	-	Pengadaan Mebel Sekolah
223	Darius Moa	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Di SDN Watulagar belum ada Turap Penahan Tanah karena letak sekolah nya di pinggirnya jalan dan ketinggian dengan Volumenya 80 Meter.	RT. 010/RW.005, Dusun Watulagar, Desa Watumerak, Kab. Sikka	Doreng	Watumerak	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	80	meter	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
224	Gabriel Baba	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Belum adanya pagar pengaman sekolah di SDI Watuwekak yang mengakibatkan orang keluar masuk sekolah dan mengganggu suasana lingkungan sekolah sehingga perlu adanya pembangunan pagar sekolah yang mendukung keamanan belajar siswa di sekolah	Wegoknatar, RT 013/RW 006, Dusun Wegoknatar, Kab. Sikka	Kewapante	Seusina	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Kewapante sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kewapante-	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
225	Rosalia Maria Bunga	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	Belum adanya Pagar Sekolah SMP Negeri Kolisia dengan Volume 113,20 M	SMP Negeri Kolisia, RT.013/RW.006, Dusun Nawuteu, Desa Kolisia B, Kecamatan Magepanda, Kab. Sikka	Magepanda	Kolisia B	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui Musrenbang Kecamatan Magepanada sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentigan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Magepanda	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	113	meter	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
226	Nolastus	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	masih terdapat kekurangan empat (4) ruang kelas di Sekolah Kelas Jauh Bora Blupur yang terletak di Bora Blupur sedangkan rombongan belajar sudah enam (6) rombel	SD Kelas Jauh Bora Blupur, Bora Blupur, RT.014/RW.007 Dusun Klotong, Kab. Sikka	Bola	Bura Bekor	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	4	ruang kelas	-	Pembangunan Ruang Kelas Baru
227	Elisabeth Bergitha Rihi	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	Terdapat 2 ruangan SDN Hubing(Rt.003/Rw.001, Dusun Hubing Kloang), dan 2 ruangan Untuk SDK Wolomude (Dusun Wolomude Rt.012/Rw.003) rusak	Desa Teka Iku , Kab. Sikka	Kangae	Teka Iku	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui Musrenbang Kecamatan Kangae sesuai hasil Kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kangae	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	4	ruang kelas	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
228	MARIA ANITA YUNIATI, S.IP	Pengadaan Mebel Sekolah (SMP)	Masih kurangnya sarana fasilitas menunjang pelaksanaan kegiatan bagi para pendidik sehingaa membatasi variasi strategi pengajaran membuat proses belajar mengajar kurang efektif , Lemari Arsip 2 buah, Kursi Guru 12 buah, Meja biro ruang Kepala Sekolah 1 Paket	Urung Pigang, RT.031 / RW. 004, SMP NEGERI PIGANG, Kab. Sikka	Alok Barat	Wailiti	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Alok Barat sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Alok Barat	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pengadaan Mebel Sekolah
229	Silverius Nikolais Nai	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Belum Ada Pupuk Untuk Kebutuhan Masyarakat Untuk Tanaman Kakao (3 Kelompok Tani)	Rt 001 /Rw 001 Dusun waturesa, Kab. Sikka	Paga	Regapu'u	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Paga sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Paga	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	kelompok	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
230	Yosef Edison S.I. Kom	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Banyak peternak babi yang kehilangan ternak akibat serangan virus ASFV, sehingga perlu adanya bantuan ternak babi sebanyak 80 ekor bagi 16 kelompok tani di Desa Watukobu	Desa Watukobu, Kab. Sikka	Kewapante	Watukobu	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Kewapante sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kewapante-	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	80	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
231	Gabriel Baba	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (SMP)	Kapasitas ruang guru di SMPN Kewapante yang hanya menampung 15 orang guru sedangkan jumlah guru saat ini ada 30 orang, sehingga perlu melakukan penambahan 1 ruangan guru baru	Magesunga, RT/RW : 009/004, Dusun Magerobak, Kab. Sikka	Kewapante	Seusina	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Kewapante sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kewapante-	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
232	Cyrilus Nong Siga	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	Belum lengkapanya mebel sekolah seperti kursi murid sebanyak 35 buah dan kursi guru 6 buah	SDK Tebuk - Desa Tebuk, Kab. Sikka	Nita	Tebuk	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	41	buah	-	Pengadaan Mebel Sekolah
233	Yohanes Nurak	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Banyak Tanaman pertanian di Desa Mahebora sering di serang hama penyakit pada tanaman (Kako dan Pisang) ada 10 poktan	3 Dusun (Sarajawa,Hagarahu,Watulitin g) Desa Mahebora, Kab. Sikka	Nita	Mahebora	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	10	kelompok	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
234	LAURENSIUS P. VIRMAYANTO LAIT	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (SD)	Belum ada sarana prasarana Laptop 6 Unit dan Printer 1 Unit untuk Siswa SDN Detunglikong	SDN Detunglikong,RT 005 RW 002 Dusun Detunglikong, Kab. Sikka	Nita	Kara Kabu	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	7	unit	-	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
235	Elisabetina Heymas, S.E	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SMP)	Usia bangunan sekolah yang sudah tua dan banyak bangunan yang sudah retak sehingga dapat membahayakan keselamatan siswa dan guru	SMPN I Kewapante, RT 004/RW 002, Dusun Ili, Kab. Sikka	Kangae	Kokowahor	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui Musrenbang Kecamatan Kangae sesuai hasil Kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kangae	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
236	Elisabetina Heymas, S.E	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Belum adanya pagar pengaman sekolah yang baik. panjang pagar 100 M2 di SDI Orinmude dan 100 M2 di SDK Ili	SDK Ili RT 004/RW 002, Dusun Ili dan SDI Orinmude RT 014/RW 007, Dusun Liantahon, Kab. Sikka	Kangae	Kokowahor	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui Musrenbang Kecamatan Kangae sesuai hasil Kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kangae	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	200	M2	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
237	Marianus Dare	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Sering Terjadi erosi pada lokasi SDK Kajowain perlu Pembagunan Turab sebanyak 1 Paket	RT 006 RW 002 Dusun Kajowain , Kab. Sikka	Talibura	Waipaar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
238	Cyrilus Nong Siga	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD	Belum adanya ruang Kepala Sekolah	SDK Tebuk - Desa Tebuk, Kab. Sikka	Nita	Tebuk	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
239	Yohanes Silvester, A.Md.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kelangkaan benih kacang ijo dan kacang tanah ditingkat masyarakat yang terbentuk dalam 20 kelompok tani di desa Runut, dengan rincian benih kacang ijo 200 kg dan benih kacang tanah 200 kg.	Dusun Ewa, Dusun Lodong dan Dusun Tana Hikong- Desa Runut, Kab. Sikka	Waigete	Runut	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Waigete sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Waigete	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
240	Dismas Diri	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (SD)	Pada saat kegiatan pembelajaran Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Siswa SDI Nabe mengalami kekurangan laptop, perlu diadakan 10 buah Laptop dan 5 buah Printer	SDI Nabe, Rt 002 RW 001, Dusun Nabe., Kab. Sikka	Mego	Kowi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Mego sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Mego	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	15	unit	-	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
241	Yohanes Nurak	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	ada dua (2) unit MCk murid dan guru di SDI Hagarahu rusak Berat,sehinga banyak anak sering buang air kecil sembarangan.	SDI Hagarahu, RT,04,Rw,02, Kab. Sikka	Nita	Mahebora	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	unit	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
242	Martina Leto Odel, A.Md,Keb	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Para petani Desa Paga dari Tiga Kelompok Tani membutuhkan Bibit Padi dan Jagung yang berkualitas baik.	Sagandona, RT.22/RW.11, Dusun Paga Barat., Kab. Sikka	Paga	Paga	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Paga sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Paga	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
243	Agustinus Ranggo, A.Md	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Belum adanya Bibit Tanaman Padi dan Jagung sehingga di Butuhkan bibit Padi dan jagung untuk kelompok Tani sawah dan Tani Ladang, Kelompok Tani 8 kelompok dan 2 kelompok tani ladang	Dusun Niobewa, Dusun Arawawo dan Dusun Aebubu, Kab. Sikka	Paga	Aebubu	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Paga sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Paga	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	10	kelompok	-	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
244	Cyrilus Nong Siga	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Belum adanya sarana prasarana pendukung IT berupah laptop	SDI Solot, Kab. Sikka	Nita	Tebuk	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
245	Muhamad Jafar	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	Kurangnya ruang kelas yang memadai dalam proses KBM di SDN Habijanang sebanyak 2 ruang kelas	SDN Habijanang Dusun Habijanang, RT.015/RW.006, Kab. Sikka	Waigete	Wairbleler	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Usulan prioritas Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2027 Kecamatan Waigete	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	ruang kelas	-	Pembangunan Ruang Kelas Baru
246	Darius Moa	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kakaonya Terserang hama penyakit busuk batang, busuk buah, sehingga diperlukan pengadaan bibit baru yang varietas unggul tahan hama penyakit untuk kelompok Tani Suka Maju.	Kelompok Suka Maju, RT. 003/RW. 002, Dusun Watupedar, Desa Watumerak., Kab. Sikka	Doreng	Watumerak	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
247	Solvinis Go Epi	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Masih kurangnya sarana pendukung pertanian (hand traktor) yang di butuhkan Masyarakat dalam mengolah lahan pertanian (kelompok tani di dusun Nirulero, Riit, Belat)	RT.006/RW.002, Dusun Riit, Kab. Sikka	Nita	Riit	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
248	Aloysius G. N. Parera, S.Sos	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD	Belum ada ruang Kepala Sekolah, saat ini dipakai rumah guru dijadikan Ruang Kepala Sekolah	SDI Hoba, RT.020 RW.007, Kab. Sikka	Alok	Nangalimang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
249	Dominikus Pondeng	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	Masih Terdapat 3 Ruang Kelas (1 Unit) SDK Bokang Yang Rusak	RT/RW.004/002, Dusun Bokang, Desa Lewomada, Kab. Sikka	Talibura	Lewomada	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	ruang kelas	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
250	Agnes Bela	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Saat Ini Terjadi Longsor di Depan banguan Sekolah SDN 191 Tuwa Sehingga membutuhkan Turap Pengaman 100 M2 dan Pagar Sekolah Sepanjang 75 M2.	Wolosambi, RT. 007, RW. 003, Dusun Wolooja, Desa Tuwa., Kab. Sikka	Tana Wawo	Tuwa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Tanawawo sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Tanawawo	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	175	M2	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
251	Muhamad Jafar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	belum memiliki pagar pengaman keliling sekolah di SDN Habijanang (200 meter)	SDN Habijanang Dusun Habijanang RT.015/RW.006 , Kab. Sikka	Waigete	Wairbleler	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Waigete sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Waigete	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	200	meter	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
252	YOSPEHUS NANGGONIS DA LOPEZ,S.Sos	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kurangnya Bibit Tanaman : Anakan Kakao sebanyak 4000 Untuk 4 Kelompok Tani , Anakan Pala sebanyak 4000 Untuk 4 Kelompok Tani dan Bibit Jagung Untuk 4 Kelompok Tani	RT 013/RW 006 ,Dusun Pakandeku , Kab. Sikka	Paga	Lowolabo	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Paga sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Paga	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	4000	anakan	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
253	Albertus Raga Sugiyono Pranoto, A.Md	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	Masih Kurangnya Meja dan Kursi Murid untuk SDN Hokok (30 Set) dan SDN Leku (50 Set)	SDN Hokok : Dusun Hokok, RT/RW : 005/003, dan SDN Leku : Dusun Ili, RT/RW : 002/001, Kab. Sikka	Bola	Wolonwalu	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	80	buah	-	Pengadaan Mebel Sekolah

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
254	Nolastus	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Masih ada lahan yang kosong untuk tanaman pertanian/perdagangan, maka masyarakat sangat membutuhkan pengadaan bibit tanaman Pala dan bibit tanaman Kopi Arabica	RT.001-RT.002/RW.001, Dusun Orinbelan, RT.003-RT.007/RW.002-RW.003, Dusun Gade, dan RT.008-RT.016/RW.004-RW.007, Dusun Klotong, Kab. Sikka	Bola	Bura Bekor	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
255	Yohanes Silvester, A.Md.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kelompok Reba Rak di Desa Runut memiliki lahan persawahan (20 hektar), tetapi kelompok tani ini belum memiliki handtractor untuk pengolahan lahan sawah sebanyak 2 unit.	Paudolor, Rt.14/Rw.04 - Dusun Ewa, Kab. Sikka	Waigete	Runut	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai usulan Prioritas Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2027 Kecamatan Waigete	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
256	Dominikus Pondeng	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Masih Terdapat Mahasiswa Kuliah Reguler dan Non Reguler (UT) Sebanyak 10 orang dari keluarga Desil 1 yang kurang mampu untuk membiayai Pendidikan di perguruan tinggi	Desa Lewomada, Kecamatan Talibur, Kab. Sikka	Talibura	Lewomada	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	10	Orang	-	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
257	BARTOLOMEUS JATO,SE	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Belum ada turap pengaman untuk SDI Damar Bima Unit 2 dengan ukuran panjang 100 m dan tinggi 1,25 m	SDI Damar Bima Unit 2, Dusun Tadat, RT 010/RW 005, Kab. Sikka	Hewokloang	Baomekot	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Hewokloang sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Hewokloang	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	100	meter	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
258	Elisabetina Heymas, S.E	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Sulitnya petani mendapatkan pupuk urea dan NPK untuk tanaman jagung karena tidak semua petani memiliki kartu tani . Pupuk Urea yang dibutukan sebanyak 1 ton dan NPK 1 ton	Gapoktan Ili Koli, Kab. Sikka	Kangae	Kokowahor	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui Musrenbang Kecamatan Kangae sesuai hasil Kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kangae	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
259	Aloysius G. N. Parera, S.Sos	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	Terdapat tiga ruang kelas 1, Kelas 2, dan kelas 3 yang rusak atap seng dan plafon bocor dan bangunan yang sudah rusak /retak	RT.014 RW.005 Kelurahan Nangalimang, Kab. Sikka	Alok	Nangalimang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	ruang kelas	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
260	Albertus Raga Sugiyono Pranoto, A.Md	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Masyarakat Membutuhkan Bibit Tanaman Pertanian seperti Kelapa Pandan dan Pengadaan Pupuk	Dusun Hokok dan Dusun Ili, Kab. Sikka	Bola	Wolonwalu	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
261	Yohanes Silvester, A.Md.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	SDK.065 Ewa mengalami kerusakan berat pada atap dan plafon sebanyak 3 ruang kelas sehingga dapat menggangu proses belajar mengajar.	Ewa, Rt.17/Rw.07 -Dusun Ewa, Kab. Sikka	Waigete	Runut	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Usulan prioritas Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2027 Kecamatan Waigete	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	ruang kelas	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
262	Solvinis Go Epi	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Tidak adanya pagar pengaman sekolah di SDI Nirulero, SDK Riit dan SDN Munegajut menyebabkan siswa/siswi bermain diluar halaman sekolah dan juga lokasi sekolah (SDN Munegajut dan SDI Nirulero) yang cukup membahayakan keselamatan peserta didik (SDI Nirulero 300m, SDN Munegajut 150m, SDK Riit 50m)	SDI Nirulero, RT.002/RW.001, Dusun Nirulero, SDK Riit, RT.007/RW.002,Dusun Riit, SDN Munegajut RT.013/RW.003, Dusun Belat, TK St.Yohanes RT.007/RW.002,Dusun Riit, Kab. Sikka	Nita	Riit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	paket	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
263	Nikolaus Nong, S.Kom	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Pembangunan Turap agar sekolah menghindari dari tanah Longsor sebanyak 1 Paket	SDN Lelowair, Rt 002/Rw.002, Dusun Karoknatar, Kab. Sikka	Waiblama	Natarmage	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Waiblama sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Waiblama	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
264	Afrinus Nong Salfa	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	Ada 4 ruang kelas yang kondisi atap seng sudah keropos sehingga sangat tergganggu suasana KBM pada saat musim hujan karena tirisan air hujan masuk ke dalam ruang kelas	SDK 051 WAIGETE, RT.015/RW.004/Dusun Waigete/Desa Egon , Kab. Sikka	Waigete	Egon	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Usulan prioritas Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2027 Kecamatan Waigete	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	4	ruang kelas	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
265	Muhamad Jafar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	belum memiliki pagar pengaman keliling di sekolah SDN Liangawo (200 meter)	SDN Liangawo Dusun Wolomapa RT. 010/RW.004, Kab. Sikka	Waigete	Wairbleler	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Waigete sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Waigete	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	200	meter	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
266	Dominikus Pondeng	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Masih terdapat lahan kosong seluas 10 Hektar yang belum ditanami bibit unggul (Kakao 5000 Anakan, Mente hibrida 5000 anakan dan Pisang Beranga 1000 Anakan) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Desa Lewomada, Kecamatan Talibura, Kab. Sikka	Talibura	Lewomada	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
267	Solvinis Go Epi	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	SDN Munegajut hanya memiliki 3 ruang kelas sedangkan rombongan belajar sudah mencapai kelas 6. Dibutuhkan penambahan 3 ruang kelas baru.	SDN Munegajut,RT.013/RW.003 Dusun Belat, Kab. Sikka	Nita	Riit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	ruang kelas	-	Pembangunan Ruang Kelas Baru

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
268	Nikolaus Nong, S.Kom	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Pembangunan Pagar Pengaman sebanyak 1 Paket agar peserta didik menjadi aman	SDN 075 Natarmage, Rt.007/Rw.004, Dusun Natarmage, Kab. Sikka	Waiblama	Natarmage	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Waiblama sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Waiblama	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
269	Elisabetina Heymas, S.E	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Banyak petani yang masih memiliki lahan pertanian yang kosong karena kekurangan bibit jagung lokal dan jagung hibrida. bibit jagung lokal 100 kg dan bibit jagung hibrida 100 kg	Gapoktan Ili Koli, Kab. Sikka	Kangae	Kokowahor	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui Musrenbang Kecamatan Kangae sesuai hasil Kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kangae	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
270	Solvinis Go Epi	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	3 ruang kelas SDI Nirulero dalam kondisi Rusak berat (atap, lantai, plafon) sehingga membuat ketidaknyamanan proses belajar mengajar.	SDI Nirulero,RT.002/RW.001,Dusun Nirulero, Kab. Sikka	Nita	Riit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	ruang kelas	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
271	Marianus Dare	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah (SD)	Perpustakaan SDK Kajowain rusak berat yaitu 1 ruangan	RW 002 RT 006 Dusun Kajowain, Kab. Sikka	Talibura	Waipaar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
272	Rofinus Inonsi Moa Luer	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	adanya ruang kelas yang rusak berat di SDI Ribang, sehingga dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar, dibutuhkan rehab berat 3 unit ruangan	Ribang, RT.002, RW.001, Dusun Ribang, Kab. Sikka	Nita	Tilang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	ruang kelas	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
273	Herlin Lado Powo, S.M.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	3 (tiga) Ruang kelas SDN Puho rusak berat (Atap bocor dan Plafon rusak)	SDN Puho, RT.004/RW.001, Dusun Puho, Kab. Sikka	Lela	Iligai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	ruang kelas	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
274	Petrus Selestinus Sewa, S.Sos	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Belum ada pagar pengaman SDN Wara sepanjang 200 meter sehingga dapat menganggu Proses KBM	SDN Wara RT.004/RW.02 Dusun Magetake, Kab. Sikka	Mego	Korobhera	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Mego sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Mego	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	200	meter	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
275	Marianus Dare	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Belum adanya mesin Giling Padi 3 paket	Dusun Lewomudat, Kab. Sikka	Talibura	Waipaar	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
276	Solvinis Go Epi	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Dasar	Kondisi mess guru SDI Nirulero dalam kondisi rusak berat (Atap, plafon, lantai, dinding, pintu, jendela) sehingga tidak bisa di tempati guru.	SDI Nirulero, RT.002/RW.001,Dusun Nirulero, Kab. Sikka	Nita	Riit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
277	Sergius Sareng	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	Terdapat 50 buah kursi, 50 buah meja dan 2 buah lemari di SDN Maget Legar dalam kondisi rusak dan tidak bisa digunakan.sehingga perlu pengadaan kursi meja sebanyak 50 pasang dan lemari 2 buah.	SDN Maget Legar,RT 014 RW 007,Dusun Legar,Desa Wolomotong, Kab. Sikka	Doreng	Wolomotong	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	102	buah	-	Pengadaan Mebel Sekolah
278	MIKAELA ERMIDA INJA	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	belum adanya alat mesin pertanian pada kelompok tani woloone dan kelompok tani rempe sikka sehingga perlu adanya pengadaan hand tracktor sebanyak 2 Unit	RT.018 Dusun Nangablo dan RT012 Dusun Woloara, Kab. Sikka	Mego	Dobo	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Mego sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Mego	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	Unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
279	Donatus Rada, S.Pd	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Belum adanya Pagar Pengaman Sekolah pada SDI Detunaka Dusun Detuki RT 003 RW 002 dengan Volume 200 m	RT 003 RW 002 Dusun Detuki , Kab. Sikka	Tana Wawo	Poma	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Tanawawo sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Tanawawo	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	200	meter	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
280	Agnes Bela	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	masih terdapat lahan pertanian Masyarakat yang kosong dan belum ada Tanaman yang ditanami sehingga membutuhakan Bantuan Tanaman Umur Panjang (TUP) Berupa Bibitan Anakan Pala dan Anakan Cengkeh untuk 13 Kelompok Tani Di Desa Tuwa.	Dusun Wolooja, Dusun Paipengadan Dusun Lokaroka, Kab. Sikka	Tana Wawo	Tuwa	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Tanawawo sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Tanawawo	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	13	kelompok	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
281	Willem Woda	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD	Masi terdapat ruangan guru SDN PIGANG BEKOR tidak layak dipakai sebanyak 1 unit.	Dusun Mageramut, RT.002/RW.001, Kab. Sikka	Waigete	Maha Kelan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Usulan prioritas Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2027 Kecamatan Waigete	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
282	Rofinus Inonsi Moa Luer	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Masih kurangnya sarana MCK di SDK Tilang, sehingga peserta didik sulit dalam mengakses sarana MCK yang bisa berdampak buruk buat kesehatan siswa	SDK Tilang, RT.012/RW.004 Dusun Tilang, Kab. Sikka	Nita	Tilang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
283	Ignasius Ivonius, S. Sos	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SMP)	Masih terdapat ruang kelas SMP St.Antonius Boganatar yang rusak 2 Ruangan	Dusun Boganatar, Kab. Sikka	Talibura	Kringa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	ruang kelas	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
284	Firminus Marianus	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Banyak tanaman Kelapa di Desa Lela terkena hama penyakit sehingga masyarakat membutuhkan anakan kelapa genja entok	Desa Lela, Kab. Sikka	Lela	Lela	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
285	Firminus Marianus	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Banyak kakao terkena hama penyakit di Desa Lela sehingga masyarakat membutuhkan anakan kakao	Desa Lela, Kab. Sikka	Lela	Lela	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
286	Daniel Desa, S.Fil.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Masih terdapat lahan tidur di Desa Bloro sehingga dibutuhkan bantuan bibit tanaman Pala sebanyak 15.000 anakan,pisang kepok 12.000 anakan,pepaya kalifornia 15.000 anakan sehingga dapat dimanfaatkan potensi lahan untuk dapat meningkatkan produksi tanaman pertanian di Desa Bloro	RT 001 - RT 013, Kab. Sikka	Nita	Bloro	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
287	Ignasius Ivonius, S. Sos	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	masih kurangnya mebel (Meja 50 Buah dan Kursi 50 Buah) di SDN Kringa	Dusun Kringa, Kab. Sikka	Talibura	Kringa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	100	buah	-	Pengadaan Mebel Sekolah

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
288	Sergius Sareng	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	Terdapat 50 buah kursi, 50 buah meja dan lemari 2 buah di SDN Aiwuat dalam kondisi rusak dan tidak bisa digunakan sehingga perlu pengadaan kursi dan meja baru sebanyak 50 pasang dan lemari 2 buah.	SDN Aiwuat RT 016 RW 008,Dusun Legar,Desa Wolomotong, Kab. Sikka	Doreng	Wolomotong	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pengadaan Mebel Sekolah
289	Muhamad Jafar	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	kurangan lengkapnya kursi dan meja dalam menunjang proses KBM di SDN Habijanang (70 buah kursi dan 70 buah meja)	SDN Habijanang Dusun Habijanang RT.015/RW.006, Kab. Sikka	Waigete	Wairbleler	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Waigete sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Waigete	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	70	set	-	Pengadaan Mebel Sekolah
290	Marianus Dare	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	belum adanya Mesin Potong Rumput Yang Dibutuhkan Sebanyak 4 unit	Dusun Natagelo, Kab. Sikka	Talibura	Waipaar	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	4	Unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
291	Sergius Sareng	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	Terdapat 50 buah kursi,50 buah meja dan 2 buah lemari di SDN Wodonwair dalam kondisi rusak dan tidak bisa digunakan sehingga perluh pengadaan kursi,meja baru sebanyak 50 pasang dan lemari 2 buah.	SDN Wodonwair RT 009 RW 004 Dusun Maget,Desa Wolomotong, Kab. Sikka	Doreng	Wolomotong	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pengadaan Mebel Sekolah
292	Antonius Moa	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	Jumlah siswa siswi di SMPN 2 Bola sangat banyak dengan jumlah siswa sebanyak 146 siswa dan jumlah guru dan pegawai sebanyak 23 orang sementara MCK yang tersedia hanya 1 buah sehingga perlu pengadaan MCK sebanyak 3 unit , (1 untuk siswa laki laki dan 1 unit untuk siswa perempuan dan 1 unit untuk guru dan pegawai) ,karena MCK juga dapat mendukung kenyamanan dan keamanan dalam proses belajar mengajar.	SMPN 2 Bola, RT.003/RW.001, Dusun Dat, Desa Waihawa, Kab. Sikka	Doreng	Waihawa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	unit	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
293	Sergius Sareng	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	Terdapat 50 buah kursi,50 buah meja dan 2 buah lemari di SDI Eha dalam kondisi rusak dan tidak bisa digunakan sehingga perlu pengadaan kursi dan meja baru sebanyak 50 pasang dan lemari 2 buah.	SDI Eha ,RT 011 RW 005,Dusun Eha,Desa Wolomotong, Kab. Sikka	Doreng	Wolomotong	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	52	buah	-	Pengadaan Mebel Sekolah
294	Ignasius Ivonius, S. Sos	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Sarana prasarana SDK Boganatar dan SDN Kringa yang belum lengkap (2 Paket)	Dusun Boganatar dan Dusun Kringa, Kab. Sikka	Talibura	Kringa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	paket	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
295	Flavianus Eksekil Edomeko, S.E	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Dasar	Belum tersedianya Gedung untuk Guru sebanyak 3 Unit	SDI Lisabheto,Dusun Serowulu,RT/RW 006/003 Desa Begu., Kab. Sikka	Paga	Begu	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Paga sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Paga	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	unit	-	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
296	Donatus Rada, S.Pd	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Diperlukan Pembangunan Pagar Pengaman di Sekolah SDN Poma sehingga menjaga keamanan lingkungan sekolah, melindungi aset-aset sekolah serta tidak mengganggu aktifitas pada saat KBM berlangsung sepanjang 250 m	RT 003 RW 002 Dusun Detuki, Kab. Sikka	Tana Wawo	Poma	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Tanawawo sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Tanawawo	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	250	meter	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
297	Silvanus Fransisko	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (SMP)	Belum ada Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU untuk SMPK St. Robertho Biket. 1 Ruangan	RT.005/RW.003, Dusun Aibura, Kab. Sikka, Kab. Sikka	Waigete	Aibura	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Usulan prioritas Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2027 Kecamatan Waigete	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	ruang kelas	-	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
298	Flavianus Eksekil Edomeko, S.E	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	kurangnya pupuk dan obat obatan unutk pertanian permintaan sebanyak 4 kelompok tani.	Desa Begu, Kab. Sikka	Paga	Begu	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Paga sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Paga	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	4	Paket	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
299	Sergius Sareng	Pengadaan Mebel Sekolah (SMP)	Masih terdapat kekurangan kursi, meja dan lemari di SMPN 43 Wolomotong, selama ini masih memakai kursi pinjaman dari BUMDES Tanah Bunga Wolomotong. Sehingga perlu pengadaan kursi dan meja sebanyak 100 pasang dan lemari 3 buah	SMPN 43 Wolomotong, RT 014 RW 007, Dusun Legar Desa Wolomotong, Kab. Sikka	Doreng	Wolomotong	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	103	buah	-	Pengadaan Mebel Sekolah
300	Laurensius Se	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Masih kurangnya Pengetahuan dan Ketrampilan Petani dalam mengelola sistem pertanian yang lebih maju sehingga petani membutuhkan pelatihan guna meningkatkan keterampilan	Dusun Wolojita, Dusun Loke, Kajubeda, Kab. Sikka	Tana Wawo	Loke	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Tanawawo sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Tanawawo	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
301	Rofinus Inonsi Moa Luer	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	banyak tanaman perkebunan yang sudah tua dan rusak, dan banyak lahan yang masih kosong sehingga 20 kelompok tani di Desa Tilang perlu diadakan intensifikasi dan pengadaan bibit tanaman perkebunan (Kakao, Pala, Alpokat, Kopi dll)	RT.01- RT.012 Desa Tilang, Kab. Sikka	Nita	Tilang	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	20	Paket	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
302	Elias Missen Nong,SP	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	3 Ruangan Kelas di SDN Guhi sudah tidak layak untuk digunakan karena rusak parah sehingga dibutuhkan rehab karena lantai dan dindingnya sudah retak parah akibat hujan yang berkelanjutan. Bangunannya juga sudah agak lama	SDN Guhi, RT.006/RW.002 Dusun Tobang Desa Nangablo, Kab. Sikka	Nita	Nangablo	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	ruang kelas	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
303	Silvanus Fransisko	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Virus ASF sehingga banyak babi yang mati sebanyak 250 Ekor	Kelompok Tani Wihing Peni, Nuran Human II dan Sinar Watu jajin, Kab. Sikka	Waigete	Aibura	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Waigete sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Waigete	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
304	Marianus Moa, S.Pd	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	masih ada 3 ruang kelas yang rusak berat (plafon,atap,pintu,jendela)	SDI Liwubao RT011 RW 006 Dusun Liwubao, Kab. Sikka	Hewokloang	Wolomapa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Hewokloang sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Hewokloang	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	ruang kelas	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
305	Elias Missen Nong,SP	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	Banyak Meja, Kursi di SDN Guhi sudah tidak layak untuk digunakan karena Rusak Parah, Sehingga mereka membutuhkan Meja 20 Buah dan Kursi 20 Buah. Dan di Ruangan Kelas juga belum ada lemari sehingga dibutuhkan Lemari sebanyak 5 Buah.	SDN Guhi, RT.006/RW.002 Desa Nangablo, Kab. Sikka	Nita	Nangablo	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pengadaan Mebel Sekolah

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
306	Willem Woda	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	produksitifitas jagung hibrida, jagung pulut manis dan jagung kuning manis di dusun mageramut, dusun pigang, dan dusun lihedogot mengalami gagal panen beberapa tahun terakhir, jadi perlu diadakan bibit jagung hibrida sebanyak 30 paket, jagung pulut manis sebanyak 30 paket dan jagung kuning manis sebanyak 30 paket.	Desa Mahe Kelan, RT.001 sampai RT.016, Kab. Sikka	Waigete	Maha Kelan	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Waigete sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Waigete	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
307	Benyamin Bani	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Keadaan keamanan sekolah kurang terjamin sehingga dibutuhkan pembanguna pagar sekolah SDI Mbiramboa seluas 150 Meter	Rt.003/Rw.002, Dusun Rejo, Desa Rejo, Kecamatan Paga, Kab. Sikka	Paga	Rejo	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Paga sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Paga	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	150	meter	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
308	Antonius Moa	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Banyak petani yang masih menggunakan alat pertanian tradisional dalam mengelola lahan pertaniannya sehingga hasil yang diperoleh belum maksimal sehingga perlu pengadaan 1 buah traktor untuk 10 kelompok tani dalam mengelola lahan pertanian. Selama ini petani menyewa traktor dari penyedia lain dengan biaya sewa yang cukup mahal	10 Kelompok tani yakni: Tahan Derita, Megu Moong, Hiro Heling, Mage Wolot, Bina Dana, Sudan Sogor, Kasih Sejahtera, Sede Lelo, Mekar Berkembang dan Blatan Pahar yang ada di Dusun Dat, Dusun Habibola dan Dusun Natar Mapat., Kab. Sikka	Doreng	Waihawa	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
309	Willem Woda	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Di desa mahe kelan masi mengalami penurunan produktifitas hasil panen di sebabkan oleh tidak adanya pupuk mpk plus dan pupuk urea.	Desa mahe kelan, RT.001 sampai RT.016, Kab. Sikka	Waigete	Maha Kelan	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai usulan Prioritas Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2027 Kecamatan Waigete	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
310	Benyamin Bani	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	kurang suburnya tanaman perkebunan sehingga tanaman hasilnya kurang begitu baik dan banyak maka perluh di pengadaan pupuk urea,kcl untuk 12 kelompok Tani di desa rejo, dan masing - masing kelompok mendapatakan 30 karung.	Dusun rejo, dusun tanalangi dan Dusun Nati, Kab. Sikka	Paga	Rejo	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Paga sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Paga	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
311	Elisabeth Bergitha Rihi	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	Selama ini maubeler (kursi, meja) yang digunakan oleh siswa SDI Nara sudah tidak layak di pakai karena banyak yang sudah rusak (100 unit)	SDI Nara, RT.012/RW.004, Dusun Nara II, Kab. Sikka	Alok Timur	Lepo Lima	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Alok Timur sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Alok Timur	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	100	unit	-	Pengadaan Mebel Sekolah

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
312	Bernardus Vinsensius, S.E.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Masih terdapat Ruangan WC yang rusak sebanyak 2 Unit sehingga menganggu Aktivitas belajar anak di sekolah SD Nebe. perlu ada perbaikan WC sebanyak 2 unit .	Dusun Nebe BC RT : 009/ RW : 005 Desa Bangkoor, Kec. Talibura, Kab. Sikka	Talibura	Bangkoor	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	unit	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
313	Bernardus Vinsensius, S.E.	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	Masiih ada Kursi dan meja yang Rusak Karena Mengangu KBM di Sekolah di SD Nangamerah. sehinnga perlu ada Perbaikan mebeiler sebanyak 60 Unit.	Dusun Nebe A ,RT 001/ RW 001 Desa Bangkoor, Kec. Talibura, Kab. Sikka	Talibura	Bangkoor	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	60	unit	-	Pengadaan Mebel Sekolah
314	Paskalis Nong Roby, S.Si	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Tidak adanya mesin perontok padi, sehingga hasil panen petani khusus padi di Kelompok Tani Damar Dolor tidak maksimal	RT.020 RW.006 Nangahure Bukit, Kab. Sikka	Alok Barat	Wuring	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Alok Barat sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Alok Barat	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
315	Bernardus Vinsensius, S.E.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	belum ada Mesin pengolahan lahan (Hand Traktor) dan Mesin Rontok Sehinga Proses Pengolahan lahan dan pasca panen menjadi Terlambat,	Dusun Nebe BC Dan Nebe A Desa Bangkoor , Kab. Sikka	Talibura	Bangkoor	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
316	Petrus Meto	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (SD)	masih belum terdapat alat praktik dan peraga peserta didik yaitu alat musik drumband sebanyak 1 Paket pada SDN Gaikiu	RT.001/RW.001. Dusun Gaikiu, Desa Bu Utara, Kab. Sikka	Tana Wawo	Bu Utara	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Tanawawo sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Tanawawo	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
317	Marselinus M. Wisang, S.E.	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	1 Ruang kelas darurat SDK NUABHANA rusak berat, atap ambrol, dan tidak dapat digunakan lagi akibat diterjang angin. maka dari itu dibutuhakan pembangunan ulang satu unit ruang kelas baru untuk SDK NUABHANA DAN dan penambahan satu unit mck	RT.01/RW.01 DUSUN BHANA, Kab. Sikka	Paga	Wolorega	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Paga sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Paga	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	ruang kelas	-	Pembangunan Ruang Kelas Baru
318	Paskalis Nong Roby, S.Si	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Tidak adanya hand traktor, sehingga kegiatan pengolahan tanah dan lahan pertanian di Kelompok Tani Karya Bersama Patisomba tidak maksimal	RT.036 RW.009 Patisomba, Kab. Sikka	Alok Barat	Wuring	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Alok Barat sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Alok Barat	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
319	Bernardus Vinsensius, S.E.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	belum terdapat pagar Pelindung Sekolah Sepanjang 120 Meter di sekolah SD Nangamerah.	Dusun Nebe A. RT 001/ RW 001 Desa Bangkoor, kec. Talibura, Kab. Sikka	Talibura	Bangkoor	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	120	meter	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
320	Paskalis Nong Roby, S.Si	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Tidak adanya mesin pencacah pupuk kompos, sehingga aktivitas dan kegiatan pertanian di Kelompok Tani KWT Kembang Baru berjalan kurang maksimal	RT.017 RW.006 Nangahure Bukit, Kab. Sikka	Alok Barat	Wuring	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Alok Barat sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Alok Barat	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
321	Bonifasius Wangge	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	Ruang kelas sudah tidak layak di pakai di SDK Ratekombo 4 Unit	Rt 010 Rw 003 Dusun Mbeja, Kab. Sikka	Tana Wawo	Bu Watuweti	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Tanawawo sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Tanawawo	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	4	ruang kelas	-	Pembangunan Ruang Kelas Baru
322	Patrisius	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Dasar	Ketiadaan Mess guru sehingga menghambat KBM di SDI Tadat.	RT.17/RW 6 Dusun wuu, Desa Wolokoli, Kecamatan Bola, Kab. Sikka	Bola	Wolokoli	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	unit	-	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
323	Ignasius Wangge	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Kurangnya tersedia meubeler untuk SDK dan SDN Nuaria	Desa Detubinga, Kab. Sikka	Tana Wawo	Detubinga	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Tanawawo sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Tanawawo	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
324	Marselinus M. Wisang, S.E.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Masih ada warga atau kelompok tani yang belum bisa membeli pupuk dengan harga terjangkau karena itu perlu pengadaan pupuk npk, urea (pupuk NPK 250 kg, pupuk urea 250 kg) dengan sasaran untuk 15 kk yang memiliki sawah	RT.01/RW01 dan Rt.05/rw04 Dusun Bhana, Kab. Sikka	Paga	Wolorega	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Paga sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Paga	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
325	Thomas Yan Boy	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	Ruangan yang ada saat ini masih dalam keadaan darurat sehingga tidak dapat digunakan untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar di SDI Kaki Hebar sehingga membutuhkan pembangunan ruang kelas vilial /kelas jauh untuk SDI Kaki Hebar dengan volume 3 ruang /unit	SDI Kaki Hebar di RT.001/RW.001 Dusun Watuplota Desa Mahe Tanah Kecamatan Doreng, Kab. Sikka	Doreng	Mahe Tanah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	ruang kelas	-	Pembangunan Ruang Kelas Baru

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
326	Donatus Dona Rokus	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (SD)	Belum adanya Gedung Perpustakaan di SDK Apinggoot, dibutuhkan 1 unit gedung perpustakaan	RT. 005/RW. 002 Dusun Apinggoot Desa Umagera, Kab. Sikka	Kewapante	Umagera	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Kewapante sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kewapante-	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
327	Rusnadi Rus	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	Belum adanya Ruang Laboratorium komputer (1 unit)	SMPN Werang, Dusun Werang, RT 11, RW 05, Kab. Sikka	Waiblama	Werang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Waiblama sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Waiblama	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
328	Thomas Yan Boy	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Belum ada gedung SDI Kaki Hebar namun sudah ada kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan ruang-ruang darurat sehingga membutuhkan gedung sekolah dasar sebanyak 1 unit	RT.001/RW.001 Dusun Watuplota Desa Mahe Tanah Kecamatan Doreng, Kab. Sikka	Doreng	Mahe Tanah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
329	Rusnadi Rus	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Belum adanya jenis tanaman Kelapa Genja (100 pohon)	12 Kelompok Tani Desa Werang, Kab. Sikka	Waiblama	Werang	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Waiblama sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Waiblama	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	100	anakan	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
330	Thomas Yan Boy	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	Kursi dan meja siswa sudah banyak yang rusak dan tidak layak pakai di SDI Kaki Hebar sehingga membutuhkan meja dan kursi siswa sebanyak 60 buah	SDI Kaki Hebar di RT.001/RW.001 Dusun Watuplota Desa Mahe Tanah Kecamatan Doreng, Kab. Sikka	Doreng	Mahe Tanah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	60	set	-	Pengadaan Mebel Sekolah
331	Thomas Yan Boy	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Belum tersedia buku modul belajar untuk siswa SDI Kaki Hebar sehingga membutuhkan modul belajar sebanyak 120 buku	SDI Kaki Hebar di RT.001/RW.001 Dusun Watuplota Desa Mahe Tanah Kecamatan Doreng, Kab. Sikka	Doreng	Mahe Tanah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	120	buku	-	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
332	Thomas Yan Boy	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Belum tersedia bibit tanaman pala sehingga membutuhkan bibit tanaman pala sebanyak 500 pohon untuk 3 kelompok di Desa Mahe Tanah yakni Kelompok Cinta Damai, Kelompok Maju Bersama dan Kelompok KWT Puter Mudeng	Kelompok Cinta Damai, Kelompok Maju Bersama dan Kelompok KWT Puter Mudeng Desa Mahe Tanah Kecamatan Doreng, Kab. Sikka	Doreng	Mahe Tanah	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
333	Daniel Desa, S.Fil.	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	Belum adanya mebel yang cukup memadai dalam mendukung proses belajar mengajar di SDK Bloro sehingga dibutuhkan lemari buku untuk 6 ruangan kelas (6 bh), Rak buku perpustakaan (1 bh) dan Meja Guru (6 bh) di SDK Bloro	SDK Bloro, RT 007/RW 003 Dusun Bloro, Kab. Sikka	Nita	Bloro	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pengadaan Mebel Sekolah
334	Donatus Dona Rokus	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Belum adanya Hand Tractor di Desa Umagera, dibutuhkan 3 unit Hand Tractor	Desa Umagera, RT. 005/RW. 002 Dusun Apinggoot, Kab. Sikka	Kewapante	Umagera	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Kewapante sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kewapante-	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	Unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
335	Daniel Desa, S.Fil.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Bangunan SDI BLORO belum memiliki turap pengaman sehingga saat musim penghujan sampah dan air dari rumah warga yang berada pada posisi yang lebih tinggi dari lokasi sekolah meluap ke lingkungan sekolah dan sebaliknya air dan sampah dari sekolah meluap kembali ke rumah warga yang rumahnya berada di lokasi yang lebih rendah sehingga dibutuhkan pembangunan turap pengaman bangunan sekolah sepanjang 250 meter	SDI Bloro, RT 004/RW 002 Dusun Wukak, Kab. Sikka	Nita	Bloro	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	250	meter	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
336	Katarina Haryanti	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Fasilitas MCK hanya 2 closet dan kondisi rusak berat, jumlah ruangan MCK hanya 2 unit, sehingga yang ada digunakan bersamaan guru dan murid, membutuhkan penambahan 2 unit ruang dan closet untuk guru dan 3 unit ruang dan closet untuk siswa	SDK 064 Watubala, RT.009/RT.003, Dusun Watubala , Kab. Sikka	Waigete	Wairterang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai usulan Prioritas Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2027 Kecamatan Waigete	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	5	unit	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
337	Katarina Haryanti	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Tidak ada mesin untuk pengolahan hasil tanaman jagung, kelompok warga petani masih menggunakan alat tradisional, sehingga warga membutuhkan 2 mesin peluruh jagung dan 2 mesin penggiling jagung	RT.01, Dusun Watubala Kelompok Tani Boa Gai dan RT.011, Dusun Wodong, Kelompok Tani Mior Wodong, Kab. Sikka	Waigete	Wairterang	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai usulan Prioritas Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2027 Kecamatan Waigete	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	4	Unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
338	Sumarni Elnis	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	Penambahan ruang kelas 3 Unit	SDI PATIMOA RT 007 / RW 003 Dusun Patimoa Desa Kolidetung, Kab. Sikka	Lela	Kolidetung	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	ruang kelas	-	Pembangunan Ruang Kelas Baru

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
339	Gabriel Berkmans Gois	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Belum tersedianya fasilitas pendukung berupa meja dan kursi belajar bagi anak PAUD Kasih Mama Woloau, saat ini para siswa membawa kursi dari rumah masing-masing sehingga perlu pengadaan meja dan kursi belajar siswa sebanyak masing-masing 36 buah	PAUD Kasih Mama Woloau, RT006/RW006 Dusun Woloau, Kab. Sikka	Mego	Dobo Nuapuu	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Mego sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Mego	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	36	set	-	Pengadaan Perlengkapan PAUD
340	Lanterdiana Meti	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	dalam meningkatkan efisiensi pengolahan lahan, percepatan tanam, dan peningkatan produktifitas pertanian maka dibutuhkan 10 handtraktor	Desa Ladolaka, Kab. Sikka	Palue	Ladolaka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Palue sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Palue	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	10	Unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
341	Lanterdiana Meti	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	menjaga ketahanan pangan, meingkatkan kesejahteraan petani, dan memastikan pasokan serta kualitas pupuk maka dibutuhkan pupuk Urea & NPK sebanyak 2 ton	Desa Ladolaka, Kab. Sikka	Palue	Ladolaka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Palue sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Palue	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
342	Lanterdiana Meti	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	masih kurangnya pemahaman peternak dalam meningkatkan efisiensi produksi, kesehatan ternak dan pendapatan Peternak maka dibutuhkan anakan babi	Desa Ladolaka, Kab. Sikka	Palue	Ladolaka	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Palue sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Palue	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
343	Sumarni Elnis	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (SD)	Penambahan Laptop 4 Unit untuk kelancaran ujian peserta didik	SDI PATIMOA RT 007 / RW 003 DUSUN PATIMOA DESA KOLIDETUNG, Kab. Sikka	Lela	Kolidetung	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	4	unit	-	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
344	Yakobus Ronsali Jogo	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	KBM sudah berjalan selama kurang lebih 8 Tahun pada kondisi Bangunan Darurat dan Lahan Hasil Swadaya Murni masyarakat Dusun Kilawair seingga kami membutuhkan 3 Ruang kelas Baru	SDK 097 Kloangaur, Dusun Kilawair RT 007,RW 003 , Kab. Sikka	Waigete	Watudiran	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai usulan Prioritas Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2027 Kecamatan Waigete	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	ruang kelas	-	Pembangunan Ruang Kelas Baru

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
345	Ignatius Cua	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	SDN Kujuwongga dan SDI Langawai kekurangan kursi dan meja siswa sebanyak 50 meja dan 100 kursi	DN Kujuwongga dan SDI Langawai , Kab. Sikka	Palue	Lidi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Palue sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Palue	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	150	buah	-	Pengadaan Mebel Sekolah
346	Elias Missen Nong,SP	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Di SDN Guhi masih kekurangan Laptop, saat ini hanya tersedia 2 unit dengan Spek yang lama sedangakan jumlah peserta didik sebanyak 105 sehingga mereka membutuhkan tambahan Laptob Sebanyak 5 Unit	SDN Guhi, RT.006/RW.002 Desa Nangablo, Kab. Sikka	Nita	Nangablo	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Nita sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Nita	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	5	unit	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
347	STEPHANUS RAGA, S.Agr	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	terdapat 2 Sekolah sekolah yang kondisi bangunan / pondasi sudah tergantung yang dapat mengakibatkan kerusakan pada bangunan tersebut dan tidak terjamin keamanannya sekitar 50 m	* RT 07 RW 03 Dusun Napunkontas (SDI Hale) ** RT 10 RW 04 Dusun Napunkontas (SDN Wairpuat), Kab. Sikka	Mapitara	Hale	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	50	meter	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
348	Yakobus Ronsali Jogo	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Rendahnya Pendapatan masyarakat untuk membeli bibit dan juga tinggihnya permintaan pasar atas beberapa komoditi tersebut seingga perlu Pengadaan Bibit Kelapa Hibrida (1000 Anakan), Aplokat Mentega (1000 Anakan), dan Mangga Harum Manis (1000 Anakan)	Dusun Warut, Dusun Kilawair dan Dusun Kloangaur , Kab. Sikka	Waigete	Watudiran	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai usulan Prioritas Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2027 Kecamatan Waigete	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
349	M. Yosefina Longge	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	masih kurangnya sarana prasaran pendidikan berupa meja kursi guru, lemari, panan tulis dan papan white board untuk SDK Tomu dan Lemari, Papan tulis, papan informasi dan whiteboard untuk SDK Lei	SDK Tomu dan SDK Lei, Kab. Sikka	Palue	Tuanggeo	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Palue sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Palue	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	paket	-	Pengadaan Mebel Sekolah
350	M. Yosefina Longge	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Rendahnya kualitas hasil usaha Tani karena masih menggunakan metode pertanian tradisional oleh karena itu dibutuhkan mesin rontok kacang hijo, meisn potong rumput, mesin giling jagung, mesin pengeolah pakan ternak masing-masing 3 unit	Desa Tuanggeo, Kab. Sikka	Palue	Tuanggeo	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Palue sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Palue	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
351	Rentika Konstantin Karwayu,S.STP.,M.AP	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	Sekolah SDK Bhakthyarsa Maumere kekurangan kursi dan meja karena banyak kursi dan meja yang sudah rusak dan tidak layak dipakai, sehingga dibutuhkan pengadaan 50 unit meja dan 50 unit kursi	SDK Bhakthyarsa Maumere, RT, 014 RW. 003, Kab. Sikka	Alok Timur	Nangameting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Alok Timur sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Alok Timur	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	50	set	-	Pengadaan Mebel Sekolah
352	YOSEF SUYANTO NONG FILES, S.Pt	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	air pdam yang ada debitnya tidak mencukupi kebutuhan MCK di SDI Manunai, terdapat 1 buah sumur namun untuk memudahkan penyaluran air untuk siswa dan guru dibutuhkan 1 Unit mesin pompa air	SDI Manunain, RT. 035 RW. 009, Kab. Sikka	Alok Timur	Waioti	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Alok Timur sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Alok Timur	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
353	Klementia	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	Terdapat kondisi 5 ruang kelas yang rusak berat. Sehingga dibutuhkan Rehabilitasi berat 5 ruang kelas SDK Bola	SDK Bola, RT 009/RW 002 Dusun Tarunggawan, Kab. Sikka	Bola	Bola	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	5	ruang kelas	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
354	Benedikta Ngole	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Kurangnya Meja dan Kurasi	SDK Uwa II dan SDN Uwa I, Kab. Sikka	Palue	Maluriwu	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Palue sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Palue	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
355	Benedikta Ngole	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	Kurangnya sarana dan prasarana	SMPK Rokatenda, Kab. Sikka	Palue	Maluriwu	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Palue sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Palue	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
356	Benedikta Ngole	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (SD)	Kurangnya alat praktek	SDK Uwa II dan SDN Uwa I, Kab. Sikka	Palue	Maluriwu	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Palue sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Palue	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
357	Ignatius, SE.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	Keamanan dan ketertiban lingkungan sekolah terrganggu, karena lingkungan sekolah terlalau terbuka, sehingga akses keluar masuk siswa kelingkungan sekolah terlalu bebas, sulit diatur dan tidak bisa dikontrol secara baik	Jl Litbang RT 03 RW 09, Kab. Sikka	Alok	Kota Uneng	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
358	Laurensius Se	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	Beberapa atap ruang kelas di SDI Detu Duli yang sudah mulai rusak (Bocor) sehingga mengganggu aktivitas belajar-menagajar di ruang kelas, sehingga membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berjalan lancar.	RT 001, RW 001 Dusun Detu Duli, Kab. Sikka	Tana Wawo	Bu Barat	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Tanawawo sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Tanawawo	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
359	Klementia	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	tanaman anakan pala,Kelapa dalam,bibit kakao merupakan tanaman yang dapat meningkatkan nilai ekonomi bagi para kelompok tani. sehingga perlu pengadaan anakan anakan pala,Kelapa dalam,bibit kakao untuk 11 Kelompok tani di Desa Bola	Desa Bola, Kab. Sikka	Bola	Bola	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan program prioritas pembangunan kabupaten sikka tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	11	Paket	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
360	Klaudina Rosline Lenga	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	Kurangnya ruang kelas di SD	Edo,RT/RW:08/02, Kab. Sikka	Palue	Kesokoja	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Palue sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Palue	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Pembangunan Ruang Kelas Baru
361	Silvanus Abson	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Belum memadai prasarana pertanian berupa Hand Tracktor sehingga dibutuhkan Pengadaan hand traktor untuk 5 kelompok	Desa Done, Kab. Sikka	Magepanda	Done	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui Musrenbang Kecamatan Magepanada sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentigan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Magepanda	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Unit	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
362	Klaudina Rosline Lenga	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Adakan pelatihan kelompok tani	DESA KESOKOJA , Kab. Sikka	Palue	Kesokoja	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Palue sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Palue	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
363	Klaudina Rosline Lenga	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Adakan obat untuk ternak ayam, kambing dan babi	Desa Kesokoja , Kab. Sikka	Palue	Kesokoja	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Palue sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Palue	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
364	Silvanus Abson	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Belum terdapat pagar pembatas menjadikan lingkungan sekolah kurang aman bagi siswa. Dibutuhkan Pembangunan Pagar Pengaman SDI Ladubewa	SDI Ladubewa, Dusun ladubewa RT.010 dan RW.04 Desa Done, Kab. Sikka	Magepanda	Done	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui Musrenbang Kecamatan Magepanada sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentigan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Magepanda	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
365	Klaudina Rosline Lenga	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Pengadaan pupuk untuk tanaman pertanian	Desa Kesokoja , Kab. Sikka	Palue	Kesokoja	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Palue sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Palue	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
366	Klaudina Rosline Lenga	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (SD)	Pelatihan para guru yang belum mengerti atau mengenal tentang IT	SDK EDO,Desa Kesokoja , Kab. Sikka	Palue	Kesokoja	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Palue sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Palue	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
367	Klaudina Rosline Lenga	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	Ruang kelas rusak berat	SDK EDO Desa Kesokoja , Kab. Sikka	Palue	Kesokoja	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Palue sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Palue	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
368	Makarius Oskar	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Sarana Prasarana PAUD Debrito seperti kursi, meja, lemari, buku-buku bacaan, APE(APE dalam dan APE luar) belum memadai	Dusun Bajo, Dusun Jedawair, Dusun Kloangbolat, Kab. Sikka	Kewapante	Geliting	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Kewapante sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Kewapante-	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pengadaan Perlengkapan PAUD
369	Arnoldus Aliando	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah (SD)	Gedung Perpustakaan SDI Edat dengan volume 1 ruang mengalami rusak parah dan perlu diperbaiki	SDI Edat di RT.002/RW. 001 Dusun Kongas Desa Wogalirit., Kab. Sikka	Doreng	Wogalirit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	ruang kelas	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
370	Arnoldus Aliando	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Tanaman Pala milik warga Desa Wogalirit tumbang/rusak akibat angin pada bulan Januari Tahun 2026 sehingga membutuhkan pengadaan bibit/anakan Pala untuk 15 Kelompok Tani sebanyak 50.000 pohon	Desa Wogalirit untuk 15 kelompok tani, Kab. Sikka	Doreng	Wogalirit	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	50000	anakan	-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
371	Emanuel Carles Idung, S.Pi.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD	Guru di SDK 093 Maumere IV tidak punya tempat untuk melaksanakan Pertemuan maupun menyimpan administrasi pembelajaran	Jl. Wairklau 4 RT.004/RW.007 Kel. Madawat, Kab. Sikka	Alok	Madawat	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
372	Emanuel Carles Idung, S.Pi.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Untuk Siswa/siswi SDK 093 Maumere IV yang sakit tidak punya tempat beristirahat	Jl. WairklauNo. 4 RT.004/RW.007 kel. Madawat , Kab. Sikka	Alok	Madawat	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah (Pembangunan UKS)	1	unit	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
373	Emanuel Carles Idung, S.Pi.	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	Jumlah Ruangan di SDI Wairklau tidak sesuai dengan Jumlah Peserta Didik.Keadaan sangat tidak optimal dan menggangu aktifitas belajar di kelas.	Jl. Cempaka Perumnas RT.003/RW.003 Madawat , Kab. Sikka	Alok	Madawat	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Pembangunan Ruang Kelas Baru
374	Antonius Arwandi	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	Di SDI Egon SDI Ahuwair lemari arsip & meja guru dalam ruang kelas sudah tidak layak pake.	Habiligut, RT. 21 / RW. 10 Wairhang, RT. 09 / RW. 04, Kab. Sikka	Waigete	Nangatobong	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai usulan Prioritas Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2027 Kecamatan Waigete	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	paket	-	Pengadaan Mebel Sekolah
375	Antonius Arwandi	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Banyak anjing yang perlu dilakukan vaksinasi rabies	Desa nangatobong , Kab. Sikka	Waigete	Nangatobong	DINAS PERTANIAN	Sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai usulan Prioritas Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2027 Kecamatan Waigete	Sesuai program prioritas tahun anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	Paket	-	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
376	Robert Eduard Hanas, S.E.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	Terdapat ruang kelas dalam keadaan rusak sebanyak 2 ruang	SDI Riidueng, RT/RW 003/001 Dusun Riidueng , Kab. Sikka	Waiblama	Watu Moning	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Waiblama sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Waiblama	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	ruang kelas	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
377	Robert Eduard Hanas, S.E.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (SD)	Belum tersediaanya Gedung/Ruangan Perpustakaan bagi siswa dan guru sebanyak 1 Unit	SD Riidueng, RT/RW 003/001 Dusun Riidueng, Kab. Sikka	Waiblama	Watu Moning	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Waiblama sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Waiblama	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
378	Marius Maryanto, SE	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Posisi Pondasi gedung sekolah SDN Natakoli tergantung karena tanahnya terkikis air hujan. Kondisi ini dapat mengganggu proses KBM disekolah. Pondasi sekolah yang menggantung dengan panjang 100 meter dan tinggi 1,5 meter.	Dusun Natakoli, Desa Natakoli, Kecamatan Mapitara, Kab. Sikka	Mapitara	Natakoli	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	100	meter	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
379	Hermanus Pajo Tena	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (SD)	Belum adanya Perpustakaan di SDK Watutena Talibura(1 unit)	RT 010/ RW 004 , Kab. Sikka	Talibura	Udek Du'en	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
380	Hermanus Pajo Tena	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (SD)	Belum adanya Perpustakaan di SDN Natarmude Talibura (1 Unit)	RT 001/ RW 001, Kab. Sikka	Talibura	Udek Du'en	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
381	Hermanus Pajo Tena	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Dasar	Belum adanya Rumah Dinas Guru di SDK Watutena Talibura (5 unit)	RT 010/ RW 004, Kab. Sikka	Talibura	Udek Du'en	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	5	unit	-	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
382	Martin Andreas Weling, SE	Pembangunan Ruang Kelas Baru (SMP)	Sampai dengan saat ini kegiatan KBM masih menggunakan ruangan perpustakaan, dimana masih ada kekurangan 2 ruang kelas	SMPN Pruda, RT 001/RW 001, Dusun Pruda, Kab. Sikka	Waiblama	Pruda	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Waiblama sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Waiblama	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	ruang kelas	-	Pembangunan Ruang Kelas Baru
383	Martin Andreas Weling, SE	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	Bangunan Ruang Kelas SDN Pauklor sampai dengan saat ini sangat memprihatinkan, sehingga perlu dilakukan Rehabilitasi Ruang Kelas sebanyak 2 Ruangan	SDN Pauklor, Rt 017/ RW 007, Dusun Pauklor, Kab. Sikka	Waiblama	Pruda	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Menjadi prioritas pendanaan melalui musrenbang Kecamatan Waiblama sesuai hasil kesepakatan para pemangku kepentingan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Waiblama	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	2	ruang kelas	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
384	Petrus Pade, S.Sos	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	Belum adanya Ruangan Perpustakaan dan fasilitasnya untuk SMP Negeri 47 Ojang (1 Paket)	RT 014/ RW 003, Kab. Sikka	Talibura	Ojang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	unit	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
385	Petrus Pade, S.Sos	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Belum Adanya Pagar Pengaman untuk SDK Ojang (1 Paket)	RT 014/ RW 003, Kab. Sikka	Talibura	Ojang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
386	Petrus Pade, S.Sos	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Terjadinya penurunan hasil produksi tanaman pangan padi di desa ojang (pupuk MPK untuk 17 kelompok tani)	Desa Ojang, Kab. Sikka	Talibura	Ojang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	17	paket	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
387	Karinus Kuin	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Sekolah SDN Baokrenget belum punya pagar, sehingga Keamanan dan Kenyamanan saat belajar mengajar terganggu. Maka perlu Pembangunan Pagar Pengaman di SDN Baokrenget dengan volume 150 meter	SDN Baokrenget, Rt.06/Rw.03, Dusun Baokrenget, Desa Egon Gahar, Kab. Sikka	Mapitara	Egon Gahar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	150	meter	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
388	Bernadinus Bulan Terang	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Banyak anak didik SD, SLTP, dan SLTA yang orang tuanya kurang mampu (Bantuan dana pendidikan bagi RTM Volume 10)	Desa Timu Tawa, Kab. Sikka	Talibura	Timutawa	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	10	Orang	-	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
389	Bernadinus Bulan Terang	Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	Masih kurangnya mebel sekolah di SDI Dungan Desa Timu Tawa (1 Paket)	Timu Tawa, Kab. Sikka	Talibura	Timutawa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	1	paket	-	Pengadaan Mebel Sekolah
390	Bernadinus Bulan Terang	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Dasar	Masih kurangnya rumah dinas kepala sekolah dan guru di SDI Dungan (3 unit)	Timu Tawa, Kab. Sikka	Talibura	Timutawa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Sesuai Pembangunan Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2027	Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027	Disetujui untuk Dilaksanakan Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	3	unit	-	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Kinerja ini menunjukkan sejauh mana program dan kegiatan yang dijalankan oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) mampu mendukung pencapaian sasaran, tujuan, dan visi pembangunan daerah. Dalam dokumen RPJMD Tahun 2025–2029, kinerja penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi alat utama untuk memantau perkembangan, menilai capaian, serta mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan di seluruh perangkat daerah.

6.1. Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sikka tahun 2027, yang terdiri dari seluruh indikator tujuan dan sasaran daerah dan perangkat daerah. Indikator kinerja daerah adalah Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian 2025	Target 2026	Target 2027
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**				
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	61,8	78,25	78,75
2	Indeks Risiko Bencana	Indeks	180,09	140,31	139,81
3	Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID)	Indeks	56,79	57,57	57,96
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	80,66	73,92	73,93
5	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,55	0,44	0,44
6	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100
7	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	3,24	4,0	4,5
8	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100
9	Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah	%	52,16	55,81	55,87
10	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100
11	Cakupan Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	Angka	98,81	99,14	99,16
12	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,37	72,24	73,37
2	Pendapatan Per Kapita	Rp	21.000.000	20.172.000	21.022.000
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,04	4,11	4,28
4	Rasio Gini	Indeks	0,234	0,2355	0,2349
5	Angka Kemiskinan	Angka	11,89	11,13	10,76
6	Pertumbuhan sektor pertanian	%	4,54	3,30	3,35
7	Usia Harapan Hidup (UHH)	Angka	74,64	74,72	74,96
8	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,26*	0,25	0,24

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian 2025	Target 2026	Target 2027
9	Pengeluaran Per Kapita	Rp Juta/ Orang/B ulan	9,219	9,694	9,924
10	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	89,87	90,04	90,10
11	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,87	89,99	90,04
12	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	%	13,09	4,20	4,40
13	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,64	74,72	74,96
14	Angka Kemisikinan	%	11,89	11,13	10,76
15	Pertumbuhan sektor akomodasi makan minum terhadap PDRB	%	0,61	5,40	5,50
16	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	-1,78	1,80	2,00
17	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	(%) Indeks	0,26*	0,25	0,24
18	Pengeluaran per Kapita	Angka	9,219	9,694	9,924
19	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,64	74,72	74,96
20	Pertumbuhan sektor perdagangan	%	10,42	9,60	9,80
21	Indeks Desa	Indeks		0,6555	0,6560
22	Indeks Kesejahteraan Petani	Indeks	37,87*	38,87	39,37
23	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	%		100	100
24	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	%	100	100	100
25	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	138	100	100
26	Pertumbuhan UMKM yang berdaya saing	Angka		3,25	3,50
27	Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang	%		2	3
28	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	%		32,09	37,43
29	Pertumbuhan Wirausaha	%		10	12
30	Persentase Koperasi Aktif	%		79,14	83,96
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
1	Pertumbuhan sektor akomodasi makan minum	%	5,21	5,40	5,50
2	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai		WTP	WTP
3	Pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	3,95	4,20	4,40
4	Pertumbuhan sektor perdagangan	%	10,42	9,60	9,80
5	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	-1,78	1,80	2,00
6	Indeks Inovasi Daerah	Angka	49,35	38,73	40,73
7	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	%	3,95	4,20	4,40
8	Pertumbuhan Sektor Primer	%	3,25*	3,30	3,35
9	Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makan Minum	%	10,13	5,4	5,5
10	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	Angka	43,75	37,65	38,07
11	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persenta se		9,82	10,43
12	Penetapan APBD Tepat Waktu	Opini	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
13	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,84	2,84	2,87
14	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	54,25	55,34	57,84

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian 2025	Target 2026	Target 2027
15	Penetapan Persentase Belanja APBD Bidang Pendidikan	%	33	20	20
16	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	49,77	50,87	53,77
17	Penetapan Persentase Belanja APBD Bidang Kesehatan	%	24,36	10	10
18	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	66,15	67,13	68,23
19	Penetapan Persentase Belanja APBD Bidang Infrastruktur	%	4,09	25	25
20	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	59	60,33	61,83
21	Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Daerah	Opini	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
22	Persentase Penyerapan Anggaran	%	93,72	100	100
23	Persentase Tindak lanjut Temuan BPK yang Ditindaklanjut	%	100	100	100
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks		B	B
2	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	2,49	2,70	2,80
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,13	2,60	2,70
4	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai		B	B
5	Indeks Kriminalitas (tindak kejahatan per 100.000 penduduk) (angka kriminalitas)	Indeks	79,83	86	82
6	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	68,41	72	76
7	Indeks Profesionalitas ASN		68,75	80,35	82,35
8	Indeks Kebijakan Publik	Indeks	2,63	3,25	3,70
9	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	74,12	50	60
10	Rata-Rata Kepuasan Pelanggan	%		92	93
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	16,17	17,04	17,61
12	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,39	10,38	10,98
13	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	100	100	100
14	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	98,46	96,50	96,50
15	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	92,31	89,14	89,35
16	Persentase Capaian Aksi HAM	%	55	50	52
17	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	100	100	100
18	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100
19	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Infrastruktur 2)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)
20	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	35,92	45	50
21	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	%	152,02	100	100
22	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	71,42	65	75
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang	%	92,07	96,17	96,20

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian 2025	Target 2026	Target 2027
	berpartisipasi dalam pendidikan (APMus)				
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APMus)	%	70,15	90,86	90,91
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	8	9,51	10,27
4	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	90,01	86,79	92,35
AB	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				
1	Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	Angka	319	421	421
2	Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	Angka	33	33	33
3	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	66,33	100	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	85,10	100	100
5	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	87,70	100	100
6	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	%	75,60	100	100
7	Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	%	98,20	100	100
8	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif	%	53,50	100	100
9	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut	%	83,50	100	100
10	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	%	48,80	100	100
11	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	%	51,20	100	100
12	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	%	90,60	100	100
13	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tubercolosis	%	158,50	100	100
14	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	%	107,17	100	100
15	Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	%	1,1	0,9	0,9
AC	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	%	57,29	57,40	57,89
2	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	65,36	67,44	69,53
3	Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik	%	99,26	99,33	99,37
4	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	51,31	51,52	51,77

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian 2025	Target 2026	Target 2027
5	Persentase Irigasi Kabupaten Kondisi Baik	%	49,4	49,20	49,25
6	Tingkat Kemantapan Jalan	%	54,17	54,57	55,14
AD	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	14	18	21
2	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%	0	0,0097	0,0099
3	Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Angka	19.509	19.387	18.926
4	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	%	24,85	23,64	23,01
5	Jumlah Rumah Keseluruhan	Angka	81.865	81.997	82.244
6	Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang Ditangani	Angka	14	18	21
7	Persentase Pelanggan Listrik	%	98,89	87,35	87,70
8	Jumlah Rumah Layak Huni	Unit	60.808	60.987	61.448
9	Persentase Permukiman yang Sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	61,9	18,3	36,7
10	Persentase Jumlah KK yang mendiami RLH	%	76,06	74,38	74,71
11	Jumlah Sambungan Rumah Air Minum	Angka	21.717	22.217	22.217
12	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	1,56	3,43	4,74
13	Persentase SR Air Minum	%	26,57	27,09	27,62
14	Persentase Penurunan RTLH MBR diluar Kawasan Permukiman Kumuh	%	100	80	60
15	Persentase Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	%	100	0,46	0,54
16	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Yang Ditangani	Ha	0	0,0097	0,0099
17	Jumlah Pelanggan Listrik	Angka	71.238	71.626	72.126
18	Persentase Luas Kawasan Kumuh di Bawah 10 HA yang ditangani	%	100	18,3	36,7
AE	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				
1	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	7,88	13,5	13
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	600	600	600
3	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	76	78
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	6.292	700	600
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	600	600	600
AF	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian 2025	Target 2026	Target 2027
1	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	%	12,18	1,38	1,88
2	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	%	9,93	0,24	0,32
3	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	%	3,85	4,36	4,49
4	Persentase korban bencana alam dan sosial dan/atau Non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100	100	100
AG	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				
1	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	%	3,59	0,77	0,79
2	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Luar Negeri	%	0,54	0,41	0,46
3	Persentase pemberi kerja yang menerapkan perlindungan hak pekerja dan dialog sosial di dalam negeri dan luar neger	%	3,99	4,21	4,46
4	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	6,44	28,20	28,40
AH	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				
1	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100
2	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100
AI	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				
1	Jumlah Penyaluran Cadangan Pangan pada Daerah Rentan Rawan Pangan	Ton	0	20	22
2	Jumlah Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung Lainnya untuk Penyimpanan Cadangan Pangan	Unit		1	1
3	Persentase pengawasan keamanan pangan	%	55,40	33,33	33,33
4	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergisi Seimbang	Angka	1	1	1
5	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang di Mutahirkan	Angka	1	1	1
6	Jumlah Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Angka	1	1	1
7	Persentase penanganan kerawanan pangan	%	59,59	2,58	2,58
AJ	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				
1	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi	%	37,33	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian 2025	Target 2026	Target 2027
2	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	1	3	3
AK	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				
1	Penetapan Hak MHA Terkait Dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota	SK	0	5	7
2	Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)	Indeks	78,13	67,63	67,64
4	Indeks Kualitas Udara	Indeks	84,97	93,74	93,75
5	Rasio Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi Terhadap Usaha yang Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Berada di Daerah	Orang	0	0	2
6	Indeks Kualitas Air	Indeks	77,50	62,49	62,50
7	Total Volume Sampah yang Dapat Ditangani	%	9.892,19	10.126,95	10.329,49
8	Data Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	72	13	14
9	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	Pengaduan	22	25	25
10	Jumlah Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Melanggar Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diiterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota	Usaha/Kegiatan	19	60	59
AL	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				
1	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama	%	11	1	1
2	Perekaman KTP elektronik	%	98,13	100	100
3	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	%	92,9	87,46	87,52
4	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	45,11	40,84	40,88
AM	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				
1	Jumlah Peningkatan Desa Yang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adatnya Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif Dan Pemberdayaan	Angka	33	36	54
2	Jumlah Desa Tertinggal Yang Memenuhi Kriteria Desa	Angka	26	30	25

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian 2025	Target 2026	Target 2027
	Berkembang Per Tahun Berdasarkan Indeks Desa Membangun Per Tahun				
3	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Angka	181	181	181
4	Jumlah Desa Berkembang Yang Memenuhi Kriteria Desa Mandiri Per Tahun Berdasarkan Indeks Desa Membangun Per Tahun	Angka	29	65	61
5	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Di Desa Yang Terfasilitasi Dalam Peningkatan Kapasitas Dan Diberdayakan	Angka	33	36	54
6	Jumlah Desa Yang Melakukan Kerjasama Antar Desa Tahun Berjalan Dikurangi Jumlah Desa Yang Melakukan Kerjasama Antar Desa Tahun Sebelumnya	Angka	15	1	1
AN	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				
1	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptove Prevalance Rate/mCPR)	Angka	39,29	50,22	55,33
2	Persentase Kebutuhan ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	39,45	26,38	27,22
3	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	Angka	2,19	2,02	1,94
AO	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				
1	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C	%	50	57,14	71,48
2	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	%	73,87	65,20	66,95
3	Penetapan Tarif Angkutan Antar Kota dalam Kabupaten Serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan Kelas Ekonomi	%		100	100
4	Terlaksananya Pelayanan Uji Berkala	%	48,28	44,00	45,00
5	Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	%	59,71	54,79	61,78
AP	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				
1	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	70,37	75,00	85,71
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	68,63	75,00	82,00
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	78,54	80,50	84,25
AQ	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian 2025	Target 2026	Target 2027
1	Jumlah Koperasi yang Meningkat Kualitas Berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset	Unit	130	70	264
2	Jumlah Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	Unit	40	25	35
AR	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				
1	Presentase Peningkatan Investasi	%	-56	5	6
2	Kegiatan pameran penanaman modal	Kegiatan	0	0	1
3	PERDA mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Angka	1	0	1
4	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab / Kota	Angka	38	85	90
5	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota	Data	4	4	4
6	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Laporan	0	1	1
7	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	Angka	1	1	0
8	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Kegiatan	38	85	90
9	Laporan realisasi penanaman modal	Laporan	1	1	1
10	Konsultasi perizinan penanaman modal	Angka	26	60	75
AS	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				
1	Persentase Perolehan Prestasi di bidang Olahraga	%	75	75	79,16
2	Rasio Wirausaha Pemuda	%	0,86	1,8	1,84
AT	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				
1	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100
AU	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				
1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	0,29	0,31	0,37
AV	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				
1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Angka	10	3	3
2	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Angka	1	1	1
3	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Angka	2	22	23

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian 2025	Target 2026	Target 2027
4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Angka	2	30	30
5	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, penayaan keberagaman)	Angka	8	2	2
6	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Angka	2	3	3
7	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	%	88,89	100	100
8	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Angka	0	1	1
9	Penyelenggaran kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Angka	0	2	2
10	Pembentukan tim ahli cagar budaya	Angka	0	0	0
11	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Angka	0	0	0
12	Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	Angka	1	1	1
13	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Angka	0	0	0
14	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Angka	0	0	0
AW	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				
1	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	1,48	54,71	57,23
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	58,43	68,16	70,21
AX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	49,41	100	100
2	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	%	50	100	100
AY	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				
1	Total Produksi Perikanan	Angka	28.998,55	32.523,36	35.271,40

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian 2025	Target 2026	Target 2027
2	Jumlah izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam I (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Angka		1	1
3	Jumlah Rumah Tangga Nelayan yang Melakukan Diversifikasi Usaha (RTP)	Angka	409	163	168
4	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan (Pendidikan dan Pelatihan/Penyuluhan dan Pendampingan/ Kemitraan Usaha dan Akses Iptek dan Informasi/ dan Penguatan Kelembagaan)	Angka		64	69
5	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional	%	0	0	0
6	Jumlah Benih Budidaya Air Tawar dan Air Payau yang diproduksi	Angka	0	0	0
AZ	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				
1	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Angka	1	1	1
2	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Angka	50	12	15
3	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%	74,48	32	35
4	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	Angka	0	1	1
5	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Angka	76	7	8
6	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Angka	12	14	18
7	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Angka	23	40	45
8	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Angka	45	50	55
9	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	Angka	194	150	160
10	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Angka	6.376	4.701	4.800
BA	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				
1	Penurunan jumlah kasus penyakit hewan	%	0,41	1	1
2	produktivitas pangan	Ton/Ha	4	3,80	3,85
BB	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				
1	Persentase Jumlah Penetapan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	%	0	0	0
2	Persentase Jumlah Izin yang Diterbitkan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI menengah yang Diterbitkan	%	5	15	15
3	Persentase Jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi Industri	%	90	0,10	0,10

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian 2025	Target 2026	Target 2027
	Kecil dan Menengah yang Diterbitkan				
4	Persentase Terselesaikannya Dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya perda	%		50	100
BC	**SEKRETARIAT DAERAH**				
1	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	20,25	83,04	83,80
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	42	40,20	43,15
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	20,90	100	100
BD	**SEKRETARIAT DPRD**				
1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD Yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100
2	Persentase Rancangan Peraturan Daerah Yang Difasilitasi Penyusunannya oleh Sekretariat DPRD	%	100	100	100
BE	**PERENCANAAN**				
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100	100	100
2	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100	100	100
BF	**KEUANGAN**				
1	Manajemen Aset	Opini	Ya	Ya	Ya
2	Deviasi Realisasi Belanja terhadap total belanja dalam APBD	%		100	100
3	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (Kab/Kota)	Opini		Positif	Positif
4	Rasio Anggaran Sisa terhadap total Belanja dalam APBD Tahun sebelumnya	%	100	100	100
5	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%	0,64	0,97	1,36
6	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	%	0,53	0,85	1,38
BG	**KEPEGAWAIAN**				
1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	4,37	6,15	6,82
BH	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				
1	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	37,8	23,78	24,45

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian 2025	Target 2026	Target 2027
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	43	29,00	29,67
BI	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				
1	Jumlah Inovasi Urusan Wajib Pelayanan Dasar Yang Dilaporkan	Angka	3	5	6
2	Jumlah Inovasi Daerah Yang Dilaporkan	Angka	15	12	14
BJ	**INSPEKTORAT DAERAH**				
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Berkembang	Terdefinisi	Terdefinisi
BK	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				
1	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	%	98,35	95,50	95,75
2	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	90	85,00	85,25
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	97,60	97,60	97,65
4	Persentase Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Potensi Konflik Sosial	%	85	85,50	85,75
5	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	100	85,00	87,00

BAB VII
PENUTUP

RKPD Tahun 2027 disusun sebagai acuan perencanaan dan berfungsi sangat penting karena menjadi dasar percepatan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah Tahun 2027. RKPD memuat gambaran umum daerah, evaluasi hasil kinerja daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Renja SKPD, Rancangan APBD dan acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sikka sangat bergantung pada strategi berbagi peran antara pemerintah, masyarakat dan swasta.

RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2025 serta kebijakan pusat dan provinsi Nusa Tenggara Timur serta sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran Pembangunan. Dengan demikian seluruh kebijakan, strategi dan program atau kegiatan pembangunan Kabupaten Sikka tahun 2027 akan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sikka tahun 2027. Selain itu, RKPD Tahun 2027 juga diselaraskan dengan RPJMN 2025-2029, RKP tahun 2027 dan mendukung pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs), Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta mewujudkan perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam bentuk rumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator yang terukur beserta sumber pembiayaannya.

7.1 Kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan RKPD dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah pelaksanaan RKPD sebagai berikut :

a. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka agar melaksanakan program-program RKPD dengan sebaik-baiknya mengarah pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD;
b. RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan perangkat daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. RKPD akan menjadi instrumen dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka.
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka dan masyarakat diharapkan dapat mengawal dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program program pembangunan yang tertuang dalam RKPD.

Keberhasilan pencapaian kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2027 memerlukan kerja bersama seluruh perangkat daerah dan dukungan para pemangku kepentingan di Kabupaten Sikka. Oleh karena itu dukungan, kesungguhan, rasa tanggung jawab, dan semangat kerja keras harus dimiliki oleh seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan di Kabupaten

Sikka. Semoga dengan pelaksanaan RKPD Kabupaten Sikka tahun 2027 yang masuk pada tahap "**Penguatan Kapasitas dan Sistem Lintas Sektor yang Efektif dan Berkelanjutan** dengan menitikberatkan pada pemantapan sistem pembangunan manusia lintas sektor, memperkuat sektor ekonomi berkelanjutan, integrasi pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup dengan teknologi, serta penguatan kolaborasi tata kelola pemerintahan. Sehingga dapat mewujudkan visi Kabupaten Sikka di tahun 2029 yaitu : **"Terwujudnya Masyarakat Sikka yang Produktif, Kreatif, Unggul dan Mandiri Menuju Maumere Baru".**

RKPD selain fokus dalam mencapai visi Kabupaten Sikka tahun 2025-2029, juga memiliki peran krusial dalam mengintegrasikan berbagai isu penting ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah. Secara nasional, terdapat 5 (lima) pengarusutamaan pembangunan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan RKPD di daerah, yaitu gender dan inklusi sosial, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), transfromasi digital, pembangunan rendah karbon, dan pembangunan berketahanan iklim. Dokumen RKPD Kabupaten Sikka digunakan juga untuk melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. Evaluasi yang dilakukan dapat dilaksanakan setiap Triwulan dan Tahunan. Evaluasi dimaksud untuk melihat perkembangan dan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan termasuk dengan target kinerja.

7.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian sangat penting dalam pelaksanaan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2027 untuk memastikan bahwa semua program berjalan sesuai dengan rencana dan selaras dengan tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Tanpa pengendalian yang efektif, RKPD berisiko tidak mencapai target, mengalami penyimpangan, atau bahkan mengalami kegagalan. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa pengendalian menjadi hal yang penting dilakukan dalam implementasi RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2027 :

1. Memastikan Seluruh Program Dilaksanakan Seluruh program yang tertuang dalam RKPD yang disertai dengan target kinerja dan kebutuhan pendanaan pembangunan telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah, termasuk dalam RAPBD tahunan.
2. Memastikan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pengendalian berfungsi sebagai mekanisme untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi kinerja secara berkala. Ini membantu pemerintah daerah mengidentifikasi hambatan atau masalah yang muncul di tengah jalan, sehingga dapat mengambil tindakan korektif secepat mungkin.
3. Optimalisasi penggunaan sumberdaya Memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan secara efisien dan efektif untuk kepentingan publik dalam pelaksanaan RKPD.
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Proses pengendalian yang transparan dan terukur akan membuat pemerintah daerah lebih akuntabel terhadap masyarakat. Laporan hasil pengendalian dapat diakses publik, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi dan menilai kinerja pemerintah dalam melaksanakan janji-janji politik yang tertuang dalam RKPD.
5. Menyesuaikan dengan Perubahan Lingkungan Lingkungan eksternal (sosial, ekonomi, politik) dapat berubah sewaktu-waktu. Pengendalian yang fleksibel memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan strategi dan program kerja agar tetap relevan dan efektif. Misalnya, jika terjadi krisis ekonomi, pengendalian dapat membantu mengidentifikasi program yang perlu diprioritaskan atau direstrukturisasi.
6. Mendorong Perbaikan Berkelanjutan Hasil dari proses pengendalian (evaluasi, audit, dan laporan) memberikan umpan balik yang berharga. Umpan balik ini dapat digunakan untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program di masa mendatang. Ini menciptakan siklus pembelajaran dan perbaikan yang berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Pelaksanaan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah proses penting untuk mengukur keberhasilan, mengidentifikasi kendala, dan memberikan masukan untuk perbaikan di masa mendatang. Evaluasi ini diatur oleh Peraturan

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Evaluasi dilakukan dengan tujuan :

1. Mengukur Pencapaian Sasaran, yaitu menilai sejauh mana target pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD telah tercapai.
2. Menilai Efektivitas dan Efisiensi, yaitu dapat meninjau efektivitas program dan penggunaan anggaran.
3. Mengidentifikasi Masalah, yaitu menemukan faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan program.
4. Meningkatkan Akuntabilitas, yaitu dalam rangka mewujudkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah daerah.
5. Menyediakan Masukan, yaitu dalam rangka memberikan rekomendasi untuk penyusunan perencanaan periode berikutnya.

Evaluasi membantu memastikan konsistensi antara RPJMD dengan rencana tahunan (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (APBD). Hal ini penting untuk mencegah adanya penyimpangan kebijakan dan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan selaras dengan tujuan jangka menengah. Pelaksanaan Evaluasi RKPD merupakan langkah krusial yang berfungsi sebagai cerminan keberhasilan dan kegagalan sebuah rencana pembangunan. Proses ini tidak hanya mengukur pencapaian, tetapi juga memberikan landasan untuk perbaikan di masa depan.

Dalam perjalanannya, RKPD selalu menghadapi ketidakpastian dan berbagai potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Untuk itu, manajemen risiko berperan sebagai "penjaga" yang memastikan rencana tersebut berjalan sesuai jalur. Untuk memastikan perencanaan yang tertuang dalam RKPD perlu dilakukan analisis manajemen risiko dengan mengidentifikasi potensi risiko baik pada lingkup internal maupun eksternal. Faktor risiko yang teridentifikasi sejak dini, pemerintah daerah dapat menyusun rencana yang lebih realistis dan memiliki strategi mitigasi yang kuat.

Penerapan manajemen risiko pada RKPD Kabupaten Sikka tahun 2027 diharapkan akan membantu dalam meningkatkan kemungkinan pencapaian target, mengoptimalkan alokasi sumber daya dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Melalui pengelolaan risiko secara proaktif, pemerintah daerah dapat mencegah atau mengurangi kendala yang berpotensi menghambat program dan kegiatan, seperti keterlambatan proyek, pembengkakan biaya, atau kegagalan program yang menghambat pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Hal ini secara langsung meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Sikka tahun 2027.